

Pengarang
Suryadi Radjab

DAMPAK PENGENDALIAN TEBBAKAU

TERHADAP HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA



Penulis Pengantar
Mulyana Wirakusumah

**DAMPAK PENGENDALIAN TEMBAKAU TERHADAP
HAK - HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

Penyunting:

Suryadi Radjab
Imas Didah Deliah
Unung Nuralamsyah

Penulis:

Suryadi Radjab

Desain Cover & Tata Letak:

Derry Y
Dede Sumitra

ISBN:

Cetakan Pertama, Mei 2013

Penerbit:

Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) dan
Center For Law and Order Studies (CLOS)

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
Daftar Singkatan	x
Ringkasan Eksekutif	xiii
Pengantar dan Ucapan Terima Kasih	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Pengendalian Tembakau	3
1.1.1. Dampak konsumsi tembakau terhadap kesehatan.....	4
1.1.2. Tekanan perdagangan produk tembakau.....	8
1.1.3. Kampanye anti tembakau.....	10
1.2. Resistensi atas Pengendalian Tembakau.....	12
1.2.1. Resistensi petani dan buruh-tani tembakau.....	14
a. Tata niaga dan dana bagi hasil.....	14
b. Menentang RUU dan RPP Tembakau.....	18
c. Menolak fatwa haram.....	23
d. Ancam boikot bayar pajak dan pemilu.....	27
1.2.2. Resistensi pengusaha industri rokok.....	29
1.2.3. Signifikansi tembakau dan pengolahannya	33
a. Sebaran perkebunan tembakau.....	34
b. Sebaran industri pengolahan tembakau.....	38
c. Serapan tenaga kerja.....	40
d. Besarnya cukai buat negara.....	42
BAB 2 RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI	47
2.1. Ruang Lingkup Kajian.....	51
2.1.1. Rumusan masalah.....	52
2.1.2. Tujuan.....	55
2.2. Metodologi.....	56
2.2.1. Pengumpulan data.....	57
2.2.2. Deskriptif-analitis.....	57
BAB 3 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU DAN CENGKEH	59
3.1. Kedudukan Tembakau.....	65
3.1.1. Bukan komoditas ilegal.....	67
3.1.2. Menguntungkan dan ekspor.....	68

a. Komoditas yang menguntungkan.....	68
b. Komoditas ekspor.....	72
c. Ekspor meningkat.....	75
3.2. Komoditas Cengkeh.....	77
3.2.1. Cengkeh untuk kretek.....	77
3.2.2. Lahan cengkeh.....	79
3.2.3. Produksi cengkeh.....	83
3.3. Sirkuit Produksi Lengkap dan Mandiri.....	86
3.3.1. Proses produksi yang lengkap.....	86
3.3.2. Pemupukan modal secara mandiri.....	90
3.3.3. Persaingan, kejatuhan dan bangkit lagi.....	91
3.4. Industri Padat Karya.....	93
3.4.1. Petani dan pekerja tembakau.....	96
3.4.2. Petani dan pekerja cengkeh.....	98
3.4.3. Serapan industri rokok atas tenaga kerja.....	100
3.5. Produksi, Pasar Domestik, dan Ekspor.....	105
3.5.1. Jumlah produksi rokok.....	106
3.5.2. Pangsa pasar domestik.....	110
3.5.3. Pasar ekspor rokok.....	115
3.5.4. Investor Asing Mengakuisisi.....	118
3.6. Kontribusi Cukai untuk Negara.....	121
3.6.1. Kecenderungan melonjak.....	122
3.6.2. Alokasi dana bagi hasil cukai.....	125
3.7. Kretek sebagai Warisan Budaya.....	128
3.7.1. Industri yang tangguh.....	129
3.7.2. Warisan budaya.....	134
BAB 4 KONTRIBUSI ATAS HAK-HAK EKOSOB	141
4.1. Kewajiban Pemerintah.....	145
4.1.1. Tersedianya sumber daya industri.....	147
4.1.2. Memenuhi dan melindungi hak.....	158
4.2. Kontribusi bagi Hak atas Pekerjaan.....	160
4.2.1. Kontribusi Untuk Pekerja.....	161
4.2.2. Sebaran Petani Tembakau.....	164
4.2.3. Sebaran Pekerja Rokok.....	169
4.3. Kontribusi bagi Hak atas Upah dan Tunjangan.....	175
4.4. Kontribusi bagi Hak atas Jaminan Sosial.....	181
4.5. Hak Budaya.....	184
BAB 5 DAMPAK PENGENDALIAN TEMBAKAU	191
5.1. Kerangka Pengendalian Tembakau.....	195
5.1.1. Serangan terhadap industri tembakau.....	196
5.1.2. Kebijakan pengendalian tembakau.....	202
5.2. Dampak Pengendalian Tembakau.....	209

5.2.1. Berebut pasar dunia.....	211
5.2.2. Industri rokok gulung tikar dan efek berantai.....	215
5.2.3. Kehilangan pekerjaan, penghasilan dan tunjangan.....	219
5.3. Dampak dari Hilir ke Hulu.....	222
5.3.1. Dampak ke hulu.....	225
5.3.2. Tanpa strategi pemenuhan hak.....	228
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	235
6.1. Kesimpulan.....	237
6.1.1. Kontribusi industri pengolahan tembakau dan cengkeh.....	238
6.1.2. Kampanye dan kebijakan antitembakau.....	240
6.2. Rekomendasi.....	244
Indeks Kata	246
Tim Penulis	251
Profil Penerbit	260

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Provinsi Penghasil Tembakau di Indonesia.....	35
Tabel 1.2 Pangsa Pasar Rokok 2012.....	38
Tabel 1.3 Provinsi Penghasil Rokok di Indonesia.....	39
Tabel 1.4 Target Penerimaan Cukai dan Batas Produk 2012.....	44
Tabel 2.1 Tantangan Industri Tembakau.....	54
Tabel 2.2 Aspek dalam Road Map IHT.....	58
Tabel 3.1 10 Besar Perusahaan Indonesia Versi Far Eastern Economic Review, 1999-2001.....	63
Tabel 3.2 10 Keluarga Terkaya di Indonesia versi Forbes 2012.....	63
Tabel 3.3 10 Perusahaan Terbesar Indonesia di Dunia.....	64
Tabel 3.4 Luas Lahan Produksi Tembakau 2007.....	66
Tabel 3.5 Produksi Tembakau Dunia 2007.....	72
Tabel 3.6 Harga Tembakau 2011.....	73
Tabel 3.7 Harga Ekspor Tembakau Besuki 2012.....	74
Tabel 3.8 Ekspor Tembakau Belum Diolah, 2002–2006.....	75
Tabel 3.9 Nilai Ekspor Tembakau 2010-2011.....	76
Tabel 3.10 Persentase Luas Lahan Cengkeh terhadap Arable Land 1990-2007.....	79
Tabel 3.11 Luas Lahan Cengkeh 2008-2012.....	80
Tabel 3.12 Luas Lahan Menurut Kepemilikan, 1990-2007.....	82
Tabel 3.13 Negeri Penghasil Cengkeh, 2002 dan 2007.....	83
Tabel 3.14 Produksi Cengkeh 2008-2012.....	83
Tabel 3.15 Produksi, Ekspor dan Impor Cengkeh 1990-2007.....	85
Tabel 3.16 Harga Rata-rata Cengkeh Kering 2005-2012.....	85
Tabel 3.17 Perkembangan Produksi SKT, SKM dan Kebutuhan Cengkeh 2009-2011.....	89
Tabel 3.18 Penduduk Kudus berdasarkan Etnis 1915 dan 1930.....	92
Tabel 3.19 Jumlah Industri Rokok Berdasarkan Skala Produksi, 2006.....	94
Tabel 3.20 Jumlah Petani Tembakau di 12 Provinsi 2007.....	97
Tabel 3.21 Jumlah Petani Cengkeh 2007.....	98
Tabel 3.22 Jumlah Petani/Buruh Tembakau dan Cengkeh 2011.....	100
Tabel 3.23 Perkembangan Jumlah Pekerja Industri Rokok 2006-2010.....	101
Tabel 3.24 Distribusi Pekerja Produk Tembakau Menurut Jenis Kelamin, 1993-2006.....	102
Tabel 3.25 Kinerja Industri Rokok Tahun 2006-2010.....	103
Tabel 3.26 Perkembangan Nilai Produksi Rokok 2006-2010.....	107
Tabel 3.27 Proyeksi Produksi 2012.....	108
Tabel 3.28 Ekspor Rokok selain Kretek Menurut Kuantitas dan Nilainya 2007.....	116
Tabel 3.29 Perkembangan Ekspor Rokok Tahun 2008-2011.....	117
Tabel 3.30 Ekspor Rokok Kudus 2007-2012.....	118
Tabel 3.31 Perusahaan Rokok Indonesia Diakuisisi Asing.....	120
Tabel 3.32 Pajak Tembakau 1938 dan 1959.....	121
Tabel 3.33 Jumlah Perusahaan, Produksi dan Kontribusi Cukai 2007-2011.....	123
Tabel 3.34 Proyeksi Penerimaan Cukai 2012.....	124
Tabel 3.35 Alokasi Sementara DBH CHT 2010.....	127
Tabel 3.36 Jumlah Perusahaan di Kudus Tahun 1924 dan 1928.....	130

Tabel 4.2 Hak-hak dalam Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	146
Tabel 4.3 Hasil Panen Padi dan Tanaman Kedua di Rembang 1841-1845.....	147
Tabel 4.4 Peringkat IPM Kabupaten dan Kota di Karesidenan Kedu, 2005-2007.....	148
Tabel 4.5 Enam Kabupaten/Kota Terkaya di Indonesia.....	155
Tabel 4.6 PDRB dan Pajak Tak Langsung (Netto) Kabupaten Kudus 2005-2009	156
Tabel 4.7 Jumlah Pekerja Industri Pengolahan Tembakau dan Cengkeh.....	161
Tabel 4.8 Jumlah Pekerja-Petani Industri Pengolahan Tembakau 2006.....	163
Tabel 4.9 Jumlah Lahan, Produksi dan Petani di Aceh 2010.....	165
Tabel 4.10 Jumlah Lahan, Produksi dan Petani di Jawa Barat 2010.....	166
Tabel 4.11 Jumlah Lahan, Produksi dan Petani di Jawa Tengah 2010.....	167
Tabel 4.12 Jumlah Lahan, Produksi dan Petani di Jawa Timur 2010.....	168
Tabel 4.13 Jumlah Lahan, Produksi dan Petani di Nusa Tenggara Barat 2010.....	169
Tabel 4.14 Jumlah Pekerja Industri Rokok di 6 Kabupaten/Kota, Jawa Tengah.....	173
Tabel 4.15 Jumlah Pekerja Industri Rokok Besar dan Sedang di Kabupaten Kudus 1996- 2009.....	173
Tabel 4.16 Jumlah Unit dan Pekerja PT Djarum Tahun 2007.....	174
Tabel 4.17 Daftar Penetapan UMK di Jawa Timur 2011-2013.....	176
Tabel 4.18 Sistem Pengupahan dan Uraian Kerja PT Djarum.....	178
Tabel 5.1 10 Negara Penghasil Tembakau yang Menandatangani dan Meratifikasi FCTC...	194
Tabel 5.2 Beberapa Pokok dalam Pengendalian Tembakau.....	195
Tabel 5.3 Pengendalian Tembakau dalam PP No. 109/2012.....	206
Tabel 5.4 Perbandingan Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Migas 2013.....	208

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Pembentukan Pekerja Industri Pengolahan Tembakau.....	41
Gambar 3.1 Persentase Luas Lahan Tembakau, 2007.....	66
Gambar 3.2 Persentase Produksi Tembakau, 2007.....	72
Gambar 3.3 Persentase Luas Lahan Cengkeh menurut Pulau, 2007.....	82
Gambar 3.4 Sirkuit Produksi Industri Kretek di Awal Pertumbuhan.....	88
Gambar 3.5 Pangsa Pasar Industri Rokok 2001.....	112
Gambar 3.6 Pangsa Pasar Industri Rokok, 2008 dan 2009.....	112
Gambar 4.1 Jumlah yang Bekerja dalam Industri Pengolahan Tembakau dan Cengkeh.....	162
Gambar 5.1 Pangsa Pasar Rokok Dunia.....	214

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Produksi Tembakau 2007.....	71
Grafik 3.2 Nilai Ekspor Tembakau 1992-2007.....	74
Grafik 3.3 Jumlah Perusahaan Baru, Pembekuan dan Pencabutan Izin Usaha, 2004-2008...	96
Grafik 3.4 Jumlah Petani Tembakau 1996-2007.....	96
Grafik 3.5 Tren Jumlah Petani Cengkeh Indonesia, 2004-2008.....	99
Grafik 3.6 Pekerja Industri Pengolahan Tembakau, 1970-2006.....	101
Grafik 3.7 Jumlah Perusahaan 2007-2011.....	106
Grafik 3.8 Jumlah Produksi Rokok 2007-2011.....	107
Grafik 3.9 Pasar Rokok Terbesar di Dunia 2010	109
Grafik 3.10 Komposisi Penjualan Philip Morris Berdasarkan Geografis.....	110
Grafik 3.11 Pangsa Pasar Industri Rokok Indonesia 2011.....	113
Grafik 3.12 Penerimaan Cukai 2000-2008.....	122
Grafik 4.1 Penerimaan Cukai Rokok 2000-2012.....	152
Grafik 4.2 Kontribusi Sub-Sub Sektor Pada Industri Pengolahan di Jawa Timur 2008-2010.....	154
Grafik 4.3 Sektor Fokus yang Menjadi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2009-2010	155
Grafik 4.4 Jumlah Petani Tembakau 1996-2001.....	164
Grafik 4.5 Jumlah Pekerja Industri Rokok 1996-2002.....	169
Grafik 4.6 Jumlah Tenaga Kerja Industri Rokok Besar dan Sedang di Indonesia (2006-2010).....	170
Grafik 4.7 Jumlah Pekerja Industri Rokok di Jawa Timur 1999.....	171
Grafik 4.8 Jumlah Pekerja Industri Rokok di Jawa Tengah 1999.....	172
Grafik 5.1 Penerimaan Cukai Rokok Tahun 1996-2013.....	209

DAFTAR SINGKATAN

AMTI	: Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APCI	: Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia
Apindo	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
APRS	: Asosiasi Perusahaan Rokok Sidoarjo
APTI	: Asosiasi Petani Tembakau Indonesia
APTJ	: Asosiasi Petani Tembakau “Kasturi” Jember
AS	: Amerika Serikat
ASBEMPB	: Aliansi Serikat Buruh dan Elemen Masyarakat Peduli Buruh
Asperki	: Asosiasi Perusahaan Rokok Kecil Indonesia
Bappeda	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Bapenas	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BAT	: British American Tobacco
BEP	: Break Event Point (titik impas)
BICT	: Belawan International Container Terminal
BPPC	: Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CR	: Concentration Ratio (rasio konsentrasi)
CSR	: Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan)
DBH-CHT	: Dana Bagi Hasil - Cukai Hasil Tembakau
Depkes	: Departemen Kesehatan (sekarang Kementerian Kesehatan)
Disperindag	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
FAO	: Food and Agriculture Organization (badan PBB bidang pangan dan pertanian)
FCTC	: Framework Convention on Tobacco Control
FKPJ	: Forum Komunikasi Petani Jember
FMPT	: Forum Masyarakat Peduli Tembakau
Formasi	: Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia
FPRK	: Forum Pekerja Rokok Kudus
Gapero	: Gabungan Pengusaha Rokok
Gaperoma	: Gabungan Pengusaha Rokok Malang
Gappri	: Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia
Gaprindo	: Gabungan Pengusaha Rokok Putih
GCSF	: Growth Colony Stimulating Factor
GPEI	: Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
HDI	: Human Development Index
HKTI	: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
HMSP	: Hanjaya Mandala Sampoerna Perseroan
IAKMI	: Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
ICESCR	: International Convention on Economic, Social and Cultural Rights
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
IGGI	: Inter-Governmental Group on Indonesia

IHT	: Industri Hasil Tembakau
ILO	: International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional)
IPB	: Institut Pertanian Bogor
ITGA	: International Tobacco Growers Association
Jamsostek	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JPTI	: Jaringan Pengendalian Tembakau Indonesia
KHL	: Kebutuhan Hidup Layak
KNPK	: Koalisi Nasional Penyelamat Kretek
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas PT	: Komisi Nasional Pengendalian Tembakau
KPPBC	: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
KSPI	: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
KTM	: Karya Tani Manunggal
KTR	: Kawasan Tanpa Rokok
KTC	: Kisaran Tobacco Company
LD-UI	: Lembaga Demografi Universitas Indonesia
Lotim	: Lombok Timur
LPPNU	: Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama
MATA	: Koalisi Masyarakat Anti World Tobacco Asia Conference
MPS	: Mitra Produksi Sigaret
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NHM	: Nederlandsche Handel Maatschappij
NO	: Na Oogst (tembakau musim hujan)
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NU	: Nahdlatul Ulama
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Paperki	: Paguyuban Pengusaha Rokok Kecil Indonesia
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDB	: Produk Domestik Bruto
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja (pemecatan)
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PPh	: Pajak Penghasilan
PPPI	: Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia
PPn	: Pajak Pertambahan Nilai
PPRK	: Persatuan Pengusaha Rokok Kudus
PTM	: Penyakit Tidak Menular
Puskindo	: Pusat Studi Kretek Indonesia
RI	: Republik Indonesia
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
Sarbumusi	: Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
SHT	: Surabaya Heritage Track
SKM	: Sigaret Kretek Mesin
SKT	: Sigaret Kretek Tangan
SPM	: Sigaret Putih Mesin
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan

SP RTMM	: Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
STN	: Serikat Tani Nasional
Sumut	: Sumatera Utara
TCSC	: Tobacco Control Support Centre
THR	: Tunjangan Hari Raya
TIS	: Tembakau Iris Halus
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UMK	: Upah Minimum Kabupaten
UMSP	: Upah Minimum Sektoral Provinsi
UMP	: Upah Minimum Provinsi
VO	: Voor Oogst (tembakau musim kemarau)
VOC	: Verenigde Oostindische Compagnie
WHO	: World Health Organization (badan PBB bidang kesehatan)
WTA	: Konferensi World Tobacco Asia
WTO	: World Trade Organization
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia adalah negeri penghasil tembakau dan penghasil cengkeh sekaligus. Dari pengolahan dan racikan tembakau dan cengkeh inilah yang melahirkan ‘rokok cengkeh’, lebih dikenal dengan sebutan *kretek*. Identitas ini melekat pada Kudus sebagai “kota kretek” dan salah seorang pembentuk industri ini, Haji Nitisemito, dikenang sebagai “raja kretek”. Identitas ini sekaligus menandakan pentingnya kedudukan industri pengolahan tembakau dan cengkeh dalam ekonomi di Indonesia, dari sebelum terbentuknya Republik Indonesia sampai sekarang. Identitas ini pula yang melekatkan *kretek* dengan Indonesia, sebagaimana halnya cerutu dengan Kuba, atau sepakbola dengan Inggris atau Brazil. Karena, *kretek* tidak dibuat di AS atau Eropa.

Industri rokok *kretek* mengalami perjalanan yang panjang, lebih 120 tahun. Setelah melewati berbagai kesulitan, bahkan nyaris hancur berkeping-keping dalam periode singkat gelombang pasang fasisme-militerisme Jepang, industri *kretek* mampu bangkit kembali dan selama dua dekade terakhir mengecap masa keemasannya. Namun, lagi-lagi, kini industri *kretek* dihadapkan tantangan global dalam bentuk hambatan-hambatan perdagangan – dengan menampakkan sosok dalam bentuk regim kesehatan dunia – bahkan berikade-berikade perdagangan yang dibentuk di negerinya sendiri.

Secara spesifik, kontrol pemerintah terhadap industri rokok *kretek* itu dikaitkan dengan dampaknya pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu hak atas pekerjaan, hak atas upah dan tunjangan, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan. Tujuannya adalah menunjukkan semakin terdesak ke belakang aspek tenaga kerja di saat negara memetik setoran pajak dan tarif cukai hasil tembakau yang terus meningkat. Tambahan lagi, pemerintah mengeluarkan PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Dengan menggunakan pendekatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka dapat diperhatikan gerak kemunduran komitmen atau kewajiban pemerintah untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) dan melindungi (*obligation to protect*) hak-hak itu. Pendekatan ini dilengkapi dengan metode deskriptif-analitis, sehingga dapat memberikan gambaran umum dan spesifik bagaimana hak-hak yang dimaksud sedang berada dalam desakan lebih ke belakang di satu sisi, sementara di sisi lain – dengan mengibarkan pentingnya kesehatan namun disusupi hambatan tarif (*tariff barrier*) dan hambatan non tarif (*non-tariff barrier*) – industri *kretek* terutama yang kecil-kecil dihantam kebangkrutan.

A. Ringkasan

1. Industri rokok *kretek* adalah industri yang khas Indonesia, karena mengandung salah satu rempah yang pernah mengundang VOC masuk dan memonopoli perdagangannya di Nusantara sejak awal abad ke-17, yakni serbuk cengkeh. Cikal bakal *kretek* dimulai pada 1880 di Kudus dan mengalami pertumbuhan penting pada permulaan abad ke-20 yang sudah menyebar di beberapa kota. Industrialisasi *kretek* dicirikan oleh sirkuit produksi (*circuit of production*) yang lengkap secara internal. Sebagai produk, *kretek* yang berada di hilir mempunyai kaitan dengan hulu, yaitu perkebunan dan pengolahan tembakau dan

cengkeh. Tidak seperti kebanyakan produk pertanian lainnya lebih sebagai komoditas untuk ekspor di tangan para pengusaha Eropa di masa kolonial Hindia Belanda. Dengan kelengkapan ini *kretek* tidak bergantung pada bahan baku impor. Selain itu, karena lebih mengandalkan pasar domestik, *kretek* juga tahan banting terhadap guncangan krisis ekonomi dunia.

2. Industrialisasi *kretek* berlangsung secara mandiri. Akumulasinya dimulai dari modal kecil-kecilan, mengumpulkan laba, dan kemudian sebagian ditanamkan kembali, sehingga mereka tumbuh sebagai industriawan baru. Mereka tidak disokong oleh kebijakan pemerintah Hindia Belanda, namun juga tidak dibinasakan karena dapat memanen pajak dan cukai yang cukup besar. Industri *kretek* nyaris hancur ketika regim fasisme Jepang menduduki Indonesia, karena banyak perkebunan tembakau dan cengkeh kehilangan produksi demi produksi bahan pangan balatentara Jepang. Sejak usai perang mempertahankan RI, secara perlahan tapi pasti, industri *kretek* mampu bangkit kembali sampai meraih kejayaannya dalam dua dekade terakhir tanpa banyak bergantung pada fasilitas dan kebijakan pemerintah.
3. Industrialisasi *kretek* sudah memberikan banyak kontribusi tidak hanya bagi penerimaan negara dari pajak dan cukai, namun juga kontribusi bagi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Tahun 2013, pemerintah mematok target penerimaan cukai sebesar Rp 88,2 triliun. Sedangkan kontribusi industri ini dapat memenuhi hak untuk sekitar 600.000 pekerja. Masih ditambah lagi dengan para pekerja di bidang tembakau dan cengkeh. Kontribusi lainnya adalah berbentuk tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) dengan menggunakan bendera yayasan (*foundation*) untuk mengalokasikan dana untuk beasiswa, pelatihan guru, serta acara pendidikan lainnya. Mereka juga mensponsori banyak pagelaran musik dan olahraga. Sejumlah pebulutangkis telah memahatkan prestasi gemilang di cabangnya. Dalam arena kebudayaan lainnya, mereka mewarisi museum *kretek* di Kudus dan Surabaya.
4. Formasi industri *kretek* berciri oligopoli di mana terdapat delapan perusahaan besar dengan konsentrasi tinggi yang menguasai 95 persen pangsa pasar (*market share*). Mereka dikerumuni ratusan perusahaan menengah dan ribuan usaha kecil yang juga terkonsentrasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan formasi yang berciri oligopoli ini, maka kedudukan mereka sulit ditembus oleh pemain asing bermodal besar untuk memproduksi *kretek* yang sama sekali baru. Namun, celah terbuka untuk menyainginya adalah dengan melakukan akuisisi lewat pasar modal sebagaimana yang dilakukan Philip Morris International Inc (PMI) dan British American Tobacco (BAT), dan menguasai saham mayoritas yang ditempuh Korea Tobacco & Ginseng (KT & G) Corporation sebanyak 60 persen. Akuisisi dan penguasaan saham mayoritas ini berlangsung setelah diadopsinya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) ke-56 pada Mei 2003.
5. Gencarnya kampanye antitembakau dan meningkatnya hambatan perdagangan tembakau dan produk tembakau telah mendorong pemerintah mengesahkan PP No. 109/2012 yang sebagian kandungannya bersumber dari FCTC. Semua ini menimbulkan kekhawatiran tidak hanya perusahaan-perusahaan industri *kretek*, namun juga petani tembakau. Pada

umumnya mereka tidak setuju dengan PP itu dengan melakukan berbagai bentuk protes kepada pemerintah. Sebelumnya PP ini diberlakukan – dengan terus menaikkan tarif cukai setiap tahun dan perizinan produksi – sudah banyak yang gulung tikar. Selain itu, impor tembakau dan rokok putih juga mengalami peningkatan. Bisa dibayangkan bila PP ini – tidak sesuai judulnya karena lebih mengatur perdagangan dan perubahan kemasan produk – diberlakukan mulai Juni 2014 mendatang.

6. Industri rokok *kretek* yang mengalami pukulan pasti berdampak ke hulu, yaitu perkebunan dan produksi maupun perdagangan tembakau dan cengkeh. Sejumlah petani cengkeh melantarkan lahan perkebunannya, sehingga banyak pohonnya mengalami kerusakan dan terancam mati, sehingga pasokan cengkeh berkurang namun mendongkrak harganya. Hal ini pun berdampak ke hilir, yakni meningkatnya biaya produksi *kretek*. Sebaliknya, ketika pemerintah melonggarkan impor tembakau dan rokok putih yang berdampak pada membesarnya volume pasokan tembakau, berdampak pada anjloknya harga tembakau. Para pemilik industri *kretek* dan petani tembakau mengalami kemerosotan penghasilan. Bahkan sebagian industri *kretek* menutup usahanya.
7. Kemerosotan jumlah pabrik maupun berkurangnya pendapatan rokok *kretek*, berdampak terhadap buruh. Kemenakertrans mengkhawatirkan potensi PHK sebanyak 500.000 buruh di berbagai perusahaan pabrik *kretek*. Beberapa temuan, sebagian buruh sudah “dirumahkan”, selain PHK sebagai tuntutan pabrik yang kesulitan menambah biaya produksi dan banyak pabrik lainnya yang tutup. Dampak ke hulu adalah buruh perkebunan dan pengolahan tembakau dan cengkeh. Kehilangan hak atas pekerjaan berantai pula dengan kehilangan upah dan tunjangan. Padahal, dalam industri pengolahan tembakau dan cengkeh – dari hulu ke hilir – seluruhnya bekerja sekitar 6 juta orang. Angka ini masih lebih banyak dengan program pemerintah yang ambisius untuk menciptakan lapangan kerja bagi 4.731.770 orang sampai tahun 2014 dengan nilai investasi Rp 2.225 triliun.
8. Pemberlakuan PP No. 109/2012 itu tidak hanya bakal menambah biaya produksi, namun juga tekanan perdagangan yang semakin meningkat. Sejumlah perusahaan iklan dan berbagai media bakal kehilangan pendapatan sebesar Rp 11,9 triliun. Pemerintah daerah ikut terkena dampak berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari reklame produk tembakau. Demikian pula para penyelenggara (*event organizer*) acara-acara seminar, pelatihan, *outbond*, musik dan berbagai cabang olahraga. Mereka akan menghadapi transisi dari sponsorship perusahaan rokok ke perusahaan non-rokok.
9. Dalam menghadapi kemungkinan risiko kehilangan pekerjaan atas banyak orang, terutama buruh-buruh yang bekerja di pabrik rokok, pemerintah – lewat Kemenakertrans – mengaku belum punya strategi mengatasinya. Sedangkan beberapa penggalan rencana pemerintah dalam melakukan konversi lahan dari tanaman tembakau ke tanaman pangan atau tanaman lainnya. Bagi petani, persoalan ini disebabkan belum ditemukan tanaman konversi tembakau yang setidaknya menghasilkan keuntungan yang sama dengan tembakau, terutama di lahan-lahan yang hanya mungkin tanaman tembakau tumbuh. Sejumlah lahan tembakau yang telah diujicobakan dan diganti dengan tanaman lain di beberapa daerah di Madura, berakhir dengan kenyataan: selalu gagal.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu mencabut PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini bukan saja bertentangan dengan Pasal 116 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, melainkan juga tidak sesuai dengan judulnya yang mengatur kaitan produk tembakau dengan zat adiktif. Karena, PP ini – dengan mencabut PP No. 19/2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan – justru mengatur hal-hal yang berkaitan dengan produk dan diversifikasi, kemasan bungkusnya, pembatasan dan pengekangan perdagangan, serta promosi, iklan dan sponsorship. Memang tidak melarang seluruhnya, namun – ditambah lagi dengan kampanye antitembakau – produk tembakau ini lebih mirip sebagai produk “semi-illegal”. Inkonsistensi dengan judul PP ini sekaligus menampakkan perilaku pemerintah sebagai bentuk tipu muslihat. Bila pemerintah tetap mempertahankan judulnya, sebaiknya isi pasal-pasalnya harus segera direvisi supaya lebih sesuai.
2. Pemerintah sebaiknya mengambil posisi mendukung industri pengolahan tembakau dan cengkeh dalam berbagai bentuk seperti PP, peraturan menteri, sampai UU bukan saja karena sudah menunjukkan ketangguhannya mampu bertahan selama 120 tahun dan mencapai masa keemasannya selama dua dekade, namun juga kontribusinya untuk penerimaan negara dari pajak dan cukai serta devisa, bahkan kontribusi bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas upah dan tunjangan, hak atas jaminan sosial, serta hak atas partisipasi dalam kehidupan budaya. Karena, sedikitnya 6 juta orang menggantungkan hidup mereka dalam industri pengolahan tembakau dan cengkeh. Untuk melindunginya dari serbuan perdagangan impor, pemerintah juga perlu menerapkan hambatan tarif dan hambatan non tarif.
3. Dalam kaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial itu pula, maka pemerintah perlu mendorong dan bahkan menekan industri pengolahan tembakau dan cengkeh lebih berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada buruh-buruh yang mereka pekerjakan seperti kepastian kerja, upah yang layak, jaminan sosial dan tunjangan lainnya. Pemerintah seharusnya menghapus bentuk kerjasama sub-kontrak dengan label MPS dalam industri rokok yang merupakan bisnis utama (*core business*) supaya mengakhiri persoalan status buruh yang dipekerjakan. Status buruh borongan perlu diiringi dengan peningkatan menjadi buruh tetap dalam kaitannya dengan masa kerja. Langkah-langkah ini penting dilakukan supaya para pengusaha rokok terutama kretek tidak dituding sebagai kelompok yang rakus dan tamak: mengeruk untung sebanyak mungkin dalam tempo sesingkat mungkin dengan mengandalkan upah yang rendah. Karena tidak terbantahkan mengingat banyak publikasi dan pemberitaan yang mengungkapkan tentang begitu besarnya laba bersih yang dipetik, belanja iklan yang dialokasikan, serta menyokong berbagai acara musik dan olahraga.
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu menimbang lebih matang ketimbang sekadar menjadi corong regim kesehatan dunia – karena WHO FCTC juga lebih banyak mengandung pengaturan perdagangan daripada kesehatan – supaya pertentangan antara hak atas kesehatan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya dapat dihasilkan titik temu. Karena, paparan asap rokok – bukan paparan asap knalpot – tingkat bahayanya tidaklah seperti yang dikesankan oleh pihak-pihak yang menyuarakan antitembakau.

Karena, banyak juga pengalaman hidup dan riset tentang produk tembakau yang menunjukkan hasil dan fakta yang bertentangan dengan yang disuarakan itu. Kemenkes perlu mengarahkan dan menguatkan standarisasi produk tembakau supaya dicapai kemajuan yang lebih diharapkan.

5. Hasil kajian ini perlu juga menyampaikan kepada semua pihak bahwa 120 tahun bertahan dan mampu menggapai masa keemasannya dalam dua dekade terakhir, bukanlah waktu yang pendek. Apa pun kandungan bahaya yang dikampanyekan, industri pengolahan tembakau dan cengkeh merupakan pelajaran yang sangat berharga – industrialisasi yang hampir sepenuhnya bersumber dari tangan-tangan dan bahan baku lokal – yang tidak atau sangat kurang bergantung kepada impor pada saat para pengusaha Eropa di Hindia Belanda tidak berkepentingan melakukan industrialisasi. Industri ini sudah melewati tahap-tahap krisis ekonomi dunia, kerusuhan sosial, perang dunia, bahkan nyaris hancur berantakan di bawah gelombang fasisme-militerisme Jepang, namun dengan tangguhnyanya mampu bertahan sebelum mereguk masa keemasannya. Khususnya bagi pemerintah, kiranya titisan sejarah panjang dengan jatuh-bangunnya pantas diapresiasi sebagai salah satu kekhasan produk Indonesia.

PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Buku ini adalah kajian tentang tantangan berat yang dihadapi industri rokok *kretek* yang bisa berdampak pada hilangnya sejumlah hak ekonomi, sosial dan budaya di beberapa lapisan masyarakat Indonesia disebabkan atas keberhasilan kampanye global antitembakau dengan diadopsinya World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) ke-56 pada Mei 2003. Keberhasilan ini buah dari persaingan panjang antara industri farmasi dengan industri tembakau di Amerika Serikat (AS) dalam apa yang disebut sebagai “perang nikotin”.

Di bawah bimbingan regim kesehatan dunia, kelompok-kelompok antitembakau – tanpa disadari secara inheren juga antikretek – pemerintah RI didesak untuk [1] meratifikasi atau mengesahkan WHO FCTC menjadi Undang-Undang (UU), [2] merancang dan membahas RUU Pengendalian Tembakau, serta mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau. Sampai akhir 2012, pemerintah dan DPR belum juga meratifikasi FCTC dan RUU Tembakau. Namun, mereka berhasil mengesahkan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, yang juga memerintahkan dibentuknya PP, dan akhirnya pemerintah mengesahkan PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Persoalannya, judul PP itu berbeda dengan kandungan pasal-pasal nya, sehingga dapat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 116 UU Kesehatan yang mengamanatkannya, atau bisa pula dipandang sebagai bentuk tipu muslihat. Karena kandungan pasal dalam PP itu lebih berkaitan dengan produk dan perdagangan produk tembakau, secara spesifik adalah produk industri rokok *kretek*, yaitu harga dan tarif cukai rokok, kemasan dan label produk, iklan, promosi dan sponsorship, serta mengontrol tujuan komersial dan kepentingan lain industri tembakau. Di satu sisi, sejumlah kandungan PP ini bersumber dari FCTC. Sama saja, keduanya bukan mengarahkan pada standarisasi produk untuk pengamanan bahan dan kandungan zat adiktif. Namun di sisi lain, kran impor tembakau dan rokok putih meningkat. Maka, dengan “senjata” ini memperkuat dugaan bahwa pemerintah sedang mendesak ke belakang industri rokok *kretek*.

Lebih dari itu – untuk mengingatkan kembali – industrialisasi pengolahan tembakau dan cengkeh sudah berlangsung lebih 120 tahun sebagai karya buah tangan para perintis dan pemupuknya maupun pengolahannya yang bersumber dari bahan baku yang hampir sepenuhnya bersumber dari lokal yang mengkarakterisasi kaitannya dari hulu ke hilir. Tidak hanya sangat banyak nilai kerja yang sudah tertanam dalam lintasan sejarah panjangnya, namun juga kaitan ketangguhan dan kemandirian yang telah teruji. Sebut saja, bagaimana industri ini pernah diguncang efek krisis ekonomi dunia, kerusuhan sosial, perang dunia, bahkan gelombang pasang fasisme-militerisme Jepang, namun mampu bangkit kembali dari reruntuhan sebelum menggapai masa keemasannya dalam dua dekade terakhir. Industri rokok *kretek* menguasai pangsa pasar domestik lebih dari 90 persen, sebagian diekspor, serta memberikan kontribusi bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, kegiatan sosial dan membentangkan kesejahteraan bagi sebagian petani tembakau dan cengkeh, selain kontribusinya untuk penerimaan negara dalam bentuk setoran pajak dan cukai, apa pun kekurangan dan kelemahannya.

Kajian dalam buku ini hendak menempatkan kebijakan pemerintah yang mengontrol perdagangan rokok terutama *kretek* dalam kaitannya dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah bisa saja menyakal bahwa kebijakannya tidak akan mematikan industri rokok *kretek*, namun faktanya banyak kasus pabrik-pabrik *kretek* kecil terpaksa gulung tikar. Pabrik-pabrik ini memproduksi *kretek* untuk dijual dengan harga terjangkau. Bila pemerintah menaikkan tarif cukai yang tinggi, kesulitan mereka pasti terjadi. Daya saing *kretek* di tingkat pasar internasional pun karena harganya yang lebih murah. Kebijakan ini sudah termasuk hambatan tarif di negeri sendiri. Apalagiditerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan rokok berdasarkan PP No. 109/2012, sementara impor tembakau dan rokok putih tidak diberlakukan dengan hambatan tarif dan nontarif. Tambahan lagi, pemerintah menerapkan perdagangan yang bersifat diskriminatif terhadap produk Indonesia. Belum lagi, banyak larangan yang berkaitan dengan rokok atau produk tembakau.

Dengan demikian, kajian dalam buku ini hendak membuka mata bahwa *kretek* itu tidak dibuat di AS atau di Eropa. *Kretek* telah mengaitkan kekhasan dan identitasnya dengan Indonesia, sebagaimana cerutu dengan Kuba, atau Jepang dengan produk otomotif. Sehingga tidaklah perlu mengarahkan dan menempatkan seakan-akan produk tembakau adalah produk “semi-illegal”. Sebaliknya, perlu dicari jalan yang lebih masuk akal ketimbang mempertentangkan secara berlebihan gara-gara paparan asap rokok – bukan asap knalpot – antara kebutuhan kesehatan dengan pekerjaan, upah dan tunjangan serta bentuk-bentuk partisipasi dalam kebudyaan.

Seiring rampungnya penulisan buku ini kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada banyak pihak yang sudah ambil bagian. Tentu saja, kami sangat menghargai sumbangan dan jerih payah yang telah diberikan Suryadi Radjab dan kawan-kawannyayang menuliskan dalam kajian ini.

Jakarta, Mei 2013

Mulayana Wirakusumah

Bab 1

PENDAHULUAN



- 1.1. Latar Pengendalian Tembakau
 - 1.1.1. Dampak konsumsi tembakau terhadap kesehatan
 - 1.1.2. Tekanan perdagangan produk tembakau
 - 1.1.3. Kampanye anti tembakau
- 1.2. Resistensi atas Pengendalian Tembakau
 - 1.2.1. Resistensi petani dan buruh-tani tembakau
 - a. Tata niaga dan dana bagi hasil
 - b. Menentang RUU dan RPP Tembakau
 - c. Menolak fatwa haram
 - d. Ancam boikot bayar pajak dan pemilu
 - 1.2.2. Resistensi pengusaha industri rokok
 - 1.2.3. Signifikansi tembakau dan pengolahannya
 - a. Sebaran perkebunan tembakau
 - b. Sebaran industri pengolahan tembakau
 - c. Serapan tenaga kerja
 - d. Besarnya cukai buat negara

Gelombang gempuran dan suara gaduh yang berupaya mengguncang kemajuan produksi pengolahan tembakau di Indonesia tidak hanya digulirkan oleh kekuatan raksasa dunia – diwakili regim kesehatan dan perdagangan bebas – namun juga membawa pengaruhnya terhadap berbagai organisasi dan barisan anti penggunaan tembakau di dalam negeri untuk menekan pemerintah dan parlemen supaya dapat mengatur perdagangan dan konsumsi tembakau. Mereka seperti menabuh genderang perang terhadap produk tembakau, khususnya buah perpaduan yang khas antara tembakau dan cengkeh, yang sangat lagendaris dengan sebutan *kretek*.¹ Inilah industri yang hampir seluruhnya dirintis oleh tiga generasi sebelumnya – lebih dari satu abad beroperasi dan terus bertahan – dengan susah-payah dibangun dan dikerahkan daya cipta, dari kerja keras dan keringat banting tulang, serta pemanfaatan sumber daya lokal sampai memetik posisi terdepan yang tidak tergoyahkan oleh gelombang krisis ekonomi dunia.²

Mengguncang produksi pengolahan tembakau dengan hanya mengatasnamakan doktrin kesehatan belaka dapat diasumsikan sebagai persoalan serius. Karena guncangan ini bakal menghadapi jutaan orang yang menggantungkan hidup dalam mata rantai perladangan dan perkebunan tembakau sampai industri pengolahannya dan perdagangan rokok.³ Secara ekonomi, sejak lama telah terbentuk keterkaitan rantai produksi dari hulu ke hilir dengan lebih lengkap di mana hasil perkebunan tembakau dan cengkeh diserap oleh industri *kretek*.⁴ Negara pun

¹ Wanda Hamilton, *Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, Yogyakarta: INSISTPress, 2010.

² Roem Topatimasang, Puthut EA, dan Hasriadi Ary, (eds.), *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota*, Yogyakarta: INSISTPress, 2010, hal. 140.

³ Lihat “RPP Tembakau Disahkan, Jutaan Orang Kehilangan Pekerjaan,” *kompas.com*, Selasa, 3 Juli 2012 | 19:55 WIB. Komite Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) menyebutkan, jumlah petani tembakau sekitar 2,1 juta orang di seluruh Indonesia.

⁴ Bandingkan perbedaannya yang menyolok dengan produksi industri perakitan otomotif yang tidak lengkap dan sangat bergantung pada impor dari negeri-negeri pusat seperti Jepang, Jerman, dan belakangan Korea Selatan. Signifikansi lainnya adalah bahwa perkebunan dan industri pengolahan tembakau juga bersifat padat karya, banyak menyerap tenaga kerja. Lebih dari itu, industri *kretek* bersifat mandiri, bebas dari pola patronase bisnis (*business patronage*), yakni tidak bergantung dan tidak dimodali oleh negara. Mereka adalah contoh dari pengusaha atau perusahaan nasional yang tumbuh secara mandiri tanpa campur tangan negara, bahkan menjadi salah satu sektor yang kompetitif di tingkat internasional.

disokong dengan penerimaan pajak dan cukai yang tinggi.⁵ Dalam *kretek*, terdapat racikan aroma cengkeh (*Eugenia aromatica*) – rempah-rempah legendaris – yang tidak ditemukan rokok lainnya seperti rokok Amerika Serikat (AS) atau Eropa.⁶

Namun studi tandingan yang disajikan ini sangatlah penting. Tembakau (*Nicotiana tabacum* atau *Nicotiana spp., L.*) – dengan kadar nikotin sekitar 0,6 persen – adalah tanaman yang telah menjadi bagian penting dalam ekonomi dan budaya di Indonesia. Sehingga studi ini lebih dari sekadar memaparkan dampaknya atas kesehatan, apalagi secara berlebihan dinyatakan sebagai penyebab kematian,⁷ adalah menimbang betapa pentingnya bagi ekonomi dan budaya yang telah terbentuk ratusan tahun dan bersifat padat karya di Indonesia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya terkait upaya mengendalikan secara ketat terhadap tembakau dan produk pengolahan tembakau. Terlebih lagi, kampanye anti tembakau ini tidak diiringi dengan solusi ekonomi dan budaya yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali dengan menunjukkan satu kasus keberhasilan dalam peralihan pola tanam tembakau ke sayuran.⁸

1.1. Latar Pengendalian Tembakau

World Health Organization (WHO) memang telah mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam Sidang Kesehatan Dunia (*World Health Assembly*) ke-56 pada 2003. FCTC ini memberikan rujukan tentang betapa pentingnya pengendalian tembakau di seluruh dunia. Dengan rujukan ini diharapkan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk mengesahkan FCTC menjadi hukum atau kebijakan nasionalnya masing-masing, sehingga menjadi bagian dari negara-negara peserta (*states parties*) atas FCTC. Setiap negara diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengurangi dampak penggunaan tembakau terhadap kesehatan, dengan langkah-langkah meratifikasi FCTC, menjabarkan lebih lanjut komitmennya ke dalam UU, serta kebijakan lainnya yang relevan.

1.1.1. Dampak konsumsi tembakau terhadap kesehatan

Tidak dapat dibantah bahwa kemunculan dan kedudukan FCTC diarahkan untuk mengekang dan membatasi dampak penggunaan tembakau. Konvensi ini juga disebut sebagai WHO FCTC. Turunan FCTC adalah *The Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products*. Persoalan

⁵ Salah satu contoh adalah PT Djarum. Perusahaan rokok pemilik pangsa pasar terbesar ketiga ini melakukan pembelian pita cukai rokok sebesar Rp 12 triliun tahun 2012. Nilai pembelian pita cukai rokok ini meningkat 13 persen dibanding tahun 2011 yang besarnya Rp 10,6 triliun. Lihat “Djarum Beli Pita Cukai Rp 12 Triliun Tahun Ini,” *indonesiainancetoday.com*, Rabu, 06 Juni 2012.

⁶ Mark Hanusz, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Jakarta: Equinox, 2000. *Kretek* disebut juga sebagai ciri khas dan budaya Indonesia.

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Framework Convention on Tobacco Control (Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau)*, Jakarta: Komnas HAM, 2012, hal. 17. Lihat juga, “Risiko Kematian Perokok Perempuan Meningkat,” *tempo.co*, Jumat, 25 Januari 2013 | 05:58 WIB. Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufro Mukti, juga berkampanye dengan menyatakan, tiap tahun ada 300.000 kematian akibat rokok di Indonesia.

⁸ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar konferensi *Mengatasi Masalah Tembakau di Negara Berkembang* pada 5 Desember 2012. Dalam acara ini peneliti Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Stephen Tamplin, mengisahkan hanya satu kasus tentang perubahan pola tanam petani tembakau ke sayuran di lereng Merapi yang relatif berhasil, sehingga membantah bahwa peralihan dari menanam tembakau ke sayuran akan membuat mereka miskin. Lihat “Petani Tembakau Merapi Berhasil Beralih ke Sayuran,” *tempo.co*, Rabu, 05 Desember 2012 | 18:51 WIB.

yang hendak dihapuskan atau dikurangi adalah *illicit trade* yang mencakup [a] produksi, pengiriman, penerimaan, pemilikan, distribusi, penyimpanan atau pembelian atas sesuatu yang dilarang/tidak sah menurut UU, [b] “regional economic integration organization” untuk mengalihkan kompetensi, mengikat dan mematuhi, [c] “tobacco advertising and promotion” atas setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi, mempengaruhi melalui promosi produk tembakau langsung atau tidak langsung, [d] “tobacco control” yang menyangkut strategi pasokan, permintaan dan pengurangan konsumsi produk tembakau dan pengaruh asap rokok, [e] “tobacco industry” yang berarti perusahaan rokok, distributor besar dan pengimpor produk tembakau, [f] “tobacco product” yang artinya seluruh atau sebagian produk terbuat dari daun tembakau sebagai bahan baku untuk dihisap, dikunyah dan dihirup, [g] “tobacco sponsorship” dalam bentuk kontribusi terhadap suatu acara, kegiatan atau individual dengan tujuan mempengaruhi melalui produk atau penggunaan tembakau, langsung atau tidak langsung.⁹

FCTC memang menekankan dan memprioritaskan terhadap hak setiap orang untuk menjaga kesehatan. Karena konsumsi tembakau dan paparan asap rokok diasumsikan dan disimpulkan sebagai suatu epidemik yang telah menjadi persoalan internasional. Asumsi dan kesimpulan ini didasarkan atas berbagai penelitian tentang pengaruh asap rokok, produk-produk yang mengandung tembakau yang diracik dengan canggih untuk menimbulkan ketergantungan, selain dihasilkan secara farmakologis aktif, mengandung racun, mutagenik dan risiko kanker, serta penyakit lainnya, bahkan kemiskinan.¹⁰

Langkah-langkah pengendalian tembakau itu telah didukung oleh penelitian tentang dampak konsumsi tembakau terhadap kesehatan yang dilakukan WHO, sehingga diperkirakan sampai tahun 2020 bakal menjadi persoalan kesehatan terbesar atas penyakit yang ditimbulkan. Diprediksi, praktik dan perilaku konsumsi tembakau dapat menyebabkan 8,4 juta kematian setiap tahun. Dikatakan, konsumsi tembakau bakal “membunuh” setiap orang dalam 10 detik. Diperkirakan pula bahwa peningkatan konsumsi tembakau di Asia dapat meningkatkan kematian empat kali lipat dari 1,1 juta orang (1990) menjadi 4,2 juta orang (2020).¹¹

Asap rokok orang lain (AROL) – disebut juga *secondhand smoker* (SHS) – dikenal sebagai perokok pasif, diperkirakan menyebabkan 600.000 kematian dini setiap tahun di dunia, dengan rincian 31 persen korban adalah anak-anak dan 64 persen perempuan.¹² Hasil penelitian lainnya yang ditulis dalam *New England Journal of Medicine* edisi Januari 2013 menyebutkan, perokok perempuan lebih mungkin meninggal akibat kanker paru-paru dibandingkan beberapa dekade lalu. Pada 1980-an, perempuan yang merokok ternyata 12,6 kali lebih mungkin meninggal akibat kanker paru-paru. Sedangkan tahun 2000-an, kemungkinan itu melonjak tajam sekitar 25,7 kali.¹³ Sedangkan di Indonesia, berdasar data Departemen Kesehatan (Depkes) pada 2007,

⁹ Pasal 1 WHO FCTC.

¹⁰ Lihat “Pembukaan” dalam FCTC.

¹¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.cit.*, hal. 17-18. Selain menyebabkan kematian bagi penggunanya, konsumsi rokok juga merugikan kesehatan orang lain. Asap rokok orang lain (AROL) dinyatakan, merugikan kesehatan orang lain karena mengandung asap dan partikel, terdiri 7.000 senyawa kimia dan partikel kecil yang menjadi Particulate matter (PM_{2.5}). Tahun 2010, Riskesdas mengungkapkan, sebanyak 62 juta perempuan dan 30 juta laki-laki menjadi perokok pasif, sehingga ada 92 juta perokok pasif.

¹² World Health Organization, *Global Adult Tobacco Survey (GATS): Thailand*, WHO, 2009.

¹³ Lihat “Risiko Kematian Perokok Perempuan Meningkat,” *tempo.co*, Jumat, 25 Januari 2013 | 05:58 WIB. Seorang peneliti adalah Dr Michael Thun, mantan wakil presiden emeritus American Cancer Society.

hampir 85 persen rumah tangga terpapar asap rokok. Perbandingan atau rasio kematian antara perokok aktif dan perokok pasif adalah delapan berbanding satu (8:1). Bila 200.000 perokok aktif, maka sedikitnya 25.000 kematian disebabkan paparan AROL.¹⁴

Berbeda dari hasil penelitian dan survei yang menyatakan rokok sebagai penyebab kematian, namun bersumber dari organisasi yang sama – Penasihat Regional Penyakit Tidak Menular WHO South East Asia Regional Office, Regu Garg – menjelaskan bahwa sedikitnya empat penyakit tidak menular (PTM) penyebab kematian tertinggi di Asia Tenggara yang mencapai 7,9 juta kasus per tahun. Keempat penyakit ini, yaitu jantung, stroke, diabetes dan kanker. Penyakit ini tidak menular namun timbul dari gaya hidup yang tidak sehat seperti diet tidak sehat, aktivitas fisik minimal, merokok, serta konsumsi alkohol berlebih.¹⁵ Data dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) 2007 menyebutkan, angka kematian akibat PTM meningkat dari 41,7 persen pada 1995 menjadi 49,9 persen pada 2001, dan meningkat lagi menjadi 59,5 persen pada 2007. Penyebab kematian tertinggi dari seluruh penyebab kematian adalah stroke (15,4 persen), disusul hipertensi, diabetes, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis. Di perkotaan, kematian akibat stroke pada kelompok usia 45-54 tahun sebesar 15,9 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 11,5 persen.¹⁶

Dalam kaitannya dengan paparan asap yang merugikan kesehatan, juga tidak memasukkan dampak emisi gas buang kendaraan bermotor atau polusi udara lainnya secara terintegrasi. Kontribusi bahan pencemar dari kendaraan bermotor ke udara di DKI Jakarta mencapai sekitar 70 persen. Mulai dari mobil pribadi, bus dan mobil angkutan umum, sepeda motor, truk, sampai lokomotif kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut menjadi sumber yang dominan dalam pencemaran udara. Beberapa studi epidemiologi menyimpulkan adanya hubungan yang erat antara tingkat pencemaran udara perkotaan dengan angka kejadian (prevalensi) penyakit pernafasan. Gas buang ini jelas berisiko terhadap kesehatan khususnya penyakit pernafasan, terutama di kota-kota besar. Penyakit yang mungkin timbul antara lain kanker pada paru-paru atau organ tubuh lainnya, penyakit pada saluran tenggorokan yang bersifat akut maupun kronis, dan kondisi yang diakibatkan karena pengaruh bahan pencemar terhadap organ lain seperti sistem syaraf.¹⁷

Pencemaran dari gas buang itu juga telah berdampak lebih jauh dalam bentuk pemanasan global (*global warming*), yakni efek rumah kaca atau perubahan iklim (*climate change*). Pada 2011, Departemen Energi AS menghitung tingkat emisi gas rumah kaca justru lebih parah daripada skenario terburuk yang diprediksi oleh ahli iklim pada 2007. Karena, sepanjang 2010, jumlah karbon dioksida (CO₂) yang terlepas ke udara sebanyak 564 juta ton (setara 512 metrik ton), meningkat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini berarti terjadi peningkatan

¹⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.cit.*, hal. 18. Lihat juga, “Risiko Kematian perempuan perokok di Indonesia Meningkat,” *bintangnews.com*, Kamis, 24 Januari 2013. Sementara, menurut mantan Menkes Endang Sedyaningih (almarhumah), jumlah korban akibat rokok sebanyak 426.214 orang pada 2007.

¹⁵ Lihat “Empat Penyakit Tak Menular Penyebab Kematian Tertinggi di Asia,” *aktual.co*, Sabtu, 8 September 2012 12:33:02; dan “Penyakit Tak Menular Jadi Pembunuh Utama,” *kompas.com*, Sabtu, 8 September 2012 | 10:03 WIB.

¹⁶ Lihat “Stroke, Penyebab Kematian Tertinggi,” *kompas.com*, Minggu, 30 September 2012 | 12:03 WIB.

¹⁷ A Tri Tugawati, “Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Kesehatan,” http://www.kpbb.org/makalah_ind/Emisi%20Gas%20Buang%20Bermotor%20%26%20Dampaknya%20Terhadap%20Kesehatan.pdf (diakses pada Rabu, 20 Februari 2013).

emisi sebesar 6 persen. Penyumbang terbesar emisi CO₂ berasal dari tiga negara, yaitu Cina, AS, dan India.¹⁸

Emisi gas rumah kaca dapat diperluas lagi di Indonesia, yaitu dampak kebakaran hutan yang menyumbang sebesar 0,672 gigaton carbon dioksida equivalent (CO₂e), sampah sebesar 0,048 gigaton CO₂e, energi dan transportasi sebesar 0,038 gigaton CO₂e, agrikultur sebesar 0,008 gigaton CO₂e, dan industri menyumbang 0,001 gigaton CO₂e. Realitas ini pula yang mendorong Presiden Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).¹⁹

Regim kesehatan dunia memang telah memprioritaskan hak setiap orang untuk menjaga kesehatan berkaitan konsumsi tembakau dan paparan asap rokok, karena dinilai berisiko tinggi atas beberapa PTM, bahkan secara mengerikan dikampanyekan berisiko kematian. Tekanan ini diikuti oleh berbagai pihak di Indonesia untuk mengambil bagian dalam kampanye ini. Pemerintah telah lewat Presiden Yudhoyono akhirnya menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan menjadi PP No. 109/2012 pada 24 Desember 2012. Sebelumnya, Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Kemken Kesra) menyatakan, tujuan utama dari RPP adalah untuk memproteksi dan meningkatkan kesehatan generasi muda.²⁰

Dalam sosialisasi PP No. 109/2012 untuk mengendalikan dampak tembakau terhadap kesehatan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengangkat kisah ayahnya sebagai perokok dan meninggal disebabkan menderita kanker paru-paru. Suaminya juga perokok yang kemudian terkena stroke. Dalam rokok terdapat ribuan racun yang terkandung dalam nikotin dan tar di mana 60 persen merupakan zat karsinogenik yang memicu penyakit kanker. Selain itu, dia mengatakan, rokok juga menyebabkan stroke.²¹

Memang hal yang mengesankan terungkap bahwa para perokok secara langsung telah membeli “tiket kematian dini”. Padahal, ada banyak pengalaman lain yang konkret di mana sejumlah orang berusia senja – laki-laki dan perempuan – masih menikmati kepulan asap yang berasal dari racikan tembakau dan cengkeh.²² Bahkan, ada juga suatu penelitian yang menyimpulkan manfaat merokok, yaitu [a] menurunkan risiko operasi penggantian lutut, [b] menurunkan risiko penyakit parkinson, [c] menurunkan risiko obesitas, [d] menurunkan risiko kematian setelah si perokok

¹⁸ Lihat “Bukannya Berkurang, Emisi Karbon Kian Melonjak,” *tempo.co*, Senin, 07 November 2011 | 21:34 WIB. Cina mengeluarkan emisi karbon 2.248 juta metrik ton, AS 1.498 juta metrik ton. India, Rusia, Jepang, dan Jerman berkisar antara 500 dan 200 juta metrik ton. Korea Selatan, Iran, Kanada, dan Arab Saudi duduk di posisi 7 hingga 10 dengan produksi emisi karbon sekitar 150 juta metrik ton. Total emisi karbon dunia 2010 sebesar 9.138 juta metrik ton.

¹⁹ Lihat “Presiden Siapkan Rencana Aksi Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca,” *tempo.co*, Senin, 26 September 2011 | 18:55 WIB.

²⁰ Lihat “Kemken Kesra: RPP Tembakau untuk Memproteksi Generasi Muda,” *kompas.com*, Rabu, 4 Juli 2012 | 16:39 WIB.

²¹ Lihat “Begini Kisah Pahit Menteri Kesehatan soal Rokok,” *tempo.co*, Rabu, 23 Januari 2013 | 12:35 WIB.

²² Roem Topatimasang, Puthut EA, dan Hasriadi Ary, (eds.), *Op.cit.*, hal. 167.

mengalami beberapa serangan jantung, dan [e] membantu obat jantung clopidogrel bekerja lebih baik.²³

Namun demikian, perihal pemicu suatu penyakit yang ditimbulkan para perokok aktif dan perokok pasif – dalam kaitan dengan asap dan apa pun PTM yang bakal timbul – perlu diakui bahwa risiko PTM ini tidaklah bersifat tunggal, terutama bagi mereka yang berada di perkotaan seiring dengan pencemaran udara yang terus meningkat akibat pelepasan emisi gas rumah kaca dan bentuk pencemaran lainnya. Rokok dan kepulan atau paparan asapnya bukanlah satu-satunya risiko yang dapat menimbulkan PTM.

1.1.2. Tekanan perdagangan produk tembakau

Industri rokok, terutama *kretek*, bukan saja menjadi ciri khas dari daya kreasi dan sumber daya Indonesia, namun juga merupakan produk yang berdaya saing atau kompetitif. Perjalanan panjang industri *kretek* ini sudah berlangsung selama 120 tahun, sejak mulai munculnya racikan tembakau dan cengkeh dalam bungkus daun jagung.²⁴ Kendati rintisannya dimulai dengan jatuh bangun, namun daya tahannya setelah berkembang pada permulaan abad ke-20, sungguh mengesankan, tidak goyah oleh gelombang krisis ekonomi global. Bahkan daya tahannya tetap kuat ketika diguncang oleh muncul dan beroperasinya monopoli dagang Badan Penyelenggara dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang disokong oleh kebijakan pemerintah yang menekan harga pembelian cengkeh dari petani dan BPPC menjualnya dengan harga tinggi kepada anggota-anggota Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). Di satu pihak keberadaan BPPC telah menyengsarakan petani cengkeh dengan memaksa petani untuk menjual cengkeh dengan harga yang rendah, sedangkan di pihak lain para anggota Gappri dipaksa pula untuk membeli cengkeh hanya dari BPPC.²⁵

Dalam perdagangan bebas di tingkat internasional, industri produk tembakau Indonesia justru menghadapi tembok proteksi. Pemerintah AS melarang masuknya rokok *kretek* ke negerinya.

²³ Penelitian dari Universitas Adelaide, Australia, muncul dalam jurnal *Arthritis & Rheumatism*. Selain itu dalam jurnal *Thrombosis Research*, edisi Oktober 2010. Lihat “Benarkah Merokok Ada Manfaatnya?” *tempo.co*, Jumat, 21 Desember 2012 | 07:00 WIB.

²⁴ *Kretek* bermula dari temuan Haji Djahhari pada akhir abad ke-19 di Kudus. Dikisahkan, semula dia merasa sakit pada bagian dada, dan kemudian mengoleskan minyak cengkeh. Sakitnya pun reda. Djahhari lantas bereksperimen merajang cengkeh dan mencampurnya dengan tembakau untuk dilinting menjadi rokok, dan semula disebut *klobot* – dibungkus daun jagung – selanjutnya dikenal sebagai *kretek* karena ketika dihisap berbunyi *kretek-kretek*. Lihat Mark Hanusz, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Jakarta: Equinox, 2000; dan Diana Hollingsworth Gessler dan Michelle Sampoerna, *The Sampoerna Legacy: A Family & Business History*, Jakarta: Sampoerna Foundation, 2007.

²⁵ BPPC menetapkan harga jauh lebih rendah dari sebelumnya untuk membeli cengkeh kering dari petani sebesar Rp 7.500 per kilogram. Para petani yang menjual cengkeh ini masih ditambah dengan pemotongan untuk Dana Penyerahan Masyarakat (DPM) Rp 2.000 dan Dana Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) Rp 1.500. Ini berarti petani hanya mengantongi Rp 4.000 per kilogram. Selain itu, tidak berarti petani tidak diperas lebih banyak lagi oleh berbagai penyimpangan. BPPC mulai beroperasi sejak 28 Desember 1990 dan berakhir sampai tahun 1998. Dengan tata niaga cengkeh (TNC) ini BPPC akan mengantongi selisih laba 100 juta dollar AS per tahun. BPPC bermodalkan suntikan dana pemerintah berupa pinjaman total Rp 759 miliar, yaitu Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) senilai Rp 569 miliar dan pinjaman komersial kepada Bank Indonesia melalui Bank Bumi Daya sebesar Rp 190 miliar. Lihat Roem Topatimasang, Puthut EA, dan Hasriadi Ary, (eds.), *Op.cit.*, hal. 55-59; “TNC Diteruskan, Perlu Dana Penyangga Rp 1 Triliun/Tahun,” *Suara Pembaruan*, Minggu, 6 November 1994; “Soal Dana Petani Cengkeh di BPPC, ICW Tuduh DPR Bela Tommy,” *Kompas*, Senin, 15 Maret 2000; dan “Tommy Soeharto: Tidak Ada Kredit Macet di BPPC,” *detik.com*, Kamis, 16 Agustus 2007 10:01 WIB.

UU Tembakau (*Tobacco Act*) di AS mendiskriminasi *kretek*, karena rokok beraroma mentol yang banyak diproduksi perusahaan AS boleh beredar, sedangkan *kretek* justru dilarang.²⁶ Bahaya aroma mentol dalam rokok ini juga sudah dikaji oleh lembaga pengawas makanan dan obat di AS, Food and Drug Administration (FDA).²⁷ Namun demikian, memang dengan disahkannya aturan *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* pada 2009 dan berlaku pada 2010, potensi kerugian Indonesia akibat aturan ini mencapai 200 juta dollar AS per tahun. Sedangkan potensi ekspor rokok Indonesia ke seluruh dunia diperkirakan 500 juta dollar AS pada 2010.²⁸

Pembentukan panel di WTO untuk menghadapi larangan ekspor *kretek* ke AS dengan tuduhan *kretek* lebih berbahaya ketimbang rokok putih, kelihatannya pernyataan WTO memang kurang menguntungkan. WTO menyatakan bahwa aturan AS itu memang diskriminatif. Namun di lain pihak, WTO juga menyatakan aturan itu memang dibutuhkan karena dapat mengurangi perokok pemula. Pernyataan terakhir ini menegaskan posisi WTO, karena tidak didasarkan atas alasan kesehatan, melainkan untuk mengurangi perokok. Pernyataan WTO inilah yang mendorong Gappri menimbang untuk mengajukan banding.²⁹

Mentoknya ekspor *kretek* akibat aturan yang diskriminatif itu, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta pemerintah RI segera tegas menanggapi keputusan WTO, karena tersedia dua bulan untuk menanggapi. AMTI menilai sikap tegas pemerintah dibutuhkan karena kebijakan AS itu memukul industri *kretek*, yang mencerminkan 90 persen produksi rokok Indonesia. Desakan juga dikemukakan Wakil Ketua Komisi Industri, Perdagangan, dan Investasi Dewan Perwakilan Rakyat Aria Bima. “Pembatasan rokok *kretek* adalah bagian dari perang dagang. Indonesia tidak boleh diam saja, harus melawan,” katanya.³⁰

Ekspor rokok Indonesia tidak hanya menghadapi tembok proteksi dan diskriminasi di AS, namun juga tekanan pemerintah dalam menaikkan cukai dan pembatasan produksi. Sejak Januari 2012,

²⁶ Lihat “Pengusaha Dukung WTO Bentuk Panel Rokok Kretek,” *tempo.co*, Rabu, 21 Juli 2010 | 18:20 WIB. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyebut diskriminasi itu sebagai politik (baca: perang) dagang. Karena, selama periode 2005-2007, terjadi peningkatan ekspor yang mencapai 150 persen. Untuk menghadapi larangan itu, Gappri mendukung pembentukan panel World Trade Organization (WTO), dengan harapan ekspor *kretek* dapat dibuka dan terus meningkat.

²⁷ Lihat “Efek Rokok Mentol Dikaji,” *kompas.com*, Sabtu, 3 April 2010 | 07:57 WIB; “Perokok Mentol Lebih Gampang Kena Stroke,” *kompas.com*, Jumat, 13 April 2012 | 14:36 WIB; “Rokok Mentol Bisa Tingkatkan Risiko Stroke,” *voaindonesia.com*, Sabtu, 14 April 2012; “FDA Diminta Melarang Rokok Mentol,” *kompas.com*, Sabtu, 19 Maret 2011 | 11:07 WIB; dan “FDA Terapkan Aturan Baru bagi Perusahaan Rokok,” *voaindonesia.com*, Jumat, 30 Maret 2012.

²⁸ Lihat “Pengusaha Rokok Dukung Banding Keputusan WTO,” *tempo.co*, Senin, 12 September 2011 | 18:49 WIB; dan “Amerika Terbukti Diskriminatif Terhadap Rokok Indonesia,” *tempo.co*, Senin, 05 September 2011 | 07:00 WIB.

²⁹ *Ibid.* Beberapa penelitian ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya rokok putih justru lebih bahaya dibandingkan rokok *kretek*. Sebab, kandungan pada rokok putih hanya satu unsur. Lebih berbahaya dibandingkan rokok *kretek* yang terdiri dari berbagai unsur dan membentuk senyawa. Lihat juga, “Kisruh RI Vs AS Soal Rokok Kretek Masuk Badan Banding WTO,” *detik.com*, Jumat, 03 Februari 2012 15:03 WIB.

³⁰ Lihat “Pemerintah Diminta Tanggapi Keputusan WTO Soal Rokok,” *tempo.co*, Senin, 12 September 2011 | 06:13 WIB. Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan Amerika terkait dengan aturan tersebut sejak 7 April 2010, tapi tak kunjung mendapatkan titik temu. Akhirnya Indonesia mengajukan sidang panel kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO untuk menyelesaikan masalah ini. Negara yang menjadi pihak ketiga pada panel adalah Brasil, Kolombia, Republik Dominika, Uni Eropa, Guatemala, Meksiko, Norwegia, dan Turki.

pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 15 persen. Sebelumnya, pada 2010, cukai sudah dinaikkan 6 persen, sehingga meningkat 2,5 kali.³¹ Karena sampai 2015, pemerintah memang berkepentingan untuk menaikkan cukai rokok supaya dapat meningkatkan penerimaannya dalam APBN.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang menyederhanakan cukai rokok – tanpa bertingkat sesuai modal-Modal yang ditanamkan – dikhawatirkan Gappri bakal menggulung industri rokok skala kecil dan menengah. Karena industri kecil dan menengah tidak akan sanggup memenuhi tarif yang nilainya hampir sama dengan industri besar. Mereka bakal kesulitan membayar cukai bila tarifnya mendekati sama antara industri kecil dan menengah dengan industri besar. Dikesankan bahwa pemerintah lebih melayani kepentingan perusahaan bermodal besar dan menyingkirkan industri kecil dan menengah yang lebih padat karya.³²

1.1.3. Kampanye anti tembakau

Tidak hanya aturan global dan aturan di negeri-negeri industri maju, serta kebijakan pemerintah Indonesia yang menekan produk tembakau, namun juga diiringi dengan berbagai kampanye anti tembakau. Perusahaan rokok, terutama *kretek*, kerap menjadi sasaran kampanye anti tembakau itu. Karena dianggap sebagai pihak yang membahayakan kesehatan jutaan orang. Beberapa kampanye anti tembakau ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, digelarnya Hari Tanpa Tembakau. WHO menggelar perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) pada 2012 yang jatuh setiap 31 Mei dengan tajuk “*Stop Tobacco Industry Interference*”. Kampanye ini fokus pada upaya-upaya melawan campur tangan industri tembakau yang tidak peduli dan semakin agresif mengingkari kesepakatan dalam WHO FCTC.³³ Dalam perayaan ini sekitar 1.000 pelajar, mahasiswa, tentara, polisi serta kalangan selebriti dan beberapa tokoh masyarakat melakukan pawai atau longmarch dari Bunderan Hotel Indonesia (HI) menuju Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mengusung pesan “Jakarta Bebas Rokok” untuk menciptakan lingkungan sehat dan generasi sehat bebas dari bahaya asap rokok.³⁴ Sehari berikutnya, 90 relawan melakukan aksi simpatik dengan menukar rokok yang sedang dihisap warga dengan setangkai bunga mawar. Puluhan relawan ini disebar ke tujuh kawasan tanpa rokok (KTR) yakni perkantoran pemerintah, rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan dan hotel di Kuta, Pantai Kuta, Terminal Ubung, Lapangan Puputan Badung, dan Bandara Ngurah Rai.³⁵

Bagian dari kampanye itu, penyelenggaraan Konferensi World Tobacco Asia (WTA) yang akan berlangsung pada 19-21 September 2012 di Jakarta, mendapat protes dari Koalisi Masyarakat Anti World Tobacco Asia Conference (MATA) dengan mendesak pemerintah tidak mengizinkan konferensi tersebut. Alasan penolakan ini karena dianggap kepentingan industri rokok internasional menargetkan masyarakat Indonesia sebagai obyek bisnis dalam meraup profit. MATA menyatakan, konsumsi tembakau bukan cuma masalah kesehatan saja, melainkan juga

³¹ Lihat “Cukai Rokok Naik 15 Persen,” *tempo.co*, Senin, 21 November 2011 | 19:02 WIB.

³² Lihat “Aturan Cukai Rokok Baru Ancam Industri Kecil,” *tempo.co*, Senin, 02 Juli 2012 | 16:19 WIB; dan “Cukai Dinaikkan, Pengusaha Rokok Mengadu ke DPR,” *tempo.co*, Kamis, 24 November 2011 | 11:02 WIB.

³³ Lihat “WHO Ingatkan Upaya Perlawanan Industri Tembakau,” *kompas.com*, Kamis, 31 Mei 2012 | 11:53 WIB.

³⁴ Lihat “Hari Tanpa Tembakau, Pelajar Longmarch,” *kompas.com*, Senin, 30 Mei 2011 | 22:23 WIB.

³⁵ Lihat “Hari Tanpa Tembakau, Rokok Ditukar Mawar,” *kompas.com*, Kamis, 31 Mei 2012 | 17:13 WIB.

berdampak pada faktor ekonomi dan sosial masyarakat, sesuai surveinya yang menunjukkan masyarakat miskin perkotaan mengkonsumsi tembakau paling banyak.³⁶

Kedua, bentuk kampanye anti tembakau juga mengekspos data yang mengerikan. Dinyatakan bahwa rokok sebagai salah satu “mesin pembunuh” yang diperkirakan telah menyebabkan kematian 300.000 orang per tahun di Indonesia, sedangkan di dunia diperkirakan jumlah itu meningkat menjadi 5,4 juta kematian per tahun atau 1 kematian tiap 6,5 detik sebagaimana diungkapkan Direktorat Pengendalian PTM Kementerian Kesehatan. Setiap batang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis racun merupakan faktor risiko dari berbagai penyakit, di mana nikotin diketahui berkontribusi terhadap kanker paru-paru, hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah, infertilitas pria, dan juga terhadap terjadinya disfungsi ereksi. Selain itu, juga mengikutsertakan data terhadap anak sebagai korban rokok dan risiko terpapar asap rokok.³⁷ Beberapa pengalaman pun ikut diekspos untuk memberikan gambaran yang lebih meyakinkan tentang betapa mengerikan dan tragisnya dampak asap rokok pada penderita kanker paru dan *bronchopneumonia duplex*.³⁸

Ketiga, lahirnya “fatwa haram” merokok. Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar acara halakah tentang Pengendalian Dampak Tembakau pada 7 Maret 2010 di Yogyakarta. Dalam halakah ini mereka mengambil keputusan, merokok secara syariaah Islam masuk dalam kategori haram, karena rokok mengandung unsur racun. Dengan fatwa terbaru ini, maka fatwa sebelumnya yang diterbitkan tahun 2005 dan 2007 – menyatakan merokok hukumnya mubah – dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁹ Lebih jauh dinyatakan, fatwa haram merokok merupakan upaya untuk menyelamatkan peradaban. Fatwa ini sebagai upaya Muhammadiyah untuk mendorong tercapainya target Millennium Development Goals

³⁶ Lihat “Masyarakat Anti-tembakau Tolak Konferensi WTA di Jakarta,” *kompas.com*, Kamis, 9 Agustus 2012 | 16:03 WIB.

³⁷ Lihat “Rokok Diperkirakan “Bunuh” 300.000 Orang Per Tahun,” *kompas.com*, Selasa, 29 Mei 2012 | 19:32 WIB; “Jumlah Perokok Anak Bisa Naik 6 Kali Lipat,” *kompas.com*, Jumat, 25 Mei 2012 | 13:59 WIB; “Inilah Risiko bila Terpapar Asap Rokok 30 Menit,” *kompas.com*, Selasa, 15 Mei 2012 | 10:39 WIB; “Rokok Makin Mengancam Generasi Muda,” *kompas.com*, Selasa, 31 Mei 2011 | 17:15 WIB; “Kena Asap Rokok, Anak Jadi Kecanduan Nikotin,” *kompas.com*, Rabu, 15 Juni 2011 | 10:00 WIB; “43 Juta Lebih Anak Indonesia Terpapar Bahaya Rokok,” *kompas.com*, Rabu, 1 Juni 2011 | 04:48 WIB; “Asap Rokok Picu Risiko Hiperaktif,” *kompas.com*, Senin, 11 April 2011 | 15:24 WIB; dan “Rokok Hambat Orgasme pada Wanita,” *kompas.com*, Kamis, 26 Mei 2011 | 15:31 WIB. Dikemukakan juga, lebih dari 80 persen perokok ada di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Sebuah survei yang dilakukan *Global Youth Tobacco Survey* 2009 yang menunjukkan bahwa 20,3 persen pelajar SMP sudah merokok sebagai pendukung kampanye.

³⁸ Irwan Julianto, “Hargai Hak Hidup Perokok Pasif,” *Kompas*, Selasa, 24 April 2012.

³⁹ Lihat “Muhammadiyah: Merokok Haram,” *kompas.com*, Rabu, 10 Maret 2010 | 02:38 WIB. Dalam amar fatwa PP Muhammadiyah ini juga ditegaskan, wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariaah. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariaah, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa/raga, perlindungan akal, perlindungan keluarga, dan perlindungan harta.

(MDGs).⁴⁰ Fatwa yang mengharamkan merokok ini justru mengejutkan juga seorang tokoh Muhammadiyah.⁴¹

Keempat, bahkan merokok dinyatakan sebagai bukan hak-hak manusia. Memang, tembakau dan rokok tidak dimasukkan dalam kategori makanan atau pangan sebagaimana terkandung dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Namun tidak berarti tanpa manfaatnya sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya.⁴² Sejauh ini kampanye yang sepenuhnya dinyatakan sebagai merusak kesehatan, juga secara berlebihan dinyatakan membawa perokok aktif dan pasif ke liang kubur, mengabaikan dan terkesan menyangkal manfaat tembakau dan rokok. Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim – tergabung dalam Jaringan Pengendalian Tembakau Indonesia (JPTI) – menyatakan, merokok bukan hak manusia karena mereka yang tidak merokok tidak akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁴³ Sebaliknya, tidak ada ketentuan yang melarang orang untuk mengkonsumsi tembakau dan rokok.⁴⁴

Kelima, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ditujukan kepada industri rokok untuk mencantumkan slogan dalam bungkusnya: “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.”⁴⁵ Para pemilik industri rokok telah dipaksa untuk memasang slogan kampanye anti rokok terhadap produknya. Kebijakan ini berarti mereka diminta untuk ambil bagian dalam kampanye untuk melawan dirinya sendiri. Dengan PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, maka peraturan ini mewajibkan produsen rokok mencantumkan foto peringatan dampak buruk merokok bagi kesehatan di bungkus rokok.⁴⁶

1.2. Resistensi atas Pengendalian Tembakau

STN NTB mengemukakan tiga persoalan yang dipandangnya merugikan petani tembakau, khususnya di NTB. Pertama, rencana pemerintahan untuk mengesahkan RUU tentang Tembakau yang mengadopsi regim kesehatan internasional yang terkandung dalam FCTC yang merupakan perjanjian internasional yang hendak menyeragamkan aturan dan membatasi produk rokok dan tembakau. Kedua, tekanan regim perdagangan bebas di mana tembakau impor mulai membanjiri

⁴⁰ Lihat “Fatwa Haram Rokok Dorong Tercapainya MDGs,” *kompas.com*, Senin, 15 Maret 2010 | 08:37 WIB. Muhammadiyah juga ingin berkolaborasi dengan lembaga internasional seperti Union for TBC and Lung Deases, khususnya untuk pengendalian tembakau. Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) PP Muhammadiyah dan PP Aisyiah melakukan advokasi, sosialisasi, dan edukasi terkait pengendalian tembakau di kalangan internal Muhammadiyah.

⁴¹ Lihat “Amien Rais Terkejut Fatwa Haram Merokok,” *kompas.com*, Sabtu, 13 Maret 2010 | 15:18 WIB. Keterkejutan Amien Rais atas keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang mengeluarkan fatwa haram rokok melalui surat fatwa haram Nomor 6/SM/MTT/III/2010, juga dengan mengutip salah satu ayat Al-Quran.

⁴² Lihat “Benarkah Merokok Ada Manfaatnya?” *tempo.co*, Jumat, 21 Desember 2012 | 07:00 WIB.

⁴³ Lihat “Merokok Bukan Hak Asasi Manusia,” *kompas.com*, Sabtu, 21 April 2012 | 02:49 WIB.

⁴⁴ Mengonsumsi tembakau dan rokok tidaklah dilarang, kecuali sejumlah kawasan yang dinyatakan dilarang merokok. Lihat juga “Menkes: Tak Ada Larangan Petani Tanam Tembakau,” *kompas.com*, Senin, 9 Juli 2012 | 14:03 WIB.

⁴⁵ Setiap bungkus rokok tercetak kampanye yang tertulis: “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.”

⁴⁶ Lihat “Indonesia Wajibkan Pencantuman Foto Peringatan pada Bungkus Rokok,” *voaindonesia.com*, Kamis, 10 Januari 2013.

pasar di dalam negeri yang mengakibatkan naiknya bea impor tembakau. Ketiga, pembelian tembakau virginia Lombok oleh Badan Usaha di NTB sesuai Surat Keputusan Gubernur NTB No. 521/438/Eko/2012 tidak dilaksanakan, sehingga terjadi penumpukan tembakau siap jual di gudang-gudang kecil petani pengoven.⁴⁷

Kebijakan pengendalian tembakau yang kian ketat dan berbagai kampanye anti tembakau baik secara global maupun nasional, tidaklah berjalan mulus atau tanpa hambatan karena hampir sepenuhnya mengingkari keberadaan dan kepentingan banyak orang yang terlibat dalam serangkaian proses produksi dan perdagangan tembakau yang tersebar di banyak pedesaan dan perkotaan yang sudah berlangsung lebih seabad di Indonesia. Lebih dari itu, negara lewat pemerintah pusat dan daerah meraup pajak dan cukai terbesar dari tembakau dan industri pengolahan tembakau.

Para petani tembakau membutuhkan mekanisme tata niaga untuk melindungi mereka dari permainan para spekulan harga. Ketika harga tembakau anjlok pada 2004 – harga tembakau basah jatuh sampai hanya Rp 500 per kilogram yang sebelumnya berkisar Rp 1.000 sampai Rp 12.000 per kilogram – banyak dikeluhkan para petani. Mereka pun mengekspresikan kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak menciptakan tata niaga yang melindungi kepentingan petani. Pengalaman ini menimpa ratusan petani tembakau di berbagai desa di Banyudono, Kabupaten Boyolali. Mereka menderita kerugian tanpa perlindungan oleh pemerintah dari para pemain pasokan tembakau untuk industri, sehingga mereka mengancam akan membakar daun tembakau sebagai bentuk protes.⁴⁸

Mengiringi kebijakan pengendalian tembakau yang kian ketat dalam empat tahun terakhir, bakal menimbulkan dampak buruk bagi para petani tembakau dan pengusaha pabrik rokok kecil. Dampak lebih jauh adalah lapisan buruh-tani tembakau dan pekerja pabrik rokok. Rembesan persoalan ini menyangkut pula hajat hidup para pedagang tembakau dan produk tembakau. Sehingga – cepat atau lambat – mereka pun mengekspresikan berbagai bentuk resistensi terhadap setiap upaya yang merugikan dan menyumbat kepentingan petani tembakau dan industri pengolahan tembakau.

Beberapa organisasi petani tembakau seperti Asosiasi Petani Tembakau (APTI) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) maupun sebuah Koalisi Nasional Penyelamat Kretek (KNKP) ambil bagian dalam kampanye “*Save Our Farm*” untuk menolak ratifikasi WHO-FCTC. Penolakan ini dituangkan dalam peluncuran kampanye ini dalam Forum Tembakau Asia ke-3 di Manila, Filipina. Para petani di Asia mendukung peluncuran “*Save Our Farm*” untuk menentang pedoman baru yang akan menghancurkan mata pencaharian jutaan petani tembakau di Asia. Kampanye ini menyerukan kepada pemerintah di kawasan Asia untuk bersama-sama dengan petani tembakau menentang pedoman tersebut.⁴⁹

⁴⁷ Lihat “STN NTB: Tiga Hal Yang Merugikan Petani Tembakau,” *berdikarionline.com*, Kamis, 1 November 2012 | 16:39 WIB. Pada 2011, impor tembakau dan produk tembakau mencapai 91.783 ton, yang terdiri dari tembakau unmanufacturing sebesar 83.107 ton; cigar, cigarilos, cigarettes 313.665 kg; dan tembakau manufacturing lainnya sebesar 8.362 ton.

⁴⁸ Lihat “Petani Ancam Bakar Daun Tembakau,” *Suara Merdeka*, Selasa, 24 Agustus 2004.

⁴⁹ Lihat “Tolak FCTC, Petani Kampanye Save Our Farm,” *suaraindonesia.co*, Selasa, 02 Oktober 2012, 14:33:26. Dalam pedoman ini antara lain mengatur: [1] Menentukan kapan boleh menanam tembakau; [2] Memutus semua dukungan pemerintah dan sektor swasta untuk petani tembakau; [3] Membatasi bahkan mengurangi luas lahan

Berbagai elemen petani dan buruh tembakau, organisasi pendukung lainnya yang tergabung pada Hari Petani Tembakau Sedunia (*World Tobacco Growers Day*) – AMTI, APTI, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Karya Tani Manunggal (KTM) Temanggung, Forum Masyarakat Peduli Tembakau (FMPT), Serikat Tani Nasional (STN), Pemuda Tani dan HKTI – melakukan demo dengan mendatangi Istana Merdeka pada 29 Oktober 2012. Ratusan orang yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur menyatakan diri bergabung dengan perjuangan International Tobacco Growers Association (ITGA) untuk mempertahankan kehidupan petani dan buruh tembakau sedunia, maka dengan tegas mereka meminta kepada pemerintah dan DPR untuk tidak melakukan akses FCTC.⁵⁰ Karena, penerapan FCTC ini akan mengancam 30 juta petani tembakau di dunia dan sekitar 1,5 juta petani tembakau di Indonesia.⁵¹

1.2.1. Resistensi petani dan buruh tembakau

Para petani atau pengusaha tani pada umumnya berada dalam ikatan kerja bersama buruh-tani dalam produksi tanaman tembakau, kemudian dipanen, diperam, dirajang, dijemur dan dibungkus. Mereka terlibat dalam produksi tembakau untuk kemudian dijual kepada pengusaha dagang dan pabrik rokok. Para petani sangat mengharapkan kestabilan dan peningkatan harga komoditas tembakau yang berefek pada tingkat upah buruh tembakau yang mereka pekerjakan. Sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah dalam tata niaga untuk melindungi petani dari permainan harga. Namun, kebijakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi tembakau dan pengolahannya maupun dipandang kurang melindungi petani tembakau dalam tata niaga serta kampanye anti rokok, telah menimbulkan serangkaian protes petani dan buruh tembakau.

a. Tata niaga dan dana bagi hasil

Dalam perdagangan tembakau, pemerintah dikritik tidak peka terhadap kondisi petani. Di satu sisi kenijakan pemerintah dituding telah menghambat petani tembakau di dalam negeri, namun di sisi lain justru tidak pernah membatasi impor tembakau. Kebijakan seperti ini dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan petani tembakau, karena dapat merusak harga tembakau nasional.⁵² Sementara tidak sedikit pula industri rokok nasional yang menghadapi kekurangan bahan baku tembakau.⁵³ Dengan disahkannya PP No. 109/2012 bakal berdampak naiknya impor tembakau sekitar 20 ribu ton yang menjadi 120 ribu ton.⁵⁴

tembakau; dan [4] Mendesak negara-negara tersebut mengurangi produksi tembakau secara bertahap. Namun kampanye menolak WHO-FCTC ini menyerukan: “*Save Our Jobs*” dan “*Save Our Way of Live*”.

⁵⁰ Lihat “Ratusan Petani Tembakau Ke Istana Tolak Akses FCTC,” *suaraindonesia.co*, Senin, 29 Oktober 2012, 17:32:43.

⁵¹ Lihat “FCTC-WHO Ancam Mata Pencaharian 34 Juta Petani Tembakau,” *suaraindonesia.co*, Rabu, 19 September 2012, 14:54:05.

⁵² Kritik ini dilontarkan Salamuddin Daeng, dengan memberikan catatan bahwa impor tembakau 2012 sekitar 100.000 ton atau meningkat sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan total produksi nasional sebesar 180.000 ton. Lihat “Petani Tembakau Dihambat, Impor Tak Dihalangi,” *bisniskeuangan.kompas.com*, Kamis, 10 Januari 2013 | 14:27 WIB.

⁵³ Lihat “Pabrik Rokok Kurang Pasokan Tembakau,” *industri.kontan.co.id*, Minggu, 03 April 2011 | 13:22 WIB. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengungkapkan, kebutuhan tembakau industri rokok mencapai 240.000 ton per tahun atau ekuivalen dengan produksi rokok sebanyak 230 - 240 miliar batang per tahun. Sementara produksi tembakau nasional hanya mampu menyuplai tembakau sekitar 150.000 ton hingga 180.000 ton.

⁵⁴ Lihat “PP Tembakau Bikin Impor Tembakau Naik 20 Ribu Ton,” *bisnis.liputan6.com*, Selasa, 05 Februari 2013 19:31. APTI mengungkapkan, impor tembakau dalam beberapa tahun terakhir selalu melonjak. Pada 2003, volume impor tembakau hanya 23 ribu ton. Kemudian impor di 2011 naik menjadi 91 ribu ton. Pada 2012 impor tembakau menembus 100 ribu ton dan dikhawatirkan tahun ini impor tembakau bisa 120 ribu ton.

Tahun 2009, petani tembakau di Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi dua persoalan sekaligus. Pertama, keputusan pemerintah untuk melepaskan tata niaga tembakau kepada mekanisme pasar tanpa dikontrol, sehingga petani tembakau menderita oleh permainan harga oleh pengusaha dagang yang menguasai pasar. Kedua, petani menghadapi kelangkaan minyak tanah *omprongan* untuk melakukan proses pengolahan daun tembakau yang sudah dipanen, karena pemerintah tidak dapat menyediakan BBM tersebut. Kedua persoalan yang hadapi ini mendorong mereka mem bakar tembakau kering sebagai bentuk protes atas anjloknya harga tembakau sambil memprotes kelangkaan minyak tanah kepada pemerintah.⁵⁵

Pada Mei 2011, ratusan orang yang tergabung dalam Komunitas Kretek Jakarta yang berunjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menuduh pemerintah tidak konsekuen, karena di satu sisi petani tembakau beralih untuk menanam komoditas lain, sementara di sisi lain impor tembakau terus meningkat.⁵⁶ Protes atas kebijakan impor tembakau berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember yang dilakukan ratusan petani dan buruh tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau “Kasturi” Jember (APTJ) dan Forum Komunikasi Petani Jember (FKPJ), selain menuntut kenaikan harga pembelian tembakau dan seluruh tembakau petani dibeli oleh pabrikan. Tidak banyak yang dituntut, petani mengajukan harga tertinggi sebesar Rp 40.000 per kilogram untuk jenis tembakau kasturi dan Rp 35.000 untuk rajang. Mereka juga menuntut transparansi pengelolaan dana alokasi cukai rokok untuk petani dan buruh tembakau, serta adanya pelarangan pengusaha dan pabrikan menanam tembakau.⁵⁷

Sebelumnya, pada Maret 2010, pemerintah tidak hanya membiarkan kelangkaan minyak tanah, namun juga mengeluarkan kebijakan konversi bahan bakar *omprongan* tembakau dari minyak tanah ke batubara. Para petani tembakau virginia di Sukaraja, Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) pun melancarkan protes dengan menuntut Gubernur NTB untuk membatalkan kebijakan konversi bahan bakar *omprongan*. Mereka mengancam akan menduduki Kantor Gubernur NTB bila tidak membatalkannya, kecuali pemerintah provinsi turun tangan untuk menaikkan harga tembakau dan menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CTH) dalam bentuk uang tunai ke petani (pengoven) yang dilengkapi bukti kepemilikan oven yang ditandai dengan adanya Tanda Daftar Industri (TDI) dan surat keterangan dari pihak kepala dusun dan kepala desa.⁵⁸

DBH CTH memang dinikmati pemerintah di mana provinsi dan kabupatennya sebagai sentra penghasil tembakau. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) – sebagai urutan kedua nasional penyumbang cukai hasil tembakau – juga meminta supaya porsi DBH terutama untuk daerah penghasil cukai hasil tembakau dinaikkan dan daerah diberi fleksibilitas pemanfaatan cukai tembakau sesuai kebutuhan di daerah. Dari hasil cukai ini dialokasikan untuk provinsi sebesar 30 persen, kabupaten/kota penghasil tembakau 40 persen, dan sisanya dibagi rata ke kabupaten/kota lainnya.⁵⁹

⁵⁵ Lihat “Petani Bakar Tembakau Sebagai Bentuk Protes,” *tani-riau.blogspot.com*, Jumat, 14 Agustus 2009.

⁵⁶ Lihat “Tolak RPP Tembakau, Ratusan Petani Geruduk Kemenkes,” *detik.com*, Selasa, 10 Mei 2011 12:17 WIB.

⁵⁷ Lihat “Petani Jember Demo Tolak Impor Tembakau,” *antarajatim.com*, Senin, 03 September 2012 16:07:52; “300 Petani Tembakau Jember Lancarkan Demo,” *infopoljatim.com*, Senin, 03 September 2012 22:56; “Petani Tembakau di Jember Demo,” *tribunnews.com*, Senin, 3 September 2012 14:20 WIB.

⁵⁸ Lihat “Petani Tembakau Ancam Duduki Kantor Gubernur NTB,” *jpnn.com*, Kamis, 29 April 2010, 10:30:00.

⁵⁹ Lihat “Pemprov Jateng Minta Porsi DBH Cukai Hasil Tembakau Dinaikkan,” *solopos.com*, Kamis, 25 Maret 2010 15:16 WIB.

Namun demikian, muncul juga dugaan penyimpangan DBH CTH pada 2009 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, senilai Rp 5,662 miliar yang dibagikan ke 10 SKPD, yaitu Bagian Perekonomian senilai Rp 2.960.987.425, Bagian Hukum Rp 150 juta, Bappeda Rp 450 juta, Dinas Pertanian Rp 446.350.000, Disperindagkop Rp 400 juta, Dinas Kesehatan Rp 335.525.000, BP4K Rp 150 juta, BLH Rp 200 juta, DP2KAD Rp 420 juta, dan Dinsosnakertrans Rp150 juta. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng telah mengaudit kerugian uang negara. Dengan demikian, Kejaksaan Karanganyar dapat segera menetapkan tersangka.⁶⁰

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solo menerjunkan tim khusus yang bertugas menelusuri realisasi penggunaan bantuan rukun tetangga (RT) senilai Rp 800.000 hingga Rp 2 juta yang digelontorkan pada 2009 yang bersumber dari DBH CTH dan diduga ada penyelewengan terkait sasaran penggelontoran dana tersebut. DBH CTH ini diberikan kepada 2.667 RT yang mencapai nilai Rp 2,4 miliar. Setiap RT mendapatkan bantuan bervariasi, ada yang mendapat Rp 800.000, Rp 1,25 juta atau Rp 2 juta.⁶¹ Dugaan penyelewengan DBH CTH juga dilakukan petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun, senilai Rp 755 juta dengan modus laporan fiktif. Dari total alokasi Rp 755 juta, sebanyak Rp144 juta diselewangkan.⁶²

RSUD Kertosono, Nganjuk, juga memperoleh dana hibah bantuan cukai tahun anggaran 2011 sebesar Rp 3,8 miliar. Namun, manajemen RSUD Kertosono telah membelanjakan dana bantuan hibah cukai untuk membiayai kepentingan proyek fisik. Padahal proyek fisik itu sudah memiliki anggaran sendiri dari Pemkab Nganjuk melalui APBD tahun 2010, sehingga terjadi anggaran ganda dalam satu proyek. Sedangkan anggaran semestinya digunakan untuk belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dampak dari rokok, justru dialokasikan untuk menutup kebutuhan pembangunan fisik, selain diselewangkan untuk kepentingan pribadi.⁶³

Kendati DBH CTH disetor kepada pemerintah, para petani tembakau berulang kali menghadapi persoalan tata niaga dan kesepakatan pembelian yang diingkari pengusaha tembakau dan pabrikan. Perjuangan petani dan buruh tembakau Lombok, khususnya Lotim, membawa hasil kesepakatan usai digelar pertemuan mereka dengan Gubernur NTB dan seluruh bupati penghasil tembakau pada 4 September 2012. Kesepakatan ini menyatakan, sebanyak 23 perusahaan tembakau bersedia membeli tembakau dari petani baik petani binaan maupun petani swadaya.⁶⁴ Namun, pada Oktober 2012, ratusan petani dan buruh tembakau swadaya dari empat kecamatan di Lotim – Kecamatan Keruak, Sakbar, Sakti dan Jerowaru – menggelar aksi demo di Kantor Bupati. Mereka meminta Bupati supaya memfasilitasi dan menjadi makelar dalam menjual tembakau petani kepada perusahaan, karena tembakau mereka tidak dijalankan

⁶⁰ Lihat “2013, Pengusutan Cukai Tembakau Karanganyar Ditarget Rampung,” *wonogiripos.com*, Senin, 07 Januari 2013.

⁶¹ Lihat “Telusuri Dugaan Penyelewengan Dana Bagi Hasil Cukai tembakau,” *indonesiatobacco.com*, Jumat, 08 April 2011.

⁶² Lihat “Diselewangkan, Dana Cukai Tembakau,” *kompas.com*, Sabtu, 7 April 2012 | 05:11 WIB; dan “Polisi Kantongi Tersangka Korupsi Dana Cukai,” *jurnas.com*, Jumat, 25 Mei 2012.

⁶³ Lihat “Aroma Penyelewengan di RSUD,” *surabayapost.co.id*, Jumat, 10 Agt 2012 | 10:24 WIB.

⁶⁴ Lihat “Seluruh Perusahaan Sepakat Membeli Tembakau Petani,” *gomong.com*, Selasa, 4 September 2012. Pemerintah Provinsi akan menghidupkan jembatan timbang, sehingga seluruh tembakau yang keluar dari Pulau Lombok dapat termonitor.

perusahaan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam instruksi Gubernur NTB.⁶⁵ Dua hari sebelumnya, ratusan petani dan buruh tembakau Lotim ini telah menekan PT Export Leaf Indonesia (ELI) di wilayah Prabayar, Kecamatan Terara, dengan melempari gudang tembakau perusahaan tersebut dan memblokir jalan. Mereka juga menuntut PT ELI membeli 1.500 bal atau 30 ton tembakau hasil produksi petani swadaya.⁶⁶

Relasi yang kurang harmonis dalam tata niaga antara petani di satu pihak dengan perusahaan tembakau dan pabrik rokok di pihak lain, pada umumnya merugikan petani tembakau. Kasus-kasus ini juga muncul di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bupati Probolinggo turun tangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gudang tembakau, yaitu gudang PT HM Sampoerna, Bentoel, Nojorono, dan Gudang Garam, yang berada di Kecamatan Paiton, serta gudang Sadana dan Jaya Abadi di Kecamatan Kraksaan. Bupati mengancam akan mencabut izin pergudangan tersebut bila membeli tembakau dari luar Probolinggo.⁶⁷

Soal harga tembakau yang dijual, petani tembakau Pamekasan, Madura, mempunyai perhitungannya atas *break event point* (BEP) atau biaya produksi tembakau petani per kilogramnya yang mencapai Rp 26.000, mulai pratanam sampai panen. Pemerintah Kabupaten Pamekasan turun tangan, dengan menetapkan harga jual tembakau kepada pihak pabrikan di atas Rp 26.000. Namun petani mengeluhkan, karena masih ada saja perwakilan pabrikan yang melakukan pembelian tembakau jauh di bawah harga yang ditetapkan, bahkan sampai jatuh ke titik Rp 8.000 per kilogram. Dengan situasi ini Bupati Pamekasan mengancam akan menutup gudang pabrikan untuk melindungi petani.⁶⁸

Puluhan petani tembakau dan warga Sumenep menuding rendahnya harga tembakau berkisar hanya Rp 2.000 – Rp 11.000 per kilogram karena permainan gudang. Menghadapi persoalan ini mereka melakukan unjuk rasa dan protes ke perwakilan Gudang Garam Kediri di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.⁶⁹ Tekanan terhadap mengimpor PT Gudang Garam di Bojonegoro juga sama, karena diminta untuk membeli tembakau pada musim tanam 2012 supaya seluruh produksi tembakau setempat terserap baik jenis tembakau Virginia Voor Oogst (VO) maupun Jawa. Sebaliknya, PT Djarum Kudus dan Nojorono akan melakukan pembelian tembakau Virginia VO sebanyak 5.800 ton, PT Bentoel Prima 175 ton, PBU 300 ton,

⁶⁵ Lihat “Demo, Petani Tembakau Minta Bupati Jadi Makelar,” *gomong.com*, Rabu, 17 Oktober 2012. Dalam aksinya ini, para pendemo juga menyorot aksi petugas lapangan yang diduga bermain dalam jual beli rekomendasi dengan memungut uang Rp 150.000 sampai Rp 200.000. Usai demo di Kantor Bupati, mereka bergerak menuju wilayah Terara dan Sikur untuk melakukan aksi yang sama bersama para petani lainnya untuk aksi gabungan di kantor perusahaan.

⁶⁶ Lihat “PT. ELI Diamuk Petani Tembakau,” *gomong.com*, Senin, 15 Oktober 2012. Perusahaan tembakau yang didemo itu diduga telah melakukan permainan di lapangan, sehingga dianggap sebagai salah satu penyebab petani dirugikan dengan permainan pihak perusahaan, apalagi dengan tak dilakukannya pembelian.

⁶⁷ Lihat “Beli Tembakau dari Luar, Bupati Ancam Tutup Gudang Tembakau,” *kompas.com*, Senin, 27 Agustus 2012 | 18:15 WIB. Dalam sidak ini Bupati Hasan Aminuddin menyertakan Kapolres AKBP Gatot Soegeng, Ketua PN Taufan Mandala, Ketua DPRD Achmad Baidawi dan sejumlah kepala dinas.

⁶⁸ Lihat “Beli Tembakau di Bawah BEP, Gudang Terancam Ditutup,” *kompas.com*, Senin, 6 Agustus 2012 | 17:01 WIB.

⁶⁹ Lihat “Harga Tembakau Rendah, Petani Demo Gudang,” *beritajatim.com*, Kamis, 30 Agustus 2012 11:22:25 WIB. PT Gudang Garam Tbk Kediri di Sumenep, berdasarkan ketentuan pabrik, mematok harga pembelian tembakau rajangan terendah Rp 21.000 dan tertinggi Rp 33.000 per kilogram.

IITC 20 ton, PT Pagi 35 ton, dan UD Supiyanto 35 ton. Sejumlah pabrik juga akan melakukan pembelian tembakau Jawa, dengan jumlah total sekitar 950 ton.⁷⁰

Ancaman demo ke pabrik rokok juga dikeluarkan APTI Kabupaten Kendal. Karena pabrik rokok enggan membeli tembakau mereka. Padahal, pada pertengahan Agustus 2012, para petani sudah mulai memanen tembakau. Ada sekitar 6 gudang tembakau di Kendal, antara lain gudang tembakau milik Djarum, Gudang Garam, Sampoerna, Sukun, Nojorono dan Bentoel. Namun, sudah lima tahun terakhir, Sampoerna tidak membeli tembakau petani daerah ini dan menuntut gudangnya ditutup. Kondisi ini mengancam sekitar 22.000 orang yang menggantungkan hidupnya dari tembakau.⁷¹

Dalam kaitannya dengan penurunan atau kurang stabilnya harga tembakau, Bupati Bojonegoro Suyoto menyatakan ada tiga faktor, yaitu kualitas dari tembakau, harga tembakau dalam komoditas internasional, serta kebutuhan pabrik. Penurunan harga ini juga terjadi di daerah lain, seperti Lumajang, Madura, Wonosobo, Temanggung dan beberapa wilayah lain di Indonesia.⁷² Namun, dia tidak memasukkan permainan gudang sebagai salah satu faktornya.

Namun, persoalan permainan harga dan pemanfaatan DBH CTH telah menjadi perhatian petani. Agustus 2012, STN NTB kembali mempersoalkan permainan harga tembakau, dengan mendatangi Kantor DPRD NTB untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi para petani Lombok Timur dan Lombok Tengah. Mereka mempersoalkan hasil panen tembakau mereka yang tidak mau dibeli oleh pihak perusahaan, bahkan ditambah lagi dengan harganya sangat rendah. Mereka pemerintah daerah ikut turun tangan dalam mengatasi persoalan tata niaga yang bersifat diskriminatif antara petani binaan dan swadaya. Perusahaan pemasok tembakau hanya membeli dari petani binaan. Dari hasil rapat terbatas ini diketahui ada empat perusahaan yang tidak melakukan pembelian, selain pengurangan stok pabrik akibat rasionalisasi stok.⁷³ Tiga bulan kemudian, pada November 2012, puluhan petani tembakau dari Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Barat (Lobar) mengepung kantor Gubernur NTB. Mereka mempersoalkan hasil panen tembakau mereka tidak dibeli pihak perusahaan dengan berbagai alasan akal-akalan belaka. Mereka menyarankan, dana bagi hasil cukai tembakau itu bisa menjadi solusi pemerintah untuk membeli tembakau petani.⁷⁴

b. Menentang RUU dan RPP Tembakau

Tahun 2010, pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau. RPP mendapat reaksi dari mereka yang terlibat dalam aktivitas ekonomi tembakau, khususnya

⁷⁰ Lihat "PT Gudang Garam Diminta Tetap Beli Tembakau Petani Bojonegoro," *bisnis-jatim.com*, Selasa, 23 Mei 2012 | 4:49 pm. Diproyeksikan area tanaman tembakau Virginia VO dan Jawa mencapai 10.000 hektare.

⁷¹ Lihat "Petani Tembakau Kendal Ancam Demo Pabrik Rokok," *kompas.com*, Senin, 27 Agustus 2012 | 18:06 WIB. Kendal terkenal dengan produksi tembakau jenis Weleri.

⁷² Lihat "Tiga Faktor Turunnya Harga Tembakau," *beritajatim.com*, Rabu, 05 September 2012 09:08:20 WIB.

⁷³ Lihat "Petani Tembakau Lotim dan Loteng Datangi Kantor DPRD NTB," *mataramnews.com*, Senin, 27 Agustus 2012 17:25.

⁷⁴ Lihat "Petani Tembakau Kepung Kantor Gubernur NTB," *primadonalombok.blogspot.com*, Jumat, 09 November 2012. Selama ini para petani tembakau merasa ada permainan yang dilakukan oleh oknum Petugas Lapangan (PL) dalam membeli hasil panen tembakau. Dimana ada dugaan oknum PL membeli tembakau petani dalam bentuk memberikan kartu dengan nilai Rp 5 juta untuk 3 ton dan juga Rp 300 ribu untuk berat 50-60 kg per bal. Permainan makelar juga sarat dalam penjualan hasil panen tembakau ini karena dari kuota 12 ribu ton untuk petani binaan dan 2.500 ton kuota bagi petani swadaya 2.500 ton ini diduga sering dipermainkan karena tidak terserap semua.

petani dan buruh tembakau. Pada 1 Maret, Sekitar 300 petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berdemo di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurut mereka, tembakau telah menghidupi mereka, sehingga menentang RPP Tembakau untuk disahkan, karena dapat mengancam sumber penghidupan mereka.⁷⁵ Tahun sebelumnya, protes sekitar 20.000 petani dan buruh tembakau pernah digelar untuk menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan di Temanggung.⁷⁶

Atas desakan Serikat Petani Nasional (STN) NTB, maka pada September 2011, Gubernur NTB mulai menyadari kontribusi pajak yang bersumber dari mata rantai perkebunan dan industri pengolahan tembakau. Karena daerahnya selain banyak petani tembakau, juga menikmati dana bagi hasil cukai tembakau yang diterima lebih Rp 100 miliar setahun. STN NTB mempersoalkan pencantuman tembakau sebagai zat adiktif. Dengan pertimbangan ini pula Gubernur NTB menolak RUU Tembakau yang dikaitkan dengan zat adiktif. Gubernur meminta supaya DPR harus hati-hati dalam menyusun tersebut.⁷⁷

Tahun 2011, pada 10 Mei, ratusan orang yang tergabung dalam Komunitas Kretek Jakarta – berasal dari kalangan petani, buruh tembakau dan pedagang asongan – menggeruduk Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menolak RPP Tembakau. Mereka memandangi RPP ini mengancam nafkah jutaan petani, buruh tembakau dan pedagang rokok yang tersebar di seluruh Nusantara. Dalam aksi protes, mereka mengusung sebatang patung rokok kretek raksasa sebagai simbol yang bertuliskan “Tolak RPP Tembakau”. Mereka juga membentangkan poster dengan tulisan, “Negara Seharusnya Melindungi Buruh-Tani dan Asongan”.⁷⁸ Tahun sebelumnya, ribuan petani dan buruh tembakau mengusung dan menyulut rokok raksasa sepanjang 3 meter dengan diameter 50 cm ketika mereka mendatangi Gedung DPR di Senayan.⁷⁹

Pada Juli 2011, sekitar 3.000 petani dan buruh tembakau dari Kabupaten Temanggung – berasal dari 14 kecamatan dengan menumpang 59 bus – berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa menolak RPP Tembakau. Sejumlah perempuan petani tembakau sudah berangkat lebih dulu menggelar aksi mogok makan di Jakarta. Rombongan petani dan buruh tembakau ini juga membawa grup kesenian dari Kecamatan Kledung dan Bulu. Kelompok kesenian ini nantinya akan dipentaskan untuk memberi semangat peserta aksi. APTI menyatakan, bakal melakukan beberapa aksi lagi, antara lain tidak akan membayar pajak dan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu bila RPP disahkan.⁸⁰

⁷⁵ Lihat “Tolak Revisi RPP Tembakau, 300 Petani Demo Kemenkes,” *detik.com*, Senin, 01 Maret 2010 11:11 WIB.

⁷⁶ Lihat “20.000 Petani Tembakau Tolak RUU Tembakau,” *kompas.com*, Senin, 16 Februari 2009 | 20:21 WIB.

⁷⁷ Lihat “Gubernur NTB Tolak Tembakau Dikaitkan Zat Adiktif,” *tempo.co*, Jumat, 16 September 2011 | 18:59 WIB. Hasil penelitian Indonesia Berdikari menyatakan, sampai 2007, dari 16.158 hektare lahan di Lombok menghasilkan 29 ribu ton tembakau virginia atau 78 persen dari kebutuhan tembakau nasional. Pada 2008 areal yang digarap meningkat menjadi 22.019 hektare yang menghasilkan 45.534 ton atau sekitar 90 persen dari kebutuhan nasional. Selain itu, lebih dari 10 juta orang di Indonesia terlibat secara langsung dari industri tembakau dan rokok. Sumbangan cukai dari industri rokok pada 2010, Rp 60,7 triliun. Jauh lebih besar dibanding seluruh penerimaan pemerintah dari sumber daya alam berupa tambang yang hanya sebesar Rp 7,1 triliun.

⁷⁸ Lihat “Tolak RPP Tembakau, Ratusan Petani Geruduk Kemenkes,” *detik.com*, Selasa, 10 Mei 2011 12:17 WIB.

⁷⁹ Lihat “Massa Petani Tembakau Sulut Rokok Raksasa di Depan DPR,” *detik.com*, Senin, 01 Maret 2010 11:26 WIB.

⁸⁰ Lihat “Ribuan Petani Tembakau Temanggung Demo ke Jakarta,” *antaranews.com*, Selasa, 12 Juli 2011 18:37 WIB.

Sebanyak ratusan orang yang tergabung dalam APTI dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Kendal, mendatangi kantor Kementerian Kesehatan dan Gedung DPR RI di Jakarta. Mereka – berasal dari 11 kecamatan penghasil tembakau dan empat kecamatan penghasil cengkeh – menolak RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Hasil Tembakau terhadap Kesehatan, serta RPP Tembakau. Bupati Widya Kandi Susanti dan Ketua DPRD Kendal juga memberikan dukungan kepada petani, termasuk akan menyurati Presiden dan DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap RPP Tembakau.⁸¹

Pada November 2011, APTI Jawa Tengah mengancam akan memblokade jalan akses di desa-desa yang menjadi sentra-sentra tembakau bermutu tinggi. RPP Tembakau mereka pandang sebagai upaya mengganggu kehidupan mereka, sehingga mereka menentangnya.⁸² Ancaman APTI bukanlah isapan jempol belaka, karena para petani dan buruh tembakau kembali menggelar unjuk rasa pada Desember 2011. Ribuan petani tembakau di Keresidenan Kedu – Temanggung, Magelang, Wonosobo, Kebumen, dan Purworejo – menggelar aksi unjuk rasa menolak RPP Tembakau. Mereka memblokade jalur utama dari Temanggung menuju Wonosobo, tepatnya di Tugu Galih, Pasar Paraan, Temanggung. Sebelum orasi dilakukan, massa telah melakukan pembakaran ban dengan cara menyiram bensin kemudian menyulutnya dengan api. Massa meneriakkan yel-yel penolakan RPP, seperti “Tolak RPP sekarang juga!” Spanduk juga dibentangkan, “Kretek simbol kedaulatan bangsa, RPP Tembakau = PHK massal buruh kretek, tolak!”⁸³ Pada 22 Desember, juga berlangsung demo turun ke jalan yang diikuti ribuan petani dan buruh tembakau yang tergabung dalam KNKP Jateng di Kendal, Magelang, Kudus, dan Boyolali, selain di Temanggung.⁸⁴

Pada Juli 2012, APTI Temanggung mengerahkan ribuan petani dan buruh tembakau di kabupatennya untuk bergabung dengan petani dan buruh dari Wonosobo, Kendal, Boyolali, Jawa Timur, dan Jawa Barat di Jakarta untuk melakukan demonstrasi menolak rencana pengesahan RPP Tembakau. Mereka berangkat dengan menggunakan sekitar 100 bus dari Jawa Tengah untuk mengangkut massa ke Jakarta. Masing-masing dari mereka rela mengeluarkan uang Rp 200.000 per orang, sedangkan mereka yang tidak bisa ikut demo ke Jakarta, bersedia membantu secara suka rela Rp 50.000 per orang.⁸⁵ Mereka yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNKP) dan APTI belum puas dengan berdemo di Kemenkes dan Kemenko Kesra, sehingga menyambangi juga Gedung DPR untuk meminta audiensi.⁸⁶

Ribuan petani tembakau se-Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan Pendopo Bupati Pamekasan, pada 22 Mei 2012. Mereka mendesak pemerintah membatalkan RUU dan RPP Tembakau. Memang tidak melarang petani menanam tembakau, namun berbagai kebijakan terkait dengan pengendalian tembakau bagi kesehatan bakal berdampak merugikan pabrik rokok kecil di Pamekasan, dengan jumlah lebih dari 300 unit. Mereka pun terancam gulung tikar dan

⁸¹ Lihat “Petani Tembakau Kendal ‘Serbu’ Jakarta,” *kompas.com*, Rabu, 13 Juli 2011 | 16:39 WIB.

⁸² Lihat “Petani Tembakau Ancam Blokade Jalan,” *kompas.com*, Selasa, 8 November 2011 | 12:44 WIB.

⁸³ Lihat “Ribuan Petani Demo di Temanggung, Tolak RPP Tembakau,” *detik.com*, Kamis, 22 Desember 2011 11:03 WIB. RPP Tembakau ini mengatur larangan penayangan iklan rokok, sponsor acara, kegiatan CSR, larangan penjualan rokok secara eceran, dan pada orang di bawah 18 tahun serta wanita hamil.

⁸⁴ Lihat “Ribuan Petani Tembakau Jateng Turun ke Jalan,” *kompas.com*, Kamis, 22 Desember 2011 | 07:24 WIB.

⁸⁵ Lihat “Petani tembakau Temanggung menuju Jakarta,” *bisnis-jateng.com*, Senin, 2 Juli 2012.

⁸⁶ Lihat “Petani Tembakau Jateng Sambangi DPR,” *suaramerdeka.com*, Rabu, 04 Juli 2012 | 18:46 wib.

menyebabkan PHK. RPP Tembakau juga dianggap menguntungkan perusahaan rokok besar dan asing.⁸⁷

APTI Madiun juga menyatakan menolak RPP Tembakau dengan memasang spanduk di 25 titik dan lima baliho besar.⁸⁸ APTI Ponorogo tidak mau ketinggalan menentang RPP Tembakau yang melibatkan dukungan pemerintah setempat.⁸⁹ Gubernur Jawa Timur pun menolak pengesahan RPP itu.⁹⁰ KNPk dan APTI di Surabaya terus menunjukkan sikap menentang RPP Tembakau. Mereka menilai banyak pasal dari RPP yang mengancam keberlangsungan hidup para petani tembakau. KNPk dan APTI menyerukan semua pihak sadar terhadap ancaman masif dan terstruktur pada kelangsungan hidup para petani tembakau Indonesia. Seruan itu terangkum dalam seminar sehari yang bertajuk, “Mengawal Regulasi untuk Kelestarian Tembakau dan Kretek sebagai Warisan Budaya”, pada 16 Juli 2012. Dalam seminar ini terungkap pula perihalan kontribusi tembakau dan industri rokok dalam memperkerjakan 24,4 juta orang.⁹¹

Para petani di Madiun juga menentang RPP Tembakau, karena dianggap mencekik petani dan dapat menggulung usaha tani tembakau.⁹² Senada dengan APTI, RPP Tembakau itu dipandang dapat menghancurkan kelangsungan hidup industri tembakau dari hulu ke hilir. RPP lebih banyak mengatur tentang tata niaga, standarisasi produk, iklan, dan pengenaan cukai yang tinggi. APTI beralasan bahwa karena banyak domain, seharusnya dilakukan melalui UU, bukan PP. Sikap APTI ini direpson Presiden dengan menyatakan, semuanya akan dipertimbangkan, namun sambil menekankan tujuan mulia menyehatkan generasi muda.⁹³ Namun, KNPk memperkirakan, dari hulu hingga hilir, sekitar 35 juta orang bakal menggangu.⁹⁴ Sementara dari Minahasa, Sulawesi Utara, perwakilan petani dan buruh cengkeh memprotes rencana Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk segera melakukan Pembahasan dan Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Dilarang Merokok.⁹⁵

Usai PP Tembakau disahkan, petani dan buruh tembakau kembali melancarkan protes. Pada 22 Januari 2013, ribuan petani dan buruh tembakau yang tergabung dalam APTI di Kabupaten Klaten menolak PP No. 109/2012 tersebut.⁹⁶ Puluhan orang yang tergabung dalam STN NTB kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB pada 17 Januari 2013 di Mataram sebagai protes atas disahkannya PP Tembakau, karena perusahaan tembakau kian enggan membeli tembakau petani, apalagi pemerintah masih membolehkan impor tembakau dan bahkan

⁸⁷ Lihat “Petani Pamekasan Tolak RPP Tembakau,” *tempo.co*, Selasa, 22 Mei 2012 | 15:41 WIB. Sekitar 70 persen dari 900.000 warga Pamekasan adalah petani tembakau.

⁸⁸ Lihat “Petani Madiun Tolak RPP Tembakau,” *kompas.com*, Selasa, 17 Juli 2012 | 11:50 WIB. Jumlah petani tembakau di Madiun mencapai 1.500 orang, dengan luas areal tanaman saat ini sekitar 950 hektar. Madiun memiliki potensi tanaman tembakau seluas 5.000 hektar.

⁸⁹ Lihat “Seribu Petani Ponorogo Tolak RPP Tembakau,” *kabarindonesia.com*, Selasa, 31 Juli 2012, 21:23:57 WIB.

⁹⁰ Lihat “Rugikan Petani, Pak Dhe Karwo Tolak RPP Tembakau,” *centroone.com*, Kamis, 26 Juli 2012 - 16.38 WIB.

⁹¹ Lihat “Petani Tembakau Jatim Tolak RPP Tembakau,” *tribunnews.com*, Senin, 16 Juli 2012 13:25 WIB.

⁹² Lihat “RPP Tembakau Dinilai Mencekik Petani,” *jagadpos.com*, Sabtu, 25 Agustus 2012 | 22:00.

⁹³ Lihat “APTI Bersikukuh RPP Tembakau Matikan Industri,” *kompas.com*, Rabu, 1 Agustus 2012 | 20:46 WIB.

⁹⁴ Lihat “KNPK: 35 Juta Orang Terancam Mengganggu,” *republika.co.id*, Selasa, 03 Juli 2012, 18:15 WIB. Ada pula sebanyak 2,1 juta petani tembakau di seluruh Indonesia, selain buruh tembakau, buruh cengkeh, pekerja rajang, buruh rokok, pengecer dan sebagainya.

⁹⁵ Lihat “Petani Cengkih di Minahasa Siap Demo,” *seputarkawanua.com*, Senin, 20 Agustus 2012.

⁹⁶ Lihat “Tolak PP Tembakau, Ribuan Petani Tembakau Klaten Demo,” *solopos.com*, Selasa, 22 Januari 2013 10:47 WIB; “Ribuan Petani Klaten Protes Aturan Ketat Tembakau,” *tribunnews.com*, Selasa, 22 Januari 2013 21:24 WIB; dan “Unjuk Rasa, 2000 Petani Tembakau Manisrenggo Dilepas Camat,” *indonesiatobacco.com*, Rabu, 23 Januari 2013.

membebasakan biaya masuk tembakau impor sejak Juli 2012.⁹⁷ APTI NTB bersama KNPK juga memprotes dengan melayangkan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Agung (MA) terhadap PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.⁹⁸

Bentuk protes petani dan buruh tembakau diekspresikan dengan melakukan pembakaran hasil panen mereka sebagaimana yang ditunjukkan lebih 200 orang yang tergabung dalam APTI dan KNKP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Donoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, pada 19 Januari 2013. Mereka membakar tembakau seberat satu kuintal sebagai protes atas disahkan PP Tembakau.⁹⁹ Namun seminggu sebelumnya, pada 12 Januari, ribuan petani dan buruh tembakau di Temanggung sudah melakukan pembakaran tembakau dan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai simbol perlawanan mereka terhadap pemerintah di Desa Campurejo, Kecamatan Tretep.¹⁰⁰ Temanggung dilanda kembali oleh demo petani dan buruh tembakau tiga hari sesudahnya di depan Balai Desa Wonosari.¹⁰¹ Disusul lagi pada 22 Januari, sedikitnya 2.500 petani dan buruh tembakau kembali berunjuk rasa di Desa Banaran, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, dengan membakar sepeda motor dan foto SBY.¹⁰²

Pada hari yang sama dengan demo di Temanggung, namun tempat yang berbeda, giliran sekitar 5.000 petani dan buruh tembakau di Klaten yang memprotes pengesahan PP Tembakau, dengan mengekspresikan pembakaran tembakau dan meminta Bupati Klaten mendukung tuntutan mereka.¹⁰³ Ribuan petani dan buruh tembakau di Boyolali tidak mau ketinggalan, dengan melakukan demo untuk menolak kebijakan yang sama dalam pengendalian tembakau. Mereka

⁹⁷ Lihat "Serikat Tani NTB Unjuk Rasa Terkait PP Tembakau," *mataram.antaranews.com*, Kamis, 17 Januari 2013 18:44.

⁹⁸ Lihat "Petani Tembakau NTB Gugat PP Tembakau," *metrotvnews.com*, Senin, 14 Januari 2013 | 01:25 WIB. NTB merupakan daerah terbesar penghasil tembakau virginia yang sudah dibudidayakan sejak lebih dari 40 tahun lalu dan sekarang tercatat sebanyak 12.714 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan mencapai 34 ribu hektare tersebar dominan di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah.

⁹⁹ Lihat "Protes, Ratusan Petani di Yogya Bakar Tembakau," *tempo.co*, Sabtu, 19 Januari 2013 | 12:17 WIB; dan "Petani Bakar Satu Kuintal Tembakau Saat Demo," *jogja.tribunnews.com*, Sabtu, 19 Januari 2013 12:22 WIB. Jumlah petani tembakau di DIY lebih dari 12.500 orang. Mereka menghidupi seratusan ribu keluarga mereka. Kontribusi tembakau dari Daerah Istimewa Yogyakarta untuk nasional 10 persen. Jenis tembakau lokal di provinsi ini antara lain bligon, grompol, kedsuli dan kemloko untuk rokok *kretek*. Dalam unjuk rasa, mereka menggelar orasi sambil membentangkan berbagai spanduk tuntutan. Mereka juga memajang foto Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang dianggap sebagai tokoh sentral lahirnya PP Tembakau sebelum ditaruh di atas tumpukan satu kuintal tembakau yang dibakar.

¹⁰⁰ Lihat "Tuntut PP Dicabut, Ribuan Petani Bakar Tembakau dan Foto Presiden," *beritasatu.com*, Minggu, 13 Januari 2013 | 03:33; dan "Petani Tembakau Temanggung Bakar Foto SBY," *banjarmasin.tribunnews.com*, Sabtu, 12 Januari 2013 | 21:56 Wita.

¹⁰¹ Lihat "Petani Tembakau Temanggung Demo Lagi," *jogja.tribunnews.com*, Selasa, 15 Januari 2013 16:40 WIB.

¹⁰² Lihat "Tolak PP Tembakau: 2.500 Petani Aksi Bakar Sepeda Motor & Foto SBY," *daerah.sindonews.com*, Rabu, 23 Januari 2013 - 16:07 WIB.

¹⁰³ Lihat "5.000 Petani Bakar Tembakau Tolak PP Tembakau," *tribunnews.com*, Selasa, 22 Januari 2013 18:47 WIB. Harga tembakau memang anjlok, termasuk jenis tembakau mole yang berasal dari Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, berdasarkan data 2012 dari Dinas Pertanian Klaten, produksi komoditas tembakau di Klaten terbagi menjadi dua, yaitu tembakau asepan dan rajang. Untuk tembakau asepan, luas lahan panen sebesar 1.049 hektar dengan total hasil produksi 2.243,71 ton tembakau kering. Sedangkan tembakau rajang memiliki luas lahan total 1.401,45 hektar yang menghasilkan 1.059,869 ton tembakau kering.

juga meminta dukungan Bupati dan jajaran DPRD Boyolali.¹⁰⁴ APTI dan KNPK di Bali juga menolak PP Tembakau.¹⁰⁵

Setelah petani dan buruh tembakau di lereng Gunung Prahau dan Sumbing menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan PP No. 109/ 2012, giliran 15.000 petani dan buruh tembakau dari lereng Sindoro yang melakukan aksi serupa di lapangan Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, pada 19 Februari 2013. Para demonstran ini juga mengarak keranda, keranjang tembakau, serta mengusung berbagai spanduk antara lain bertuliskan, “Tembakau Nafas Kami Nyawa Kami” dan “Tembakau Atau Mati!” Ketua MUI Temanggung ikut ambil bagian dalam aksi ini serta memberikan tausiyah keagamaan untuk menyabarkan demonstran yang sempat memanas.¹⁰⁶

Protes-protes petani dan buruh tembakau memperoleh dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sedang menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Impor dan Pemberdayaan Petani Tembakau untuk melindungi petani dan industri tembakau. Semula rancangan peraturan ini merupakan inisiatif dari anggota DPRD Jatim, namun kemudian pemerintah pun menyambut baik karena hal itu bertujuan melindungi industri kretek dan 15 juta lapangan kerja di daerahnya.¹⁰⁷ Selain Pemprov, DPRD Jatim juga ingin sama-sama terkesan untuk melindungi petani dan pabrik *kretek*.¹⁰⁸

c. Menolak fatwa haram

Rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram merokok,¹⁰⁹ sudah menjadi perbincangan di kalangan kyai Nahdlatul Ulama (NU).¹¹⁰ Berbeda dengan MUI, kalangan kyai NU di Kabupaten Jember menilai, mengharamkan rokok lebih banyak menimbulkan ‘mudharat’ (kerugian) daripada manfaatnya. Karena itu, mereka meminta MUI tidak gegabah membuat fatwa dan sebaiknya kaji lebih dalam dari berbagai aspek seperti aspek sosial dan ekonomi seperti nasib petani dan buruh tembakau maupun buruh pabrik rokok.¹¹¹ Rencana ini juga menimbulkan reaksi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), dengan

¹⁰⁴ Lihat “Ribuan Petani Tembakau di Boyolali Demo!” *solopos.com*, Rabu, 30 Januari 2013 12:00 WIB. APTI Boyolali mengungkapkan, sekitar 14.000 hingga 15.000 petani yang menggantungkan hidupnya dari tembakau.

¹⁰⁵ Lihat “Petani Tembakau Tolak Peraturan Pemerintah,” *bisnisbali.com*, Jumat, 18 Januari 2013; dan “KNPK dan APTI Bali Tolak PP 109/2012,” *metroballi.com*, Kamis, 17 Januari 2013.

¹⁰⁶ Lihat “15 Ribu Petani Tembakau Gunung Sindoro Demo Tolak PP 109,” *suaramerdeka.com*, Rabu, 20 Februari 2013 | 01:45 wib.

¹⁰⁷ Lihat “Jawa Timur Susun Perda Perlindungan Tembakau,” *tempo.co*, Rabu, 01 Agustus 2012 | 10:37 WIB. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur mengungkapkan, jumlah industri rokok dan tembakau Jawa Timur lama-kelamaan menyusut. Pada 2007, jumlahnya mencapai 2.344 industri besar ataupun kecil, kemudian menjadi 1.100 industri pada 2010, dan saat ini menyusut menjadi 876 industri. Penyusutan ini terjadi karena adanya berbagai aturan, mulai dari pembatasan luas area pabrik hingga masuknya rokok impor. Namun, sumbangan dari cukai rokok terhadap penerimaan negara mencapai Rp 77 triliun pada 2011 dan diperkirakan melonjak menjadi Rp 80 triliun pada 2012. Jawa Timur menyumbang 60 persen.

¹⁰⁸ Lihat “Lawan RPP Tembakau, DPRD Jatim Siapkan Perda Pro Petani,” *lensaindonesia.com*, Rabu, 23 Januari 2013 14:08 WIB.

¹⁰⁹ Lihat “MUI Siapkan Fatwa Haram untuk Rokok,” *kompas.com*, Selasa, 12 Agustus 2008 | 13:08 WIB.

¹¹⁰ Lihat “Gus Solah: Rokok Itu Makruh, Kalau Haram Terlalu Jauh,” *detik.com*, Kamis, 22 Januari 2009 11:09 WIB.

¹¹¹ Lihat “Kyai Jember Tolak Fatwa Anti Rokok,” *tempo.co*, Kamis, 14 Agustus 2008 | 15:42 WIB.

mendatangi MUI Jatim pada 29 Agustus 2008. Mereka meminta MUI tidak mengeluarkan fatwa pengharaman rokok.¹¹²

Namun demikian, MUI meneruskan rencananya. MUI mengeluarkan fatwa tentang rokok pada Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa yang diselenggarakan pada Januari 2009.¹¹³ Sidang komisi Ijtima Ulama Fatwa III MUI yang membahas fatwa rokok tidak menemukan titik temu. Komisi hanya menghasilkan 4 alternatif fatwa rokok dan salah satunya adalah rokok diharamkan dalam kondisi tertentu.¹¹⁴ MUI mengeluarkan fatwa haram untuk kegiatan merokok di kalangan anak-anak dan perempuan hamil.¹¹⁵ Fatwa ini juga didukung oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Komisi VIII yang juga Anggota Kaukus Parlemen Untuk Pengendalian Dampak Tembakau DPR, dengan menilai fatwa MUI sebagai langkah yang tepat.¹¹⁶

Maka, petani tembakau NTB tidak hanya menghadapi kebijakan pemerintah, namun juga fatwa haram merokok hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat, 23-26 Januari 2009. APTI NTB menentang fatwa MUI yang memunculkan kesan seakan-akan usaha tani tembakau dikategorikan haram dan dikritik sebagai fatwa yang gegabah. Karena fatwa ini dapat mengancam usaha tani tembakau di Pulau Lombok yang mencapai 16.809 kepala keluarga (KK) dan hasil produksinya merupakan penyumbang terbesar bahan baku rokok nasional. Masa produksinya selama lima bulan terlibat sebanyak 23.000 orang dan 15 unit perusahaan pengelola tembakau sebagai mitra petani dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 154.000 orang.¹¹⁷

Fatwa haram merokok yang muncul di Padang Panjang itu mengundang reaksi dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Fatwa yang mengharamkan merokok dipandang berpotensi menaikkan angka pengangguran dan sangat merugikan. Dalam kaitan fatwa ini, Kudus menjadi salah satu daerah penting dalam industri rokok *kretek* – terbesar di Jawa Tengah – sehingga MUI dan DPRD Kudus ambil bagian dalam memprotes atau menolak pengharaman merokok. MUI Kudus mempertimbangkan bahwa Kudus merupakan daerah berbasis industri rokok, di mana masyarakatnya sangat menggantungkan denyut perekonomiannya dari rokok di mana sedikitnya ada 100.000 pekerja di pabrik-pabrik rokok. Bila diharamkan, bakal menimbulkan dampak sosial yang keras.¹¹⁸ Dengan menimbang situasi inilah sehingga masyarakat, pengusaha rokok, dan

¹¹² Lihat “Petani Tembakau Datangi MUI,” *kompas.com*, Jumat, 29 Agustus 2008 | 14:31 WIB.

¹¹³ Lihat “MUI Keluarkan Fatwa Rokok Januari 2009,” *kompas.com*, Senin, 24 November 2008 | 17:09 WIB.

¹¹⁴ Lihat “Rokok Diusulkan Haram dalam Kondisi Tertentu,” *detik.com*, Minggu, 25 Januari 2009 13:52 WIB.

¹¹⁵ Lihat “MUI: merokok haram,” *bbc.co.uk*, Minggu, 25 Januari 2009 - 13:08 GMT.

¹¹⁶ Lihat “PKS Apresiasi Fatwa Haram Rokok,” *kompas.com*, Selasa, 27 Januari 2009 | 18:05 WIB.

¹¹⁷ Lihat “Petani Tembakau NTB Tolak Fatwa Haram Merokok,” *mataram.antaranews.com*, Selasa, 27 Januari 2009 21:08. Sampai 2007 produksi tembakau virginia pada areal seluas 16.158 hektare (ha) di Pulau Lombok telah mencapai 29 ribu ton atau 78 persen dari total kebutuhan tembakau virginia nasional sebanyak 50 ribu ton/tahun. Pada musim tanam tahun 2008, areal tanam tembakau virginia yang digarap mencapai 22.019 ha agar dapat memproduksi sebanyak 45.534 ton atau sekitar 90 persen kebutuhan tembakau virginia nasional. Perluasan areal tanam tembakau virginia itu untuk memaksimalkan potensi areal tanam tembakau virginia di Pulau Lombok yang mencapai 58.516 ha. Sebanyak 10.098 ha berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, 19.263 ha di Lombok Tengah dan 29.154 ha di Lombok Timur.

¹¹⁸ Lihat “Fatwa Haram Rokok Naikkan Pengangguran,” *Suara Merdeka*, Senin, 21 Januari 2009. Berdasarkan data Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), saat ini tercatat ada 95 ribu karyawan dari 15 pabrik yang tergabung dalam PPRK. Bila ditambah dengan 115 pabrik yang tergabung dalam Forum Perusahaan Rokok Kudus (FPRK), serta puluhan pabrik lain yang tak berasosiasi, total jumlahnya mencapai lebih 120.000 pekerja. Selama 2005-2008, Kudus telah menyumbang cukai rokok rata-rata 26,12 persen dari total pendapatan cukai rokok nasional. Pada 2008,

ulama Kudus bersatu menentang rencana fatwa haram rokok yang akan dikeluarkan MUI. Pada 20 Januari 2009, rombongan MUI Kudus, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gapri), PPRK, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kudus, Asisten II Bupati Kudus, dan LSM mendatangi dan beraudiensi dengan MUI Pusat di Jakarta.¹¹⁹

Fatwa MUI itu bakal membawa pengaruh terhadap setoran cukai ke negara sebagaimana dikemukakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai pada 27 Januari 2009. Dikhawatirkannya bahwa penerimaan negara dari cukai akan turun sekitar 10 persen. Penurunan ini dikaitkan dengan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Mengimbangi penerimaan ini kenaikan tarif cukai rokok sebesar 7 persen akan berlaku pada Februari.¹²⁰

Keluarnya fatwa haram merokok oleh MUI – sebagaimana diakuinya – tidak lepas dari desakan berbagai pihak.¹²¹ Namun demikian, MUI Kudus kembali mengungkapkan pentingnya Kudus sebagai daerah penghasil *kretek*, karena sekitar 700.000 orang tergantung penghidupannya pada produksi pengolahan tembakau dan cengkeh. Diperkirakan – dengan fatwa haram merokok – para petani tembakau di Kudus juga jadi korban dan dampaknya akan bertambah negatif, tambah miskin.¹²² Sedangkan seorang komisioner Komnas HAM menyatakan, fatwa haram MUI ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan parameter hak-hak manusia (*human rights*), selain MUI bukanlah lembaga negara.¹²³

Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak juga mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan fatwa yang menyatakan rokok termasuk ke dalam zat adiktif, sejak Oktober 2008. Namun MA menanggapi permohonan ini dengan menyatakan, pihaknya tidak punya kapasitas untuk mengeluarkan fatwa dan tidak punya kompetensi untuk menetapkan suatu kaidah.¹²⁴

Tidak hanya MUI yang menggunakan pandangan dan hukum agama untuk mengeluarkan fatwa haram merokok, melainkan juga Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dampak negatif merokok bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat. Fatwa ini diambil dalam *halaqoh* – setelah menelaah manfaat dan mudarat rokok – tentang Pengendalian Dampak Tembakau yang diselenggarakan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada 7

setoran cukai Kudus mencapai Rp 11 triliun atau 20 persen lebih dari penerimaan negara atas rokok yang mencapai Rp. 50 triliun. Dalam rancangan peta jalan (road map) industri rokok, orientasi industri rokok dirancang dalam tiga konsentrasi. Untuk periode 2007-2010 terkonsentrasi untuk kepentingan pendapatan (*pro income*), 2010-2015 untuk tenaga kerja (*pro job*), dan 2015-2020 untuk kepentingan kesehatan (*pro health*).

¹¹⁹ Lihat “Protes Fatwa Haram Rokok MUI: Seberapa Penting Rokok bagi Orang Kudus,” *viva.co.id*, Selasa, 20 Januari 2009, 12:09.

¹²⁰ Lihat “Fatwa MUI: Merokok Haram, Penerimaan Cukai Terpangkas,” *viva.co.id*, Selasa, 27 Januari 2009, 14:43. Pemerintah mengajukan kenaikan target cukai rokok, dari semula Rp 49 triliun dinaikkan menjadi Rp 54 triliun. Dan akan menunggu usulan yang diajukan ke DPR.

¹²¹ Lihat “MUI Mengaku Didesak Sahkan Fatwa Haram Rokok,” *viva.co.id*, Selasa, 27 Januari 2009, 16:23.

¹²² Lihat “Fatwa Haram Rokok MUI: 700 Ribu Warga Kudus Bergantung pada Rokok,” *viva.co.id*, Selasa, 20 Januari 2009, 11:35.

¹²³ Lihat “Fatwa Tidak Sesuai Prinsip HAM,” *viva.co.id*, Senin, 2 Februari 2009, 13:52. Karena MUI bukan lembaga negara, maka tidak ada kewajiban (*obligation*) dan tanggung jawab (*responsibility*) yang dibebankan kepadanya dalam implementasi hak-hak manusia. Hanya lembaga Negara yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak manusia. Dan dengan kewajiban ini, maka setiap pelanggaran, pengingkaran atau pengabaian atas hak-hak manusia menjadi tanggung jawab negara.

¹²⁴ Lihat “MA Tak Punya Kapasitas Tetapkan Fatwa Rokok,” *viva.co.id*, Rabu, 28 Januari 2009, 13:20.

Maret 2010 di Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa tahun 2005 yang menyatakan merokok mubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan fatwa menjadi haram dinilai sebagai keputusan yang akan membawa manfaat.¹²⁵ Fatwa ini didukung oleh MUI Solo.¹²⁶

Para petani dan buruh tembakau di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, memprotes atau mengancam fatwa haram merokok yang dikeluarkan PP Muhammadiyah. Ekspresi protes mereka berunjuk rasa dengan melakukan teatrikal membakar tembakau di atas telapak tangan dan di atas kepala mereka. Kendati kesakitan menahan panas, namun mereka tetap melakukannya. Sejumlah petani bahkan memenuhi mulut mereka dengan batang-batang rokok yang menyala, kemudian dihisap layaknya orang merokok. Mereka khawatir fatwa ini dapat mematikan sumber atau kelangsungan usaha mereka.¹²⁷

Bila sebelumnya mereka menentang fatwa haram MUI, maka pada 2010, sejumlah kyai NU di Jember kembali mengabaikan fatwa haram Muhammadiyah atas merokok. Bagi mereka, umat Islam selain Muhammadiyah, boleh saja tetap merokok, bertanam dan berdagang produk pengolahan tembakau. Para kyai NU ini mempunyai dalil juga untuk mengabaikan fatwa haram Muhammadiyah.¹²⁸ Namun, fatwa Muhammadiyah ini memperoleh dukungan dari Komisi Fatwa MUI.¹²⁹

Memang, tidak sedikit petani dan buruh tembakau yang memprotes dan menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam pengendalian tembakau dan kampanye anti rokok lebih mengandalkan dana dan iuran pribadi secara sukarela seperti yang dilakukan ribuan petani dan buruh tembakau dari sejumlah kabupaten di Jawa Tengah yang berangkat ke Jakarta untuk memprotes RPP Tembakau pada Februari-Maret 2010.¹³⁰ Karena “periuksi nasi” mereka langsung merasa terancam atas kebijakan ketat tentang tembakau.

Namun kampanye anti tembakau, tidak sedikit gelontoran dana dari AS. Salah satunya dari filantropis Michael Bloomberg asal New York di bawah bendera Bloomberg Initiative (BI). Dalam rentang 2007-2010, sebanyak 4.195.442 dollar AS atau sekitar Rp 39 miliar itu mengalir ke pihak-pihak yang berkomitmen untuk menabuh genderang perang terhadap tembakau di

¹²⁵ Lihat “Fatwa PP Muhammadiyah: Merokok Haram!” *kompas.com*, Selasa, 9 Maret 2010 | 10:12 WIB; “Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Merokok,” *antaranews.com*, Selasa, 9 Maret 2010 12:21 WIB; “PP Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Merokok,” *detik.com*, Selasa, 09 Maret 2010 16:41 WIB; dan “Fatwa Muhammadiyah: Rokok Haram,” *viva.co.id*, Selasa, 9 Maret 2010, 16:12. Keputusan ini berisi instruksi mengikat kepada seluruh jajaran organisasi, lembaga-lembaga amal usaha, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, masjid, dan berbagai fasilitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Perihal dampak negatif yang akan dirasakan para buruh tembakau, mereka bisa diajarkan untuk beralih menanam tanaman lain yang lebih bermanfaat.

¹²⁶ Lihat “MUI Solo Dukung Rokok Haram,” *viva.co.id*, Senin, 15 Maret 2010, 13:01 WIB.

¹²⁷ Lihat “Petani Tembakau Protes Fatwa Haram Rokok,” *liputan6.com*, Jumat, 12 Maret 2010 14:08.

¹²⁸ Lihat “Kiai NU: Yang Bukan Muhammadiyah Tidak Haram Merokok,” *tempo.co*, Selasa, 16 Maret 2010 | 15:35 WIB.

¹²⁹ Lihat “MUI Dukung Muhammadiyah Soal Fatwa Rokok Haram,” *detik.com*, Rabu, 10 Maret 2010 02:10 WIB.

¹³⁰ Lihat “Ribuan petani tembakau Jateng protes RPP,” *wonogiripos.com*, Minggu, 28 Februari 2010. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng, Nurtantio Wisnu Brata mengatakan, mereka yang berangkat ke Jakarta dari Klaten sebanyak tujuh bus, Kendal empat bus, Wonosobo enam bus, Magelang empat bus, Boyolali dua bus, dan Temanggung 50 bus. “Dalam demo ini tidak ada membayari mereka, namun secara sukarela petani beriuran untuk berangkat ke Jakarta yang bersarannya bervariasi,” katanya.

Indonesia. Proyek terbesar BI di Indonesia adalah pembentukan Tobacco Control Support Centre (TCSC) yang menghabiskan dana 542.600 dollar AS. TCSC bertujuan berfungsi sebagai pusat koordinasi segala kegiatan kampanye dan memperjuangkan regulasi yang prokesehatan.¹³¹

PP Muhammadiyah menyangkal tudingan bahwa fatwa haram yang dikeluarkannya tidak ada hubungannya dengan gelontoran dana Rp 3,6 miliar untuk program antirokok dari Michael Bloomberg atau BI. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih Dr Yunahar Ilyas menegaskan, lembaga lain bernama Muhammadiyah Tobacco Centre yang khusus menangani kampanye anti rokok dan berada di luar struktur organisasi PP Muhammadiyah. Selain itu, mereka juga tidak pernah mencampuri penentuan fatwa di bidang Tarjih Muhammadiyah.¹³²

d. Ancam boikot bayar pajak dan pemilu

Banyak lapisan petani dan buruh tembakau, terutama dari NTB, Jatim dan Jateng, telah mengekspresikan penolakan mereka terhadap pengendalian tembakau secara lebih ketat dan mereka pandang dapat mengganggu kepentingan mereka. Tidak hanya ditujukan kepada spekulasi harga tembakau dan DBH CHT maupun kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi produk pengolahan tembakau, kampanye anti rokok dan fatwa haram, namun juga mulai merembet kepada ancaman mereka untuk memboikot bayar pajak dan mengikuti pemilihan umum (pemilu).

Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) menyampaikan desakan untuk perbaikan dalam pemanfaatan DBH CHT, seiring rencana penarikan pajak rokok sebagaimana diatur dalam UU No.28/2009. Karena dengan rencana penarikan pajak ini akan semakin membebani masyarakat. LPPNU juga mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperbaiki peruntukan DBH CHT supaya lebih difokuskan untuk mengakomodasi kebutuhan petani dan buruh industri tembakau.¹³³

Namun dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah, sejumlah petani dan buruh tembakau di NTB sudah mulai menyuarakan penolakan membayar segala macam pajak yang dibebankan kepada masyarakat sebagai bentuk protes.¹³⁴ Para petani dan buruh tembakau yang menggelar aksi di Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung pada 12 Januari 2013, tidak hanya membakar dua keranjang tembakau dan foto Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono, juga membakar Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) sebagai bentuk ancaman membayar pajak dan mengikuti Pemilu bila PP No. 109/2012 tidak dicabut.¹³⁵ Para petani di sejumlah kecamatan di Temanggung mengancam boikot pemilu, dengan mundur dari Panitia Pemungutan Suara (PPS).¹³⁶

¹³¹ Lihat "Pengusaha New York Beri Jutaan Dolar Perangi Rokok di Indonesia," *detik.com*, Sabtu, 13 Maret 2010 14:40 WIB.

¹³² Lihat "Muhammadiyah: Penetapan Fatwa Haram Rokok Bukan Karena Uang Bloomberg," *detik.com*, Sabtu, 13/03/2010 16:36 WIB.

¹³³ Lihat "Petani Tembakau Protes Rencana Penarikan Pajak Rokok," *okezone.com*, Rabu, 25 Juli 2012 18:16 wib.

¹³⁴ Lihat "Konversi Ditolak, Petani Tembakau Ancam Tak Bayar Pajak," *globalfm lombok.com*, Senin, 29 Maret 2010 - 16:55.

¹³⁵ Lihat "Petani Tembakau Temanggung Bakar Foto SBY," *banjarmasin.tribunnews.com*, Sabtu, 12 Januari 2013 | 21:56 Wita; "Petani Tembakau Ancam Boikot Pemilu," *Suara Merdeka*, Senin, 14 Januari 2013; dan Lihat "Ribuan Petani Tembakau Temanggung Demo Tolak PP Tembakau," *solopos.com*, Sabtu, 12 Januari 2013 15:06 WIB.

¹³⁶ Lihat "Petani Tembakau Bersikukuh Boikot Pemilu," *suaramerdeka.com*, Senin, 21 Januari 2013 | 00:40 wib.

Protes petani dan buruh tembakau yang tergabung dalam APTI Klaten menyuarakan juga boikot atau mogok bayar pajak di Klaten pada 22 Januari 2013, dengan mengerahkan ribuan orang untuk mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Klaten. Mereka menolak PP Tembakau tersebut.¹³⁷ Sebelumnya, pada 13 Juli 2011 di Jakarta, berbagai elemen petani dan buruh tembakau yang terlibat dalam KNPk mengungkapkan kesepakatan petani yang bakal memboikot bayar pajak RUU dan RPP Pengendalian Tembakau disahkan. Karena pemerintah lebih mengedepankan dampaknya terhadap kesehatan, bukan pada dampaknya terhadap nasib petani dan buruh tembakau, serta industri rokok.¹³⁸

APTI memang telah mengeluarkan ancaman boikot untuk membayar pajak, karena kebijakan pemerintah mengancam kehidupan petani dan buruh tembakau.¹³⁹ Selain itu, APTI juga mengancam bakal memboikot pemilu.¹⁴⁰ Ancaman boikot bayar pajak juga disuarakan ribuan petani dan buruh tembakau se-DIY di halaman gudang tembakau Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, 19 Januari 2013. Mereka sepakat melakukan boikot bayar pajak, karena sekitar 12.500 orang di tiga kabupaten, yaitu Gunung Kidul, Sleman, dan Bantul menggantungkan hidup dari sektor pertembakauan. Rata-rata tiap tahun, setoran industri ini menyumbang kontribusi pendapatan daerah sebesar Rp 20 miliar.¹⁴¹

Pernyataan ancaman boikot pajak diungkapkan ribuan petani tembakau yang tersebar di Kota Magelang, Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jateng, yang tergabung dalam APTI Jateng pada 17 Januari 2013. Selain akan memboikot pajak, juga memboikot pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bentuk penolakan mereka terhadap PP Tembakau.¹⁴² Ancaman boikot bayar pajak bumi bangunan (PBB), boikot Pileg dan Pilpres 2014 diusung petani dan buruh tembakau yang tersebar di wilayah Demak, Jateng. APTI Demak memandang, pemerintah terus menekan kehidupan para petani dan buruh tembakau, tanpa menimbang pentingnya tembakau bagi mereka.¹⁴³

¹³⁷ Lihat “Desak PP 109/2012 Dicabut, Ribuan Petani Tembakau Klaten Berdemo Ancam Boikot Tak Bayar Pajak,” *indepnews.com*, Selasa, 22 Januari 2013 | 18:05; dan “Ribuan Petani Klaten Protes Aturan Ketat Tembakau,” *tribunnews.com*, Selasa, 22 Januari 2013 21:24 WIB

¹³⁸ Lihat “RUU Tembakau Disahkan, Petani Ancam Boikot Pajak,” *inilah.com*, Rabu, 13 Juli 2011 | 08:59 WIB; dan “Jutaan Petani Ancam Boikot Pajak Jika RUU Tembakau Disahkan,” *monitorindonesia.com*, Rabu, 13 Juli 2011, 9:36. APTI menyatakan, ada sekitar 2,1 juta petani yang menjadi wajib pajak. Selain itu, bila RUU dan RPP itu disahkan, akan melanggar hak ekonomi dan sosial (*ecosoc*) para petani dan buruh tembakau.

¹³⁹ Lihat “Petani Tembakau Ancam Boikot Bayar Pajak,” *tempo.co*, Minggu, 13 Januari 2013 | 18:38 WIB; dan “APTI Ancam Tak Bayar Pajak Jika PP Tembakau Tak Dicabut,” *tribunnews.com*, Rabu, 23 Januari 2013 10:51 WIB.

¹⁴⁰ Lihat “RPP Tembakau Diterbitkan, Petani Ancam Boikot Pemilu,” *jpnn.com*, Rabu, 02 Januari 2013, 21:46:00.

¹⁴¹ Lihat “Petani Tembakau se-DIY Ancam Boikot Bayar Pajak,” *republika.co.id*, Minggu, 20 Januari 2013, 15:47 WIB; “Petani Ancam Boikot Pajak,” *solopos.com*, Sabtu, 19 Januari 2013 20:00 WIB; dan “Petani Tembakau DIY Sepakat Boikot Pajak,” *suaramerdeka.com*, 19 Januari 2013 | 14:30 wib.

¹⁴² Lihat “Petani Tembakau Tiga Kabupaten Jateng Ancam Boikot Pemilu dan Bayar Pajak,” *lensaindonesia.com*, Kamis, 17 Januari 2013 22:04 WIB.

¹⁴³ Lihat “Petani Tembakau Demak Ancam Boikot Pajak, Pileg dan Pilpres,” *lensaindonesia.com*, Kamis, 17 Januari 2013 12:34 WIB; dan “Petani Tembakau se-Kabupaten Demak Ancam Boikot Pemilu,” *aktual.co*, Kamis, 17 Januari 2013 15:58:31. Lahan tanaman tembakau di Demak ada sekitar 3500 hektar yang tersebar di Kecamatan Mranggen, Karangawen dan Guntur. Petani tidak bisa beralih ke tanaman jagung atau palawija, karena kondisi tanahnya tidak cocok.

1.2.2. Resistensi industri rokok

Apakah mereka yang terlibat dalam industri pengolahan tembakau berdiam diri terhadap kebijakan pemerintah dan kampanye global anti rokok maupun tekanan perdagangan? Industri pengolahan tembakau, khususnya *kretek*, tidaklah dapat hanya kelihatan dalam beberapa industri besar seperti Sampoerna (Surabaya), Gudang Garam (Kediri), Djarum (Kudus), Bentoel (Malang), dan Nojorono (Kudus), melainkan banyak pabrik rokok kecil yang berada di sentra-sentra industri rokok di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seluruh industri rokok ini terdapat begitu banyak orang yang bekerja atau menggantungkan hidup mereka sebagai buruh. Kebijakan pengendalian tembakau dan kenaikan tarif cukai maupun tekanan perdagangan internasional menimbulkan dampak terhadap mereka yang terlibat dalam industri pengolahan tembakau.

Pemerintah sudah membuat *roadmap* industri pengolahan tembakau, khususnya produksi rokok, sebagai strategi yang dijalankan. Mulai 2015, industri rokok dibatasi produksinya hanya 260 miliar batang per tahun. Sejak 2007, sudah ditegaskan dalam tiga prioritas. Pertama, dalam periode 2007-2010, prioritas ditekankan pada aspek tenaga kerja, penerimaan dan kesehatan. Kedua, periode 2010-2015 memprioritaskan aspek penerimaan negara, kesehatan, dan tenaga kerja. Ketiga, periode 2015-2020, prioritas tertuju pada aspek kesehatan, tenaga kerja dan penerimaan negara. Sekarang posisi strategi pemerintah berada dalam upaya aspek penerimaan negara, sehingga menaikkan cukai menjadi tekanan. Tahun 2012, pemerintah menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 16 persen. Para pengusaha rokok yang tergabung dalam Forum Masyarakat Rokok Indonesia (Formasi) memprotes kepada Komisi XI DPR soal kenaikan cukai rokok rata-rata 16 persen mulai 1 Januari 2012.¹⁴⁴

Tahun 2013, pemerintah juga berencana menaikkan lagi cukai rokok kendati diperkirakan di bawah 10 persen. Salah satu pertimbangan rencana kenaikan cukai ini adalah penerapan strategi pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 147,2 triliun. Rinciannya, target penerimaan bea masuk Rp 26,5 triliun atau meningkat 7,1 persen dari target dalam APBN-P 2012, sedangkan target penerimaan cukai sebesar Rp 89 triliun atau meningkat sebesar 6,9 persendari target APBN-P 2012, dan target penerimaan bea keluar di 2013 sebesar Rp 31,7 triliun atau naik 36,6 persen dari target tahun 2012. Kenaikan cukai rokok inilah yang menekan pengusaha untuk menaikkan harga rokok.¹⁴⁵

Para pengusaha industri rokok memang terus menghadapi persoalan kenaikan cukai. Mereka yang tergabung dalam Gappri di Solo menyatakan menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai rokok sejak November 2002. Mereka menuding Menteri Keuangan tidak aspiratif karena industri rokok, bahkan industri ini seperti dijadikan sapi perahan dan bakal berdampak pada kehidupan buruh yang semakin *ngrekoso* (sengsara).¹⁴⁶ Pada 2011, Formasi

¹⁴⁴ Lihat "Pemerintah Tak Peduli Pengusaha Rokok Protes Cukai Naik," *finance.detik.com*, Senin, 28 November 2011 13:01 WIB. Para pengusaha ini juga protes karena industri rokok kretek tangan dihadapkan pada kenaikan cukainya mencapai 38 persen. Sedangkan rokok dengan mesin kenaikan cukainya hanya 9-10 persen.

¹⁴⁵ Lihat "Cukai Naik 10%, Harga Rokok Makin Mahal Tahun Depan," *finance.detik.com*, Selasa, 04 September 2012 16:41 WIB.

¹⁴⁶ Lihat "Pengusaha Rokok Solo Protes Kenaikan Cukai," *tempo.co*, Jumat, 20 September 2002 | 09:49 WIB.

juga menolak kenaikan cukai rokok, karena dapat mematikan atau menggulung industri menengah dan kecil.¹⁴⁷

Pada Februari 2009, ratusan pengusaha rokok berskala kecil di Jawa Timur memprotes sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang mengancam kelangsungan usaha mereka, karena mereka nilai bersifat diskriminatif dalam persaingan usaha atau dagang. Kebijakan itu dinilai politis karena menguntungkan pengusaha rokok pabrikan. Padahal, industri rokok berskala kecil, dengan produksi 600 juta batang per tahun, selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Industri ini menyerap banyak tenaga manusia, tidak seperti industri rokok pabrikan yang menggunakan mesin pengganti tenaga manusia.¹⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203/2008 kian mencekik kondisi pabrik rokok golongan III atau kecil.¹⁴⁹ Sekitar 10.000 buruh pabrik rokok yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) kembali melakukan demo dengan mengepung Kantor Bea Cukai Malang, karena pemerintah menaikkan cukai lagi lewat PMK No. 181/PMK.011/2009.¹⁵⁰

Langkah pemerintah menaikkan pita cukai rokok per 1 Januari 2008 di satu sisi membawa dampak yang cukup signifikan bagi ribuan buruh pabrik rokok yang ada di Kabupaten Malang, berupa ancaman PHK. Namun di sisi lain beroperasinya banyak pabrik rokok di Kabupaten Malang justru memberikan kontribusi yang sangat besar, karena pada tahun 2006, telah menyumbang penerimaan cukai sebesar Rp 2,1 triliun yang berasal dari pabrik-pabrik rokok berskala kecil, menengah hingga berskala besar.¹⁵¹

Januari 2010, pemerintah kembali menaikkan pajak cukai di satu sisi dan di sisi lain Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok. Dampaknya adalah puluhan perusahaan rokok di Sidoarjo menurunkan jumlah produksinya untuk menyesuaikan kenaikan pajak cukai tersebut. Sedangkan fatwa haram dipandang berpengaruh secara psikologis terhadap permintaan rokok. Dua sisi persoalan inilah yang dikeluhkan Asosiasi Perusahaan Rokok Sidoarjo (APRS) yang dikhawatirkan mengancam sejumlah pabrik rokok gulung tikar.¹⁵²

APTI Jateng memperkirakan, lebih dari 300 pabrik rokok kretek sudah gulung tikar yang sebagian diakibatkan oleh penerapan cukai tinggi. Pihaknya juga menilai, kehadiran PP No. 109/2012 tentang Tembakau lebih menguntungkan kepentingan sekitar 9 pabrik rokok yang bersumber dari modal asing, sehingga mengancam eksistensi pabrik kretek pribumi yang terus

¹⁴⁷ Tahun 2011, industri rokok kretek sudah banyak yang gulung tikar. Bila sebelumnya berjumlah sekitar 3.000 industri, maka dengan kenaikan cukai terus-menerus mengakibatkan tinggal sekitar 1.400 industri. Lihat "Industri Rokok Tolak Kenaikan Tarif Cukai," *tempo.co*, Selasa, 22 November 2011 | 16:26 WIB.

¹⁴⁸ Lihat "Pengusaha Rokok Protes Kebijakan Pemerintah," *Kompas*, Rabu, 11 Februari 2009. Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.011/2008. Pengusaha keberatan kenaikan tarif cukai rokok dari 30 persen per batang menjadi 40 persen mulai Februari 2009. Sebagai gambaran atas ancaman konkret kebangkrutan antara lain di Kota Kediri dulu ada 24 pabrik rokok, sekarang tinggal 13 pabrik. Sedangkan di Nganjuk, dari 200 pabrik tinggal 109 pabrik.

¹⁴⁹ Lihat "Permenkeu Mencekik Pabrikan Kecil," *malangraya.web.id*, Senin, 16 Maret 2009.

¹⁵⁰ Lihat "Bea Cukai Malang Dikepung Buruh Rokok," *kompas.com*, Senin, 30 November 2009 | 10:32 WIB.

¹⁵¹ Lihat "Ribuan Buruh Pabrik Rokok Malang Terancam Di-PHK," *merdeka.com*, Kamis, 22 November 2007 16:11:00.

¹⁵² Lihat "Cukai Naik & Fatwa Haram: Pabrik Rokok Terancam Gulung Tikar," *okezone.com*, Senin, 15 Maret 2010 00:20 wib. Di Sidoarjo ada sebanyak 82 perusahaan rokok yang mayoritas memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT). Namun, peraturan Menteri Keuangan No 181 2009, kenaikan pajak cukai untuk SKT sebesar 65 persen. Sedangkan untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), kenaikan pajaknya hanya 35 persen.

menderita oleh tekanan pemerintah maupun persaingan dengan perusahaan rokok bermodal besar.¹⁵³ Banyak keluhan yang disuarakan pengusaha industri rokok kecil di Kudus sebagai salah satu lapisan industri rokok yang langsung terkena dampaknya.¹⁵⁴ Sedangkan di Jakarta, mereka yang tergabung dalam Komunitas Kretek yang menolak Hari Anti Tembakau Sedunia melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS sebagai protes atas sepak terjang perusahaan rokok raksasa asal AS di Indonesia.¹⁵⁵

Namun, sesuai strategi pemerintah dalam *roadmap*, dalam periode 2010-2015, pemerintah memprioritaskan penerimaan negara dengan menaikkan tarif cukai di satu sisi, sedangkan di sisi lain mengendalikan dampak konsumsi tembakau atas kesehatan dan tanpa membatasi impor tembakau. Dengan naiknya cukai rokok sebesar 5 persen, maka penerimaan cukai di kuartal I 2011 saja telah melewati target yang ditetapkan, yakni 24,75% dari target tahunan sebesar Rp 62,7 triliun. Karena realisasinya sudah mencapai 27,78% atau setara dengan 17,4 triliun. Dengan demikian, kontribusi cukai rokok adalah terbesar, dengan menyumbangkan penerimaan 95,94 persen.¹⁵⁶

Beriringan dengan kenaikan tarif cukai dan kebijakan pemerintah dalam pengendalian dampak tembakau yang kian ketat bakal mengarahkan industri rokok pada langkah gulung tikar. Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) Universitas Muria Kudus (UMK) sudah memperkirakan kemungkinan ini yang berjumlah sebanyak 1.500 industri rokok kecil akan tertekan menyusul disahkannya PP No. 109/2012. Karena dengan biaya produksi yang semakin membengkak, industri rokok bakal menanggung beban yang memberatkan, termasuk biaya mengubah desain bungkus atau kemasan rokok. Industri ini diibaratkan, sudah jatuh masih pula diinjak-injak.¹⁵⁷ Pengusaha industri rokok kecil di Malang memprotes pengesahan PP ini yang dipandang semakin memberatkan kelangsungan usaha mereka, selain harus menanggung puluhan ribu buruh.¹⁵⁸ Bahkan Gappri menyebutkan, pabrik tembakau pernah mencapai 5.000 pabrik, namun sekarang hanya tinggal 600 pabrik.¹⁵⁹ Sehingga mereka siap untuk menggugat PP Tembakau, karena dinilai dengan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.¹⁶⁰

Sementara itu, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) memperkirakan dampak PP Tembakau terhadap konsumsi rokok, yakni bakal menurun atau berkurang. Karena banyak aturan seperti aturan produksi, konsumsi rokok, promosi produk (iklan) dan banyak lagi yang

¹⁵³ Lihat "Duh, 300 Pabrik Rokok Terancam Tak 'Berasap'," *indonesiatobacco.com*, Rabu, 23 Januari 2013.

¹⁵⁴ Lihat "Pengusaha Kecil Keluhkan PP Tembakau," Rabu, 20 Februari 2013 08:31. PP ini diterapkan 18 bulan setelah ditetapkan atau sekitar Agustus 2014 mendatang.

¹⁵⁵ Lihat "Komunitas Kretek Demo Kedubes Amerika," *kabar24.com*, Kamis, 31 Mei 2012 12:24.

¹⁵⁶ Lihat "Cukai Rokok Penyumbang Terbesar Penerimaan Negara," *kontan.co.id*, Kamis, 07 April 2011 | 20:43 WIB.

¹⁵⁷ Lihat "Akibat PP Tembakau: 1.500 Industri Rokok Kecil Terancam Gulung Tikar," *suaramerdeka.com*, Kamis, 10 Januari 2013 | 21:20 wib; dan "Biaya Produksi Rokok Dipastikan Naik," *solopos.com*, Jumat, 11 Januari 2013 01:27 WIB.

¹⁵⁸ Lihat "Pengesahan RPP Tembakau Buat Industri Rokok Kecil Limbung," *beritajatim.com*, Rabu, 16 Januari 2013 12:44:49 WIB.

¹⁵⁹ Lihat "Gara-Gara PP, dari 5.000 Tinggal 600 Pabrik Tembakau," *okezone.com*, Senin, 11 Februari 2013 16:19 wib.

¹⁶⁰ Lihat "Industri Rokok Gugat PP Tembakau ke MA," *kabarbisnis.com*, Senin, 11 Februari 2013 | 18:43 wib.

dibatasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang juga dapat mengurangi konsumsi rokok.¹⁶¹

Kemungkinan industri rokok gulung tikar, pasti berdampak pada buruh yang bekerja dalam industri tersebut. Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) memperkirakan potensi PHK buruh dalam pabrik rokok menyusul pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 167/2011 yang mengatur tentang perubahan tarif cukai hasil tembakau, bakal mencapai 15.000 orang. Sebelum PMK 167 ini jumlah anggota Formasi di wilayah Malang, Kediri, dan Blitar mencapai 502 perusahaan, dengan 43.000 buruh. Namun, belakangan tinggal hanya 147 perusahaan rokok, dengan sekitar 20.000 buruh. Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya juga mengaku berat dengan diberlakukannya PMK ini yang menaungi 10 perusahaan rokok, dengan pekerja mencapai 105.000 orang.¹⁶² Formasi memprotes ke Komisi XI DPR soal kenaikan cukai rokok rata-rata 16 persen mulai 1 Januari 2011.¹⁶³

Tahun 2012, sejumlah pengusaha rokok yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma) merasa resah menjelang diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/PMK.04/2010 yang merupakan perubahan atas PMK No 200/OMK.04/2008 tentang Tata Cara, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik dan importir tembakau, yang dimulai pada November 2012. Karena peraturan ini memberatkan dan menimbulkan penyusutan pabrik rokok, sehingga dikhawatirkan juga berdampak buruk terhadap pekerja.¹⁶⁴ Dampak terhadap pekerja ini sudah dikemukakan oleh Asosiasi Perusahaan Rokok Kecil Indonesia (Asperki) dan Paguyuban Pengusaha Rokok Kecil Indonesia (Paperki) Malang.¹⁶⁵

Kenaikan tarif cukai rokok 2012 yang diabaikan keberatannya oleh pemerintah telah memaksa sejumlah pengusaha rokok kelas menengah dan kecil di Kabupaten Kudus melakukan berbagai efisiensi yang berdampak terhadap buruh seperti pemecatan atau PHK. Persoalan mereka masih ditambah dengan bahan baku pembuatan rokok mulai dari tembakau, cengekeh, hingga kertas pembungkus sudah mengalami kenaikan secara signifikan. Dengan biaya produksi yang

¹⁶¹ Lihat "Pengusaha Pasrah PP Tembakau akan Pangkas Konsumsi Rokok Indonesia," *analisdaily.com*, Senin, 14 Jan 2013 00:17 WIB.

¹⁶² Lihat "15 Ribu Buruh Pabrik Rokok Terancam PHK," *disnakertransduk.jatimprov.go.id*, edisi 135 Maret 2012.

¹⁶³ Lihat "Cukai Rokok Dinaikkan 16%, Pengusaha Ngadu ke DPR," *finance.detik.com*, Kamis, 24 November 2011 14:14 WIB. Formasi menjelaskan, industri rokok atau sigaret kretek tangan (SKT) melibatkan paling banyak tenaga kerja. Karena itu, mereka memprotes kenaikan cukai SKT yang mencapai 38 persen, sedangkan rokok dengan mesin (SKM) dengan kenaikan cukai hanya 9-10 persen.

¹⁶⁴ Lihat "Pengusaha Rokok Malang Resah Aturan Baru," *surabaya.tribunnews.com*, Minggu, 1 Juli 2012 18:38 WIB. Jumlah pekerja pabrik rokok di Kabupaten Malang mencapai 34.000 orang dari 97 pabrik yang beroperasi. Padahal, sebelumnya pernah lebih dari 400 pabrik rokok.

¹⁶⁵ Lihat "Pemerintah Berencana Naikkan Cukai, Buruh Pabrik Rokok Kecil Terancam," *malangraya.web.id*, Sabtu, 8 November 2008; dan "Ribuan Buruh Rokok Terancam PHK," *halomalang.com*, Sabtu, 17 November 2012. Di Kabupaten Malang, terdapat sekitar 374 industri rokok yang terbagi dalam tiga klasifikasi. Industri besar 16 unit, industri menengah 54 unit dan industri kecil sebanyak 304 unit. Dari 194 anggota Paperki, sekitar 47 perusahaan dalam kondisi mati suri. Pengusaha rokok sudah pernah dikagetkan dengan kenaikan sesuai Permenkeu No. 134/2007 sebesar 1.200 persen.

meningkat, maka harga rokok pun akan melonjak. Dengan demikian, pengusaha mengambil langkah pengurangan pekerja atau merumahnya.¹⁶⁶

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan, PP Tembakau sudah mengancam kelangsungan pekerja.¹⁶⁷ Melihat gelagat ancaman atas kehilangan pekerjaan, sekitar 4.000 buruh – berasal dari 14 pabrik rokok di Kota Malang – menggelar demo di depan Balai Kota Malang, pada 12 Februari 2013, yang digalang oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Mereka juga ikut menyatakan tolak terhadap PP Tembakau yang disahkan Presiden, karena mereka pandang dapat mengancam nasib mereka sebagai buruh pabrik rokok. Selain itu, mereka mendesak Pemkot Malang untuk mengirimkan surat penolakan pemberlakuan PP.¹⁶⁸

Tidak ketinggalan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) – yang berkewajiban memfasilitasi perluasan lapangan kerja – juga ikut memperkirakan dampak diberlakukannya PP Tembakau. Dalam perhitungannya, bakal terancam sebanyak 500.000 buruh di berbagai perusahaan industri rokok. Sejauh ini sudah puluhan pabrik rokok yang tutup dan diiringi dengan serangkaian pengurangan tenaga pekerja di Jateng dan Jatim, khususnya industri tembakau seperti di Kudus.¹⁶⁹ Kendati demikian, Presiden tetap mengesahkan PP Tembakau tersebut.

Apakah pemerintah mempunyai solusi atas kemungkinan dampak terburuk yang dihadapi banyak industri rokok dan diiringi dengan buruh yang mereka pekerjakan?

Kelihatannya pemerintah tidak mempunyai strategi atas potensi PHK 500.000 pekerja industri rokok sebagaimana yang dikemukakan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Kemenakertrans. Pihaknya, berjanji akan mensosialisasi PP Tembakau untuk menerangkan bagaimana meminimalisasi dampaknya bagi buruh. Sedangkan kenyataannya, sejumlah perusahaan industri rokok di Kudus sudah menutup usaha mereka, sehingga beriringan dengan PHK.¹⁷⁰ Persoalan ini jelas menambah beban kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah dan berikut tanggung jawab dalam memulihkan hak atas pekerjaan, termasuk tahapan-tahapan dan anggarannya.

1.2.3. Signifikansi tembakau dan pengolahannya

Tembakau dan industri pengolahannya salah satu mata rantai terpenting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Percobaan penanaman tembakau secara besar-besaran di Indonesia dilakukan sudah dilakukan sejak 1830 seiring dibentangkannya Tanam Paksa atau *Cultuurstelsel*

¹⁶⁶ Lihat “Cukai Rokok Naik, Buruh Terancam PHK,” *Seputar Indonesia*, Selasa, 13 Desember 2011. Kebijakan pemerintah menaikkan cukai ini dikecam oleh Aliansi Serikat Buruh dan Elemen Masyarakat Peduli Buruh Kudus (ASBEMPBK).

¹⁶⁷ Lihat “Ribuan Buruh Terancam Kehilangan Pekerjaan,” *suaramerdeka.com*, Rabu, 13 Februari 2013 | 16:44 wib.

¹⁶⁸ Lihat “Demo, Ribuan Buruh Pabrik Rokok Tolak PP Tembakau,” *kompas.com*, Selasa, 12 Februari 2013 | 13:58 WIB; dan “Ribuan Buruh Pabrik Rokok di Malang Tolak PP Tembakau,” *okezone.com*, Selasa, 12 Februari 2013 10:30 wib.

¹⁶⁹ Lihat “500.000 Orang Terancam PHK Jika RPP Tembakau Berlaku,” *finance.detik.com*, Rabu, 20 Juni 2012 15:53 WIB; dan “500 Ribu Tenaga Pabrik Rokok Terancam PHK,” *tribunnews.com*, Rabu, 20 Juni 2012 17:33 WIB.

¹⁷⁰ Lihat “Pemerintah Tak Punya Strategi Cegah PHK 500.000 Pekerja Industri Rokok,” *finance.detik.com*, Rabu, 20 Juni 2012 17:37 WIB.

di sekitar Semarang di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes graaf van den Bosch. Namun, dari hasil kerja paksa ini menemui kegagalan, sehingga tahun 1856, dicoba kembali penanaman tembakau secara meluas di daerah Besuki, Jatim, dilengkapi suatu balai penelitian, Besoekisch Profstation. Berbagai upaya untuk mendapatkan galur yang cocok, dengan cara seleksi atau hibridisasi tembakau yang telah ada, jenis tembakau besuki cerutu ini terus berkembang sampai sekarang. Tanaman tembakau ini merupakan persilangan antara jenis kedu dengan jenis deli. Tahun 1858, ditanam jenis tembakau cerutu di Klaten. Penanaman tembakau di luar Jawa, dilakukan di daerah Deli, Sumatra Utara pada 1863, yang disusul dengan pembangunan Deli Proefstation pada 1906. Ketiga daerah ini menjadi daerah penghasil tembakau jenis cerutu. Dalam perdagangan internasional, khususnya ekspor ke Eropa, Indonesia menjadi salah satu pemasok tembakau cerutu peringkat atas yang diperhitungkan.¹⁷¹

Sampai sekarang, penanaman dan luas lahan tembakau terus meningkat. Bahkan dalam perdagangan, kebutuhan tembakau domestik atau dalam negeri juga meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan tembakau dari berbagai industri rokok, baik rokok putih maupun *kretek*. Kemajuan industri rokok, terutama *kretek*, bukan saja mendorong lonjakan permintaan dan perluasan lahan penanaman tembakau serta banyaknya penyerapan tenaga kerja dalam pengolahan tembakau, namun juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pajak cukai yang ditarik pemerintah. Ditambah lagi dalam rentang lebih seabad, industri rokok – dengan berbagai jatuh bangunnya – tetap bertahan oleh gejolak dan bantingan krisis ekonomi dunia. Di sinilah letak signifikansi tembakau dan industri pengolahannya.

a. Sebaran perkebunan tembakau

Sejak menjadi salah satu komoditas ekspor di masa kolonial Hindia Belanda, penanaman tembakau mengalami peningkatan. Apalagi ketika industri rokok mulai tumbuh, maka permintaan tembakau domestik juga bertambah. Penanaman tembakau pun menyebar di banyak daerah, sehingga industri pertembakauan menempati kedudukan penting dalam perekonomian baik di masa kolonial maupun pasca-kolonial dan sampai sekarang.

Daerah-daerah seperti di Kabupaten Jember, Probolinggo, Lamongan, Bojonegoro, Malang, Magetan, Pacitan, dan Madura di Jatim maupun di Kabupaten Temanggung, Magelang, Kendal, Solo, Wonosobo, Boyolali, dan Grobogan di Jateng menjadi sentra-sentra produksi tembakau. Belakangan muncul sentra tembakau di Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cianjur, Banjar, Cirebon, Sukabumi, Bandung Barat di Jawa Barat, serta perkebunan tembakau di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat di NTB. Sekarang, sedikitnya ada 13 provinsi sebagai daerah pemasok tembakau yang tersebar di banyak kabupatennya sebagaimana yang terdapat dalam tabel 1.1. Namun, Jatim merupakan provinsi yang paling banyak menjadi pemasok permintaan tembakau secara nasional, bisa mencapai 50 persen.¹⁷²

¹⁷¹ Tembakau Besuki dan Klaten lebih dikenal dengan sebutan tembakau Jawa dan tembakau Deli lebih dikenal dengan tembakau Sumatra. Penanamannya sesuai dengan nama tempat tembakau itu ditanam.

¹⁷² Lihat “Jawa Timur Pasok 50 Persen Kebutuhan Tembakau Nasional,” *tempo.co*, Rabu, 12 Juli 2006 | 19:37 WIB.

Tabel 1.1 | Provinsi Penghasil Tembakau di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Tembakau
1	Aceh	Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Aceh Tengah, Gayo Lues, Simeuleu, Sabululalam, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Pidie	-
2	Sumatera Utara	Langkat, Binjai, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Siantar, dan Simalungun	Deli sebagai pembalut cerutu (<i>deg blad</i>), Barley
3	Sumatera Barat	Limapuluh Kota (Payakumbuh), Solok, Tanah Datar, Sawahlunto	Rudau teleng
4	Jambi	Kerinci, Merangin	-
5	Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau, Kab OKU Selatan	-
6	Lampung	Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pringsewu	Virginia
7	Jawa Barat	Bandung, Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Cianjur, Banjar, Ciamis, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sukabumi, Bandung Barat, dan Subang	Mole, Virginia, Barley
8	Jawa Tengah	Temanggung, Magelang, Kendal, Tegal, Pemalang, Rembang, Demak, Semarang, Blora, Batang, Klaten, Solo, Sukoharjo, Wonosobo, Boyolali, Banjarnegara, Karanganyar, Banyumas, Wonogiri, Purworejo, Magelang, Grobogan, Sragen, Kebumen, dan Cilacap	Srintil, Virginia, Asepan, tembakau nasi, Kedu, Rembang
9	Yogyakarta	Sleman, Bantul, dan Gunungkidul	Virginia, rajangan Bligon
10	Jawa Timur	Ngawi, Banyuwangi, Jember, Gresik, Nganjuk, Probolinggo, Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto, Madiun, Blitar, Malang, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan	Kasturi, Besuki, Somporejep, Rajangan rengganis, Virginia, Grompol, Campalok
11	Bali	Buleleng, Gianyar, Bangli, Karangsem, dan Bangli	Virginia

Tabel 1.1 | Provinsi Penghasil Tembakau di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Tembakau
12	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Sinjai, Bone, Jeneponto, Bulukumba, Barru, Enrekang, Soppeng, Luwu, dan Wajo	Tongka, Cabenge, Virginia
13	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima, Kab. Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa	Virginia, tembakau rajangan (Senang, Kesturi, Eskort, Hitam, dan Makopan), Ampenan
14	Nusa Tenggara Timur	Belu, Sikka, Sumba Barat, dan Timor Tengah Selatan (TTS)	

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Kenyataannya, perladangan tembakau tidak hanya terdapat di 13 provinsi, namun juga di provinsi lainnya. Provinsi seperti Aceh¹⁷³ dan Jambi¹⁷⁴ memang lebih sedikit luas lahan maupun volume produksinya. Daerah lainnya memiliki perkebunan tembakau, juga di Sumatera Selatan.¹⁷⁵ Kebanyakan adalah perkebunan kecil yang dikelola secara swadaya. Sedangkan perkebunan cengkeh, banyak terdapat di Maluku dan Sulawesi Utara. Namun demikian, provinsi lain seperti Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, juga provinsi yang menghasilkan cengkeh. Dulu, penguasaan atas panen cengkeh juga ibarat salah satu “tambang emas” bagi kapal-kapal dagang Belanda untuk memonopoli perdagangan.¹⁷⁶

Dengan meningkatnya pertumbuhan lahan untuk ladang-ladang tembakau bukan saja perputaran perdagangan tembakau ditujukan untuk ekspor, namun juga mengalami perkembangan pesat sesudah terbentuknya sejumlah sentra industri rokok, khususnya *kretek* di Jawa. Secara dominan, pasokan tembakau, terutama untuk permintaan atau kebutuhan dalam negeri, berasal dari hasil panen dari ladang-ladang tembakau yang dikelola secara swadaya oleh rakyat atau penduduk setempat, terutama terkonsentrasi di Jateng dan Jatim. Sedangkan perkebunan tembakau raksasa

¹⁷³ Lihat “Pengusaha Tembakau Datangkan Pekerja dari Jabar,” *aceh.tribunnews.com*, Rabu, 2 November 2011 09:24 WIB.

¹⁷⁴ Lihat “Tembakau Kerinci Diminati di Jawa,” *merdeka.com*, Kamis, 13 September 2012 | 00:23 WIB; “Cukai Tembakau Jambi Rp 2,2 Miliar,” *jambi.tribunnews.com*, Jumat, 18 Februari 2011 10:39 WIB; dan “Merangin akan Kembangkan Tembakau,” *jambi.antaranews.com*, Kamis, 8 November 2012 08:02 WIB.

¹⁷⁵ Lihat “Produksi Industri Manufaktur Sumsel Naik 4,61 Persen,” *sumsel.antaranews.com*, Selasa, 5 Februari 2013 18:31 WIB; dan “Alokasi Kurang Bayar DBH Cukai Tembakau Rp 91,58 Miliar,” *investor.co.id*, Selasa, 15 Januari 2013 | 13:21.

¹⁷⁶ Cengkeh dan pala dikenal sebagai bagian dari rempah-rempah telah menjadi motif ekonomi atas terbentuknya kolonialisme dagang Hindia Belanda di Nusantara lewat operasi perusahaan dagang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Cengkeh tidak hanya diolah untuk kebutuhan bumbu dapur, namun juga untuk farmasi herbal dalam bentuk minyak. Dalam kaitannya dengan rokok, cengkeh menjadi salah satu elemen dalam *kretek*. Lihat “Cengkeh, Rempah Legendaris Tanah Maluku,” *kompas.com*, Jumat, 6 Agustus 2010 | 06:58 WIB; “Sejarah Nusantara (1602-1800),” http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_%281602-1800%29 (diakses pada 1 Maret 2013); dan Bram Hendrawan, “Van Dis di Indonesia Menguak Sisi Kelam Kolonialisme,” *rnw.nl*, Kamis, 26 April 2012 - 1:33pm.

dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara milik negara (BUMN) seperti perkebunan tembakau di Deli Serdang, Sumatera Utara yang lebih bertujuan ekspor, bahkan realisasi ekspor produk tembakau provinsi mampu tumbuh 1.900 persen pada kuartal I 2012 mencapai 572 ribu kilogram (kg) atau senilai 2,860 juta dollar AS.¹⁷⁷ Sementara itu, nilai ekspor tembakau Sumut sepanjang Januari-Mei 2012 bernilai 2,659 juta dollar AS, yang berarti ini melonjak sekitar 1.114,16% dibandingkan tahun 2011 yang hanya US\$ 219.000 dengan volume 58 ton.¹⁷⁸

Selama periode Januari-November 2011, nilai ekspor tembakau Indonesia mengalami kenaikan 4,59 persen. Memang pasokan terbatas, namun larangan impor tembakau dari beberapa negara justru menjadi pendongkrak harga. BPS mengeluarkan data yang menyajikan, nilai ekspor tembakau untuk periode ini mencapai 652,2 juta dollar AS atau naik 4,59% dibandingkan tahun 2010 yang hanya US\$ 623,5 juta dollar AS.¹⁷⁹

Pada dasarnya, sebaran perladangan tembakau yang terus meningkat. Peningkatan ini tidak lepas dari hubungan rantai produksinya yang sangat erat dengan industri rokok. Sejak *kretek* mulai diterima sebagai salah satu rokok yang mengandung cengkeh dalam pasaran dalam negeri, hubungan segitiga – tembakau, cengkeh dan rokok – menjadi tidak terelakkan dalam mata rantai produksinya. Sedangkan sebagai komoditas, ketiga komoditas itu membentuk suatu rangkaian dan lintasan perdagangan baik untuk memenuhi permintaan domestik maupun ekspor.

Sejak munculnya *kretek* sebagai rokok khas produksi lokal itu kian memperjelas hubungan hubungan segitiga antara tembakau, cengkeh dan *kretek*. Tidak ada *kretek* tanpa tembakau dan cengkeh. Bahkan, para petani dan buruh panen cengkeh sempat menikmati hasil yang gemilang karena hasil panen mereka diserap oleh banyak industri *kretek* sampai akhir dekade 1980-an. Rasa gurih dan sedikit pedas maupun wangi sedapnya yang khas dan bercampur tembakau dalam *kretek*, namun terutama karena keuntungan yang besar, maka menjadi motif bagi Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto untuk bermain dan merebut ruang (pasar) dalam bisnis cengkeh. Periode 1990-an inilah yang menandai kehancuran perladangan dan usaha kecil cengkeh yang dikelola para petani disebabkan oleh keberadaan dan sekap terjeng BPPC.¹⁸⁰ Namun, sesudah berakhirnya era BPPC yang kelam, kondisi ekonomi petani cengkeh mengalami kebangkitan seiring melesatnya *kretek* mendominasi pasaran nasional atau domestik, bahkan menembus pasar ekspor.

¹⁷⁷ Lihat “Wuih, Ekspor Tembakau Sumut Naik 1.900%,” *okezone.com*, Senin, 21 Mei 2012 20:17 wib.

¹⁷⁸ Lihat “Ekspor Tembakau ke Iran Melonjak 1.114,16%,” *komoditasindonesia.com*, Senin, 16 Juli 2012.

¹⁷⁹ Volume ekspor tembakau 2011 turun 15,76 persen menjadi 92.311 ton, sedangkan selama periode Januari-November 2010 mencapai 109.577 ton. Lihat “Ekspor Naik, Harga Tembakau Ikut Terdongkrak,” *kontan.co.id*, Senin, 09 Januari 2012 | 16:10 WIB.

¹⁸⁰ BPPC terdiri atas Inkud dari unsur koperasi, PT Kerta Niaga dari unsur BUMN dan unsur swasta melalui PT Kembang Cengkih Nasional (KCN). KCN milik Tommy, putra bungsu mantan Presiden Soeharto, yang juga berstatus sebagai pimpinan BPPC. BPPC dimodali negara, karena dapat kredit 325 juta dolar AS atau Rp 759 miliar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). BPPC memperoleh hak-hak istimewa seperti memonopoli dagang, juga menentukan harga beli dan jual, serta memaksa petani untuk menyetorkan simpanan wajib khusus petani (SWKP). BPPC diperkirakan mengeruk keuntungan Rp 1,4 triliun. BPPC mirip koloni dagang VOC. Namun, sesudah reformasi, BPPC bubar, dan Soeharto pun sempat terseret menjadi tersangka. Lihat “Soeharto Tersangka Kasus BPPC,” *Kompas*, Jumat, 22 Juni 2001; “Tommy Mengaku BPPC Pernah Pinjam Dana KLBI,” *elshint.com*, Kamis, 16 Agustus 2007 10:27 WIB; “Korupsi BPPC, Ada di Mana Nurdin Halid?” *Suara Merdeka*, Kamis, 20 September 2007; dan “Tommy Bantah Ada Peyalahgunaan KLBI untuk BPPC,” *tempo.co*, Kamis, 16 Agustus 2007 | 10:58 WIB.

b. Sebaran industri rokok

Menjelang dan seiring bubarnya BPPC, secara perlahan harga cengkeh pun mulai pulih dan tidak lagi dihargai di bawah Rp 10.000 per kilogram. Harganya sempat merangkak dalam kisaran Rp 13.000-20.000 per kilogram. Tahun 2011, harganya mencapai Rp 50.000-60.000 per kilogram, dan pertengahan tahun berikutnya Rp 90.000 per kilogram untuk cengkeh kering.¹⁸¹ Sejak Agustus 2012, harga cengkeh terus melambung dan menembus harga Rp 120.000 per kilogram. Memang situasi ini sangat menguntungkan petani cengkeh, namun justru berdampak pada industri *kretek* terutama sigaret kretek tangan (SKT) yang kebanyakan industri kecil.¹⁸²

Kendati mengandung cengkeh, *kretek* justru paling banyak dikonsumsi di Indonesia yang termasuk dalam lima besar konsumen rokok sesudah China, Jepang, AS, dan Rusia. Secara nasional, pangsa pasar *kretek* mencapai 92 persen, sedangkan rokok putih (non-*kretek*) hanya 8 persen. Namun, dengan keluarnya PP No. 109/2012, Gappri menilai, akan memangkas jumlah industri rokok nasional. Pasalnya industri rokok akan menemui kesulitan untuk memenuhi ketentuan baru dari pemerintah, sehingga lambat laun, pangsa rokok putih bakal mencaplok pangsa *kretek*.¹⁸³

Tabel 1.2 Pangsa Pasar Rokok 2012		
No	Jenis Rokok	Pangsa Pasar
1	Sigaret kretek mesin (SKM)	40 persen
2	Sigaret kretek reguler (SKR)	35 persen
3	Sigaret kretek tangan (SKT)	17 persen
4	Rokok putih	8 persen
Sumber: liputan6.com, 11/02/2013 16:23		

Sejak kemunculan *kretek* pada abad ke-19 di Kudus, industri rokok mulai mendapat tempat sebagai salah satu kekuatan ekonomi Hindia Belanda. Penanaman dan pengolahan tembakau, cengkeh dan kemudian diakhiri dengan produk rokok, pangsa pasar *kretek* pun terus berkembang seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan ekonomi. Semula dilinting dengan tangan dan peralatan yang sederhana, selanjutnya digantikan dengan produksi mesin seiring kemajuan teknologi produksi dan perluasan modal dalam industri rokok *kretek*. Kendati demikian, tidak berarti rokok putih tidak diproduksi seperti rokok yang berasal dari Kisaran,

¹⁸¹ Lihat "Harga Cengkeh Tinggi, Alhamdulillah Petani Untung," *republika.co.id*, Sabtu, 16 Juni 2012, 05:53 WIB.

¹⁸² Lihat "Harga Cengkeh Naik, Pabrik Rokok Kecil Khawatir," *kompas.com*, Senin, 7 Januari 2013 | 10:41 WIB.

¹⁸³ Lihat "Rokok Putih Bakal Caplok Pangsa Pasar Kretek," *liputan6.com*, Senin, 11 Februari 2013 16:23. Bagi Gappri, industri rokok nasional yang dimaksud dan dipandang sebagai identitasnya adalah industri *kretek*, bukan industri rokok putih.

Sumatera Utara.¹⁸⁴ Rokok putih juga pernah diproduksi di Cirebon, Jawa Barat, sejak masa Hindia Belanda.¹⁸⁵

Industri rokok tidak hanya terdapat di Kudus, Kediri, Malang, Surabaya, dan Cirebon, melainkan tersebar juga di berbagai daerah lainnya seperti di Pasuruan, Madiun, Sleman, Bantul, Solo, Karanganyar, Semarang, dan Karawang.¹⁸⁶ Bahkan sekarang, terdapat pula industri rokok rumahan (*home industry*) di Lombok.¹⁸⁷ Karena produksi tembakau Lombok mengalami peningkatan dan dengan kualitas yang berpeluang menyisihkan kualitas tembakau dunia, maka sebagian tembakaunya diekspor selain untuk memenuhi kebutuhan nasional.¹⁸⁸ Perkembangan yang menjanjikan ini telah muncul desakan di DPRD NTB yang menyarankan pemerintah provinsi ini untuk mengundang investor supaya membangun pabrik rokok guna menghisap hasil produksi tembakau Lombok.¹⁸⁹

Tabel 1.3 | Provinsi Penghasil Rokok di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Rokok
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	Kretek
2	Sumatera Utara	Pematang Siantar, Kota Medan	Rokok putih
3	Jawa Barat	Kota Cirebon, Cirebon, Karawang, Bekasi	Rokok putih dan kretek
4	Jawa Tengah	Semarang, Jepara, Pati, Demak, Kudus, Karanganyar, Solo, Kebumen, dan Salatiga	Kretek dan rokok putih
5	Yogyakarta	Bantul, Sleman, dan Kulonprogo	Kretek
6	Jawa Timur	Pamekasan, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Probolinggo, Lumajang, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Malang, Kediri, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Tulungagung, Magetan, dan Pacitan	Kretek

¹⁸⁴ Rokok putih ini dikeluarkan oleh Kisaran Tobacco Company (KTC). Namun, Kisaran Tobacco tidak dapat bertahan, sehingga tutup pada 2008. Tahun 2007 produksi rokok Sumut masih di posisi 2,4 milyar batang dan terus turun selama beberapa tahun terakhir. Lihat “Industri Rokok Sumut Belum Stabil,” *medantalk.com*, Kamis, 13 Januari 2011 at 10:47 AM.

¹⁸⁵ Semula adalah perusahaan rokok SS Michael. Kemudian British American Tobaccos (BAT) memproduksi beberapa merek rokok putih. Lihat “Gedung BAT Cirebon,” <http://www.kratonpedia.com/picture-view/2012/1/27/681/Gedung.BAT.Cirebon.html> (diakses pada Kamis, 28 Februari 2013); dan Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosuanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal. 211.

¹⁸⁶ Lihat “Pabrik Rokok ke 4 di DIY Diresmikan,” *harianjogja.com*, Rabu, 21 Juli 2010 14:00 WIB; “Makin Banyak Industri Rokok Kecil Bangkrut,” *jogja.tribunnews.com*, Rabu, 16 November 2011 00:16 WIB; dan “Philip Morris Bangun 2 Pabrik Rokok Sampoerna di Jatim,” *finance.detik.com*, Rabu, 11 Juli 2012 14:40 WIB.

¹⁸⁷ Lihat “Saatnya Pabrik Rokok Rumahan Diberdayakan,” *bp3ed.disperindag.ntbprov.go.id*, Jumat, 10 Agustus 2012 09:52.

¹⁸⁸ Lihat “Telah Diekspor, Potensial Sisihkan Kualitas Dunia,” *suarantb.com*, Senin 24 Mei 2010.

¹⁸⁹ Lihat “Gubernur Diminta Undang Investor Bangun Pabrik Rokok,” *beritadaerah.com*, Rabu, 12 September 2012.

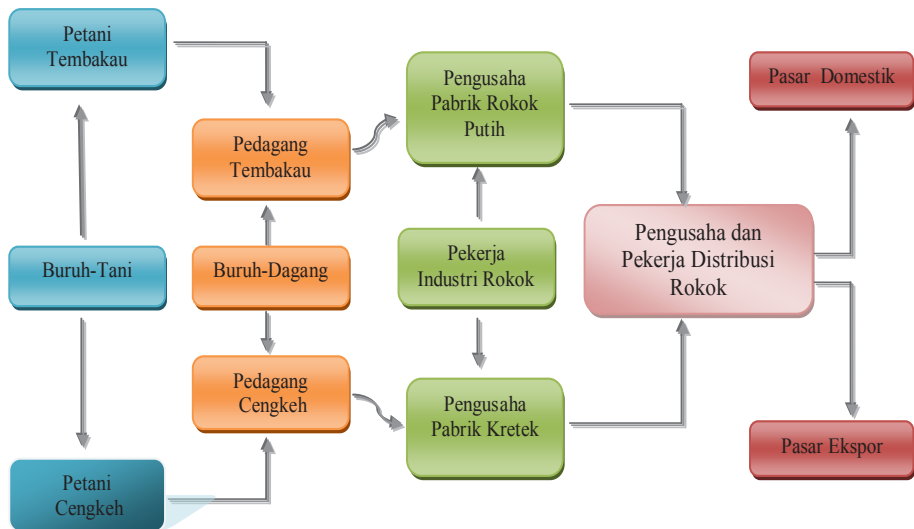
Tabel 1.3 Provinsi Penghasil Rokok di Indonesia			
No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Rokok
7	Sulawesi Selatan	Soppeng	Kretek
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat	Kretek (<i>home industry</i>)
Sumber: diolah dari berbagai sumber			

Sebagian besar industri rokok memang terkonsentrasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagaimana halnya penghasil tembakau terbesar untuk kebutuhan nasional. Industri rokok juga sedikit terdapat di Yogyakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Lainnya industri kecil yang lebih ditujukan untuk memenuhi permintaan lokal. Kendati demikian, dari 33 provinsi di Indonesia, sebanyak 28 daerah merupakan daerah penghasil rokok dan kebanyakan adalah industri kecil. Empat kota penghasil *kretek* terbesar adalah Kudus, Kediri, Malang, dan Surabaya.

c. Serapan tenaga kerja

Mata rantai produksi tembakau, cengkeh dan industri rokok terutama *kretek* bukan saja memberikan banyak keuntungan bagi lapisan petani dan pedagang tembakau, petani dan pedagang cengkeh, serta pengusaha industri rokok dan pedagangnya, namun juga serapannya terhadap tenaga kerja dari berbagai perlintasannya. Industri pengolahan tembakau ini telah membentuk rangkaian lapisan pekerja, mulai dari perkebunan dan pengolahan tembakau sampai industri rokok. Sebagian besar pekerja terserap dalam industri kecil yang masih menggunakan tangan atau sigaret kretek tangan (SKT). Lapisan ini masih ditopang dengan pekerja dagang untuk memasarkan tembakau dan rokok baik untuk pasar domestik (*domestic demand*) maupun pasar ekspor. Pembentukan lapisan pekerja industri pengolahan tembakau ini dapat dilihat pada **gambar 1.1**.

Gambar 1.1: Proses Pembentukan Pekerja Industri Pengolahan Tembakau



Bisa dipastikan bahwa banyak orang terlibat dalam penanaman dan pengolahan tembakau sebelum dihisap oleh industri rokok, terutama *kretek*. Sedangkan penanaman dan pengolahan cengkeh tidaklah sebanyak tembakau, dengan sentra utama terdapat di Maluku dan Sulawesi Utara. Perkebunan tembakau terbanyak memang paling banyak tersebar di Jatim, dengan luas lahan mencapai 102.000 hektare dan tersebar di 22 kabupaten. Pada 2011, produksi tembakau Jatim per tahun mencapai 81 ribu ton, atau 56,9 persen dari produksi tembakau nasional.¹⁹⁰ Sehingga paling banyak buruh tembakau berada di provinsi Jatim.

KNPK memperkirakan, dari hulu hingga hilir, berkisar antara 30-35 juta orang yang bekerja dalam rangkaian produksi tembakau, cengkeh, industri rokok, serta dalam perdagangan tembakau dan rokok, termasuk efek ganda (*multiplier effect*) dari keberadaan produk-produknya.¹⁹¹ Sedangkan perkiraan lain mengungkapkan, sekitar 34 juta pekerja yang bersentuhan dengan industri rokok, baik langsung maupun tidak langsung.¹⁹²

¹⁹⁰ Lihat "RUU Pengendalian Tembakau Jangan Merugikan Jawa Timur," *tempo.co*, Kamis, 17 Februari 2011 | 17:08 WIB.

¹⁹¹ Lihat "RPP Tembakau Merugikan 30 juta Pekerja Rokok," *inilah.com*, Jumat, 3 Agustus 2012 | 11:28 WIB; dan "KNPK: 35 Juta Orang Terancam Menganggur," *republika.co.id*, Selasa, 03 Juli 2012, 18:15 WIB. Ada pula sebanyak 2,1 juta petani tembakau di seluruh Indonesia, selain buruh tembakau, buruh cengkeh, pekerja rajang, buruh rokok, pengecer dan sebagainya.

¹⁹² Badrul Munir, "Rokok dan Wong Cilik," *kompas.com*, Sabtu, 21 Juli 2012 | 02:14 WIB.

Perihal berapa banyak petani dan buruh tembakau di seluruh Indonesia, APTI mengatakan, jumlahnya sebanyak 2,1 juta orang.¹⁹³ Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pada 2005 jumlah petani tembakau 1,6 persen dari jumlah tenaga sektor pertanian, yakni sebanyak 2,2 juta orang.¹⁹⁴ AMTI memperkirakan, sekitar 2,5 juta orang bekerja di perkebunan tembakau.¹⁹⁵ Mereka tersebar terutama di 10 provinsi. Jumlah petani tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lebih dari 12.500 orang, namun mereka menghidupi seratusan ribu keluarga mereka, selain kontribusi tembakau nasional sebanyak 10 persen.¹⁹⁶

Berapa banyak orang yang bekerja dalam industri rokok? Pada Januari 2010, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, di Indonesia sedikitnya terdapat 3.800 pabrik rokok, termasuk kelas rumahan. Sehingga jumlahnya paling banyak di seluruh dunia. Pabrik rokok ini terkonsentrasi di Jateng dan Jatim, dengan jumlah sekitar 3.000 pabrik.¹⁹⁷ Berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang dikompilasi oleh asosiasi industri, jumlah perusahaan rokok di Indonesia tahun 2007 mencapai 5.000 unit, kemudian turun menjadi 1.500 unit pada 2010. Jumlahnya diperkirakan turun lagi sebesar 17 persen pada 2012 dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁹⁸

Sedangkan jumlah pekerja dalam industri rokok, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan sekitar 6,1 juta orang. Namun sebanyak 80 persen justru pekerja *outsourcing* (alihdaya) yang mayoritas bertugas sebagai pekerja linting (menggulung rokok) yang merupakan pekerjaan utama (*core business*). Perusahaan rokok besar yang menggunakan sistem mitra produksi sigaret (MPS), banyak mempekerjakan buruh borongan bidang melinting rokok.¹⁹⁹ Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim mencatat sebanyak 1.314 perusahaan rokok, dengan perkiraan menyerap tenaga kerja sebanyak 6,4 juta orang pada 2006. Operasi industri ini juga menimbulkan efek ganda yang ditaksir mencapai 18 juta orang.²⁰⁰

d. Besarnya cukai buat negara

Kendati industri pengolahan tembakau menghadapi dua tekanan sekaligus – regim kesehatan dan perdagangan bebas – namun pemerintah terus mendongkrak lebih tinggi dalam penerimaan cukai buat negara. Industri rokok tidak hanya mengalami tekanan di negeri sendiri, namun juga negeri-negeri tujuan ekspor seperti AS, Brazil, India dan Thailand, serta belakangan Australia yang ikut memberlakukan pengetatan impor komoditas rokok kretek asal Indonesia.²⁰¹ Segera disusul larangan ekspor rokok kretek ke Selandia Baru.²⁰²

¹⁹³ Lihat “RPP Tembakau Disahkan, Jutaan Orang Kehilangan Pekerjaan,” *kompas.com*, Selasa, 3 Juli 2012 | 19:55 WIB.

¹⁹⁴ Badrul Munir, “Rokok dan Wong Cilik,” *kompas.com*, Sabtu, 21 Juli 2012 | 02:14 WIB.

¹⁹⁵ Lihat “RPP Tembakau Harus Lindungi 2,5 Juta Petani,” *inilah.com*, Jumat, 6 Juli 2012 | 15:16 WIB.

¹⁹⁶ Lihat “Protes, Ratusan Petani di Yogya Bakar Tembakau,” *tempo.co*, Sabtu, 19 Januari 2013 | 12:17 WIB.

¹⁹⁷ Lihat “Wah... Pabrik Rokok di Indonesia Terbanyak di Dunia,” *kompas.com*, Kamis, 14 Januari 2010 | 14:36 WIB.

¹⁹⁸ Lihat “Jumlah Perusahaan Rokok Diperkirakan Turun 17%,” *indonesiafinancetoday.com*, Selasa, 21 Jun 2012.

¹⁹⁹ Lihat “6,1 juta Alihdaya Industri Rokok Minta Diangkat,” *bisnis.com*, Rabu, 21 November 2012 | 12:47 WIB.

²⁰⁰ Lihat “Jawa Timur Pasok 50 Persen Kebutuhan Tembakau Nasional,” *tempo.co*, Rabu, 12 Juli 2006 | 19:37 WIB.

²⁰¹ Lihat “RI berhenti ekspor rokok kretek ke AS,” *harianjogja.com*, Senin, 28 Juni 2010; “Kena Embargo, Ekspor Rokok ke AS Merosot,” *republika.co.id*, Selasa, 29 Juni 2010, 02:23 WIB; “Australia Perketat Impor Rokok Kretek,” *investor.co.id*, Jumat, 27 April 2012 | 22:31; dan “Pakde Batal Protes Larangan Ekspor Rokok ke Dubes India,” *surabaya.tribunnews.com*, Jumat, 22 Juni 2012 16:49 WIB.

²⁰² Lihat “Selandia Baru Akan Larang Rokok Kretek Indonesia,” *indonesiafinancetoday.com*, Rabu, 25 April 2012.

Dalam industri rokok, produsen *kretek* menghadapi proteksi AS dalam bentuk regulasi the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. Menghadapi sengketa ini maka disampaikan tanggapan atas notifikasi banding pemerintah AS terhadap putusan panel World Trade Organization (WTO).²⁰³ Situasi ini menambah kesulitan ekspor ke negeri tujuan, karena kebijakan memperketat masuknya impor *kretek* yang berasal dari Indonesia.²⁰⁴ Kendati kehilangan pasar ekspor AS yang nilainya separuh dari ekspor, maka para produsen *kretek* yang tergabung dalam Gappri sudah mengalihkan ke negeri lain, sehingga industri rokok mampu tumbuh 10 persen.²⁰⁵

Industri rokok memang mengecap keuntungan dari ekspor selain memenuhi permintaan dalam negeri. Tahun 2010, diperkirakan ekspor rokok mencapai 400 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,6 triliun, terbanyak negeri tujuan Kamboja yang mencapai nilai 150 juta dollar AS per tahun.²⁰⁶ Misalnya, ekspor produksi rokok dari Kudus ditujukan ke-30 negeri.²⁰⁷ Nilai ekspor rokok dari Kudus mencapai 61,25 juta dolar AS atau naik 24,34 persen dibanding nilai ekspor tahun sebelumnya sebesar 49,26 juta dolar AS.²⁰⁸ Padahal pada 2011, nilai ekspor rokok Kudus mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 199,2 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya 16,46 juta dolar AS,²⁰⁹ bahkan melonjak sampai 300 persen.²¹⁰

Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian menyatakan, pemerintah menargetkan nilai ekspor rokok dan cerutu pada 2015 akan mencapai US\$ 1,05 miliar. Nilai ekspor ini naik 15 persen per tahun dari realisasi ekspor rokok 2008 yang mencapai US\$ 357,8 juta. Peningkatan target ekspor rokok ini digenjut seiring dengan ditekannya produksi rokok dalam negeri, sesuai *roadmap* hasil industri tembakau bahwa produksi rokok 2015 dibatasi hanya 260 miliar batang.²¹¹

Dengan ekspor komoditas rokok ke negeri tujuan, sedikitnya ada tiga implikasi positif. Pertama, produk industri rokok, terutama *kretek*, tergolong komoditas yang kompetitif di tingkat internasional. Kendati menghadapi berbagai kebijakan proteksi ke negeri tujuan, namun nilai ekspornya terus meningkat. Kedua, nilai ekspor mata dagangan rokok ini juga menandai keberadaannya sebagai penyumbang devisa atau neraca perdagangan luar negeri Indonesia. Pemerintah pun berkepentingan menargetkan ekspor rokok sampai puncaknya menjelang 2015 yang disesuaikan dengan *roadmap*-nya. Ketiga, dengan nilai ekspor yang meningkat, penerimaan negara dari pajak ekspor juga meningkat.

²⁰³ Lihat "RI Tanggapi Banding AS atas Putusan Sengketa Rokok," *investor.co.id*, Senin, 23 Januari 2012 | 19:15.

²⁰⁴ Lihat "Indonesia Kian Sulit Ekspor Rokok Kretek," *republika.co.id*, Minggu, 29 April 2012, 15:11 WIB; dan "Rokok Kretek Susah Tembus Ekspor," *kompas.com*, Kamis, 28 Juni 2012 | 09:14 WIB.

²⁰⁵ Lihat "Meski Dihambat, Industri Rokok Tumbuh 10 Persen," *tempo.co*, Selasa, 28 Februari 2012 | 19:10 WIB.

²⁰⁶ Lihat "Ekspor Rokok RI Capai Rp 3,6 Triliun, Paling Besar ke Kamboja," *finance.detik.com*, Kamis, 16 Desember 2010 14:14 WIB.

²⁰⁷ Lihat "Oow, Rokok Kudus Diekspor ke 30 Negara," *republika.co.id*, Kamis, 09 Februari 2012, 22:40 WIB.

²⁰⁸ Lihat "Peningkatan Ekspor Rokok Kudus Capai 24,34 Persen," *beritadvertiser.com*, Senin, 25 Februari 2013; "Ekspor Rokok Kudus Melonjak 200% Lebih," *Suara Merdeka*, Sabtu, 20 Maret 2012; dan "Ekspor Rokok Kudus Tumbuh 24,34% Selama 2012," *bisnis-jateng.com*, Minggu, 24 Februari 2013.

²⁰⁹ Lihat "Nilai Ekspor Rokok Melonjak," *jatengnews.com*, Senin, 16 Januari 2012.

²¹⁰ Lihat "Dilarang WHO, Ekspor Rokok Kretek di Kudus Melonjak 300 Persen," *suaramerdeka.com*, 17 Maret 2012 | 14:06 wib.

²¹¹ Lihat "2015, Ekspor Rokok Bakal Capai US\$ 1,05 M," http://log.viva.co.id/news/read/142836-2015_ekspor_rokok_bakal_capai_us_1_05_m (diakses pada 2 Maret 2013).

Selain itu, salah satu kepentingan pemerintah untuk memungut pasokan APBN dari masyarakat adalah dari cukai rokok. Setiap tahun tarif cukai terus mengalami kenaikan. Terlepas dari tekanan berbagai kalangan yang anti tembakau, dengan harapan konsumsi rokok menurun, namun gagasan mereka yang mengusulkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 65 persen dari harga jual dalam 10 tahun ke depan,²¹² pastilah mendongkrak penerimaan negara. Industri rokok kretek memang penyumbang cukai terbesar buat negara. Tahun 2010, pemerintah menargetkan penerimaan cukai senilai Rp 60,1 triliun, namun terealisasi melebihi target, yakni Rp 66,1 triliun.²¹³

Dirjen Bea Cukai mengakui, pemasukan dari cukai, memang salah satu andalan sebagai sumber penerimaan negara.²¹⁴ Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, pendapatan cukai ditargetkan Rp 75,4 triliun. Sekitar Rp 72 triliun ditargetkan dari cukai hasil tembakau, Rp 123 miliar dari cukai etil alkohol serta Rp 3,2 triliun dari cukai minuman etil alkohol.²¹⁵ Penerimaan dari tarif cukai dan batas produksi rokok *kretek* pada 2012 dapat dilihat dalam **tabel 1.4**. Industri rokok yang memproduksi sigaret kretek mesin (SKM) adalah paling banyak. Kendati jauh lebih sedikit, sigaret kretek tangan (SKT) diproduksi dengan menggunakan pekerja yang jauh lebih banyak.

Tabel 1.4 Target Penerimaan Cukai dan Batas Produk 2012				
No	Jenis Rokok	Penerimaan Cukai	Batas Produksi	Rata-rata Cukai
1	Sigaret kretek mesin (SKM)	Rp 48,67 triliun	155,5 miliar batang	Rp 313 per batang
2	Sigaret putih mesin (SPM)	Rp 4,56 triliun	16,5 miliar batang	Rp 277 per batang
3	Sigaret kretek tangan (SKT)	Rp 15,8 triliun	96,4 miliar batang	Rp 164 per batang
Jumlah		Rp 69,03 triliun	268,5 miliar batang	
Sumber: diolah dari <i>tempo.co</i> , Senin, 21 November 2011 19:02 WIB				

Namun demikian, Menko Perekonomian Hatta Radjasa juga mengakui, industri rokok adalah penyumbang cukai yang cukup tinggi dan dianggapnya sebagai punggung pendapatan negara sampai sekarang. Penerimaan negara dari cukai rokok sudah mencapai Rp 80 triliun dalam setahun.²¹⁶ Dengan provokatif, Gappri menyebut setoran industri rokok hanya dari cukai saja – belum termasuk pajak – lebih besar ketimbang Freeport pada 2010. Bila setoran Freeport itu sekitar Rp 20 triliun, maka setoran cukai rokok mencapai Rp 70 triliun. Penerimaan negara dari

²¹² Lihat “Cukai Rokok Diusulkan 65% dari Harga Jual,” *indonesiafinancetoday.com*, Jumat, 25 Januari 2013.

²¹³ Lihat “Industri Kretek Penyumbang Cukai Terbesar,” *investor.co.id*, Kamis, 24 Februari 2011 | 17:19.

²¹⁴ Lihat “Rokok Masih Diandalkan Jadi Sumber Pemasukkan Negara,” *finance.detik.com*, Kamis, 05 Juli 2012 15:49 WIB.

²¹⁵ Lihat “Cukai Rokok Naik 15 Persen,” *tempo.co*, Senin, 21 November 2011 | 19:02 WIB.

²¹⁶ Lihat “Pemerintah Raup Rp 80 Triliun dari Rokok,” *finance.detik.com*, Sabtu, 15 September 2012 14:05 WIB.

cukai rokok masih lebih besar dari sektor Mineral dan Batubara hanya menyumbang Rp 66,82 triliun.²¹⁷

Dengan tekanan dari regim kesehatan dan perdagangan dunia itu kelihatannya juga telah mendorong anggota DPR mengusulkan penerimaan cukai dioptimalisasi hingga mencapai Rp 100 triliun, dengan cara peningkatan produksi rokok, dan lebih ditekankan untuk ekspor. Dalam kaitan ekspor, karena WTO sudah menyatakan pelarangan ekspor kretek ke AS bersifat diskriminatif.²¹⁸ Namun, dengan *roadmap* pemerintah, produksi rokok sudah dibatasi. Pada 2015, produksi rokok dibatasi hanya sampai 260 miliar batang per tahun.²¹⁹

Penerimaan negara yang bersumber dari cukai tembakau, cengkeh dan produk olahannya sudah diakui sebagai tulang punggung. Industri pengolahan tembakau ini tidak hanya penyumbang cukai dan pajak, namun juga penyerapannya atas tenaga kerja yang mencapai jutaan orang. Dalam ekspor, industri ini menyumbangkan devisa atau memperbaiki neraca perdagangan luar negeri. Signifikansi industri ini tidak dapat dibantah sebagai salah satu industri yang kompetitif atau berdaya saing tinggi tanpa bergantung oleh kebijakan proteksi. Signifikansi ini karena ditopang dari warisan – dengan berbagai daya kreasi maupun pengerahan tembakau dan cengkeh lokal – produk yang dikenal sebagai *kretek*, sudah terbentuk sejak abad ke-19, mulai dari Kudus merambah ke banyak daerah lainnya.

²¹⁷ Lihat “Setoran Industri Rokok Lebih Besar dari Freeport,” *finance.detik.com*, Senin, 11/04/2011 15:37 WIB.

²¹⁸ Lihat “Anggota DPR Minta Cukai Rokok Digenjot Rp 100 Triliun,” *finance.detik.com*, Senin, 12 September 2011 19:05 WIB.

²¹⁹ Lihat “Kenaikan Cukai Sesuai Roadmap Industri Rokok,” *finance.detik.com*, Jumat, 25 November 2011 17:59 WIB.

Bab 2

Ruang Lingkup dan Metodelogi



- 2.1. Ruang Lingkup
 - 2.1.1. Rumusan masalah
 - 2.1.2. Tujuan
- 2.2. Metodologi
 - 2.2.1. Pengumpulan data
 - 2.2.2. Deskriptif-analitis

INDUSTRI pengolahan tembakau sekarang ini sedang menghadapi tekanan global dari dua sisi sekaligus. Di satu sisi adalah tekanan dari aspek kesehatan, sedangkan di sisi lain dari aspek perdagangan. Regim kesehatan dunia telah menyepakati Framework Convention on Tobacco Control atau dikenal juga WHO FCTC (2003) yang diadopsi Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) untuk mengendalikan dampak produk tembakau dan mulai berlaku sejak 27 Februari 2005. Konvensi ini juga dilengkapi dengan turunannya, yakni *The Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products* yang diadopsi oleh Konferensi Negara-negara Pihak (*Conference of the Parties*) pada 12 November 2012 di Seoul, Korea Selatan. Persoalan yang hendak dihapuskan atau dikurangi secara signifikan dalam protokol ini adalah *illicit trade*.¹

Sementara itu, dalam arena perdagangan global, beberapa pemerintah seperti Amerika Serikat (AS), Brasil, India, serta belakangan Australia dan segera disusul Selandia Baru melarang dan memperketat impor produk industri pengolahan tembakau, khususnya industri *kretek*, yang berasal dari Indonesia.² Aturan dan kebijakan pelarangan dan proteksi setiap pemerintah pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang dijalankan World Trade Organization (WTO).³ Namun demikian, tembok pelarangan dan proteksi terhadap produk industri pengolahan tembakau dari Indonesia merupakan realitas hubungan dagang dengan beberapa negeri tersebut.

Kedua tekanan itu dapat menimbulkan dampak terhadap industri pengolahan tembakau di Indonesia, terutama dalam bentuk kebijakan pemerintah. Pertama, mempersulit keberadaan industri ini dengan setiap tahunnya pemerintah menaikkan tarif cukai yang berdampak pada

¹ Pasal 1 WHO FCTC. *illicit trade* mencakup [a] produksi, pengiriman, penerimaan, pemilikan, distribusi, penyimpanan atau pembelian atas sesuatu yang dilarang/tidak sah menurut UU, [b] “regional economic integration organization” untuk mengalihkan kompetensi, mengikat dan mematuhi, [c] “tobacco advertising and promotion” atas setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi, mempengaruhi melalui promosi produk tembakau langsung atau tidak langsung, [d] “tobacco control” yang menyangkut strategi pasokan, permintaan dan pengurangan konsumsi produk tembakau dan pengaruh asap rokok, [e] “tobacco industry” yang berarti perusahaan rokok, distributor besar dan pengimpor produk tembakau, [f] “tobacco product” yang artinya seluruh atau sebagian produk terbuat dari daun tembakau sebagai bahan baku untuk dihisap, dikunyah dan dihirup, [g] “tobacco sponsorship” dalam bentuk kontribusi terhadap suatu acara, kegiatan atau individual dengan tujuan mempengaruhi melalui produk atau penggunaan tembakau, langsung atau tidak langsung.

² Lihat “RI berhenti ekspor rokok kretek ke AS,” *harianjogja.com*, Senin, 28 Juni 2010; “Kena Embargo, Ekspor Rokok ke AS Merosot,” *republika.co.id*, Selasa, 29 Juni 2010, 02:23 WIB; “Australia Perketat Impor Rokok Kretek,” *investor.co.id*, Jumat, 27 April 2012 | 22:31; “Pakde Batal Protes Larangan Ekspor Rokok ke Dubes India,” *surabaya.tribunnews.com*, Jumat, 22 Juni 2012 16:49 WIB; dan “Selandia Baru Akan Larang Rokok Kretek Indonesia,” *indonesiainancetoday.com*, Rabu, 25 April 2012.

³ Lihat “Pengusaha Rokok Dukung Banding Keputusan WTO,” *tempo.co*, Senin, 12 September 2011 | 18:49 WIB; dan “Amerika Terbukti Diskriminatif Terhadap Rokok Indonesia,” *tempo.co*, Senin, 05 September 2011 | 07:00 WIB.

kenaikan harga jualnya.⁴ Kedua, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan dampak konsumsi tembakau sebagai bagian dari kepanjangan tangan regim kesehatan dunia yang berimplikasi pada meningkatnya kampanye anti rokok yang dipaksakan kepada industri rokok.⁵ Ketiga, pemerintah telah mengeluarkan *roadmap* tentang produksi rokok untuk membatasi jumlahnya menjadi 260 miliar batang mulai 2015.⁶ Kebijakan-kebijakan ini diperkirakan berimplikasi negatif terhadap sumbangan tembakau, cengkeh dan rokok dalam perekonomian, serta berbagai lapisan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Studi ini mengambil posisi untuk mempertimbangkan signifikansi warisan dan sumbangan industri pengolahan tembakau sebagai bagian penting dalam ekonomi nasional serta tentang jutaan orang menggantungkan pekerjaan mereka dalam rangkaian hubungan produksi tembakau, cengkeh dan rokok. Produk industri pengolahan tembakau tidaklah berimbang ditinjau dan ditekan hanya dari aspek kesehatan belaka. Penekanan yang tidak berimbang ini pasti meniadakan atau mengurangi aspek yang lain. Karena itu, dalam studi ini penting pula ditinjau dan mengakui pentingnya aspek sumbangan dan warisan yang telah berlangsung lebih seabad memainkan peran dalam ekonomi, sosial dan budaya yang sudah tertanam di Indonesia.

Memang benar, setiap orang mempunyai hak atas kesehatan sebagaimana yang diwajibkan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Convention on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) yang sudah diratifikasi Republik Indonesia (RI) melalui UU No. 11/2005. Berdasarkan konvensi ini negara berkewajiban merencanakan dan merealisasikan secara bertahap terhadap pelaksanaan hak atas kesehatan baik secara fisik maupun mental.⁷ Namun benar pula dan sama pentingnya bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan,⁸ hak atas upah dan kondisi kerja⁹ maupun perlindungan hak pekerja,¹⁰ hak atas

⁴ Lihat "Cukai Naik 10%, Harga Rokok Makin Mahal Tahun Depan," *finance.detik.com*, Selasa, 04 September 2012 16:41 WIB.

⁵ Peraturan Pemerintah No. 19/2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Pasal 7: (b) tulisan peringatan kesehatan pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca; Pasal 8: (1) Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan, (2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin".

⁶ Lihat "Tantangan Jangka Panjang Industri Rokok Semakin Berat," *neraca.web.id*, Senin, 19 Desember 2011; "Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Batas Produksi Rokok," *indonesiainancetoday.com*, Kamis, 01 Desember 2011; dan "Wow! Harga Semua Cukai Rokok Akan Seragam di 2015," *finance.detik.com*, Minggu, 29 Mei 2011 14:05 WIB.

⁷ Pasal 12 ICESCR: "(1) Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental; (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan: [a] Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat, [b] Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, [c] Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, [d] Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang."

⁸ Pasal 6 ICESCR: "(1) Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini; (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan."

jaminan sosial,¹¹ serta hak berpartisipasi dalam kebudayaan, mengecap manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, memetik manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.¹²

Kewajiban dan komitmen pemerintah untuk memenuhi dan mempertahankan atau melindungi hak atas pekerjaan, hak atas upah dan kondisi kerja, jaminan perlindungan hak pekerja, hak atas jaminan sosial, serta berpartisipasi dalam kebudayaan dan mengecap manfaatnya, sangat relevan dengan studi ini. Terlebih lagi industri pengolahan tembakau bukan saja membentangkan peranannya dalam sejarah ekonomi Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang, sumbangannya bagi pajak dan cukai maupun devisa buat negara.¹³ Pasokan industri ini bersumber dari perkebunan tembakau dan cengek yang tergolong perkebunan rakyat.¹⁴

2.1. Ruang Lingkup

Studi ini memfokuskan pada lingkup kedudukan dan peranan industri pengolahan tembakau dalam memenuhi hak atas pekerjaan, hak atas upah dan tunjangan, hak atas jaminan sosial, dan Keberadaan industri ini bukan saja telah membantu pemerintah dalam menunaikan kewajibannya untuk merealisasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana yang terkandung dalam perjanjian internasional yang sudah diratifikasi atau UU No. 11/2005, namun juga mempunyai sejarah yang unik dan khas secara internal (domestik). Bahkan industri pengolahan tembakau telah dengan tangguhannya tumbuh dan bertahan menjadi salah satu industri kompetitif secara internasional.¹⁵

⁹ Pasal 7 ICESCR: "... menjamin: (a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya: [1] Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, [2] Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini; (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat; (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan; (d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum."

¹⁰ Pasal 8 ICESCR: "(1) menjamin: [a] Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pembatasan dalam pelaksanaan hak ini tidak diperbolehkan kecuali yang ditentukan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain; [b] Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;"

¹¹ Pasal 9 ICESCR: "Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial."

¹² Lihat Pasal 15 ICESCR.

¹³ Lihat "Pajak Ganda Rokok Butuh Revisi," *suaramerdeka.com*, 01 Mei 2012 | 07:43 wib; Pajak Rokok 10% dari Cukai Berlaku Tahun 2014," *kontan.co.id*, Jumat, 24 Februari 2012 | 07:37 WIB; dan "Sepanjang 2012, Industri Rokok Ditargetkan Sumbang Devisa Rp 75 Triliun," *neraca.web.id*, Kamis, 01 Maret 2012.

¹⁴ Dwiyantri Septi Pertiwi dan Fitri Arianti, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Tembakau Rakyat (Studi Kasus Desa Tegalroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)," *Diponegoro Journal of Economics*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2013; dan *Kemungkinan Rehabilitasi Tanaman Cengek Rakyat di Sulawesi Utara: Laporan Penelitian*, Manado: Proyek kerja sama antara Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara dan Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, 1981.

¹⁵ Lihat "Ekspor Rokok Kudus Melonjak 200% Lebih," *Suara Merdeka*, Selasa, 20 Maret 2012; "Krisis, Eksportir Tembakau Sumut Masih Tumbuh Positif," *okezone.com*, Senin, 13 Agustus 2012 19:18 wib; "Eksportir Rokok Sumut Masih Eksis," *bumn.go.id*, Selasa, 25 September 2012; "Eksportir Tembakau Belum Terpengaruh Krisis,"

2.1.1. Rumusan masalah

Industri pengolahan tembakau memang menghadapi dua tekanan sekaligus tidak hanya dari regim kesehatan dunia dan berbagai elemen pendukungnya di Indonesia, namun juga tekanan perdagangan. Keberadaan industri ini dituduh telah menyebabkan meluasnya konsumsi tembakau dan paparan asap rokok terhadap orang lain sehingga menimbulkan risiko terkena penyakit tidak menular (PTM). Secara berlebihan, juga dikampanyekan bahwa rokok sebagai salah satu “mesin pembunuh” yang diperkirakan telah menyebabkan kematian 300.000 orang per tahun di Indonesia, sedangkan di dunia diperkirakan jumlah itu meningkat menjadi 5,4 juta kematian per tahun atau 1 kematian tiap 6,5 detik sebagaimana diungkapkan Direktorat Pengendalian PTM Kementerian Kesehatan. Setiap batang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis racun merupakan faktor risiko dari berbagai penyakit, di mana nikotin diketahui berkontribusi terhadap kanker paru-paru, hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah, infertilitas pria, dan juga terhadap terjadinya disfungsi ereksi. Selain itu, juga mengikutsertakan data terhadap anak sebagai korban rokok dan risiko terpapar asap rokok.¹⁶

WHO FCTC memprioritaskan terhadap hak setiap orang untuk menjaga kesehatan dalam kaitannya dengan konsumsi tembakau dan paparan asap rokok. Konsumsi ini diasumsikan dan disimpulkan sebagai suatu epidemik yang telah menjadi persoalan internasional. Asumsi dan kesimpulan ini didasarkan atas berbagai penelitian tentang pengaruh asap rokok, produk-produk yang mengandung tembakau yang diracik dengan canggih untuk menimbulkan ketergantungan, selain dihasilkan secara farmakologis aktif, mengandung racun, mutagenik dan risiko kanker, serta penyakit lainnya, bahkan kemiskinan.¹⁷ Kesepakatan internasional ini bertujuan setidaknya mengurangi dampak konsumsi tembakau dan paparan asap rokok terhadap kesehatan. Dan terkesan bahwa produk tembakau sebagai satu-satunya faktor sebagai perusak kesehatan.

Dalam mengadopsi sebagian tentang perlindungan kesehatan orang lain dari paparan asap rokok, sejumlah pemerintah di daerah-daerah juga sudah merealisasikan kawasan tanpa rokok (KTR).¹⁸ Sedangkan pemerintah pusat sudah membuat *roadmap* industri pengolahan tembakau, dengan tiga tahapan periode, yaitu periode 2007-2010 yang memprioritaskan aspek tenaga kerja, penerimaan dan kesehatan; periode 2010-2015 memprioritaskan aspek penerimaan negara,

waspada.co.id, Sabtu, 10 Maret 2012 12:30; dan “Ekspor Tembakau Jember Tak Terpengaruh Krisis,” *surabaya.tribunnews.com*, Kamis, 21 Juni 2012 17:26 WIB.

¹⁶ Lihat “Rokok Diperkirakan “Bunuh” 300.000 Orang Per Tahun,” *kompas.com*, Selasa, 29 Mei 2012 | 19:32 WIB; “Jumlah Perokok Anak Bisa Naik 6 Kali Lipat,” *kompas.com*, Jumat, 25 Mei 2012 | 13:59 WIB; “Inilah Risiko bila Terpapar Asap Rokok 30 Menit,” *kompas.com*, Selasa, 15 Mei 2012 | 10:39 WIB; “Rokok Makin Mengancam Generasi Muda,” *kompas.com*, Selasa, 31 Mei 2011 | 17:15 WIB; “Kena Asap Rokok, Anak Jadi Kecanduan Nikotin,” *kompas.com*, Rabu, 15 Juni 2011 | 10:00 WIB; “43 Juta Lebih Anak Indonesia Terpapar Bahaya Rokok,” *kompas.com*, Rabu, 1 Juni 2011 | 04:48 WIB; “Asap Rokok Picu Risiko Hiperaktif,” *kompas.com*, Senin, 11 April 2011 | 15:24 WIB; dan “Rokok Hambat Orgasme pada Wanita,” *kompas.com*, Kamis, 26 Mei 2011 | 15:31 WIB. Lihat juga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Framework Convention on Tobacco Control (Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau)*, Jakarta: Komnas HAM, 2012, hal. 17. Dikemukakan juga, lebih dari 80 persen perokok ada di negeri-negeri sedang berkembang seperti Indonesia. Sebuah survei yang dilakukan *Global Youth Tobacco Survey 2009* yang menunjukkan bahwa 20,3 persen pelajar SMP sudah merokok sebagai pendukung kampanye.

¹⁷ Lihat “Pembukaan” dalam FCTC.

¹⁸ Lihat “Mulai 2013, Kawasan Tanpa Rokok Diwajibkan,” *kompas.com*, Rabu, 23 Januari 2013 | 18:58 WIB; “Bali Berlakukan Perda Kawasan Tanpa Rokok,” *voaindonesia.com*, Sabtu, 02 Juni 2012; “Muspida Dukung Perda Kawasan Tanpa Rokok,” *fajar.co.id*, Jumat, 02 November 2012 | 20:12:08 WITA; dan “Pemko Bukittinggi Terapkan Sanksi Perda Kawasan Tanpa Rokok,” *rri.co.id*, Selasa, 22 Januari 2013 10:46.

kesehatan, dan tenaga kerja; serta periode 2015-2020, prioritas tertuju pada aspek kesehatan, tenaga kerja dan penerimaan negara.¹⁹

Kendati demikian, *roadmap* itu tidak diterapkan secara konsekuen. Pemerintah lebih mengutamakan aspek penerimaan negara ketimbang aspek tenaga kerja. Dalam periode 2007-2010, kenaikan tarif cukai rokok terus diberlakukan setiap tahun. Kenyataan ini berdampak pada banyak industri rokok skala menengah dan kecil menderita dan terpaksa gulung tikar atau bangkrut.²⁰ Sedangkan dalam periode 2010-2015, pemerintah kian menggenjot penerimaan negara dari cukai, memajukan aspek kesehatan dari dampak konsumsi tembakau dan paparan asap rokok, serta mendesak ke belakang aspek tenaga kerja. Periode ini diiringi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.²¹ Periode ini dipandang sebagai ancaman terhadap banyak orang yang bakal kehilangan pekerjaan dari dampak kebijakan pemerintah.²²

Namun, dalam situasi semacam itu Menteri Keuangan mengatakan bahwa kenaikan tarif cukai rokok telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk industri besar dan pengusaha kecil, melindungi kesehatan, serta sudah selaras dengan *roadmap*.²³ Padahal kenyataannya, kebijakan yang ditempuh pemerintah justru terus mendesak kian ke belakang aspek tenaga kerja, karena kian banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan dan upah, selain banyak industri kecil berakhir dengan gulung tikar. Sebagai contoh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan mengungkapkan, sebanyak 205 perusahaan rokok di Pamekasan mengalami gulung tikar atau rugi akibat harga cukai yang ditetapkan pemerintah terlalu mahal.²⁴

Kebijakan pemerintah yang menyulitkan industri pengolahan tembakau itu kian diperkuat oleh dua organisasi keagamaan yang cukup berpengaruh, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

¹⁹ Imam Haryono, "Roadmap 2007-2020 Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai," <http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/pdf/sby60.pdf> (diakses pada 4 Maret 2013). Lihat juga, "Pemerintah Tak Peduli Pengusaha Rokok Protes Cukai Naik," *finance.detik.com*, Senin, 28 November 2011 13:01 WIB.

²⁰ Lihat "Kenaikan Cukai Rokok Akan Menambah Pemasukan Negara," *kompas.com*, Rabu, 22 Juli 2009 | 11:34 WIB; "Tarif Cukai Rokok 2007 Diterapkan Per Batang," *liputan6.com*, Sabtu, 18 November 2006 14:34; "Tarif Cukai Spesifik Rokok Berlaku Mulai 1 Juli," *antaranews.com*, Kamis, 28 Juni 2007 17:22 WIB; "Mulai Januari 2008 Tarif Cukai Spesifik Rokok Naik, Tarif Cukai Advalorum Turun," *beritasore.com*, Rabu, 2 Januari 2008; "Cukai Rokok 2009 Naik 7%, Penerimaan Bea Cukai Lampau Rp 49 T," *finance.detik.com*, Selasa, 16 Desember 2008 11:00 WIB; "Pemerintah Putuskan Kenaikan Cukai Rokok," *kompas.com*, Rabu, 18 November 2009 | 17:20 WIB; "Target Cukai Rokok 2010 Naik," *kompas.com*, Rabu, 17 Februari 2010 | 11:54 WIB; "Kebijakan Pita Cukai Ancam Ratusan Perusahaan Rokok," *okezone.com*, Kamis, 29 November 2007 16:09 wib; "15 Ribu Industri Kecil Rokok Kretek Gulung Tikar," *temanggungkab.go.id*, Kamis, 3 Mei 2012; dan "Cukai Tinggi, Ratusan Perusahaan Rokok Gulung Tikar," *liputan6.com*, Sabtu, 16 Juni 2012 14:59.

²¹ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono PP No. 109/2012 pada 24 Desember 2012. Lihat "SBY Teken PP Tembakau," *tempo.co*, Rabu, 09 Januari 2013 | 21:22 WIB; dan "KNPK: Pemerintah Tak Pernah Libatkan Stakeholder Tembakau," *liputan6.com*, Sabtu, 09 Juni 2012 14:10.

²² Lihat "KNPK: 35 Juta Orang Terancam Menganggur," *republika.co.id*, Selasa, 03 Juli 2012, 18:15 WIB; dan "PP Tembakau Mengancam Industri Kecil dan Menengah," *kontan.co.id*, Jumat, 11 Januari 2013 | 09:14 WIB.

²³ Lihat "Kenaikan Cukai Sesuai Roadmap Industri Rokok," *finance.detik.com*, Jumat, 25 November 2011 17:59 WIB.

²⁴ Lihat "Cukai Tinggi, Ratusan Perusahaan Rokok Gulung Tikar," *liputan6.com*, 16 Juni 2012 14:59.

Muhammadiyah. Tahun 2009, MUI mengeluarkan fatwa haram merokok.²⁵ Setahun kemudian, pada 8 Maret 2010 di Yogyakarta, giliran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengeluarkan fatwa haram merokok. Dengan fatwa ini mengubah hukumnya dari mubah atau dibolehkan menjadi larangan.²⁶ Fatwa ini mengejutkan mantan Ketua PP Muhammadiyah.²⁷ Fatwa ini dikawatirkan kian menyulitkan industri pengolahan tembakau seperti bertambahnya pengangguran.²⁸ Demikian pula dengan elemen-elemen lainnya yang aktif dalam kampanye anti rokok. Semua ini menjadi tantangan bagi industri pengolahan tembakau yang telah dipaksa menghadapi situasi yang melawannya.

Tabel 2.1 Tantangan Industri Tembakau			
No	Pihak	Produk	Tantangan
1	Internasional	WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC); The Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products; dan "Hari Tanpa Tembakau"	Penghapusan bentuk-bentuk <i>illicit trade</i>
2	Republik Indonesia	Hukum: UU No. 11/1995 tentang Cukai; UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 40/1999 tentang Pers; UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak; dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.	Penerimaan negara, perlindungan konsumen, anak, kesehatan, dan siaran iklan; Komnas HAM mendesak ratifikasi FCTC
		Kebijakan pemerintah: PP No. 19/2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan; PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan	Informasi kandungan rokok, kampanye anti rokok, dan siaran iklan
		Cukai: Peraturan Menteri Keuangan; dan <i>Roadmap</i>	Harga rokok mahal; strategi mengurangi konsumsi rokok
		Pemerintah daerah: Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Membatasi kawasan bagi perokok
3	Organisasi keagamaan	Fatwa haram merokok	Larangan merokok
4	Organisasi dan kelompok lainnya	Kampanye anti rokok/tembakau	Menggugat dampak konsumsi rokok

²⁵ Lihat "MUI Siapkan Fatwa Haram untuk Rokok," *kompas.com*, Selasa, 12 Agustus 2008 | 13:08 WIB; dan "MUI: Merokok Haram," *bbc.co.uk*, Minggu, 25 Januari, 2009 - 13:08 GMT.

²⁶ Lihat "Fatwa Muhammadiyah: Rokok Haram," *viva.co.id*, Selasa, 9 Maret 2010, 16:12; dan "Fatwa Haram Rokok Muhammadiyah Sejalan dengan Kebijakan Pemprov DKI," *detik.com*, Minggu, 14 Maret 2010 09:38 WIB.

²⁷ Lihat "Amien Rais Terkejut Fatwa Haram Merokok," *kompas.com*, Sabtu, 13 Maret 2010 | 15:18 WIB.

²⁸ Lihat "Fatwa Haram Rokok Naikkan Pengangguran," *Suara Merdeka*, Senin, 21 Januari 2009.

Dengan tekanan regim kesehatan dunia dan diikuti pemerintah lewat Kementerian Kesehatan, serta kampanye anti rokok yang digalang berbagai elemen non-negara, telah menghadapi industri pengolahan tembakau berada dalam kesulitan, terutama ancaman serius yang dialami banyak industri kecil.²⁹ Ancaman ini berantai dampaknya, yaitu pada banyaknya PHK atas pekerja dan mereka pun kehilangan upah.³⁰ Padahal, industri pengolahan tembakau, terutama dalam *kretek*, merupakan salah satu industri yang penting dan khas Indonesia. Industri *kretek* terbentuk sesudah Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) berakhir, bersumber dari daya kreasi dan dengan mengerahkan sumber daya lokal. Industri ini juga sudah melekat dalam kebudayaan Nusantara, bahkan menjadi identitas dari mana rokok itu berasal.

Dengan mempertimbangkan banyaknya elemen sosial yang masif terlibat dalam industri pengolahan tembakau dan cengekeh, maka tidaklah mengherankan munculnya resistensi mereka terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap merugikan kepentingan mereka. Dengan demikian, di satu sisi mereka yang terlibat dalam industri pengolahan tembakau menghadapi tantangan atau kesulitan bahkan ancaman dari kebijakan pemerintah, maka di sisi lain resistensi mereka terhadap kebijakan pemerintah juga dapat menjadi tantangan bagi pemerintah.

2.1.2. Maksud dan tujuan

Studi ini pada dasarnya bermaksud untuk memberikan tandingan atau tantangan terhadap pandangan dan penelitian yang selama ini menekan industri pengolahan tembakau. Sebaliknya hendak menegaskan tentang signifikansinya dalam ekonomi nasional bukan saja di masa Hindia Belanda, namun juga peranannya sampai sekarang yang mampu menembus pasar ekspor dan menunjukkan karakternya yang kompetitif. Industri ini juga bersifat khas yang membentuk identitas dalam sejarah dan produk industri *kretek*.³¹ Bahkan, identitas suatu kebudayaan telah diperbincangkan sebagai hak manusia.³²

Maksud lainnya adalah menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menekankan pentingnya aspek kesehatan belaka tanpa mengimbanginya dengan aspek tenaga kerja. Penekanan “kesehatan melawan rokok” hanyalah gambaran yang menunjukkan hilangnya aspek tenaga kerja yang berada di balik beroperasinya industri pengolahan tembakau. Mengabaikan atau menyembunyikan hak atas pekerjaan, upah dan tunjangan kerja, adalah juga menyematkan dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memenuhi (*to fulfil*) dan melindungi (*to protect*) hak-hak itu.

²⁹ Lihat “Aturan Cukai Rokok Baru Ancam Industri Kecil,” *tempo.co*, Senin, 02 Juli 2012 | 16:19 WIB; “Industri Rumahan Rokok Nyaris Bangkrut Akibat Cukai Mahal,” *pikiran-rakyat.com*, Selasa, 8 Januari 2013 - 05:38; “Road Map IHT Ancaman Industri Rokok,” *suaramerdeka.com*, Jumat, 08 April 2011 | 13:38 wib; “Industri Kecil Rokok, Mati Tersundut Cukai,” *inilah.com*, Sabtu, 17 November 2012 | 10:01 WIB; dan “Industri Rokok Rumahan Jatim Terancam Gulung Tikar,” *republika.co.id*, Jumat, 11 Januari 2013, 14:08 WIB.

³⁰ Lihat “Road Map Industri Rokok: Ancaman PHK Massal Menghadang,” *suaramerdeka.com*, 28 Maret 2011 | 08:44 wib; “500 Ribu Tenaga Pabrik Rokok Terancam PHK,” *surabaya.tribunnews.com*, Rabu, 20 Juni 2012 18:48 WIB; “PPRK Jamin Buruh PHK Mendapat Pesangon,” *antaranews.com*, Selasa, 9 Februari 2010 23:17 WIB; “Gulung Tikar, Jumlah Buruh Rokok Terus Menurun,” *antarajateng.com*, Selasa, 28 Agst 2012 15:57:23 WIB; dan “Pabrik Rokok Lokal Mulai PHK Karyawan,” *bisnis.com*, Selasa, 08 Mei 2012 | 18:36 WIB.

³¹ Mark Hanusz, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Jakarta: Equinox, 2000.

³² Yvonne Donders, *Towards a Right to Cultural Identity?* Antwerp: Intersentia, 2002.

Dengan itulah maka studi ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran tentang kesulitan atau tantangan dan ancaman yang dihadapi elemen-elemen yang terlibat dalam aktivitas ekonomi tembakau, cengkeh dan industri rokok terkait berbagai upaya yang melawannya baik di tingkat internasional maupun di dalam negeri. Kesulitan ini pun masih ditambah dengan kebijakan pemerintah yang terus-menerus mengeruk penerimaannya dengan memberlakukan kenaikan tarif cukai setiap tahun. Kesulitan ini telah semakin mendesak ke belakang aspek tenaga kerja pada saat bersamaan negara memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pajak dan tarif cukai tembakau.

Studi juga bertujuan menjadi *input* untuk pemerintah dan DPR supaya dapat mempertimbangkan dalam perbaikan kebijakan maupun rencana pembentukan Undang-Undang (UU) atau legislasi lainnya yang berdampak negatif pada industri pengolahan tembakau dan mereka yang terlibat di dalam industri tersebut. Pemerintah dan DPR tidak boleh mengutamakan pemenuhan dan perlindungan hak atas kesehatan belaka dengan mengesampingkan hak atas pekerjaan, hak atas upah dan tunjangan, jaminan sosial, dan budaya dengan cara melawan industri pengolahan tembakau. Karena hak-hak itu saling bergantung, tidak terpisahkan dan dibutuhkan bagi setiap orang.³³

2.2. Metodologi

Studi ini menggunakan kerangka deskriptif-analitis³⁴ dalam menggambarkan dan menelaah keberadaan industri pengolahan tembakau dengan berbagai kontribusinya secara nasional dan lokal. Industri ini sudah terbentuk sejak akhir abad ke-19 dan terus bertahan dan berkembang sampai sekarang sebagai salah satu yang kompetitif kendati menghadapi berbagai gelombang krisis ekonomi dunia.³⁵ Secara deskriptif hendak dijelaskan tentang pentingnya kedudukan dan peranan industri pengolahan tembakau dalam ekonomi nasional. Seberapa pentingnya, dapat ditimbang dari kontribusinya baik untuk penerimaan negara dan devisa maupun penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku, keluasaan permintaan domestik, serta daya saing.

Lebih jauh, studi ini juga mempertimbangkan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas upah dan kondisi kerja maupun jaminan perlindungan hak pekerja, hak atas jaminan sosial, serta berpartisipasi dalam kebudayaan dan mengecap manfaatnya. Perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan tidak boleh mengabaikan atau mengesampingkan hak-hak lainnya untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Negara tidak berlaku adil dan jujur bila mempertentangkan hak atas kesehatan melawan tembakau tanpa menunjukkan keberadaan lapisan sosial yang mengoperasikan industri pengolahan tembakau tersebut. Dalam perlindungan

³³ Victoria Hamlyn, "The Indivisibility of Human Rights: Economic, Social and Cultural Rights and the European Convention on Human Rights," *Bracton Law Journal*, Vol. 40, 2008; dan *Vienna Declaration and Programme of Action: Report of the World Conference on Human Rights*, Vienna, 14-25 June 1993, UN Doc A/CONF.157/23 (1993); 32 ILM 1661 (1993), 1.5.

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005; Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Rosdakarya, 1995; dan Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

³⁵ Lihat "Ekspor Rokok Kudus Melonjak 200% Lebih," *Suara Merdeka*, Selasa, 20 Maret 2012; "Krisis, Ekspor Tembakau Sumut Masih Tumbuh Positif," *okezone.com*, Senin, 13 Agustus 2012 19:18 wib; "Ekspor Rokok Sumut Masih Eksis," *bumn.go.id*, Selasa, 25 September 2012; "Ekspor Tembakau Belum Terpengaruh Krisis," *waspada.co.id*, Sabtu, 10 Maret 2012 12:30; dan "Ekspor Tembakau Jember Tak Terpengaruh Krisis," *surabaya.tribunnews.com*, Kamis, 21 Juni 2012 17:26 WIB.

dan pemenuhan hak-hak ini, pendekatan yang standar digunakan adalah metodologi berbasis indikator (*indicators based methodology*) sebagai prinsip implementasi kewajiban negara (*obligation of the state*) yang disusul dengan dua kewajiban tambahan, yaitu kewajiban berbuat (*obligation of conduct*) dan kewajiban meraih hasil (*obligation of result*).³⁶

2.2.1. Pengumpulan dan pengolahan data

Studi ini disusun berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data dikumpulkan sebanyak mungkin dan relevan dengan keberadaan industri pengolahan tembakau dan sedapat mungkin dapat memberikan gambaran tentang perkembangan terkini dan dinamika yang mengiringinya, selain kontribusinya bagi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pengumpulan data ini tidak hanya data tertulis berupa buku, klipng berita digital dan artikel, namun juga makalah-makalah. Data terbanyak berupa berita digital yang menjadi rujukan bagi perkembangan terkini yang sekaligus mewarnai dinamika industri pengolahan tembakau. Ada banyak pendapat atau pandangan yang dikumpulkan, sehingga dapat memperkaya studi ini.

Berbagai informasi yang dikumpulkan dan terdokumentasi juga dilakukan pengolahan atas sebagian informasi yang terseleksi untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel, grafik dan gambar. Kendati demikian, tetap dipertimbangkan akurasi datanya, terutama terkait jumlah atau angka. Dengan teknik pengolahan data seperti ini dapat ditunjukkan apa dan bagaimana perkembangan terkini atas industri pengolahan tembakau di Indonesia. Dengan cara ini bisa lebih banyak data yang dapat digunakan dalam penyusunan naskah studi ini. Cara ini tidak berarti data yang berasal dari kementerian, badan statistik, organisasi atau lembaga penelitian lainnya dikesampingkan.

2.2.2. Deskriptif-analitis

Industri pengolahan tembakau bukanlah industri baru di Indonesia, melainkan sudah tertancap sejak lama dan mengiringi kemunculan perkebunan tebu, kopi dan nila yang sudah lebih dulu dimobilisasi. Interpretasi sejarah merupakan salah satu cara dalam menggunakan metode deskriptif yang membentangkan hubungannya dengan masa lampau sebelum industri pengolahan tembakau menempati kedudukannya yang penting seperti sekarang dalam ekonomi Indonesia. Kemudian industri ini dianalisa dan membedakannya dengan sejumlah industri lainnya sebagai komparasi atas keunggulannya.

Namun karena studi ini tidak membatasi pada satu pendekatan saja dan mengaitkan dalam beberapa relasi dalam suatu situasi, maka beberapa pendekatan yang digunakan dapat saling melengkapi. Misalnya, pendekatan berbasis indikator berguna untuk menunjukkan implementasi kewajiban pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak sebagai solusi yang dijalankan. Indikator ini akan diperiksa, sehingga dapat diketahui progres yang telah dilakukan pemerintah dalam merealisasikan hak-hak terkait langkah-langkahnya dalam menjalankan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

Di satu sisi deskripsi atas industri pengolahan tembakau yang dilihat seberapa penting kedudukannya dalam perekonomian. Ukuran ini tidak hanya dalam skala dan prosentase, namun juga keunikan dan sifat atau karakternya. Banyak kampanye anti tembakau, kelihatannya juga

³⁶ Matthew CR Craven, *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: A Perspective on Its Development*, Oxford: Clarendon Press, 1995.

mengabaikan karakter dan keunikan yang tersembunyi dalam industri pengolahan tembakau. Di sisi lain, setiap langkah yang ditempuh negara terutama oleh pemerintah, haruslah mempertimbangkan relasinya secara khusus terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah mempunyai *road map* sebagai patokan dalam merealisasikan beberapa prioritas dalam setiap lima tahun,³⁷ bisa digunakan untuk melakukan penilaian.

Tabel 2.2 Aspek dalam Road Map IHT			
Periode	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
2007-2010	Aspek penyerapan tenaga kerja	Aspek penerimaan negara	Aspek kesehatan masyarakat
2010-2015	Aspek penerimaan negara	Aspek kesehatan masyarakat	Aspek penyerapan tenaga kerja
2016-2020	Aspek kesehatan masyarakat	Aspek penyerapan tenaga kerja	Aspek penerimaan negara
Sumber: diolah dari finance.detik.com, Jumat, 25/11/2011 17:59 WIB			

³⁷ Lihat “Kenaikan Cukai Sesuai Roadmap Industri Rokok,” *finance.detik.com*, Jumat, 25/11/2011 17:59 WIB.

Bab 3

Industri Pengolahan Tembakau dan Cengkeh



- 3.1. Kedudukan Tembakau
 - 3.1.1. Bukan komoditas ilegal
 - 3.1.2. Menguntungkan dan ekspor
 - a. Komoditas yang menguntungkan
 - b. Komoditas ekspor
 - c. Ekspor meningkat
- 3.2. Komoditas Cengkeh
 - 3.2.1. Cengkeh untuk kretek
 - 3.2.2. Lahan cengkeh
 - 3.2.3. Produksi cengkeh
- 3.3. Sirkuit Produksi Lengkap dan Mandiri
 - 3.3.1. Proses produksi yang lengkap
 - 3.3.2. Pemupukan modal secara mandiri
 - 3.3.3. Persaingan, kejatuhan dan bangkit lagi
- 3.4. Industri Padat Karya
 - 3.4.1. Petani dan pekerja tembakau
 - 3.4.2. Petani dan pekerja cengkeh
 - 3.4.3. Serapan industri rokok atas tenaga kerja
- 3.5. Produksi, Pasar Domestik dan Ekspor
 - 3.5.1. Jumlah produksi rokok
 - 3.5.2. Pangsa pasar domestik
 - 3.5.3. Pasar ekspor rokok
- 3.6. Kontribusi Cukai untuk Negara
 - 3.6.1. Kecenderungan melonjak
 - 3.6.2. Alokasi dana bagi hasil cukai
- 3.7. Kretek sebagai Warisan Budaya
 - 3.7.1. Industri yang tangguh
 - 3.7.2. Warisan budaya

Kendati menghadapi tantangan sebagai industri yang ditekan pengaruh dan jumlah konsumsinya secara global dan nasional, namun industri pengolahan tembakau – disebut juga industri hasil tembakau (IHT) – masih tetap menempati kedudukan yang penting dalam perekonomian. IHT bukan saja memberikan sumbangan pendapatan yang besar bagi negara melalui pajak dan cukai, namun juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sekurang-kurangnya berbagai industri rokok di Jawa Tengah mampu menyerap sebanyak 113.323 tenaga kerja.¹ Karena peran

¹ Lihat “Industri Rokok Berperan Penting di Perekonomian IHT Jateng Serap 113.000 Pekerja,” *joglosemar.co*, Rabu, 28 April 2010 09:00 WIB. Usaha industri rokok di Jateng tersebar di 34 kabupaten/kota, kecuali Kota Tegal dan Kabupaten Wonogiri.

yang besar dalam ekonomi, maka dipandang penting untuk mempertahankan keberadaan industri keretek.²

Pada 2011, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memang tidak mengumumkan daftar pembayar pajak terbesar karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang (UU) No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, namun majalah *Forbes* justru menempatkan R Budi dan Michael Hartono di puncak dari 40 orang terkaya di Indonesia.³ Kedua pengusaha rokok ini masih bertengger sebagai orang terkaya dengan total kekayaan mereka mencapai Rp 126 triliun.⁴ Dalam rilis posisi orang terkaya Indonesia untuk tiga teratas – Hartono bersaudara, Susilo Wonowidjojo dan Eka Tjipta Widjaja – nilai kekayaan mereka mencapai 32,5 miliar dollar AS atau 38 persen dari total kekayaan 40 orang terkaya.⁵ Sedangkan di lain sisi, Ditjen Pajak mengumumkan para penunggak pajak yang dinilai tidak bertentangan dengan UU. Sehingga pada Januari 2010, terungkap 100 penunggak pajak.⁶ Perusahaan Tambang Minyak Negara (Pertamina) termasuk penunggak pajak terbesar dan dilakukan tindakan penagihan.⁷

Sesudah regim Soeharto berlalu, posisi konglomerat teratas pun mengalami pergeseran. Sebelumnya, kebanyakan grup perusahaan yang berada di puncak atau 10 besar mempunyai hubungan khusus sebagai kroni-kroni Soeharto. Posisi ini mulai mengalami pergeseran, karena terdapat tiga grup perusahaan industri *kretek* masuk ke dalam 10 besar dan bahkan PT Gudang Garam sempat melesat di peringkat pertama pada 1999 (lihat **tabel 3.1**). Pertumbuhan industri *kretek* tidak begitu terpengaruh oleh gelombang krisis finansial sejak pertengahan 1997. Pada Tahun 1994 penerimaan negara dari cukai rokok saja mencapai Rp 2,9 triliun, bahkan pada 1997 mengalami peningkatan hampir 200 persen menjadi Rp 4,792 triliun.⁸

² Lihat “Penting, Mempertahankan Eksistensi Industri Keretek,” *suaramerdeka.com*, Senin, 14 Januari 2013 | 12:59 wib.

³ Lihat “Ditjen Pajak Tidak Umumkan Pembayar Pajak Terbesar,” *investor.co.id*, Jumat, 25 November 2011 | 15:28.

⁴ Lihat “Ini Alasan Pengusaha Rokok Orang Terkaya di Indonesia,” *tribunnews.com*, Jumat, 25 November 2011 11:36 WIB. Budi dan Michael Hartono merupakan dua bersaudara pemilik grup rokok Djarum. Selain memiliki pabrik rokok Djarum, keduanya adalah bos PT Bank Central Asia Tbk (BCA), bank dengan pemilik nasabah kelas menengah atas terbesar di Indonesia. Mereka juga memiliki perkebunan sawit seluas 65.000 hektare di Kalimantan Barat sejak 2008, serta sejumlah properti di antaranya pemilik Grand Indonesia. Budi dan Michael menjadi terkaya karena BCA dan Grand Indonesia, baru didukung oleh industri rokoknya. Ditambah lagi dengan industri elektroniknya.

⁵ Lihat “Hartono Bersaudara Masih Orang Terkaya Indonesia,” *kompas.com*, Kamis, 24 November 2011 | 13:57 WIB.

⁶ Lihat “Daftar 100 Wajib Pajak Penunggak Pajak,” *finance.detik.com*, Kamis, 28 Januari 2010 17:48 WIB.

⁷ Lihat “Daftar 10 Penunggak Pajak Terbesar,” *finance.detik.com*, Rabu, 03 Februari 2010 21:48 WIB. Sepuluh penunggak pajak adalah Pertamina (Persero): Surat Paksa; Karaha Bodas Company LLC: Penyanderaan; Industri Pulp Lestari: Blokir Rekening; BPPN: Surat Paksa; Kalimantan Plywood Industries: Penyitaan; Bakrie Investindo: Surat Paksa; Bentala Kartika Abadi: Surat Paksa; Daya Guna Samudra Tbk: Pelelangan; Kaltim Prima Coal: Surat Paksa; dan Merpati Nusantara Airlines: Surat Paksa.

⁸ Simon Bambang Sumarno dan Mudrajad Kuncoro, “Struktur, Kinerja, dan Kluster Industri Rokok Kretek: Indonesia, 1996-1999”, <http://website.mudrajad.com/sites/default/files/softcopies/Struktur,%20Kinerja,%20dan%20Kluster%20Industri%20Rokok%20Kretek%20Indonesia,%201996-1999.pdf> (diakses pada 30 Maret 2013).

Tabel 3.1 10 Besar Perusahaan Indonesia Versi Far Eastern Economic Review, 1999-2001				
1999	2000	2001	Perusahaan	Poin
2	1	1	Astra International	6.06
3	2	2	Indofood	5.9
6	3	3	HM Sampoerna	5.72
1	4	4	Gudang Garam	5.55
5	5	5	Indosat	5.42
7	8	6	Djarum	5.1
-	9	1	Telkomsel	5.03
-		8	Satelindo	4.97
-	7	9	Sosro	4.95
-	10	10	SCTV	4.94

Sumber: Sumber: FEER, <http://www.feer.com>, 23 April 2002

Namun, sesudah lebih 10 tahun, peringkat siapa saja yang berada dalam jajaran orang terkaya di Indonesia pada 2012 juga mengalami pergeseran. Para pengusaha pemilik industri kretek bukan saja masuk dalam tiga besar, namun keluarga pemilik Grup Djarum berada di puncak dalam daftar 10 besar. Mereka sudah menelakung beberapa pengusaha nasional yang jauh dari pusaran Istana Cendana. Beberapa pengusaha teratas bukan lagi produk patronase bisnis (*business patronage*).⁹ Karena sebagian dari mereka adalah yang menggalang bisnis secara independen. Selain keluarga Hartono, terdapat pula keluarga Susilo Wonowidjojo (Grup Gudang Garam) serta keluarga Putera Sampoerna sebagai orang terkaya yang semula berkecimpung dalam industri rokok *kretek* (lihat **tabel 3.2**).¹⁰ Bahkan penerus patronase Orde Baru, Aburizal Bakrie bukan saja tidak termasuk dalam jajaran 10 besar, melainkan juga terlempar dari 40 orang terkaya.¹¹

Tabel 3.2 10 Keluarga Terkaya di Indonesia versi Forbes 2012			
No	Keluarga	Jumlah	
1	R Budi dan Michael Hartono	15,0 miliar dollar AS	Grup Djarum
2	Keluarga Eka Tjipta Widjaja	7,7 miliar dollar AS	Grup Sinarmas
3	Keluarga Susilo Wonowidjojo	7,4 miliar dollar AS	Grup Gudang Garam
4	Keluarga Anthoni Salim	5,2 miliar dollar AS	Grup Indofood
5	Chairul Tanjung	3,4 miliar dollar AS	Grup Para/CT Corp
6	Sri Prakash Lohia	3,0 miliar dollar AS	Grup Indorama

⁹ Bandingkan dengan karya Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydney: Allen & Unwin, 1986. Pada periode Soeharto, konglomerat dibentuk dalam pusaran Istana Cendana.

¹⁰ Lihat "Ini 10 Konglomerat Teratas Indonesia 2012," *kompas.com*, Kamis, 29 November 2012 | 14:00 WIB; "Inilah Para Jawara Bisnis Rokok," *inilah.com*, Senin, 25 Juni 2012 | 08:32 WIB; "Ini Dia Gurita Bisnis Chairul Tanjung dari Es Krim Hingga Ritel," *suarapengusaha.com*, Selasa, 20 November 2012 - 04:17 pm; dan "Sri Prakash Lohia, Bermula dari Purwakarta," *tempo.co*, Senin, 05 November 2012 | 04:05 WIB.

¹¹ Lihat "Aburizal Bakrie Tertendang dari Daftar 40 Orang Terkaya RI," *kompas.com*, Kamis, 29 November 2012 | 14:45 WIB.

Tabel 3.2 | 10 Keluarga Terkaya di Indonesia versi Forbes 2012

No	Keluarga	Jumlah	
7	Sukanto Tanoto	2,8 miliar dollar AS	Grup RGM
8	Martua Sitorus	2,7 miliar dollar AS	Grup Wilmar
9	Peter Sondakh	2,6 miliar dollar AS	Grup Rajawali
10	Keluarga Putera Sampoerna	2,3 miliar dollar AS	Alfa/Mansion*

Sumber: diolah dari kompas.com, Kamis, 29 November 2012 | 14:00 WIB

Catatan: *) Sebelumnya diakuisi Philip Morris Inc adalah pemilik Grup Sampoerna

Majalah *Forbes* mengeluarkan daftar 2000 perusahaan perusahaan *listed* terbesar di dunia, *Global 2000*. Dari dua ribu perusahaan yang terdaftar, perusahaan-perusahaan dari AS dan Jepang paling banyak, yaitu masing-masing 524 perusahaan dan 258 perusahaan. Dalam daftar ini terdapat 10 perusahaan asal Indonesia, sebanyak enam perusahaan merupakan perusahaan milik negara (BUMN), empat di antaranya adalah bank negara. Dari empat perusahaan swasta, perusahaan industri *kretek* PT Gudang Garam Tbk (GGRM) berada di peringkat 1.399, teratas dibandingkan swasta lainnya (lihat **tabel 3.3**). PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menempati peringkat paling tinggi perusahaan negara yang berada di peringkat 479.¹²

Tabel 3.3 | 10 Perusahaan Terbesar Indonesia di Dunia (US\$)

No	Perusahaan	Peringkat	Pendapatan	Laba Bersih	Aset	Market Value
1	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)	479	5,9 miliar	1,7 miliar	51,5 miliar	18,4 miliar
2	PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)	488	6 miliar	1,3 miliar	60,4 miliar	17,6 miliar
3	PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)	700	3,1 miliar	900 juta	35,9 miliar	21,1 miliar
4	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)	726	7,6 miliar	1,3 miliar	11,1 miliar	14,9 miliar
5	PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)	969	3,1 miliar	600 juta	32,9 miliar	7,8 miliar
6	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)	1.351	2,2 miliar	700 juta	3,5 miliar	10,1 miliar
7	PT Gudang Garam Tbk (GGRM)	1.399	4,2 miliar	500 juta	3,4 miliar	11,5 miliar
8	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN)	1.636	2,4 miliar	400 juta	15,6 miliar	4,6 miliar
9	PT Semen Gresik Tbk (SMGR)	1.674	1,6 miliar	700 juta	1,7 miliar	8,1 miliar
10	PT Bumi Resources Tbk (BUMI)	1.898	4,4 miliar	300 miliar	8,8 miliar	5,4 miliar

Sumber: Dikutip dari okezone.com, 19 April 2012 12:15

Bab ini mendeskripsikan pentingnya kedudukan dan kontribusi industri pengolahan tembakau dalam perekonomian, mulai dari karakteristik dan kemunculannya di masa kolonial sampai keberadaannya sekarang. Setiap pemilik perusahaan yang dilempar produk-produknya ke pasar, pasti dilandasi oleh motif mengejar laba baik sebanyak mungkin maupun laba yang stabil dalam jangka panjang. Dengan motif ini di satu sisi timbul ketegangannya dengan buruh-buruh yang dipekerjakan terkait upah dan tunjangan atau kondisi kerja lainnya, namun di sisi lain industri rokok juga membuka kesempatan kerja dan penghasilan bagi banyak orang. Sedangkan hal yang

¹² Lihat "10 Perusahaan RI Masuk Daftar Perusahaan Terbesar Dunia," *okezone.com*, Kamis, 19 April 2012 12:15 wib.

tidak kalah pentingnya adalah pasar bagi produk-produk industri pengolahan tembakau sebagai arena persaingan mereka. Belakangan, industri rokok menghadapi tantangan dari kampanye global anti tembakau dan tekanan perdagangan dalam menghadapi para pesaing.

Memang dalam kampanye anti tembakau ini sejumlah pihak berpendapat industri pengolahan tembakau tidaklah penting.¹³ Sebuah lembaga anti tembakau, Tobacco Control Support Centre (TCSC), juga tidak memandang penting sumbangan iklan rokok terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan non rokok.¹⁴ Demikian pula kontribusinya terhadap ekonomi yang dinyatakan oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.¹⁵ Dengan tekanan ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian segera mengalihkan produksi petani dari tanaman tembakau ke hortikultura.¹⁶ Kampanye global anti tembakau ini gencar pula dipromosikan oleh peneliti Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health atas keberhasilan petani di lereng gunung Merapi yang beralih dari tembakau ke tanaman sayuran.¹⁷

3.1. Kedudukan Tembakau

Namun kisah dari lereng Merapi itu berbeda dengan sejumlah petani dari beberapa daerah lainnya. Sejumlah petani kopi di beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, mulai meninggalkan kebun-kebun kopi mereka yang sudah digarap secara turun temurun. Para petani mulai beralih ke kebun tembakau yang harganya lebih menjanjikan untuk keluarga mereka.¹⁸ Sebagian petani padi di Kabupaten Garut, beralih menanam tembakau supaya mendapatkan penghasilan selama musim kemarau.¹⁹ Petani di kawasan pegunungan Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, mulai beralih menanam tembakau setelah sebagian areal pertaniannya terserang hama wereng di batang coklat pada awal musim tanam kemarau. Selain lebih tahan terhadap serangan hama, harga bibit tembakau juga sedang murah sehingga dinilai lebih menguntungkan.²⁰

Dengan beberapa peralihan itu bisa diperkirakan bahwa jumlah petani yang terlibat dalam produksi tembakau terus bertambah kendati tekanan perdagangan dan kampanye anti tembakau terus bergaung. Pada 2007, sedikitnya luas lahan untuk produksi tembakau seluas 198.054 hektare. Luas lahan di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat mencapai 90 persen dari total lahan tembakau. Lahan terluas adalah Jawa Timur, dengan luas 108.701 hektare. Sedangkan luas lahan yang berada di bawah 10 persen adalah Jawa Barat, serta Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat (lihat **tabel 3.4**).

¹³ Lihat "Gappri: Industri Rokok Tak Dianggap Penting," *inilah.com*, Senin, 25 Juni 2012 | 07:00 WIB.

¹⁴ Lihat "Pendapatan Pajak Rokok Sangat Kecil Dibanding Pajak Non Rokok," *detik.com*, Rabu, 15 Juni 2011 14:39 WIB.

¹⁵ Lihat "Kontribusi Ekonomi Industri Rokok Kecil?" *sindonews.com*, Kamis, 6 Desember 2012– 14:21 WIB.

¹⁶ Lihat "Pemerintah Siap Alihkan Petani Tembakau ke Hortikultura," *antaranews.com*, Selasa, 2 Maret 2010 19:12 WIB.

¹⁷ Penelitian ini sebagai strategi pengurangan konsumsi rokok di Indonesia yang harus mulai melibatkan petani tembakau, yang disponsori Bloomberg Initiative (BI) dan didukung oleh Muhammadiyah. Lihat "Petani Tembakau Merapi Berhasil Beralih ke Sayuran," *tempo.co*, Rabu, 05 Desember 2012 | 18:51 WIB; dan "Lebih Menguntungkan Saat Tembakau Digantikan Sayuran," *pikiran-rakyat.com*, Sabtu, 09 Maret 2013 - 011:15:00.

¹⁸ Lihat "Patani Kopi Lampung Ramai-ramai Beralih ke Tembakau," *republika.co.id*, Minggu, 15 Juli 2012, 10:00 WIB.

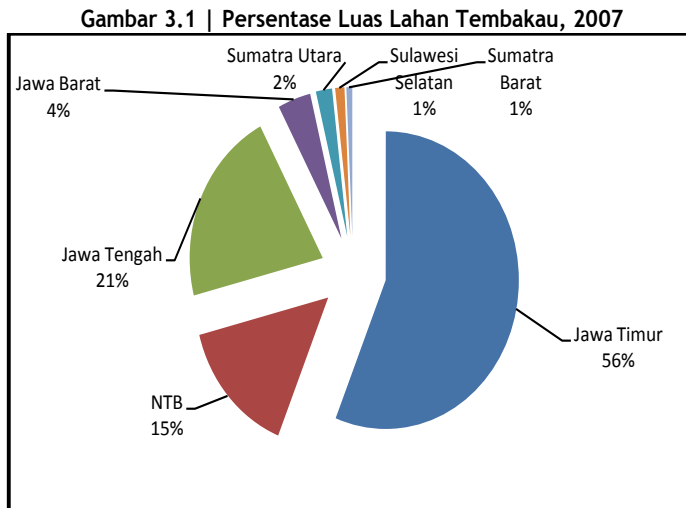
¹⁹ Lihat "Akibat Kemarau, Petani Padi Beralih Tanam Tembakau," *aktual.co*, Senin, 3 September 2012 09:01:00.

²⁰ Lihat "Petani Kebumen Beralih ke Tembakau," *kompas.com*, Kamis, 14 Juli 2011 | 20:30 WIB.

Tabel 3.4 Luas Lahan Produksi Tembakau 2007			
No	Provinsi	Luas (ha)	%
1	Jawa Timur	108.701	54,9
2	Jawa Tengah	41.186	20,8
3	Nusa Tenggara Barat	28.671	14,5
4	Jawa Barat	7.655	3,9
5	Sumatra Utara	3.709	1,9
6	Sulawesi Selatan	2.265	1,1
7	Sumatra Barat	1.350	0,7
8	Lainnya	4.517	2,3
Jumlah		198.054	100,0

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Tembakau/Tobacco, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan. 2008

Bila luas lahan itu disusun berdasarkan persentase, maka Jawa Timur – dengan sejarah panjang perladangan tembakau sudah berlangsung – lebih dari 50 persen luas lahan produksi tembakau di Indonesia. Kendati banyak kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi sentra tembakau, namun hanya 21 persen dari total luas lahan perkebunan tembakau. Selanjutnya disusul NTB seluas 15 persen dan Jawa Barat hanya 4 persen luas lahannya. **Gambar 3.1** memberikan gambaran tentang persentase luas lahan tembakau. Sedangkan lahan perkebunan tembakau di Sumatera Utara hanya 2 persen saja.



3.1.1. Bukan komoditas ilegal

Tanaman tembakau (*Nicotiana tabacum*) adalah genus tanaman yang berdaun lebar yang semula berasal dari Amerika.²¹ Tembakau termasuk tanaman semusim, dapat dipanen sekitar 90-120 hari. Berdasarkan waktu, penamaan tembakau dibagi dua, yaitu VO tembakau musim kemarau (*Voor Oogst*) dan NO musim hujan (*Na Oogst*). Ketika tiba waktunya, tanaman tembakau pun dipanen, kemudian daunnya dirajang dan dijemur. Daun tembakau yang sudah dirajang dan dikeringkan inilah yang menjadi bahan baku utama rokok baik sigaret putih, rokok kretek, dan cerutu maupun tembakau pipa dan tingwe.

Selain digunakan sebagai bahan baku dalam industri rokok, tembakau dapat pula menghasilkan protein anti-kanker – “Growth Colony Stimulating Factor” (GCSF) – yang berguna bagi penderita kanker. Kegunaan lainnya adalah untuk menstimulasi perbanyakan sel tunas (*stemcell*) yang bisa dikembangkan untuk memulihkan jaringan fungsi tubuh yang sudah rusak.²² Tembakau yang dimodifikasi secara genetik dapat memproduksi obat diabetes dan kekebalan tubuh. Tembakau transgenik yang memproduksi interleukin-10 (IL-10) merupakan *cytokine* anti-radang yang ampuh. *Cytokine* adalah protein yang merangsang sel-sel kekebalan tubuh agar aktif. Penggunaan IL-10 dalam dosis kecil dapat membantu mencegah kencing manis (*diabetes mellitus*) tipe 1.²³ Beberapa lainnya manfaat tembakau adalah melepaskan gigitan lintah, obat HIV/AIDS, dan obat luka.²⁴

Salah satu spesies tembakau, *Nicotiana glauca*, dapat memproduksi senyawa yang digunakan sebagai biodiesel – sumber energi berbasis bukan fosil – lebih ramah lingkungan. Senyawa ini bisa digunakan secara langsung sebagai bahan bakar atau diproses menjadi produk minyak lainnya. Spesies ini dapat tumbuh baik di kondisi yang panas dan gersang. Untuk tumbuh besar, tanaman tembakau ini tidak butuh tanah yang subur dan bisa hidup di kawasan yang hanya mendapatkan curah hujan 200 milimeter per tahun atau bertemperatur di atas 40 derajat Celsius.²⁵

Kendati banyak manfaatnya sebagai bahan obat-obatan selain paling banyak digunakan sebagai bahan baku rokok yang juga banyak dihisap orang, namun tembakau bukan termasuk makanan. Memang ada tembakau yang dikunyah baik yang pernah digunakan para penambang batubara

²¹ Contohnya, tembakau Virginia. Virginia adalah salah satu negara bagian di Republik Amerika Serikat (United State of America, USA) yang terletak di sebelah timur. Jenis tembakau ini banyak terdapat di Lombok.

²² Peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Arief Budi Witarto MEng adalah seorang ahli di bidang rekayasa protein. Dia menjelaskan, tanaman tembakau dapat dimanfaatkan sebagai reaktor penghasil protein GCSF, suatu hormon yang menstimulasi produksi darah. Lihat “Tembakau Dapat Hasilkan Protein Anti-Kanker,” *antaranews.com*, Kamis, 14 Juni 2007 00:47 WIB.

²³ Lihat “Tembakau untuk Obat Kencing Manis,” *gatra.com*, Kamis, 16 April 2009. Menurut Profesor Mario Pezzotti dari Universitas Verona, tanaman transgenik menarik untuk sistem produksi protein kesehatan karena menawarkan kemungkinan produksi pada skala besar dengan biaya rendah, sehingga menghindari proses pemurnian yang panjang dibandingkan dengan obat tradisional sintetis.

²⁴ Budiah Sari Siregar, “Tembakau Manfaat yang Terlupakan,” *analisdaily.com*, Senin, 06 Agustus 2012 00:04 WIB.

²⁵ Lihat “Tembakau Berpotensi Jadi Sumber Energi Terbaru,” *kompas.com*, Jumat, 30 November 2012 | 12:01 WIB. Penelitian dilakukan oleh sekelompok ilmuwan asal School of Biological Sciences, Inggris, maupun para peneliti dari Laboratorium Bioteknologi Universitas Thomas Jefferson. Tanaman tembakau juga bisa menjadi sumber pemasok bioethanol dan biodiesel, yang bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dalam bentuk aslinya, sehingga bisa menjadi alternatif energi untuk mengurangi *global warming*.

untuk mengganti rokok ataupun bernama *gutkha* di India atau sugi. Tradisi mengunyah tembakau juga pernah dilakukan suku Indian. Tembakau ini tidaklah memabukkan, namun dapat merangsang untuk menambah semangat (kerja).²⁶

Seiring dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, pada 24 Desember 2012, diberlakukan mulai tahun 2014. PP ini mewajibkan pabrik rokok putih untuk membungkus 20 batang rokok dalam satu bungkus, sehingga tidak ada lagi kemasan 12 atau 16 batang. Rokok juga dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Pada samping kemasan produk, harus pula tercantum pernyataan, “Tidak ada batas aman” dan “Mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”.²⁷

Menko Kesra Agung Laksono menyatakan, PP itu ditujukan untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok, bukan melarang petani bertanam tembakau, bukan pula larangan iklan, perdagangan, dan produksi rokok, serta larangan membawa dan menjual rokok.²⁸ Perihal tidak melarang petani menanam tembakau, sudah beberapa kali dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) seperti ketika berupaya melunakkan ketidaksetujuan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) atas RPP Tembakau,²⁹ rapat kerja dengan Komisi IX DPR,³⁰ serta menyatakan bahaya rokok dan kerugian menanam tembakau.³¹

Karena tidak adanya larangan menanam maupun memperdagangkan tembakau, maka tembakau bukanlah komoditas ilegal. Memproduksi dan mendistribusi tembakau bukanlah suatu tindakan ilegal, melainkan sesuatu yang diperbolehkan. Setiap orang bebas memproduksi dan mendistribusi tembakau sebagai komoditas baik diperdagangkan di pasar dalam negeri maupun diekspor ke negeri lain. Karena tembakau bukan termasuk narkotika yang dilarang berdasarkan hukum atau UU.

3.1.2. Menguntungkan dan ekspor

Mengapa banyak petani lebih memilih mempertahankan lahannya ditanami tembakau ketimbang tanaman lain, bahkan tidak sedikit yang beralih ke tanaman tembakau? Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan mereka tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Pertama, tembakau merupakan komoditas tanaman yang paling menguntungkan sampai sekarang ini. Kedua, tidak semua lahan tembakau cocok dengan tanaman alternatif. Lahan di Temanggung pernah dicoba tanaman jagung, namun hasilnya jauh dari memuaskan. Ketiga, di beberapa daerah, menanam tembakau bersentuhan dengan aspek budaya, semacam kebanggaan dan unsur sakralnya.³²

²⁶ Lihat “Tembakau Kunyah,” http://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau_kunyah (diakses pada 10 Maret 2013).

²⁷ Lihat “PP Tembakau Disahkan, Apa yang Dilarang?” *viva.co.id*, Rabu, 9 Januari 2013, 10:53.

²⁸ Lihat “Menko Kesra: Tak Perlu Resah, PP Tembakau Tidak Larang Tanam Tembakau,” *setkab.go.id*, Sabtu, 12 Januari 2013 - 11:42 WIB.

²⁹ Lihat “Menkes: RPP Tidak Larang Orang Tanam Tembakau,” *viva.co.id*, Jumat, 6 Januari 2012, 13:52.

³⁰ Lihat “Menkes: Pemerintah Tak Larang Tanam Tembakau,” *kompas.com*, Senin, 25 Juni 2012 | 12:41 WIB.

³¹ Lihat “Menkes: RPP Tembakau Tidak Larang Menanam Tembakau,” *kontan.co.id*, Senin, 09 Juli 2012 | 13:24 WIB.

³² Lihat “Tiga Alasan Petani Tak Mau Beralih dari Tembakau,” *okezone.com*, Senin, 14 November 2011 16:05 wib.

a. Komoditas yang menguntungkan

Ketika dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 81/1999 tentang Kandungan Tar dan Nikotin dalam Produk Rokok, sebagian petani sudah menyatakan tekad mereka untuk terus menanam tembakau, karena sejak lama memang menjadi komoditas yang menguntungkan. Mereka yang sudah terbiasa menanam tembakau memang memandang komoditas ini sangat penting dibandingkan tanaman atau komoditas lainnya.

Seorang petani mengaku, dari 20 hektare lahan yang ditanami menghasilkan sebanyak 40 ton tembakau virginia kering berkualitas tinggi dengan harga Rp 8.000/kg. Total hasil penjualan tembakau, sebanyak Rp 320 juta. Penghasilan yang diperoleh dua kali lipat dari hasil dua kali menanam padi.³³ Ternyata, lebih 12 tahun kemudian, pendapat ini tidak berubah pada petani di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.³⁴ Belakangan, seorang petani di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, juga mengungkapkan telah coba menanam berbagai tanaman, mulai dari jagung, melon, tomat, sampai kacang. Akhirnya ditanam tembakau yang lebih cocok untuk musim kemarau dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanaman lain.³⁵

Kementerian Pertanian telah menyiapkan langkah pengalihan tanaman tembakau ke tanaman hortikultura sebagai antisipasi dampak pengendalian tembakau yang ketat. Menteri Pertanian, Suswono, juga menyatakan, peluang pengembangan tanaman hortikultura lebih bagus ke depan karena selain untuk memenuhi pasar dalam negeri juga bisa dipasarkan ke luar negeri.³⁶ Namun gagasan kementerian ini menuai kritik. Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) menyayangkan pernyataan Menteri Pertanian tidak bisa memberikan jaminan ke petani tembakau bahwa produksi sistem pertanian hortikultura yang digagas bisa bersaing dengan produk impor dan lebih menguntungkan.³⁷

Tembakau yang ditanam di lereng gunung Sindoro dan Sumbing, Kabupaten Temanggung, sebagian adalah penghasil tembakau kualitas nomor satu, yakni tembakau *srintil*. Kendati ditanam dan dipanen dari kebun yang sama, tidak semua tembakau “dianugerahi” sebutan *srintil*, yang bisa dijual dalam kisaran Rp 400.000 – Rp 800.000 per kilogram. Seorang petani tembakau di Dukuh berpegang pada warisan pengetahuannya tentang tembakau secara turun-temurun, yaitu tanah (*siti*), benih (*wiji*), dan cuaca atau waktu (*wanci*). Contoh tanahnya pernah diperiksa di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan dibawa ke Amerika Serikat (AS) untuk mengetahui apakah contoh tanah ini dapat menghasilkan kualitas tembakau yang terbaik. Selain itu, kualitas tembakau bergantung juga kepada cuaca atau waktu. Misalnya, ketika tanaman membutuhkan

³³ Lihat “Tembakau Menguntungkan Dibanding Padi,” *Suara Pembaruan*, Senin, 17 Januari 2000.

³⁴ Lihat “Dibanding Padi, Tembakau Lebih Menguntungkan,” *jurnas.com*, Jumat, 1 Jun 2012.

³⁵ Lihat Julkifli Marbun, “Tembakau Lebih Menguntungkan bagi Petani,” <http://tsc-indonesia.org/?p=2992> (diakses pada 9 Maret 2013).

³⁶ Lihat “Pemerintah Siap Alihkan Petani Tembakau ke Hortikultura,” *antaranews.com*, Selasa, 2 Maret 2010 19:12 WIB.

³⁷ Lihat “Puskindo: Pemerintah Tak Bisa Pakasakan Petani Ganti Tanaman Tembakau,” *tribunnews.com*, Sabtu, 19 Januari 2013 11:41 WIB. Puskindo menerangkan, petani tentu yang paling tahu dan berhak menentukan mana tanaman yang akan ditanam, cocok dengan iklim dan lingkungan, dan menguntungkan secara ekonomis. Petani tidak mungkin menanam tembakau kalau tidak menguntungkan.

guyuran hujan, namun hujan tidak turun, atau sebaliknya, dapat menimbulkan stress atau ketebalan daunnya mengempes.³⁸

Dengan demikian, tidak setiap tanah dapat ditanami tembakau yang dibutuhkan, terlebih lagi bila hendak mendapatkan kualitas yang bagus, seperti sebutan “Negeri di atas Awan” terhadap beberapa dusun di Temanggung. Sebaliknya, tidak setiap lahan yang pernah ditanami tembakau, kemudian cocok ditanami dengan tanaman alternatif seperti hortikultura. Penanaman tembakau telah berlangsung secara turun-temurun, dengan pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan jenis tanah yang berbeda, hasil tembakau juga berbeda. Bila sentra produksi tembakau di Temanggung termasyhur sebagai penghasil *srintil*, maka Sumenep masyhur dengan tembakau *campalok*.³⁹ Sedangkan di lahan yang ditanami tembakau tidak begitu cocok dengan tanaman lain.⁴⁰

Selain itu, muncul penolakan terhadap agenda pemerintah yang mengalihkan tanaman dari tembakau ke yang tanaman lainnya sebagaimana penolakan ini disuarakan oleh APTI Bali. Mereka menolak arah kebijakan pemerintah di bidang pertanian untuk melakukan diversifikasi atau penggantian tanaman tembakau dengan tanaman lain, menyusul penerapan kebijakan PP No. 109/2012. APTI menilai langkah diversifikasi menjadi tidak efektif karena belum tentu hasil tanaman pengganti akan diserap oleh industri atau pasar, sehingga dianggap akan sangat merugikan petani.⁴¹

Tembakau termasuk salah satu komoditas hasil pertanian yang penting. Kualitas tinggi tembakau *srintil* telah menempatkannya sebagai sebutan “emas hijau”, karena harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram.⁴² Tembakau ini dihasilkan dari jenis Kemloko yang bisa digunakan untuk cerutu, serta memiliki keunggulan dari segi rasa dan aroma.⁴³ Perkebunan tembakau tersebar di berbagai daerah, mulai dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan. Sejak akhir abad ke-19, tembakau telah menjadi komoditas ekspor terutama yang dikuasai pengusaha Belanda. Perusahaan tembakau di Jerman mengakui kualitas tembakau Deli sebagai yang terbaik.⁴⁴

³⁸ Puthut EA, “Hikayat Negeri Tembakau,” *National Geographic Indonesia*, Desember 2012, hal. 44-45. Sedikitnya 14 dari 19 kecamatan di Temanggung, adalah sentra penghasil tembakau, dengan luas lahan sekitar 15.000 hektare. Perputaran uang ketika panen tembakau, bisa lebih dari Rp 1 triliun.

³⁹ *Ibid.*, hal. 54; dan “Tembakau Campalok: Tembakau Madura yang Beraroma Khas,” *Jawa Pos*, Selasa, 29 Agustus 2006. Harga tembakau *campalok* mencapai Rp 1.250.000 per kilogram.

⁴⁰ Lihat “Tembakau: Dilema Penggantian Emas Hijau,” *gatra.com*, Kamis, 27 Mei 2010.

⁴¹ Lihat “APTI Bali Tolak Diversifikasi Tembakau,” *beritabali.com*, Kamis, 17 Januari 2013 | 20:03.

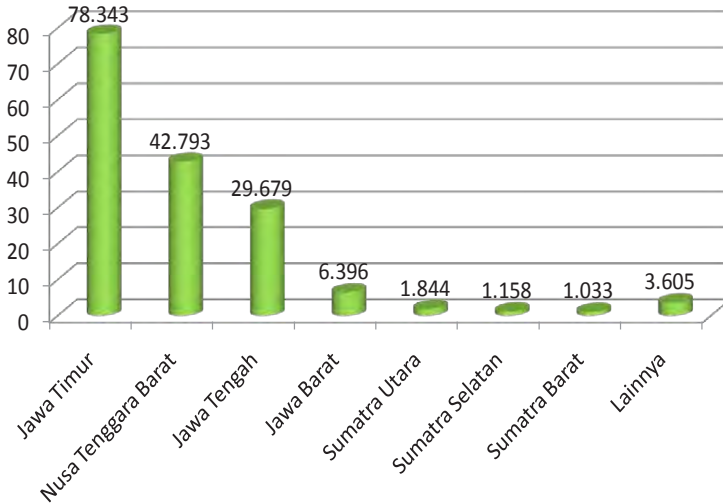
⁴² Lihat “Tembakau Srintil Ibarat Emas Hijau di Temanggung,” *metrotvnews.com*, Selasa, 25 September 2012 | 15:44 WIB; dan “Srintil Masih Primadona Tembakau Temanggung,” *beritadaerah.com*, Rabu, 16 November 2011. Saat panen tiba, satu hektare tembakau berkualitas bagus menghasilkan pendapatan bersih Rp 200 juta, dan dari puluhan ribu hektar bisa meraih hingga Rp1 triliun. Sehingga tak mengherankan bila warga Desa Legok Sari, Kab Temanggung, mampu membangun berbagai infrastruktur secara mandiri. Kehidupan mereka pun tergolong sejahtera.

⁴³ Lihat “Tembakau Temanggung, Salah Satu yang Terbaik,” *skalanews.com*, Kamis, 27 September 2012 23:29 WIB. Mutu paling rendah, Grade A dengan harga Rp 50.000 per kilogram. Sedangkan yang paling bagus, Grade I bisa mencapai Rp 500.000 per kilogram, untuk cerutu.

⁴⁴ Lihat “Perusahaan Jerman Akui Kualitas Tembakau Deli Terbaik Di Dunia,” *tribunnews.com*, Jumat, 21 Desember 2012 20:40 WIB. Harga tembakau Deli dapat mencapai 150 Euro per kilogram. Tembakau Deli juga sudah dikenal lebih dari 120 tahun oleh bangsa Jerman.

Kendati lebih banyak diekspor, namun volume produksi tembakau di Sumatera Utara lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa Barat. Pada 2007, Jawa Timur (Jatim) menempati peringkat pertama dalam volume produksi tembakau, yakni 78.343 ton. Peringkat kedua ditempati Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan produksi sebanyak 42.793 ton, lebih besar dibandingkan Jawa Tengah (Jateng) kendati provinsi ini lebih banyak terdapat sentra produksi tembakau. (lihat **grafik 3.1**).

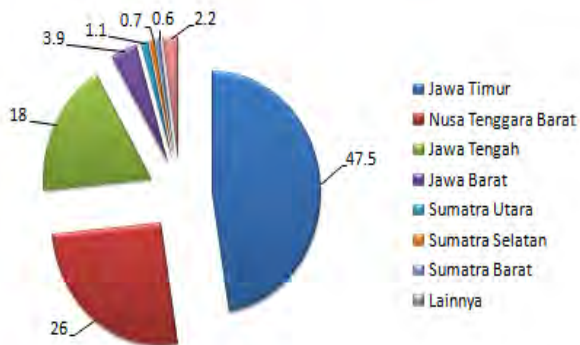
Grafik 3.1 | Produksi Tembakau 2007 (dalam ton)



Sumber: Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Tembakau/Tobacco, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan. 2008.

Dilihat dari persentase, volume produksi tembakau di Jatim hampir mencapai 50 persen total produksi di seluruh Indonesia. NTB mencapai 26 persen dan disusul Jawa Tengah 18 persen. Jawa Barat menempati empat besar, namun jauh di bawah tiga provinsi di atasnya yang hanya 3,9 persen (lihat **gambar 3.2**). Bila Jatim, NTB dan Jateng digabung, persentase produksinya mencapai 91,5 persen. Kendati NTB tergolong kedua terbesar sebagai penghasil tembakau, namun hampir tidak ada pabrik rokok di daerahnya.

Gambar 3.2 | Persentase Produksi Tembakau 2007



(Sumber: Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Tembakau/Tobacco, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008.

b. Komoditas ekspor

Tembakau tidak sekadar diperdagangkan di pasar domestik, melainkan juga komoditas ekspor. Pada tingkat global, China dikenal sebagai negeri penghasil tembakau paling banyak di dunia. Pada 2007, China menghasilkan tembakau sebanyak 2.397.200 ton atau sebesar 38,0 persen produksi dunia. Tempat kedua diduduki Brazil serta disusul India dan Amerika Serikat (AS). Keempat negeri penghasil tembakau ini menghasilkan 4,2 juta ton tembakau atau 67 persen total produksi dunia (6.311.103 ton). Indonesia menempati urutan kelima dengan produksi sebanyak 164.851 ton atau 2,6 persen produksi dunia (lihat **tabel 3.5**).

Tabel 3.5 Produksi Tembakau Dunia 2007			
No	Provinsi	Produksi	%
1	China	2.397.200	38,0
2	Brazil	919.393	14,6
3	India	555.000	8,8
4	Amerika Serikat	353.177	5,6
5	Indonesia	164.851*	2,6
6	Pakistan	126.000	2,0
7	Italia	100.000	1,6
8	Turki	98.000	1,6
9	Zimbabwe	79.000	1,3
10	Yunani	18.500	0,3
11	Lain-lain	1.499.982	23,8
Jumlah		6.311.103	100,0

Sumber: FAOSTAT
<http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor> (diakses pada 18 Maret 2013).

Catatan: *) dikutip dari Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia 2003-2005 dan 2007-2009: Tembakau/Tobacco. 2006 dan 2008

Selain diserap oleh pasar dalam negeri sebagai salah satu komoditas yang menguntungkan, tembakau juga menembus pasar ekspor. Tembakau Deli termasuk yang sudah sejak awal produksinya menjadi komoditas ekspor di masa kolonial Hindia Belanda.⁴⁵ Tahun 2011, ekspor tembakau dinilai cukup menggembirakan. Nilai ekspornya mengalami kenaikan sebesar 4,59 persen. Larangan impor dari beberapa negara juga memberikan keuntungan, yakni harganya terdongkrak naik. Harga rata-rata tembakau pada 2011 lebih tinggi 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, volume ekspornya turun 15,76 persen menjadi 92.311 ton dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 109.577 ton. Salah satu sebabnya adalah faktor keterbatasan stok.⁴⁶ Beberapa jenis tembakau yang diekspor dapat dilihat dalam **tabel 3.6**.

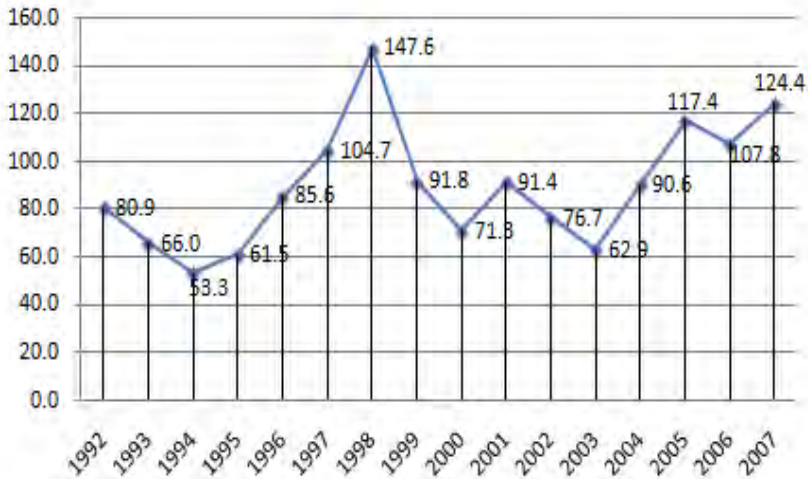
Tabel 3.6 Harga Tembakau 2011		
No	Jenis	Harga/Kg
1	Virginia	Rp 40.000
2	Kasturi	Rp 46.000 – 47.000
3	Temanggung	Rp 100.000 – 150.000
Sumber: surabayapost.co.id, Selasa, 10 Januari 2012 11:51 WIB		

Memang sejauh ini terkesan bahwa nilai ekspor tembakau kurang signifikan dibandingkan dengan ekspor nonmigas lainnya. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan, dalam 15 tahun, selama periode 1992-2007, nilai ekspor tembakau mengalami kenaikan sebesar 54 persen. Bila pada 1992 bernilai 80,9 juta dollar AS, maka pada 2007 sudah mencapai 124,4 juta dollar. Nilai ekspor tembakau berfluktuasi, karena pada 1993-1996 sempat menurun, namun naik lagi pada 1997 dan turun lagi pada 1999-2000. Nilai ekspor sempat mencapai puncaknya pada 1998, yakni 147,6 juta dollar AS (lihat **grafik 3.2**).

⁴⁵ Lihat “Perusahaan Tembakau Jerman: Tembakau Deli Kualitas Teratas,” *wartaekonomi.co.id*, Sabtu, 22 Desember 2012 09:02 WIB; dan “Tembakau Deli Terbaik di Dunia,” *liputan6.com*, Sabtu, 22 Desember 2012 10:44. Tembakau Deli – yang harganya dapat mencapai 150 Euro per kilogram – sudah dikenal lebih dari 120 tahun oleh kalangan masyarakat Jerman. Bukti-bukti sejarah tembakau Deli dan peran bangsa Jerman dalam mempopulerkan tembakau Deli ke dunia sudah tercatat pada abad ke-19.

⁴⁶ Lihat “Ekspor Tembakau Terdongkrak Menggembirakan,” *surabayapost.co.id*, Selasa, 10 Januari 2012 | 11:51 WIB; dan “Ekspor Naik, Harga Tembakau Ikut Terdongkrak,” *kontan.co.id*, Senin, 09 Januari 2012 | 16:10 WIB.

Grafik 3.2 | Nilai Ekspor Tembakau Tahun 1992 – 2007 (US\$ Juta)



Sumber: Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Impor (Jilid 1), 2007, BPS, Jakarta
 Catatan: *) diambil dari Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Tembakau/Tobacco, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008

Namun demikian, salah satu produk tembakau yang juga masyhur adalah tembakau dari Jenggawah, Kabupaten Jember, yakni jenis Besuki *Na Oogst* (NO). Tembakau ini biasa digunakan untuk bahan baku cerutu dan diekspor ke berbagai negeri di Eropa seperti Jerman, Italia, Belanda. Ekspor tembakau Besuki ini tidak terpengaruhi oleh krisis ekonomi di negeri-negeri tujuan ekspor tersebut. Sebanyak 70 persen produksi tembakau Besuki NO ditujukan untuk memenuhi permintaan ekspor. Naiknya harga tembakau Besuki NO didukung kualitas yang baik karena cuaca cukup mendukung kendati sempat ada hujan ‘*salah mongso*’. Permintaan ekspor yang tetap tinggi juga tidak terpengaruh oleh kampanye-kampanye anti rokok.⁴⁷

Tabel 3.7 Harga Ekspor Tembakau Besuki 2012		
No	Daun tembakau	Harga/kg
1	Pengisi cerutu (<i>filter</i>)	Rp 30.000
2	Pembalut cerutu bagian tengah (<i>omblad</i>)	Rp 60.000
3	Pembalut luar cerutu (<i>dekblad</i>)	Rp 80.000
Sumber: antarajatim.com, 13 September 2012 13:41:50		

⁴⁷ Lihat “Ekspor Tembakau Besuki Tak Terdampak Krisis,” *antarajatim.com*, Kamis, 13 September 2012 13:41:50.

c. Ekspor meningkat

Sebenarnya nilai ekspor tembakau tidaklah seperti yang ditunjukkan dalam **grafik 3.2**, karena perdagangan luar negeri untuk komoditas tembakau tetap diminati importir di Eropa dan beberapa negeri di Asia, bahkan dari besaran nilainya mengalami peningkatan. Ekspor daun tembakau yang digunakan sebagai pembungkus cerutu, nilainya cukup besar yang ditujukan ekspor ke Eropa dan AS. Sedangkan peluang ekspor tembakau yang tertuju ke India dan Spanyol juga terbuka.⁴⁸

Ekspor tembakau memang berfluktuasi, tidak menunjukkan kecenderungan meningkat atau menurun, melainkan berubah-ubah sesuai permintaan. Kendati volume dan nilainya atas ekspor tembakau jenis *Na-oogst* (NO) dan *Voor-oogst* (VO) berfluktuasi, namun hanya nilai total yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama 2002-2006 kendati dari segi volume tetap saja berfluktuasi (lihat **tabel 3.8**). Dari segi harga, tembakau NO memang lebih tinggi. Bila lebih banyak tembakau jenis ini maka sudah bisa dipastikan nilai eksponya juga meningkat.

Tabel 3.8 Ekspor Tembakau Belum Diolah, 2002-2006						
Tahun	Na-oogst		Voor-oogst		Total	
	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)
2002	13.040,8	42.838,4	17.776,8	17.187,2	30.817,6	60.025,6
2003	13.195,0	56.758,0	14.011,2	14.048,6	27.206,2	70.806,6
2004	11.274,8	37.895,0	22.975,3	34.133,0	34.250,1	72.028,0
2005	11.120,7	48.929,7	28.808,3	47.517,5	39.929,0	96.447,2
2006	10.441,2	52.291,1	25.894,2	44.230,8	36.335,4	96.521,9
Total	59.888,7	238.712,2	108.649,6	157.117,1	168.538,3	395.829,3

Sumber: <http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/pdf/sby82.pdf>

Nilai penawaran ekspor daun tembakau yang dikelola oleh PTPN II Kebun Helvetia (tembakau Deli) pada 2011 menembus level 65 euro atau sekitar Rp.750.000 per kilogram.⁴⁹ Pasar tembakau di Eropa memang relatif stabil bahkan cenderung terus meningkat. Krisis ekonomi dan utang di Eropa juga tidak banyak berpengaruh terhadap konsumsi tembakau sampai akhir 2012. Harga tembakau Deli dapat mencapai 150 Euro per kilogram dan sangat populer di Eropa.⁵⁰ Dengan kenaikan harga, maka nilai eksponya juga terdongkrak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama Januari-November 2011, nilai ekspor tembakau mencapai 652,2 juta dollar AS atau Rp 5,9 triliun (lihat **tabel 3.9**). BPS juga mengungkapkan, nilai ekspor tembakau dan bahan

⁴⁸ Lihat "Tembakau Indonesia Mendunia," *kemendag.go.id*, Jumat, 21 Desember 2012. Selain itu, nilai ekspor rokok *kretek* bernilai Rp 4,26 triliun per tahun.

⁴⁹ Lihat "Nilai Tawar Ekspor Tembakau Deli 2011 Tembus Level 65 Euro," *analisdaily.com*, Rabu, 16 Mei 2012 01:37 WIB.

⁵⁰ Lihat "Tembakau Indonesia Mendunia," *kemendag.go.id*, Jumat, 21 Desember 2012. Ekspor tembakau Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2011 mencapai 15.698 ton atau senilai 85,3 juta dollar AS. Nilai ini meningkat 52,13 persen dibanding dengan tahun 2007. Sedangkan pada periode Januari-Mei 2012, ekspor tembakau mencapai 6.409 ton atau senilai 34,3 juta dollar AS, menurun 8 persen di tahun 2011 pada periode yang sama.

baku rokok tahun 2011 mencapai 710 juta dollar AS atau naik 5,7 persen dibanding tahun 2010 yang berada di kisaran 672 juta dollar AS.⁵¹

Tabel 3.9 Nilai Ekspor Tembakau 2010-2011			
No	Tahun	Nilai Ekspor	
1	2010	Rp 5,6 triliun*	672 juta dollar AS**
2	2011	Rp 5,9 triliun*	710 juta dollar AS**

Sumber: surabayapost.co.id, Selasa, 10 Januari 2012 | 11:51 WIB*); dan neraca.co.id, Rabu, 25 April 2012**)

Catatan: *) Periode Januari-November

Tembakau dari Sumatera Utara (Sumut) salah satu komoditas ekspor yang penting. BPS Sumut merilis, nilai ekspor Juli 2012 mencapai 946,58 juta dollar AS. Angka ini meningkat sebesar 6,72 persen dibanding ekspor Juni 2012, serta meningkat sebesar 1,29 persen dibanding Juli 2011. Peningkatan ekspor terbesar Juli 2012 terjadi pula atas golongan barang Tembakau (HS 24) yang mengalami kenaikan sebesar 39,61 persen, sebaliknya penurunan nilai ekspor justru berasal dari golongan barang Aluminium (HS 76) sebesar 52,50 persen dan sektor pertanian mengalami penurunan 27,64 persen.⁵²

Menurut BPS Sumut, nilai ekspor tembakau selama Januari-Februari 2012 mengalami kenaikan 8,08 persen dari periode yang sama tahun 2011. Kendati masih menghadapi krisis di Eropa dan AS yang juga menjadi tujuan ekspor, namun nilai ekspor tembakau mencapai 40,277 juta dollar AS. Tahun sebelumnya nilai ekspor sebesar 37,265 juta dollar AS. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut juga mengakui bahwa negeri importir tetap membutuhkan komoditas tembakau.⁵³ Pada bulan April 2012, ekspor produk tembakau Sumut tumbuh sangat mengesankan, yakni sebesar 1.900 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2011.⁵⁴ Cara *direct selling* ini telah mempertahankan pertumbuhan ekspor tembakau Deli pada Semester I 2012.⁵⁵ Nilai ekspor tembakau pada Semester ini sebanyak 123,219 juta dollar AS. Realisasi ini meningkat 8,01 persen dibandingkan semester yang sama tahun lalu, yang hanya 114,084 juta

⁵¹ Lihat "Setelah AS, Giliran Selandia Baru Boikot Rokok RI," *neraca.co.id*, Rabu, 25 April 2012.

⁵² Nomor Release: No. 56/09/12/Th. XV, 03 September 2012, <http://sumut.bps.go.id/?qw=brs&no=361> (diakses pada 9 Maret 2013).

⁵³ Lihat "Tembakau Beri Kontribusi US\$ 40,277 juta," *bisnis-sumatra.com*, Rabu, 18 April 2012.

⁵⁴ Lihat "Wuih, Ekspor Tembakau Sumut Naik 1.900%," *okezone.com*, Senin, 21 Mei 2012 20:17 wib. PTPN II sudah menjual dengan cara *direct selling*, tidak lagi dikirim ke Brehmen – rumah lelang yang terkenal untuk tembakau – melainkan sudah mengundang pembeli untuk datang langsung membeli di Indonesia, dan ini bagus untuk pendapatan devisa.

⁵⁵ Lihat "Jual Langsung ke Pembeli, Ekspor Tembakau Deli Naik 915%," *okezone.com*, Rabu, 25 Juli 2012 06:33 wib. Manager Distrik Tembakau PTPN 2 Bambang Sutrisno mengatakan, produksi tembakau di tahun lalu telah habis terjual pada akhir Juni 2012 dengan volume mencapai 1.173 ball. Seluruhnya merupakan tembakau deli kualitas terbaik, dengan harga rata-rata ekspor mencapai 39,9 euro per kilogram. Dimana Jerman menjadi negara tujuan utama ekspor, diikuti oleh Denmark dan Swedia.

dollar.⁵⁶ Dengan hasil ini, lonjakan yang sangat mengesankan bersumber dari nilai ekspor tembakau ke Iran yang mencapai 662 ton dengan nilai 2,659 juta dollar AS, yakni melonjak sekitar 1.114,16 persen dibandingkan tahun 2011 yang hanya 219.000 dollar AS dengan volume 58 ton.⁵⁷

APTI Jawa Barat mengungkapkan, permintaan pasar ekspor terhadap tembakau Jawa Barat jenis tembakau hijau 2.000 dan tembakau hitam 3.000 ton per tahun. Namun, para petani baru dapat menyanggupi sekitar 10-13 pesen dari permintaan ekspor. Kendala yang dihadapi adalah pengolahan tembakau, karena golongan tembakau iris halus (TIS) diolah secara manual, bukan dengan mesin. Para peminat tembakau Jabar lebih menyukai proses pengolahan secara manual. Harga tembakau kualitas super bisa mencapai Rp 110.000 per kilogram, sedangkan yang biasa berada di kisaran Rp 60.000 per kilogram.⁵⁸ APTI pun berupaya mengantisipasi pemberlakuan PP No. 109/2012 dengan menggarap pasar ekspor, dan dengan memanfaatkan lahan yang masih bisa diperluas.⁵⁹

3.2. Komoditas Cengkeh

Berbeda dengan rokok putih yang hanya mengandalkan bahan baku utama tembakau, maka *kretek* justru membutuhkan bahan baku lainnya, yakni cengkeh (*Eugenia aromaticum*) dan disebut juga *cloves*. Tidak ada *kretek* tanpa cengkeh sebagai ciri khas rokok produksi Indonesia. Namun, cengkeh tidak hanya dimanfaatkan untuk produksi *kretek*. Cengkeh – dengan rasa pedas yang terkandung di dalamnya – tergolong rempah dan lazim juga digunakan sebagai bumbu masak, namun demikian bermanfaat pula untuk meningkatkan produksi asam lambung, menggiatkan gerakan peristaltik saluran pencernaan, menyembuhkan sakit gigi, perut kembung atau masuk angin, serta sakit kepala.⁶⁰ Selain rempah-rempah untuk bumbu dapur dan manfaat minyaknya, cengkeh bisa juga bermanfaat bagi bahan baku farmasi dan kosmetik.

3.2.1. Cengkeh untuk kretek

Namun demikian, sebagian besar produksi cengkeh ditujukan sebagai bahan baku industri rokok *kretek*, bukan untuk bahan lainnya. Cengkeh sebagai bahan baku *kretek* inilah yang

⁵⁶ Lihat “Krisis, Ekspor Tembakau Sumut Masih Tumbuh Positif,” *okezone.com*, Senin, 13 Agustus 2012 19:18 wib.

⁵⁷ Lihat “Ekspor Tembakau ke Iran Melonjak 1.114,16%,” *komoditasindonesia.com*, Senin, 16 Juli 2012.

⁵⁸ Lihat “Permintaan Ekspor Tembakau Jabar Tinggi,” *bisnis.com*, Kamis, 02 Juni 2011 | 10:30 WIB; dan “Jabar Kewalahan Penuhi Pasar Ekspor Tembakau,” *jabar.tribunnews.com*, Senin, 16 Juli 2012 17:09 WIB. Produksi ekspor tidak terkendala pada luas lahan, karena penyebaran luas lahan mencapai 8.000 - 8.500 ha per tahun yang terjadi di 11 kabupaten/kota seperti Garut, Sumedang, Bandung, Kuningan, dan Banjar. Ekspor golongan TIS tertuju ke Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Thailand.

⁵⁹ Sekarang, luas lahan tembakau di Jabar mencapai sekitar 9.618 hektar, dengan jumlah petani 89.000 kepala keluarga dan total produksi mencapai 8.800 ton per tahun. Lihat “Petani Tembakau Jabar Siap Garap Pasar Ekspor,” *bisnis-jabar.com*, Senin, 16 Juli 2012 | 16:43 WIB; dan “Lahan Bukan Kendala Perkembangan Tembakau Jabar,” *jabar.tribunnews.com*, Senin, 16 Juli 2012 17:39 WIB.

⁶⁰ Lihat “Cengkeh: Bumbu Ajaib Dengan Sejuta Manfaat,” *beritasatu.com*, Rabu, 01 Agustus 2012 | 18:09. Secara tradisional cengkeh digunakan sebagai bumbu dan dicampur dengan cabe, kayu manis, kunyit dan rempah-rempah lainnya. Minyak cengkeh banyak digunakan dalam pembuatan parfum, sabun, garam mandi dan sebagai rasa penyedap. Cengkeh juga dinyatakan dapat membantu dalam merangsang sirkulasi dan meningkatkan pencernaan serta metabolisme tubuh. Dalam pengobatan Cina, cengkeh digunakan untuk mengatasi muntah, gangguan pencernaan dan masalah terkait lainnya. Untuk yang merasa stres kemudian, dididihkan air dengan daun kemangi, daun mint dan cengkeh untuk dijadikan sebagai minuman teh hitam tradisional. Dengan menambahkan sedikit madu, minuman ini bakal membantu orang yang meminumnya untuk meredakan ketegangan.

menimbulkan kekhasan rokok produksi Indonesia. Diperkirakan serapan cengkeh yang dibutuhkan dalam industri rokok *kretek* berkisar 80-90 persen, dan selebihnya dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Dengan meningkatnya produksi *kretek*, maka meningkat pula kebutuhan cengkeh. Selama 2007-2011, laju produksi *kretek* per tahun rata-rata 4.2 persen. Dengan demikian, kebutuhan cengkeh juga mengalami peningkatan seiring meningkatnya produksi *kretek*.

Cengkeh dibutuhkan untuk beberapa jenis *kretek*, karena salah satu bahan utamanya. Jenis *kretek* yang dimaksud adalah sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), dan mild. SKT membutuhkan paling banyak cengkeh, yakni sekitar 0,70 gram per batang. SKM butuh 0,40 gram dan mild butuh 0,25 gram cengkeh per batang rokok *kretek*. Belakangan terjadi pergeseran dalam konsumsi kretek, karena kian banyak konsumen yang memilih rokok kretek yang lebih ringan, sehingga terjadi pula pergeseran dalam komposisi bahan kretek di mana *kretek* jenis SKM dan mild kian mendominasi.⁶¹

Kendati terjadi kecenderungan tentang berkurangnya komposisi cengkeh dalam rokok *kretek*, namun kebutuhan cengkeh bagi pemenuhan kebutuhan industri kretek tetap tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Pada tahun 2012, kebutuhan cengkeh sudah lebih dari 120 ribu ton dan tiga tahun kemudian, pada tahun 2015, diperkirakan sudah menembus 130 ribu ton. Banyak perusahaan rokok juga menyimpan cengkeh sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan tahun produksi berikutnya yang sekaligus pula untuk mengantisipasi defisit kebutuhan cengkeh dalam satu atau dua tahun kemudian.⁶²

Namun demikian, jauh sebelum munculnya *kretek* yang berbahan baku cengkeh sebagai produk industri rokok, cengkeh sudah terlebih dulu menjadi salah satu bagian penting dalam komoditas rempah-rempah yang dikuasai Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) sejak awal abad ke-17 atau tahun 1620, dengan memonopoli perdagangan dan membatasi produksi supaya harganya stabil, terutama di kepulauan Maluku. Mereka yang tidak bersedia menjual rempah hanya kepada VOC, akan dihabisi. Pada 1621, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengirim armada dari Batavia ke Pulau Banda untuk menghancurkan masyarakat setempat yang menolok monopoli Belanda. Pelayaran ini juga disebut sebagai pelayaran Hongi (*Hongi-Tochten*).⁶³ Sesudah VOC runtuh, pemerintah Hindia Belanda – dengan campur tangan yang berlebihan – menggenjot program Tanam Paksa. Sesudah program ini berakhir, maka secara perlahan tumbuh industri *kretek* yang sekaligus juga sebagai ciri khas rokok Indonesia. Peruntungan industri

⁶¹ Lihat “Kebutuhan Cengkeh untuk Industri Rokok Kretek,” <http://perkebunan.litbang.deptan.go.id/?p=4172> (diakses pada 19 Maret 2013). Pergeseran komposisi *kretek* terjadi sejak empat dekade lalu, dari rokok klobot menjadi SKT, dari SKT menjadi SKM, dan sejak sepuluh tahun terakhir bergeser dari SKM menjadi mild.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Willard Anderson Hanna, *Kepulauan Banda: kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Pala*, Jakarta: Gramedia, 1983. Lihat juga, “Hongi-Tochten, Pelayaran Membasmi Cengkeh,” *Kompas*, Sabtu, 28 Juli 2012. Dalam penyerangan itu, pasukan VOC berjumlah 1.655 orang Eropa (150 meninggal dalam perjalanan) ditambah 250 orang dari garnisun di Banda. Sebanyak 286 orang Jawa dijadikan pengayuh kapal. Selain itu, terdapat 80-100 orang Jepang, beberapa dari mereka dijadikan algojo pemenggal kepala. Perlawanan rakyat Banda berhasil dipatahkan. Semua pimpinan rakyat Banda yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda dihukum mati, sebagian lain dibawa ke Batavia untuk dijual sebagai budak. Jumlah seluruh warga Banda yang dibawa ke Batavia mencapai 883 orang, terdiri dari 287 pria, 356 perempuan, dan 240 anak-anak. Sebanyak 176 orang meninggal dalam perjalanan. Belanda juga menyingkirkan pesaing-pesaing dari Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, dan Inggris dengan kejam. Pada 1623, dua tahun setelah pembantaian rakyat Banda, para pedagang Inggris juga dibantai serdadu bayaran VOC.

kretek sempat ditandai dengan kerusuhan sebagai buah konflik antarpengusaha yang sedang tumbuh.

3.2.2. Lahan cengkeh

Rebutan kekuasaan atas perdagangan komoditas cengkeh yang mirip dengan VOC juga berlangsung di bawah Orde Baru. Selama 1990-1998, beroperasinya sebuah kekuatan monopoli dagang, Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Keberadaan BPPC ini sempat menimbulkan konflik yang sengit dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri).⁶⁴ Dalam periode monopoli BPPC, luas lahan cengkeh menunjukkan kecenderungan yang menurun. Menciutnya lahan perkebunan cengkeh mencapai titik terendah pada tahun 2000 yang hanya seluas 415.598 hektare dalam rentang 1990-2007 (lihat **tabel 3.10**). Setelah BPPC dibubarkan, harga cengkeh mulai pulih dan mendorong petani kembali aktif menanam cengkeh.⁶⁵ Belakangan ini, meningkatnya kebutuhan cengkeh yang diserap industri rokok *kretek*, ternyata tidak menambah luas lahan tanaman cengkeh tersebut.

Tabel 3.10 Persentase Luas Lahan Cengkeh terhadap Arable Land 1990-2007				
No	Tahun	Lahan (ha)	Arable Land (000) ha	% Lahan Cengkeh thd Arable Land
1	1990	692,682	20,253	3,42
2	1991	668,204	18,081	3,70
3	1992	608,350	18,100	3,36
4	1993	571,047	18,129	3,15
5	1994	534,376	17,126	3,12
6	1995	501,823	17,342	2,89
7	1996	491,713	17,941	2,74
8	1997	457,542	18,200	2,51
9	1998	428,735	18,700	2,29
10	1999	415,859	19,700	2,11
11	2000	415,598	20,500	2,03
12	2001	429,300	20,200	2,13
13	2002	430,212	20,081	2,14
14	2003	442,333	22,406	1,97
15	2004	438,253	24,666	1,78

⁶⁴ Sebagai komoditas yang mengiurkan atau menguntungkan, cengkeh menjadi rebutan para tengkulak, bahkan pemerintah memberi hak monopoli pembelian dan perdagangan kepada beberapa perusahaan yang tergabung dalam BPPC. Periode di bawah Orde Baru – dengan sistem tata niaga cengkeh – pernah diberlakukan lewat Keppres No. 50/1979 dan Keppres No. 8/1980. Namun akhirnya jatuh ke tangan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) ketika membentuk BPPC pada 28 Desember 1990 yang beroperasi sampai 1998 yang memonopoli perdagangan cengkeh di Indonesia.

⁶⁵ BPPC dibubarkan lewat SK No. 22/MPP/Kp/1/1998 sebagai konsekuensi penandatanganan *Letter of Intent* dengan International Monetary Fund (IMF). Harga cengkeh merangkak naik menjadi Rp 7,420 pada tahun 1998. Tahun 1999 menjadi Rp 20,000, dan tahun 2000 naik lagi menjadi Rp 30,000. Tahun 2007, harga cengkeh naik lagi menjadi Rp 39.000 per kilogram.

Tabel 3.10 | Persentase Luas Lahan Cengkeh terhadap Arable Land 1990-2007

No	Tahun	Lahan (ha)	Arable Land (000) ha	% Lahan Cengkeh thd Arable Land
16	2005	448,858	21,946	2,05
17	2006	444,658	22,000	2,02
18	2007	453,292	22,000	2,06

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Cengkeh/Clove, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008.

Secara keseluruhan, luas lahan cengkeh selama 2008-2012 cenderung mengalami penambahan, yaitu secara berturut-turut 456.471 hektar, 467.403 hektar, 470.041 hektar, 485.193 hektar, dan 485.304 hektar. Dua dari 33 provinsi – Riau dan Jakarta (DKI) – tidak ada informasi tentang luas lahan. Namun demikian, lahan untuk tanaman cengkeh yang paling luas tetap berada di Sulawesi Utara. Kendati luasnya stabil, namun masih ada sedikit fluktuatif, yaitu berturut-turut selama 2008-2012, yaitu 74.383 hektar, 75.920 hektar, 73.891 hektar, 74.148 hektar, dan 74.162 hektar. Sedangkan Maluku, dalam dua tahun terakhir mencapai luas 43.566 hektar.⁶⁶ **Tabel 3.11** menunjukkan rincian luas lahan perkebunan cengkeh di Indonesia.

Tabel 3.11 | Luas Lahan Cengkeh 2008-2012

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	22.188	22.117	22.609	22.071	22.068
2	Sumatera Utara	3.397	2.927	2.743	3.059	3.057
3	Sumatera Barat	6.919	6.987	7.834	7.223	7.221
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	15.250	15.378	15.046	15.101	15.103
6	Jambi	313	312	163	163	163
7	Sumatera Selatan	380	230	209	208	208
8	Bengkulu	912	1.008	1.085	1.230	1.229
9	Bangka-Belitung	104	109	49	50	50
10	Lampung	7.627	7.303	7.099	7.357	7.357
11	Banten	15.606	15.602	15.603	15.626	15.623
12	Daerah Khusus Ibukota (DKI)	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	32.383	32.775	33.323	31.294	31.296
14	Jawa Tengah	36.060	37.489	38.972	42.300	42.302
15	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	2.968	3.014	2.882	3.071	3.071
16	Jawa Timur	41.218	41.474	41.964	43.876	43.869
17	Bali	15.526	15.494	15.496	15.685	15.687

⁶⁶ Lihat “Luas Areal Cengkeh Menurut Provinsi di Seluruh Indonesia, 2008 – 2012,” <http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/bun/BUN-asem2012/Areal-Cengkeh.pdf> (diakses pada 21 Maret 2013).

Tabel 3.11 | Luas Lahan Cengkeh 2008-2012

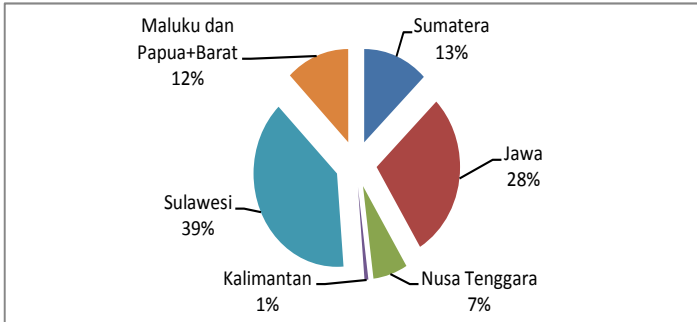
No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
18	Nusa Tenggara Barat	1.463	1.612	1.875	2.618	2.619
19	Nusa Tenggara Timur	13.482	13.720	14.515	15.042	15.053
20	Kalimantan Barat	1.078	1.069	1.049	912	919
21	Kalimantan Tengah	38	38	33	26	35
22	Kalimantan Selatan	1.780	776	744	723	726
23	Kalimantan Timur	201	201	53	22	22
24	Sulawesi Utara	74.383	75.920	73.891	74.148	74.162
25	Gorontalo	6.550	7.800	8.045	8.280	8.289
26	Sulawesi Barat	2.568	3.021	2.973	2.584	2.585
27	Sulawesi Selatan	43.678	44.001	44.524	44.259	44.278
28	Sulawesi Tengah	41.827	43.288	43.438	44.109	44.136
29	Sulawesi Tenggara	9.712	16.075	16.711	17.480	17.490
30	Maluku	36.042	36.810	35.796	43.567	43.566
31	Maluku Utara	20.090	18.057	18.352	20.130	20.136
32	Papua	2.061	2.061	2.242	2.253	2.243
33	Papua Barat	650	735	725	725	725
	Jumlah	456.454	467.403	470.041	485.193	485.304

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan

Sejak lama Sulawesi Utara merupakan sentra produksi cengkeh terbesar di Pulau Sulawesi. Selain itu tersebar pula di Sulawesi Selatan dan Tengah. **Gambar 3.3** menunjukkan persentase lahan terluas yang ditempati Sulawesi sebesar 39 persen, kemudian disusul Pulau Jawa (28 persen), dan Sumatera hanya 13 persen. Sedangkan Maluku yang pernah menjadi sasaran serangan VOC dalam perebutan kepentingan monopoli cengkeh sejak abad awal ke-17, dikelompokkan bersama Papua dan Papua Barat (12 persen). Daerah penghasil cengkeh di Maluku meliputi Kecamatan Amahe, Kairatu, Seram Barat, Bula, Taniwel, Seram Utara, Werinama, Leihtu, Salahutu, pulau Haruku, Saparua, Nusa Laut, dan Tehoru. Tahun 1994, luas lahan tanaman cengkeh di Maluku Utara mencapai 38,000 hektar, namun merosot sampai hanya 20,090 hektar.⁶⁷

⁶⁷ Lihat "Pasang Surut Komoditas Cengkeh," *depan.go.id*, Kamis, 24 November 2011 - 13:54.

Gambar 3.3 | Persentase Luas Lahan Cengkeh menurut Pulau, 2007



Sebagian besar perkebunan cengkeh adalah perkebunan rakyat, karena banyak kebun cengkeh dimiliki oleh para petani kecil. **Tabel 3.12** berikut ini dapat memberikan gambaran bahwa selama periode 1990-2007, petani kecil menguasai sebagian besar lahan perkebunan cengkeh. Sedangkan penguasaan lahan yang lebih sedikit dimiliki pemerintah dan swasta, dengan persentase sekitar 20 persen. Sebaliknya, sebanyak 80 persen lahan cengkeh justru dimiliki petani kecil, sehingga disebut juga sebagai perkebunan rakyat. Usaha tani cengkeh merupakan bidang usaha yang berlangsung secara independen dan sudah sejak lama dijalankan petani.

Tabel 3.12 | Luas Lahan Menurut Kepemilikan, 1990-2007

No	Tahun	Petani Kecil	Pemerintah	Swasta	Total
1	1990	672,607	3,968	16,107	692,682
2	1991	650,407	3,298	14,499	668,204
3	1992	592,446	3,086	12,818	608,350
4	1993	556,496	2,307	12,244	571,047
5	1994	520,012	2,221	12,143	534,376
6	1995	491,563	504	9,756	501,823
7	1996	479,379	1,914	10,42	491,713
8	1997	447,549	1,928	8,065	457,542
9	1998	419,827	1,860	7,048	428,735
10	1999	407,149	1,860	6,85	415,859
11	2000	407,010	1,860	6,728	415,598
12	2001	420,341	1,860	7,099	429,300
13	2002	421,589	1,865	6,758	430,212
14	2003	433,885	1,865	6,583	442,333
15	2004	429,728	1,865	6,660	438,253
16	2005	438,771	1,865	8,221	448,858
17	2006	436,091	1,865	6,702	444,658
18	2007	444,683	1,865	6,744	453,292

Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Cengkeh/Clove, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008

3.2.3. Produksi dan ekspor cengkeh

Dari negeri-negeri penghasil cengkeh, Indonesia merupakan negeri penghasil cengkeh terbesar di dunia. Dari data FAO, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai penghasil cengkeh, bahkan dengan persentase dua pertiga cengkeh di dunia, dengan jumlahnya mencapai 79 ribu ton atau 73 persen (tahun 2002) dan 84 ribu ton atau 75 persen (tahun 2007). Selain Indonesia, negeri penghasil cengkeh lainnya adalah Madagaskar yang memproduksi sebanyak 10 ribu ton (9 persen), Tanzania sebanyak 9,9 ribu ton (8,9 persen) dan Sri Lanka sebanyak 3 ribu ton (2,8 persen) pada 2007, sebagaimana yang terkandung dalam **tabel 3.13**.

Tabel 3.13 Negeri Penghasil Cengkeh, 2002 dan 2007					
No	Negeri	2002		2007	
		Dalam ton	%	Dalam ton	%
1	Indonesia	79,009*	72,9	84,404*	75,3
2	Madagaskar	15,600	14,4	10,000	9,0
3	Tanzania	10,000	9,2	9,900	8,9
4	Sri Lanka	1,500	1,4	3,070	2,8
5	Komoro	1,000	0,9	2,500	2,2
6	Lainnya	1,271	1,2	2,020	1,8
Jumlah		108,380	100,0	111,894	100,0

Sumber : <http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor>
 Catatan: *) Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2004-2006 dan 2007-2009: Cengkeh/Clove, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan

Karena lahan cengkeh hampir merata terdapat di seluruh provinsi – hanya Riau dan DKI saja tanpa didukung informasi – maka produksinya juga tersebar di daerah-daerah tersebut. Dalam periode 2008-2012, total produksi cengkeh mencapai puncaknya pada 2010, yakni dengan produksi 98.586 ton. Namun seluruh produksi tidak berada di bawah 70.000 ton. Provinsi yang tidak stabil dalam produksinya adalah Sulawesi Utara, karena tahun 2008 berjumlah anjlok hanya 461 ton, namun pada 2010 mencapai 20.166 ton dan kemudian turun lagi tahun berikutnya menjadi hanya 324 ton. Sedangkan Maluku dan Maluku Utara tetap menjadi sentra produksi cengkeh yang relatif stabil (lihat **tabel 3.14**).

Tabel 3.14 Produksi Cengkeh 2008-2012						
No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	1.949	714	1.505	1.119	1.132
2	Sumatera Utara	420	289	250	373	377
3	Sumatera Barat	1.710	1.750	1.584	1.751	1.769
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	1.815	1.456	1.587	3.211	3.245
6	Jambi	39	39	28	28	28

Tabel 3.14 | Produksi Cengkeh 2008-2012

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
7	Sumatera Selatan	58	44	44	48	49
8	Bengkulu	122	79	78	69	70
9	Bangka-Belitung	15	11	12	13	13
10	Lampung	452	625	623	720	728
11	Banten	2.766	2.282	3.556	3.291	3.324
12	Daerah Khusus Ibukota (DKI)	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	5.346	4.776	6.051	5.209	5.262
14	Jawa Tengah	6.407	6.510	6.960	4.236	4.279
15	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	332	395	225	393	397
16	Jawa Timur	10.213	10.792	10.213	6.807	6.870
17	Bali	3.768	4.317	4.311	773	781
18	Nusa Tenggara Barat	283	251	252	160	162
19	Nusa Tenggara Timur	1.411	1.422	1.621	1.605	1.622
20	Kalimantan Barat	213	223	204	202	204
21	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
22	Kalimantan Selatan	382	165	142	83	84
23	Kalimantan Timur	5	3	5	2	2
24	Sulawesi Utara	461	1.663	20.166	324	327
25	Gorontalo	626	638	683	735	743
26	Sulawesi Barat	278	579	595	372	376
27	Sulawesi Selatan	7.315	18.685	11.035	9.135	9.227
28	Sulawesi Tengah	6.767	3.223	10.327	7.861	7.941
29	Sulawesi Tenggara	2.328	4.788	4.046	6.688	6.756
30	Maluku	10.631	11.185	8.281	11.732	11.851
31	Maluku Utara	4.312	4.976	4.058	5.158	5.210
32	Papua	69	69	67	69	68
33	Papua Barat	38	82	77	77	78
Jumlah		70.532	82.032	98.586	72.246	72.976
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan						

Memang luas lahan sempat menyusut selama periode monopoli BPPC, namun produksi cengkeh berfluktuatif, kadang meningkat dan kadang menurun dalam periode 1990-2007. Produksi cengkeh sempat mencapai titik tertinggi pada 1995, yakni 90.007 ton. Produksi paling rendah berlangsung pada 1999, hanya sebanyak 52.903 ton. Sesudah BPPC dibubarkan, titik produksi tertinggi berlangsung pada 2007, yakni 84.404 ton. Dengan jumlah produksi yang relatif stabil, setiap tahun, cengkeh juga diekspor. Namun, cengkeh juga sempat diimpor dalam jumlah yang cukup besar selama 1999-2001, dengan kecenderungan yang menurun, yaitu 22.610 ton (1999), 20.873 ton (2000), dan 16.899 ton (2001). Sejak 2002, impor terus menurun, bahkan tahun 2007 pun tidak ada lagi impor cengkeh (lihat **tabel 3.15**). Penurunan ini terbantu dengan adanya SK Menteri Perdagangan dan Industri No. 538/2002 yang melarang impor cengkeh.

Tabel 3.15 | Produksi, Ekspor dan Impor Cengkeh 1990-2007

No	Tahun	Ekspor (ton)	Impor (ton)	Produksi (ton)
1	1990	1,105	8	66,912
2	1991	1,118	3	80,253
3	1992	794	6	73,124
4	1993	700	5	67,366
5	1994	670	3	78,379
6	1995	490	4	90,007
7	1996	230	0	59,479
8	1997	356	0	59,192
9	1998	20,157	1	67,177
10	1999	1,776	22,610	52,903
11	2000	4,655	20,873	59,878
12	2001	6,324	16,899	72,685
13	2002	9,399	796	79,009
14	2003	15,688	172	76,471
15	2004	9,060	9	73,837
16	2005	7,680	1	78,350
17	2006	11,270	1	61,408
18	2007	14,094	0	84,404

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Cengkeh/Clove, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008

Sejak bubarnya BPPC, harga cengkeh memang tidak lagi berada di bawah Rp 8.000 per kilogram, melainkan dapat terus bertahan di atas Rp 20.000. Sebagai contoh, harga cengkeh yang dijual warga Desa Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, mencapai Rp 120.000 per kilogram. Bahkan petani cengkeh di Desa Rutong, Kota Ambon, dapat menjual dengan harga Rp 200.000. Petani cengkeh di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, juga menikmati harga penjualan yang mencapai Rp100.000 per kilogram.⁶⁸ **Tabel 3.16** dapat menunjukkan pergerakan harga rata-rata cengkeh kering dari tahun ke tahun dalam periode 2005-2012. Harga rata-rata tertinggi dicapai pada 2011, yakni Rp 111.000 per kilogram.⁶⁹

Tabel 3.16 | Harga Rata-rata Cengkeh Kering 2005-2012

No	Tahun	Harga Rata-rata
1	2005	Rp 60.000 per kilogram
2	2006	Rp 38.000 per kilogram
3	2007	Rp 27.000 per kilogram

⁶⁸ Lihat "Harga Cengkeh di Natuna Melonjak," *kepri.antaranews.com*, Kamis, 04 Oktober 2012 22:11 WIB.

⁶⁹ Lihat "Cengkeh Indonesia," <http://www.cengkehindonesia.com/> (diakses pada 19 Maret 2013).

**Tabel 3.16 | Harga Rata-rata
Cengkeh Kering 2005-2012**

No	Tahun	Harga Rata-rata
4	2008	Rp 55.000 per kilogram
5	2009	Rp 34.000 per kilogram
6	2010	Rp 50.000 per kilogram
7	2011	Rp 111.000 per kilogram
8	2012	Rp 83.000 per kilogram*)

Sumber: <http://www.cengkehindonesia.com/>
*) Sampai Agustus 2012

Dengan harga cengkeh yang tinggi, maka dampaknya dialami para pengusaha industri *kretek*. Pada paruh pertama 2011, kendati dalam kondisi normal, harganya berkisar Rp 50.000-60.000 per kilogram. Namun, dari pantauan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), harga di beberapa daerah sepanjang Mei sudah menembus Rp 130.000-135.000 per kilogram. Dampak ini sudah dirasakan oleh seorang pengusaha rokok kretek di Malang, sehingga dia terpaksa merogoh dana pembelian cengkeh dua kali lipat lebih banyak ketimbang biasanya demi menopang usaha produksi rokok kreteknya. Untuk mengembalikan beban biaya produksi yang kian besar ditanggungnya, maka dia pun terpaksa menaikkan harga jual produk rokoknya.⁷⁰

3.3. Sirkuit Produksi Lengkap dan Mandiri

Tanaman tembakau dan cengkeh memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan industri rokok, terutama *kretek*. Tidak ada industri *kretek* tanpa ketersediaan tembakau dan cengkeh sebagai bahan baku. Dengan adanya pertanian tembakau dan cengkeh, terbentuk sirkuit produksi industri *kretek* yang sekarang mendominasi industri rokok di Indonesia. Berikut ini deskripsi atas terbentuknya industri *kretek* yang di satu sisi memiliki rangkaian produksi (*circuit of production*) yang lengkap secara internal, serta di sisi lain berkembang lewat pemupukan modal secara mandiri atau independen tanpa campur tangan negara atau pemerintah.

3.3.1. Proses produksi yang lengkap

Memang benar bahwa tembakau merupakan produk pertanian yang diekspor sebagai bagian dari dominasi bisnis pengusaha Belanda atau Eropa sejak abad ke-19 di bawah Hindia Belanda. Para pengusaha Belanda tidak berkepentingan membangun suatu rangkaian industri pengolahan tembakau, melainkan diekspor ke Eropa untuk diolah dan diperdagangkan kepada pengusaha industri rokok. Hubungan sosial-ekonomi yang terbentuk antara Belanda dan Indonesia adalah hubungan antara pusat (*metropolitan*) dan pinggiran (*peripheral*) sesudah beroperasinya perusahaan Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) dan Javasche Bank pada 1828, serta diterapkannya sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*) sejak 1830. Secara produksi, Indonesia menjadi wilayah kantong untuk ekspor (*enclave*), bergantung pada pasar di pusat, karena tidak

⁷⁰ Lihat "Harga Cengkeh Tinggi, Pabrik Rokok Kretek Terjepit," *kontan.co.id*, Senin, 30 Mei 2011 | 17:31 WIB. Gappri juga mengungkapkan dampaknya bahwa kenaikan harga cengkeh bisa memperlambat laju produksi rokok kretek nasional sekitar 5-10 persen. Kenaikan ini juga bakal mendongkrak modal produsen rokok kretek hingga dua kali lipatnya.

dapat diselesaikan seluruhnya secara internal (*domestic*), melainkan harus melalui sokongan atau bantuan pusat.⁷¹

Proses produksi di pulau Jawa dan sekitarnya dipersiapkan untuk kantong komoditas ekspor dan sebaliknya menjadi pangsa pasar bagi impor barang-jadi atau setengah-jadi. Proses ini tidak diarahkan untuk memacu pertumbuhan secara internal (domestik), namun ditarik sebagai surplus untuk memperkuat struktur di luar (pusat). Karena bukan untuk membangun industrialisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi domestik sebagaimana yang terjadi di Inggris, maka perekonomian bergantung pada impor yang tinggi. Menurut Geertz, produksi petani di Jawa dihisap, namun bukan untuk industrialisasi dan penguatan struktur domestik. Mereka terhisap dan menderita, namun bukan untuk apa-apa (*suffered for nothing*), melainkan hanya melingkarlingkar (*involution*) yang menambah kerumitan, karena sektor pertanian gagal menopang tumbuhnya sektor industri domestik dan tidak memperoleh kompensasi apa pun dari perannya.⁷²

Namun berbeda dengan yang dilakukan pengusaha Belanda di mana komoditas tembakau lebih ditujukan untuk ekspor, maka para perintis industri *kretek* justru membentuk basis produksi industri – tembakau, cengkeh dan *kretek* – bukan sebagai kantong komoditas ekspor, melainkan diserap pasar lokal untuk industri pengolahan tembakau. Perintisan industri *kretek* ini berlangsung dalam kondisi kekurangan modal, namun secara swadaya terus-menerus dibangun dan dipertahankan dengan menggunakan teknologi produksi yang sederhana, yakni alat pelinting kayu atau dikerjakan dengan tangan. Industri ini membentangkan suatu rangkaian antara hulu dan hilir yang saling terkait. Dengan kelengkapan sistem produksinya, maka tidak ada surplus yang diekspor ke pusat atau Eropa, serta tidak pula bergantung pada bahan baku atau muatan impor (*import content*). Tidaklah mengherankan bila sejak akhir 1960-an, industri *kretek* mulai mendapatkan posisi yang lebih penting sebagai produk industri yang menjejali pasar domestik tanpa butuh kebijakan proteksi. Dalam dua dekade terakhir, para pengusaha industri *kretek* menempati jajaran sebagai lapis orang terkaya di Indonesia.⁷³

Dalam pembentukan industri *kretek*, tembakau dan cengkeh tidaklah diekspor sebagaimana proses produksi pola pusat-pinggiran – bahkan juga tidak diimpor sebagai barang setengah-jadi atau barang-jadi – melainkan dihisap atau diserap untuk diolah menjadi produk akhir, yakni *kretek*.⁷⁴ Sirkuit atau rangkaian produksi dari pertanian ke industri secara internal (domestik)

⁷¹ Farchan Bulkin, “Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian,” *Prisma* No. 2, 1984; dan Hamza Alavi, “The Structure of Peripheral Capitalism,” dalam Hamza Alavi dan Theodor Shanin (eds.), *Introduction to Sociology of ‘Developing’ Societies*, London: Macmillan Press, 1982.

⁷² Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1971, hal. 143.

⁷³ Lihat “Orang Terkaya di Indonesia: Ical Turun dan Chairul Tanjung Melejit di Daftar Terkaya,” *tribunnews.com*, Jumat, 25 November 2011 09:53 WIB; “Sudono Salim Orang Ke-25 Terkaya versi Forbes 2004,” *tempo.co*, Minggu, 10 Juni 2012 | 20:54 WIB; dan “Sudono Salim, dari Penyalur Cengkeh Sampai Bos BCA,” *tempo.co*, Minggu, 10 Juni 2012 | 19:56 WIB. Tahun 1990, sebuah perusahaan industri *kretek* mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, sehingga mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka.

⁷⁴ Pada mulanya, *kretek* dibungkus dengan kelobot, daun jagung baik yang muda maupun tua. Sangat sedikit produsen membungkusnya dengan kelaras atau daun kawung, kecuali dalam kesulitan memperoleh kelobot. Batang-batang rokok hanya diikat dengan jumlah tertentu (kebanyakan 10 dan 20 batang per ikat) untuk dipasarkan. Saat itu, belum dikenal kertas pembungkus, sehingga rokok bisa disebut “bertelanjang bulat” di pasaran. Cara penjualannya pun kebanyakan dari tangan ke tangan, secara kecil-kecilan. Tidak ada kios khusus rokok, dan produsen membuatnya sebagai kegiatan keluarga.

lengkap, produk dapat diselesaikan secara lokal tanpa melalui Eropa. Karena bahan-bahan baku tersedia secara lokal, peralatan linting dibuat sendiri dari bahan kayu juga secara lokal, sebelum mesin-mesin menggantikannya. Rangkaian produksi industri *kretek* di Jawa lengkap secara internal tanpa membutuhkan keterhubungan dan ketergantungannya dengan Eropa sebagai pusat.⁷⁵

Hubungan antara pertanian dan industri dalam industri pengolahan tembakau menunjukkan hubungan yang erat dan saling mengait. Tembakau tidak sekadar sebagai komoditas ekspor, melainkan dimanfaatkan atau diserap oleh industri rokok. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, merasa optimis bahwa seluruh produksi tembakau petani di daerah itu akan habis dibeli oleh pabrik rokok, seiring kunjungan kerja timnya ke sejumlah pabrik rokok besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah.⁷⁶ Dirjen Bea dan Cukai mengatakan, industri rokok *kretek* merupakan pembeli tunggal untuk sektor pertanian tembakau dan cengkeh.⁷⁷

Gambar 3.4 | Sirkuit Produksi Industri Kretek di Awal Pertumbuhan



Dalam industri *kretek*, tembakau dan cengkeh tidak diekspor terlebih dulu sebagai barang-barang setengah jadi, melainkan telah diolah sebagai tembakau rajangan dan cengkeh olahan yang kemudian diserap oleh industri *kretek*. Proses produksi ini tidak membutuhkan bantuan atau ketergantungan pada negeri-negeri di pusat, melainkan dapat diselesaikan seluruhnya sebagai produk – rokok *kretek* – secara internal. Produk *kretek* tidak melewati pasar ekspor dan

⁷⁵ Pada 1906, Nitisemito – pernah menjadi ukang jahit, blantik alias pialang jual beli kerbau, jagal kerbau, rental dokar, dan jual-beli tembakau – memberanikan diri memproduksi rokok. Selang delapan tahun, dia sudah menjadi pengusaha rokok raksasa, dengan pabrik di atas lahan enam hektare di Desa Jati Kudus, dengan pekerja sekitar 15.000 orang. Lihat “Sejarah Kretek,” <http://kudus-city.4t.com/sejarah/s-all3.htm> (diakses pada 13 Maret 2013).

⁷⁶ Lihat “Produksi Tembakau Pamekasan Tahun 2011 Bakal Habis Diserap Pabrik Rokok,” *tempo.co*, Selasa, 22 Maret 2011 | 13:33 WIB.

⁷⁷ Lihat “Dirjen: Produksi Rokok 2005 Meningkat,” *tempointeractive.com*, Jumat, 11 Pebruari 2005 | 18:20 WIB.

pengolahan industri di luar negeri, melainkan seluruhnya dapat dipenuhi secara domestik. Dua perusahaan industri rokok *kretek* terbesar di Kediri dan Kudus mengaku siap membeli tembakau dari Temanggung pada masa panen 2013 di tengah kecemasan atas bakal diberlakukannya PP 109/2012.⁷⁸

Industri *kretek* berbeda dengan kebanyakan industri di Indonesia yang hanya dapat selesai bila ditopang oleh ekspor komoditas pertanian atau pertambangan, yang kemudian diimpor dalam bentuk barang setengah-jadi sebelum diselesaikan lewat suatu industri perakitan seperti industri mobil.⁷⁹ Dalam industri otomotif dan elektronik, proses produksi seperti dalam industri *kretek* tidaklah terjadi, karena membutuhkan barang setengah-jadi, komponen atau suku cadang (*spare part*) untuk dirakit sebagai produk akhir.⁸⁰ Sebaliknya, industri *kretek* justru seluruhnya dapat menggunakan bahan-bahan baku yang berasal dari negeri sendiri, sehingga tidak ada surplus yang ditarik ke luar negeri (pusat). Dan menurut Dirjen Bea dan Cukai, industri rokok merupakan pembeli tunggal untuk sektor pertanian tembakau dan cengkeh.⁸¹

Industri rokok *kretek* secara garis besar dibagi dalam dua golongan, yaitu sigaret *kretek* tangan (SKT) dan sigaret *kretek* mesin (SKM). Jumlah produksi SKM – dengan mengandalkan kecepatan teknologi produksinya – dapat melesat sampai lebih 150 miliar batang per tahun. Kendati demikian, total produksi kedua golongan industri *kretek* ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan produksi SKT hanya di bawah 20 miliar batang per tahun. Namun kedua golongan ini senantiasa membutuhkan bahan baku cengkeh sebagaimana yang terlihat dalam **tabel 3.17** selama 2009-2011. Karena produksi rokok cenderung meningkat, maka kebutuhan cengkeh pun meningkat setiap tahun. Tahun 2011, kebutuhan cengkeh untuk kedua golongan industri ini mencapai 79.738 ton.

Tabel 3.17 Perkembangan Produksi SKT, SKM dan Kebutuhan Cengkeh 2009-2011						
Uraian	SKT			SKM		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Produksi Rokok (miliar batang)	16,7	17,0	18,0	142,9	144,7	157,1
Kebutuhan Cengkeh (ton)	46.973	46.904	52.146	67.872	73.445	79.738
Sumber: Gappri						

⁷⁸ Lihat “2 Pabrik Rokok Serap Produksi Petani,” *bisnis-jabar.com*, Kamis, 21 Februari 2013 | 07:48 WIB. PT Gudang Garam sepakat akan melakukan pembelian dengan kuota naik daripada 2012, yakni dari 6.500 ton menjadi Rp8.500 ton. Sedangkan kuota PT Djarum turun dari tahun lalu, yakni dari 6.000 ton turun menjadi 4.000 ton.

⁷⁹ Lihat “Kebijakan Impor Baja Ancam Industri Mobil,” *kompas.com*, Kamis, 31 Januari 2013 | 08:21 WIB. Selain tergantung pada impor baja, industri otomotif juga bergantung pada impor suku cadang.

⁸⁰ Lihat “Pemerintah Segera Keluarkan Izin Impor Suku Cadang Kendaraan,” *tempo.co.id*, Jumat, 08 April 2005 | 19:34 WIB; dan “Impor Suku Cadang Mobil Jepang Lesu,” *liputan6.com*, Kamis, 24 Maret 2011 14:01.

⁸¹ Lihat “Dirjen: Produksi Rokok 2005 Meningkat,” *tempointeractive.com*, Jumat, 11 Pebruari 2005 | 18:20 WIB.

3.3.2. Pemupukan modal secara mandiri

Pembentukan industri *kretek* itu bukan pula hasil daya kreasi dari kreativitas kebudayaan Belanda. Tidak ada pengusaha Belanda yang terlibat dalam industri *kretek*, karena tembakau yang dikuasai mereka justru diekspor ke Eropa.⁸² Para pengusaha Belanda tidak berkepentingan memupuk modal di sektor industri pada negeri jajahan (pinggiran), melainkan ditanam dan diakumulasi di pusat. Negeri-negeri jajahan lebih ditempatkan sebagai wilayah kantong ekspor bagi pengusaha Belanda ketimbang melakukan industrialisasi. Kemudian, negeri-negeri jajahan dijadikan sebagai pasar bagi barang-barang jadi yang diimpor, seperti halnya tekstil.⁸³

Namun berbeda dengan kepentingan pengusaha Belanda, maka sejumlah orang di Kudus justru mulai merintis kembali suatu industri pengolahan tembakau yang diabaikan perusahaan Belanda yang menguasai pasar tembakau untuk ditransformasi menjadi rokok. Para kreator kalangan pribumi inilah yang menyelesaikan proses produksi pengolahan tembakau secara domestik pada permulaan abad ke-20. Dengan modal kecil – menggunakan teknologi produksi yang sangat sederhana – mereka mengolah tembakau dan cengkeh untuk dilinting dengan tangan dan peralatan kayu untuk berubah menjadi *kretek*. Rokok jenis inilah yang sekarang merajai pasaran dalam negeri yang menjadi motif BAT menguasai saham *kretek* Bentoel.⁸⁴ Perusahaan *kretek* lainnya menikmati lonjakan penjualannya sebesar 8 persen dibandingkan tahun 2011.⁸⁵

Kretek dimulai atau dirintis oleh Haji Djamar yang merajang cengkeh dan dicampurkan dalam tembakau yang akan dilintungnya menjadi rokok sekitar tahun 1880. Melinting rokok yang akan dihisap sudah menjadi kebiasaannya, sebagaimana kebanyakan penduduk yang mengkonsumsi rokok. Namun pada 1906, langkah yang ditempuh Nitisemito lebih serius dalam menyelami bisnis *kretek* yang sangat diuntungkan karena pengusaha Belanda tidak memasukinya sebagai kompetitor. Keberhasilannya dalam menyelami dan menggerakkan industri *kretek* telah menaikkan kedudukannya sebagai “Raja *Kretek*” dari Kudus. Pada puncaknya, sekitar 1938, perusahaannya memproduksi lebih 10 juta batang dan mempekerjakan lebih dari 10.000 orang – suatu angka yang tergolong besar – termasuk mempekerjakan tenaga ahli asal Belanda di bidang keuangan.⁸⁶

Pada tahap primitif, industri *kretek* menunjukkan kemampuannya tumbuh secara mandiri. *Pertama*, industri *kretek* tidak membutuhkan kredit besar dari bank-bank negara sebagaimana yang pernah digelontorkan di masa pemerintahan Soeharto Orde Baru kepada perusahaan-perusahaan industri yang menjadi kroni-kroni bisnisnya dalam jumlah yang akhirnya menjadi kredit macet, melainkan lewat serangkaian perdagangan – jual produk, mengumpulkan

⁸² Jan Breman, *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

⁸³ Perkembangan tekstil pun sekarang ini banyak dibanjiri dengan tekstil impor. Lihat “Banjir Impor Tekstil Impor,” *kontan.co.id*, Jumat, 25 Januari 2013 | 10:04 WIB.

⁸⁴ Lihat “BAT Akuisisi Bentoel: Ini Peluang Besar Rebut Pasar *Kretek* RI,” *viva.co.id*, Rabu, 17 Juni 2009, 10:04. Pangsa pasar *kretek* mencapai 93 persen dan rokok putih hanya dapat merebut 7 persen. Langkah British American Tobacco (BAT) mengakuisisi 85 persen saham PT Bentoel Internasional Investama Tbk adalah peluangnya merebut pasar *kretek*.

⁸⁵ Lihat “Penjualan Sigaret *Kretek* Mesin Gudang Garam Naik hingga Kuartal III,” *indonesiainancetoday.com*, Rabu, 05 Desember 2012.

⁸⁶ J.A. Noertjahyo, “Sigaret *Kretek*, Tonggak Bangsa,” dalam J.B. Kristianto (ed.), *1000 Tahun Nusantara*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2000, hal. 276-287.

keuntungan dan menanam kembali sebagian keuntungannya – dalam memupuk dan memperluas modalnya. *Kedua*, industri *kretek* yang mulai tumbuh juga tidak memperoleh proteksi politik dari pemerintah atau kebijakan tarif impor rokok yang tinggi untuk membentenginya sebagaimana yang dinikmati para pengusaha industri substitusi impor (ISI) terutama di masa Orde Baru. Karena di masa pertumbuhannya, industri *kretek* berada di bawah intaian pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berkepentingan untuk memaksa perusahaan *kretek* menyetorkan pajak dan bea.⁸⁷

Tahap primitif itu, industri *kretek* tumbuh di luar ekonomi perkebunan raksasa yang dikuasai pengusaha Belanda yang justru tidak berkepentingan dengan industri kecil. Pada umumnya, sebagaimana sudah dikemukakan, pengusaha Belanda tidak berkepentingan dengan industrialisasi di negeri jajahannya, melainkan berkepentingan dengan industrialisasi di negerinya dan di Eropa. Sehingga industri *kretek* ibarat tumbuh liar dalam berbagai dominasi modal-modal Belanda, karena juga bukan bisnis yang menjadi kepentingan mereka. Dalam kedudukan ini keberadaan pengusaha industri *kretek* bukan menjadi pesaing pengusaha Belanda. Tidak ada persaingan antara pengusaha pribumi dan pengusaha Belanda dalam industri *kretek*. Namun, rintisan dan pemupukan primitif atas industrialisasi *kretek* yang diabaikan pengusaha Belanda ini justru menjadi salah satu industri yang menguntungkan.

3.3.3. Persaingan, kejatuhan dan bangkit lagi

Pertumbuhan industri *kretek* itu menjalar tidak hanya di sekitar Kudus, namun juga merembet ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bila sebelumnya usaha *kretek* banyak dirintis dan dijalankan oleh kalangan pribumi, namun ketika keuntungan menjadi motif dan peluang masih terbuka lebar, maka mulai banyak pula kalangan Tionghoa yang mengikuti jejak membangun usaha mereka. Dengan perkembangan ini di satu sisi terbentuk golongan pengusaha pribumi atau bumiputra serta golongan pengusaha Tionghoa dalam arena bisnis yang sama,⁸⁸ sedangkan di sisi lain di antara sesama mereka terjadi saling bersaing demi mengejar laba atau keuntungan.

Persaingan bisnis pun terbentuk dalam industri *kretek*. Berbeda dengan sektor perkebunan raksasa dan pertambangan, maka di sektor perkebunan tembakau dan cengkeh rakyat serta industri *kretek*, arena ini justru tanpa melibatkan pengusaha Belanda secara langsung. Kendati demikian, persaingan ini berjalan kian sengit seiring bertambahnya jumlah usaha industri *kretek* baik di Kudus maupun di kota-kota lainnya. Cepat atau lambat, persaingan ini memanaskan situasi dan menimbulkan gejolak untuk memperebutkan laba di antara mereka. Pada 31 Oktober 1918, persaingan mencapai puncak dan akhirnya memercikkan ledakan, yakni suatu kerusuhan hebat di Kudus.

⁸⁷ Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Jakarta : Sinar Harapan, 1982.

⁸⁸ Secara garis besar, dalam industri rokok *kretek*, terbelah atas dua kelompok sosial sebagai pengusaha baru yang menguasai bisnis ini, yaitu kelompok bumiputra dan kelompok Tionghoa. Para pengusaha Belanda sebagai lapisan teratas dalam formasi ekonomi ini tidak terlibat karena mereka lebih mementingkan komoditas pertanian yang diekspor ketimbang ikut menyelenggarakan industrialisasi, terlebih lagi industrialisasi di sektor perkretekan. Sebagian pengusaha perintis industri *kretek*, bergabung dalam Serikat Dagang Islam (SDI) atau kemudian berubah menjadi Serikat Islam (SI). Tentang formasi tiga lapisan pengusaha di masa Hindia Belanda, untuk lebih lengkapnya, lihat Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydney: Allen & Unwin, 1986.

Kerusuhan itu bukan saja menimbulkan kerusakan atas rumah-rumah dan pabrik-pabrik *kretek*, namun juga banyak korban yang menderita luka-luka. Tidak lepas dari itu juga kedudukan pemerintah Hindia Belanda dalam menempatkan diri untuk menjalankan politik atau kebijakan ekonominya. Dampak kerusuhan ini sangat dirasakan karena banyak pengusaha bumiputra yang berpengaruh diajukan ke muka pengadilan dan dijatuhi hukuman. Sehingga industri rokok kretek mereka yang pernah mekar di Kudus, sejak itu mengalami kemunduran. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pengusaha Tionghoa untuk memperkuat kedudukan mereka dalam industri *kretek*. Inilah pergeseran yang terjadi dalam industri *kretek* di masa Hindia Belanda.

Kendati kerusuhan itu telah mengakibatkan kerusakan cukup berat bagi industri kretek, namun pelan tetapi pasti, industri ini bangkit kembali dari kehancurannya. Salah satu pendorongnya adalah permintaan konsumen yang sudah telanjur membutuhkan *kretek*. Pada 1924, industri kretek di Kudus kembali pulih, bahkan tercatat sekitar 35 pabrik skala besar, menengah, dan kecil. Tahun 1928, jumlah pabrik tetap menunjukkan peningkatan menjadi 50 pabrik, dan komposisi kepemilikan antara kalangan bumiputra dan Tionghoa hampir seimbang. Perimbangan kepemilikan ini ditandai pula dengan pertambahan penduduk di Kudus menjelang 1930 sebagaimana dalam **tabel 3.18**.

Tabel 3.18 Penduduk Kudus berdasarkan Etnis 1915 dan 1930					
Tahun	Eropa	Tionghoa	Timur asing lainnya	Bumiputra	Total
1915	230	4.000	40	34.530	38.800
1930	417	4.445	172	49.490	54.424

Sumber: De Graaf en Stibbe, *Encycopedie van Nederlansch Indie*, deel twee, Leiden: EJ Drill, 1918, hal. 284-285; lihat juga *Overzicht voor Nederlansch Indie, Volkstelling 1930*, deel VIII, Batavia: Departemen van Economische Zaken, 1936, hal. 78.

Usaha yang dijalankan Nitisemito demi mengembalikan kejayaan *Bal Tiga* – sebelumnya adalah rokok cap *Kodok Mangan Ulo* namun kurang membawa keberuntungan – juga pulih kendati harus menghadapi persaingan dengan pengusaha *kretek* dari kalangan Tionghoa. Kejayaannya sungguh-sungguh dicapai pada 1938, dengan mengoperasikan pabrik seluas 6 hektare dan mempekerjakan lebih 10.000 buruh termasuk tenaga ahli keuangan asal Belanda, serta memproduksi lebih 10 juta batang. *Bal Tiga* merambah pasar di berbagai daerah melintasi Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan, bahkan sampai ke Singapura dan Malaysia. Dengan kemajuan ini pemerintah Hindia Belanda memandang usahanya sebagai salah satu yang penting bagi pemasukan pajak dan bea, sehingga harus menimbang berulang kali untuk menutup pabriknya. Beriringan dengannya, muncul pula rokok *Goenoeng Kedoe* yang dimiliki M Atmowidjojo, *Delima* milik pengusaha HM Muslich, *Djangkar* milik H Ali Asikin, dan *Trio* yang dimiliki Tjoa Khang Hay, sejak tahun 1914 di Kudus.⁸⁹

⁸⁹ Pada 1909-1914, sedikitnya terdapat 12 perusahaan rokok besar, 16 perusahaan menengah, dan 7 perusahaan kecil di Kudus. Selain itu, pada 1910, muncul pula perusahaan rokok *kretek* di Surabaya. Tahun 1930, beroperasi pabrik kretek *Minak Djinggo* di Pati dan dua tahun kemudian pindah ke Kudus yang dimiliki oleh Kho Djie Song, pemilik perusahaan Nojorono. Perusahaan yang didirikan pada 1937 oleh HA Ma'roef, memproduksi rokok *Djamboe Bol*.

Kemunculan industri *kretek* sebagai arena bisnis yang menguntungkan bukan saja mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk merasa perlu menarik pajak dan bea yang lumayan besar masa itu, namun juga memberikan kesempatan kepada sebuah perusahaan transnasional, PT British American Tobacco (BAT) untuk mendirikan pabrik yang memproduksi rokok putih pada 1925 di Cirebon, Jawa Barat.⁹⁰ Sasaran konsumen rokok putih adalah kalangan etnis Belanda (Eropa) dan para pejabat pribumi, yang belum atau tidak menyukai *kretek*. Dengan demikian – terlepas dari segmen pasarnya – BAT dapat diletakkan sebagai salah satu pesaing dalam industri rokok di masa Hindia Belanda.

Meluasnya pasar *kretek* telah membangkitkan dorongan sejumlah orang mendirikan pabrik di beberapa kota lainnya seperti Surabaya, Malang dan Kediri. Dalam menghadapi persaingan dan gejolak, memang tidak banyak yang dapat bertahan lama. Ada yang jatuh dalam kebangkrutan⁹¹ dan ada pula yang bangun sebagai pabrik baru. Mereka juga harus menghadapi persaingan dengan perusahaan rokok putih yang menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia. Pada dekade 1950-an, rokok putih mendominasi pangsa pasar, dengan penguasaan sekitar 90 persen. Namun, perlahan-lahan pangsa pasar *kretek* merambat naik dan melejit sejak 1998. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengungkapkan, penguasaan produk *kretek* atas pasar domestik selama lebih satu dekade ini di atas 90 persen dan ditandai dengan kemunculan hampir 5.000 pabrik.⁹²

3.4. Industri Padat Karya

Sebagaimana pada umumnya setiap permulaan industrialisasi, dicirikan dengan banyak pekerja yang dilibatkan dalam proses produksi. Dapat dikatakan, industri pengolahan tembakau yang muncul pada permulaan industrialisasi bersifat padat karya. Sampai sekarang, industri *kretek* masih banyak yang menggunakan tangan, pada umumnya dalam pabrik-pabrik sigaret *kretek* tangan (SKT). Industri *kretek* yang termasuk kategori SKT memang yang paling banyak menyerap tenaga kerja, namun sekaligus pula yang banyak muncul dan kemudian tenggelam. Industri SKT banyak termasuk industri yang bermodal kecil, lebih mengandalkan kemampuan atau produktivitas pekerjaan tangan ketimbang mesin.

Tahun 2006, jumlah pabrik yang tercatat adalah 3.961 perusahaan rokok. Sebagian besar tergolong pabrik kecil yang memproduksi maksimal 6 juta batang rokok. Golongan pabrik IIIB ini berjumlah 3.834 perusahaan, dengan mengandalkan kerja tangan dalam melinting dan mengemas rokok. Sedangkan yang termasuk golongan I – pabrik yang memproduksi dalam skala besar – diperbolehkan memproduksi lebih dari 2 miliar batang per tahun, namun jumlah perusahaannya justru paling sedikit, hanya enam perusahaan saja (lihat **tabel 3.19**). Pabrik skala

Pada 1949, MC Wartono mendirikan pabrik *kretek* yang memproduksi rokok *Sukun*. Pada 25 Agustus 1950, Oei Wie Gwan membangun pabrik *kretek* terbesar, yakni *Djarum*.

⁹⁰ Lihat “Gedung PT. British American Tobaccos (P.T B.A.T),” *disparbud.jabarprov.go.id*, Selasa, 27 Desember 2011. Sebelumnya gedung ini dimiliki oleh perusahaan rokok SS Michael. Dari sinilah BAT menggerakkan pabriknya untuk dilempar ke pangsa pasar untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup kalangan Eropa dan pejabat pribumi.

⁹¹ Salah satu yang menderita kebangkrutan adalah perusahaan rokok *Bal Tiga* yang demikian Berjaya pada 1914-1949. Produsen *kretek* ini berakhir pada 1955 dan para pewarisnya menikmati hasil warisan Nitisemito.

⁹² Lihat “Jatuh-Bangunnya Industri Rokok *Kretek* Nasional,” *swa.co.id*, Senin, 11 Februari 2013. Omzet rokok – belum termasuk tembakau – di Indonesia bisa mencapai Rp 225 triliun.

besar lebih mengandalkan teknologi produksi yang modern, yakni dijalankan oleh mesin-mesin yang produktivitasnya lebih tinggi.

Tabel 3.19 | Jumlah Industri Rokok Berdasarkan Skala Produksi, 2006

No	Jenis/ Skala	Golongan	Jumlah Produksi (batang)	Jumlah Pabrik
1	Besar	I	> 2 miliar	6
2	Menengah	II	> 500 juta s.d. 2 miliar	25
3	Kecil	IIIA	> 6 juta s.d. 500 juta	96
4	Kecil	IIIB	sampai dengan 6 juta	3.834
Jumlah				3.961
Sumber: Direktorat Cukai, 2007				

Sebagai sentra industri rokok, Kabupaten Kudus merupakan jumlah pabrik terbanyak di wilayah eks-Keresidenan Pati, dengan jumlah sebanyak 94 pabrik dari total 138 pabrik di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kudus.⁹³ Tidak sedikit perusahaan industri rokok yang bangkrut baik karena kebijakan pemerintah maupun kekalahan dalam persaingan. Tingginya harga bahan baku rokok – tembakau dan cengkeh – ditambah lagi dengan omzet atau penjualan yang tidak sesuai target, kemudian juga menjadi penyebab puluhan perusahaan rokok *kretek* di Kabupaten Sumenep terpaksa gulung tikar.⁹⁴ Demikian pula atas apa yang diderita pabrik rokok di Pamekasan sebagai buntut kenaikan cukai setiap tahun yang ikut tergulung dalam kebangkrutan.

Para pengusaha industri rokok kecil ini menilai cukai sudah terlalu tinggi, sehingga tidak sepadan dengan biaya produksi yang dikeluarkan.⁹⁵ Menurut Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), banyak pabrik kecil yang rontok akibat harga cengkeh yang melambung sampai Rp 250 ribu per kilogram pada 2011. Pabrik rokok kecil juga harus menghadapi persaingan dengan pabrik rokok besar yang bisa leluasa menaikkan harga untuk mengembalikan beban biaya produksi.⁹⁶ Kemudian, lebih dari 100 perusahaan rokok berskala

⁹³ Lihat “Kudus Memiliki Jumlah Pabrik Rokok Terbanyak,” *jogja.antaranews.com*, Kamis, 6 September 2012 15:34 WIB. Dari jumlahnya, untuk golongan satu sebanyak tiga pabrik, golongan dua sebanyak 58 pabrik, dan golongan tiga sebanyak 77 pabrik. Sebelumnya, pada 2010, jumlahnya sebanyak 243 pabrik rokok. Penurunan ini karena ketentuan luas bangunan industri rokok minimal 200 meter persegi.

⁹⁴ Lihat “Puluhan Perusahaan Rokok Gulung Tikar,” *surabaya.okezone.com*, Rabu, 18 April 2012 21:16 wib.

⁹⁵ Lihat “Imbas Kenaikan Cukai di Pamekasan,” *beritajatim.com*, Senin, 18 Juni 2012 10:31:53 WIB.

⁹⁶ Lihat “Pabrik Rokok Kecil Terancam Gulung Tikar,” *tempo.co*, Senin, 07 Januari 2013 | 10:57 WIB. Jumlah pabrik rokok kecil terus berkurang. Pada 2009, masih berjumlah 2.500 pabrik, namun belakangan menyusut menjadi sekitar 1.500 perusahaan.

kecil di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, terancam bangkrut karena naiknya cukai dan harga tembakau.⁹⁷

Kendati demikian, berlangsung pula sejumlah pabrik SKT yang baru dibangun dengan sokongan dari beberapa perusahaan besar. Pada Juli 2012, salah satu perusahaan besar meresmikan dua pabrik SKT di Probolinggo dan Lumajang. Perusahaan ini menganggap pembangunan dan pengoperasian dua pabriknya sebagai upaya memperkuat tradisi SKT yang diharapkan menyerap 8.400 pekerja.⁹⁸ Sebaliknya, tidak sedikit pula izin pabrik rokok yang dicabut karena kesulitan dan tidak beroperasi atau gulung tikar. Kenaikan cukai menuntut mereka untuk meningkatkan daya saing dengan alih teknologi produksi untuk menggantikan banyak pekerja tangan (*manual labour*). Dengan kenaikan cukai ini pabrik-pabrik rokok dihadapkan pada persaingan yang kian ketat atau keras.

Dampak dari situasi yang banyak dialami pabrik rokok, dalam kurun waktu 2007-2008, Kantor KPPBC Kudus telah mencabut izin 1.204 pabrik rokok kelas kecil di daerah Kudus dan Jepara, karena sudah tidak beroperasi, gudang yang beralih fungsi. Selain itu, 184 pabrik rokok dibekukan terkait perizinan dan 410 pabrik diblokir (tutup sementara) karena tidak membuat laporan bulanan.⁹⁹ Pada Maret 2010, kantor yang sama juga mencabut izin usaha 1.980 perusahaan rokok di Kudus. Sebagian perusahaan, diduga fiktif.¹⁰⁰ Pada Maret 2011, KPPBC kembali mencabut izin 86 perusahaan rokok skala kecil.¹⁰¹ Sementara itu, pada April 2009, Kantor Bea dan Cukai Malang mencabut izin sebanyak 157 pabrik dan membekukan 56 pabrik rokok.¹⁰² Sebelumnya, tahun 2007, sebanyak 20 perusahaan rokok skala kecil (golongan 3) di Malang terancam mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin operasional dan hukuman pidana karena melanggar tiga aturan cukai rokok.¹⁰³ Berikut ini **grafik 3.3** menggambarkan tentang kemunculan dan kehilangan pabrik rokok selama 2004-2008, dengan kecenderungan bahwa pencabutan izin usaha mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2008, mencapai 1801 izin usaha yang dicabut.

⁹⁷ Lihat "Perusahaan Rokok Kecil di Daerah Terancam Gulung Tikar," *tempo.co*, Selasa, 22 Februari 2011 | 13:20 WIB.

⁹⁸ Lihat "Sampoerna Resmikan Dua Pabrik Sigaret Kretek Tangan," *tempo.co*, Rabu, 11 Juli 2012 | 14:40 WIB. Pabrik yang beroperasi di Probolinggo telah menyerap pekerja sebanyak 4.600 orang.

⁹⁹ Lihat "Bea Cukai Kudus Cabut Izin 1.204 Pabrik Rokok Kecil," *tempo.co*, Selasa, 05 Agustus 2008 | 14:34 WIB. Menurut Forum Perusahaan Rokok Kudus (FPPRK), pelanggaran yang dilakukan pabrikan kecil itu tidak terlepas dari perubahan sistem. Berdasar aturan lama, harga eceran rokok ditentukan pemerintah berdasarkan empat golongan strata, sedangkan aturan baru, harga eceran jual ditentukan berdasarkan harga per batang, dengan tiga golongan strata. Dalam aturan baru, golongan strata I dengan batasan produksi 2 miliar batang ke atas, golongan II 500 juta batang-1 miliar batang, dan golongan III 0-500 juta batang per tahunnya. Adapun harga per batang untuk golongan III Rp 300, sedangkan untuk isi 12 batang Rp 3.600.

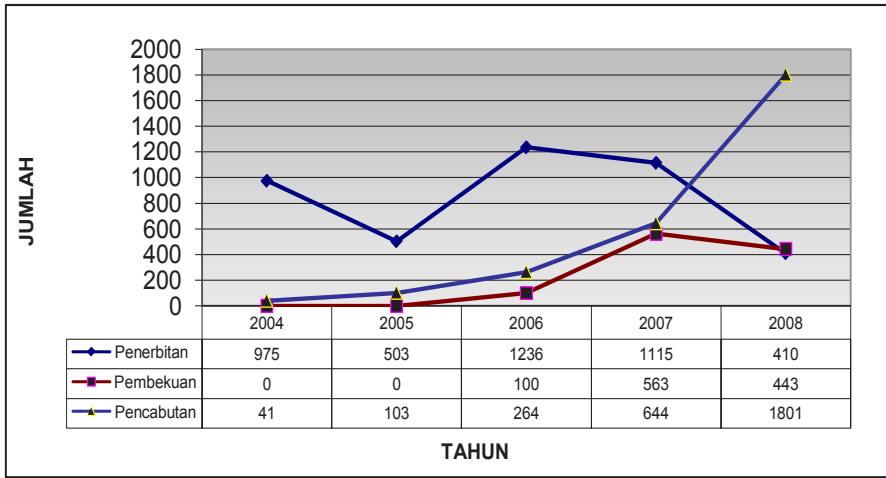
¹⁰⁰ Lihat "1.980 Izin Pabrik Rokok Dicabut," *Suara Merdeka*, Jumat, 12 Maret 2010. Selain itu, terungkap pula realisasi penerimaan cukai tahun 2009 sebesar Rp 15,2 triliun. Jumlah ini melampaui hingga 10,12 persen dari target yang dibebankan pada KPPBC Tipe Madya Cukai sebesar Rp 13,8 triliun.

¹⁰¹ Lihat "Ada 86 Pabrik Rokok Dicabut Izinnya," *tempo.co*, Selasa, 01 Maret 2011 | 14:11 WIB. Tahun 2011, target penerimaan cukai dari Kudus sebesar Rp 15,16 triliun, terdiri cukai rokok Rp 15,08 triliun dan bea masuk Rp 75 miliar. Sedangkan penerimaan cukai tahun 2010 mencapai Rp 16,8 triliun.

¹⁰² Lihat "Izin Ratusan Pabrik Rokok di Malang Dicabut," *tempo.co*, Selasa, 21 April 2009 | 16:28 WIB.

¹⁰³ Lihat "20 Perusahaan Rokok di Malang Terancam Dicabut Izinnya," *surabaya.detik.com*, Sabtu, 12 Mei 2007 17:17 WIB.

Grafik 3.3 | Jumlah Perusahaan Baru, Pembekuan dan Pencabutan Izin Usaha, 2004-2008

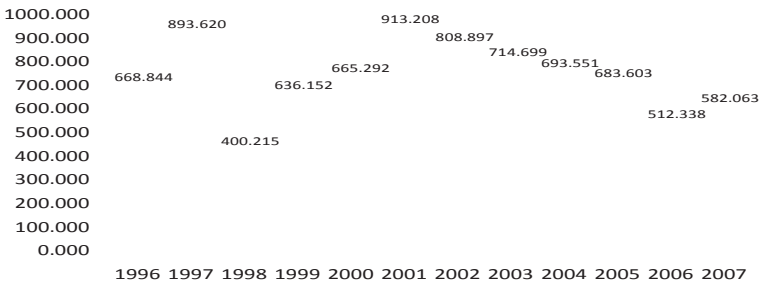


Sumber: Direktorat Pajak dan Cukai, 2009

3.4.1. Petani dan pekerja tembakau

Salah satu kontribusi penting industri pengolahan tembakau adalah penyerapannya atas tenaga kerja yang tergolong tinggi dalam catatan resmi. Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan, sepanjang 12 tahun – periode 1996-2007 – jumlah petani tembakau berfluktuasi antara di atas 400.000 sampai di atas 900.000 orang. Jumlah petani pernah mencapai puncaknya pada 2001, yakni 913.208 orang.¹⁰⁴ Namun jumlahnya sempat anjlok secara drastis ketika terjadi krisis moneter pada 1997-1998 menghantam Indonesia. Tahun 2006, sempat turun, namun tahun berikutnya bertambah lagi jumlah petani tembakau yang bekerja di banyak perkebunan rakyat (lihat grafik 3.4).

Grafik 3.4 | Jumlah Petani Tembakau 1996-2007



Sumber: a) Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Tembakau/Tobacco, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008; b) Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (Sakernas) 1996-2007, BPS, Jakarta

¹⁰⁴ Lihat “Tolak Teken FCTC, Indonesia Dikucilkan Internasional,” *poskotanews.com*, Jumat, 18 Januari 2013 10:18:07 WIB.

Sedangkan jumlah petani versi lainnya dengan sedikit selisih dikemukakan kelompok Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) yang mengungkapkan jumlah petani tembakau lebih banyak dibandingkan Ditjen Perkebunan pada 2005, yakni 684.000 orang.¹⁰⁵ Namun demikian, data jumlah petani 2011 versi Ditjen Perkebunan yang tersebar di 12 provinsi, kelihatan lebih banyak. Jumlah paling banyak adalah Jawa Timur, yakni 511.116 petani (lihat **tabel 3.20**). Tabel ini selain tidak memasukkan beberapa provinsi lainnya, juga salah satu provinsi penting sebagai penghasil tembakau, Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dicantumkan.

Tabel 3.20 Jumlah Petani Tembakau di 12 Provinsi 2011		
No	Tahun	Jumlah Petani
1	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	1.649
2	Sumatera Utara	8.628
3	Sumatera Barat	5.408
4	Jambi	294
5	Sumatera Selatan	137
6	Lampung	926
7	Jawa Barat	24.278
8	Jawa Tengah	134.790
9	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	11.568
10	Jawa Timur	511.116
11	Sulawesi Selatan	6.870
12	Bali	1.259
Jumlah		706.923
Sumber: dikutip dari http://ditjenbun.deptan.go.id		

Karena belum mencerminkan kenyataan jumlah yang sesungguhnya, maka informasi yang dikemukakan Bupati Lombok Timur (Lotim) adalah salah satu yang penting dicatat. Jumlah petani binaan sebanyak 4.383 orang pada 2013 di Kabupaten Lotim yang menggarap lahan tembakau virginia seluas 10.454 hektar, dengan jumlah oven keseluruhan sebanyak 10.556 unit.¹⁰⁶ Selain itu, dalam perkebunan tembakau, terdapat pula orang-orang yang bekerja sebagai pekerja atau buruh tembakau.¹⁰⁷ Secara garis besar, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) juga mengungkapkan bahwa jumlah petani tembakau mencapai 2 juta orang.¹⁰⁸ Namun, angka

¹⁰⁵ Lihat "Petani Tembakau di Indonesia," http://www.tcscindo.org/assets/applets/Fact_Sheet_Petani_Tembakau_Di_Indonesia.pdf (diakses pada 24 Maret 2013).

¹⁰⁶ Lihat "Bupati Minta Petani Tembakau Menanam Sesuai Target Pembelian," lomboktimurkab.go.id, Rabu, 13 Maret 2013 14:30:08 WIB.

¹⁰⁷ Harus diakui bahwa dalam kajian ini sulit menemukan data yang lebih rinci tentang berapa banyak yang tersebar di berbagai daerah penghasil tembakau. Persoalan juga bertambah karena kerap terjadi penyebutan yang tumpang tindih antara petani dan pekerja yang diupah.

¹⁰⁸ Lihat "Petani Tembakau Minta Pemerintah Adil," republika.co.id, Rabu, 23 Maret 2011, 19:23 WIB. APTI mencatat, para petani menggarap luas lahan tembakau di Indonesia yang mencapai 202.453 hektar.

ini tetap belum menyebutkan jumlah pekerja atau buruh tembakau. Demikian pula dengan kerja pengolahan tembakau.

3.4.2. Petani dan pekerja cengkeh

Selain negeri penghasil tembakau, Indonesia juga negeri penghasil cengkeh. Sebagai penghasil cengkeh, volume produksi Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Luas lahan perkebunan cengkeh memang menunjukkan kecenderungan meningkat dalam periode 2008-2012, sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.11. Namun kecenderungan ini tidak diikuti dengan volume produksi, karena hanya pada 2010 titik puncak produksi cengkeh. Tahun 2011, produksi cengkeh menurun karena curah hujan tinggi yang menyebabkan lebih sedikit bunga cengkeh yang dihasilkan.¹⁰⁹ Pada berbagai lahan perkebunan inilah banyak orang yang terlibat dalam proses produksi cengkeh.

Tahun 2007, sedikitnya bekerja 1.043.653 orang di perkebunan atau ladang-ladang cengkeh atau 2,5 persen dari total pekerja di sektor pertanian. Lebih dari 50 persen petani berada di tiga provinsi, yaitu Jawa Timur sebanyak 208.298 orang (19,9 persen), Jawa Tengah (18,9 persen), dan Jawa Barat (16,5 persen). Kendati Sulawesi Utara yang memiliki lahan cengkeh yang terluas dan Maluku merupakan sentra produksi cengkeh yang besar, namun dari jumlah orang yang bekerja masih lebih sedikit dibandingkan tiga provinsi tersebut (lihat **tabel 3.21**). Lebih banyak jumlah petani atau orang yang bekerja di lahan perkebunan cengkeh di Jawa berkaitan dengan kepadatan penduduk. Dengan penduduk yang lebih sedikit, maka petani di luar Jawa menanam cengkeh di lahan yang lebih luas dibandingkan dengan di Jawa.¹¹⁰

Tabel 3.21 | Jumlah Petani Cengkeh 2007

No	Provinsi	Jumlah Petani	%
1	Jawa Timur	208.298	20,0
2	Jawa Tengah	197.603	18,9
3	Jawa Barat	172.221	16,5
4	Sulawesi Utara	72.283	6,9
5	Sulawesi Selatan	60.668	5,8
6	Bali	56.618	5,4
7	Maluku	44.659	4,3
8	Sumatera Barat	34.458	3,3
9	Sulawesi Tengah	31.150	3,0
10	Lainnya	121.036	11,6
Jumlah		1.043.653	100,0

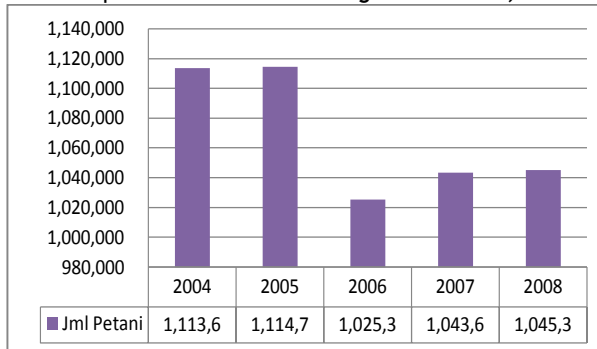
Sumber: Statistik Harga Produsen Sector Pertanian di Indonesia 1996-2000, untuk tahun 2001-2006 berasal dari Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2007-2009: Cengkeh/Clove, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008

¹⁰⁹ Lihat “Cuaca Tak Bersahabat, Produksi Cengkeh Merosot,” *kontan.co.id*, Senin, 05 September 2011 | 09:10 WIB.

¹¹⁰ Tentang luas lahan, lihat Gambar 3.2 Persentase Luas Lahan Cengkeh menurut Pulau, 2007. Luas lahan perkebunan cengkeh di Pulau Sulawesi adalah yang paling luas, yakni 39 persen.

Perkembangan jumlah orang yang bekerja di perkebunan atau ladang cengkeh selama 2004-2008, tetap bertahan dalam jumlah di atas 1 juta orang yang digolongkan sebagai petani dan sekaligus mengesankan tingkat kestabilannya yang mencukupi. Tahun 2005, jumlah petani paling banyak, yakni 1,114 juta orang. Sedangkan yang terendah adalah tahun 2006, yakni 1,025 juta orang (lihat **grafik 3.5**). Selisih keduanya tidak mencapai 100.000 orang. Sepanjang periode ini tidak menunjukkan kecenderungan menurun maupun meningkat dalam hal jumlah petani cengkeh. Hanya dalam rentang 2006-2008 saja yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada 2010, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyatakan, jumlah petani cengkeh mencapai 1,5 juta orang.¹¹¹ Sehingga ada kecenderungan meningkat jumlah orang yang terlibat dalam produksi perkebunan cengkeh.

Grafik 3.5 | Tren Jumlah Petani Cengkeh Indonesia, 2004-2008



Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia (Tree Crop Estate Statistic of Indonesia) 2004-2006, 2006-2008, 2007-2009: Cengkeh/Clove, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008
Catatan: 2008 angka sementara

Kendati demikian, tabel 3.20 itu belum termasuk mereka yang bekerja paruh waktu dan diupah sebagai buruh-tani, sehingga belum mencerminkan jumlah orang yang bekerja di ladang-ladang atau perkebunan tembakau. Dengan memasukkan jumlah buruh-tani, maka diperkirakan sampai akhir 2011, lebih dari satu juta orang yang bekerja di ladang-ladang tembakau. Demikian pula mereka yang bekerja di ladang-ladang cengkeh pasti melibatkan buruh-tani dalam memproduksi. Jumlah orang yang bekerja di kedua ladang ini diperkirakan mencapai 2,75 juta orang (lihat **tabel 3.22**).¹¹²

¹¹¹ Lihat "Panjangnya Matarantai Rugikan Petani Tembakau," *kabarbisnis.com*, Jumat, 06 Agustus 2010 | 13:55 wib.

¹¹² Lihat "Fakta Seputar Kontribusi Rokok dalam Perekonomian RI," *jaringnews.com*, Sabtu, 7 Juli 2012 12:02 WIB.

Tabel 3.22 Jumlah Petani/Buruh Tembakau dan Cengkeh 2011		
No	Perkebunan	Jumlah Petani/buruh
1	Tembakau	1.250.000
2	Cengkeh	1.500.000
Jumlah		2.750.000
Sumber: jaringnews.com, Sabtu, 7 Juli 2012 12:02 WIB		

3.4.3. Serapan industri rokok atas tenaga kerja

Tidak hanya dalam perkebunan dan usaha tani tembakau dan cengkeh yang menyerap tenaga kerja masing-masing lebih dari sejuta orang, penyerapan yang juga lebih di atas itu berlangsung dalam industri rokok. Pada 2009, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, sedikitnya 3.800 pabrik rokok, termasuk kelas rumahan dan jumlah ini terbanyak di seluruh dunia. Dua provinsi terbanyak pabrik rokok – Jawa Tengah dan Jawa Timur – terdapat sekitar 3.000 pabrik.¹¹³ Padahal, menurut Gappri, tahun 2007, jumlah produsen rokok mencapai 5.000 perusahaan.¹¹⁴ Karena kian banyak industri rokok kecil yang mengalami kesulitan memenuhi ketentuan pemerintah.¹¹⁵ Tahun 2010, jumlahnya merosot lagi sampai 1.500 pabrik, serta turun lagi menjadi tersisa 1.000 pabrik pada 2012.¹¹⁶ Jumlah pabrik rokok terus merosot dan sebanyak 500 pabrik sedang berada di ambang kehancuran.¹¹⁷

Kendati tidak menunjukkan berapa jumlah pekerja seluruhnya, namun industri rokok ini telah membentuk lapisan pekerja industri *kretek*. Tidak hanya serapannya atas tenaga kerja, melainkan juga telah melempangkan jalan bagi demikian banyak perempuan untuk ambil bagian dan terserap sebagai pekerja. Kecenderungan penyerapannya seperti ini masih terus berlangsung selama dekade 2000-an. Pada umumnya, sepanjang periode 1970-2006, kecenderungan industri pengolahan tembakau skala besar dan menengah dalam menyerap tenaga kerja terus mengalami peningkatan, kecuali sempat menurun selama 1991-1992. Pada 1970, jumlah pekerja sebanyak 132.000 orang. Tahun 2006, meningkat menjadi 316.991 pekerja. Memang sempat turun dan stagnan selama 1992-1994 hanya sebanyak 182.817 pekerja, sebelum menanjak lagi pada tahun berikutnya (lihat **grafik 3.3**). Kecenderungan ini belum termasuk industri skala kecil yang lebih bersifat padat karya dan dipastikan lebih banyak jumlahnya.¹¹⁸

¹¹³ Lihat “Wah... Pabrik Rokok di Indonesia Terbanyak di Dunia,” *kompas.com*, Kamis, 14 Januari 2010 | 14:36 WIB.

¹¹⁴ Lihat “Produsen Rokok Kecil Diambang Kepunahan,” *jpnn.com*, Kamis, 18 Oktober 2012, 08:30:00. Pada sisi lain, konsumsi rokok semakin meningkat. Tahun 2011, pasar rokok Indonesia sudah menyerap sekitar 250 miliar batang rokok. Kemudian, tahun 2012 diprediksi bakal ada 300 miliar batang yang diproduksi dan diserap pasar Indonesia.

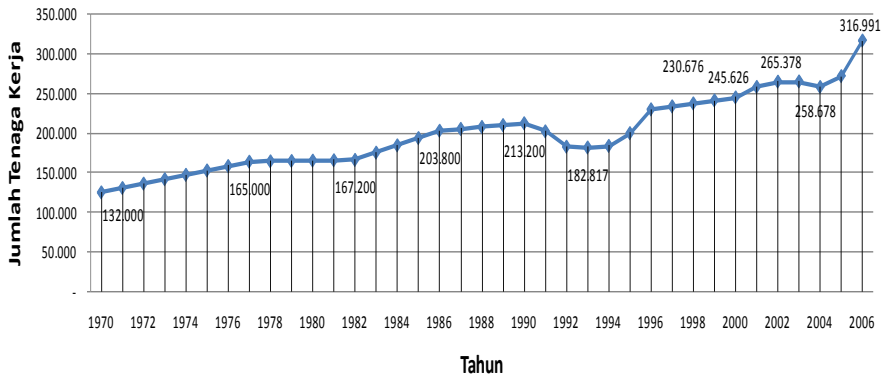
¹¹⁵ Lihat “Kian Banyak Industri Rokok Kecil Gulung Tikar,” *kompas.com*, Selasa, 15 November 2011 | 20:28 WIB.

¹¹⁶ Lihat “Jumlah Perusahaan Rokok Diperkirakan Turun 17%,” *indonesiainancetoday.com*, Kamis, 21 Juni 2012.

¹¹⁷ Lihat “500 Produsen Rokok di Indonesia ‘Kembang Kempis,’” *liputan6.com*, Jumat, 11 Januari 2013 10:39.

¹¹⁸ Selain jumlah industri rokok kecil lebih banyak, jumlah pekerjajanya jauh lebih banyak. Sesudah krisis moneter 1997-1998, muncul hampir 5.000 pabrik rokok *kretek* yang baru.

Grafik 3.6 | Pekerja Industri Pengolahan Tembakau, 1970-2006



Sumber: BPS, Statistik Industri Besar dan Sedang, 1996-2006

Kementerian Perindustrian juga menyajikan data jumlah pekerja industri rokok dalam periode 2006-2010 untuk golongan industri besar dan sedang (menengah). **Tabel 3.23** menunjukkan tren atau kecenderungan jumlah pekerja dalam industri-industri yang memproduksi jenis rokok *kretek* (KBLI 16002), rokok putih (16003), dan rokok lainnya (16004). Jumlah pekerja dalam produksi rokok kretek memang jauh melampaui jumlah pekerja rokok putih, namun dari tahun ke tahun jumlah pekerja rokok putih justru meningkat dan rokok kretek menunjukkan naik-turunya. Dalam rokok kretek, jumlah pekerja mencapai puncaknya pada 2007, yakni sebanyak 278.353 orang. Naik turun jumlah pekerja juga dialami dalam produksi rokok lainnya.

Tabel 3.23 | Perkembangan Jumlah Pekerja Industri Rokok 2006-2010 (Besar dan Sedang)

KBLI	Jenis Industri	2006	2007	2008	2009	2010	Tren
16002	Rokok kretek	261.591	278.353	262.576	263.751	257.690	-0,84%
16003	Rokok putih	2.998	2.907	3.294	3.315	3.721	5,80%
16004	Rokok lainnya	5.516	4.856	13.164	10.718	8.691	18,54%

Sumber: Kementerian Perindustrian RI (http://www.kemenperin.go.id/statistik/ibs_indikator.php?indikator=3)

Demikian pula kemampuan perusahaan-perusahaan produk tembakau skala besar dan menengah dalam menyerap tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin. Industri rokok ini lebih banyak menyerap pekerja perempuan ketimbang pekerja laki-laki. Selama 1993-2006, rata-rata komposisi pekerja perempuan dan laki-laki berkisar antara 80 persen berbanding 20 persen. Jumlah pekerja perempuan tidak pernah dilampaui oleh pekerja laki-laki. Tahun 2001, jumlah pekerja perempuan adalah yang terbanyak, yakni 82,21 persen. Sedangkan jumlah pekerja laki-laki yang terbanyak adalah tahun 1993, yakni sebesar 20,70 persen. Namun, secara keseluruhan,

penyerapan tenaga kerja untuk industri pengolahan tembakau skala besar dan menengah terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali sempat sedikit turun pada 2004 (lihat **tabel 3.24**).

Tabel 3.24 Distribusi Pekerja Produk Tembakau Menurut Jenis Kelamin, 1993-2006						
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1993	38.411	147.201	185.612	20,70	79,30	100
1994	41.193	174.836	216.029	19,07	80,90	100
1995	45.046	200.960	246.006	18,31	81,69	100
1996	43.372	179.935	223.307	19,40	80,60	100
1997	45.439	180.904	226.343	20,10	79,90	100
1998	44.793	194.055	238.848	18,80	81,20	100
1999	44.277	200.245	244.522	18,10	81,90	100
2000	43.549	202.077	245.626	17,73	82,27	100
2001	46.037	212.710	258.747	17,79	82,21	100
2002	53.227	212.151	265.378	20,06	79,94	100
2003	47.529	218.137	265.666	17,89	82,11	100
2004	49.948	208.730	258.678	19,31	80,69	100
2005	51.120	221.193	272.313	18,77	81,23	100
2006	60.325	256.666	316.991	19,03	80,97	100

Sumber: BPS, Statistik Industri Sedang dan Besar 1993-2006

Dari segi kinerja selama 2006-2010 dalam industri besar dan menengah, industri rokok *kretek* terus mengalami peningkatan nilai produksi dari tahun ke tahun dalam periode 2006-2008, namun selama 2009-2010 justru menurun yang juga diikuti penurunan biaya input. Sebaliknya, nilai tambah bruto rokok *kretek* menunjukkan kecenderungan meningkat, kecuali pada 2008 (lihat **tabel 3.25**). Tabel ini memperlihatkan ketika nilai produksi rokok *kretek* meningkat, nilai rokok putih justru merosot dalam periode 2007-2008. Namun unit usaha rokok *kretek* terus mengalami penurunan selama 2007-2009 yang justru diikuti dengan sedikit kenaikan jumlah pekerja pada 2009 dibanding tahun 2008.

Tabel 3.25 | Kinerja Industri Rokok Tahun 2006-2010 (Besar dan Sedang)

KBLI	Jenis Industri	Unit Usaha	Pekerja (Orang)	Nilai Produksi (Ribuan Rp)	Nilai Output (Ribuan Rp)	Biaya Input (Ribuan Rp)	Nilai Tambah Bruto
Kinerja 2006							
16002	Rokok kretek	449	261.591	57.326.813.726	60.666.487.573	18.446.469.485	42.220.018.088
16003	Rokok putih	13	2.998	7.856.124.030	7.883.647.833	1.544.760.061	6.338.887.772
16004	Rokok lainnya	32	5.516	149.550.690	153.248.405	71.908.325	81.340.080
Kinerja 2007							
16002	Rokok kretek	425	278.353	73.366.697.670	83.208.418.450	30.793.983.556	52.414.434.894
16003	Rokok putih	8	2.907	3.644.523.297	3.770.564.515	1.433.722.147	2.336.842.368
16004	Rokok lainnya	31	4.856	60.245.393	184.545.182	101.452.570	83.092.612
Kinerja 2008							
16002	Rokok kretek	381	262.576	99.344.152.041	108.814.918.450	59.273.680.569	49.541.237.881
16003	Rokok putih	13	3.294	2.711.562.648	4.604.755.667	2.286.693.826	2.318.061.841
16004	Rokok lainnya	35	13.164	192.435.355	735.782.692	239.427.266	496.355.426
Kinerja 2009							
16002	Rokok kretek	364	263.751	93.027.552.924	99.142.536.070	45.440.440.074	53.702.095.996
16003	Rokok putih	13	3.315	5.205.085.797	5.402.440.983	3.489.344.324	1.913.096.659
16004	Rokok lainnya	36	10.718	418.781.076	800.210.972	196.575.926	603.635.046
Kinerja 2010							
16002	Rokok kretek	369	257.690	91.525.580.899	96.280.594.860	38.050.370.253	58.230.224.607
16003	Rokok putih	12	3.721	3.504.329.312	3.642.910.684	2.846.608.769	796.301.915
16004	Rokok lainnya	36	8.691	345.494.390	410.980.492	105.725.352	305.255.140
Sumber: Kementerian Perindustrian RI (http://www.kemenperin.go.id/statistik/lbs_tahun.php?tahun=2006); (http://www.kemenperin.go.id/statistik/lbs_tahun.php?tahun=2007); (http://www.kemenperin.go.id/statistik/lbs_tahun.php?tahun=2008); (http://www.kemenperin.go.id/statistik/lbs_tahun.php?tahun=2009); (http://www.kemenperin.go.id/statistik/lbs_tahun.php?tahun=2010)							

Data BPS dan Kemenperin itu memang tidak memasukkan jumlah pekerja dalam industri pengolahan tembakau skala kecil. Sehingga dapat dikatakan data yang ditunjukkan belumlah mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Operasi industri rokok dan efek ganda yang terkait dengannya diperkirakan telah memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja yang mencapai 24,4 juta orang di mana dan sekurang-kurangnya 10 juta orang terlibat langsung di dalamnya.¹¹⁹ Menurut Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), jumlah pekerja yang mencakup juga pedagang yang terlibat dalam industri rokok secara nasional sekitar 6,5 juta orang. Sedangkan yang langsung terlibat dalam produksi rokok berjumlah sekitar 350.000 orang.¹²⁰ Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) memperkirakan sekitar 6 juta orang

¹¹⁹ Lihat "Fakta Seputar Kontribusi Rokok dalam Perekonomian RI," *jaringnews.com*, Sabtu, 7 Juli 2012 12:02 WIB.

¹²⁰ Lihat "Industri Rokok Serap Tenaga Kerja 6,5 juta Orang," *surabaya.detik.com*, Kamis, 07 Juni 2007 13:48 WIB. Gappri menyatakan, jumlah petani tembakau 2,4 juta orang, petani cengkeh sekitar 1,5 juta orang, mereka yang

yang bekerja dalam industri pengolahan tembakau, termasuk industri rokok.¹²¹ Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga memperkirakan jumlah pekerja industri rokok sekitar 6,1 juta orang, dengan 80 persen adalah alihdaya (*outsourcing*) di bagian pelinting yang justru sebagai *core business*.¹²²

Secara spesifik, produksi rokok didominasi *kretek*, maka industri rokok *kretek* menyerap 97 persen jumlah pekerja dalam industri rokok nasional. Paling banyak pekerja, diserap oleh pabrik-pabrik SKT, namun pangsa pasarnya hanya sebesar 30,5 persen pada 2010, karena mengalami penurunan dalam lima tahun. Pangsa pasarnya dikuasai oleh SKM.¹²³ Karena juga kebanyakan produksi SKM dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan industri rokok raksasa kendati beberapa dari perusahaan ini bekerja sama dalam bentuk Mitra Produksi Sigaret (MPS) di sejumlah daerah yang sedikit membantu menyerap tenaga kerja.

Beberapa perusahaan besar yang berbasis di Jawa Timur adalah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Salah satu perusahaan rokok terbesar yang sejak lama berdiri dan beroperasi di Kediri, pernah mengklaim bahwa yang dipekerjakannya berjumlah 500.000 orang.¹²⁴ Perusahaan rokok dengan anak perusahaannya yang berbasis di Surabaya dan sedang menguasai pangsa pasar, mempekerjakan 27.000 orang. Jumlah lebih banyak lagi, seiring kerja sama dengan 38 unit MPS di berbagai lokasi di Pulau Jawa dalam memproduksi SKT, secara keseluruhan mempekerjakan lebih dari 60.000 orang.¹²⁵ Sedangkan tiga pabrik dari perusahaan rokok kretek terbesar di Malang yang tergolong SKT mempekerjakan 5.400 buruh linting dari seluruhnya 20.000 buruh.¹²⁶ Lamongan yang juga menjadi salah satu daerah penghasil rokok, sedikitnya beroperasi 40 pabrik rokok. Selain memberikan kontribusi terhadap ekonomi lokal, juga menyerap sebanyak 4.481 pekerja.¹²⁷ Masih ada lagi pekerja lainnya yang diserap sebagaimana yang berlangsung di Kabupaten Jember ketika investor besar menggarap pembangunan pabrik rokok yang akan mengambil tempat di Desa Garahan, Kecamatan Silo. Diperkirakan, kelak bakal mempekerjakan 6.000 orang.¹²⁸

terlibat dalam perdagangan rokok 1,2 juta orang, serta bagian transportasi, percetakan dan lain-lain mencapai 10 juta orang.

¹²¹ Lihat "Industri Tembakau, Serap 6 juta Tenaga Kerja & Setor Rp 87 Triliun," *finance.detik.com*, Kamis, 27 Desember 2012 14:26 WIB.

¹²² Lihat "6,1 juta Alihdaya Industri Rokok Minta Diangkat," *bisnis.com*, Rabu, 21 November 2012 | 12:47 WIB. Lihat juga, "Kesampingan Pelinting Rokok, Sampoerna Dianggap Melanggar," *jpnn.com*, Jumat, 23 November 2012, 19:28:00. Sebuah Perusahaan rokok skala besar yang menggunakan sistem mitra produksi sigaret (MPS) memiliki sekitar 60.000 orang pekerja borongan bidang pelinting rokok. Jumlah pekerja tetap di perusahaan yang mengoperasikan 8 pabrik rokok – 6 pabrik SKT dan 2 pabrik SKM – hanya 28.300 orang buruh.

¹²³ Lihat "Pangsa Pasar Rokok Kretek Tangan Terus Menurun," *indonesiainfocenter.com*, Rabu, 07 September 2011.

¹²⁴ Lihat "Surya Wonowidjoyo," http://id.wikipedia.org/wiki/Surya_Wonowidjoyo (diakses pada 23 Maret 2013).

¹²⁵ Lihat "Sekilas Sampoerna," http://www.sampoerna.com/id_id/about_us/pages/sampoerna_overview.aspx (diakses pada 23 Maret 2013); dan "Kesampingan Pelinting Rokok, Sampoerna Dianggap Melanggar," *jpnn.com*, Jumat, 23 November 2012, 19:28:00.

¹²⁶ Lihat "Buruh Linting Bentoel Tuntut THR Naik," *kompas.com*, Sabtu, 13 Agustus 2011 | 14:01 WIB; dan "Bentoel Bangun 8 Proyek Baru," *surabaya.detik.com*, Jumat, 08/08/2008 13:01 WIB.

¹²⁷ Lihat "Industri Rokok Lamongan Serap 4.481 Tenaga Kerja," *surabaya.tribunnews.com*, Kamis, 6 Desember 2012 15:30 WIB.

¹²⁸ Lihat "Pabrik Rokok Sampoerna Serap 6.000 Pekerja," *beritajatim.com*, Selasa, 27 November 2012 13:14:15 WIB.

Pada 2010, industri rokok yang terdapat di Jawa Tengah – sebagian besar terkonsentrasi di Kudus – mampu menyerap sebanyak 113.323 orang pekerja.¹²⁹ Perkembangan berikutnya, pada 25 Februari 2011, Lingkungan Industri Kecil – Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) diresmikan, sehingga kawasan ini diperkirakan dapat menyerap 1.100 orang sebagai pekerja.¹³⁰ Dengan penduduk Kabupaten Kudus yang berjumlah sekitar 750.000 orang, namun sebanyak 110.000 orang di antaranya bekerja di sektor industri rokok.¹³¹

Pabrik rokok terbesar di Kudus mempekerjakan sedikitnya 64.206 buruh di salah satu unit kerjanya,¹³² dengan total diperkirakan 75.000 pekerja.¹³³ Perusahaan lainnya yang masih tergolong besar juga mempekerjakan lebih 7.000 buruh seiring ikut dalam memproduksi kretek yang ringan dan pusat distribusinya pindah dari Kudus ke Pulogadung, Jakarta.¹³⁴ Sebuah perusahaan yang mengambangkan status 3.400 buruhnya sejak 2008, ternyata masih aktif membeli pita cukai rokok di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Kudus untuk mempertahankan pabriknya.¹³⁵ Sedangkan di Yogyakarta terdapat tiga pabrik di Dusun Jati, Jejeran, Pleret, Kabupaten Bantul. Pabrik-pabrik ini diresmikan pada 2010 dan sudah menyerap sebanyak 4.061 pekerja.¹³⁶

3.5. Produksi, Pasar Domestik dan Ekspor

Industri rokok, khususnya *kretek*, memiliki sejarah yang panjang dalam meraih tempat yang lebih signifikan sekarang ini dibandingkan industri lainnya di Indonesia. Berapa banyak modal yang sudah ditanamkan sepanjang lintasan sejarahnya dan mengecap laba dari produk-poduknya, serta berapa pula yang ditanamkan kembali untuk perluasannya, selain berbagai perusahaan yang timbul dan tenggelam. Menghitung berapa jumlah yang sudah ditanamkan seluruhnya, pastilah sulit, karena tidak ada data yang cukup untuk merepresentasi seluruh jumlahnya. Kendati demikian, AMTI coba memperkirakan besarnya secara nominal hanya pada 2010 saja di mana terdapat 3.000 perusahaan yang memproduksi *kretek* dengan investasi mencapai Rp 250 triliun, dengan melibatkan sedikitnya 600.000 pekerja.¹³⁷

¹²⁹ Lihat “Industri Rokok Berperan Penting di Perekonomian IHT Jateng Serap 113.000 Pekerja,” *joglosemar.co*, Rabu, 28 April 2010 09:00 WIB. Usaha industri rokok di Jateng tersebar di 34 kabupaten/kota, kecuali Kota Tegal dan Kabupaten Wonogiri.

¹³⁰ Lihat “LIK Bisa Serap 1.100 Tenaga Kerja,” *kompas.com*, Sabtu, 26 Februari 2011 | 04:26 WIB.

¹³¹ Lihat “Tarik Ulur Komoditi ‘Emas Hijau’,” *Suara Merdeka*, 26 Desember 2011. Bila diandaikan masing-masing pekerja menanggung dua orang, maka terdapat 330.000 orang yang bergantung di industri rokok.

¹³² Lihat “64.206 Buruh PT Djarum Terima THR,” *Suara Merdeka*, Kamis, 18 Agustus 2011. Lihat juga, “67.046 Buruh Rokok Djarum Kudus Terima THR Rp45 Miliar,” *antaranews.com*, Rabu, 17 September 2008 18:15 WIB. Unit kerja perusahaan ini tersebar di 76 lokasi, dengan pembagian 70 lokasi di Kudus, 3 lokasi di Pati, 1 lokasi di Rembang, dan 2 lokasi di Jepara. Perusahaan ini memberikan kesempatan pada masyarakat utamanya dalam penyediaan lapangan kerja. Mereka yang bekerja sebanyak 74.920 pekerja (Januari 2007), hampir 90 persen pekerja berasal dari Kudus.

¹³³ Lihat “Djarum,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Djarum> (diakses pada 26 Maret 2013).

¹³⁴ Lihat “Lompatan Kuantum Sang Superstar Baru Industri Rokok,” <http://202.59.162.82/swamajalah/sajian/details.php?cid=1&id=4552&pageNum=17>, Kamis, 29 Juni 2006 (diakses pada 24 Maret 2013).

¹³⁵ Lihat “Buruh Jambu Bol Kudus Menuntut THR,” *kompas.com*, Kamis, 11 Agustus 2011 | 20:59 WIB.

¹³⁶ Lihat “3 Pabrik Rokok Serap 4.061 Tenaker,” *harianjogja.com*, Rabu, 21 Juli 2010 14:15 WIB. Keberadaan pabrik ini juga berkontribusi terhadap pembayaran pajak cukai lebih dari Rp 302 miliar pada semester pertama 2010, atau naik sebesar 7,26 persen dibanding periode sama tahun 2009.

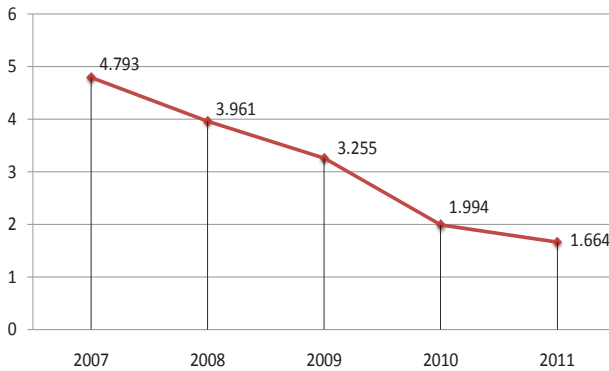
¹³⁷ Lihat “Mayoritas Penduduk Amerika Serap Rokok Kretek Indonesia,” *republika.co.id*, Senin, 18 Oktober 2010, 03:47 WIB.

Dalam setiap produksi komoditas, produk-produknya pasti digelindingkan ke pasar baik lokal dan nasional maupun pasar ekspor, demi memperluas laba dan menginvestasikan lagi. Sifatnya mengarah pada produksi komoditas yang disemestakan (*generalized commodity production*). Ketika bahan-bahan baku – rajangan tembakau dan cengkeh sebagai produk pertanian (perkebunan) – ditambah saus dan kertas atau daun pembalut menyatu dalam proses produksi, batangan-batangan rokok *kretek* pun berubah menjadi produknya yang kemudian dibungkus dan di-*packing* untuk dialirkan ke berbagai distributor dan pedagang pengecer untuk dikonsumsi. Jumlah produksi mendesak pangsa pasar bagi perusahaan-perusahaan industri rokok.

3.5.1. Jumlah produksi rokok

Produksi rokok bersumber dari perusahaan-perusahaan industri rokok. Pada 2007, Ditjen Bea Cukai mencatat sebanyak hampir 5.000 perusahaan yang ambil bagian dalam produksi rokok. Sepanjang periode 2007-2011, kecenderungan yang terjadi adalah merosotnya jumlah perusahaan, karena dari tahun ke tahun, sebanyak ratusan perusahaan industri rokok berguguran sebagaimana yang ditunjukkan dalam **grafik 3.7**. Tahun 2008, sebanyak 832 perusahaan lenyap, sehingga tersisa 3.961 perusahaan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan paling drastik terjadi pada 2010, karena sebanyak 1.261 perusahaan tidak beroperasi. Pada 2011, tinggal 1.664 perusahaan lagi yang memproduksi rokok.

Grafik 3.7 | Jumlah Perusahaan 2007-2011

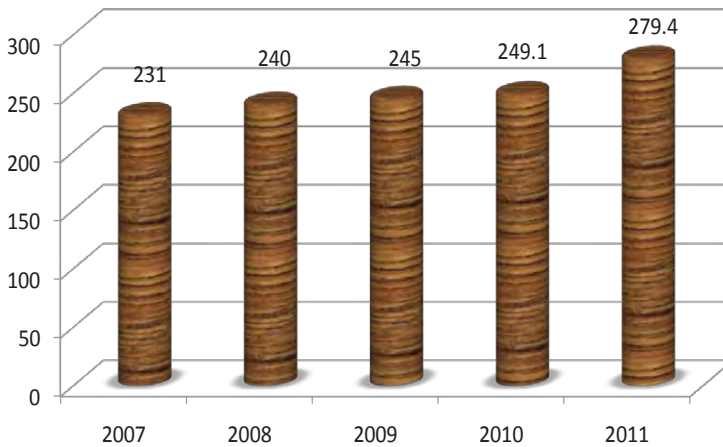


Sumber: Ditjen Bea Cukai

Namun demikian, kehancuran atau merosotnya jumlah perusahaan industri rokok sampai lebih 1.000 perusahaan, ternyata tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi rokok. Sebaliknya justru jumlah produksi rokok cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2007-2011 (lihat **grafik 3.8**). Dalam lima tahun ini jumlah produksi rokok telah bertambah dari 231 miliar batang (2007) menjadi 279,4 miliar batang (2011), yang berarti bertambah sebanyak 48,4 miliar batang. Lonjakan yang paling tinggi dicapai pada 2011 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa perusahaan besar kelihatannya memegang peranan penting dalam kontribusinya atas jumlah produksi rokok selama lima tahun itu. Dengan demikian, bertambahnya produksi – pada

saat yang bersamaan ditunjukkan dengan merosotnya jumlah perusahaan – penerimaan negara dari setoran cukai cenderung meningkat.

Grafik 3.8 | Jumlah Produksi Rokok 2007-2011 (miliar batang)



Sumber: Ditjen Bea Cukai

Kendati jumlah produksi rokok terus mengalami peningkatan selama 2007-2011 tanpa terpengaruh atas merosotnya jumlah perusahaan rokok, namun tidaklah ditunjukkan dengan peningkatan nilai produksi yang beriringan dalam periode 2006-2010 atas tiga jenis rokok, yaitu *kretek*, rokok putih dan rokok lainnya (lihat **tabel 3.26**). Ketika jumlah nilai produksi rokok *kretek* mengalami peningkatan selama 2006-2008, namun pada periode yang sama, rokok putih justru mengalami penurunan nilainya. Sebaliknya kemudian, ketika nilai produksi *kretek* menurun, nilai produksi rokok putih justru meningkat. Sedangkan nilai produksi rokok lainnya mengalami peningkatan penting pada 2009.

Tabel 3.26 Perkembangan Nilai Produksi Rokok 2006-2010 (ribu rupiah)				
No	Tahun	Rokok Kretek	Rokok Putih	Rokok Lainnya
1	2006	57.326.813.726	7.856.124.030	149.550.690
2	2007	73.366.697.670	3.644.523.297	60.245.393
3	2008	99.344.152.041	2.711.562.648	192.435.355

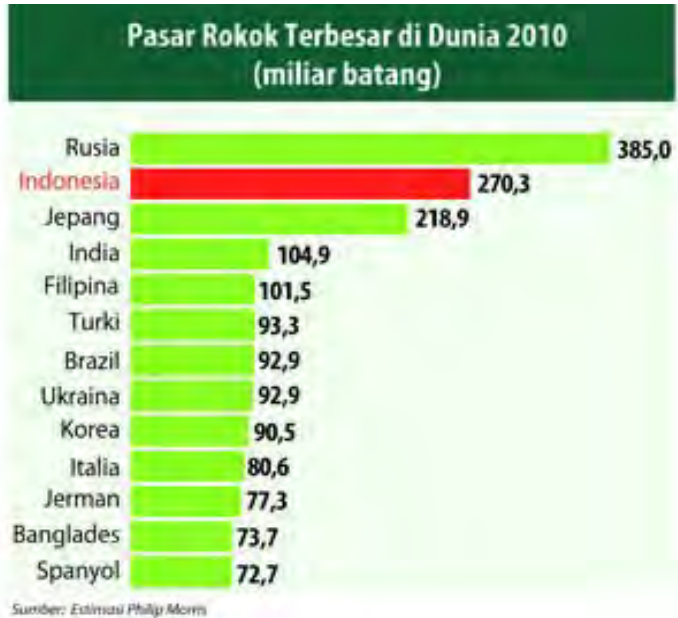
Tabel 3.26 Perkembangan Nilai Produksi Rokok 2006-2010 (ribu rupiah)				
No	Tahun	Rokok Kretek	Rokok Putih	Rokok Lainnya
4	2009	93.027.552.924	5.205.085.797	418.781.076
5	2010	91.525.580.899	3.504.329.312	345.494.390
Tren		12,45%	-11,82%	43,53%
Sumber: Kementerian Perindustrian RI (http://www.kemperin.go.id/statistik/lbs_indikator.php?indikator=2)				

Dengan kenaikan tarif cukai 15 persen pada 2012, pemerintah memproyeksikan jumlah produksi rokok secara nasional sebanyak 268,7 miliar batang. Jumlah produksi terbanyak diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi jenis sigaret kretek mesin (SKM), dengan jumlah sebanyak 155,5 miliar batang. Paling sedikit adalah sigaret kretek tangan (SKT) golongan III yang diturunkan menjadi 300 juta batang. SKT juga paling rendah dikenakan tarif cukai, hanya Rp 164 per batang (lihat **tabel 3.27**). Dengan menaikkan tarif cukai ini pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 72 triliun pada 2012.¹³⁸

Tabel 3.27 Proyeksi Produksi 2012				
No	Jenis Produksi	Jumlah Produksi	Setoran Cukai	Tarif Cukai
1	Sigaret kretek mesin (SKM)	155,5 miliar batang	Rp 48,67 triliun	Rp 313 per batang
2	Sigaret kretek tangan (SKT)	96,4 miliar batang	Rp 15,80 triliun	Rp 164 per batang
3	Sigaret putih mesin (SPM)	16,5 miliar batang	Rp 4,56 triliun	Rp 277 per batang
Jumlah		268,4 miliar batang	Rp 69,03 triliun	
Sumber: dikutip dan diolah dari tempo.co, Senin, 21 November 2011 19:02 WIB				

Selain itu, tidak dapat disangkal, rokok termasuk komoditas yang banyak dikonsumsi orang di dunia. Berdasarkan data estimasi yang bersumber dari perusahaan rokok raksasa dunia, Philip Morris, pasar rokok terbesar 2010 berada di negeri Rusia yang berjumlah 385 miliar batang. Indonesia dinyatakan berada pada tempat kedua, dengan serapan pasar yang mencapai 270,3 miliar batang rokok. Peringkat ketiga adalah pasar Jepang, serta berikutnya disusul India dan Filipina (lihat **grafik 3.9**). Namun, pasar rokok ini tidak memasukkan China yang menempati pasar paling besar di dunia.

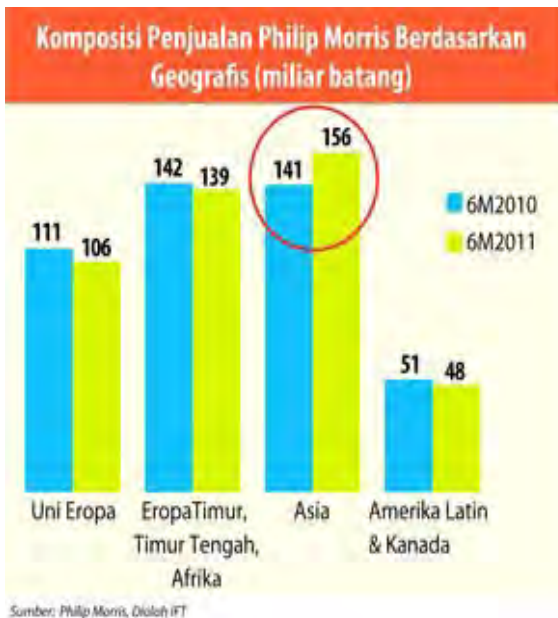
¹³⁸ Lihat "Cukai Rokok Naik 15 Persen," *tempo.co*, Senin, 21 November 2011 | 19:02 WIB; dan "Cukai Rokok Naik 16% Tahun Depan," *viva.co.id*, Jumat, 25 November 2011, 19:30.

Grafik 3.9 | Pasar Rokok Terbesar di Dunia 2010

Berapa banyak rokok yang dipasarkan Phillip Morris International Inc? Perusahaan ini memasarkan rokok sebanyak 445 miliar batang pada 2010. Sedangkan tahun 2011, meningkat menjadi 452 miliar batang. **Grafik 3.10** menunjukkan, sasaran pasar perusahaan ini tertuju pada Asia sebagai pasar di urutan tertinggi, yaitu 141 miliar batang pada 2010 dan 156 miliar batang pada 2011. Penjualan ini kelihatannya belum termasuk yang dipasarkan di Indonesia, karena – sebagai pemilik PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) – Philip Morris mencatat kenaikan volume penjualan sebesar 16,4 persen menjadi 91,7 miliar batang di 2011 dibandingkan 78,8 miliar batang pada 2010.¹³⁹

¹³⁹ Lihat “Volume Penjualan Sampoerna Capai 91,7 Miliar Batang di 2011,” *indonesiaincancetoday.com*, Senin, 30 April 2012; dan “Inilah Para Jawara Bisnis Rokok,” *inilah.com*, Senin, 25 Juni 2012 | 08:32 WIB.

Grafik 3.10 | Komposisi Penjualan Philip Morris Berdasarkan Geografis



Indonesia merupakan salah satu negeri penghasil rokok terbesar sesudah AS. Berbeda dengan rokok yang diproduksi di AS, maka rokok produksi Indonesia lebih berciri *kretek* – rokok yang mengandung cengkeh. Rokok khas asal Indonesia ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, melainkan juga diekspor ke berbagai negeri. Namun, dengan peluncuran *road map*, produksi rokok di Indonesia segera dibatasi hanya sampai 260 miliar batang per tahun pada 2015.¹⁴⁰ Sejak 2004, jumlah produksi rokok sudah di atas 200 miliar batang dan tahun berikutnya terus mengalami kenaikan.¹⁴¹

3.5.2. Pangsa pasar domestik

Ketika muncul sebagai industri rokok – dengan produk khususnya *kretek* – pertama-tama yang dilakukan adalah melempar produknya ke pasar lokal di daerahnya sendiri. Ketika produksi meningkat, pasar produknya diperluas ke beberapa daerah dan seterusnya. Sejak dekade 2000-an, rokok *kretek* telah mendominasi pasar domestik. Beberapa dekade lalu, pangsa pasar rokok di Indonesia sempat didominasi rokok putih (non-*kretek*). Pada dekade 1950-an, rokok putih mendominasi dengan pangsa pasar sekitar 90 persen. Namun, rokok *kretek* bisa melesat sesudah krisis 1998. Bila sebelumnya, anggota Gappri hanya sekitar 800 pabrik, sesudah krisis rokok

¹⁴⁰ Lihat “Roadmap Cukai Rokok Disiapkan,” *finance.detik.com*, Jumat, 11 Juli 2008 10:16 WIB; “Produksi Rokok 2010 Dipangkas 5 Miliar Batang,” *finance.detik.com*, Jumat, 09 April 2010 14:49 WIB; “Inilah Roadmap Ditjen Bea Cukai hingga 2020,” *inilah.com*, Selasa, 26 Juni 2012 | 22:36 WIB.

¹⁴¹ Lihat “Dirjen: Produksi Rokok 2005 Meningkat,” *tempointeractive.com*, Jumat, 11 Februari 2005 | 18:20 WIB.

kretek tumbuh mencapai hampir 5 ribu pabrik dalam tiga tahun.¹⁴² Pada 2009, segmen rokok *kretek* memegang sekitar 93 persen dari pangsa pasar.¹⁴³

Namun demikian, pertumbuhan produksi rokok cenderung rendah karena disesuaikan dengan rencana pembatasan produksi jangka panjang. Diproyeksikan selama 2012, produksi rokok hanya berkisar 3-4 persen, sebelum dibatasi secara ketat dengan produksi 260 miliar batang di 2015.¹⁴⁴ Pembatasan produksi ini juga membangkitkan persaingan yang kian ketat di segmen SKM bagi sejumlah perusahaan yang memproduksi *kretek* ringan (*mild and slim*), terutama dengan munculnya produk-produk baru.¹⁴⁵ Konsumsi rokok bergeser dari *kretek* batang besar (SKT) ke rokok *kretek* batang kecil atau *mild* (SKM). Pergeseran ini menjadi tantangan yang berat bagi perusahaan-perusahaan yang masih memproduksi SKT.¹⁴⁶

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan produksi industri rokok skala menengah dan besar pada 2011 sebesar 9,22 persen. Peningkatan ini didorong oleh permintaan domestik yang tumbuh pada 2010.¹⁴⁷ Gappri memproyeksikan produksi rokok secara nasional hingga akhir 2011 mencapai 300 miliar batang. Proyeksi itu didasarkan pada perhitungan produksi rokok hingga Agustus 2011 yang telah mencapai 199,77 miliar batang. Namun, asumsi ini melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah 265 miliar batang.¹⁴⁸

Pertumbuhan produksi dan pangsa pasar rokok *kretek* memang mengalami peningkatan secara signifikan sesudah krisis 1998. Menurut pengamatan Bloomberg Institute, pangsa pasar rokok di Indonesia pada 2001, sudah didominasi *kretek*. Perusahaan yang memproduksi *Gudang Garam*, *Sampoerna* dan *Djarum* menikmati pangsa pasar dalam jumlah yang signifikan (lihat **gambar 3.5**). Ketiga perusahaan yang memproduksi *kretek* ini menguasai 72 persen pasar rokok, dengan *Gudang Garam* menguasai 34 persen.

¹⁴² Lihat "Jatuh-Bangunnya Industri Rokok Kretek Nasional," *swa.co.id*, Senin, 11 Februari 2013.

¹⁴³ Lihat "Ini Peluang Besar Rebut Pasar Kretek RI," *viva.co.id*, Rabu, 17 Juni 2009, 10:04; dan "Akuisisi Bentoel, BAT Incar Pasar Kretek Indonesia," *finance.detik.com*, Rabu, 17 Juni 2009 11:04 WIB.

¹⁴⁴ Lihat "Produksi Rokok Diproyeksi Tumbuh 4% di 2012," *indonesiainancetoday.com*, Jumat, 11 November 2011; dan "Wow, Setahun Indonesia Produksi 265 Miliar Batang Rokok!" *republika.co.id*, Senin, 03 Oktober 2011, 17:51 WIB.

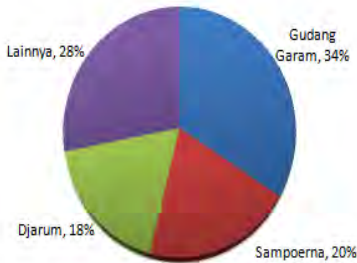
¹⁴⁵ Lihat "Persaingan Rokok Mild Semakin Ketat," *indonesiainancetoday.com*, Selasa, 03 April 2012.

¹⁴⁶ Lihat "Tantangan Jangka Panjang Industri Rokok Semakin Berat," *neraca.co.id*, Senin, 19 Desember 2011. Tahun 2008, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, jumlah perokok di Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Tahun 2010, konsumsi rokok Indonesia diperkirakan menembus angka 260 miliar batang.

¹⁴⁷ Lihat "Produksi Rokok Diproyeksi Capai 300 Miliar Batang," *indonesiainancetoday.com*, Kamis, 24 November 2011.

¹⁴⁸ Lihat "Produksi Rokok Diproyeksi Capai 300 Miliar Batang," *indonesiainancetoday.com*, Kamis, 24 11 2011.

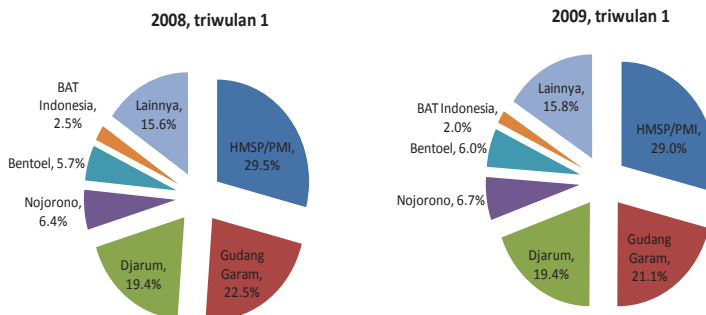
Gambar 3.5 | Pangsa Pasar Industri Rokok 2001



Sumber: Bloomberg

Selang tujuh tahun kemudian, pangsa pasar rokok tetap dikuasai tiga besar itu, namun kedudukan pertama rokok *Gudang Garam* telah diambil alih oleh *Sampoerna* seiring keberhasilannya dalam memproduksi *kretek* ringan. Dalam triwulan pertama 2008, ketiga rokok ini mengecap 71,4 persen pangsa pasar. *Kretek* lainnya yang mengikuti dalam jumlah yang lebih kecil adalah *Nojorono* dan *Bentoel*. Demikian pula pada triwulan pertama 2009, tiga besar tetap ditempati *Sampoerna*, *Gudang Garam* dan *Djarum*, dengan penurunan sedikit. Ketiganya tetap mendominasi pangsa pasar sebesar 69,5 persen (lihat **gambar 3.5**).

Gambar 3.6 | Pangsa Pasar Industri Rokok, 2008 dan 2009



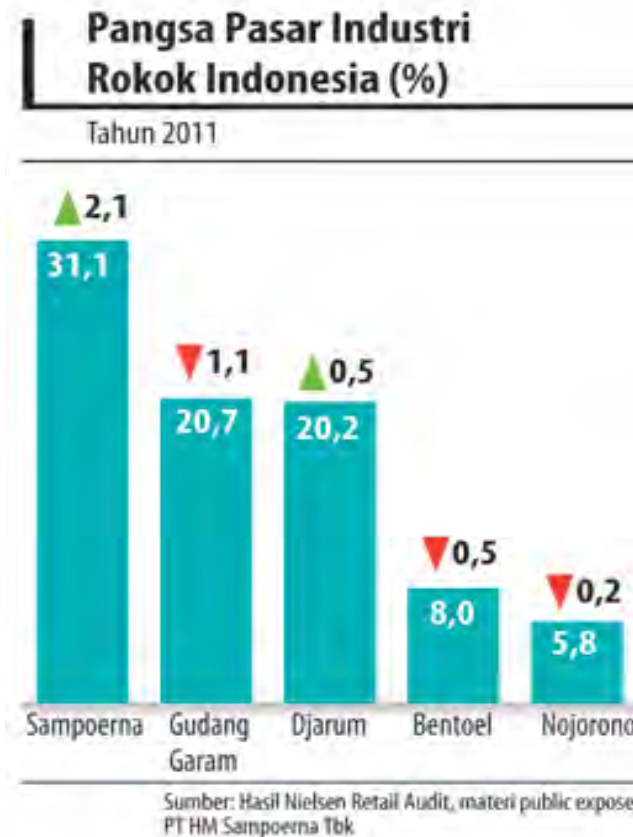
Sumber: Koran Neraca, 29 Juni 2009

Hasil riset yang disusun Nielsen Retail Audit menunjukkan ada lima perusahaan besar pada 2011 yang mendominasi pasar rokok dan masih dipuncaki *Sampoerna* dengan pertumbuhan penjualan sebesar 22 persen menjadi Rp 52,8 triliun dibandingkan tahun 2010.¹⁴⁹ Namun penguasaan

¹⁴⁹ Lihat “Penjualan 2011 Sampoerna Tumbuh Tertinggi Dibanding Pesaing,” *indonesiafinancetoday.com*, Kamis, 05 April 2012.

pangsa pasar *Nojorono* telah dilampaui oleh *Bentoel* sesudah diakuisisi BAT. Dari kelimanya, hanya dua perusahaan yang mengalami kenaikan, sedangkan tiga lainnya menurun (lihat **grafik 3.5**). Kelima perusahaan ini menguasai 85,8 persen pasar rokok di Indonesia yang sekaligus menunjukkan dominasi mereka atas pasar domestik.

Grafik 3.11 | Pangsa Pasar Industri Rokok Indonesia 2011



Dominasi perusahaan industri *kretek* raksasa atas pasar domestik, jelaslah membawa mereka untuk mengecap laba yang besar. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk menuai laba kotor pada 2010 sebanyak Rp 12,65 triliun dan pendapatan usaha senilai Rp 43,38 triliun atau meningkat 11 persen dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 38,97 triliun.¹⁵⁰ Tahun 2011, perusahaan ini membukukan laba bersih sebesar Rp 8,06 triliun atau meningkat 25,5 persen dibandingkan pada tahun 2010 yang meraup Rp 6,42 triliun. Perusahaan berhasil meraup pendapatan hingga Rp 31,96 triliun. Perusahaan ini memproduksi rokok hingga 91,7 miliar batang.¹⁵¹ Pada semester I

¹⁵⁰ Lihat “Dalam Satu Batang Rokok, Sampoerna Raup Untung 30%,” *duniaindustri.com*, Jumat, 15 April 2011 04:21.

¹⁵¹ Lihat “Jelang Seabad, Laba Sampoerna Mengepul Rp 8 T,” *viva.co.id*, Jumat, 27 April 2012, 17:51; “Sampoerna Bukukan Laba Bersih Rp8,06 Triliun,” *investor.co.id*, Jumat, 27 April 2012 | 13:37; “Raup Rp 8,06 Triliun, Laba

2012, perusahaan ini sudah meraih peningkatan laba 28,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp 4,8 triliun.¹⁵²

Pada 2009, perusahaan industri *kretek* PT Gudang Garam Tbk (GGRM) yang menduduki tempat kedua dalam pangsa pasar, menikmati laba bersih Rp 3,45 triliun atau naik 83,8 persen dibanding 2008 yang bernilai Rp 1,88 triliun.¹⁵³ Tahun 2010, laba bersihnya mencapai Rp 4,1 triliun, mengalami sebesar 18,8 persen.¹⁵⁴ Tahun 2011, laba bersih dinikmati sebesar Rp 4,89 triliun atau meningkat 18,03 persen.¹⁵⁵ Pada triwulan III 2012, laba bersihnya justru turun dari Rp 3,78 triliun menjadi Rp 3,006 triliun, padahal raihan mzet penjualan rokok mencapai Rp 35,59 triliun, atau naik dari periode sebelumnya Rp 30,56 triliun.¹⁵⁶ Penurunan laba ini sudah terjadi sejak semester I 2012.¹⁵⁷

Perusahaan rokok lainnya, PT Djarum Tbk memetik laba Rp 2,08 triliun pada 2008.¹⁵⁸ Perusahaan ini juga memiliki pabrik di Brasil, sehingga sekarang omsetnya dapat mencapai Rp.13 triliun per tahun.¹⁵⁹ Perusahaan rokok PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) membukukan perolehan laba bersih sebesar Rp 305,9 miliar pada 2011, atau meningkat 40 persen dibandingkan 2010 sebesar Rp 218,6 miliar.¹⁶⁰ Untuk menaikkan labanya, PT Wismilak Inti Makmur Tbk menargetkan penjualan pada 2013 mencapai Rp1,4 triliun atau meningkat 40 persen dibanding proyeksi penjualan tahun ini Rp 1 triliun.¹⁶¹ Perusahaan-perusahaan ini juga melakukan investasi di bidang-bidang bisnis lainnya.¹⁶²

Sampoerna Makin ‘Ngepul’,” *finance.detik.com*, Minggu, 18 Maret 2012 11:13 WIB; dan “Laba Bersih HM Sampoerna Tembus Rp 8 T,” *okezone.com*, Senin, 19 Maret 2012 10:09 wib. Peningkatan laba bersih ini seiring dengan meningkatnya penjualan bersih menjadi Rp 52,8 triliun yang tumbuh 21,8 persen dari tahun 2010 yang sebesar Rp 43,38 triliun. Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) PT HM Sampoerna juga sepakat untuk membagikan dividen sebesar Rp 7,67 triliun atau Rp 1.750 per saham. Bonus bagi para pemegang saham itu sudah termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 23 Desember 2011 sebesar Rp 200 per saham atau total Rp 876,6 miliar.

¹⁵² Lihat “Naik 28,6%, Laba HM Sampoerna Jadi Rp 4,8 Triliun,” *inilah.com*, Rabu, 1 Agustus 2012 | 22:22 WIB.

¹⁵³ Lihat “Gudang Garam Bukukan Laba Rp 3,4 Triliun,” *kompas.com*, Selasa, 30 Maret 2010 | 11:25 WIB. Peningkatan laba bersih ini dipicu oleh kenaikan penjualan perseroan sebesar 8 persen, dari Rp 30,25 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 32,97 triliun. Perusahaan ini juga mencatat laba usaha naik 64 persen, dari Rp 3,165 triliun untuk periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi Rp 5,206 triliun.

¹⁵⁴ Lihat “Laba Gudang Garam Naik 18,8 Persen,” *kompas.com*, Rabu, 30 Maret 2011 | 15:13 WIB.

¹⁵⁵ Lihat “Laba Gudang Garam mengepul ke Rp 4,9 triliun,” *kabarbisnis.com*, Minggu, 01 April 2012 | 13:48 wib.

¹⁵⁶ Lihat “Meski Rokok Laris, Laba Gudang Garam Turun 20,6%,” *finance.detik.com*, Selasa, 30 Oktober 2012 20:26 WIB; “Laba Gudang Garam Turun 20 Persen,” *surabaya.tribunnews.com*, Selasa, 30 Oktober 2012 22:19 WIB; “Laba Gudang Garam Turun 20% Jadi Rp3 Triliun,” *okezone.com*, Selasa, 30 Oktober 2012 13:51 wib; dan “Beban Gerogoti Laba Gudang Garam Jadi Rp 3 T,” *inilah.com*, Selasa, 30 Oktober 2012 | 14:20 WIB.

¹⁵⁷ Lihat “Laba Bersih Gudang Garam Turun 8,6 Persen,” *tempo.co*, Selasa, 31 Juli 2012 | 12:00 WIB.

¹⁵⁸ Agung Supriyadi, “Dua Sisi Investasi Sosial Perusahaan Rokok Djarum dan HM Sampoerna,” <http://recyclearea.wordpress.com/2009/07/16/26/> (diakses pada 26 Maret 2013).

¹⁵⁹ Lihat “Robert Budi Hartono,” <http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2267989-robert-budi-hartono/#ixzz2OgKdBsWQ> (diakses pada 26 Maret 2013).

¹⁶⁰ Lihat “Laba Bersih 2011 Bentoel Naik 40%,” *indonesiafinancetoday.com*, Rabu, 28 Maret 2012.

¹⁶¹ Lihat “Wismilak Targetkan Penjualan 2013 Tumbuh 40%,” *indonesiafinancetoday.com*, Selasa, 20 November 2012.

¹⁶² Lihat “Robert Budi Hartono,” *Op.cit.* Lihat juga, “Gudang Garam Miliki Maskapai,” *kompas.com*, Selasa, 15 Maret 2011 | 11:58 WIB; dan “Hartono Bersaudara Masih Orang Terkaya Indonesia,” *kompas.com*, Kamis, 24 November 2011 | 13:57 WIB.

3.5.3. Pasar ekspor rokok

Sesudah menguasai pasar domestik, produk industri pengolahan tembakau juga secara terus-menerus memperluas pasarnya ke luar negeri. Dalam perluasan pasar untuk ekspor ini ada tiga peran industri pengolahan tembakau yang dijalankan. Pertama, memperkuat daya saing sebagai industri yang kompetitif di tingkat global atau internasional. Salah satu faktor kompetitifnya adalah produk-produk industri pengolahan tembakau dilempar ke pasar dengan harga yang lebih murah. Kedua, implikasi ekspor adalah kontribusi positifnya bagi surplus neraca perdagangan luar negeri di sektornya. Devisa atau mata uang asing akan bertambah seiring transaksi ekspor yang dilakukan perusahaan-perusahaan industri pengolahan tembakau. Ketiga, bahan baku yang digunakan bersumber dari dalam negeri, sehingga berperan meniadakan atau mengurangi tarikan surplus keuntungan ke luar negeri.

Namun demikian, memperluas pasar terus-menerus tidaklah tanpa hambatan baik dengan sesama kompetitor maupun kebijakan pemerintah asing. Salah satunya adalah kebijakan proteksi sejumlah pemerintah di mana *kretek* yang dilempar ke pasar ekspor, diperkirakan bakal menderita kesulitan. Selain AS¹⁶³ dan Brazil¹⁶⁴ yang menetapkan larangan impor *kretek*, juga disusul pemerintah Australia yang mengeluarkan kebijakan Plain Tobacco Packaging.¹⁶⁵ Disusul lagi dengan bakal direalisasikan kebijakan pemerintah Selandia Baru yang melarang masuknya *kretek*.¹⁶⁶

Selain penghasil rokok *kretek* terbesar di dunia – sebagaimana sudah dikemukakan – industri rokok Indonesia juga merupakan industri yang kompetitif, sehingga menjadi salah satu komoditas yang ditujukan untuk ekspor. Bahkan, menurut AMTI, realitas dalam lapisan konsumen rokok di AS justru sebanyak 99 persen mereka menyerap produk rokok *kretek* dari Indonesia, karena mereka kualitas komoditas *kretek* ini dinilai baik.¹⁶⁷ Dengan pentingnya posisi AS untuk menyerap rokok dari Indonesia, maka Gappri berharap supaya kran impor AS dapat dibuka kembali.¹⁶⁸

Pada akhir 2010, Kementerian Perdagangan mengungkapkan, nilai ekspor produk industri rokok Indonesia mencapai 400 juta dollar AS atau Rp 3,6 triliun. Tahun 2011, diprediksi nilai eksportnya sama dengan 2010. Dari total nilai ekspor ini, paling banyak ditujukan ke Kamboja dengan nilainya lebih dari 150 juta dollar AS per tahun. Total ekspor rokok selama Januari-September 2010 sudah tembus 357,05 juta dollar atau naik 25,8 persen dari periode yang sama tahun 2009 yang mencapai 283,75 juta dollar AS. Sedangkan total ekspor rokok di tahun 2009 menembus nilai

¹⁶³ Lihat “Larangan Impor Rokok AS Rugikan Devisa USD 6,5 Juta,” *surabayapagi.com*, Selasa, 29 Juni 2010 | 01:30 WIB; “Amerika Melarang Rokok Kretek, Indonesia Banning,” *tempo.co*, Senin, 12 September 2011 | 11:13 WIB; “WTO Kembali Menangkan Kasus Rokok Kretek Indonesia,” *kompas.com*, Jumat, 6 April 2012 | 17:20 WIB; dan “Rokok Kretek Indonesia Kalahkan Amerika,” *banjarmasin.tribunnews.com*, Sabtu, 7 April 2012 20:39 wita.

¹⁶⁴ Lihat “Giliran Brazil Ancam Rokok Indonesia,” *solopos.com*, Kamis, 12 April 2012 18:11 WIB; dan “Brasil Bersiap Larang Rokok Kretek, Indonesia Terancam,” *bisnis.com*, Kamis, 12 April 2012 | 15:36 WIB.

¹⁶⁵ Lihat “Indonesia Kian Sulit Ekspor Rokok Kretek,” *republika.co.id*, Minggu, 29 April 2012, 15:11 WIB.

¹⁶⁶ Lihat “Selandia Baru Akan Larang Rokok Kretek Indonesia,” *indonesiainfancetoday.com*, Rabu, 25 April 2012; dan “Setelah AS, Giliran Selandia Baru Boikot Rokok RI,” *neraca.co.id*, Rabu, 25 April 2012.

¹⁶⁷ Lihat “Mayoritas Penduduk Amerika Serap Rokok Kretek Indonesia,” *palembang.tribunnews.com*, Minggu, 17 Oktober 2010 18:07 WIB; dan “Mayoritas Penduduk Amerika Serap Rokok Kretek Indonesia,” *republika.co.id*, Minggu, Senin, 18 Oktober 2010, 03:47 WIB.

¹⁶⁸ Lihat “Produsen Berharap AS Buka Kembali Pasar Rokok Kretek,” *antaranews.com*, Kamis, 5 April 2012 11:53 WIB.

sebesar 410,49 juta dollar AS.¹⁶⁹ Gapri memperkirakan, ekspor rokok keretek Indonesia mencapai US\$ 500 juta atau sekitar Rp 4,26 triliun setahun.¹⁷⁰ Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian menjelaskan, nilai ekspor rokok pada kuartal I 2011 meningkat 2,6 persen menjadi 168,5 juta dollar AS dibandingkan periode yang sama 2010. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan volume ekspor dan harga jual rokok.¹⁷¹

Industri rokok tidak hanya memproduksi *kretek*, namun juga rokok putih, cerutu, dan jenis rokok lainnya. Produk-produk sigaret selain *kretek* (HS 2402209090) ini mempunyai pasar ekspor ke banyak negeri seperti Kamboja, Thailand, Turki, Malaysia, Singapura, Jepang, serta beberapa negeri di Timur Tengah. Tahun 2007, negeri tujuan ekspor selain *kretek* paling banyak ke Kamboja, namun dari nilainya justru berbeda. Di antaranya, ekspor ke Turki sebanyak 6.578.739.000 batang (17,4 persen) dibanding Malaysia yang hanya 2.934.734.000 batang (7,8 persen), namun nilai ekspor ke Malaysia justru lebih tinggi yang mencapai 24.918.773 dollar AS (13,4 persen) dibanding Thailand sebesar 24.407.566 dollar (13,1 persen). Bahkan nilai ekspor ke Singapura lebih tinggi lagi, yakni 30.394.854 dollar AS atau 16,3 persen total nilai ekspor (lihat **tabel 3.28**). Lima besar penerima ekspor rokok selain *kretek* menyumbangkan nilai devisa sebesar 171.531.241 dollar AS atau 92 persen total.

Tabel 3.28 Ekspor Rokok selain Kretek Menurut Kuantitas dan Nilainya 2007						
Negeri	Jumlah (ribu batang)	%	% Kumulatif terbesar ke	Nilai (US\$)	%	% Kumulatif terbesar ke
Kamboja	21.499.614	56,9	tiga terbesar: 82,8	79.355.145	42,6	tiga terbesar: 62,3
Thailand	6.578.739	17,4		24.407.566	13,1	
Turki	3.182.804	8,4		12.428.790	6,7	
Malaysia	2.934.734	7,8	lima terbesar: 96,0	24.918.773	13,4	lima terbesar: 92,0
Singapura	2.063.321	5,5		30.394.854	16,3	
Vietnam	525.386	1,4	sepuluh terbesar: 99,6	6.866.082	3,7	sepuluh terbesar: 99,5
Jordania	373.464	1,0		1.428.840	0,8	
Filipina	195.564	0,5		2.912.350	1,6	
Uni Emirat Arab	146.584	0,4		555.888	0,3	
Jepang	90.271	0,2		2.231.756	1,2	
Lainnya	167.003	0,4		946.968	0,5	
Jumlah	37.757.484			186.447.012		
Sumber: BPS. 2008. Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor&Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor 2007						

Berdasarkan data yang dikeluarkan Pusdatin, nilai ekspor atas beberapa jenis rokok cenderung meningkat selama 2008-2011. Jenis rokok lain yang mengandung tembakau (*other cigarettes containing tobacco*) menunjukkan peningkatan yang berlanjut dari tahun ke tahun bukan saja

¹⁶⁹ Lihat “Ekspor Rokok RI Capai Rp 3,6 Triliun, Paling Besar ke Kamboja,” *finance.detik.com*, Kamis, 16 Desember 2010 14:14 WIB; dan “Jika Ditabung 10 Tahun, Sumbangan Industri Rokok Bisa Buat Bayar Utang Negara,” *finance.detik.com*, Kamis, 16 Desember 2010 12:26 WIB.

¹⁷⁰ “Setelah AS, Giliran Selandia Baru Boikot Rokok RI,” *neraca.co.id*, Rabu, 25 April 2012.

¹⁷¹ Lihat “Ekspor Rokok Naik 2,6% di Kuartal I,” *indonesiainfancetoday.com*, Senin, 16 Mei 2011.

nilainya, namun juga volume ekspornya. Hanya jenis *cigarettes tobacco* saja yang berfluktuasi, dengan nilai terendah 77.528.000 dollar AS pada 2009 dan yang tertinggi 94.083.000 dollar AS pada 2008 (lihat **tabel 3.29**). Dari segi harga rokok, juga mengalami peningkatan sebagaimana tercermin dari nilainya yang melonjak kendati volume ekspornya justru lebih sedikit atau turun. Rokok *kretek* kian meningkat permintaan ekspor. Selain itu, juga diminati konsumen di Belanda, dengan transaksi impornya sampai Juni 2010, mencapai 312.000 batang atau 6,814 juta dollar AS.¹⁷²

Tabel 3.29 | Perkembangan Ekspor Rokok Tahun 2008-2011

No	Uraian Rokok	2008		2009		2010		2011	
		Volume (ton)	Nilai (ribu US\$)	Volume (ton)	Nilai (ribu US\$)	Volume (ton)	Nilai (ribu US\$)	Volume (ton)	Nilai (ribu US\$)
1	Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco	2.557	22.003	2.138	27.824	2.390	30.674	2.351	36.356
2	Cigarettes tobacco	10.512	94.083	7.102	77.528	8.164	91.537	6.882	89.063
3	Other cigarettes containing tobacco	42.503	223.000	45.225	286.099	46.637	333.411	48.797	418.538

Sumber: Pusdatin

Sejauh ini kesulitan yang dialami perusahaan industri rokok berupaya didobrak dengan terus melakukan ekspor. Produk rokok *Gudang Garam* yang diekspor memang menurun pada 2011 dengan beberapa kebijakan proteksi dan larangan impor – dengan memperluasnya ekspor ke Malaysia, Arab Saudi dan sejumlah negara Timur Tengah, menyusul kemudian Jepang, Belanda dan Swiss – ternyata masih berada di atas 6 miliar batang.¹⁷³ Rokok Sampoerna lebih mengutamakan pasar domestik, sehingga ekspornya masih sangat kecil.¹⁷⁴

Sebaliknya, lonjakan ekspor rokok dicatatkan pula oleh perusahaan-perusahaan di Kudus selama 2012. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus menginformasikan, nilai ekspor rokok dari daerahnya mencapai 61,25 juta dollar AS atau naik 24,34 persen dibanding nilai ekspor tahun sebelumnya yang hanya 49,26 juta dollar (lihat **tabel 3.30**). Lonjakan lebih besar dicatatkan pada 2011 dibanding tahun sebelumnya,¹⁷⁵ menembus 200 persen.¹⁷⁶ KPPBC

¹⁷² Lihat “Ekspor Rokok ke Belanda Terus Naik,” *inilah.com*, Senin, 28 Juni 2010 | 17:09 WIB.

¹⁷³ Lihat “Ekspor Rokok Kretek PT GG Jadi 6,1 Miliar Batang,” *tribunnews.com*, Rabu, 27 Juni 2012 17:47 WIB. Ekspornya berkurang 300 juta batang dibanding tahun 2010, dengan realisasinya mencapai 6,1 miliar batang pada 2011. PT GG memproduksi 41,884 miliar batang rokok dengan nilai cukai dan PPN mencapai Rp 22,3 triliun. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2010 dengan produksi 37,78 miliar batang rokok dengan nilai cukai dan PPN sebesar Rp 20,78 triliun.

¹⁷⁴ “Sampoerna Bukukan Laba Bersih Rp8,06 Triliun,” *investor.co.id*, Jumat, 27 April 2012 | 13:37.

¹⁷⁵ Lihat “Ekspor Rokok Kudus Tumbuh 24,34% Selama 2012,” *bisnis-jateng.com*, Minggu, 24 Februari 2013.

¹⁷⁶ Lihat “Ekspor Rokok Kudus Melonjak 200% Lebih,” *suaramerdeka.com*, Selasa, 20 Maret 2012. Nilai ekspor rokok mencapai 49,262 juta dollar AS pada 2011 atau melonjak 200 persen ketimbang tahun sebelumnya yang bernilai 16,464 juta dollar AS, dengan tujuan ke 40 negeri. Malaysia merupakan negeri tujuan ekspor terbesar

Tipe Madya Kudus mencatat, nilai ekspor rokok dari sejumlah perusahaan rokok di wilayahnya selama Januari-Februari 2012 mencapai Rp 219,3 miliar, dengan tujuan ekspor ke Malaysia dan AS.¹⁷⁷

Tabel 3.30 Ekspor Rokok Kudus 2007-2012			
No	Tahun	Nilai (US\$)	% naik/ turun
1	2007	15,83 juta	-
2	2008	15,39 juta	- 2,78
3	2009	14,67 juta	- 4,68
4	2010	16,46 juta	12,20
5	2011	49,26 juta	199,27
6	2012	61,25 juta	24,34

Sumber: dikutip dari bisnis-jateng.com, Minggu, 24 Februari 2013

Ekspor rokok tidak hanya berasal dari beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah saja, namun juga dari Sumatera Utara (Sumut). Sampai sekarang, komoditas rokok putih produksi di Sumut masih tetap menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir, sebagaimana yang diekspor melalui terminal peti kemas Belawan International Container Terminal (BICT). Tahun 2011, volume ekspor rokok putih mencapai 51.635 ton, naik 16,81 persen dibanding tahun 2010 yang berjumlah 44.201 ton. Tahun 2012, sampai Agustus sudah mencapai volume ekspor 36.350 ton, naik 5 persen dalam periode yang sama tahun 2011.¹⁷⁸

3.5.4. Investor asing mengakuisasi

Sejarah panjang sejak Hindia Belanda sebagai industri pengolahan tembakau yang mandiri dan kompetitif, menggunakan bahan baku lokal, dengan volume produksi yang terus meningkat, perluasan terus-menerus pasar domestik yang besar dan sebagian diekspor, maka tak terbantahkan bila rokok *kretek* adalah komoditas yang sangat menguntungkan. Perusahaan-perusahaan rokok *kretek* yang tumbuh, mekar dan membesar di Jawa menjadi incaran para investor besar yang berkepentingan melakukan investasi dalam industri rokok *kretek*, tidak terkecuali raksasa dari AS dan Korea Selatan.

Motif setiap pengusaha adalah mengeruk untung. Maka, raksasa asing adalah yang paling berkepentingan menjajal kekuatannya untuk meraup untung di Indonesia. Dimulai dengan PT Philip Morris Indonesia yang memproduksi rokok *Marlboro*, disusul oleh British American

dengan nilai 17,591 juta dollar AS. Selanjutnya disusul Singapura dan AS masing-masing 12,901 juta dollar dan 8,875 juta dollar AS.

¹⁷⁷ Lihat "Ekspor Rokok di Kudus Capai Rp 219,3 Miliar," *suaramerdeka.com*, 16 Maret 2012 | 07:15 wib. Pada Januari nilai ekspornya mencapai Rp 95.380.688.000 atau setara dengan 5.071.584 dollar AS, sedangkan nilai ekspor rokok mencapai Rp 123.932.968.015 atau setara dengan 6.269.740 dollar AS. Namun, jenis rokok yang banyak diekspor ke AS adalah cerutu.

¹⁷⁸ Lihat "Ekspor Rokok Sumut Masih Eksis," *bumn.go.id*, Selasa, 25 September 2012.

Tobacco (BAT) Indonesia dengan produk andalannya *Dunhill*, dan belakangan rakasasa Korea Selatan KT & G pun mengikutinya. Tiga perusahaan rokok – PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT Bentoel Internasional Investama Tbk, dan PT Trisakti Purwosari Makmur – ditelan oleh tiga perusahaan asing tersebut.

Philip Morris International Inc, perusahaan rokok terbesar dunia yang memiliki banyak anak perusahaan – lewat anak perusahaannya di Indonesia, PT Philip Morris Indonesia – sudah mengambil alih 40 persen saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dengan harga persaham Rp 10.600 pada 12 Maret 2005. Setelah proses akuisisi saham selesai, Philip Morris juga melakukan penawaran tender untuk memiliki seluruh sisa saham dengan harga yang sama per saham, yang diselesaikan dalam tempo sekitar 90 hari.¹⁷⁹ Transaksi pembelian saham ini mencapai 5,2 miliar dollar AS atau Rp 48 triliun yang sudah mencakup utang bersih Rp 1,5 triliun.¹⁸⁰

Empat tahun kemudian, giliran BAT yang secara resmi mengambil alih 85% saham pengendali di perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia, PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), dari PT Rajawali Corpora dan para pemegang saham lainnya dengan harga 494 juta dollar AS. Harga ini setara dengan Rp 873 per saham, premi sebesar 20 persen di atas harga penutupan Bentoel sebesar Rp 730 per saham pada 15 Juni 2009. Dengan asumsi bahwa semua saham dapat dibeli dalam proses penawaran tender, maka transaksi secara keseluruhan, mencakup 100 persen saham Bentoel, dengan perkiraan harga keseluruhan sebesar 580 juta dollar AS.¹⁸¹

Pergerakan perusahaan rokok asing di lantai bursa saham juga ditunjukkan oleh perusahaan Korea Selatan, KT & G. Perusahaan ini membeli saham 60 persen, dengan nilai 140 miliar won atau setara Rp 1,12 triliun dari perusahaan tembakau terbesar keenam di Indonesia, PT Trisakti Purwosari Makmur (TPM), pada 21 Juni 2011. TPM sudah memproduksi sampai 3 miliar batang pada 2010. Dengan pembelian ini KT & G tidak hanya mengincar pasar domestik, namun juga melemparkan produknya ke pasar Asia Tenggara.¹⁸²

¹⁷⁹ Lihat “Philip Morris Indonesia Akuisisi HM Sampoerna,” *tempointeractive.com*, ” Senin, 14 Maret 2005 | 11:51 WIB. Akuisisi dilakukan untuk investasi strategis dan mengembangkan *brand equity* dari produk-produk HM Sampoerna yang sudah ada.

¹⁸⁰ Lihat “Untuk Akuisisi HM Sampoerna, Philips Morris Bayar Rp 48 T,” *finance.detik.com*, Senin, 14 Maret 2005 15:54 WIB.

¹⁸¹ Lihat “Akuisisi Bentoel, BAT Incar Pasar Kretek Indonesia,” *finance.detik.com*, Rabu, 17 Juni 2009 11:04 WIB. Bagi BAT, akuisisi ini menempatkan posisinya yang cukup strategis untuk mengambil pangsa pasar rokok kretek di Indonesia yang dinilai cukup menggiurkan. Kesempatan strategis ini untuk memasuki pasar kretek Indonesia yang sangat luas dan sedang berkembang dan akan menjadi landasan untuk pertumbuhan di masa yang akan datang.

¹⁸² Lihat “Korsel Beli Perusahaan Rokok Indonesia,” *liputan6.com*, Kamis, 21 Juli 2011 11:43. TPM adalah perusahaan rokok yang didirikan pada 1 Maret 1974 di Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur. Pertama kali yang diproduksi adalah sigaret kretek tangan dengan merek *Apokat* dan *Kacang Bayi*. Kini, TPM memproduksi sejumlah merek antara lain *Master Mild*, *Win Mild*, *Lintang Enam*, *Bheta*, dan *Pencil Mas International*.

Tabel 3.31 | Perusahaan Rokok Indonesia Diakuisisi Asing

No	Perusahaan	Kode Emiten	Keterangan	Tahun	Keuntungan bagi Pengakuisisi	Kepemilikan oleh Pengakuisisi (%)
1	HM Sampoerna	HMSP	Dijual oleh Sampoerna kepada Philip Morris Indonesia	2005	Philip Morris Indonesia menguasai 29,5 persen pangsa pasar tahun 2011	97,95
2	Bentoel Internasional	RMBA	Dijual oleh Rajawali kepada British American Tobacco (BAT). BAT membeli Bentoel dan menggabungkan dengan BAT Indonesia	2009	BAT menguasai 9 persen pangsa pasar rokok Indonesia di tahun 2009	99,14
3	Trisakti Purwosari Makmur	NA	Dijual kepada KT&G Corp	2011	KT&G penetrasi ke pasar rokok kretek, dan nilai penjualan Rp 5 miliar, sekitar 0,3 persen dari nilai penjualan rokok di Indonesia pada 2010	60,00

Sumber: Berbagai sumber, laporan keuangan HM Sampoerna, Bentoel Internasional, diolah IFT

Akuisisi atau mengambilalih saham mayoritas tiga perusahaan rokok *kretek* itu membangkitkan sejumlah komentar. Ketika PT Philip Morris Indonesia menguasai saham PT HM Sampoerna Tbk, maka PT BAT Indonesia – yang memproduksi *Dunhill*, *Lucky Strike*, *Ardath*, *Commfil* dan *Kansas*, serta menguasai pangsa pasar rokok putih sebesar 30 persen yang sekaligus rivalnya dalam memperebutkan setiap jengkal pasar rokok dunia dan Indonesia – memandang akuisisi ini bukan sebagai ancaman dan tidak akan mengubah peta bisnis. Akuisisi ini hanya mengganti kepemilikan. Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian menilai, akuisisi ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.¹⁸³ Sebaliknya, HM Sampoerna, Bentoel Internasional, dan TPM lebih tergiur menerima pelepasan ketimbang mempertahankan atas apa yang sudah mereka bangun dan kuasai.

Namun, akuisisi HM Sampoerna oleh Philip Morris itu menimbulkan keprihatinan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization). Pihaknya mengasumsikan, akan memicu semakin banyaknya “korban baru” rokok yang menimbulkan berbagai persoalan kesehatan seperti kanker dan pembangkakan paru-paru. WHO juga menyebutkan, *kretek* mengandung tingkat tar yang sangat tinggi dan lebih beracun.¹⁸⁴ Sedangkan akuisisi PT Bentoel International Investama Tbk oleh PT BAT Indonesia Tbk, dianggap bisa memperluas pangsa pasar perokok di

¹⁸³ Lihat “Akuisisi Sampoerna oleh Philip Morris Dinilai Bukan Ancaman,” *finance.detik.com*, Selasa, 19 April 2005 13:00 WIB; dan “Akuisisi Sampoerna Tak Mengubah Peta Industri Rokok,” *liputan6.com*, Kamis, 17 Maret 2005 08:25.

¹⁸⁴ Lihat “WHO Prihatinkan Akuisisi HM Sampoerna oleh Philip Morris,” *finance.detik.com*, Jumat, 01 April 2005 10:32 WIB. Pihak Philip Morris membantah tuduhan WHO, karena *kretek* tidak lebih atau kurang berbahaya daripada rokok jenis lainnya dan tidak ada rokok yang aman.

Indonesia dan tidak mendapatkan keuntungan dari akuisisi itu, hanya penyakitnya saja yang justru didapatkan.¹⁸⁵

3.6. Kontribusi Cukai untuk Negara

Jauh sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia (RI), industri pengolahan tembakau sudah lebih dulu beroperasi dan memperkenalkan produk-produknya dengan berbagai teknik promosi. Industri ini sudah muncul sejak akhir abad ke-19 dan mulai mendapatkan tempat pada permulaan abad ke-20 yang tumbuh secara mandiri dan dengan memupuk modal mulai dari kecil-kecilan sampai jatuh-bangun dan diperluas secara terus-menerus menjadi beberapa kekuatan raksasa, bahkan menjadi kompetitif di tingkat internasional. Industri ini mempunyai warisan peninggalan di beberapa kota, dan ada pula yang dikenal sebagai “kota kretek”.¹⁸⁶ Industri pengolahan tembakau juga sudah berperan dalam menyumbangkan pajak dan bea terutama dalam bentuk cukai yang disetorkan kepada negara.

Lance Castles,¹⁸⁷ sudah menunjukkan seberapa besar sumbangan industri *kretek* yang bermula dari Kudus dan menyebar di beberapa kota di Jawa. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah mencium nilai ekonomis yang dioperasikan industri *kretek*, sehingga penarikan pajak tembakau pun menjadi salah satu pemasukan. Tahun 1938 adalah salah satu titik puncak di masa Hindia Belanda dalam industri *kretek*. Salah satu pemilik perusahaan yang memproduksi rokok *Bal Tiga* mendapat julukan sebagai “Raja Kretek”.¹⁸⁸ Sumbangan pajaknya pun tidak dapat diabaikan sebagaimana yang dapat dibandingkan di masa pemerintahan Soekarno (lihat **tabel 3.32**). Dari tahun 1938 sampai 1959 – selama 20 tahun perkembangan industri pengolahan tembakau – telah terjadi kenaikan hampir 137 kali lipat atau 13.700 persen. Pada 1959, pajak tembakau pun mencapai 18,2 persen dari total pemasukan pajak dan bea.

Tabel 3.32 Pajak Tembakau 1938 dan 1959			
No	Tahun	Jumlah (rupiah)	% thd pajak dan bea
1	1938	1.790.000	6,2
2	1959	244.930.000	18,2
Sumber: Lance Castles, 1982			

¹⁸⁵ Lihat “Akuisisi Bentoel oleh BAT Bisa Picu Peningkatan Konsumsi Rokok,” *finance.detik.com*, Jumat, 19 Juni 2009 18:01 WIB.

¹⁸⁶ Lihat “Kudus, Kota Kretek Kaya Pesona Wisata,” *okezone.com*, Senin, 22 Februari 2010 18:14 wib; “Museum Kretek Sebagai Penegas Identitas Kudus Kota Kretek,” *detik.com*, Kamis, 14 Juli 2011 10:00:54 WIB; dan “Tiga Buku Kretek Lengkapi Sejarah Kudus,” *kompas.com*, Minggu, 9 Oktober 2011 | 15:30 WIB.

¹⁸⁷ Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Jakarta : Sinar Harapan, 1982.

¹⁸⁸ Alex Sumaji NitiseMITO, *Raja Kretek NitiseMITO*, Kudus, 1980. Tahun 1938, NitiseMITO telah mempekerjakan 10.000 buruh rokok dengan produksi rokok 10.000.000 batang perhari.

Penerimaan pajak dan bea dari cukai tembakau terus mengalami peningkatan pada 1962 yang mencapai 21,70 persen dari total.¹⁸⁹ Peningkatan penerimaan dari cukai ini juga diungkapkan Gappri pada 1988 yang mencapai Rp 1.090.241.756.641. Sepuluh tahun kemudian telah berlipat lebih dari enam kali, yakni mencapai Rp 6.286.982.466.382. Nilai penerimaan ini akan bertambah dengan memperhitungkan pemasukan dari jenis pajak lain, antara lain pajak perseroan, penjualan, reklame, ekspor-impor, serta keterkaitannya dengan sumbangan produksi dan pengolahan tembakau dan cengkeh.¹⁹⁰

3.6.1. Kecenderungan melonjak

Salah satu kontribusi industri pengolahan tembakau adalah setoran cukai bagi pemasukan dalam anggaran negara, selain berbagai pajak lainnya. Sejak 1988, setoran cukai industri rokok sudah menembus di atas Rp 1 triliun. Sepuluh tahun berikutnya, pada 1998, sudah berada di atas Rp 6 triliun. Sepuluh berikutnya lagi, sudah mencapai hampir Rp 50 triliun. Dengan data ini dapat ditunjukkan bahwa setoran cukai industri rokok cenderung melonjak setiap tahun, tidak pernah turun dalam rentang 2000-2008 (lihat **grafik 3.12**). Dalam rentang sembilan tahun, telah terjadi lebih dari empat kali lipat penerimaan negara yang dipetik dari setoran cukai rokok.

Grafik 3.12 | Penerimaan Cukai 2000-2008 (dalam triliun)



Setoran cukai yang diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan industri rokok, tidak terpengaruhi dengan kejatuhan sejumlah perusahaan. **Tabel 3.33** menunjukkan bahwa banyak perusahaan industri rokok yang menderita kebangkrutan atau tidak beroperasi lagi, justru tidak menyusutkan jumlah penerimaan negara dari cukai. Sepanjang 2007-2011, kecenderungan yang terjadi adalah

¹⁸⁹ Amen Budiman dan Onghokham, *Rokok kretek: Lintasan sejarah dan Artinya bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, Kudus: Djarum Kudus, 1987.

¹⁹⁰ JA Noertjahyo, "Sigaret Kretek, Tonggak Bangsa," dalam JB Kristanto (ed.), *1000 tahun Nusantara*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2000.

menyusutnya jumlah perusahaan industri rokok. Tahun 2008 ditunjukkan bagaimana jumlah perusahaan rokok menyusut dibanding tahun sebelumnya, namun penerimaan dari cukai tetap melonjak. Kelihatannya, kehancuran sejumlah perusahaan rokok dapat dilampaui dengan memperbesar jumlah produksi. Dalam lima tahun itu, jumlah produksi rokok telah bertambah dari 231 miliar (2007) batang menjadi 279,4 miliar batang (2011). Dengan demikian, penerimaan negara dari setoran cukai cenderung meningkat, karena jumlah produksi rokok terus meningkat.

Tabel 3.33 Jumlah Perusahaan, Produksi dan Kontribusi Cukai 2007-2011				
No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Produksi (miliar batang)	Setoran Cukai (triliun rupiah)
1	2007	4.793	231	43,5
2	2008	3.961	240	49,0
3	2009	3.255	245	54,3
4	2010	1.994	249,1	59,3
5	2011	1.664	279,4	77,0

Sumber: Ditjen Bea Cukai

Perusahaan-perusahaan industri rokok berkepentingan memproduksi rokok sebanyak mungkin untuk digelindingkan ke pasar baik domestik maupun ekspor. Tidaklah mengherankan bila terjadi persaingan ketat di antara sesama perusahaan industri rokok *kretek* maupun rokok putih. Rokok kretek tetap menguasai lebih dari 90 persen pangsa pasar, sedangkan rokok putih hanya stagnan pada 7 persen. Namun Gabungan Pengusaha Rokok Putih (Gaprindo) mengungkapkan kesulitan rokok putih dalam meningkatkan jumlah produksinya, karena peminat rokok putih kian tertekan. Tambahan lagi, persaingannya dengan rokok putih impor kendati masih sedikit.¹⁹¹

Di satu sisi persaingan itu kian ketat dan keras saja seiring dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan *road map*, dengan proyeksi produksi rokok pada 2015 hanya sebatas 265 miliar batang.¹⁹² Perusahaan-perusahaan industri rokok dipaksa untuk memperebutkan jumlah hanya sebatas itu. Namun di sisi lain, pemerintah menggenjot penerimaan negara dari setoran cukai dengan menaikkan tarifnya. Tahun 2012, pemerintah – dengan persetujuan DPR – telah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 15 persen yang mulai berlaku pada Januari.¹⁹³ Implikasi

¹⁹¹ Lihat “Rokok Putih & Rokok Cengkih Bersaing Ketat,” *bisnis.com*, Rabu, 25 Juli 2012 | 16:40 WIB. Gaprindo juga menyebutkan, sedikitnya 30 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya di industri yang berkaitan dengan tembakau.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ Lihat “Cukai Rokok Naik 15 Persen,” *tempo.co*, Senin, 21 November 2011 | 19:02 WIB; dan “Menkeu minta izin DPR naikan cukai rokok,” *merdeka.com*, Selasa, 4 September 2012 16:11:16.

kenaikan tarif cukai adalah perusahaan-perusahaan rokok menaikkan harga jual rokok. Dan kenaikan tarif cukai ini sebagai upaya menekan tingkat konsumsi rokok.¹⁹⁴

Dengan kenaikan tarif cukai 15 persen pada 2012, pemerintah memproyeksikan jumlah produksi rokok secara nasional sebanyak 268,7 miliar batang. Jumlah produksi terbanyak diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi jenis sigaret kretek mesin (SKM), dengan jumlah sebanyak 155,5 miliar batang. Paling sedikit adalah sigaret kretek tangan (SKT) golongan III yang diturunkan menjadi 300 juta batang. SKT juga paling rendah dikenakan tarif cukai, hanya Rp 164 per batang (lihat **tabel 3.34**). Dengan menaikkan tarif cukai ini pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 72 triliun pada 2012.¹⁹⁵

Tabel 3.34 Proyeksi Penerimaan Cukai 2012				
No	Jenis Produksi	Jumlah Produksi	Setoran Cukai	Tarif Cukai
1	Sigaret kretek mesin (SKM)	155,5 miliar batang	Rp 48,67 triliun	Rp 313 per batang
2	Sigaret kretek tangan (SKT)	96,4 miliar batang	Rp 15,80 triliun	Rp 164 per batang
3	Sigaret putih mesin (SPM)	16,5 miliar batang	Rp 4,56 triliun	Rp 277 per batang
Jumlah		268,4 miliar batang	Rp 69,03 triliun	
Sumber: dikutip dan diolah dari tempo.co, Senin, 21 November 2011 19:02 WIB				

Berdasar keterangan Dirjen Bea Cukai, realisasi penerimaan negara dari cukai rokok selama 2012 justru melampaui target, yakni sebesar Rp 79,9 triliun.¹⁹⁶ Dengan pendapatan ini berarti pemerintah mendapatkan surplus penerimaan dari cukai sebesar Rp 7,9 triliun.¹⁹⁷ Sedangkan pernyataan Menteri Keuangan pada akhir 2012 yang mengecilkan kontribusi cukai rokok sebagai andalan, namun mengecap nikmatnya dari kontribusi untuk penerimaan negara yang justru melampaui target, yakni hampir Rp 90 triliun.¹⁹⁸ Tahun sebelumnya, pemerintah juga mendapatkan penerimaan dari cukai yang melebihi target. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, target penerimaan cukai sebesar Rp 60,7 triliun, namun realisasinya mencapai Rp 77 triliun.¹⁹⁹ Sehingga tahun 2011 terjadi surplus penerimaan sebanyak Rp 16,3 triliun.

¹⁹⁴ Lihat "Tekan Perokok, Pemerintah Diminta Maksimalkan Cukai Tembakau," *bisnis-jatim.com*, Jumat, 18 Maret 2011 | 9:13 am.

¹⁹⁵ Lihat "Cukai Rokok Naik 15 Persen," *tempo.co*, Senin, 21 November 2011 | 19:02 WIB; dan "Cukai Rokok Naik 16% Tahun Depan," *viva.co.id*, Jumat, 25 November 2011, 19:30.

¹⁹⁶ Lihat "Naikkan Cukai Rokok Tahun Depan, Pemerintah Kejar Penerimaan Rp 85 Triliun," *finance.detik.com*, Kamis, 20 September 2012 15:41 WIB.

¹⁹⁷ Bandingkan dengan "Pendapatan Cukai Rokok Pemerintah Naik Rp 3 Triliun di 2013," *liputan6.com*, Jumat, 28 Desember 2012 11:44. Menurut AMTI, pendapatan pemerintah dari cukai rokok pada 2012 mencapai Rp 84 triliun. Ini berarti surplus penerimaan sebesar Rp 12 triliun.

¹⁹⁸ Lihat "Menkeu: Cukai Tembakau Tak Bisa Terus Jadi Andalan," *viva.co.id*, Rabu, 12 Desember 2012, 17:59; dan "Rokok Masih Diandalkan Jadi Sumber Pemasukkan Negara," *finance.detik.com*, Kamis, 05 Juli 2012 15:49 WIB.

¹⁹⁹ Lihat "Rp 77 Triliun Penerimaan Negara dari Cukai Rokok," *duniaindustri.com*, Minggu, 22 April 2012 03:11.

Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD-UI) mengungkapkan, penerimaan negara dari cukai rokok senantiasa mengesampingkan surplus dari target yang ditetapkan. Penerimaan kenaikan cukai rokok pada 2012, meningkat sekitar 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan cukai rokok menguntungkan atau meningkatkan penerimaan negara berkisar 0,66-4,21 persen kendati dinyatakan untuk membatasi konsumsi rokok.²⁰⁰ Perusahaan rokok Djarum diperkirakan membeli pita cukai rokok selama setahun sebesar Rp 12 triliun, sedangkan tahun 2011 membeli pita cukai ini sebesar Rp 10,6 triliun.²⁰¹ Dengan pengalaman surplus ini, maka pemerintah berkepentingan untuk terus mengesampingkan lebih banyak lagi penerimaan negara dari kebijakan menaikkan tarif cukai rokok.²⁰²

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merilis kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2013 dengan besaran rata-rata sekitar 8,5 persen. Kebijakan cukai ini ditempuh untuk mencapai target penerimaan APBN 2013 dari sektor cukai hasil tembakau sebesar Rp 88,02 triliun yang merupakan hasil kesepakatan optimalisasi penerimaan negara antara Pemerintah dengan DPR. Kebijakan cukai hasil tembakau tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada 12 November 2012, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada 25 Desember 2012.²⁰³ Implikasinya, perusahaan-perusahaan rokok yang tergabung dalam Gapri memastikan kenaikan harga jual rokok berkisar 15-20 persen untuk mengikuti kenaikan tarif cukai sebesar rata-rata 8,5 persen.²⁰⁴

3.6.2. Alokasi dana bagi hasil cukai

Rokok, terutama *kretek* memang nikmat dikonsumsi karena kandungan aroma cengkeh. Namun kenikmatan *kretek* juga memanen pundi-pundi cukai. Kepentingan untuk langsung memanen cukai dari setiap batang rokok disuarakan oleh pemerintah kota/kabupaten Kediri, Surabaya, Malang, Pasuruan dan Kudus dalam meminta bagi hasil pembayaran cukai rokok sebesar 10 persen. Namun usulan mereka kandas di tangan pemerintah pusat. Dirjen Bea Cukai menegaskan, cukai merupakan pajak negara yang langsung dipungut pemerintah pusat. Demikian pula PPN dan PPh yang dipungut dan masuk dalam kas negara. Sehingga pengalokasiannya dilakukan melalui mekanisme APBN.²⁰⁵ Dengan demikian, tidak hanya pemerintah pusat dan DPR-RI saja yang berkepentingan dengan pemasukan dari cukai rokok, namun juga para pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kepentingan itu juga mendorong pemerintah terus meningkatkan penerimaan dari tarif cukai rokok. Lembaga Demografi FE-UI menganjurkan kepada pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok sampai batas maksimum, yakni sebesar 57 persen dari harga jual eceran. Dengan

²⁰⁰ Lihat "Kenaikan Cukai Berpotensi Untungkan Negara hingga 4,21%," *bisnis-kepri.com*, Rabu, 27 Februari 2013; dan "Negara Diuntungkan Kenaikan Cukai Rokok," *kabarbisnis.com*, Rabu, 27 Februari 2013 | 11:44 wib.

²⁰¹ Lihat "Pembelian Pita Cukai Djarum Capai Rp 12 Triliun," *investor.co.id*, Selasa, 5 Juni 2012 | 18:59.

²⁰² Lihat "Naikkan Cukai Rokok Tahun Depan, Pemerintah Kejar Penerimaan Rp 85 Triliun," *finance.detik.com*, Kamis, 20 September 2012 15:41 WIB.

²⁰³ Lihat "Tarif Cukai Rokok 2013 Naik Rokok 8,5%," *liputan6.com*, Senin, 26 November 2012 14:50; dan "Kenaikan Cukai Rokok 2013 Tak Setinggi Tahun Lalu," *viva.co.id*, Senin, 12 November 2012, 19:02.

²⁰⁴ Lihat "Harga Rokok 2013 Naik Sampai 20% Karena Cukai Naik," *liputan6.com*, Selasa, 27 November 2012 10:49.

²⁰⁵ Lihat "Pembagian Cukai Rokok Tetap Ditangani Pemerintah Pusat," *tempointeractive.com*, Sabtu, 05 Maret 2005 | 18:43 WIB.

kebijakan ini diharapkan terjadi penurunan konsumsi rokok.²⁰⁶ Sementara itu dalam rapat dengar pendapat bersama Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai di DPR, anggota Komisi XI DPR mengusulkan penerimaan negara dari cukai rokok digenjot hingga mencapai Rp 100 triliun. Caranya, produksi rokok dinaikkan, dan kalau perlu Indonesia melakukan ekspor rokok.²⁰⁷ Usulan ini diterima pemerintah, karena pejabat Kementerian Keuangan berjanji dengan serius untuk mengupayakan realisasi penerimaan cukai – dalam APBN-P 2013 – bisa melampaui Rp 100 triliun.²⁰⁸ Dengan pemasukan dari cukai, maka pemerintah pusat mengalokasikan sebagian pemasukan ini sebagai DBH.

Namun, dua pemerintah di tingkat lokal – Kabupaten dan Kota Kediri – berencana meminta data ke PT Gudang Garam Tbk terkait kebingungan kedua pemerinah daerah ini membagi persentase kucuran cukai rokok. Rencana ini dilakukan menyusul kabar bahwa keduanya bakal mendapat kucuran dana bagi hasil (DBH) cukai sebanyak Rp 288,5 miliar setelah disahkannya undang-undang pengganti UU No. 11/1995 tentang Pembagian Hasil Cukai Rokok untuk Daerah. Pemkab Kediri meminta data terbaru kepada perusahaan rokok kretek itu terkait luas pabrik dan jumlah pekerja yang berasal dari kabupatennya. Tidak mau ketinggalan, Pemkot Kediri juga melakukan hal yang sama.²⁰⁹

Pemkab Kudus menyambut UU No. 39/2007 tentang Cukai itu dengan gembira. Karena dengan UU ini Kudus bakal memperoleh DBH cukai rokok sebesar 2 persen. Tahun 2007, dengan target penerimaan Negara dari cukai sebesar Rp 42,03 triliun, maka DBH untuk daerah penghasil cukai rokok berkisar Rp 800 miliar. Ada 8 daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil cukai rokok, yaitu Kudus, Semarang, Surakarta, Malang, Kediri, Tulungagung, dan Surabaya. Cara pembagiannya, 40 persen dari pembagian itu jatuh ke delapan daerah produsen, 30 persennya ke provinsi dan 30 persen sisanya ke daerah bukan penghasil rokok.²¹⁰

Perintah UU Cukai itu direalisasikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan. Tahun 2012, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan alokasi sebesar Rp 1,69 triliun yang berlaku sejak 11 Desember 2012. Sedangkan alokasi definitif dana ini untuk provinsi dan kabupaten/kota diatur oleh gubernur dan kepala daerah yang bersangkutan.²¹¹ Alokasi pembagian dana cukai ini ditetapkan per provinsi menggunakan variabel dengan masing-masing bobot, yaitu penerimaan cukai hasil tembakau 2 tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 57,5 persen. Kemudian, rata-rata produksi tembakau kering selama 3 tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 37,5 persen.

²⁰⁶ Lihat “Cukai Rokok Didorong Sampai Batas Maksimum,” *tempo.co*, Jumat, 18 Maret 2011 | 13:12 WIB.

²⁰⁷ Lihat “Anggota DPR Minta Cukai Rokok Digenjot Rp 100 Triliun,” *finance.detik.com*, Senin, 12/09/2011 19:05 WIB. Menurut anggota DPR itu, menggenjot penerimaan cukai rokok bukan lagi sebesar Rp 75 triliun, namun Rp 100 triliun, dengan membuka kebijakan peningkatan produksi rokok dan termasuk menggenjot ekspor.

²⁰⁸ Total produksi rokok pada 2012 menyentuh 338 miliar batang dan realisasi penerimaan mencapai Rp 95 triliun. Lihat “Penerimaan Cukai Rokok 2013 Ditarget Rp 100 Triliun,” *republika.co.id*, Rabu, 27 Februari 2013, 22:00 WIB.

²⁰⁹ Lihat “Kabupaten dan Kota Kediri Rebutan Cukai Rokok,” *tempointeractive.com*, Rabu, 25 Juli 2007 | 13:06 WIB. UU pengganti ini adalah UU No. 39/2007 tentang Cukai.

²¹⁰ Lihat “Daerah Sambut Positif Bagi Hasil Cukai Rokok,” *tempo.co*, Sabtu, 21 Juli 2007 | 14:18 WIB. Tahun 2007, Kudus diperkirakan akan menerima sekitar Rp 80 miliar.

²¹¹ Lihat “Alokasi bagi hasil cukai tembakau Rp 1,69 triliun,” *antaranews.com*, Jumat, 21 Desember 2012 14:17 WIB.

Pembinaan lingkungan sosial (diukur dengan angka indeks pembangunan manusia) 2 tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 3 persen.²¹²

Pemerintah memang menargetkan penerimaan cukai dari daerah-daerah penghasil rokok, terutama daerah seperti Kudus, Semarang, Surakarta, Surabaya, Malang, Kediri, dan Tulungagung. Ketika berkunjung ke pabrik rokok pada 15 September 2012 di Kediri, Menko Perekonomian menyatakan, sumbangan cukai rokok bagi pendapatan negara sekitar Rp 80 triliun. Jawa Timur adalah penyumbang terbesar, yakni Rp 60 triliun. Tahun sebelumnya setoran cukainya Rp 57 triliun.²¹³ Daerah Kudus juga salah satu penyumbang cukai rokok terbesar. Tahun 2009, KPPBC Tipe Madya Cukai menargetkan penerimaan cukai dari Kudus sebesar Rp 13,8 triliun, namun realisasinya mencapai Rp 15,2 triliun, melampaui 10,12 persen dari target.²¹⁴ Kudus menyumbangkan cukai sebesar Rp 16,8 triliun, sedangkan tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 15,16 triliun.²¹⁵ Bahkan salah satu perusahaan rokok yang berbasis di Surabaya – HM Sampoerna yang diakuisisi Philips Morris Indonesia – menyetorkan cukai kepada pemerintah sebesar Rp 19,7 triliun atau setara 1,7 persen pendapatan negara.²¹⁶ Hal ini pula yang mendorong Gappri menantang pemerintah, dengan menyatakan, bila 10 tahun hasil pendapatan yang dipetik dari cukai rokok *kretek* itu ditabung, maka industri kretek bisa membayar utang negara.²¹⁷

Sesudah pemerintah pusat memungut cukai produk tembakau dari berbagai perusahaan, maka pemerintah provinsi mendapat kurungan DBH cukai hasil tembakau (CHT) yang dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tahun 2010, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 115/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010. Dengan PMK ini, maka 19 provinsi mendapat bagian DBH CHT. Total dikurangkan dana sebanyak Rp 1.118.499.999.975 (lihat **tabel 3.35**). Provinsi Jawa Timur menerima alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp 613 miliar. Berikutnya disusul Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Setiap pemerintah provinsi mengecap dana ini paling banyak. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota seperti Kudus, Kota Kediri dan Kab Kediri, serta Pasuruan adalah empat besar pengecap DBH CHT.

Tabel 3.35 | Alokasi Sementara DBH CHT 2010

No	Provinsi	Jumlah (rupiah)	No	Provinsi	Jumlah (rupiah)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.781.180.440	11	DI Yogyakarta	16.431.332.126
2	Sumatera Utara	10.387.046.342	12	Jawa Timur	613.451.367.661
3	Sumatera Barat	4.565.683.440	13	Bali	8.015.419.753
4	Jambi	2.124.355.812	14	Nusa Tenggara Barat	109.382.755.901

²¹² Lihat “Wuih! Daerah Dapat Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp 1,69 T,” *liputan6.com*, Rabu, 16 Januari 2013 16:31.

²¹³ Lihat “Pemerintah Raup Rp 80 Triliun Dari Rokok,” *finance.detik.com*, Sabtu, 15 September 2012 14:05 WIB.

²¹⁴ Lihat “1.980 Izin Pabrik Rokok Dicabut,” *Suara Merdeka*, Jumat, 12 Maret 2010.

²¹⁵ Lihat “Ada 86 Pabrik Rokok Dicabut Izinnya,” *tempo.co*, Selasa, 01 Maret 2011 | 14:11 WIB.

²¹⁶ Lihat “Sampoerna Bukukan Laba Bersih Rp 8,06 Triliun,” *investor.co.id*, Jumat, 27 April 2012 | 13:37.

²¹⁷ Lihat “Jika Ditabung 10 Tahun, Sumbangan Industri Rokok Bisa Buat Bayar Utang Negara,” *finance.detik.com*, Kamis, 16 Desember 2010 12:26 WIB.

Tabel 3.35 | Alokasi Sementara DBH CHT 2010

No	Provinsi	Jumlah (rupiah)	No	Provinsi	Jumlah (rupiah)
5	Sumatera Selatan	1.768.995.392	15	Nusa Tenggara Timur	2.251.458.068
6	Lampung	2.059.947.542	16	Kalimantan Tengah	1.607.647.694
7	Banten	2.962.898.419	17	Kalimantan Selatan	1.924.735.665
8	DKI Jakarta	1.462.854.078	18	Kalimantan Timur	1.567.975.705
9	Jawa Barat	69.555.868.846	19	Sulawesi Selatan	7.594.159.519
10	Jawa Tengah	258.604.317.572	Total		1.118.499.999.975

Sumber: PMK No. 115/PMK.07/2010

Alokasi DBH-CHT 2010 yang besarnya lebih dari Rp 1,118 triliun merupakan persentase sebesar 2 persen dari penerimaan CHT sebagaimana dimaksud dalam UU No. 47/2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.²¹⁸ Tahun 2011, meningkat lagi alokasinya menjadi Rp 1,201 triliun untuk 20 provinsi seiring peningkatan penerimaan negara dari cukai.²¹⁹ Tahun 2012, sebagaimana PMK No. 197/PMK.07/2012, jumlah alokasi yang direalisasikan sebesar Rp 1,69 triliun,²²⁰ melampaui target Rp 1,44 triliun.²²¹ Dalam alokasi yang ditargetkan, Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak menerima kucuran DBH CHT, yakni sebesar Rp 698.035.490.445. Penerima kedua terbesar dikecap Jawa Tengah sebanyak 364.242.511.314, serta diikuti Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 159.841.094.981, dan Jawa Barat sebanyak Rp 137.064.461.313.

3.7. Kretek sebagai Warisan Budaya

Pada dasarnya, industri *kretek* merupakan industri khas Nusantara. Tidak ada jenis rokok yang disebut *kretek* itu berasal dari negeri lain, karena racikan tembakau dicampur dengan biji cengkeh menjadi sesuatu yang khas *kretek*. Industrialisasi ini berakar dari Kudus,²²² dan selanjutnya industri *kretek* pun menyebar ke sejumlah daerah.²²³ Industri *kretek* selain membentuk suatu lapisan pekerja dan menyerap banyak pekerja perempuan, juga menghisap bahan baku – tembakau dan cengkeh olahan – yang diselesaikan secara internal atau domestik

²¹⁸ Lihat “Dana Bagi Hasil Tembakau Sering Disalahgunakan Pemda,” *finance.detik.com*, Jumat, 09 April 2010 18:20 WIB; dan “Menkeu Guyur Daerah Produsen Rokok dan Tembakau Rp 1,118 Triliun,” *finance.detik.com*, Kamis, 08 April 2010 12:33 WIB.

²¹⁹ Lihat “Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Capai Rp 1,2 Triliun,” *tribunnews.com*, Senin, 25 Juli 2011 23:47 WIB. DBH-CHT ini dialokasikan sesuai PMK No. 96/PMK.07/2011 tertanggal 27 Juni 2011 yang sebelumnya PMK 33/PMK.07/2011.

²²⁰ Lihat “Alokasi bagi hasil cukai tembakau Rp 1,69 triliun,” *antaranews.com*, Jumat, 21 Desember 2012 14:17 WIB; dan “Wuih! Daerah Dapat Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp 1,69 T,” *liputan6.com*, Rabu, 16 Januari 2013 16:31.

²²¹ Lihat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46 /PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 tertanggal 20 Maret 2012.

²²² Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Jakarta : Sinar Harapan, 1982; dan Alex Sumaji Nitisemito, *Raja Kretek Nitisemito*, Kudus, 1980. Lihat juga, “Kudus, Kota Kretek Kaya Pesa Wisata,” *okezone.com*, Senin, 22 Februari 2010 18:14 wib; “Museum Kretek Sebagai Penegas Identitas Kudus Kota Kretek,” *detik.com*, Kamis, 14 Juli 2011 10:00:54 WIB.

²²³ Amen Budiman dan Onghokham, *Rokok kretek: Lintasan sejarah dan Artinya bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, Kudus: Djarum Kudus, 1987.

tanpa melalui proses ekspor, sehingga tidak bergantung pada muatan impor (*import content*).²²⁴ Bahkan, Dirjen Bea dan Cukai mengatakan, industri *kretek* merupakan pembeli tunggal untuk sektor pertanian tembakau dan cengkeh.²²⁵ Sebagian besar tembakau diperoleh dari Jawa, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat, sedangkan cengkeh diperoleh dari Maluku dan Sulawesi. Dari ladang-ladang tembakau dan cengkeh inilah terjadi lintasan transaksi perdagangan untuk kemudian dihisap bagi kebutuhan pabrik-pabrik yang memproduksi *kretek*.²²⁶

Tidak hanya itu, kendati tidak dilirik oleh para pengusaha Belanda (Eropa) sebagai sektor bisnis yang menguntungkan – tumbuh secara mandiri sebagai kekuatan industri lokal tanpa fasilitas serta proteksi apa pun – namun sejak masa kolonial Hindia Belanda, industri *kretek* itu sudah menyumbangkan total pajak dan bea kepada pemerintah sebesar 6,2 persen pada 1938.²²⁷ BAT yang ikut ambil bagian pada 1924 di Cirebon, lebih memproduksi rokok putih sebagaimana pada umumnya rokok yang dikenal di seluruh dunia.²²⁸ Pada 2005, Philip Morris International Inc melumat saham PT HM Sampoerna.²²⁹ Pada 2011, giliran perusahaan asal Korea Selatan, KT & G, yang membeli mayoritas saham PT Trisakti Purwosari Makmur.²³⁰ Pembelian dan penguasaan saham oleh tiga raksasa asing ini menunjukkan betapa pentingnya industri rokok *kretek* yang tumbuh, berkembang dan terus bertahan sampai sekarang.

3.7.1. Industri yang tangguh

Sebagai salah satu industri yang penting baik karena kelengkapan sirkuit produksinya secara internal maupun kontribusinya dalam menyerap tenaga pekerja dan penerimaan pemerintah dari pajak dan cukai sejak masa Hindia Belanda, maka industri *kretek* menjadi sangat dinamis oleh berbagai persaingan di tingkat domestik dan internasional, sorotan negatif dan upaya melebihi-lebihkan bahaya kematian bagi penikmat *kretek*.

Permulaan abad ke-20 merupakan pertumbuhan penting pertama dalam industri *kretek*. Selain Kudus, tahun 1909 berdiri perusahaan kretek di Blitar. Tahun 1911 muncul di Kediri, dan kemudian di Surabaya tahun 1914. Namun, ketegangan dalam persaingan industri *kretek* sudah terlihat sejak itu. Ketegangan ini meledak dalam suatu kerusuhan yang terjadi pada Oktober 1918 di Kudus. Sebagaimana pada umumnya kerusahan, selain menimbulkan kerusakan pabrik-pabrik *kretek* dan rumah-rumah mereka, juga korban yang menderita luka-luka. Kemunduran tidak

²²⁴ Bandingkan dengan Hamza Alavi, “The Structure of Peripheral Capitalism,” dalam Hamza Alavi dan Theodor Shanin (eds.), *Introduction to Sociology of ‘Developing’ Societies*, London: Macmillan Press, 1982.

²²⁵ Lihat “Dirjen: Produksi Rokok 2005 Meningkat,” *tempointeractive.com*, Jumat, 11 Februari 2005 | 18:20 WIB.

²²⁶ Topatimasang, Roem, Puthut EA, dan Hasriadi Ary (eds), *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota*, Yogyakarta: Indonesia Berdikari, 2010, hal. 5-6. Lihat juga, “Produksi Tembakau Pamekasan Tahun 2011 Bakal Habis Diserap Pabrik Rokok,” *tempo.co*, Selasa, 22 Maret 2011 | 13:33 WIB; dan “2 Pabrik Rokok Serap Produksi Petani,” *bisnis-jabar.com*, Kamis, 21 Februari 2013 | 07:48 WIB.

²²⁷ Lihat Tabel 3.30 Pajak Tembakau 1938 dan 1959. Dalam 20 tahun sesudah 1938, pajak dan bea industri rokok (*kretek*) melesat menjadi 18,2 persen. Secara nominal, mengalami kenaikan hampir 137 kali lipat atau 13.700 persen.

²²⁸ Pada 2009, BAT menguasai saham PT Bentoel Internasional Investama Tbk, salah satu perusahaan industri *kretek* yang berbasis di Malang. Lihat “Wow! 85% Saham Bentoel Diborong BAT,” *inilah.com*, Rabu, 17 Juni 2009 | 11:22 WIB; “Akuisisi Bentoel, BAT Incar Pasar Kretek Indonesia,” *finance.detik.com*, Rabu, 17 Juni 2009 11:04 WIB; dan “BAT Akuisisi Bentoel: Ini Peluang Besar Rebut Pasar Kretek RI,” *viva.co.id*, Rabu, 17 Juni 2009, 10:04.

²²⁹ Lihat “Untuk Akuisisi HM Sampoerna, Philips Morris Bayar Rp 48 T,” *finance.detik.com*, Senin, 14 Maret 2005 15:54 WIB.

²³⁰ Lihat “Korsel Beli Perusahaan Rokok Indonesia,” *liputan6.com*, Kamis, 21 Juli 2011 11:43.

terelakkan ketika banyak pengusaha bumiputra yang berpengaruh diajukan ke muka pengadilan dan dijatuhi hukuman. Situasi ini menimbulkan pergeseran peta industri *kretek* seiring terjunnya sejumlah pengusaha Tionghoa yang secara spesifik menempati kedudukan khusus dalam kebijakan pemerintah kolonial.

Usai kerusuhan itu industri *kretek* bangkit dari kehancuran. Cita rasa *kretek* yang khas sudah terlanjur melekat di kalangan konsumen. Jumlah pabrik *kretek* pun mengalami peningkatan. Pada 1924 tercatat 35 pabrik, dan pada 1928 sudah mencapai 50 pabrik di Kudus. **Tabel 3.36** menunjukkan bangkit kembalinya industri *kretek*, yang terdiri atas tiga golongan, yaitu perusahaan besar, menengah dan kecil.²³¹ Dalam rentang ini terjadi peningkatan jumlah perusahaan setiap tahun. Tahun 1925 menjadi 38 perusahaan, tahun 1926 bertambah menjadi 42 perusahaan, dan sebanyak 46 perusahaan di tahun 1927. Salah satu yang paling menonjol adalah perusahaan yang dimiliki Haji Nitisemito yang mempekerjakan 15.000 pekerja.²³²

Tabel 3.36 Jumlah Perusahaan di Kudus Tahun 1924 dan 1928				
No	Perusahaan	Produksi	1924	1928
1	Besar	> 50 juta batang	12	13
2	Menengah	10-50 juta batang	16	26
3	Kecil	< 10 juta batang	7	11
Jumlah			35	50
Sumber: Budiman dan Onghokham, 1987				

Sesudah di Cirebon, BAT membuka pabriknya di Surabaya pada 1928. Selang tiga tahun kemudian, jumlah perjualan rokok putih – termasuk tambahan impor – mencapai 7,1 miliar batang.²³³ Sedangkan di bawah rokok putih, jumlah peredaran *kretek* hanya mencapai 6,95 miliar batang.²³⁴ Memang jumlah perusahaan kretek lebih banyak dan telah meluas di hampir seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah. Demikian pula di Jawa Timur setelah Blitar, Kediri, dan Surabaya, muncul lagi di Nganjuk, Madiun, Jombang, Tulungagung, Probolinggo, Besuki, Bojonegoro, Ponorogo, Tuban, Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang. Namun, peredaran rokok putih belum dapat ditandingi oleh *kretek*.

Ketika terjadi krisis ekonomi dunia – disebut juga Depresi Besar 1929-1933 – yang diawali rontoknya bursa saham di New York, berdampak pada anjloknya pendapatan dari pajak bagi pemerintah Hindia Belanda. Sehingga diberlakukan beban pajak 20 persen bagi semua hasil tembakau pabrik. Sejak 1932 pabrik rokok harus membeli stiker banderol pajak atau pita cukai untuk dipasang di setiap bungkusnya. Periode ini menjadi salah satu masa terberat industri *kretek*

²³¹ Amen Budiman dan Onghokham, *Rokok kretek: Lintasan sejarah dan Artinya bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, Kudus: Djarum Kudus, 1987, hal. 109.

²³² Mark Hanusz, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Jakarta: Equinox Publishing (Asia), 2000, hal. 47. Pada 1908, Nitisemito mendaftarkan perusahaannya sebagai NV Bal Tiga Nitisemito yang memproduksi *kretek* dengan merek *Bal Tiga*.

²³³ Amen Budiman dan Onghokham, *Op.cit.*, hal. 173.

²³⁴ Lance Castles, *Op.cit.*, hal. 168.

dan berdampak terhadap penurunan jumlah produksi. Tahun 1932, produksi *kretek* hanya 6,08 miliar batang.

Lebih berat lagi ketika terjadi Perang Dunia II. Regim fasisme-militerisme Jepang menduduki Indonesia dengan bala tentaranya. Perekonomian diarahkan untuk menopang kebutuhan perang Jepang. Sektor perkebunan babak belur, diganti dengan tanaman pangan dan jarak yang digunakan untuk pelumas mesin-mesin. Produksi perkebunan merosot sampai 80 persen.²³⁵ Sehingga produksi tembakau menjadi sangat terbatas dan sulit diperoleh. Industri *kretek* mengalami kemerosotan. Situasi ini bertambah gawat karena penguasa militer Jepang menyita banyak perusahaan *kretek*, termasuk NV Bal Tiga.

Kendati dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 tersirat penyebutan nama Nitisemito yang dikenal sebagai penggerak utama industri *kretek* – memberi sinyal arti penting perannya – namun Republik Indonesia (RI) yang dibentuk itu harus kembali menghadapi agresi militer Belanda. Industri *kretek* hanya berkembang di kota-kota yang dikuasai Belanda, seperti Surabaya, Malang, dan Semarang. Pada 1948, industri *kretek* di Kudus bisa mengakses cengkeh impor. Sampai penyerahan kedaulatan RI, industri *kretek* tumbuh dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang sulit, apalagi harganya melambung akibat gagal panen di Zanzibar dan dampak yang menjaral dari Perang Korea.

Namun secara keseluruhan, industri *kretek* tetap bisa tumbuh. Selama 1959-1963 di bawah regim Demokrasi Terpimpin, dapat dicapai produksi *kretek* rata-rata di atas 20 miliar batang per tahun.²³⁶ Perkembangan ini beriringan dengan nasionalisasi perusahaan asing sejak 1957, terutama perusahaan milik Belanda, Inggris, dan Amerika, juga Jacobson van den Berg dan BAT. Industri *kretek* juga menikmati keringan tarif cukai hanya 20 persen dari harga eceran. Secara umum juga terjadi pergeseran dalam industri rokok berkat kebijakan pemerintah yang menguntungkan *kretek*.

Sesudah pemerintahan beralih kepada Orde Baru Soeharto – lewat dukungan Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) untuk menggerakkan ekonomi dengan utang luar negeri dan modal asing – maka peta industri rokok diiringi dengan kembalinya BAT sebagai perusahaan rokok putih terbesar sejak 1968 untuk menancapkan lagi produksi dan pasarnya di Indonesia. Pada 1970, rokok putih pun menguasai 40 persen pangsa pasar. Namun, dalam tahun yang sama juga Indonesia mengalami swasembada cengkeh dan pemerintah mencanangkan pengurangan impor supaya dapat menguatkan devisa.

Situasi perang antara Arab dan Israel ditandai dengan embargo minyak mentah terhadap pihak yang mendukung Israel. Sebagai negeri pengekspor minyak dan gas bumi, Indonesia menuai kelimpahan “uang minyak” (*petrodollar*) sejak 1974 yang sekaligus mengubah haluan kebijakan ekonomi.²³⁷ Periode *oil boom* ini membawa dua keuntungan politik-ekonomi bagi industri *kretek* sebagai celah kebangkitannya. Pertama, dengan kelimpahan *petrodollar* ini memungkinkan

²³⁵ Iyung Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008, hal. 44.

²³⁶ Lance Castles, *Op.cit.*, hal. 171. Tahun 1959 jumlah produksi sebanyak 21,22 miliar batang, kemudian berturut-turut 21,37 miliar batang (1960), 20,22 miliar batang (1961), 19,30 miliar batang (1962), dan 20,71 miliar batang (1963). Tahun 1961, juga telah berdiri perusahaan *kretek* di Karesidenan Sumatera Timur, Bali, dan Lombok.

²³⁷ Suryadi A Radjab, *Praktik Culus Bisnis Gaya Orde Baru*, Jakarta: Grasindo, 1999, hal. 23-25.

sejumlah perusahaan rokok kretek memperoleh pinjaman lunak dan mereka menambah investasi untuk memperbesar kapasitas produksi. Pada paruh kedua 1970-an, produksi *kretek* mulai menggunakan filter. Kedua, migrasi penduduk ke luar Jawa lewat program transmigrasi diiringi pula dengan distribusi *kretek* secara lebih luas ke daerah-daerah para transmigran. Inilah salah satu tahapan penting di mana *kretek* menggusur pasar rokok putih.

Dalam dekade 1990-an, industri *kretek* berhasil menghapus ketergantungan yang tinggi terhadap cengkeh impor dari Zanzibar dan Madagaskar. Perkembangan ini juga diiringi dengan meningkatnya produksi tembakau domestik. Dampak positif atas kemudahan memperoleh bahan baku *kretek* secara domestik, maka industri *kretek* tidak goyah menghadapi guncangan krisis ekonomi. Kenyataan ini ditunjukkan dengan gelombang krisis finansial yang melanda Asia Timur dan Tenggara sejak pertengahan 1997 – banyak perusahaan besar dan perbankan ambruk – namun tetap tidak menggoyahkan keberadaan industri *kretek*.²³⁸

Sejak 1998, produk-produk industri *kretek* mendominasi pasar di negerinya sendiri. Periode keemasan *kretek* terus bertahan sampai sekarang dengan menguasai pangsa pasar rokok sebesar 93 persen.²³⁹ Selama 1990-an, jumlah produksi rokok kretek memang sudah melejit di atas 150 miliar batang per tahun, sedangkan rokok putih hanya dapat menembus 67 miliar batang (lihat **tabel 3.37**). Hanya rokok kretek yang dikerjakan dengan tangan – dikenal sebagai rokok *klobot* atau *klembak* – tidak dapat melampaui 10 miliar batang. Bahkan, Gappri memproyeksikan, jumlah produksi rokok secara nasional selama 2011 mencapai 300 miliar batang.²⁴⁰

Tabel 3.37 Perkembangan Produksi Rokok di Indonesia 1996 - 2001 (juta batang)				
No	Rokok Kretek	Rokok Putih	Klobot/ Klembak	Total
1996	159.500	53.640	6.146	219.286
1997	169.121	55.973	7.900	232.994
1998	167.005	69.464	8.510	244.979
1999	163.665	67.380	7.400	238.445
2000	164.483	66.706	6.700	237.889
2001	168.071	69.423	6.500	243.994
Sumber: Indocommercial (1999; 2002)				

Dengan perkembangan industri *kretek* yang terus meningkat produksinya dan menguasai pangsa pasar di negerinya sendiri, telah menciptakan strukturnya seiring mekarnya sejumlah perusahaan sebagai raksasa di antara ribuan perusahaan industri *kretek* yang terkonsentrasi di Jawa Timur

²³⁸ Topatimasang, Roem, Puthut EA, dan Hasriadi Ary (eds), *Op.cit.*, hal. 3-5.

²³⁹ Lihat “Fahmi: Akuisisi BAT Membuka Pasar Rokok Kretek di Luar Negeri,” *kontan.co.id*, Senin, 22 Juni 2009 | 19:07 WIB; dan “Pelajari Industri Rokok Sebelum Sahkan RPP Tembakau,” *beritasatu.com*, Kamis, 05 Juli 2012 | 06:00.

²⁴⁰ Lihat “Produksi Rokok Diproyeksi Capai 300 Miliar Batang,” *indonesiainfancetoday.com*, Kamis, 24 November 2011.

dan Jawa Tengah namun juga tersebar di berbagai daerah. Menurut Sumarno dan Kuncoro,²⁴¹ struktur industri *kretek* ini berciri oligopolis dengan konsentrasi tinggi. Dengan menggunakan CR4 (*concentration ratio*) pada empat perusahaan terbesar, CR8 (rasio konsentrasi pada 8 perusahaan terbesar) maupun Indeks Herfindahl-Hirschman (IHH) struktur ini mempunyai konsentrasi industri lebih dari 60 persen pangsa pasar (lihat **tabel 3.38**).

Tabel 3.38 Konsentrasi Industri Rokok Kretek di Indonesia 1996-1999				
No	CR4	CR8	IHH	Total Firm
1996	0.8109	0.9174	0.3131	191
1997	0.8216	0.9071	0.3207	190
1998	0.6807	0.8206	0.2056	204
1999	0.7891	0.8812	0.2716	206
Rata-rata	0.7756	0.8815	0.2778	
Sumber: Sumarno dan Kuncoro, diolah dari data BPS				

Industri rokok *kretek* yang berstruktur oligopolis tidak mudah dimasuki pelaku baru. Kesulitan atau hambatan untuk masuk (*entry barrier*) mendorong para pelaku industri yang baru lebih memilih akuisisi lewat pasar modal atau pengambilalihan perusahaan secara terbatas.²⁴² Inilah celah yang digunakan oleh Philip Morris, BAT, serta KT & G untuk masuk ke dalam kancah persaingan industri *kretek*, dengan mengandalkan kekuatan finansial mereka.

Industri *kretek* juga mengalami periode yang sulit baik ketika diawali dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menarik pajak dan bea seiring krisis ekonomi dunia yang disebut Depresi Besar, disusul penghancuran banyak perkebunan oleh penguasa militer Jepang dan berbagai dislokasi sebelum dan sesudah terbentuknya RI²⁴³ maupun kembalinya BAT yang beriringan dengan diberlakukannya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan ditambah pula ketegangan antara Gappri dan BPPC, serta gelombang krisis finansial yang menyapu Asia Timur dan Tenggara, industri *kretek* tetap menunjukkan ketangguhannya untuk tetap bertahan dalam berbagai guncangan. Salah satu faktornya adalah karena rokok *kretek* menggunakan muatan lokal (*local content*) lebih dari 90 persen dan menguasai pangsa pasar 93 persen. Seperti kata orang Betawi, “kretek nggak ada matinye!”

Namun demikian, tantangan itu kelihatannya akan berlanjut dengan kebijakan pemerintah lewat *road map* dengan kenaikan tarif cukai secara rutin, pemberlakuan PP No. 109/2012, desakan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO, kampanye anti tembakau, serta kebijakan proteksi dan larangan impor rokok *kretek* oleh sejumlah pemerintah asing.

²⁴¹ Dengan metode rasio konsentrasi (*concentration ratio*), struktur pasar bersifat oligopolis. Lihat Simon Bambang Sumarno dan Mudrajad Kuncoro, “Struktur, Kinerja, dan Kluster Industri Rokok Kretek: Indonesia, 1996-1999”, <http://website.mudrajad.com/sites/default/files/softcopies/Struktur,%20Kinerja,%20dan%20Kluster%20Industri%20Rokok%20Kretek%20Indonesia,%201996-1999.pdf> (diakses pada 30 Maret 2013).

²⁴² Topatimasang, Roem, Puthut EA, dan Hasriadi Ary (eds), *Op.cit.*, hal. 11-12.

²⁴³ Farchan Bulkin, “Nasib Publik dalam Sebuah Republik,” *Prisma*, No. 8, Agustus 1984.

Tantangan ini disingkap lebih garang oleh beberapa kalangan sebagai konspirasi global yang berupaya menyeret industri *kretek* ke dalam kehancuran atau digulung oleh para raksasa dunia.²⁴⁴ Inilah dinamika global yang mengisi perkembangan industri rokok Indonesia yang melibatkan lebih banyak elemen yang terlibat.

3.7.2. Warisan budaya

Sudah lebih 100 tahun industri rokok *kretek* tumbuh, memainkan peranan dalam perekonomian, melesat dan mendominasi pasar di negeri sendiri, serta sekarang menghadapi tantangan baru terkait regim kesehatan dan perdagangan dunia. Perintis pertama rokok *kretek* pada 1880-an, Haji Djahhari di Kudus, sudah wafat pada 1890. Dua perintis berikutnya di permulaan abad ke-20 – Haji Nitisemito (*Bal Tiga*) di Kudus dan Liem Seng Tee (*Dji Sam Soe* dan *Sampoerna*) di Surabaya – yang meletakkan fondasi industri *kretek* juga sudah berlalu. Dekade 1950-an, generasi berikutnya, Oei Wie Gwan membangun pabrik yang memproduksi *Djarum* di Kudus dan Tjou Ing Hwie membentangkan operasi *Gudang Garam* di Kediri, yang sekarang menjadi raksasa industri *kretek* modern yang menembus pasar dunia.²⁴⁵

Lintasan sejarah yang dilewati industri *kretek* mengalami periode pasang-surut. Persaingan yang keras telah membawa mereka ke arena yang dinamis, namun sekaligus pula memercikkan kerusuhan dan terus bertahan di masa perang dunia. Terpaan krisis ekonomi dunia yang berulang kali menghantam, tidak juga mengubur seluruh yang sudah ditanamkan setapak demi setapak itu kendati tidak sedikit yang rontok. Demikian pula kebijakan para pemerintah baik dalam menarik cukai maupun dalam memperlakukan, mulai dari masa Hindia Belanda sampai sekarang tetap kokoh bertahan. Para raksasa dunia pun tergiur mengambil alih perusahaan-perusahaan industri *kretek* tersebut.²⁴⁶

Tak dapat disangkal bahwa industri *kretek* merupakan karya cipta bangsa Indonesia yang dirintis dari Kudus, dengan riwayat yang unik. Haji Djahhari disebut-sebut sebagai yang pertama kali meraciknya menjadi *kretek* pada 1880-an. Dari seorang penderita asma – mengoleskan sekujur dada dan punggungnya dengan minyak cengkeh – penyakitnya lambat laun pun berlalu. Lantas diuji-coba rajangan cengkeh dicampur tembakau, kemudian dilinting menjadi rokok. Eksperimen asap rokok yang mengandung cengkeh ini terhisap masuk ke rongga dada hingga proses pengobatan berlangsung lebih cepat.²⁴⁷ Dengan riwayat ini selain asmanya lebih cepat sembuh, Djahhari juga menemukan formula atau resep rokok yang unik, yakni *kretek* yang kelak temuannya terwariskan sampai sekarang.

Warisan Djahhari telah melahirkan beberapa raksasa nasional seperti industri *kretek* Sampoerna, Djarum, Gudang Garam, Bentoel, dan Nojorono, namun dua di antaranya sudah jatuh ke tangan raksasa dunia. Kendati demikian, banyak pihak berupaya pula menjadikan *kretek* sebagai

²⁴⁴ Abhisan DM, Hasriadi Ary, dan Miranda Harlan, *Membunuh Indonesia, Konspirasi Global Penghancuran Kretek*, Jakarta: Kata-Kata, 2011; dan Wanda Hamilton, *Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, Yogyakarta: INSISTPress, 2010.

²⁴⁵ Topatimasang, Roem, Puthut EA, dan Hasriadi Ary (eds), *Op.cit.*, hal. 139.

²⁴⁶ *Ibid.*, hal. 139-140.

²⁴⁷ Kodrat Wahyu Dewanto dkk, *Divine Kretek, Rokok Sehat: inovasi Dr. Gretha Zahar, Prof. Sutiman Bambang Sumitro, Drs., M.S., D.Sc.*, Jakarta: Masyarakat Bangsa Produk Indonesia, 2011.

identitas produk Indonesia seperti halnya cerutu dengan Kuba yang melekat sebagai simbol.²⁴⁸ Salah satu komunitas yang ikut ambil bagian dalam menyebarkan *kretek* ke luar Jawa pada 1970-an adalah sejumlah transmigran yang sudah merasa cocok dengan cita rasa khas dan selera mereka terhadap apa yang terkandung dalam *kretek*. Dan sejumlah pabrik rokok *kretek* kecil pun muncul di luar Jawa.

Konsumsi *kretek* terus meningkat setiap tahun. Sejak pertama kali menjadi industri produksi massal, *kretek* telah mendapatkan tempatnya pada segmen pasar tertentu. Komoditas ini terus-menerus meluas pasarnya, tidak lagi seputaran Kudus, Kediri, Malang, dan Surabaya, bahkan menembus tapal batas negeri dengan ekspor. Produksi sudah hampir menembus 300 miliar batang.²⁴⁹ WHO menyebutkan, ada sekitar 75 juta penduduk Indonesia yang mengkonsumsi rokok, dengan menghabiskan 225 miliar batang dan membelanjakan uang mereka sebanyak Rp 100 triliun per tahun.²⁵⁰ Mereka tidak hanya menikmati rokok dalam acara-acara hiburan atas kumpul-kumpul sambil nongkrong di berbagai tempat, dalam berbagai pertemuan dan *ngobrol*, saat istirahat dari bekerja, dalam suatu kenduri dan sehabis makan, pentas-pentas musik dan pertandingan olahraga, serta menikmati perjalanan, bahkan sampai saat melepas hajat. Banyak lapisan dan status sosial dari berbagai usia dan lintas budaya membentuk gaya hidup merokok, khususnya *kretek*.²⁵¹

Warisan Djamhari itu tidak hanya dipancangkan fondasinya oleh para pemilik ladang dan perusahaan, namun juga diolah banyak pekerja – dari ladang-ladang tembakau dan cengkeh sampai pabrik – dengan mengerahkan tenaga kerja mereka untuk memproduksi produk akhir: *kretek*. Dari tangan-tangan mereka yang menghasilkan *kretek*, produk ini tersebar ke para distributor, berbagai supermarket, pasar-pasar, toko-toko, kios-kios, gerobak-gerobak dorong, dan pedagang asongan. Dari hasil kerja mereka pula, miliaran batang *kretek* menembus pasar ekspor seperti ke Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Turki, beberapa negeri di Timur Tengah dan Eropa, serta AS. Bahkan, banyak pula warga AS seperti “jatuh cinta” kepada *kretek*.²⁵²

Memproduksi dan merasakan keberadaan *kretek* juga menimbulkan kebanggaan. Ahli waris pemilik *Bal Tiga* merasa bangga atas apa yang sudah dirintis Nitisemito yang kemudian mendapat sebutan sebagai “Raja Kretek”.²⁵³ Masih dari Kudus, kebanggaan juga terungkap

²⁴⁸ Rusdi Mathari, “Cerita Sebatang Cerutu,” *beritasatu.com*, Selasa, 13 Desember 2011 | 09:58. Lihat juga, “Soekarno soal Cerutu Kuba, Che dan Castro,” *merdeka.com*, Rabu, 13 Juni 2012 08:05:00; “Lelang Kotak Cerutu Kuba buat Dana Kesehatan,” *antaranews.com*, Senin, 4 Maret 2013 12:43 WIB; dan “Meski Krisis, Penjualan Cerutu Kuba di Spanyol Meningkat,” *republika.co.id*, Rabu, 27 Februari 2013, 09:00 WIB.

²⁴⁹ Lihat “Produksi Rokok Diproyeksi Capai 300 Miliar Batang,” *indonesiainfancetoday.com*, Kamis, 24 November 2011.

²⁵⁰ Lihat “Belanja Rokok Rakyat Indonesia Rp 100 Triliun Per Tahun,” *skalanews.com*, Selasa, 07 Ags 2012 12:50 WIB; “Masyarakat Indonesia Belanjakan Rp.100 Triliun untuk Rokok,” *poskotanews.com*, Senin, 6 Agustus 2012 13:25:16 WIB; dan “Indonesia, Urutan 3, Konsumen Rokok Terbesar di Dunia,” *poskotanews.com*, Minggu, 15 April 2012 21:42:31 WIB.

²⁵¹ Rudy Badil, *Kretek Jawa: Gaya Hidup Lintas Budaya*, Jakarta: Gramedia, 2011.

²⁵² Lihat “Mayoritas Penduduk Amerika Serap Rokok Kretek Indonesia,” *antaranews.com*, Minggu, 17 Oktober 2010 16:15 WIB.

²⁵³ Lihat Alex Sumaji Nitisemito, *Raja Kretek Nitisemito*, Kudus, 1980; dan “Nitisemito ‘Raja Rokok Kretek’ Asal Kudus (1),” <http://sendang-kapit-pancuran.blogspot.com/2012/01/nitisemito-radja-rokok-kretekasal.html#>. *UVgmBTdykgq* (diakses pada 29 Maret 2013).

dengan julukan “Kudus Kota Kretek”.²⁵⁴ Tidak ketinggalan, Kudus juga menghadirkan sebuah museum yang memamerkan sejarah industri *kretek* dengan berbagai peninggalan masa lalu seperti koleksi peralatan kerja pengolahan tembakau dan cengkeh, produk dan mereknya, serta koleksi foto-foto para pengusaha *kretek* dan tontonan film dokumenter. Museum Kretek Kudus yang berdiri pada 1986 itu terletak di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati Kudus di atas lahan seluas 2 hektar.²⁵⁵ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus telah membuka museum ini sebagai obyek wisata sejarah rokok *kretek* dan diminati wisatawan asing.²⁵⁶

Tidak hanya Kudus yang menghadirkan penggalan-penggalan sejarah industri rokok *kretek* dalam sebuah museum, melainkan juga Surabaya. Namun berbeda dengan Kudus – tanpa butuh waktu lama sesudah diakuisisi – museum di Surabaya berdiri pada 2010, dengan memamerkan perjalanan Hanjaya Mandala (HM) Sampoerna sebagai perusahaan yang memproduksi rokok *kretek* yang didirikan Liem Seeng Tee pada 1913. Nama museum yang terletak di lahan Taman Sampoerna ini adalah House of Sampoerna, menempati bangunan megah yang berdiri pada 1862 dan sudah direnovasi. Lantai dua bangunan ini beroperasi pabrik, sehingga museum ini beraroma rokok *kretek*. Dalam pabrik ini sedikitnya 3.000 pekerja perempuan yang memproduksi rokok. House of Sampoerna juga memiliki program Surabaya Heritage Track (SHT). Dengan menggunakan bus ber-AC dan ditemani pemandu, para pengunjung dibawa berkeliling kota Surabaya untuk wisata sejarah secara gratis.²⁵⁷

Kedua museum itu sekaligus pula menampilkan diri sebagai warisan budaya (*heritage of culture*).²⁵⁸ Namun yang lebih penting lagi adalah menjadi sarana pengetahuan terkait berbagai barang peninggalan dan dokumen-dokumen sebagai catatan perkembangan industri *kretek* dengan hulunya adalah proses penanaman di ladang-ladang tembakau dan cengkeh. Museum Kretek Kudus sudah mengembangkan fasilitas edukasi ilmu pengetahuan dan sosial-humanis berupa Techno Hall dan Pojok Buruh Rokok.²⁵⁹ Aspek pengetahuan dari kedua museum ini dapat mendeskripsikan atas berlangsungnya proses pembentukan lapisan pengusaha industri rokok nasional secara independen²⁶⁰ – tanpa sokongan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah –

²⁵⁴ Lihat “Kudus, Kota Kretek Kaya Pesona Wisata,” *okezone.com*, Senin, 22 Februari 2010 18:14 wib; “Museum Kretek Sebagai Penegas Identitas Kudus Kota Kretek,” *detik.com*, Kamis, 14 Juli 2011 10:00:54 WIB; dan “Kabupaten Kudus,” http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus (diakses pada 31 Maret 2013).

²⁵⁵ Lihat “Mengenal Sejarah Rokok Kretek di Museum Kretek Kudus,” *travel.detik.com*, Senin, 19 Maret 2012 15:02:00 WIB; dan “Museum Kretek,” http://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Kretek (diakses pada 31 Maret 2013)

²⁵⁶ Lihat “Museum Kretek Kudus Dibuka untuk Wisatawan,” *tempo.co*, Senin, 13 September 2010 | 11:38 WIB; “Dinas Budpar Jadikan Museum Kretek Kudus Tempat Wisata,” *elshinta.com*, Minggu, 22 Agustus 2010 17:39 WIB; “Sejumlah Pengunjung Banyak Koleksi Rokok di Museum Kretek Kudus,” *bisnis-jateng.com*, Jumat, 16 November 2012; dan “Wisatawan Asing Minati Museum Kretek Kudus,” *kompas.com*, Selasa, 3 Juli 2012 | 13:37 WIB.

²⁵⁷ Lihat “Museum Beraroma Rokok,” *kompas.com*, Minggu, 17 April 2011 | 09:15 WIB. Dalam museum ini prestasi wakil Sampoerna juga diabadikan, yakni penampilan 234 pekerja termasuk para perempuan pelinting rokok memukau penonton Tournament of Roses di Pasadena, California, Amerika Serikat, di tahun 1990 dan 1991.

²⁵⁸ Lihat “Kretek yang Dianggap Sebagai ‘Heritage,’” *kompas.com*, Rabu, 6 Juni 2012 | 09:17 WIB; dan “Rokok Kretek Warisan Budaya Bangsa,” *surabaya.tribunnews.com*, Rabu, 16 Januari 2013 14:33 WIB.

²⁵⁹ Lihat “Museum Kretek Kembangkan Techno Hall,” *kompas.com*, Kamis, 28 April 2011 | 20:12 WIB. Techno Hall merupakan taman pintar mini yang mengedepankan teknologi informasi, sehingga para pengunjung dapat memperoleh pengetahuan baru dari permainan-permainan berbasis teknologi. Sedangkan Pojok Buruh Rokok, dikemas melalui acara-acara atau kunjungan khusus. Pengembangan ini menampilkan sosok buruh rokok yang sedang melinting atau membatil, juga diorama kehidupan dan kegiatan petani tembakau dan para buruh rokok.

²⁶⁰ Lihat “Sampoerna: Warisan Teladan Liem Seeng Tee,” *koelitinta.com*, 19 April 2010.

mengaitkan diri ke hulu secara internal atau domestik dengan proses pengolahan tembakau dan cengkeh yang menghidupi perkebunan rakyat. Dengan modal kecil dan teknologi pelinting kayu untuk memproduksi SKT, secara perlahan dan bertahap, mereka kemudian tumbuh menjadi konglomerat baru dengan basis industri *kretek*.²⁶¹

Kebanggaan atas produksi Indonesia juga pernah dipertontonkan secara demonstratif oleh mantan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, yang seorang diplomat ulung. Beliau diutus menghadiri penobatan Ratu Elizabeth II – didampingi suaminya Pangeran Philip yang bergelar Duke of Edinburg – pada Juni 1953 di Istana Buckingham, Inggris. Konon, di sela-sela Pangeran Philip melepas ketegangan, Agus Salim menghampirinya seraya menghisap dan mengayun-ayunkan rokok *kreteknya* di sekitar dan tercium hidung sang pangeran. Sehingga terjadi percakapan unik di antara mereka untuk mencairkan suasana dan sekaligus mendorong pengaren bersikap ramah:

Pangeran Philip: “Dari mana bau tidak sedap itu datang?”

Agus Salim: “Adakah Yang Mulia mengenali aroma rokok ini? Yang Mulia, bau yang tidak sedap itu adalah bau rokok *kretek* yang sedang saya hisap yang dibuat dari tembakau dan cengkih. Boleh saja yang mulia tidak menyukainya. Tapi justru bau inilah yang menarik minat pelaut-pelaut Eropa mengarungi lautan mendatangi negeri kami tiga abad yang lalu.”²⁶²

Demikianlah, *kretek* bukan hanya sekadar rokok yang pada umumnya dikenal orang di seluruh dunia dengan rokok putih, juga bukan cerutu yang sepenuhnya tembakau, melainkan rokok yang mengandung bahan baku lain: cengkeh. Perbedaan lainnya adalah bunyinya ketika dihisap. Karena hisapan nyala rokok ini berbunyi khas, “*kretek...kretek...kretek!*” Bunyi ini keluar dari efek terbakarnya potongan biji cengkeh yang tergulung dan bercampur dengan rajangan kering daun tembakau. Namun sebelum dikenal dengan sebutan bunyinya ‘*kretek*’, lebih dulu orang mengenalnya dengan sebutan ‘*rokok cengkeh*’.²⁶³

Riwayat industri *kretek* itu dapat tumbuh karena dipenuhi oleh dua sisi. Di satu sisi tersedia kondisi-kondisi yang diperlukan dalam konteks kolonialisme Belanda yang mewardahi, serta di satu sisi lain muncul pandangan atau gagasan kreatif di masyarakat lokal terhadap jenis rokok yang berbeda. Dengan daya ciptanya yang merupakan perpaduan antara pengalaman budaya yang diperkenalkan atau dipenetrasi dari luar dengan kreativitas lokal yang melakukan sebuah eksperimen dari pengalaman sendiri, maka pada momen dan tempat yang tepat menghasilkan produk budaya yang unik dan khas yang disebut *kretek*.²⁶⁴

²⁶¹ Lihat “Museum Beraroma Rokok,” *kompas.com*, Minggu, 17 April 2011 | 09:15 WIB; “Sampoerna: Warisan Teladan Liem Seeng Tee,” *koelitinta.com*, 19 April 2010; dan “Sejarah Sampoerna,” http://www.sampoerna.com/id_id/about_us/pages/the_history_of_sampoerna.aspx (diakses pada 31 Maret 2013).

²⁶² Rhoma Dwi Aria Yuliantri, “Agus Salim: Menghisap Kretek Saat Penobatan Ratu Elizabeth II,” *belajarsejarah.com*, 30 September 2009; “H Agus Salim, Pecandu Rokok Kretek yang Jago Diplomasi,” *wartanews.com*, Rabu, 18 Agustus 2010 20:12 WIB; dan Waskiti G Sasongko, “Kretek Sebagai Kritik Kebudayaan,” *zhithoetheque.wordpress.com*, Sabtu, 24 Desember 2011.

²⁶³ Amen Budiman dan Onghokham, *Op.cit.*, hal. 106. Rokok putih berbahan tembakau Virginia, Burley, dan Oriental), sebaliknya *kretek* merupakan racikan antara tembakau dengan cacahan cengkeh dan tambahan saus. Tembakau untuk sigaret *kretek* pun sangat beragam, bahkan mencapai lebih dari tiga puluh jenis tembakau.

²⁶⁴ Waskiti G Sasongko, “Kretek Sebagai Kritik Kebudayaan,” *zhithoetheque.wordpress.com*, Sabtu, 24 Desember 2011. Rujukannya dipetik dari Denys Lombard, Denys Lombard, *Nusa Jawa: Batas-batas pembaratan*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Dulu, pada awal abad ke-17, cengkeh di Maluku seperti Ternate, Tidore, dan Ambon, menjadi arena perebutan dan perang dagang sampai Perserikatan Perusahaan Hindia Timur (Vereenigde Oostindische Compagnie – VOC) melakukan monopoli rempah-rempah.²⁶⁵ Sesudah VOC bangkrut dan penguasa Hindia Belanda dirundung kesulitan ekonomi, maka Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) dijalankan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch sejak 1830 untuk mengangkat hasil kerja rodi ini ke Belanda dan Eropa untuk menggerakkan industrialisasi. Salah satu tanaman yang ditanam secara besar-besaran di sekitar Semarang adalah tembakau. Tahun 1856, penanaman tembakau meluas di daerah Besuki, Pasuruan, Jawa Timur. Tahun 1858, diperluas lagi dengan penanaman jenis tembakau cerutu lainnya di Klaten. Sedangkan di luar Jawa, ditanam tembakau jenis pembungkus cerutu di daerah Deli pada 1863. Selang 20 tahun kemudian, muncul *kretek* dari buah tangan Haji Djamhari dan Haji Nitisemito merintisnya produksi industri *kretek* sebagai komoditas yang diproduksi secara massal.²⁶⁶

Selain serpihan cengkeh dalam tembakau, juga terkandung saus. Cengkeh memberi rasa sedikit pedas, kemudian saus menambah rasa yang lain. Membubuhkan kadar rajangan cengkeh dan jenis saus ini hanya sedikit yang mengetahuinya, sehingga menjadi resep rahasia.²⁶⁷ Saus sebagai perasa mencirikan selera dan kepekaan, sebagaimana kegemaran yang tercermin dalam tradisi mengunyah sirih pinang yang ditambahkan perasa gambir, cengkeh atau rempah lainnya untuk menghasilkan rasa sedap dan gurih. Semula taburan rasa sedap dalam *kretek* tidak diimpor, namun seiring membesarnya perusahaan mereka, penyedap rasa ini pun didatangkan dari luar negeri. Ada yang mencampurkan esens buah manis seperti strawberry dan raspberry, namun ada pula memberi cita rasa pedas dengan menaburkan kayu manis. Dan pilihan selera konsumen *kretek* ini sesuai dengan cita rasa dari masing-masing produk industri *kretek*.

Rokok cengkeh, *kretek* itu hadir bersama banyak orang baik sebagai komoditas maupun dalam berbagai aktivitas pribadi dan pergaulan sosial. Sobary²⁶⁸ mengisahkan, sebungkus *kretek* yang dibeli menjadi milik pribadi sang pembeli. Dalam pergaulan sosial, barang milik pribadi itu dibuka, dan ketika sang pemilik menyulut *kretek* itu, yang lain pun mengambil sebatang, dan menyulutnya dengan rasa kekeluargaan yang nyaman. Individu lebur ke dalam kolektivitas, tanpa menghilangkan ciri identitas dan aspirasi pribadi. Dengan *kretek* in pun menjadi kekuatan pengikat kebersamaan mereka. Jauh sebelumnya, *kretek* adalah karya, cipta, dan wujud kreativitas bangsa – para perintis, pengusaha yang menanamkan modalnya serta lapisan pekerja yang sudah banting tulang – yang memiliki pertautan ke hulu di mana petani dan buruh tembakau dan cengkeh memproduksi untuk diolah menjadi produk dan terus menguatkan industri *kretek*.

Kaitan ke hulu itu direfleksikan oleh kerja petani dan buruh tembakau di Desa Legoksari, Temanggung. Pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, proses penanaman tembakau

²⁶⁵ Nurediyanto, “Eugenia Aromatica,” *topix.com*, Senin, 6 Februari 2012. Cengkeh di Cina digunakan untuk berbagai macam pengobatan. Bijinya juga dikembangkan sebagai terapi penyakit jantung.

²⁶⁶ Sebelum kertas rokok menggantikan pembalutnya, banyak jenis rokok yang dicirikan dengan pembalut bukan kertas, seperti *klobot* (daun jagung) di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta *kawung* (daun dari pohon aren) di Jawa Barat. Jenis rokok lainnya adalah *klembak menyen* yang diracik dari tembakau dengan akar klembak – tumbuhan obat laksatif (menenangkan) – ditambah dengan sedikit kemenyan.

²⁶⁷ Mark Hanusz, *Op. cit.*, hal. 90.

²⁶⁸ Mohamad Sobary, “Kretek sebagai Warisan kebudayaan,” *sindonews.com*, Senin, 24 Desember 2012 - 06:38 WIB.

diawali terlebih dulu dengan kepercayaan dan ritual mereka. Mereka menggelar tikar dan mengelilingi sesajen dalam nampan yang satu berisi buah-buahan dan satu lagi berisi rokok. Sedangkan yang khusus berisi dua nasi tumpeng – lengkap dengan ayam utuh (*ingkung*) dan ayam cemani – yang juga ditancapkan lidi-lidi yang sudah ditemplei uang kertas. Selain kepada Tuhan, mereka mengucapkan rasa hormat kepada Ki Ageng Makukuhan yang dipercaya sebagai orang pertama yang membawa bibit tembakau di wilayah Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Prau. Ritual ini juga diakhiri dengan pemanduan oleh seorang pemuka agama yang berlangsung dengan khidmat, sebelum mereka menyantap hidangan dan membawa bibit-bibit tembakau untuk ditanami di lahan-lahan yang sudah disiapkan.²⁶⁹ Mereka adalah orang-orang yang menghasilkan tembakau terbaik dan berkualitas tinggi.

Warna kebudayaan juga ditampilkan dalam menyatakan *kretek* sebagai bagian dari mereka dengan suasana yang riang. Dengan *kretek*, Kudus sudah menuai pengakuan. Pada dekaan 1990-an, sering mengalun bait dolanan anak yang begitu populer di kalangan siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), khususnya dalam kegiatan Pramuka. Alunan bait-bait yang mengumandang dalam nyanyian mereka:²⁷⁰

*Kota Kudus, kota kretek
Kota Kudus, tempat kami
Di sinilah, di sinilah
Di sinilah, tempat kami*

*Rokok kretek industri asli
Jenang Kudus tak asing lagi
Mari kawan mari kemari
Datanglah ke kota kami.*



²⁶⁹ Puthut EA, "Hikayat Negeri Tembakau," *National Geographic Indonesia*, Desember 2012, hal. 44.

²⁷⁰ Lihat "Kretek, Warisan Dunia Asli Indonesia," <http://puskindo.blogspot.com/2012/07/kretek-warisan-dunia-asli-indonesia.html> (diakses pada 30 Maret 2013).

Bab 4

**Kontribusi Atas Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya**



- 4.1. Kewajiban Pemerintah
 - 4.1.1. Tersedianya sumber daya industri
 - 4.1.2. Memenuhi dan melindungi hak
- 4.2. Kontribusi bagi Hak atas Pekerjaan
 - 4.2.1. Kontribusi untuk pekerjaan
 - 4.2.2. Sebaran petani tembakau
 - 4.2.3. Sebaran pekerja rokok
- 4.3. Kontribusi bagi Hak atas Upah dan Tunjangan
- 4.4. Kontribusi bagi Hak atas Jaminan Sosial
- 4.5. Kontribusi dalam Kebudayaan

Sejak permulaan millennium atau abad ke-21, industri pengolahan tembakau dan cengkeh – yang menghasilkan rokok yang disebut *kretek* – sedang berada di masa keemasannya sampai sekarang dengan dominasi pangsa pasar hingga 93 persen di negerinya sendiri.¹ Industri ini tumbuh sejak permulaan abad ke-20 yang sudah dirintis pada akhir abad ke-19 – dengan modal kecil-kecilan yang justru diabaikan oleh pengusaha Belanda (Eropa) – di masa kolonial Hindia Belanda. Kemudian industri ini mengalami pasang-surut, ditandai oleh kerusuhan sosial sebagai dampak dari persaingan yang keras dan posisi pemerintah Hindia Belanda yang menindas golongan bumiputra. Mereka yang terlibat dalam industri ini merasakan masa-masa dua perang dunia, menderita kehancuran pada perkebunan seiring tertancapnya kepentingan penguasa fasisme Jepang untuk tujuan memenuhi kebutuhan perang Asia-Pasifik, mengalami dislokasi ekonomi sebelum dan sesudah terbentuknya Republik Indonesia (RI),² dan memberikan kontribusi penting bagi perjalanan RI pada 1959 mencapai 18,2 persen total pajak dan bea.³ Industri *kretek* juga dikesampingkan dalam kebijakan pemerintah Orde Baru seiring diberlakukannya UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan mengucurnya utang luar negeri terutama lewat Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang terbentuk pada 1967. Namun, ketika “rejeiki nomplok” pada periode *oil boom* – sejak pertengahan 1970-an sampai awal 1980-an – terbuka celah untuk memperoleh pinjaman lunak yang menggairahkan kembali pertumbuhan perusahaan-perusahaan industri *kretek*. Tantangan dan ketegangan masih mereka hadapi menyusul beroperasinya VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) produk regim Soeharto – Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) – yang melakukan monopoli pembelian dan perdagangan cengkeh selama dekade 1990-an.⁴ Sampai akhirnya, krisis financial menyapu Asia Timur dan Tenggara yang berdampak secara politis: Soeharto jatuh bersama BPPC dan kroni-

¹ Lihat “Ini Peluang Besar Rebut Pasar Kretek RI,” *viva.co.id*, Rabu, 17 Juni 2009, 10:04; dan “Akuisisi Bentoel, BAT Incar Pasar Kretek Indonesia,” *finance.detik.com*, Rabu, 17 Juni 2009 11:04 WIB.

² Farchan Bulkin, “Nasib Publik dalam Sebuah Republik,” *Prisma*, No. 8, Agustus 1984.

³ Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Jakarta : Sinar Harapan, 1982.

⁴ Andrew Rosser, *Politics of Economic Liberalization in Indonesia: State, Market and Power*, London: Curzon Press, 2002; Budi Pranoto Sudjanadipradja, “Analisis Karakteristik Pasar Cengkeh, Konflik BPPC-GAPPRI, dan Penghormatan Kebijakan BPPC pada Pelaku Pasar Cengkeh Indonesia: Studi Kasus Ekonomi Politik,” <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=110463&lokasi=lokal> (diakses pada 1 April 2013); Ketut Rindjin, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, Jakarta: Gramedia, 2004, hal. 111-112. Lihat juga, “BPPC Bubar, Uang Petani Raib,” *Xpos*, No 07, Thn. III, 5-12 Maret 2000; dan “Cengkeh Berbau Tommy Soeharto,” *detik.com*, Rabu, 23/05/2007 17:02 WIB.

kroni bisnis yang sudah dibesarkannya.⁵ Industri kretek tetap bisa bertahan, bahkan menunjukkan kemajuan pesatnya sesudah krisis finansial itu.

Lebih dari itu, berbeda dengan banyak jenis industri yang tumbuh di Indonesia, industri *kretek* adalah yang paling tua sesudah industri gula. Bahkan berbeda pula dengan industri gula, industri *kretek* justru mampu mendominasi pasar di negerinya sendiri. Lagi pula, industri *kretek* tidak pernah dikuasai oleh pengusaha Belanda di masa kolonial Hindia Belanda. Industri *kretek* menunjukkan kaitan yang besar dari hulu ke hilir, sehingga tidak bergantung kepada impor bahan baku, karena muatan lokal (*local content*) mencapai lebih 90 persen.⁶ Bukan hanya pasar di negerinya sendiri yang didominasi, melainkan juga menembus pasar ekspor dengan 30 negeri tujuan⁷ dan nilai 400 juta dollar AS.⁸ Secara provokatif dinyatakan, penerimaan negara dari pajak dan cukai rokok – bila ditabung dalam 10 tahun – bisa digunakan untuk bayar utang.⁹ Karena setiap tahun, pemerintah senantiasa mengecap kenaikan pendapatan dari cukai rokok.¹⁰ Di sini pula letak ketangguhan industri *kretek* dalam menghadapi berbagai guncangan krisis dan gejolak politik.

Selain kontribusinya terhadap penerimaan negara dari cukai dan pajak lainnya maupun devisa, bagaimana membentuk industri yang tangguh, maka industri *kretek* juga memberikan kontribusinya terhadap lapangan kerja, upah dan tunjangan, serta tanggung jawab sosial dan partisipasi dalam kebudayaan. Berapa banyak orang yang menggantungkan hidup mereka dalam industri pengolahan tembakau – perkebunan tembakau dan cengek, serta industri rokok kretek – berdasarkan kaitan hulu ke hilir? Berapa banyak kontribusinya terhadap kemajuan social dan budaya sebagai wujud tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility* – CSR) mereka? Berapa pula perkiraan efek ganda (*multiplier effect*) atas peranan industri pengolahan tembakau itu?

⁵ William Curt Hunter, George G. Kaufman, Thomas H. Krueger (eds.), *The Asian Financial Crisis: Origins, Implications and Solutions*, New York: Springer, 1999; Suryadi A Radjab, Praktik Bisnis Culas Gaya Orde Baru, Jakarta: Grasindo, 1999, hal. 30-32; Lepi T Tarmidi, “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran,” <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/427EA160-F9C2-4EB0-9604-C55B96FC07C6/3015/bempvol1no4mar.pdf> (diakses pada 1 April 2013); Nurul Widyaningrum dkk, *Pola-pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2003, hal. 99; “Bau Skandal di Komisi V DPR,” *Xpos*, No 09, Thn. III, 20-26 Maret 2000.

⁶ Ahmad Khairul, “Potensi Kemandirian Nasional yang Terabaikan,” <http://komunitaskretek.or.id/?p=253> (diakses pada 1 April 2013); “Kretek: Ketangguhan Industri yang Teruji,” *zhithrotheque.wordpress.com*, Senin, 22 Oktober 2012; dan “Komunitas Kretek Keluhkan Polemik Kebijakan Anti Tembakau,” kominfo.jatimprov.go.id, Selasa, 27 September 2011 | 20:30.

⁷ Lihat “Oow, Rokok Kudus Diekspor ke 30 Negara,” republika.co.id, Kamis, 09 Februari 2012, 22:40 WIB; dan “Ekspor Nonmigas Kudus Didominasi Rokok,” antarajateng.com, Selasa, 08 Januari 2013 15:16:12 WIB. Ekspor rokok dari Kudus juga masih dapat menembus Amerika Serikat (AS), dengan nilai yang mencapai 8,65 juta dollar AS pada 2011. Paling tinggi ekspor ke Malaysia sebesar 17,59 juta dollar, dan diikuti Singapura sebesar 12,37 dollar AS. Total ekspor rokok pada 2011 sebesar sebesar 49,26 juta dollar, sedangkan pada 2012 turun menjadi hanya 22,81 juta dollar AS.

⁸ Lihat “Ekspor Rokok RI Capai Rp 3,6 Triliun, Paling Besar ke Kamboja,” finance.detik.com, Kamis, 16 Desember 2010 14:14 WIB. Kamboja mengimpor rokok dari Indonesia dengan nilai lebih dari 150 juta dollar per tahun. Selama Januari-September 2010 sudah tembus mencapai 357,05 juta dollar atau naik 25,8 persen dari periode yang sama tahun 2009 yang mencapai 283,75 juta dollar AS. Sedangkan total ekspor rokok di tahun 2009 tembus 410,49 juta dollar AS.

⁹ Lihat “Rokok Bisa Bayar Utang Negara,” surabayapost.co.id, Jumat, 17 Desember 2010 | 11:05 WIB.

¹⁰ Lihat “Cukai Rokok Naik, Bea Cukai Kantongi Tambahan Rp 2 Triliun di 2011,” finance.detik.com, Jumat, 03 Desember 2010 16:55 WIB.

4.1. Kewajiban Pemerintah

Hak-hak manusia (*human rights*) tidak hanya hak-hak sipil dan politik, namun juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak manusia merupakan suatu klaim yang berdasar, sah (*legitim*) bagi setiap orang baik berdasarkan moral atau kesepakatan, ataupun perjanjian dan hukum.¹¹ Hak-hak ini saling bergantung (*interdependent*) dan tidak terpisahkan (*indivisible*) satu sama lain.¹² Dalam konsep dan norma hak-hak manusia, dikenal istilah kewajiban negara (*obligation of the state*). Secara umum, kewajiban negara ada tiga, yaitu kewajiban menghormati (*obligation to respect*), kewajiban melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban memenuhi (*obligation to fulfil*).

Namun khusus dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pekerjaan, negara lebih terlibat dengan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak tersebut.¹³ Pemerintah diwajibkan [a] menyusun perencanaan dan langkah-langkah (*to take steps*) berdasarkan indikator hasil sebagai kewajiban berbuat (*obligation of conduct*), dan [b] merealisasikan atas apa yang sudah direncanakan dengan memaksimalkan ketersediaan sumber daya (*to the maximum of their available resources*) sebagai kewajiban meraih hasil (*obligation of result*). Dengan demikian, negara (*state*) dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bersifat sebagai realisasi yang progresif (*progressive realization*).¹⁴

Berdasarkan konsep dan norma hak-hak manusia, tidaklah menjadi kewajiban pihak lain kecuali negara, terutama pemerintah yang menanggung kewajiban dan tugas untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya hak atas pekerjaan. Pemerintah tidak boleh tanpa rencana, sebaliknya berkewajiban menyusun rencana merealisasikan hak ini. Selain itu, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak atas pekerjaan supaya tidak mengakibatkan orang-orang yang bekerja kehilangan pekerjaan mereka. Maka, dalam kaitan ini pemerintah ditantang untuk pertama-tama memenuhi hak atas pekerjaan dengan menyediakan lapangan-lapangan kerja. Namun ketika muncul persoalan terkait ketegangan atau perselisihan, maka sedikitnya pemerintah wajib mempertahankan atau melindungi hak atas pekerjaan.

Tabel 4.1 membedakan tiga kewajiban itu. Pertama, dengan sifat non-material, kebebasan (*freedom*) setiap orang hanya dapat dinikmati bila negara menghormatinya, dengan tindakan tanpa melakukan campur tangan. Negara harus menahan atau mengekang diri untuk berbuat. Kedua, dalam pergaulan sosial dapat timbul perselisihan, bahkan tindak kekerasan, sehingga kehadiran atau peran negara diperlukan sebatas menegakkan keadilan (*justice*). Ketiga, peran negara lebih diperlukan dengan tujuan supaya setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau mencapai kesejahteraan (*welfare*), karena diasumsikan sumber-sumber daya material bersifat terbatas. Yang terakhir inilah hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus dipenuhi baik

¹¹ Naning Mardiniah, Harry Wibowo, Rahadi T Wiratama, dan Wildan Pramudia., *Memeriksa Kewajiban Negara: Instrumen Monitoring Hak atas Pendidikan dan Kesehatan*, Jakarta: LP3ES, 2006, hal 1.

¹² Lihat "Human Rights Principles," <http://www.unfpa.org/rights/principles.htm> (diakses pada 2 April 2013).

¹³ Lihat *Frequently Asked Questions on Economic, Social and Cultural Rights (Fact Sheet No. 33)*, Geneva: Office of the United Nations, High Commissioner for Human Rights, 2008.

¹⁴ Lihat "What are the Obligations of States on Economic, Social and Cultural Rights?" <http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/WhataretheobligationsofStatesonESCR.aspx> (diakses pada 1 April 2013).

untuk bertahan hidup (*survival*) demi mencegah kekerasan (*violence*) maupun menjadi sejahtera (*well-being*) demi menghindari kesengsaraan (*misery*).

Tabel 4.1 Relasi Hak-hak Manusia dan Kewajiban Negara		
No	Pemegang Hak	Pengemban Kewajiban
1	Manusia (orang/ kelompok orang)	Negara (semua aparat negara)
2	Menikmati kebebasan (<i>freedom</i>)	Kewajiban menghormati (<i>obligation to respect</i>)
3	Memperjuangkan keadilan (<i>justice</i>)	Kewajiban melindungi (<i>obligation to protect</i>)
4	Kebutuhan atas kesejahteraan (<i>welfare</i>)	Kewajiban memenuhi (<i>obligation to fulfill</i>)
Sumber: diolah dari Harry Wibowo, 2005		

Kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu terkandung dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan ini sudah menjadi hukum nasional sesudah diratifikasi melalui legislasi UU No. 11/2005. Dalam kovenan ini pertama-tama yang ditekankan adalah pemenuhan hak atas pekerjaan (*right to work*) sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 6. Pekerjaan yang dimaksud berlaku secara umum untuk semua orang, kecuali anak, tanpa dibatasi oleh posisi atau kedudukan dalam relasi kerja seperti posisi pengusaha dan pekerja, petani, nelayan, pegawai negara, birokrat, politisi, dan sebagainya. Kovenan ini memberikan perhatian yang cukup banyak terhadap orang-orang yang bekerja sebagai buruh atau pekerja upahan (*wage labour*),¹⁵ yakni terkandung dalam Pasal 7-9 (lihat **tabel 4.2**). Hak-hak lainnya adalah hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.

Tabel 4.2 Hak-hak dalam Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11/2005)		
No	Pasal	Hak-hak dalam Kovenan
1	Pasal 6	Hak atas pekerjaan
2	Pasal 7	Hak atas upah, kehidupan yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, jenjang karir, istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja
3	Pasal 8	Hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat buruh dan hak mogok
4	Pasal 9	Hak atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial
5	Pasal 10	Hak membentuk keluarga, perempuan dan anak, kesehatan reproduksi
6	Pasal 11	Hak atas standar kehidupan yang layak: pangan, sandang dan perumahan
7	Pasal 12	Hak atas kesehatan (fisik dan mental); pengurangan kematian ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit endemik
8	Pasal 13	Hak atas pendidikan
9	Pasal 14	Kewajiban negara dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan gratis

¹⁵ Secara spesifik, hak-hak buruh dan berbagai ketentuannya secara internasional dirinci dalam berbagai Konvensi ILO (International Labour Organization).

Tabel 4.2 | Hak-hak dalam Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11/2005)

No	Pasal	Hak-hak dalam Kovenan
10	Pasal 15	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, mengescape kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan, memperoleh manfaat dan perlindungan atas karya ilmiah, sastra atau seni

Sumber: Disarikan dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

4.1.1. Tersedianya sumber daya industri

Industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia bukanlah perjalanan yang singkat, melainkan sudah melampaui seabad. Lintasan perjalanannya sangatlah panjang dan mengandung kekhasan lokal yang mencirikan kaitan identitasnya dengan Nusantara, keterkaitan hulu ke hilir yang kuat, dan dinamikanya yang terus menyertainya sampai sekarang.

Sebelum *kretek* muncul, paling tua adalah perladangan cengkeh yang mengobarkan motif kongsi dagang VOC dalam mengeruk untung ekonomi dengan melakukan monopoli dagang untuk menguasai aliran cengkeh di Maluku, bahkan dengan cara brutal melakukan pembuangan, pengusiran dan pembantaian terhadap penduduk Pulau, serta mempekerjakan tenaga mereka yang ditaklukkan sebagai budak.¹⁶ Kemudian, disusul dengan penanaman tembakau secara besar-besaran yang berlangsung secara ekstra-ekonomi di bawah program ekonomi raksasa Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) selama 1830-1870 yang menyedot demikian banyak surplus yang diangkut ke Eropa.¹⁷ Dalam periode ini dapat ditunjukkan tanaman produksi di Karesidenan Rembang di mana salah satunya adalah tembakau yang mengalami peningkatan produksi selama 1841-1844 (lihat **tabel 4.3**).¹⁸ Sehingga relasi dagang antara Hindia Belanda dengan Jerman sudah berlangsung lebih 120 tahun, khususnya dengan perusahaan tembakau di Bremen.¹⁹

Tabel 4.3 | Hasil Panen Padi dan Tanaman Kedua di Rembang 1841-1845 (dalam pikul)

Tahun	Padi	Kopi	Tebu	Tembakau	Kanel
1841	976.575	1.036,5	7.576	5.631	377
1842	941.253	682	9.153	8.596	742

¹⁶ Lihat "Sejarah Aktivitas Kolonial dan Monopoli Pergadangan VOC di Nusantara (1602-1800)," <http://www.sejarahnusantara.com/sejarah-nusantara/sejarah-aktivitas-kolonial-dan-monopoli-pergadangan-voc-di-nusantara-1602-1800-10023.htm> (diakses pada 2 April 2013).

¹⁷ Tania Murray Li, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 92-95.

¹⁸ Tri Handayani, "Petani dan Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang pada Periode Penanaman Tanaman Wajib," http://eprints.undip.ac.id/19807/1/Petani_dan_Tembakau_Gupernemen-Tri_Handayani.pdf (diakses pada 2 April 2013).

¹⁹ Lihat "Setelah Ratusan Tahun, Lelang Tembakau Pindah dari Bremen ke Sumut," <http://amti.or.id/2010/08/setelah-ratusan-tahun-lelang-tembakau-pindah-dari-bremen-ke-sumut/> (diakses pada 2 April 2013); "Perusahaan Jerman Akui Kualitas Tembakau Deli Terbaik Di Dunia," *tribunnews.com*, Jumat, 21 Desember 2012 20:40 WIB; dan "Tembakau Indonesia Laris Manis di Pasar Internasional," *kompas.com*, Senin, 24 Desember 2012 | 10:33 WIB.

Tahun	Padi	Kopi	Tebu	Tembakau	Kanel
1843	959.647	2.546	10.706	11.589	973
1844	518.559	1.938	5.037	17.390	973
1845	911.811	1.514	-	-	496
Rata-rata	861.569	1.420,5	8.118	10.801,5	712,2

Sumber: TNI, 1849, I. *Residentie Rembang in het jaar 1845*, hal. 410 (dikutip dari Tri Handayani, http://eprints.undip.ac.id/19807/1/Petani_dan_Tembakau_Gupernemen-Tri_Handayani.pdf)

Selain Rembang, Karesidenan Kedu merupakan daerah penghasil tembakau sejak beroperasinya Sistem Tanam Paksa. Salah satu daerah penghasil tembakau di bekas karesidenan ini adalah Kabupaten Temanggung di mana ketika panen bisa beredar uang lebih Rp 1 triliun. Dengan mengandalkan produksi dan perdagangan tembakau, kabupaten ini termasuk peringkat tujuh dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2005 dan meningkat pada 2007 (lihat **tabel 4.4**). Angka harapan hidup Temanggung lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten di karesidenan ini. Berpenduduk 716.295 orang (2008), pola hidup, asupan gizi, dan tingkat kesehatan lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) cukup tinggi, sebesar 72,47 persen kendati sebagian besar penduduk mengesampingkan pendidikan SD.²⁰ Ladang-ladang tembakau telah menjadi salah satu sumber daya ekonomi yang penting bagi sebagian penduduk Temanggung dalam mencapai hidup yang lebih sejahtera.

Kabupaten/ Kota	2005		2006		2007	
	Kedu	Jateng	Kedu	Jateng	Kedu	Jateng
Kebumen	5	24	5	23	5	23
Purworejo	4	20	4	17	4	18
Wonosobo	6	29	6	27	6	27
Magelang	3	15	3	15	3	17
Temanggung	2	7	2	5	2	6
Kota Magelang	1	4	1	3	1	3

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2008 (dikutip dari Roem Topatimasang dkk, 2010)

Sedangkan sebagian penduduk di Kabupaten Minahasa – berpenduduk 301.857 orang (2008) – mengerahkan tenaga kerja mereka dalam memproduksi tanaman cengkeh. Seiring bangkrutnya VOC, tanaman cengkeh yang semula berasal dari gugusan pulau-pulau kecil di Kepulauan Maluku, menemukan lahan yang cocok di jazirah Sulawesi Utara itu. Belakangan tanaman ini

²⁰ Topatimasang, Roem, Puthut EA, dan Hasriadi Ary (eds.), *Kretrek: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota*, Yogyakarta: Indonesia Berdikari, 2010, hal. 18-22.

merupakan persilangan antara cengkeh Ternate dengan cengkeh asal Madagaskar. Pada awal abad ke-20, roda perekonomian Minahasa yang berbasis cengkeh bangkit kembali beriringan dengan tumbuhnya industri *kretek* di Jawa. Namun pada 1990-an, kejayaannya terganggu gara-gara kebijakan monopoli cengkeh regim Soeharto Orde Baru yang mempersembahkannya kepada BPPC. Kemudian, seiring berakhirnya regim ini produksi cengkeh kembali bangkit, bahkan menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan pemerintah Minahasa maupun kesejahteraan warga setempat. Perputaran uang ketika musim panen setahun berkisar Rp 300 – 600 miliar, namun ketika panen raya (2-3 tahun sekali) mencapai Rp 1,32 triliun.²¹ Kabupaten ini salah satu sumber daya ekonomi yang terbentang di ladang-ladang yang menyebarkan aroma cengkeh.

Lebih belakangan adalah industri rokok *kretek*. Konon, perintis pertama adalah Haji Djamhari sekitar 1870-1880, seiring berakhirnya Tanam Paksa. Kemudian dengan kemunculan perintis berikutnya, pada 1906, Haji Nitisemito yang juga berasal dari Kudus, dengan menggenjot dan memproduksi *kretek* ini sampai memperoleh tempat yang lebih meyakinkan di pasar domestik. Memproduksi *kretek* pun menjadi kebanggaan, sehingga mendorong lahirnya perusahaan rokok, baik bersekala kecil maupun menengah dan besar di wilayah Pantura tengah. Selain milik Nitisemito ada juga pusat industri rokok di Jawa Vorstenlande (kekeratonan Surakarta dan Yogyakarta) dan Lembah Brantas (Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Malang).²² Pada periode awal pertumbuhan, industri *kretek* yang dimulai dari Kudus, menyebar pula ke Surabaya sejak 1913.

Dengan demikian, jauh sebelum negara Republik Indonesia (RI) terbentuk, industri pengolahan cengkeh, tembakau dan *kretek* sudah lebih dulu memainkan perannya dalam mengembangkan kreasi dan daya cipta kebudayaan maupun menancapkan fondasi ekonominya yang kokoh. Tidak sedikit dari penduduk di sekitar perkebunan cengkeh dan tembakau, serta industri rokok *kretek* yang diserap sebagai pekerja. Memang semula, cengkeh dan tembakau – sebagai bagian dari kepentingan dagang perusahaan Belanda – diekspor ke Eropa untuk industri farmasi dan pengolahan tembakau. Namun dengan kecerdikan sejumlah orang Kudus, kedua komoditas ekspor ini diracik dalam produk yang dikenal ‘rokok cengkeh’, yang kemudian populer dengan sebutan *kretek*. Hampir seluruh sumber daya untuk produksi dapat dipenuhi kebutuhannya hanya di dalam negeri.

Industri pengolahan tembakau dan cengkeh itu juga pernah mengalami masa paling gelap ketika Indonesia diduduki penguasa fasisme-militerisme Jepang. Banyak lahan perkebunan dan ladang-ladang rakyat dipaksa mengabdikan kepada kepentingan penguasa. Sebagian besar petani dipaksa menanam tanaman pangan. Banyak pula penduduk dipaksa bekerja sebagai *romusha* demi

²¹ *Ibid.*, hal. 44-52. Lihat juga, Mark Hanusz, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Jakarta: Equinox Publishing (Asia), 2000. Riwat cengkeh Madagaskar adalah bibit dan benih pohon cengkeh yang dicuri Pierre Poivre (1719-1786) dari Kepulauan Maluku, dan lewat pemerintah Perancis – Kesultanan Zanzibar di Kepulauan Madagaskar – mengizinkan Poivre menanam cengkeh itu. Dalam produksi cengkeh, pendapatan kotor petani lebih Rp 74 juta dan biaya produksi Rp 21,5 juta, sehingga penghasilan bersihnya Rp 51,8 juta per hektar selama dua tahun, atau Rp 2,1 juta per bulan.

²² Rudy Badil, *Kretek Jawa: Gaya Hidup Lintas Budaya*, Jakarta: Gramedia, 2011, hal. 139. Lihat juga, “Tiga Buku Kretek Lengkapi Sejarah Kudus,” *kompas.com*, Minggu, 9 Oktober 2011 | 15:30 WIB. Selain buku karangan Rudy Badil, terdapat pula buku Mark Hanusz yang berjudul *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, dan karya Hasyim Asy’ari dan Abdul Jalil berjudul *Kudus Kota Kretek Sejak 1880*.

melayani kepentingan perang Jepang.²³ Namun, industri ini mampu bangkit kembali dari kehancuran, bahkan berhasil menyetorkan kontribusi dari total pajak dan bea sampai 18,2 persen pada 1959.²⁴ Perlahan tapi pasti, setengah abad kemudian, industri *kretek* menggapai masa keemasannya dengan mendominasi 93 persen pangsa pasar di negerinya sendiri.²⁵ Industri ini tidak hanya mampu bertahan dan bangkit dari krisis ekonomi, namun juga kerusuhan sosial dan kebijakan penguasa yang paling mencekik sekalipun.

Industri *kretek* mempunyai sejarah panjang. Lebih dari itu mempunyai kaitan dari hulu ke hilir yang lengkap, sehingga tidak bergantung kepada impor.²⁶ Belum ada yang melakukan penelitian untuk dapat menghitung berapa banyak nilai seluruhnya – uang, tenaga kerja, sumber daya lainnya, dan hasil penjualan produk yang ditanamkan kembali – yang sudah ditanamkan dalam industri pengolahan tembakau dan cengkeh sepanjang riwayatnya. Namun, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) coba menghitungnya hanya sebatas investasi yang dijumlahkan pada 2010 saja. Perkiraanannya, nilai investasi industri rokok kretek berjumlah Rp 250 triliun yang tersebar dalam 3.000 perusahaan.²⁷ Struktur industri rokok – dengan mempertimbangkan penguasaan pasar – yang bersifat oligopolis, menyulitkan pemain atau pelaku baru yang masuk membangun industri *kretek* yang sama sekali baru, kecuali lewat celah akuisisi atau pengambilalihan di bursa saham.²⁸

Dengan panjangnya proses perjalanan sejarah industri rokok *kretek* itu maka akar-akarnya sudah cukup dalam tertanam dan tersebar di banyak daerah tidak hanya di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun mekar pula di Yogyakarta, beberapa di Jawa Barat. Pengakaran mereka bergandeng tangan dengan perkebunan-perkebunan tembakau dan cengkeh di banyak daerah yang diproduksi oleh banyak pekerja. Industri ini sudah melewati fase-fase yang buruk seperti dihantam gelombang krisis ekonomi, kerusuhan sosial dan ketegangan dengan penguasa monopoli cengkeh, didera oleh dua perang dunia maupun penghancuran perkebunan, dislokasi ekonomi, dan menghadapi berbagai persaingan dan kecurangan. Namun tetap mampu bertahan dengan secara mandiri sampai memperoleh tempat yang sangat meyakinkan di negerinya sendiri.

²³ Aiko Kurosawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo, 1993; Hendri F Isnaeni dan Apid, *Romusha: Sejarah yang Terlupakan, 1942-1945*, Yogyakarta: Ombak, 2008; dan AJ Sumarmo, *Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*, Semarang: IKIP Semarang Pres, 1991.

²⁴ Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Jakarta : Sinar Harapan, 1982.

²⁵ Lihat “Pelajari Industri Rokok Sebelum Sahkan RPP Tembakau,” *beritasatu.com*, Kamis, 05 Juli 2012 | 06:00. Kementerian Perindustrian menyebutkan, konsumen kretek menyumbang 89,3 persen dari total konsumsi rokok nasional. Angka ini bahkan naik menjadi 93 persen pada 2009. Kenaikan ini seiring dengan penurunan angka konsumsi rokok putih dari 10,7 persen menjadi hanya 7 persen.

²⁶ Lihat “Mayoritas Tembakau Petani Diserap Pabrik,” *disbun.jatimprov.go.id*, Kamis, 10 Januari 2013 14:03; dan “Panen Tembakau Petani Diserap Pabrik Rokok,” *kabar24.com*, Rabu, 18 Juli 2012 03:27.

²⁷ Lihat “Mayoritas Penduduk Amerika Serap Rokok Kretek Indonesia,” *republika.co.id*, Senin, 18 Oktober 2010, 03:47 WIB.

²⁸ Lihat “Asing Lebih Memilih Akuisisi Perusahaan Rokok Dibanding Investasi Baru,” *indonesiainancetoday.com*, Senin, 09 Januari 2012; dan “Industri Rokok Diincar Karena Molek,” *inilah.com*, Senin, 25 Juni 2012 | 10:00 WIB. Tiga perusahaan rokok kretek telah diakuisisi oleh tiga perusahaan asing, yaitu Philip Morris International Inc membeli PT HM Sampoerna Tbk pada 2005, British American Tobacco Plc (BAT) mengakuisisi PT Bentoel Internasional Investama Tbk pada 2009, serta KT&G Corporation membeli 60 persen saham milik PT Trisakti Purwosari Makmur (TPM) pada 2011.

Tidak hanya sejarahnya yang panjang, namun industri pengolahan tembakau dan cengkeh itu juga telah menyediakan salah satu aset nasional yang sangat penting sebagai sumber daya yang membentang di lahan-lahan perkebunan cengkeh dan tembakau serta industri-industri *kretek* di sejumlah daerah di Indonesia. Tanpa banyak dukungan pemerintah – sejak masa Hindia Belanda sampai sekarang – mampu menggapai masa keemasannya serta menyediakan pundi-pundi pajak dan cukai buat negara. Aset nasional ini terus berputar dan produktivitasnya meningkat yang digerakkan oleh banyak petani dan pekerja untuk mendominasi pasar domestik dan menembus pasar ekspor. Lagi-lagi, dengan ekspor yang meningkat, industri pengolahan tembakau dan cengkeh ini ikut menyumbangkan tambahan devisa negara. Diakui pula bahwa tembakau produksi dari Indonesia termasuk salah satu kualitas terbaik di dunia.²⁹

Selain ekspor tembakau, industri pengolahan tembakau dan cengkeh juga mengeksport rokok, terutama *kretek*. Diperkirakan, nilai ekspor rokok mencapai 400 juta dollar AS atau Rp 3,6 triliun pada 2011, karena relatif naik setiap tahun. Kendati dibayang-bayangi larangan impor dari pemerintah AS, namun nilai ekspor pada 2010 mencapai lebih 400 juta dollar. Ekspor terbesar rokok tertuju pada Kamboja yang mencapai 150 juta dollar, disusul Malaysia, Singapura dan Thailand. Tahun sebelumnya, ekspor rokok menembus 410,49 juta dollar pada 2009.³⁰ Nilai ekspor rokok dari Kabupaten Kudus saja mencapai 61,25 juta dolar AS pada 2012 atau melonjak naik 24,34 persen dibanding nilai ekspor tahun sebelumnya, dengan tujuan ekspor ke 75 negeri.³¹ Sumber daya industri ini menunjukkan kemampuan bersaingnya tanpa khawatir berhadapan dengan produk-produk rokok lainnya di pasar internasional.

Beroperasinya industri pengolahan tembakau dan cengkeh, telah membuat negara memetik nilai pajak dan bea sejak awal abad ke-20. Bila dulu dipetik oleh pemerintah Hindia Belanda, maka sejak pasca-kolonial dipetik oleh pemerintah RI. Perkembangan nilai penerimaan negara dari pajak dan bea ini terus menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun sejak cukai diberlakukan pemerintah Hindia Belanda. Dari setoran cukai rokok saja, tren ini tidak pernah anjlok maupun sama dengan tahun sebelumnya sebagaimana yang diperlihatkan dalam periode 2000-2012 (lihat **grafik 4.1**). Tahun 2000, pemerintah meraup setoran cukai dari perusahaan-perusahaan industri rokok sebesar Rp 11,29 triliun. Selang 12 tahun selanjutnya, penerimaan negara dari cukai sudah mencapai 7,5 kali lipat atau Rp 84 triliun.³² Menurut Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, panen cukai rokok yang dikantongi pemerintah selalu melebihi target.³³

²⁹ Lihat “Indonesia Penghasil Tembakau Kualitas Dunia,” *lensaindonesia.com*, Rabu, 23 Januari 2013 16:23 WIB.

³⁰ Lihat “Ekspor Rokok RI Capai Rp 3,6 Triliun, Paling Besar ke Kamboja,” *finance.detik.com*, Kamis, 16 Desember 2010 14:14 WIB.

³¹ Lihat “Peningkatan Ekspor Rokok Kudus Capai 24,34 Persen,” *beritadaerah.com*, Senin, 25 Februari 2013.

³² Lihat “Pendapatan Cukai Rokok Pemerintah Naik Rp 3 Triliun di 2013,” *liputan6.com*, Jumat, 28 Desember 2012 11:44.

³³ Lihat “Penerimaan Cukai Rokok 2013 Ditarget Rp 100 Triliun,” *republika.co.id*, Rabu, 27 Februari 2013, 22:00 WIB. Dalam APBN 2013, penerimaan cukai ditarget Rp 92 triliun, maka dalam APBN-P 2013, penerimaan cukai diharapkan akan melebihi target, diharapkan bisa mencapai Rp 100 triliun.



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tidak mengherankan bila pemerintah mengakui bahwa setoran cukai rokok menjadi salah satu andalan bagi pendapatan negara. Dalam sebuah kesempatan, Mohammad Sobary mengatakan, industri rokok *kretek* menggerakkan roda perekonomian nasional karena sebagai penyumbang cukai terbesar bagi pendapatan negara.³⁴ Pada 2012, kontribusi cukai rokok ditargetkan sebesar Rp 79,8 triliun,³⁵ namun realisasinya hampir mencapai Rp 90 triliun.³⁶ Dengan terus meningkatnya target maupun realisasi setoran cukai buat pendapatan negara, maka seorang anggota DPR mengusulkan untuk menggenjotnya sampai Rp 100 triliun.³⁷ Peneliti kesehatan masyarakat mengusulkan tarif cukai rokok sebesar 65 persen dari harga jual untuk mengendalikan konsumsi serta memperkuat upaya pembatasan.³⁸

Dengan tarif cukai yang terus meningkat, maka kontribusi perusahaan-perusahaan industri rokok untuk keuangan negara. Kenaikan cukai yang tinggi, memperbesar kontribusi industri rokok kepada pendapatan negara. Panen cukai ini dipetik pemerintah dari daerah-daerah yang banyak beroperasi industri rokok seperti Jawa Tengah (Jateng). Tahun 2012, gabungan Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan kontribusinya sebesar Rp 20 triliun.

³⁴ Lihat “Industri Kretek Penyumbang Cukai Terbesar,” *investor.co.id*, Kamis, 24 Februari 2011 | 17:19.

³⁵ Lihat “Menkeu: Bea Cukai Rokok Masih Jadi Andalan,” *inilah.com*, Senin, 29 Oktober 2012 | 15:09 WIB; dan “Rokok Masih Diandalkan Jadi Sumber Pemasukan Negara,” *finance.detik.com*, Kamis, 05 Juli 2012 15:49 WIB.

³⁶ Lihat “Menkeu: Cukai Tembakau Tak Bisa Terus Jadi Andalan,” *viva.co.id*, Rabu, 12 Desember 2012, 17:59.

³⁷ Lihat “Anggota DPR Minta Cukai Rokok Digenjot Rp 100 Triliun,” *finance.detik.com*, Senin, 12 September 2011 19:05 WIB.

³⁸ Lihat “Cukai Rokok Diusulkan 65% dari Harga Jual,” *indonesiainancetoday.com*, 25 Januari 2013.

Tahun 2013, meningkat lagi dengan target Rp 24,67 triliun, dan sampai Maret sudah terkumpul sebanyak Rp 6,6 triliun. Cukai rokok menyumbang 85 persen total penerimaan Ditjen Bea dan Cukai di Jateng/DIY, sedangkan untuk penerimaan pusat kedua provinsi menyumbang sebesar 30 persen.³⁹

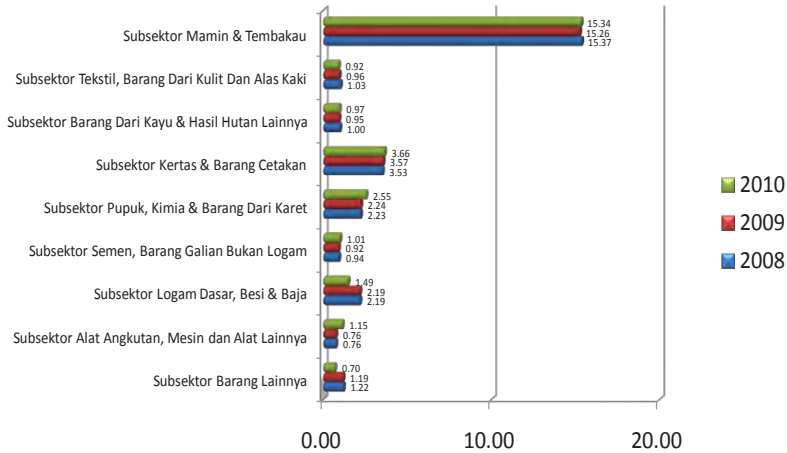
Dengan kontribusi cukai rokok itu, Gappri pun merasa bangga karena nilai setoran cukai rokok jauh lebih besar bila dibandingkan dengan perusahaan tambang emas raksasa PT Freeport Indonesia.⁴⁰ Sumber daya industri rokok telah berbuah dengan kontribusinya bagi pendapatan negara baik dari cukai maupun pajak lainnya. Sumber daya industri ini juga yang membentangkan aktivitas ekonomi dari hulu ke hilir, dari para petani tembakau dan cengkeh beserta buruh-buruh yang dipekerjakan sampai perusahaan industri *kretek* dan buruh-buruh, serta pedagang pengecer dan asongan.

Dalam kaitan hulu ke hilir itulah yang menempatkan industri pengolahan tembakau dan cengkeh sebagai industri yang kuat dan stabil. Provinsi Jawa Timur paling banyak terdapat industri pengolahan tembakau dan cengkeh. Ladang-ladang tembakau dan cengkeh hampir tersebar di seluruh daerah, sedangkan industri *kretek* terkonsentrasi di Surabaya, Malang dan Kediri. Kendati sub-sektor ini digabungkan dalam kelompok makanan dan minuman serta tembakau (Mamin dan Tembakau), namun dapat diperkirakan besarnya volume produksi industri pengolahan tembakau dalam kontribusinya pada industri pengolahan di Jawa Timur, khususnya dalam periode 2008-2010 (lihat **grafik 4.2**). Kelompok industri ini mendominasi dalam industri pengolahan, dan tidak pernah berkurang dari 15 persen.

³⁹ Lihat "Rokok-JatengDIY-Rp-2467-T," *Suara Merdeka*, Jumat, 5 April 2013. Target penerimaan cukai rokok secara nasional mencapai Rp 92 triliun dan dimungkinkan bertambah pada APBN Perubahan.

⁴⁰ Lihat "Setoran Industri Rokok Lebih Besar dari Freeport," *finance.detik.com* Senin, 11/04/2011 15:37 WIB. Bila PT Freeport Indonesia menyetorkan sekitar Rp 20 triliun, maka industri rokok cuma dari cukai saja bisa sampai Rp 70 triliun. Disebutkan, PT Freeport Indonesia yang mengeruk tambang emas di Papua menimbulkan dampaknya luar biasa terhadap lingkungan. Sedangkan industri rokok berdampak secara ekonomi dalam skala yang besar dari hulu ke hilir mulai dari petani, pabrikan, sampai ke pedagang asongan.

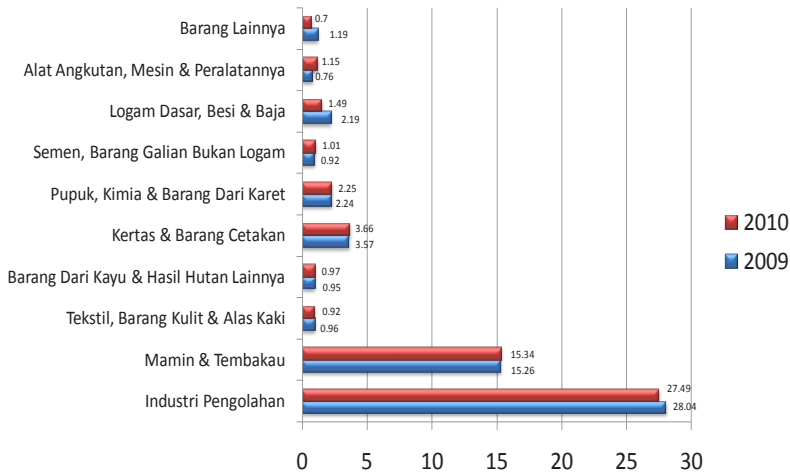
Grafik 4.2 | Kontribusi Sub-Sub Sektor Pada Industri Pengolahan di Jawa Timur 2008-2010



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Bagaimana dengan sumbangan industri pengolahan Mamin dan Tembakau bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur? Dalam periode 2009-2010, kelompok industri pengolahan Mamin dan Tembakau kembali menunjukkan pertumbuhan yang kuat, rata-rata di atas 15 persen per tahun (lihat **grafik 4.3**). Kelompok Mamin dan Tembakau ini jauh meninggalkan kelompok industri pengolahan lainnya. Bahkan untuk kelompok industri kertas dan barang cetakan (rata-rata lebih 3,5 persen) masih terlalu kecil dibandingkan kelompok Mamin dan Tembakau. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan kelompok industri pupuk, kimia, dan barang dari karet maupun kelompok industri semen dan barang galian bukan logam. Artinya, industri pengolahan tembakau dan cengkeh – dengan produk akhirnya rokok *kretek* – menempati kedudukan dan peran yang sangat signifikan dalam memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur.

Grafik 4.3 | Sektor Fokus yang Menjadi Pertumbuhan Ekonomi di Dalam Koridor Ekonomi Jawa Timur 2009-2010



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2010

Dengan besarnya pendapatan dan sumbangan cukai – bukan hasil tambang atau produk pertanian lainnya – produksi industri *kretek* juga mampu menempatkan Kota Kediri sebagai salah satu kota yang menghasilkan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang besar, yakni Rp 202,33 juta. Kota ini menempati urutan keempat di mana terdapat PT Gudang Garam Tbk yang tahun 2010 mencatatkan pendapatan Rp 32,97 triliun (lihat **tabel 4.5**). Kota Bontang di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kabupaten Mimika di Papua adalah peringkat pertama dan kedua sebagai kabupaten/kota yang terkaya di Indonesia yang bersumber dari produksi barang tambang gas alam dan emas. Peringkat ketiga ditempati Jakarta Pusat dengan PDB per kapitas sebesar Rp 224,41 juta.⁴¹

Tabel 4.5 Enam Kabupaten/Kota Terkaya di Indonesia				
No	Kabupaten/Kota	PDB	Upah (per bulan)	Sumber PDB
1	Kota Bontang (Kaltim)	Rp 368,05 juta	Rp 2,15 juta	Badak NGL (gas alam), Pupuk Kaltim, Indominco Mandiri (batu bara), dan industri petrokimia

⁴¹ Lihat “6 Kabupaten Terkaya di Indonesia,” <http://portalunique.blogspot.com/2011/01/6-kabupaten-terkaya-di-indonesia.html> (diakses pada 3 April 2013).

Tabel 4.5 | Enam Kabupaten/Kota Terkaya di Indonesia

No	Kabupaten/Kota	PDB	Upah (per bulan)	Sumber PDB
2	Kabupaten Mimika (Papua)	Rp 295,05 juta	Rp 2,16 juta	PT Freeport Indonesia, dana bagi hasil Rp 424,33 miliar (2009)
3	Jakarta Pusat (DKI Jakarta)	Rp 224,41 juta	Rp 1,92 juta	Berkembangnya bisnis dan jasa
4	Kota Kediri (Jatim)	Rp 202,33 juta	-	PT Gudang Garam Tbk mencatatkan pendapatan Rp 32,97 triliun (2010)
5	Kabupaten Siak (Riau)	Rp 156,35 juta	-	Bersumber migas dan berada di segi tiga pertumbuhan ekonomi "Sijori", dana bagi hasil Rp 993,2 miliar.
6	Kab. Sumbawa Barat (NTB)	Rp 100 juta	-	PDB dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Rp 128,26 juta

Sumber: forumkami.com; portalunique.blogspot.com, 2011

Tidak hanya karena kontribusi perusahaan rokok Gudang Garam yang telah menempatkan Kota Kediri menduduki peringkat empat sebagai kota yang mempunyai PDB tertinggi, namun juga perusahaan-perusahaan dari Kabupaten Kudus yang menunjukkan kontribusi mereka bagi penerimaan negara yang disetorkan melalui pembelian cukai rokok dalam jumlah Rp 15,1 triliun pada 2011.⁴² Tahun berikutnya mencapai Rp 19,7 triliun. Dengan banyaknya perusahaan rokok kretek yang beroperasi, terutama yang besar dan sedang, Kabupaten Kudus dapat meraup produk domestik regional bruto (PDRB) hampir Rp 29 triliun pada 2009 dan pajak tak langsung (netto) lebih dari Rp 12,5 triliun pada tahun yang sama (lihat **tabel 4.6**). Jumlah raihan PDRB maupun pajak tak langsung, sama-sama pula menunjukkan kecenderungan menanjak dari tahun ke tahun dalam periode 2005-2009.

Tabel 4.6 | PDRB dan Pajak Tak Langsung (Netto) Kabupaten Kudus 2005-2009 (dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Tak Langsung
1	2005	19.784.423,33	8.125.331,64
2	2006	21.562.981,38	8.754.806,35
3	2007	24.013.253,71	10.382.104,50
4	2008	27.245.392,30	11.678.481,57
5	2009	28.905.457,00	12.537.956,55

Sumber: Dikutip dari BPS Kabupaten Kudus, 2011

⁴² Lihat "Fakta Seputar Kontribusi Rokok dalam Perekonomian RI," *jaringnews.com*, Sabtu, 7 Juli 2012 12:02 WIB.

Kontribusi setoran cukai lebih lagi disumbangkan oleh PT HM Sampoerna, dengan jumlah Rp 21 triliun pada 2009.⁴³ Sedangkan Kabupaten Temanggung – sebagai penghasil tembakau terbaik dengan kualitas *srintil* – menuai panen setoran cukai yang dialokasi dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp 10,05 miliar pada 2009 atau lebih dari seperempat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemerintah pusat, dan bertambah pada 2010 menjadi Rp 13,67 miliar atau 24,81 persen PAD.⁴⁴ Bahkan ketika panen tembakau di Temanggung sebagai satu titik hulu dari industri pengolahan tembakau, perputaran uang mencapai lebih Rp 1 triliun.⁴⁵

Bentuk pendapatan lainnya bagi pemerintah di daerah adalah reklame. Sebagai salah satu ajang promosi atau iklan yang menjadi pemasukan bagi pemerintah kabupaten atau kota, maka pendapatan dipetik oleh pemerintah Kabupaten Cianjur adalah dari reklame. Kendati dinilai cenderung mengabaikan etika dan estetika maupun bupatinya merasa kesal dengan para perokok yang berpendapatan rendah, namun dari reklame-reklame rokok ini menjadi bagian dari pemasukan pemerintahnya.⁴⁶ Pendapatan dari reklame rokok juga dipetik Pemerintah Kota Yogyakarta, sebanyak 20 persen dari total Rp 6,3 miliar pemasukan.⁴⁷

Sementara itu, dari segi jumlah produksi dan pangsa pasar, industri rokok *kretek* sekarang ini berada dalam masa keemasan. Pada masa ini pula industri pengolahan tembakau dan cengkeh yang menjadi salah satu sumber daya nasional yang penting dan memainkan perannya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial, kini dihadapkan pada kampanye global anti rokok atau tembakau yang melibatkan banyak elemen di dalamnya.⁴⁸ Industri *kretek* dituduh oleh kelompok Tobacco Control Support Center (TCSC) telah mengakibatkan kematian yang mencapai 239 ribu orang per tahun,⁴⁹ sedangkan World Health Organization (WHO) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut tinggi lagi, yakni 300.000 orang.⁵⁰ bahkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut-nyebut – dengan mengutip hasil survei Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) tahun 2007 – angka kematian mencapai 405.720 orang.⁵¹

Angka-angka itu memang kelihatan sebagai sesuatu yang dilebih-lebihkan atau dibesar-besarkan tanpa memberikan suatu solusi. Untuk satu hal saja timbul persoalan, sebut-menyebut angka itu tidak menjelaskan bagaimana kejadiannya? Apalagi angka-angka yang dimaksud lebih dikesankan sebagai faktor tunggal belaka. Namun, Kementerian Kesehatan (Kemkes) mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) supaya Indonesia segera meratifikasi Konvensi Kerangka

⁴³ Lihat “Tembakau, Industri Ratusan Triliun,” *bbc.co.uk*, 24 Mei 2010 - 01:02 GMT.

⁴⁴ Lihat “Fakta Seputar Kontribusi Rokok dalam Perekonomian RI,” *jaringnews.com*, Sabtu, 7 Juli 2012 12:02 WIB.

⁴⁵ Puthut EA, “Hikayat Negeri Tembakau,” *National Geographic Indonesia*, Desember 2012, hal. 47.

⁴⁶ Lihat “Cukai Rokok di Cianjur Perhari Capai Kisaran Rp 15 M,” *kabarancianjur.com*, Kamis, 01 November 2012 05:00.

⁴⁷ Lihat “Rokok Sumbang Pendapatan Iklan Terbesar,” *harianjogja.com*, Jumat, 22 Februari 2013 19:27 WIB.

⁴⁸ Lihat, Wanda Hamilton, *Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, Yogyakarta: INSISTPress, 2010.

⁴⁹ Lihat “Jumlah Kematian Akibat Rokok Sama dengan Korban Tsunami,” *health.detik.com*, Selasa, 18 Desember 2012 16:25 WIB.

⁵⁰ Lihat “Rokok Penyebab Satu Dari 10 Kematian Orang Dewasa,” *antarasulteng.com*, Senin, 18 Juni 2012 18:12 WIB; dan “300.000 Kematian Disebabkan Rokok,” *joglosemar.co*, Rabu, 30 Mei 2012 06:00 WIB.

⁵¹ Lihat “Per Jam, 46 Orang Meninggal Akibat Rokok,” *viva.co.id*, Selasa, 2 Juni 2009, 07:23.

Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) pada Mei 2003.⁵²

4.1.2. Memenuhi dan melindungi hak

Industri pengolahan tembakau dan cengkeh bukan saja sudah menyumbangkan pajak dan bea bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun juga kepada negara RI baik di masa pemerintahan Soekarno dan periode panjang di masa pemerintahan Soeharto maupun sesudah reformasi sampai sekarang. Jumlah pajak dan bea yang disetorkan oleh industri rokok kepada negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah terus menggenjot penerimaan dari cukai tembakau, yang ternyata hasilnya senantiasa melebihi target sebagaimana yang dikemukakan Lembaga Demografi Universitas Indonesia.⁵³ Diakui pula oleh Dirjen Bea Cukai bahwa penerimaan dari cukai rokok masih diandalkan sebagai pemasukan negara.⁵⁴ Dengan setoran ini – dalam rentang 10 tahun menabung – pemerintah bisa menggunakannya untuk membayar utang negara.⁵⁵ Dan sekadar diketahui, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, sebagai salah satu andalan penerimaan negara, cukai rokok menyumbang hampir Rp 90 triliun dari total penerimaan cukai sebesar Rp 130 triliun.⁵⁶

Pemerintah pusat adalah pemegang otoritas dalam penarikan cukai tembakau selain PPh dan PPh.⁵⁷ Namun demikian, dari hasil penerimaan ini pemerintah pusat juga mengalokasikan dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang didasarkan atas UU No. 39/2007 tentang Cukai. Tahun 2012, dana sebesar Rp 1,69 triliun dialokasikan untuk seluruh provinsi, kabupaten dan kota sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 197/2012.⁵⁸ Daerah-daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan penerima alokasi DBH-CHT paling banyak pertama dan kedua.⁵⁹

⁵² Lihat “Kemenkes Desak Kemenlu Ratifikasi KK Pengendalian Tembakau,” *poskotanews.com*, Minggu, 7 Oktober 2012 15:13:05 WIB. Negara yang telah menandatangani sebelum tanggal 29 Juni 2004 disebut ‘telah meratifikasi’ FCTC. Sedangkan negara yang menyetujui setelah batas waktu yang telah ditentukan disebut ‘telah melakukan akses’ FCTC. Akses mempunyai hak yang sama dengan ratifikasi. Menurut Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Kementerian Kesehatan, kebiasaan merokok menyebabkan satu dari 10 kematian orang dewasa di dunia dengan lebih dari 4.000 jenis racun pada tiap batang. Daftar penyakit yang dipicu dari kandungan nikotinnya, di antaranya kanker paru-paru, hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah, infertilitas pria dan juga disfungsi ereksi alias impotensi.

⁵³ Lihat “Kenaikan Cukai Berpotensi Untungkan Negara hingga 4,21%,” *bisnis-kepri.com*, Rabu, 27 Februari 2013; dan “Negara Diuntungkan Kenaikan Cukai Rokok,” *kabarbisnis.com*, Rabu, 27 Februari 2013 | 11:44 wib.

⁵⁴ Lihat “Rokok Masih Diandalkan Jadi Sumber Pemasukkan Negara,” *finance.detik.com*, Kamis, 05 Juli 2012 15:49 WIB.

⁵⁵ Lihat “Rokok Bisa Bayar Utang Negara,” *surabayapost.co.id*, Jumat, 17 Desember 2010 | 11:05 WIB.

⁵⁶ Lihat “Menkeu: Cukai Tembakau Tak Bisa Terus Jadi Andalan,” *viva.co.id*, Rabu, 12 Desember 2012, 17:59.

⁵⁷ Lihat “Pembagian Cukai Rokok Tetap Ditangani Pemerintah Pusat,” *tempointeractive.com*, Sabtu, 05 Maret 2005 | 18:43 WIB. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

⁵⁸ Lihat “Wuih! Daerah Dapat Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp 1,69 T,” *bisnis.liputan6.com*, Rabu, 16 Januari 2013 16:31; dan “Alokasi Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp 1,69 Triliun,” *antaranews.com*, Jumat, 21 Desember 2012 14:17 WIB.

⁵⁹ Lihat Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 115/PMK.07/2010, serta PMK No. 197/PMK.07/2012. Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan daerah-daerah penghasil tembakau dan rokok paling banyak di Indonesia.

Industri pengolahan tembakau dan cengkeh sudah tumbuh sebagai sub-sektor pertanian dan industri yang penting bagi penerimaan negara dari pajak dan bea. Dengan mengerahkan segala sumber daya – membenteng dari pedesaan yang ditumbuhi tanaman tembakau dan cengkeh maupun kota-kota yang digerakkan oleh roda-roda industri *kretek* – telah melibatkan banyak pekerja yang menggerakkan roda ekonomi sub-sektor itu. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kejatuhan dan banyak pula yang muncul dengan mengandalkan modal kecil-kecilan. Namun, perkebunan tembakau dan cengkeh maupun industri *kretek* tidak pernah mati terkubur selamanya, bahkan sebaliknya mampu bangkit dan menggapai masa keemasannya sekarang ini. Pencapaian ini tidak dapat diabaikan dari basis ekonomi yang tersedia pada masa kolonial Hindia Belanda sebagai dimensi obyektif di satu sisi dengan kreativitas budaya masyarakat lokal sebagai dimensi subyektif di sisi lain yang menjadi momentum lahirnya rokok *kretek*.

Kendati demikian, untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya – sesuai perjanjian internasional hak-hak manusia (*international bill of human rights*) – bukanlah kewajiban dan tugas perusahaan-perusahaan atau para pemilik industri pengolahan tembakau dan cengkeh, melainkan kewajiban dan tugas negara terutama pemerintah yang sudah mengesahkan diri sebagai bagian dari negara-negara pihak/perserta (*states parties*) dalam perjanjian tersebut,⁶⁰ karena RI sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui legislasi UU No. 11/2005. Dengan UU ini pemerintah berkewajiban membuat rencana untuk merealisasikan langkah-langkah programatis bagi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya atas setiap orang di Indonesia.

Dalam kaitan ini secara spesifik adalah rencana dan langkah-langkah programatis pemerintah untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan mengerahkan sumber daya industri pengolahan tembakau dan cengkeh yang dipadukan dengan sumber daya pemerintah secara maksimal sesuai pedoman global yang disepakati dalam merealisasikan hak-hak itu. Pemerintah harus mengerahkan sumber dayanya terutama dengan anggarannya untuk dipadukan dengan sumber daya industri pengolahan tembakau dan cengkeh dalam langkah dan tindakan memperluas lapangan kerja, memajukan kebijakan upah dan tunjangan pekerja, serta jaminan sosial dan memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pemerintah tidak hanya berkewajiban dan bertugas memperluas lapangan kerja dan memajukan kebijakan upah dan tunjangan bagi pekerja, melainkan juga memberikan perlindungan terhadap para pekerja ketika mereka menghadapi perselisihan atau dirugikan dalam melaksanakan aktivitas produksi dan pekerjaan lainnya.⁶¹ Pemerintah harus sedapat mungkin mencegah atas kemungkinan terjadinya pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa para pekerja yang diupah. Secara umum, pemerintah harus berperan mencegah orang-orang yang sudah bekerja menjadi kehilangan pekerjaan, termasuk mereka yang terlibat dalam usaha-usaha perkebunan tembakau dan cengkeh. Pemerintah pun harus melindungi lahan-lahan mereka dari penyerobotan atau bentuk pengusuran lainnya yang dapat menimbulkan kerugian atau penghilangan atas pekerjaan dan penghasilan mereka. Demikian pula pemerintah seharusnya

⁶⁰ Lihat Human Rights Committee, General Comment 31, Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004).

⁶¹ Lihat “Kesampingan Pelinting Rokok, Sampoerna Dianggap Melanggar,” *jpnn.com*, Jumat, 23 November 2012, 19:28:00; “Organisasi Pekerja Desak Cabut Ijin MPS Sampoerna,” *inilah.com*, Senin, 11 Februari 2013 | 11:32 WIB; dan “Seribu Buruh PT Djarum Kudus Mogok Kerja,” *republika.co.id*, Rabu, 08 Desember 2010, 21:56 WIB.

menangani mereka kehilangan akibat kebangkrutan pabrik-pabrik.⁶² Tugas pemerintah adalah mengarahkan setiap orang supaya dapat mencapai hidup yang lebih sejahtera, sebaliknya mencegah kesesaraan.

Di samping itu, selain pungutan cukai rokok, pemerintah juga mempetik pendapatan dari perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang bekerja dalam industri pengolahan tembakau dalam bentuk PPN⁶³ dan PPh.⁶⁴ Jumlahnya lebih Rp 100 triliun, sehingga dengan itu pemerintah juga dapat mengalokasikan anggaran untuk program di bidang-bidang lainnya seperti bidang usaha/bisnis yang berbeda, pendidikan, penelitian dan pengembangan, memperluas usaha kecil dan menengah, tidak kecuali sarana kesehatan masyarakat, serta berbagai kegiatan sosial. Bahkan bisa pula digunakan untuk membayar cicilan utang negara.⁶⁵

4.2. Kontribusi bagi Hak atas Pekerjaan

Indonesia bukanlah negeri yang sejahtera. Beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indonesia berada pada ranking 111 dari 182 negeri (UNDP, 2009), daya saing global pada peringkat 54 dari 133 negeri (WEF, 2009), pendapatan per kapita rendah (2.246 dollar AS), dan angka kemiskinan mencapai 31,02 juta (BPS, 2010). Namun industri pengolahan tembakau banyak menyerap tenaga kerja yang mencapai 6,2 juta orang, selain sumbangan bagi penerimaan negara yang bersumber dari cukai sebesar Rp 56,4 triliun pada 2009.⁶⁶

Dalam upaya menggapai negeri yang lebih sejahtera, pemerintah yang dibebankan kewajiban untuk memenuhi ekonomi, sosial dan budaya di satu sisi, sedangkan di sisi lain dalam momen-momen perselisihan atau sengketa ekonomi dan sosial, harus melindungi setiap orang dari kehilangan pekerjaan dan usaha. Pemerintah kelihatannya berniat dan dengan itu menyusun rencananya. Salah satu rencana ini adalah program untuk memenuhi sekitar 4.731.770 orang dalam mendapatkan hak atas pekerjaan sampai 2014, pemerintah membutuhkan nilai investasi sebesar Rp 2.225 triliun yang disusun rencananya oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).⁶⁷

⁶² Lihat "Cukai Tinggi, Ratasan Perusahaan Rokok Gulung Tikar," *liputan6.com*, Sabtu, 16 Juni 2012 14:59; "Tiap Tahun, Pabrik Rokok di Malang Gulung Tikar," *beritajatim.com*, Rabu, 16 Januari 2013 13:06:01 WIB; "1.500 Industri Rokok Kecil Terancam Gulung Tikar," *suaramerdeka.com*, Kamis, 10 Januari 2013 | 21:20 wib; dan "Ribuan Buruh Rokok 'Berguguran'," *liputan6.com*, 12 April 2010 09:25.

⁶³ Lihat "PPn atas Tembakau dan Rokok," <http://noorelaili.blogspot.com/2012/07/ppn-atas-tembakau-dan-rokok.html>, Jumat, 27 Juli 2012 (diakses pada 3 April 2013). Unsur-unsur yang mendukung penarikan pajak rokok, yaitu [1] Penanggung jawab pajak yaitu orang yang diharuskan melunasi pajak (pabrikasi), [2] Penanggung pajak yaitu orang yang memikul beban pajak (agen rokok), dan [3] Pemikul beban pajak yaitu orang yang harus memikul beban pajak (konsumen rokok).

⁶⁴ Bambang Kesit, "Pajak Penghasilan Karyawan," http://fecon.uui.ac.id/images/Hand_Out/Akt/Perpajakan/PJK/pajak%20penghasilan%20karyawan.pdf (diakses pada 3 April 2013); dan Maykel David R, "Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan Tidak Tetap," <http://www.pbtaxand.com/consultations/718-perhitungan-pph-21-untuk-karyawan-tidak-tetap#sthash.Smki45oL.dpbs> (diakses pada 3 April 2013).

⁶⁵ Lihat "Jika Ditabung 10 Tahun, Sumbangan Industri Rokok Bisa Buat Bayar Utang," *finance.detik.com*, Kamis, 16 Desember 2010 12:26 WIB.

⁶⁶ Sutawi, "Gizi, Rokok, dan Karakter Bangsa," <http://sutawi.staff.umm.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=29> (diakses pada 3 April 2013).

⁶⁷ Lihat "Serap 5 Juta Pekerja Butuh Rp 2.000 T," *neraca.co.id*, Rabu, 16/05/2012.

Nilai investasi itu sangatlah besar, angkanya hampir dua kali APBN. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang bergerak memainkan perannya dalam memperbesar kendali (*control*) atas dampak konsumsi tembakau. Dua sisi ini saling bertentangan. Di satu sisi pemerintah membuka lapangan kerja, sedangkan di sisi lain pemerintah akan mengubur lapangan kerja yang sudah terisi. Karena sisi lain ini terdapat jutaan orang yang bekerja atau menggantungkan hidupnya dalam produksi industri pengolahan tembakau dan cengkeh.

4.2.1. Kontribusi untuk pekerjaan

Padahal, apa pun tudingan yang dialamatkan berbagai elemen baik pada tingkat global maupun tingkat nasional, industri pengolahan tembakau dan cengkeh telah memberikan kontribusinya bagi pemenuhan hak atas pekerjaan yang diperoleh jutaan orang. Beberapa versi berikut ini dapat menggambarkan kontribusi industri ini (lihat **tabel 4.7**). Informasi jumlah pekerja ini ada yang tersirat dan ada pula yang tersurat. Gabungan Perserikatan Perusahaan Rokok Indonesia (Gapri) menanggapi rencana pemerintah menaikkan cukai yang dapat mengancam kelangsungan hidup 33 juta buruh.⁶⁸ Partisipasi Indonesia menyebut jumlahnya sebanyak 30,5 juta orang.⁶⁹ Koalisi Nasional Penyelamat Kretek (KNPK) mengklaim bukan hanya petani yang dirugikan, melainkan pekerja oleh pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109/2012, yakni sebanyak 30 juta pekerja.⁷⁰ Seorang pakar tembakau, Syamsul Hadi, yang diundang DPR menyatakan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja dari industri rokok dan yang terkait dengannya mencapai 24,4 juta dengan rincian 1,25 juta orang bekerja di ladang-ladang tembakau, 1,5 juta orang bekerja di ladang cengkeh, dan sekurang-kurangnya 10 juta orang terlibat langsung dalam industri rokok.⁷¹ Mantan Rektor Universitas Jember Prof. Dr. Kabul Santoso MS – juga sebagai pakar tembakau – mengungkapkan, ada sekitar 18 juta orang mulai dari hulu sampai hilir yang hidup dari industri rokok *kretek* di mana sekitar delapan juta orang menggantungkan hidup sebagai petani tembakau.⁷² Sedangkan perkiraan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) lebih kecil lagi, yakni sebanyak hampir 6 juta orang bekerja dalam industri pengolahan tembakau di Indonesia.⁷³

Tabel 4.7 | Jumlah Pekerja Industri Pengolahan Tembakau dan Cengkeh

No	Versi	Jumlah	Sumber
1	Badrul Munir	34 juta orang	<i>Kompas</i> , 21 Juli 2012
2	Gapri	33 juta orang	<i>jejaknews.com</i> , 20 November 2011
3	Partisipasi Indonesia	30,5 juta orang	<i>sumbawanews.com</i> , 23 November 2012

⁶⁸ Lihat “Kenaikan Cukai Ancam 33 Juta Buruh Rokok Indonesia,” *jejaknews.com*, Minggu, 20 November 2011. Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kudus mengemukakan, tahun 2012 cukai rokok dinaikkan sekitar 17 persen. Bersamaan itu target penerimaan pendapatan dari cukai rokok ditetapkan Rp 20 triliun. Sedangkan target tahun 2011 sebesar Rp 17,5 triliun dengan mudah dapat diraih.

⁶⁹ Lihat “Buruh Pabrik Rokok Sampoerna Outsourcing,” *sumbawanews.com*, Jumat, 23 November 2012 - 08:31.

⁷⁰ Lihat “RPP Tembakau Merugikan 30 juta Pekerja Rokok,” *inilah.com*, Jumat, 3 Agustus 2012 | 11:28 WIB; dan “KNPK: 35 Juta Orang Terancam Menganggur,” *republika.co.id*, Selasa, 03 Juli 2012, 18:15 WIB.

⁷¹ Lihat “Fakta Seputar Kontribusi Rokok dalam Perekonomian RI,” *jaringnews.com*, Sabtu, 7 Juli 2012 12:02 WIB.

⁷² Lihat “18 Juta Orang Masih Hidup dari Industri Rokok Kretek,” *surabayapost.co.id*, Rabu, 17/10/2012 | 08:27 WIB.

⁷³ Lihat “Industri Tembakau, Serap 6 juta Tenaga Kerja & Setor Rp 87 Triliun,” *finance.detik.com*, Kamis, 27 Desember 2012 14:26 WIB.

Tabel 4.7 Jumlah Pekerja Industri Pengolahan Tembakau dan Cengkeh			
No	Versi	Jumlah	Sumber
4	KNPK	30 juta orang	<i>inilah.com</i> , 3 Agustus 2012
5	Syamsul Hadi	24,4 juta orang	<i>jaringnews.com</i> , 7 Juli 2012
6	Kabul Santoso MS	18 juta orang	<i>surabayapost.co.id</i> , 17 Oktober 2012
7	AMTI	6 juta orang	<i>finance.detik.com</i> , 27 Desember 2012

Komunitas Kretek mencantumkan ilustrasi atau **gambar 4.1** untuk mendampingi tulisan Gabriel Mahal.⁷⁴ Dengan mengutip dari Ketua Dewan Pertimbangan organisasi HKTI Siswono Yodo Husodo, memperkirakan jumlah petani dan buruh yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam industri rokok mencapai 30,5 juta orang. Perkiraannya, jumlah petani dan buruh tembakau sebanyak 6 juta orang, petani dan buruh cengkeh 1,5 juta orang, serta buruh linting kretek sebanyak 600.000 orang. Gabungan keseluruhannya adalah 30,5 juta orang baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kretek, juga para pedagang eceran, asongan, pekerja industri kreatif dan percetakan. Gambaran ini memperlihatkan banyaknya orang yang menggantungkan hidupnya dalam industri pengolahan tembakau dan cengkeh.

Gambar 4.1 | Jumlah yang Bekerja dalam Industri Pengolahan Tembakau dan Cengkeh



Sumber: komunitaskretek.or.id

Berapa jumlah pekerja yang terlibat dalam industri rokok? Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (SP RTMM) memperkirakan, sebanyak 4 juta orang terlibat langsung sebagai pekerja. Bila setiap pekerja menanggung tiga orang lagi dari anggota keluarganya, maka 24 juta orang yang menggantungkan hidupnya dalam industri rokok.⁷⁵ Sedangkan dalam perkebunan tembakau, jumlahnya orang yang terlibat mencapai 2,5 juta petani.⁷⁶ Data lainnya dihimpun Akhyar Rais dalam tulisannya yang memperkirakan jumlah pekerja yang terserap baik langsung maupun tidak langsung dalam industri rokok pada 2006, secara keseluruhan mencapai

⁷⁴ Gabriel Mahal, "Asal! Bahaya Merokok vs Bahaya Pengangguran," <http://komunitaskretek.or.id/?p=504> (diakses pada 5 April 2013).

⁷⁵ Lihat "Industri Rokok vs Antirokok (1)," *Suara Merdeka*, Selasa, 26 April 2005.

⁷⁶ Lihat "RPP Tembakau Harus Lindungi 2,5 Juta Petani," *inilah.com*, Jumat, 6 Juli 2012 | 15:16 WIB.

sekitar 6,5 juta orang (lihat **tabel 4.8**).⁷⁷ Jumlah petani tembakau adalah yang terbanyak, 2,4 juta orang. Data ini memasukkan pula jumlah pedagang dan pekerjanya, serta jumlah pekerja di bidang percetakan dan transportasi.

Tabel 4.8 Jumlah Pekerja-Petani Industri Pengolahan Tembakau 2006		
No	Sub-sektor	Jumlah
1	Industri rokok	360.000 pekerja
2	Perkebunan tembakau	2.400.000 petani
3	Perkebunan cengkeh	1.500.000 petani
4	Perdagangan	1.200.000 pedagang/pekerja
5	Percetakan, transportasi dll	1.050.000 pekerja
T o t a l		6.510.000 orang

Sumber: Akhyar Rais,
<http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/pdf/sby82.pdf>

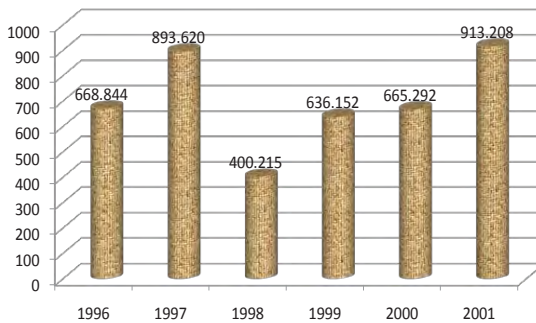
Tidak bisa diingkari bahwa banyak orang yang terlibat dalam rangkaian kerja produksi industri pengolahan tembakau dan cengkeh, yang membentang mulai dari Aceh sampai Papua kendati terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Maluku dan Sulawesi Utara. Kendati tanpa menjadi kewajibannya – sebagaimana halnya negara terutama pemerintah – berbagai industri pengolahan tembakau dan cengkeh telah memainkan perannya dalam memberikan kontribusinya bagi pemenuhan hak atas pekerjaan. Sekitar 6,5 juta orang sudah dipenuhi haknya oleh berbagai perusahaan – bukan atas dasar kewajiban – melainkan karena kebutuhan sebagai implikasi dalam relasinya dengan tenaga kerja (*labour power*) yang saling membutuhkan. Angka ini lebih besar jumlahnya ketimbang rencana pemerintah yang berencana memenuhi kurang dari 5 juta orang untuk mendapatkan hak atas pekerjaan, namun dengan nilai investasi yang mencapai Rp 2.225 triliun.

Berapa banyak kontribusi sub-sektor usaha perkebunan tembakau dalam memenuhi lapangan kerja? Berdasarkan data yang disajikan Widyastuti Soerojo,⁷⁸ selama 1996-2001, sebagian orang yang menggantungkan hidupnya dalam perkebunan tembakau, jumlahnya mengalami fluktuasi. Pada 1996, jumlah petani tembakau sebanyak 668.844 orang. Ketika krisis moneter pada 1997, mengalami peningkatan yang pesat menjadi 893.620 petani, namun sempat anjlok setahun kemudian (lihat **grafik 4.1**). Tahun-tahun selanjutnya kembali menunjukkan kecenderungan meningkat, bahkan mencapai titik tertinggi pada 2001, yakni sebanyak 913.208 orang. Perkebunan tembakau menjadi salah satu sumber ekonomi yang kembali menemukan kebangkitannya sesudah krisis finansial itu. Kebangkitan ini dapat ditarik korelasinya dengan perkembangan industri rokok yang terus menanjak tanpa terpengaruhi oleh krisis yang sempat melanda Asia Tenggara, terutama Indonesia.

⁷⁷ Akhyar Rais, “Prospek Ekspor dan Impor Tembakau,” <http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/pdf/sby82.pdf> (diakses pada 3 April 2013). Bila setiap orang diasumsikan menanggung dua anggota keluarga, maka lebih 18 juta orang menggantungkan hidup dari industri pengolahan tembakau.

⁷⁸ Widyastuti Soerojo, “Benarkah Penanggulangan Masalah Tembakau Dilematis Bagi Indonesia?” <http://www.ifppd.org/detail/newsforum.php?id=7> (diakses pada 5 April 2013)

Grafik 4.4 | Jumlah Petani Tembakau 1996-2001



Sumber: Dikutip dan diolah dari Widyastuti Soerojo
(<http://www.ifppd.org/detail/newsforum.php?id=7>)

4.2.2. Sebaran petani tembakau

Indonesia mempunyai bahan lahan tembakau yang tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan pulau-pulau, perkebunan tembakau terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Bila dilihat dalam **tabel 3.35** (Bab 3), sebaran itu terhampar di 19 provinsi, mulai dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur. Mereka yang terlibat dalam perkebunan tembakau memproduksi sebanyak 214.524 ton pada 2011 dengan lahan seluas 228.770 hektar dan tahun berikutnya 226.704 ton pada lahan seluas 249.781 hektar. Produksi mengalami pertumbuhan sebesar 5,68 persen, sedangkan pertumbuhan luas lahan sebesar 9,18 persen.⁷⁹ Dalam sumber daya produksi inilah para petani dan buruh tani tembakau bekerja menggarap aktivitas produksi.

Grafik 4.4 juga menunjukkan banyaknya orang menggantungkan hidupnya menggarap perkebunan tembakau sebagai petani. Demikian pula mereka yang menjadi buruh-tani tembakau. Namun data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang diakses tidak memasukkan elemen buruh-tani yang terdapat dalam beberapa tabel berikut yang seluruhnya merupakan perkebunan rakyat.⁸⁰ Kendati demikian, berbagai angka yang dikumpulkan, sedikitnya memberikan gambaran tentang kontribusi industri pengolahan tembakau di bagian hulu untuk hak atas pekerjaan.

Tabel 4.9 menunjukkan sebaran jumlah lahan, produksi dan petani yang terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 2010. Sedikitnya 15.582 orang terlibat dalam kegiatan menggarap lahan dalam perkebunan tembakau yang tersebar di 20 kabupaten/kota. Petani

⁷⁹ Lihat “Tabel-3: Produksi, Luas Areal dan Produktivitas Perkebunan di Indonesia,” <http://www.deptan.go.id/Indikator/tabel-3-prod-lsareal-prodvtas-bun.pdf> (diakses pada 10 April 2013).

⁸⁰ Lihat “Perkebunan dan Produktivitas Tembakau di Indonesia Tahun 2010,” http://ditjenbun.deptan.go.id/statistikbun/public/Luas_Areal_dan_Produksi_Perkebunan_report.php# (diakses pada 4 April 2013). Perkebunan tembakau di Sumatera Utara, terutama Deli Serdang yang juga terdapat PTPN II, tidak dicantumkan di sini.

tembakau terbanyak berada di Kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah 5.123 orang. Kedua terbanyak ditempati Kabupaten Simeulue,⁸¹ berjumlah 4.870 orang. Jumlah produksi terbanyak juga dihasilkan dari Aceh Jaya dan diikuti Simeulue. Sedangkan jumlah petani tembakau paling sedikit terdapat di Kabupaten Aceh Singkil, hanya 3 orang. Sebagian mereka juga mengikuti pelatihan yang diadakan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut).⁸²

Tabel 4.9 | Jumlah Lahan, Produksi dan Petani di Aceh 2010

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan	Jumlah Produksi	Jumlah Petani
1	Kab. Aceh Barat	2	1	135
2	Kab. Aceh Barat daya	36	33	24
3	Kab. Aceh Besar	1.103	902	1.524
4	Kab. Aceh Gayo Lues	50	38	295
5	Kab. Aceh Jaya	1.405	1.185	5.123
6	Kab. Aceh Selatan	45	39	18
7	Kab. Aceh Singkil	24	10	3
8	Kab. Aceh Tamiang	125	98	143
9	Kab. Aceh Tengah	786	782	1.042
10	Kab. Aceh Tenggara	1	0	18
11	Kab. Aceh Timur	500	514	1.144
12	Kab. Aceh Utara	109	33	207
13	Kab. Bireun	137	45	38
14	Kota Langsa	324	378	688
15	Kota Lhokseumawe	19	8	118
16	Kab. Nagan Raya	4	3	15
17	Kab. Pidie	45	32	46
18	Kab. Pidie jaya	7	2	73
19	Kab. Simeuleu	1.254	1.078	4.870
20	Kota Sumbulussalam	40	21	58
T o t a l				15.582
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan				

Jawa Barat adalah salah satu provinsi penghasil tembakau yang penting dan sebagian diekspor.⁸³ Jumlah petani di provinsi ini sedikitnya 26.312 orang pada 2010 kendati jumlah sebarannya lebih sedikit dibandingkan Aceh. Perkebunan tembakau tersebar di 14 kabupaten/kota, dengan Garut sebagai kabupaten terluas lahannya, produksi dan jumlah petani tembakau (lihat **tabel 4.10**). Jumlah petani di Garut sebanyak 9.795 orang, diikuti Kabupaten Sumedang dengan 9.706 petani.

⁸¹ Kabupaten ini sama dengan nama pulaunya yang secara geografis terpisah dari Pulau Sumatera. Sebelum BPPC beroperasi, sekitar 1970-1990, kabupaten ini terkenal sebagai penghasil cengkeh. Lihat "Kabupaten Simeulue, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simeulue (diakses pada 10 April 2013).

⁸² Lihat "Aceh Tengah Latih Petani Tembakau," *aceh.tribunnews.com*, Sabtu, 3 November 2012 10:39 WIB.

⁸³ Lihat "Permintaan Ekspor Tembakau Jabar Tinggi," *bisnis.com*, Kamis, 02 Juni 2011 | 10:30 WIB; dan "Jabar Kewalahan Penuhi Pasar Ekspor Tembakau," *tribunnews.com*, Senin, 16 Juli 2012 17:09 WIB. Permintaan pasar ekspor tembakau jenis tembakau hijau dan hitam mencapai 2.000 sampai 3.000 ton per tahun.

Jumlah petani paling sedikit berada di Bandung Barat dan Subang, masing-masing 25 orang. Kontribusi perkebunan tembakau ini juga mendorong dibangun dan dioperasikannya pabrik rokok *kretek* dan rokok putih di Karawang dengan nilai investasi sebesar Rp 2,8 triliun atau setara 300 juta dollar AS.⁸⁴

Tabel 4.10 Jumlah Lahan, Produksi dan Petani di Jawa Barat 2010				
No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan	Jumlah Produksi	Jumlah Petani
1	Kab. Bandung	1.371	1.050	3.252
2	Kab. Bandung Barat	8	6	25
3	Kota Banjar	9	4	36
4	Kab. Cianjur	20	22	105
5	Kab. Ciamis	14	23	140
6	Kab. Cirebon	136	141	205
7	Kab. G a r u t	3.953	3.322	9.795
8	Kab. Kuningan	50	50	198
9	Kab. Majalengka	1.093	906	2.654
10	Kab. Subang	1	0	25
11	Kab. Sukabumi	40	20	43
12	Kab. Sumedang	2.296	2.107	9.706
13	Kab. Tasikmalaya	5	4	58
14	Kota Tasikmalaya	6	3	70
Total				26.312

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan

Dalam industri pengolahan tembakau, Jawa Tengah merupakan provinsi yang menjadi perintis dan peletak dasar-dasar industri *kretek*, dari tanaman tembakau dan cengkeh diolah menjadi rokok *kretek* di Kudus. Provinsi ini juga tertancap dua gunung yang terkait dengan tembakau, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Pada kaki kedua gunung ini tersemayam hamparan tanaman tembakau jenis *srintil* di lereng-lereng gunung itu yang menjadi buah bibir dunia pertembakauan – diibaratkan sebagai tambang “emas hijau” – terdapat di Kabupaten Temanggung dengan perputaran uang yang terbesar.⁸⁵ Sebagian tembakau dari Jawa Tengah diekspor.⁸⁶ Temanggung memang “kabupaten tembakau” dengan jumlah petani terbanyak, yakni 49.528 orang. Kedua terbanyak jumlah petani adalah Kabupaten Kendal. Sebanyak 22 kabupaten/kota menjadi sebaran perkebunan tembakau di Jawa Tengah (lihat **tabel 4.11**). Jumlah

⁸⁴ Lihat “Sampoerna Bangun Pabrik Baru,” *tempo.co*, Selasa, 25 Juli 2006 | 19:36 WIB; “Sampoerna Hari Ini Bangun Pabrik Baru,” *tempo.co*, Kamis, 27 Juli 2006 | 17:14 WIB; “Buruh PT Sampoerna Kembali Demo,” *radar-karawang.com*, Rabu, 20 Maret 2013 | 14.00 dan “Merek-Merek Kami,” http://www.sampoerna.com/id_id/our_products/pages/our_brands.aspx (diakses pada 11 April 2013).

⁸⁵ Lihat “Tembakau Srintil Ibarat Emas Hijau di Temanggung,” *metrotvnews.com*, Selasa, 25 September 2012 | 15:44 WIB. Para petani tembakau di Temanggung tidak pernah diberitakan bangkrut. Ketika panen tiba, satu hektare tembakau berkualitas bagus menghasilkan pendapatan bersih Rp 200 juta bahkan perputaran uang saat itu lebih Rp 1 triliun.

⁸⁶ Lihat “Ekspor Tembakau Krosok Magelang Mandek,” *suaramerdeka.com*, Jumat, 17 Februari 2012 | 15:52 wib.

petani paling sedikit berada di Kabupaten Banyumas. Tembakau produksi mereka banyak diserap pabrik rokok seperti yang dialami ribuan petani Manisrenggo, Klaten.⁸⁷

Tabel 4.11 Jumlah Lahan, Produksi dan Petani di Jawa Tengah 2010				
No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan	Jumlah Produksi	Jumlah Petani
1	Kab. Banjarnegara	540	296	1.308
2	Kab. Banyumas	6	1	26
3	Kab. Batang	194	-	-
4	Kab. Blora	1.261	1.156	2.334
5	Kab. Boyolali	5.190	3.980	16.542
6	Kab. Cilacap	52	10	436
7	Kab. Demak	3.041	1.700	10.085
8	Kab. Grobogan	1.557	810	3.342
9	Kab. Karanganyar	203	167	61
10	Kab. Kendal	7.159	5.053	20.805
11	Kab. Kebumen	339	114	4.867
12	Kab. Klaten	3.322	2.243	15.253
13	Kab. Magelang	6.320	2.372	19.890
14	Kab. Pemasang	220	116	571
15	Kab. Purworejo	243	196	1.097
16	Kab. Rembang	130	91	115
17	Kab. Semarang	894	468	2.289
18	Kab. Sukoharjo	262	305	1.109
19	Kab. Tegal	13	4	20
20	Kab. Temanggung	14.582	6.374	49.528
21	Kab. Wonogiri	465	218	846
22	Kab. Wonosobo	3.365	856	11.034
Total				161.556
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan				

Jawa Timur adalah kantong terbesar dalam produksi tembakau di Indonesia, selain rokok *kretek*. Sebagian tembakau diekspor, bahkan tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi di Eropa. Namun petani hanya khawatir dengan kampanye dan seruan WHO.⁸⁸ Paling banyak diserap oleh berbagai pabrik rokok.⁸⁹ Perusahaan rokok besar membangun lagi beberapa pabrik seperti di Probolinggo dan Lumajang,⁹⁰ Jember,⁹¹ serta Pamekasan.⁹² Jumlah petani sebanyak 423.649

⁸⁷ Lihat "Tembakau Petani Manisrenggo Akhirnya Laku," *solopos.com*, Minggu, 17 Oktober 2010 23:15 WIB.

⁸⁸ Lihat "Ekspor Tembakau Jember Tak Terpengaruh Krisis," *surabaya.tribunnews.com*, Kamis, 21 Juni 2012 17:26 WIB; dan "Ekspor Tembakau Besuki NO Tak Terdampak Krisis Eropa," *lensaindonesia.com*, Jumat, 14 September 2012 02:38 WIB.

⁸⁹ Lihat "Harga Tembakau di Jember Naik, Petani Luar Daerah Berdatangan," *lensaindonesia.com*, Senin, 17 September 2012 20:23 WIB.

⁹⁰ Lihat "Philip Morris Bangun 2 Pabrik Rokok Sampoerna di Jatim," *finance.detik.com*, Rabu, 11 Juli 2012 14:40 WIB; dan "Bangun Dua Pabrik Baru, Sampoerna Buka 8.400 Lapangan Kerja," *neraca.co.id*, Kamis, 12 Juli 2012.

orang, terbanyak di Kabupaten Probolinggo yang berjumlah 92.853 orang (lihat **tabel 4.12**). Kabupaten Bojonegoro adalah yang kedua terbanyak dalam jumlah petani. Kemudian diikuti Pamekasan dan Lamongan. Paling sedikit terdapat di Kabupaten Madiun, yakni hanya 598 orang.

Tabel 4.12 Jumlah Lahan, Produksi dan Petani di Jawa Timur 2010				
No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan	Jumlah Produksi	Jumlah Petani
1	Kab. Banyuwangi	1.388	1.130	3.824
2	Kab. Blitar	450	485	6.297
3	Kab. Bojonegoro	9.664	3.857	66.474
4	Kab. Bondowoso	9.654	3.736	38.363
5	Kab. Jember	13.498	7.235	28.432
6	Kab. Jombang	4.110	604	14.829
7	Kab. Lamongan	5.728	2.053	44.362
8	Kab. Lumajang	1.247	812	5.116
9	Kab. Madiun	217	161	589
10	Kab. Magetan	721	649	1.597
11	Kab. Mojokerto	396	195	1.356
12	Kab. Nganjuk	1.054	433	3.229
13	Kab. Ngawi	1.067	639	5.980
14	Kab. Pacitan	90	-	-
15	Kab. Pamekasan	25.893	10.242	50.454
16	Kab. Ponorogo	547	401	3.569
17	Kab. Probolinggo	11.475	9.805	92.853
18	Kab. Sampang	2.927	1.429	8.288
19	Kab. Situbondo	5.961	4.920	21.751
20	Kab. Sumenep	9.836	3.139	23.154
21	Kab. Tuban	1.465	525	3.132
T o t a l				423.649
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan				

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi penghasil tembakau jenis Virginia dan terbesar ketiga sesudah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagian produksi diekspor. Menurut Gubernur NTB, nilai transaksi tembakau Lombok dari petani ke perusahaan mitra yang berasal dari Jawa Timur, rata-rata mencapai Rp 800 miliar setiap tahun, bahkan pernah menembus Rp 1 triliun dalam masa tiga bulan musim panen.⁹³ Perkebunan tembakau di NTB terkonsentrasi pada dua kabupaten, yaitu Lombok Timur dan Lombok Tengah kendati sebarannya meluas ke delapan kabupaten/kota. Lombok Timur merupakan daerah paling banyak petani tembakau, yakni 20.211 orang (lihat **tabel 4.13**).

⁹¹ Lihat "Pabrik Rokok HM Sampoerna Akan Bangun Di Jember," *infopoljatim.com*, Jumat, 9 November 2012.

⁹² Lihat "Sampoerna Akan Bangun Pabrik Rokok di Pamekasan," *indonesiatobacco.com*, Senin, 11 April 2011.

⁹³ Nilai Transaksi Tembakau Lombok Capai Rp 800 Miliar," *antaramataram.com*, Rabu, 07 Maret 2012 16:58.

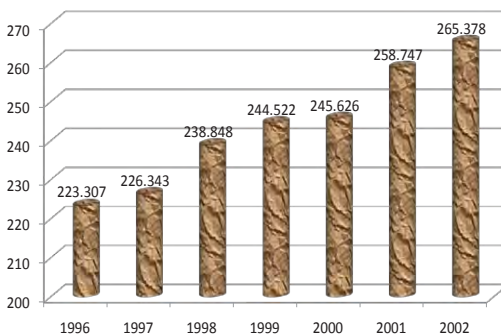
Tabel 4.13 | Jumlah Lahan, Produksi dan Petani di Nusa Tenggara Barat 2010

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan	Jumlah Produksi	Jumlah Petani
1	Kab. Bima	46	36	123
2	Kab. Dompu	77	65	235
3	Kab. Lombok Barat	162	204	177
4	Kab. Lombok Tengah	11.311	11.833	13.178
5	Kab. Lombok Timur	22.887	26.477	20.211
6	Kab. Lombok Utara	199	265	327
7	Kab. Sumbawa	7	9	78
8	Kab. Sumbawa Barat	11	6	63
Total				34.393

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan

4.2.3. Sebaran pekerja rokok

Bagaimana dengan perkembangan jumlah pekerja dalam industri rokok dalam periode 1996-2002? Korelasi antara kebangkitan sub-sektor perkebunan tembakau dengan industri rokok, ternyata menunjukkan kaitannya secara positif sesudah berlalunya krisis moneter. Karena, penyerapan industri rokok terhadap tenaga kerja cenderung mengalami peningkatan dalam periode ini. Bila pada tahun 1996 terdapat sebanyak 223.307 pekerja, maka enam tahun kemudian telah mengalami peningkatan menjadi 265.378 pekerja pada 2002.⁹⁴ Kenaikan ini juga diiringi dengan peningkatan jumlah produksi rokok dan berikutnya adalah peningkatan setoran cukai buat pendapatan negara.

Grafik 4.5 | Jumlah Pekerja Industri Rokok 1996-2002

Sumber: Dikutip dan diolah dari Widyastuti Soerojo (<http://www.ifppd.org/detail/newsforum.php?id=7>)

Kecenderungan itu dapat dikemukakan bahwa sepanjang 1999-2002, jumlah pekerja yang terserap mengalami peningkatan yang cukup berarti. Rata-rata pertumbuhan jumlah pekerja

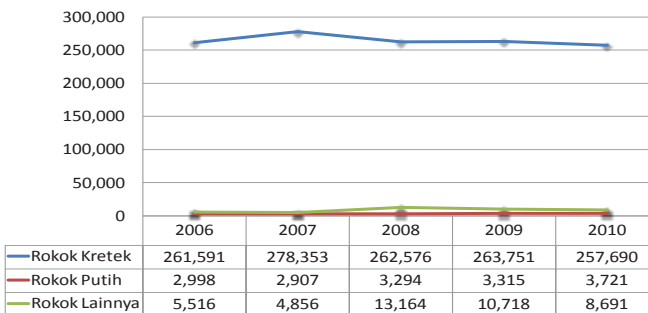
⁹⁴ *Ibid.*

industri rokok meningkat sebesar 4,08 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai pada 1998. Bila pada 1997 berjumlah 181,3 ribu pekerja, meningkat menjadi 196,8 ribu pekerja pada 1998, atau meningkat sebesar 8,56 persen. Jumlah pekerja industri rokok kretek (31420) mengalami peningkatan paling besar, yakni sebesar 9,7 persen, diikuti industri rokok lain-lain (31440) yang mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, dan industri rokok putih (31430) yang mengalami peningkatan sebesar 2 persen.⁹⁵

Secara keseluruhan, dalam periode 1997-2002, industri rokok *kretek* mampu menyerap 95 persen pekerja, rokok putih sebesar 3 persen, dan rokok lain-lain sebesar 2 persen pekerja. Rata-rata penyerapan tenaga kerja per perusahaan secara total sebesar 850 orang, dengan pertumbuhan sebesar 2,48 persen per tahun. Industri rokok *kretek* (31420) yang terdiri dari SKT dan SKM, rata-rata per tahun mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 964 orang per perusahaan, dengan pertumbuhan sebesar 2,54 persen. Sedangkan industri rokok putih (31430) yang terdiri dari sigaret putih mesin (SPM), rata-rata per tahun menyerap tenaga kerja sebanyak 475 orang per perusahaan, industri rokok putih mengalami pertumbuhan yang negatif, dengan pertumbuhan sebesar minus 1,95 persen.⁹⁶

Sedangkan kelanjutan dalam penyerapan tenaga kerja di sub-sektor industri rokok dalam periode 2006-2010 mengalami naik-turun pada industri besar dan menengah, berdasarkan data yang disajikan Kementerian Perindustrian, yang dibedakan atas tiga jenis produksi, yaitu rokok *kretek*, rokok putih dan rokok lainnya. Jumlah pekerja yang dipekerjakan dalam industri ini tidak pernah melampaui 300.000 orang pekerja. Jumlah terbanyak terjadi pada 2007, yakni total 286.016 pekerja (lihat **grafik 4.6**). Namun Jumlah pekerja dalam industri rokok *kretek* mencapai pada titik terendah pada 2010, yakni 257.690 pekerja. Sebaliknya dalam industri rokok putih, jumlahnya mencapai titik tertinggi pada tahun yang sama. Sedangkan rokok lainnya tertinggi dicapai pada 2009, yakni sebanyak 10.718 pekerja.

Grafik 4.6 | Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Industri (Rokok) Besar dan Sedang di Indonesia (2006-2010)



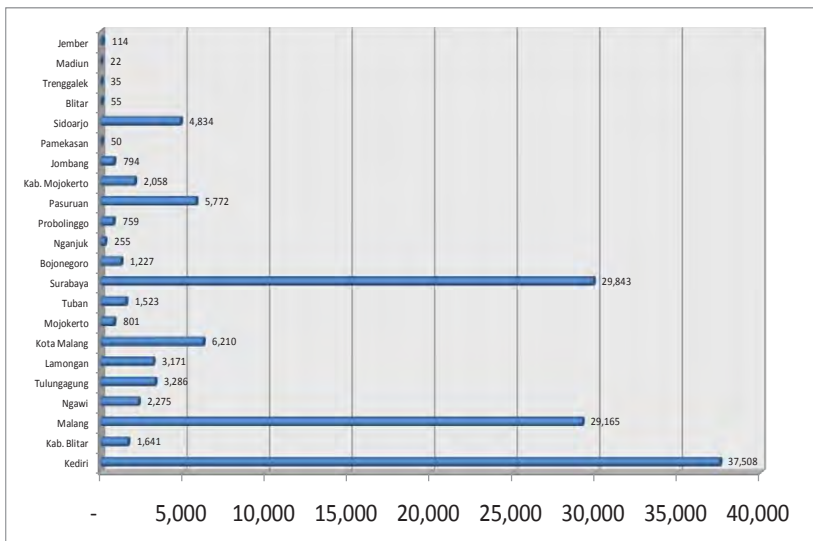
Sumber: Kementerian Perdagangan RI

⁹⁵ Lihat "Industri Rokok," <http://nanxsu.blog.com/2012/03/25/industri-rokok/>, 25 Maret 2012 (diakses pada 3 April 2013)

⁹⁶ *Ibid.*

Provinsi Jawa Timur tidak hanya terdapat banyak perkebunan serta pengolahan tembakau dan cengkeh, namun industri rokok *kretek*. Tahun 1999, industri rokok tersebar di 21 kabupaten/kota, sehingga tidak sedikit buruh yang dipekerjakan. Sebagian besar buruh terkonsentrasi di 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Kota Kediri yang juga terdapat tiga perusahaan besar. Paling banyak buruh bekerja di pabrik-pabrik rokok di Kediri, yang berjumlah 37.508 orang (lihat **grafik 3.7**). Daerah lainnya yang mempekerjakan buruh di atas 5.000 orang adalah Kabupaten Pasuruan dan Kota Malang. Sedangkan di atas 1.000 pekerja terdapat di Kabupaten Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Tulungagung, Ngawi, dan Blitar.

Grafik 4.7 | Jumlah Pekerja Industri Rokok di Jawa Timur 1999



Sumber: Sumarno dan Kuncoro, *Struktur, Kinerja, dan Kluster Rokok Kretek: Indonesia 1996-1999* (diambil dari <http://website.mudrajad.com/sites/default/files/softcopies/Struktur,%20Kinerja,%20dan%20Kluster%20Industri%20Rokok%20Kretek%20Indonesia%201996-1999.pdf>)

Pabrik-pabrik rokok di Jawa Timur memang tidak sedikit yang gulung tikar. Namun ada pula yang muncul lewat dukungan perusahaan besar yang juga ikut memberikan kontribusi bagi hak atas pekerjaan. Dengan lobi pemerintah Kabupaten Pamekasan – yang daerahnya sebagai salah satu sentra penghasil tembakau – HM Sampoerna berkomitmen untuk membangun pabrik rokok skala besar di Pamekasan sebagai bagian dari Pengembangan Wilayah Suramadu (PWS).⁹⁷ Daerah penghasil tembakau lainnya, Kabupaten Jember juga menjadi bagian dari perluasan industri rokok HM Sampoerna.⁹⁸ Tahun 2012, dua pabrik rokok baru di Probolinggo dan Lumajang diresmikan yang sekaligus pula sebagai perayaan 99 tahun Sampoerna. Dengan

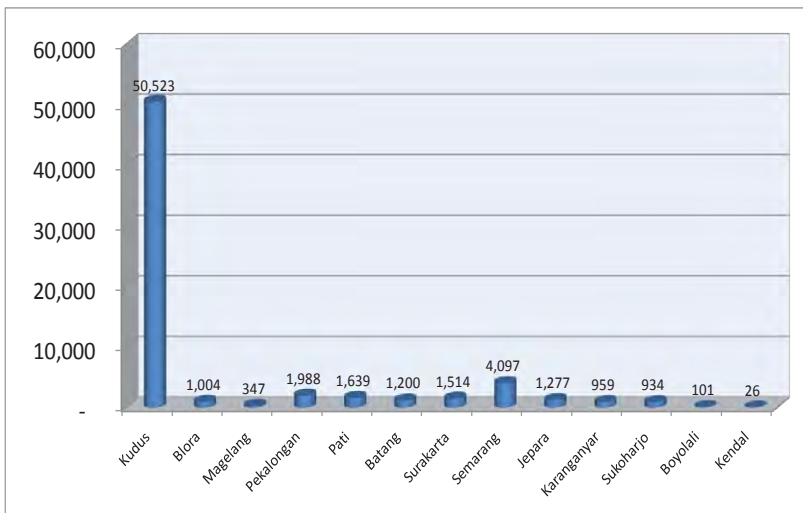
⁹⁷ Lihat “Sampoerna Akan Bangun Pabrik Rokok di Pamekasan,” *indonesiatobacco.com*, Senin, 11 April 2011.

⁹⁸ Pabrik Rokok HM Sampoerna Akan Bangun di Jember, *infopoljatim.com*, Jumat, 9 November 2012.

demikian, sejumlah anak perusahaannya yang bersama dengan ke-38 mitra produksi sigaret (MPS) menyumbang sekitar 95.000 pekerja.⁹⁹

Bagaimana dengan serapan industri rokok terhadap pekerja di Jawa Tengah? Provinsi ini juga banyak terdapat industri rokok yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Pada 1999, paling banyak pekerja berada di Kabupaten Kudus, berjumlah 50.523 pekerja (lihat **grafik 3.8**). Sedikitnya 2 perusahaan industri rokok besar terdapat di Kudus. Sedangkan daerah yang lebih memperkerjakan 1.000 buruh adalah Kabupaten Blora, Pekalongan, Pati, Batang, Surakarta, Kota Semarang, dan Jepara. Selebihya di bawah 1.000 buruh.

Grafik 4.8 | Jumlah Pekerja Industri Rokok di Jawa Tengah 1999



Sumber: Sumarno dan Kuncoro, *Struktur, Kinerja, dan Kluster Rokok Kretek : Indonesia 1996-1999* (diambil dari <http://website.mudrajad.com/sites/default/files/softcopies/Struktur,%20Kinerja,%20dan%20Kluster%20Industri%20Rokok%20Kretek%20Indonesia,%201996-1999.pdf>)

Berdasarkan sejumlah data yang dihimpun tentang industri rokok di enam kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Blora. Selain dikenal sebagai daerah penghasil mebel (*furniture*), Kabupaten Jepara paling banyak terdapat perusahaan kecil. Tahun 2006-2007, masing-masing berjumlah sama, yakni 1.170 unit. Namun, jumlah buruh mengalami peningkatan menjadi 20.930 orang pada 2007 di Jepara. Sedangkan di Kabupaten Kudus banyak terdapat perusahaan besar dan menengah, yakni sebanyak 59 perusahaan, dengan jumlah buruh 81.787

⁹⁹ Lihat “Philip Morris Bangun 2 Pabrik Rokok Sampoerna di Jatim,” *finance.detik.com*, Rabu, 11/07/2012 14:40 WIB. Sampoerna mengoperasikan delapan pabrik rokok di Jawa Timur (Surabaya, Pandaan, Malang, Probolinggo dan Lumajang) dan di Jawa Barat (Karawang).

orang pada 2009 (lihat **tabel 4.9**). Kategori perusahaan besar/średang juga hanya terdapat satu di Kabupaten Blora, dengan jumlah buruh lebih 1.000 orang yang relatif stabil selama 2009-2011.

Tabel 4.14 Jumlah Pekerja Industri Rokok di 6 Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 2007-2011							
			Jumlah Perusahaan dan Pekerja				
No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Kecil	Pekerja	Besar & Sedang	Pekerja	Sumber
1	Kota Semarang	2009	7	1.363	-	-	Buku Besar Statistik Industri Besar dan Sedang Kota Semarang 2010 : http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/
2	Kabupaten Kudus	2009	-	-	59	81.787	BPS Kabupaten Kudus
	Kabupaten Pekalongan	2011	20	116			BPS Kabupaten Pekalongan
4	Kota Pekalongan	2012	17	2.412	-	-	http://perindagkop.pekalongankota.go.id/industri/data-industri
5	Kabupaten Jepara	2006	1.170	15.912	-	-	Data BPS dari Skripsi Pratama
		2007	1.170	20.930	-	-	Data BPS dari Skripsi Pratama
		2008	100	794	-	-	Data BPS dari Skripsi Pratama
		2009	122	2.216	-	-	Data BPS dari Skripsi Pratama
		2010	103	1.870	-	-	http://jeparakab.bps.go.id/Subyek_Statistik/06.Industri/industri.htm
6	Kabupaten Blora	2009	77	818	1	1.231	Blora Dalam Angka 2010, Tabel 6.1.2
		2010	-	-	1	1.273	Blora Dalam Angka 2011, 6.1.3
		2011	-	-	1	1.296	Blora Dalam Angka 2012, table 6.1.3

Sebagaimana sudah ditunjukkan dalam **tabel 4.14** bahwa di Kabupaten Kudus banyak terdapat perusahaan industri rokok kretek skala besar dan sedang. Sepanjang 1996-2009, secara keseluruhan, jumlah pekerja di perusahaan-perusahaan rokok menunjukkan kecenderungan meningkat. Hanya tahun 2003-2004 saja yang mengalami penurunan, namun tahun berikutnya menanjak lagi (lihat **tabel 4.15**). Jumlah pekerja rokok lebih dua kali lipat dibandingkan jumlah pekerja non-rokok. Dengan demikian, industri rokok kretek skala besar dan sedang telah menyumbangkan dua pertiga lebih banyak dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dari total penyerapan tenaga kerja di kabupaten ini.

Tabel 4.15 Jumlah Pekerja Industri Rokok Besar dan Sedang di Kabupaten Kudus Tahun 1996-2009				
No	Tahun	Pekerja Rokok	Pekerja Non-Rokok	Jumlah Pekerja
1	1996	42.939	18.920	61.859
2	1997	40.322	19.400	59.722
3	1998	41.364	19.240	60.604
4	1999	45.650	16.956	62.606
5	2000	46.210	16.760	62.970

Tabel 4.15 | Jumlah Pekerja Industri Rokok Besar dan Sedang di Kabupaten Kudus Tahun 1996-2009

No	Tahun	Pekerja Rokok	Pekerja Non-Rokok	Jumlah Pekerja
6	2001	52.236	16.656	68.892
7	2002	55.665	15.954	71.619
8	2003	54.157	16.151	70.308
9	2004	49.678	16.615	66.293
10	2005	55.805	18.645	74.450
11	2006	70.791	20.255	91.046
12	2007	79.226	19.648	98.874
13	2008	78.256	18.735	96.991
14	2009	81.787	16.661	98.448

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2011

Kudus memang dikenal “kota kretek” dan salah satu perusahaan industrinya yang terbesar adalah PT Djarum Tbk. Perusahaan dibangun kembali oleh Oei Wie Gwan pada 1951 ini mengubah nama dari Djarum Gramophon menjadi Djarum.

yang banyak pabriknya berada di Kabupaten Kudus. Tahun 1972, mulai mengeskpor produk rokoknya dan selang tiga tahun memproduksi *kretek* filter. Tahun 1981 mengeluarkan Djarum Super, salah satu merek rokok paling terkenal, juga *kretek* filter. Pabrik-pabrik rokok ini tersebar di empat kabupaten di Jawa Tengah. Selain Kudus, juga berlokasi di Pati, Rembang dan Jepara (lihat **tabel 4.16**). Pada 2007, jumlah buruh yang bekerja sebanyak 74.920 orang, dengan jumlah pekerja di Kudus mencapai 90 persen.¹⁰⁰

Tabel 4.16 | Jumlah Unit dan Pekerja PT Djarum Tahun 2007

No	Kabupaten	Jumlah Unit	Jumlah Pekerja
1	Kudus	70	67.428
2	Pati	3	7.492
3	Rembang	1	
4	Jepara	2	
Jumlah		76	74.920

Sumber: Diolah dari wisnudewobroto.com

Sedikitnya data dari jumlah pekerja yang bekerja dalam industri rokok kecil secara keseluruhan, maka angkanya memang terlihat kecil dan tidak mencerminkan realitas jumlah pekerja yang sebenarnya. Menurut informasi Gappri, sebanyak 600.000 orang bekerja dalam industri rokok

¹⁰⁰ Lihat “Kunci Keberhasilan PT Djarum,” <http://www.wisnudewobroto.com/kunci-keberhasilan-pt-djarum/> (diakses pada 7 April 2013).

pada 2012. Peralihan dari sigaret tangan ke sigaret mesin – sebagai langkah efisiensi dan peningkatan produktivitas – juga menimbulkan pengurangan pekerja.¹⁰¹ Lambat-laun, seiring peralihan teknologi produksi yang mengandalkan kecepatan mesin-mesin, jumlah pekerja industri rokok memang cenderung menyusut. Penyusutan ini menjadi tantangan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya untuk menjawab terhadap kemungkinan PHK.

Kendati berbeda-beda angka jumlah orang yang menggantungkan hidup dalam industri pengolahan tembakau dan cengkeh, mulai dari angka 6 juta sampai 34 juta orang, namun lebih untuk menegaskan, maka sedikitnya ada 6 juta orang yang dipenuhi hak atas pekerjaan berkat kontribusi yang bersumber aktivitas kerja di ladang-ladang tembakau dan cengkeh, serta industri rokok baik besar dan menengah maupun kecil. Kontribusi mereka ini hampir tanpa dukungan program pemerintah, kecuali beberapa pemerintah daerah yang mengecap alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). Salah satu contoh adalah yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro yang memberikan bantuan modal kepada pedagang rokok yang besarnya mulai Rp 4 juta hingga Rp 10 juta per pedagang untuk pengembangan usaha.¹⁰²

4.3. Kontribusi bagi Hak atas Upah dan Tunjangan

Hak atas pekerjaan jelas berkait langsung dengan hak atas upah atau gaji. Karena dalam setiap ikatan atau kesepakatan kerja, upah atau gaji merupakan elemen yang sangat penting. Sehingga hak atas pekerjaan senantiasa diiringi dengan hak atas upah. Dalam hubungan dua pihak – pemberi kerja¹⁰³ dan penerima kerja¹⁰⁴ – terikat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk membayar upah atau gaji kepada penerima kerja sebagai haknya, sedangkan penerima kerja (penerima upah) mempunyai kewajiban melaksanakan kerja – lazimnya 8 jam kerja – untuk memproduksi dan mendistribusikan komoditas yang menjadi hak pemberi kerja.¹⁰⁵

Dalam hak-hak manusia, peran negara (*state*) khususnya pemerintah adalah memastikan upah atau gaji dibayarkan kepada para pekerja upahan. Pemilik perusahaan industri rokok, perkebunan tembakau dan cengkeh, serta pemilik usaha dagang lainnya membayar upah atau gaji, minimum sesuai ketentuan pemerintah yang sekarang dikenal dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Kebijakan ini merupakan salah satu cara pemerintah menyejahterakan setiap orang supaya hak-haknya terpenuhi secara layak, demi memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia baik bagi dirinya maupun keluarganya.

¹⁰¹ Lihat “PP Tembakau Bakal PHK Ribuan Buruh,” *tribunnews.com*, Senin, 11 Februari 2013 17:23 WIB. Pemberlakuan PP No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Juni 2014 mendatang, diperkirakan bakal menekan jumlah pekerja industri rokok.

¹⁰² Lihat “Pedagang dan Buruh Rokok Dapat Bantuan Modal,” *antaranews.com*, Senin, 9 Juli 2012 15:40 WIB. Dalam memanfaatkan penerimaan DBH CHT, Disperindag mengalokasikan total anggaran Rp 33,9 miliar untuk pengembangan berbagai sektor.

¹⁰³ Dalam industri pengolahan tembakau dan cengkeh, pemberi kerja adalah petani pemilik lahan, bibit dan tanaman tembakau dan cengkeh, pengusaha industri rokok, dan pedagang pemilik usaha dagang tembakau, cengkeh dan rokok.

¹⁰⁴ Pekerja yang dimaksud adalah pekerja upahan (*wage labour*), dengan mengerahkan tenaga kerja (*labour power*) untuk memproduksi dan mendistribusikan komoditas.

¹⁰⁵ Komoditas yang sudah diproduksi tidak lazim menjadi milik penerima kerja, melainkan sepenuhnya menjadi milik pemberi kerja.

Namun demikian, survei yang dilakukan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengungkapkan, sebanyak 57,4 persen pekerja menilai pemerintah belum menerapkan upah yang layak. Hanya 25,5 persen pekerja yang menjawab pemerintah telah memberlakukan upah yang layak. Hasil survei ini didasari asumsi mereka bahwa upah yang layak setara dengan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).¹⁰⁶ Pemerintah memang menghendaki upah pekerja supaya dapat mencapai upah yang layak, maka dengan itu diharapkan tripartit – wakil dari serikat buruh, pengusaha dan Disnaker – dalam upah kabupaten atau kota bisa bekerja sebaik-baiknya.¹⁰⁷ Dari kehendak ini pula Menakertrans mengumpulkan para gubernur untuk menentukan penetapan upah yang lebih seragam.¹⁰⁸

Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan upah yang ditetapkan terutama oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga disebut juga upah minimum kabupaten/kota (UMK). UMK inilah yang menjadi patokan atau pedoman bagi perusahaan-perusahaan industri rokok maupun perusahaan-perusahaan tembakau harus membayar upah buruh-buruh yang mereka pekerjakan. Sekadar contoh daftar upah yang seharusnya minimal dibayarkan di Jawa Timur dapat dilihat dalam **tabel 4.17**. Demikian pula provinsi lainnya, setiap pembayaran upah sedikitnya berpatokan pada UMK.

Tabel 4.17 Daftar Penetapan UMK di Jawa Timur 2011-2013				
No	Kabupaten/Kota	UMK 2011	UMK 2012	UMK 2013
1	Kota Surabaya	1.115.000	1.257.000	1.740.000
2	Kab. Gresik	1.133.000	1.257.000	1.740.000
3	Kab. Sidoarjo	1.107.000	1.252.000	1.720.000
4	Kab. Pasuruan	1.107.000	1.252.000	1.720.000
5	Kab. Mojokerto	1.105.000	1.234.000	1.700.000
6	Kota Malang	1.079.887	1.132.254	1.340.300
7	Kab. Malang	1.077.600	1.130.500	1.343.700
8	Kota Batu	1.050.000	1.100.215	1.268.000
9	Kota Kediri	975.000	1.037.500	1.128.400
10	Kab. Kediri	934.500	999.000	1.089.950
11	Kab. Jombang	866.500	978.200	1.200.000
12	Kota Pasuruan	926.000	975.000	1.195.800
13	Kab. Pamekasan	925.000	975.000	1.059.600
14	Kab. Tuban	935.000	970.000	1.144.400
15	Kab. Lamongan	900.000	950.000	1.075.700
16	Kab. Bojonegoro	870.000	930.000	1.029.500
17	Kab. Jember	875.000	920.000	1.091.950
18	Kab. Banyuwangi	865.000	915.000	1.086.400
19	Kab. Probolinggo	814.000	888.500	1.198.600
20	Kab. Bangkalan	850.000	885.000	983.800

¹⁰⁶ Lihat "Upah Pekerja Belum Layak?" *kompas.com*, Kamis, 9 Februari 2012 | 14:10 WIB.

¹⁰⁷ Lihat "Presiden: Upah Buruh Harus Baik," *kompas.com*, Rabu, 1 Februari 2012 | 16:48 WIB.

¹⁰⁸ Lihat "Standar Upah Baru Dibahas Lusa," *kompas.com*, Rabu, 1 Februari 2012 | 12:48 WIB.

21	Kota Probolinggo	810.500	885.000	1.103.200
22	Kota Mojokerto	835.000	875.000	1.040.000
23	Kab. Lumajang	740.700	825.391	1.011.950
24	Kab. Sumenep	785.000	825.000	965.000
25	Kab. Blitar	750.000	820.000	946.850
26	Kota Blitar	737.000	815.000	924.800
27	Kab. Tulungagung	720.000	815.000	1.007.900
28	Kota Madiun	745.000	812.500	953.000
29	Kab. Situbondo	733.000	802.500	1.048.000
30	Kab. Bondowoso	735.000	800.000	946.000
31	Kab. Sampang	725.000	800.000	1.104.600
32	Kab. Nganjuk	710.000	785.000	960.200
33	Kab. Ngawi	725.000	780.000	900.000
34	Kab. Madiun	720.000	775.000	960.750
35	Kab. Trenggalek	710.000	760.000	903.900
36	Kab. Magetan	705.000	750.000	866.250
37	Kab. Pacitan	705.000	750.000	887.250
38	Kab. Ponorogo	705.000	745.000	924.000
Sumber: Bidang HI & Syarat Kerja, 2010-2011				

Pada 2011, upah minimum provinsi (UMP) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat, sebesar 16,53 persen, dari Rp 1,21 juta menjadi Rp 1,41 juta. UMP DKI Jakarta naik 15,38 persen, dari Rp 1,118 juta menjadi Rp 1,29 juta per bulan, menyusul Papua Barat. Sedangkan kenaikan terendah di Nanggroe Aceh Darussalam, sebesar 3,85 persen, dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 1,35 juta sebulan. Namun, tiga provinsi di Jawa tidak menetapkan kenaikan UMP, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sehingga yang digunakan adalah upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang terendah sebagai patokan. Para pengusaha di Jawa Timur mengambil UMK Pacitan, yakni Rp 705.000 sebulan. Jawa Tengah mengambil UMK Cilacap, yang sebesar Rp 675.000 per bulan. Kebijakan upah ini dikritik oleh Federasi Serikat Pekerja Nasional (FSPN), karena masih berada di bawah kebutuhan hidup layak (KHL), sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa keberatan dengan kenaikan UMP.¹⁰⁹

Tingkat upah atau gaji maupun penghasilan setiap orang memang salah satu indikator atas kesejahteraan. Dalam menemukan kata sepakat atas besarnya upah atau gaji tidaklah mudah, karena kepentingan pengusaha pemilik industri rokok dan pekerja yang diupah berada dalam posisi yang tidak sejalan. Tidak jarang pekerja atau buruh memprakarsai suatu tuntutan. Hal ini pula yang mendasari tambahan hak bagi pekerja, yakni hak berserikat buruh. Dengan hak ini buruh bergabung dalam sebuah serikat buruh dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk dengan melakukan pemogokan.

Tidak hanya perusahaan-perusahaan rokok kecil yang menghadapi tuntutan buruh, namun juga perusahaan besar sekelas Gudang Garam. Pada 1 Januari 2003, diterapkan kenaikan upah di perusahaan ini. Berulang kali para pekerja melakukan mogok kerja. Serikat Buruh Muslimin

¹⁰⁹ Lihat "Gaji Buruh Naik Rata-rata 8,69 Persen," *kompas.com*, Kamis, 24 Februari 2011 | 11:14 WIB.

Indonesia (Sarbumusi) memperingatkan perusahaan untuk menuntaskan beberapa persoalan, mulai dari besarnya selisih dan kecilnya kenaikan kompensasi antara buruh golongan A (terendah) dengan golongan G (setingkat manajer). Para buruh telah menerima kompensasi masa kerja sekaligus tunjangan hari raya (THR) setelah tercapai kesepakatan dengan pihak manajemen. Namun, kenaikan ini mereka nilai tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan seiring perolehan laba bersih perusahaan sebesar Rp 2 triliun.¹¹⁰

Para pekerja yang terserap dalam perusahaan industri *kretek*, sebagaimana pada umumnya perusahaan, terdiri atas beberapa golongan. Dalam industri kretek PT Djarum¹¹¹ yang memproduksi sigaret kretek tangan (SKT) juga membagi atas tiga bagian, yaitu buruh borongan, buruh harian dan buruh bulanan (lihat **tabel 4.18**). Sedangkan untuk produksi sigaret kretek mesin (SKM) dibagi dalam dua golongan, yaitu buruh borongan dan buruh bulanan sebagai operator mesin. Setiap mesin ada 9 pekerja borongan yang dibagi dalam tiga regu shift: pagi, siang dan malam yang masing-masing bekerja selama 7 jam, dengan upah biasanya sebesar Rp 30.000 per hari dengan uang makan Rp 3.500 selain tambahan tunjangan. Buruh operator mengoperasikan mesin-mesin sesuai standar produksi di mana setiap mesin bekerja 3 operator. Setiap operator digaji Rp 2.000.000 per bulan dan operator yang baru digaji Rp 1.500.000 per bulan. Mereka bisa dapat promosi dalam setahun kerja.

Penetapan upah pekerja harian dan pekerja borongan diatur melalui Persatuan Pengusaha Rokok Kudus (PPRK) dengan memperhatikan kemampuan dan kepentingan seluruh anggota serta standar biaya hidup di daerah Kudus. Para pekerja harian disediakan bonus upah 5 persen dari UMK. Para pekerja mendapatkan premi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Selain itu, masa kerja setiap 10 tahun, diberi bonus upah lagi, yakni sekitar 200 x 10 tahun. Perusahaan ini menyediakan sejumlah fasilitas antara lain Poliklinik, jaminan sosial (kesehatan, kematian, hamil dan hari tua), Tunjangan Hari Raya (THR), diberikan sama besarnya dengan gaji sebulan, mobil jemputan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Bahkan disediakan pula koperasi karyawan, penjualan barang secara kredit maupun kredit kepemilikan rumah.

Tabel 4.18 | Sistem Pengupahan dan Uraian Kerja PT Djarum

No	Golongan	Jumlah	Upah	Uraian Kerja
1	Buruh Borongan	57.284		
	Buruh giling/ linting		Rp. 26.000/ hari	Menggiling olahan rokok dengan membalutnya dengan kertas sigaret. Gaji lebih banyak dari bathil
	Buruh pembungkus/ contong		Rp. 39.500/tim per 1000 bungkus	Rokok yang sudah diseleksi dan memenuhi standar kemudian dibungkus dengan kertas celopant untuk di pak/ dibungkus dengan rapi kemudian dibuahi pita cukai. Setiap tim terdiri atas 4 orang untuk memproduksi rokok berbentuk kerucut atau terompet (Djarum Coklat)

¹¹⁰ Lihat “Kenaikan Upah di Gudang Garam Diprotes,” *liputan6.com*, 29 Januari 2003 07:04; dan “Buruh Gudang Garam Memperoleh Kompensasi,” *liputan6.com*, 27 November 2002 17:38. Dalam pengamanannya, sebanyak 200 personel dari Brigade Mobil, Pengendalian Massa Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resor Kota Kediri dikerahkan di sekitar pabrik.

¹¹¹ Lihat “Laporan PKL Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP Tahun 2009,” <http://www.scribd.com/doc/25345028/Laporan-Pkl-Pt-Djarum> (diakses pada 5 April 2013).

Tabel 4.18 | Sistem Pengupahan dan Uraian Kerja PT Djarum

No	Golongan	Jumlah	Upah	Uraian Kerja
	Buruh pengepakan Buruh bathil		- Rp. 22.000/hari	Mengepak rokok yang sudah dibungkus Membantu petugas penggiling seperti memberi lem pada kertas sigaret, merapikan gilingan rokok, menghitung rokok, dan menyerahkannya pada pensortir
2	Buruh Harian	9.545		
	Buruh sortir		Rp. 750.000/bulan	Menerima bagian batil untuk menyortir dan mengendalikan mutu
	Buruh rajang cengkeh Pekerja administrasi		Rp. 750.000/bulan	Melakukan pengawasan terhadap buruh yang bekerja
3	Buruh Bulanan	2.362		
	Pekerja administrasi		-	Mencatat dan mendokumentasikan seluruh aktivitas kerja perusahaan
	Pekerja manajerial		-	Mengelola dan mengoperasikan jalannya perusahaan

Sumber: Laporan PKL, Januari 2010 (<http://www.scribd.com/doc/25345028/Laporan-Pkl-Pt-Djarum>)

Masih di Kudus, sebuah pabrik rokok kretek Kembang Arum, mengupah buruh linting sebesar Rp 10.000 per 1.000 linting rokok pada 2012. Setiap hari buruh kretek ini dapat menghasilkan sebanyak 3.000 linting SKT, sehingga menuai upah Rp 30.000 per hari.¹¹² Cara mengupah buruh dengan target jumlah batang rokok yang dihasilkan sudah diterapkan sejak lama di Kudus. Pada 2003, SP RTMM mengungkapkan, upah minimum buruh borongan adalah menghasilkan 2.000 batang rokok per hari. Untuk produksi 1.000 batang, upah buruh yang memproduksi rokok SKT ukuran pendek senilai Rp 5.600 dan ukuran panjang Rp 5.700. Saat itu, upah buruh harian masih sebesar Rp 13.500 per hari.¹¹³

Sedangkan perusahaan rokok terbesar PT Philips Morris Indonesia – grup usaha yang mengeluarkan rokok Sampoerna – dalam memproduksi SKT menggunakan cara Mitra Produksi Sampoerna (MPS) sebagai penerapan strategi afiliasi dengan menyerahkan produksi rokoknya kepada pihak ketiga (*third party operation*). Strategi produksi ini dilakukan dengan kontrak dan menggunakan tenaga *outsourcing*, selain sebagai bentuk inovasi dan promosi guna memperluas dan meningkatkan produksi dengan metode berbiaya lebih murah. Strategi kerjasama ini disebut Mitra Produksi Sigaret (MPS), dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, sekitar 1.000-1.600 buruh yang didominasi perempuan. Sampoerna memproduksi rokok *kretek* dengan mempergunakan 38 MPS yang tersebar di luar pulau Jawa yang secara keseluruhan memiliki lebih dari 60.000 pekerja.¹¹⁴

Perusahaan-perusahaan rokok *kretek* tidak hanya memberikan hak pekerja selain upah, yakni tunjangan. Salah satu tunjangan yang paling ditunggu buruh dalam setahun kerja adalah THR. Perusahaan rokok PT Djarum yang tersebar di beberapa kabupaten – Kudus, Jepara, Pati, dan Rembang – sebanyak 67.046 orang buruhnya menerima THR berdasarkan kesepakatan antara

¹¹² Lihat “Sejumlah Buruh Sedang Selesaikan Pembuatan Rokok Kretek,” *bisnis-jateng.com*, Rabu, 21 Maret 2012.

¹¹³ Lihat “Upah Minimal Buruh Rokok Senilai 2.000 Batang,” *Suara Merdeka*, Kamis, 24 Juli 2003.

¹¹⁴ Lihat “Buruh Pabrik Rokok Sampoerna Outsourcing,” *sumbawanews.com*, Jumat, 23 November 2012 - 08:31.

PPRK dan Pengurus Cabang SP RTMM-SPSI untuk membagikannya pada 17-23 September 2008. THR buruh borongan ditetapkan Rp 675 ribu dan buruh batil Rp 625 ribu, kemudian buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun diberi secara proporsional. Perusahaan menyediakan dana Rp 45 miliar untuk membayar THR. Selain itu perusahaan juga meliburkan buruh selama 12 hari untuk menikmati libur lebaran.¹¹⁵ Pada Agustus 2011, PT Djarum kembali membayar THR kepada 64.206 buruh di 109 unit kerja, dengan total dana sebesar Rp 50,2 miliar.¹¹⁶ Awal Agustus 2012, lagi THR dibayarkan kepada 54.000 buruh rokok PT Djarum yang bekerja di 60 unit produksi, dengan dana yang dibagikan itu mencapai Rp 48 miliar.¹¹⁷

Gambaran lain tentang kesejahteraan pekerja terekam pula dalam perusahaan rokok terbesar lainnya, PT Gudang Garam. Seorang pekerja di perusahaan ini sudah 30 tahun bekerja sebagai sopir truk pengangkut rokok. Dengan penghasilannya yang bersumber dari perusahaan rokok ini dia dapat memiliki rumah, menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak. Perusahaan ini juga mempekerjakan 38 ribu pekerja tetap.¹¹⁸

Berkat kemajuan yang dicapai berbagai perusahaan industri rokok *kretek*, pemerintah Kabupaten Malang lewat Dinkes, sudah merencanakan pembangunan tujuh poliklinik – antara lain Pakisaji, Wagir, Singosari, Bululawang, Sumberpucung dan Kapanjen – yang dikhususkan bagi buruh pabrik rokok dengan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar. Dalam melayani kesehatan buruh dan keluarganya, Dinkes akan menagih biaya yang ditanggung perusahaan rokok melalui jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).¹¹⁹

Berbedanya kepentingan antara pengusaha sebagai pemilik perusahaan dengan buruh yang dipekerjakan, memang kerap menimbulkan perselisihan. Perselisihan ini terekspresi dalam bentuk protes dan demo buruh seperti yang dilakukan ratusan buruh pabrik rokok *Pakis Mas* di Malang. Buruh-buruh yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) melakukan demo dan mogok kerja pada Februari 2013 di halaman pabrik. Selain menuntut penetapan status supaya mendapat status pekerja tetap setelah pabrik ini berganti pemilik, mereka juga menuntut kenaikan upah, karena upah yang mereka terima hanya Rp 800.000 dan ada pula yang menerima Rp 720 ribu, jauh di bawah UMK Kabupaten Malang yang besarnya Rp 1,3 juta per bulan.¹²⁰

Forum Pekerja Rokok Kudus (FPRK) bersama Aliansi Serikat Buruh dan Elemen Masyarakat Peduli Buruh (ASBEMPB) mempersoalkan upah yang dibayarkan perusahaan rokok ke DPRD Jawa Tengah pada Januari 2010. Mereka mempersoalkan masih dibayarnya upah buruh pabrik

¹¹⁵ Lihat “67.046 Buruh Rokok Djarum Kudus Terima THR Rp 45 Miliar,” *antaranews.com*, Rabu, 17 September 2008 18:15 WIB; dan “67.045 Buruh Rokok Djarum Kudus Terima THR Rp 45 Miliar,” *republika.co.id*, Kamis, 18 September 2008, 06:06 WIB.

¹¹⁶ Lihat “64.206 Buruh PT Djarum Terima THR,” *Suara Merdeka*, Jumat, 18 Agustus 2011.

¹¹⁷ 54.000 Buruh Rokok PR Djarum Mulai Terima THR,” *bisnis-jateng.com*, Sabtu, 4 Agustus 2012; “Buruh dan Karyawan PT Djarum Terima THR,” *kompas.com*, Jumat, 3 Agustus 2012 | 10:38 WIB; dan “Ribuan Buruh Rokok Djarum Terima THR,” *hariansemarang.net*, Minggu, 5 Agustus 2012 02:24.

¹¹⁸ Lihat “Tembakau, Industri Ratusan Triliun,” *bbc.co.uk*, Senin, 24 Mei 2010 - 01:02 GMT.

¹¹⁹ Lihat “Poliklinik Akan Dibangun untuk Buruh Pabrik Rokok,” *tempo.co*, Jumat, 03 Oktober 2008 | 14:55 WIB. Tahun 2008, Kabupaten Malang melalui bagi hasil kompensasi cukai rokok menerima dana sebesar Rp 5,2 miliar.

¹²⁰ Lihat “Ratusan Buruh Rokok Mogok Kerja,” *sindonews.com*, Rabu, 6 Februari 2013 - 12:12 WIB; dan “Buruh Rokok Pakis Mas Mogok Kerja,” *beritajatim.com*, Rabu, 06 Februari 2013 17:22:34 WIB. Pabrik ini mempekerjakan 150 orang yang kesemuanya perempuan, 100 orang berstatus pekerja tetap, sedangkan 50 orang pekerja kontrak. Setiap tahun mereka demo menuntut THR.

rokok yang berjumlah sekitar 100.000 orang di Kudus itu rata-rata hanya menerima sekitar Rp 375.000 per bulan. Upah sebesar ini jauh di bawah UMK 2010 yang besar Rp 775.000 per bulan. Sebanyak 90 persen buruh masih digaji di bawah UMK tersebut.¹²¹

Perselisihan juga ditunjukkan dalam protes buruh perusahaan yang memproduksi rokok Bola Dunia pada 13 Agustus 2011 di Pakisaji, Kabupaten Malang. Ribuan buruh menuntut kenaikan nilai THR.¹²² Dalam aksi ini juga mencakup ribuan buruh pabrik rokok PT Bentoel Utama. Mereka mempersoalkan THR yang dibayarkan lebih kecil dari 50 persen gaji, yakni Rp 550.000. Padahal mereka sebelumnya dijanjikan perusahaan bakal mendapatkan Rp 1,2 juta. Mereka melakukan aksi berjalan kaki menuju pusat Pabrik Bentoel, Kota Malang. Dalam perundingan, pihak perusahaan akan menambah jumlah THR sesuai kesepakatan.¹²³ THR yang belum juga dibayarkan menjadi tuntutan bagi sekitar 300 buruh pabrik rokok Gentong Gotri pada 13 Agustus 2012 di Kudus.¹²⁴ Perusahaan rokok Gentong Gotri kembali diprotes buruh yang mendatangi kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) terkait belum dibayarnya uang jasa tahunan untuk buruh harian sebesar Rp 200 ribu dan buruh borongan Rp 180 ribu.¹²⁵

Kendati demikian, kerap terjadi perselisihan buruh terhadap pengusaha pemilik perusahaan industri rokok dalam hal kontribusinya dalam pemenuhan hak atas upah dan tunjangan, namun tidak menyebabkan buruh menjadi tidak peduli ketika pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian tembakau. Pertama, ribuan buruh dari 14 pabrik rokok yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) pada 22 Februari 2010 di Malang menggelar demo yang memprotes kenaikan tarif cukai rokok sebesar 63 persen sebagaimana yang tercantum dalam PMK No. 181/2009.¹²⁶ Kedua, masih dari Malang, yang berlangsung pada 12 Februari 2013, ratusan buruh yang tergabung dalam SPSI melakukan unjuk rasa di depan Kantor Balaikota untuk menolak PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa produk Tembakau bagi Kesehatan.¹²⁷ PP ini dianggap mengancam pekerjaan buruh rokok.¹²⁸

4.4. Kontribusi bagi Hak atas Jaminan Sosial dan CSR

Mereka yang bekerja sebagai pekerja upahan atau digaji, juga mendapat pemenuhan hak tambahan lainnya, yakni hak atas jaminan sosial. Demikian pula, para pekerja yang terikat hubungan kerja di perusahaan-perusahaan industri rokok. Setiap perusahaan, tidak terkecuali

¹²¹ Lihat "90% gaji buruh rokok di Kudus di bawah UMK," *solopos.com*, Rabu, 13 Januari 2010 20:09 WIB; dan "Gaji Buruh Ini Rp 375.000 Per Bulan," *kompas.com*, Rabu, 13 Januari 2010 | 20:17 WIB.

¹²² Lihat "Ribuan Buruh Pabrik Rokok Tuntut THR," *liputan6.com*, Sabtu, 13 Agustus 2011 13:54.

¹²³ Lihat "Ribuan Buruh Rokok Bentoel Tuntut Kenaikan THR," *antarajatim.com*, Sabtu, 13 Agustus 2011 18:13:08.

¹²⁴ Lihat "Belum Terima THR, Buruh Pabrik Rokok di Kudus Demo," *solopos.com*, Senin, 13 Agustus 2012 10:41 WIB.

¹²⁵ Lihat "Puluhan Buruh Rokok Datangi Kantor Dinsosnakertrans," *suaramerdeka.com*, Senin, 01 April 2013 | 17:29 wib.

¹²⁶ Lihat "Ribuan Buruh Rokok Demo Bea Cukai Malang," *surabaya.detik.com*, Senin, 22 Februari 2010 11:00 WIB.

¹²⁷ Lihat "Ratusan Buruh Rokok Di Malang Demo Tolak PP No 109/2012," *aktual.co*, 12 Februari 2013 13:19:01.

¹²⁸ Lihat "Demo, Ribuan Buruh Pabrik Rokok Tolak PP Tembakau," *kompas.com*, Selasa, 12 Februari 2013 | 13:58 WIB.

perusahaan industri rokok, harus mematuhi UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).¹²⁹ Pada 2011, berganti menjadi UU No. 24/2011. Dalam pemenuhan hak ini negara sudah mengambil langkahnya dengan memberlakukan UU Jamsostek. Perusahaan-perusahaan rokok pun harus menyertakan buruh yang dipekerjakan menjadi peserta Jamsostek.

Beberapa perusahaan industri rokok besar di Jawa Timur seperti PT HM Sampoerna, Gudang Garam dan Bentoel, sudah menyertakan buruh-buruh yang dipekerjakan dalam program Jamsostek. Bahkan kepesertaannya tergolong baik dan tertib.¹³⁰ Namun sejumlah perusahaan rokok di Kudus tidaklah demikian, sehingga timbul ketegangan dengan serikat-serikat buruh sebelum PPRK menyertakannya pada 2010 sebagaimana yang sempat dipersoalkan oleh lima serikat buruh yang tergabung dalam ASBEMPB. Aliansi menuding para pengusaha rokok yang tergabung dalam PPRK yang didominasi perusahaan PT Djarum dan PT Nojorono telah mengabaikan hak-hak puluhan ribu buruh di Kudus. Menurut mereka, ada sekitar 70.000 buruh PT Djarum tidak diikuti dalam Jamsostek, bahkan ada yang dipaksa mengundurkan diri dengan uang pesangon di bawah Rp 1 juta kendati yang bersangkutan sudah bekerja selama 11 tahun. Sehingga mereka menuntut supaya para pengusaha rokok segera mendaftarkan buruh yang dipekerjakannya dalam program Jamsostek sesuai UU No. 3/1992.¹³¹

Berkat tekanan-tekanan yang dilakukan serikat-serikat buruh di Kudus itu, maka kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, PPRK menyatakan pihaknya akan menyertakan 15.000 buruh menjadi peserta Jamsostek.¹³² Dengan kenyataan ini PT Jamsostek berupaya merangkul buruh rokok, karena potensial peserta bisa berasal dari 80.000 buruh borongan yang belum seorang pun yang menjadi peserta Jamsostek.¹³³ Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau berharap kepesertaan buruh rokok pada program Jamsostek dapat dimaksimalkan di masa mendatang termasuk penyesuaiannya dengan UU No. 24/2011 yang menggantikan UU No. 3/1992, yang diselenggara oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai berlaku pada 2014.¹³⁴

Selain itu, setiap perusahaan juga dibebankan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Pasal 15,17 dan 34 UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan dasar inilah banyak perusahaan besar menjalankan CSR, yang kemudian dikenal sebagai “investasi sosial”. Peran perusahaan ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan peran ini perusahaan juga menjadikannya sebagai sarana promosi dalam menunjukkan kontribusinya yang ditayangkan lewat iklan. Dengan demikian, terjadi dwifungsi

¹²⁹ Emir Sundoro, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Berdikari*, Jakarta: Dinov ProGRESS Indonesia, 2009. Jamsostek mencakup jaminan kecelakaan kerja (KK), jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan kematian (JK).

¹³⁰ Lihat “15.000 Buruh Rokok Akan Ikut Jamsostek,” *suarakarya-online.com*, Selasa, 13 April 2010.

¹³¹ Lihat “Ada 70 Ribu Buruh PT Djarum Belum Dapat Jamsostek,” *tempo.co*, Rabu, 13 Januari 2010 | 15:50 WIB.

¹³² Lihat “15.000 Buruh Rokok Akan Ikut Jamsostek,” *suarakarya-online.com*, Selasa, 13 April 2010.

¹³³ Lihat “Asuransi Pekerja: Jamsostek Rangkul buruh Rokok,” *bisnis.com*, Minggu, 26 Februari 2012 | 20:42 WIB. PT Jamsostek juga menyebutkan, sebanyak 15.000 buruh rokok harian yang dijanjikan PPRK telah bergabung dalam kepesertaan Jamsostek sejak April 2010.

¹³⁴ Lihat “Jaminan Sosial Pekerja Perlu Dimaksimalkan,” *suaramerdeka.com*, Minggu, 15 April 2012 | 14:06 wib.

CSR bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankannya, terutama perusahaan-perusahaan industri rokok.¹³⁵

Apa saja kontribusi industri rokok bagi kegiatan sosial? dalam menggerakkan CSR, PT Djarum membentuk Djarum Foundation. Pada 1984, PT Djarum menyelenggarakan program Beasiswa Djarum. Sebanyak 5.886 orang mahasiswa yang terpilih dari 71 perguruan tinggi di 23 propinsi menikmati alokasi beasiswa itu. Sebelum tahun 2009, beasiswa bernilai Rp. 500.000 per bulan yang diterima selama 12 bulan. Sejak 2009, akan menerima Rp 600.000 per bulan, yang berarti setahun sebanyak Rp 7,2 juta bagi setiap penerima beasiswa. Selain uang beasiswa, Djarum juga memberikan pelatihan-pelatihan *soft skill* serta berbagai kegiatan. Dengan latihan *soft skill*, peserta dapat mengecap outbound, leadership training, practical skills dan entrepreneurship. Sedangkan kegiatan lainnya adalah Factory Visit ke Pabrik Djarum, mengikuti acara Forum Rektor yang mempertemukan rektor perguruan tinggi, Lomba Karya Tulis khusus Beswan Djarum, serta pelatihan jurnalistik. Beberapa kegiatan lainnya adalah donor darah penerima beasiswa dari IPB. Bantuan dana juga dialokasikan kepada Universitas Paramadina dan SMA Taruna Magelang.¹³⁶

Tidak hanya bidang pendidikan yang menjadi kontribusi PT Djarum, melainkan juga bidang kebudayaan dengan membangun GOR Bulutangkis – dengan luas bangunan 29.450 meter persegi – yang berada di atas lahan seluas 43.207 meter persegi dan menghabiskan Rp 30 miliar. Kiprahnya sudah dimulai pada 1969 dengan membentuk PB Djarum dan banyak melahirkan atlet dunia seperti Liem Swie King, Hastomo Arbi, Hadiyanto, Kartono, Heryanto, Christian Hadinata, dan Hadiwinoto.¹³⁷ Dalam liga utama sepakbola, perusahaan ini mensponsori Liga Djarum selama tiga tahun, periode 2005-2007 dengan menggelontor dana sekitar 35 miliar. Sebelumnya perusahaan rokok BAT yang memproduksi Dunhill lebih dulu menyokong dana untuk Liga Dunhill (1994-1995 dan 1995-1996) dan Liga Kansas (1996-1997).¹³⁸ Djarum Foundation juga membangun tempat khusus *Green Plants Cultivation Seedlings Center*, sejak 1984 untuk digunakan dalam pembudidayaan bibit-bibit tanaman seperti tanaman buah-buahan, hias, tanaman langka, bahkan tanaman dari negara lain. Ada ratusan ribu bibit yang dibeli untuk penghijauan dan terus meningkat berhubung isu *Global Warming*. Masyarakat dapat memperoleh bibit itu secara gratis.¹³⁹

Sedangkan PT HM Sampoerna membentuk yayasan bernama Putera Sampoerna Foundation (SF) pada 2001. Selain beasiswa, SF juga menggelar program United Schools Program (USP) serta Teacher Education Program. Beasiswa telah diberikan kepada 32.000 pelajar yang berkemampuan bagus di bidang akademik namun tidak memiliki kemampuan ekonomi. Menteri Pendidikan mendukung program USP, sehingga tercatat 17 sekolah dan 5 madrasah bergabung di dalamnya. USP telah menorehkan prestasi dengan meningkatkan ranking salah satu sekolah USP, SMA 4 Denpasar, dari peringkat 41 ke peringkat 8 di level nasional. TEP digelar untuk

¹³⁵ Agung Supriyadi, “Dua Sisi Investasi Sosial Perusahaan Rokok Djarum dan HM Sampoerna,” <http://recyclearea.wordpress.com/2009/07/16/26/> (diakses pada 7 April 2013).

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Lihat “Kunci Keberhasilan PT Djarum,” <http://www.wisnudewobroto.com/kunci-keberhasilan-pt-djarum/> (diakses pada 7 April 2013).

¹³⁸ Lihat “Divisi Utama Liga Indonesia,” http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Utama_Liga_Indonesia (diakses pada 7 April 2013).

¹³⁹ Lihat “Kunci Keberhasilan PT Djarum,” *Op.cit.*,

melengkapi peserta dengan pengetahuan yang dibutuhkan dan skill untuk menjadi seorang guru profesional. Sebanyak 8.000 guru telah digembleng dalam latihan itu. Bahkan ada proyek kerjasama antara Sampoerna dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bernama Sampoerna School of Business Management ITB.¹⁴⁰

Perusahaan industri rokok besar lainnya menyelenggarakan aktivitas sosial lainnya sebagai bagian dari alokasi mereka untuk CSR. Salah satu realisasi CSR PT Gudang Garam Tbk adalah program bina sosial yang disasarkan kepada 29 keluarga penambang pasir di Sungai Brantas, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri. Setiap keluarga mantan penambang mendapat pinjaman modal satu unit keramba berisi 800-1.000 benih ikan lele, nila, atau bawal. Modal itu wajib dikembalikan setelah tiga kali panen. Namun, mereka menghadapi kesulitan dan merasa tidak dipedulikan pemerintah, terutama Dinas Perikanan.¹⁴¹

Kendati demikian, pada kebutuhan lain, sebagai daerah yang mempunyai PDB keempat terkaya berkat beroperasinya berbagai perusahaan industri rokok *kretek*, Pemerintah Kota Kediri juga membangun rumah sakit (RS) khusus untuk menangani segala penyakit terkait dampak rokok dan industri rokok, terutama kawasan pabrik Gudang Garam yang luasnya sepertiga kawasan kota. RS ini menginduk pada RSUD Gambiran. Pembangunan gedung RS dengan desain arsitektur modern ini diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 204 miliar berada di atas seluas 4,8 hektar. Seluruh anggaran akan diambilkan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) selama lima tahun yang disetorkan perusahaan industri rokok. Juru bicara pemerintah kota menyatakan, pembangunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban lingkungan Gudang Garam pada masyarakat.¹⁴²

Sebelumnya, dengan menggunakan DBH-CHT, pemerintah Kota Kediri juga membangun tempat khusus merokok (*smoking area*). Tahap awal, dibangun 20 unit di beberapa lokasi seperti di terminal bus, stasiun kereta api, kantor-kantor pelayanan umum, dan pasar. Pembangunan tahap awal ini menelan anggaran Rp sedikitnya 100 juta. Pembangunan kawasan merokok merupakan realisasi peraturan pemerintah tentang dana bagi hasil cukai. Pemanfaatan DBH-CHT juga akan dipakai untuk menata lingkungan kumuh dan limbah buang atau sanitasi di sekitar pabrik rokok.¹⁴³

4.5. Kontribusi bagi Kebudayaan

Rasanya, belum pernah ada kelompok perusahaan lainnya dalam berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan yang memberikan kontribusi sebegitu besar dan prestasi segemilang perusahaan industri rokok selain kontribusinya bagi ekonomi dan pendapatan negara, terlepas dari efek dari konsumsi rokok. Demikian pula, industri pengolahan tembakau dan cengkeh tidaklah menjadi kontribusi utama bagi pemanasan global (*global warning*) dan efek rumah kaca (*green house*

¹⁴⁰ Agung Supriyadi, *Op.cit.*. SF juga mengadakan program sosial untuk anak remaja. Program ini bertujuan memberikan pendidikan bagi para siswa yang putus sekolah. SF mengajak khalayak ramai untuk berpartisipasi memberikan donasi bersama SF kepada para remaja.

¹⁴¹ Lihat "Eks Penambang Pasir Liar Tuntut Pekerjaan Layak," *tempo.co*, Minggu, 21 Oktober 2012 | 17:29 WIB.

¹⁴² Lihat "Dibangun, RS Khusus Dampak Rokok," *kompas.com*, Senin, 8 November 2010 | 07:50 WIB; dan "Rumah Sakit Khusus Gangguan Pernafasan Akan Didirikan di Kediri," *tempo.co*, Rabu, 01 Juli 2009 | 16:26 WIB.

¹⁴³ Lihat "Kota Kediri Bangun Tempat Khusus Merokok," *tempo.co*, Rabu, 11 Juni 2008 | 20:21 WIB; dan "Pemkot Kediri Sediakan Tempat Khusus Merokok," *gatra.com*, Rabu, 11 Juni 2008 10:22.

effect) seperti polusi udara yang bersumber dari kegiatan transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, bus, truk, kereta api, dan pesawat yang terus bertambah memproduksi emisi gas buang, sehingga di atmosfer meningkat intensitas efek rumah kaca.¹⁴⁴

Industri pengolahan tembakau dan cengkeh bukan hanya sebagai bentangan ekonomi yang digerakkan oleh lapisan petani dan buruh tembakau dan cengkeh yang tersebar di banyak daerah maupun perusahaan-perusahaan pabrik rokok di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyumbang pendapatan negara, namun juga terkait dengan kebudayaan yang mencirikan identitas nasional sebagaimana kaitan cerutu dengan Kuba, wine atau minuman anggur dengan Perancis, vodka dengan Rusia, jam tangan dengan Swiss, otomotif dengan Jepang dan Jerman, sepakbola dengan Inggris atau Brazil, serta industri film dengan AS, India dan Hongkong yang kesemuanya menembus tapal batas negeri atau menyebar sebagai produk secara internasional.

Dalam kaitan itu, sejak dulu Indonesia – disebut juga Nusantara yang terdiri dari banyak pulau – terkenal dengan rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, jahe, jinten, kemiri, kunyit, dan lada atau merica. Rempah-rempah ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur atau penyedap rasa, namun juga biasa digunakan untuk pengobatan. Rempah-rempah ini pun menjadi buah bibir yang menembus ke telinga pelaut-pelaut Eropa, tidak kalah dengan emas batangan. Sebagai surga rempah-rempah, para pelaut dan pedagang Portugis dan Spanyol sempat mencicipi keuntungan yang ditarik dari Maluku pada abad ke-16, sebelum perusahaan kongsi dagang Belanda VOC mengambil alih secara monopoli atas perdagangan rempah-rempah pada awal abad ke-17.¹⁴⁵ Dengan monopoli inilah VOC sukses memetik surplus perdagangan yang luar biasa yang dihisap oleh industri farmasi dan keuntungan dagang lainnya. Dari rempah-rempah ini pula, cengkeh dan kayu manis, kelak menjadi bahan baku dalam produksi rokok *kretek*. Cengkeh juga yang menjadi ilham bagi Minggus Tahitoe untuk menciptakan lirik lagu “Bila Cengkeh Berbunga”.¹⁴⁶

Bukan cuma rempah-rempah yang diangkut ke Eropa sesudah VOC bangkrut, namun juga daun tembakau yang ditanam secara besar-besaran lewat program kerja rodi dalam Sistem Tanam Paksa – dipelopori oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch – selama 1830-1870 bersama produk tanaman kopi, tebu, dan nila (*indigo*), juga teh, kayu manis, dan lada. Dalam penanaman tembakau dikerahkan sebanyak 37.000 keluarga di atas luas lahan 4.000 bahu yang tersebar di Rembang, Kedu, Pasuruan, dan Banyuwangi. Dari hasil kerja rodi ini berhasil ditarik ratusan juta pound oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menutupi utang-utangnya dan diangkut ke negeri Belanda.¹⁴⁷ Karena bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini berhasil luar biasa. Dalam periode 1831-1871, Batavia tidak hanya bisa membangun sendiri, melainkan juga punya hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di Kerajaan Belanda. Umumnya,

¹⁴⁴ Lihat “Penyebab Pemanasan Global,” <http://www.indoenergi.com/2012/04/penyebab-pemanasan-global.html> (diakses pada 7 April 2013).

¹⁴⁵ Lihat “Rempah-Rempah: Daya Pikat Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia,” <http://www.anneahira.com/kedatangan-bangsa-eropa-di-indonesia.htm> (diakses pada 7 April 2013).

¹⁴⁶ Lihat “Diana Nasution,” http://id.wikipedia.org/wiki/Diana_Nasution (diakses pada 7 April 2013).

¹⁴⁷ Lihat “Tanaman dan Sistem Perdagangan pada Sistem Tanam Paksa oleh Raffles,” <http://www.g-excess.com/4734/tanaman-dan-sistem-perdagangan-pada-sistem-tanam-paksa-oleh-raffles/>, 12 Oktober 2010 (diakses pada 7 April 2013).

lebih dari 30 persen anggaran belanja kerajaan berasal kiriman dari Batavia. Pada 1860-an, 72 persen penerimaan Kerajaan Belanda disumbang dari Oost Indische atau Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung, Batavia (Jakarta) menjadi sumber modal. Misalnya, membiayai kereta api nasional Belanda yang serba mewah. Kas kerajaan Belanda pun mengalami surplus.¹⁴⁸ Dari tembakau pula muncul grup musik *reggae* Jamaican Smoke yang mengalunkan lagu mengisap tembakau berjudul “Gara-gara Rasta”.¹⁴⁹ Harum dan cita rasa tinggi jenis tembakau Temanggung, *srintil*, yang legendaris itu telah pula mengilhami Ahmad Tohari menokohkan Srintil yang dinobatkan sebagai penari ronggeng dalam novelnya, *Ronggeng Dukuh Paruk*.¹⁵⁰

Kendati banyak surplus yang ditarik keluar dari Hindia Belanda dan para pengusaha Belanda juga tidak berkepentingan melakukan industrialisasi kecuali hanya sebagai *enclave* (produksi kantong ekspor), namun buah dari produksi cengkeh dan tembakau secara besar-besara itu juga membawa perkembangan baru dalam industrialisasi. Haji Djamhari mengilhami tumbuhnya produksi ‘rokok cengkeh’ pada akhir abad ke-19. Pada awal ke-20 ditandai bangkitnya industri rokok *kretek*. Industri inilah yang mempunyai kaitan hulu ke hilir yang tidak dikuasai oleh para pengusaha Belanda, sehingga membentuk kemandirian yang kuat, karena tidak bergantung pada impor bahan baku atau setengah jadi, sehingga kini sukses merebut masa keemasannya.

Keberadaan industri kretek maupun beragam produknya yang tersebar dan membentangkan rangkaian panjang untuk sampai ke banyak orang. Dari distributor mengalir rokok-rokok kretek itu ke tangan para pengecer di took-toko, kios-kios atau warung-warung pinggir jalan. *Kretek* ini pula yang menginspirasi Leo Kristi – musisi balada yang lebih mengandalkan gitar akustik – mencipta lagu berjudul “Di Deretan Rel-rel”. Cuplikan liriknya menampilkan gaya dan selera seorang perokok yang tengah mengisap *kretek* sambil menikmati suasana pagi yang membekaskan sisa-sisa hujan semalam, dengan tersaji hidangan kopi panas dan pisang goreng di sebuah kedai.¹⁵¹

Banyak kegiatan kebudayaan seperti liga sepakbola, basket,¹⁵² pentas atau konser musik, kegiatan perlombaan, dan tontotan televisi disokong dana dari perusahaan-perusahaan industri rokok *kretek*. Salah satu aktivitas yang rutin digelar setiap tahun di Jakarta adalah *Java Jazz Festival*. Pentas musik kolosal yang diharapkan menyedot total 100.000 penonton ini banyak mengundang musisi dan penyanyi jazz dari luar negeri, selain dari dalam negeri.¹⁵³ Penyelenggara pentas jazz ini masih berharap festival ke-10 mendapatkan sokongan dana dari

¹⁴⁸ Lihat “Cultuurstelsel,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Cultuurstelsel> (diakses pada 7 April 2013).

¹⁴⁹ Lihat “Gara-gara Rasta,” <http://rian378.mywapblog.com/chord-gitar-botagearista-gara-rasta-mp3.xhtml>; dan http://www.reverbnation.com/artist/song_show_lyrics/2902095 (diakses pada 7 April 2013).

¹⁵⁰ Ahmad Tohari, *Ronggeng Dukuh Paruk*, Jakarta: Gramedia, 2011.

¹⁵¹ Bambang Aroengbinang, “Album-Album Konser Rakyat Leo Kristi,” <http://thearoengbinangproject.com/blog/album-album-konser-rakyat-leo-kristi/> (diakses pada 7 April 2013).

¹⁵² Sebuah perusahaan rokok yang memproduksi *A Mild*, menjadi salah satu sponsor dalam liga bola basket (A Mild IBL). Lihat “Pertandingan Basket A Mild IBL: Putra Riau vs SM Britama,” riauinto.com, Senin, 10 September 2007 22:48 wib.

¹⁵³ Lihat “Java Jazz, Seleb Inggris Dituding Kampanye Rokok,” tempo.co, Jumat, 01 Maret 2013 | 13:00 WIB.

perusahaan industri rokok.¹⁵⁴ Sebelumnya, konser Anggun C Samsi yang sukses digelar pada November 2009 di Sabuga, Bandung, juga didukung dana dari perusahaan rokok.¹⁵⁵

Musik menjadi salah satu ajang kebudayaan yang menyedot ketertarikan orang secara massal dan dukungan dana dari perusahaan rokok kretek masih diharapkan.¹⁵⁶ Bersama kawan-kawannya, Ariel – sekeluar dari penjara Kebonwaru, Bandung – membentuk grup band baru, Noah. Dengan album yang mereka rilis, sebuah perusahaan industri rokok menyongsong mereka untuk melakukan serangkaian tur di 25 kota yang dimulai dari September 2012 dan berakhir pada Februari 2013. Sebelumnya mereka menggelarnya dengan kode “*mission impossible*” konser tur 5 negeri 2 benua dalam 24 jam, sehingga mencatatkan rekor.¹⁵⁷

Besarnya laba yang dipetik para pengusaha industri rokok *kretek* memang ditunjukkan dengan luasannya mereka memberikan kontribusi dalam mensponsori berbagai kegiatan kebudayaan pop. Kontribusi ini juga menjadi arena promosi mereka. Namun berbeda dengan produk komoditas lainnya, perusahaan penghasil rokok justru menghadapi tekanan kampanye anti rokok. Rokok sudah dapat dikatakan sebagai produk “setengah ilegal”. Di satu sisi banyak larangan bagi para pengisap rokok sebagai konsumen langsung dalam mengkonsumsi di berbagai kawasan, sementara di sisi lain perusahaan rokok ditekan untuk membatasi produksi dan membebani dengan sejumlah ketentuan maupun kebijakan ketat dan larangan impor oleh pemerintah asing. Belum lagi ditambah dengan serangkaian kampanye global yang melibatkan banyak pengikut, dengan menyatakan jutaan orang mengalami kematian gara-gara konsumsi rokok.

Salah satu yang gencar dikampanyekan adalah larangan mensponsori acara musik dan olahraga di Indonesia yang disuarakan oleh Menteri Kesehatan ketika melakukan sosialisasi PP No. 109/2012 yang ditujukan kepada pimpinan para media massa dan elektronik. Sponsor dari perusahaan rokok diingatkan paling lambat dalam 12 bulan diberikan waktu untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya semua iklan dan sponsorship rokok berhenti.¹⁵⁸ Namun, perusahaan industri rokok terus berproduksi dan tidak akan berhenti, kecuali bangkrut atau ditutup dengan cara menindasnya. Dengan laba yang dipetikanya, perusahaan rokok akan terus mempromosikan produknya supaya komoditasnya “laris manis”. Apa pun ajang promosi dimasuki, terutama dalam bentuk iklan, adalah sarana promosi yang penting dan sekaligus memberikan keuntungan bagi perusahaan periklanan dan media massa.

Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) DKI Jakarta Irfan Ramli mengatakan, rokok merupakan produk primadona di mata dunia periklanan Indonesia. Pemberlakuan PP No. 109/2012 itu secara otomatis berimbas pada iklan produk rokok. Belanja iklan secara nasional mencapai Rp 119 triliun. Namun diprediksi, pendapatan perusahaan periklanan dari produk rokok akan turun cukup signifikan. Padahal, belanja iklan rokok tiap tahun selalu naik, hampir 90 persen ditempatkan di TV dan media elektronik, sisanya untuk media cetak. Maka, dengan

¹⁵⁴ Lihat “Pengusaha Peter Gontha Berharap Perusahaan Rokok Masih Bisa Jadi Sponsor Acara Musik,” *suarapengusaha.com*, Kamis, 28 Februari 2013 - 06:10 pm.

¹⁵⁵ Lihat “Gara-gara Rokok, Konser Anggun Diprotes Komnas Perlindungan Anak,” *suarakarya-online.com*, Jumat, 20 Nopember 2009.

¹⁵⁶ Lihat “Sponsor Rokok Masih Diharapkan,” *bbc.co.uk*, Jumat, 1 Juli 2011 - 18:00 WIB.

¹⁵⁷ Lihat “Noah Hadir Langsung Pecahkan Rekor,” *okezone.com*, Rabu, 26 Desember 2012 11:29 wib.

¹⁵⁸ Lihat “Menkes: 2014, Acara Musik-Olahraga Tanpa Sponsor Rokok,” *republika.co.id*, Rabu, 23 Januari 2013, 15:00 WIB; dan “Stop Iklan & Sponsorship Bagi-bagi Rokok,” *inilah.com*, Rabu, 23 Januari 2013 | 20:27 WIB.

peraturan baru ini diprediksi penyusutan belanja iklan rokok mencapai Rp 11,9 triliun atau 10 persen. Dengan itu, pihaknya merasa perlu menghasilkan karya-karya iklan secara lebih kreatif untuk mengikuti peraturan pemerintah.¹⁵⁹

Kendati menghadapi banyak tekanan baik secara internasional maupun nasional, industri pengolahan tembakau dan cengkeh dengan produk akhir yang dikenal *kretek* itu telah memberikan berbagai kontribusi bagi pemenuhan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, terutama kebudayaan pop: mulai dari olahraga sampai kesenian dan pendidikan. Industri ini telah mengukir prestasi bagi penerima kontribusinya seperti para jagoan bulutangkis, digelarnya liga sepakbola nasional, liga basket, banyak pentas dan tur grup musik, tontonan lainnya, sampai beasiswa dan pelatihan guru, terlepas dari relasinya dengan buruh yang kerap menimbulkan perselisihan. Kontribusinya juga teralokasi bagi sejumlah usaha kecil dan pembangunan RS, termasuk riset kesehatan.¹⁶⁰

Dalam beberapa hal, *kretek* juga menggelembungkan rasa bangga sebagai salah satu produk yang berjaya di pasar domestik dan mampu menembus pasar dunia ke-70 negeri sehingga mengaitkan *kretek* dengan identitas Indonesia. Industri pengolahan tembakau dan cengkeh pun mengilhami sejumlah musisi untuk menciptakan lirik lagu maupun nyanyian kanak-kanak tanpa perlu dikenal siapa penciptanya, juga karya puisi.¹⁶¹ Beberapa karya tulis lainnya dalam bentuk cerita pendek maupun novel juga terinspirasi dari *kretek*.¹⁶²

Akhirnya, kontribusi perusahaan-perusahaan industri rokok *kretek* itu tidak ketinggalan pula untuk mewariskan sebuah museum pada 1985 di Kudus yang dibangun atas sokongan dana para pengusaha *kretek* yang tergabung dalam PPRK. Museum yang berada di atas lahan seluas 2,5 hektar di Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati ini terdapat pula Rumah Adat Kudus ukuran 8x10 meter persegi peninggalan abad ke-17. Dalam museum ini terpajang peralatan pembuatan *kretek*, patung-patung replika buruh-buruh merajang dan menggunting *kretek*, lukisan diaroma buruh-buruh melinting *kretek*, foto-foto pengusaha, surat perdagangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Karya-karya seni kreatif pada bungkus-bungkus jenis *klobot* dan *kretek* (SKT) lainnya, ikut dibentangkan dalam pajangan. Masih ada lagi koleksi produk *merchandise* dalam bentuk asbak, gantungan kunci, cangkir, gelas, termos, tas dan kaos yang memamerkan logo perusahaan *kretek* yang pernah ada di Kudus. Untuk menikmati koleksi museum ini setiap pengunjung hanya dikenakan sumbangan sukarela.¹⁶³ Selain itu, bertambah pula dengan fasilitas lainnya seperti bioskop mini (*movie theatre*), edukasi ilmu pengetahuan dan sosial-humanis berupa Techno Hall dan Pojok Buruh Rokok.¹⁶⁴

¹⁵⁹ Lihat "Belanja Iklan Rokok Selalu Bertengger di Atas," *neraca.co.id*, Sabtu, 26 Januari 2013.

¹⁶⁰ Kodrat Wahyu Dewanto dkk., *Divine Kretek, Rokok Sehat : Inovasi Dr. Gretha Zahar, Prof. Sutiman Bambang Sumitro, Drs., M.S., D.Sc.*, Jakarta: Masyarakat Bangsa Produk Indonesia, 2011. Lihat juga, "Divine Kretek Obat Kanker Mahakarya Bidang Kesehatan," *bisnis-jateng.com*, Kamis, 23 Juni 2011.

¹⁶¹ Lihat "Puisi 12 Kretek untuk 1 Gerbong, Kang Aidi," <http://karya-kangaidi.blogspot.com/2012/01/puisi-12-kretek-untuk-1-gerbong-kang.html> (diakses pada 8 April 2013).

¹⁶² Ratih Kumala, *Gadis Kretek*, Jakarta: Gramedia, 2012.

¹⁶³ Topatimasang, Roem, Puthut EA, dan Hasriadi Ary (eds), *Op.cit.*, hal. 144-145.

¹⁶⁴ Lihat "Museum Kretek Kembangkan Techno Hall," *kompas.com*, Kamis, 28 April 2011 | 20:12 WIB; dan "Mengenal Sejarah Rokok Kretek di Museum Kretek Kudus," <http://amti.or.id/2012/03/mengenal-sejarah-rokok-kretek-di-museum-kretek-kudus/> (diakses pada 8 April 2013).

Satu lagi museum *kretek* tersaji di Surabaya, milik perusahaan PT HM Sampoerna, namanya House of Sampoerna yang terletak di Taman Sampoerna 6. Bangunan berasitektur Belanda yang dibangun pada 1862 ini semula adalah panti asuhan Pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1932, Liem Seeng Tee – pendiri Sampoerna – membelinya dan mengalihfungsikan menjadi pabrik rokok Sampoerna. Dalam museum ini terpampang beraneka benda peninggalan keluarga Sampoerna yang berhubungan dengan sejarah perusahaan, seperti mesin cetak pertama dan peralatan-peralatan pertama yang dipakai oleh Research & Development Departement. Lantai dua beroperasi pabrik *kretek* di mana lebih dari 3.000 buruh perempuan bekerja dan setiap buruh mampu melinting rokok dengan kecepatan sampai 325 rokok per jam. Selain menikmati koleksi di museum ini juga disediakan program *Surabaya Heritage Track* (SHT) – dengan bus khusus ber-AC dan pemandu – pengunjung dibawa dengan nyaman berkeliling kota Surabaya untuk menikmati wisata sejarah.¹⁶⁵

Kedua museum itu menyajikan jejak langkah para perintis, peletak fondasinya yang mengaitkan hulu ke hilir, dan gemuruhnya di masa kolonial Hindia Belanda sebagai periode kebangkitan awal yang sempat dihantam badai kerusuhan sosial, krisis ekonomi, dan didera dua perang dunia. Kini berkat pembangunan yang membentang dari hulu ke hilir, industri ini mencapai zaman keemasannya pada millennium baru. Warisan industri ini pertama kali dibangun dan tumbuh jauh sebelum Republik Indonesia terbentuk.[]

¹⁶⁵ Lihat “Museum Beraroma Rokok,” *kompas.com*, Minggu, 17 April 2011 | 09:15 WIB; dan “Pelesir Surabaya dengan Bus Merah,” *kompas.com*, Kamis, 25 November 2010 | 09:59 WIB.

Bab 5

**Dampak Pengendalian Tembakau
Terhadap Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya**



- 5.1. Kerangka Pengendalian Tembakau
 - 5.1.1. Serangan terhadap industri tembakau
 - 5.1.2. Kebijakan pemerintah
- 5.2. Dampak Pengendalian Tembakau
 - 5.2.1. Berebut pasar dunia
 - 5.2.2. Industri rokok gulung tikar dan efek berantai
 - 5.2.3. Kehilangan pekerjaan, penghasilan dan tunjangan
- 5.3. Berdampak dari Hilir ke Hulu
 - 5.3.1. Dampak ke hulu
 - 5.3.2. Tanpa strategi pemenuhan hak



Sumber foto: www.indoenergi.com (diakses pada 7 April 2013)

Ada banyak asap yang mengepul dan terpapar di jalan-jalan, tempat-tempat parkir, pabrik-pabrik, tambang-tambang, bengkel-bengkel, kantor-kantor, rumah-rumah tangga, kampus-kampus, kafe-kafe, pantai dan pelabuhan, bandar udara, sampai di hutan-hutan yang tidak berpenghuni. Seluruh asap ini membentuk semacam kabut polusi di permukaan bumi. Dan jujur saja, salah satunya adalah kepulan dan paparan asap rokok.

Namun, sebagai sumber dari mana datangnya seluruh asap itu, maka industri pengolahan tembakau yang ditunjuk sebagai biang kerok dan terus-menerus diperangi secara ekonomi dan politik internasional, lebih dari dua dekade terakhir. Gelombang kampanye global anti konsumsi dan produksi rokok yang disokong dengan banyak survei telah membawa buih-buihnya ke Indonesia untuk mengarahkan suatu perubahan dalam menentukan bahwa rokok semula barang dagangan atau komoditas legal terkesan menjadi “semi-illegal”. Dimulai sejak 1987, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization – WHO) mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (*World No Tobacco Day*) yang diperingati setiap 31 Mei. Pada 1998, WHO membentuk Inisiatif Bebas Tembakau (Tobacco Free Initiative/TFI), upaya memusatkan perhatian internasional terhadap dampak konsumsi tembakau. Bantuan dialirkan untuk menciptakan kebijakan kesehatan publik dunia, mendorong mobilisasi antar masyarakat, dan merancang WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada 1999. Dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) ke-56 pada Mei 2003, dengan suara bulat mengadopsi FCTC.¹

Dengan FCTC – yang ditetapkan sebagai hukum internasional setelah 40 peratifikasi – itulah industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia menghadapi tekanan-tekanan gencar dari regim kesehatan dunia. Kendati Republik Indonesia (RI) belum menandatangani dan meratifikasinya, namun pada tingkat global, RI akan mengalami tekanan untuk mengambil langkah mengadopsi kerangka acuan ini ke dalam bentuk UU maupun kebijakan pemerintah. Sebagai negeri penghasil tembakau terbesar kelima, RI bersama Zimbabwe adalah yang belum menandatangani dan meratifikasi (lihat **tabel 5.1**). AS dan Italia memang sudah menandatangani, namun belum meratifikasinya. Sedangkan lainnya sudah menandatangani dan meratifikasi FCTC.

Tabel 5.1 10 Negara Penghasil Tembakau yang Menandatangani dan Meratifikasi FCTC					
No	Negara	Jumlah	%	Tanda Tangan	Ratifikasi
1	China	2.397.200	38,0	10 November 2003	11 Oktober 2005
2	Brazil	919.393	14,6	16 Juni 2003	3 November 2005
3	India	555.000	8,8	10 September 2003	5 Februari 2004
4	Amerika Serikat	353.177	5,6	10 Mei 2004	-
5	Indonesia	164.851	2,6	-	-
6	Pakistan	126.000	2,0	18 Mei 2004	3 November 2004
7	Italia	100.000	1,6	16 Juni 2003	-
8	Turki	98.000	1,6	28 April 2004	31 Desember 2004
9	Zimbabwe	79.000	1,3	-	-
10	Yunani	18.500	0,3	16 Juni 2003	27 Jan 2006
	Lain-lain	1.499.982	23,8	-	-

Sumber: Diolah dari berbagai sumber; FAOSTAT, <http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor> (diakses pada 18 Maret 2013)

¹ Lihat “Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),” <http://www.ifppd.org/detail/komitment.php?id=7> (diakses pada 8 April 2013).

Apa dampak yang mungkin ditimbulkan bila ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam FCTC atau yang diadopsi mirip dengan kerangka itu ditujukan terhadap industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia? Apa saja bentuk kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi industri pengolahan tembakau dan cengkeh? Adakah berbagai bentuk kampanye dari kelompok non-pemerintah juga mempengaruhinya? Dalam kerangka nasional, negeri penghasil cengkeh, penghasil tembakau, dan penghasil *kretek* ini sedang disudutkan, dikucilkan dan diperangi dalam kepungan regim kesehatan dunia dan kepentingan impor tembakau dan produk tembakau.

5.1. Kerangka Pengendalian Tembakau

Dengan FCTC, maka regim kesehatan dunia sudah mempunyai kerangka legal untuk memerangi industri pengolahan tembakau dan cengkeh di dunia dan khususnya di Indonesia. Karena FCTC sudah disetujui negara-negara sebagai sebuah kesepakatan atau perjanjian internasional yang menjadi kerangka acuan dalam menerapkan peraturan dan kebijakan pengendalian tembakau di tingkat global maupun nasional. Pokok-pokok yang terkandung dalam FCTC mencakup: [1] Peningkatan tarif cukai rokok; [2] Pelarangan total iklan rokok; [3] Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang komprehensif; [4] Pencantuman peringatan kesehatan berupa gambar pada bungkus rokok; [5] Membantu orang yang ingin berhenti merokok; dan [6] Pendidikan masyarakat. Sudah 175 negara dari 192 negara anggota WHO telah meratifikasi FCTC – karena sudah melampaui 40 peratifikasi – maka konvensi ini menjadi hukum internasional yang berlaku sejak 2005.²

Tabel 5.2 | Beberapa Pokok dalam Pengendalian Tembakau

No	FCTC	Uraian Ringkas
1	Pasal 5: Perlindungan kebijakan pengendalian tembakau dari pengaruh industri tembakau	Para Pihak harus melindungi kebijakan pengendalian tembakau dari tujuan komersil dan kepentingan lain industri tembakau sesuai UU.
2	Pasal 6: Harga dan Cukai untuk mengurangi permintaan terhadap tembakau	Para pihak harus mempertimbangkan tujuan Kesehatan nasional dalam menetapkan kebijakan pajak dan harga produk tembakau, termasuk penjualan bebas pajak dan cukai, serta melaporkan tingkat pajak dan kecenderungan konsumsi dalam pertemuan berkala Tarif cukai seharusnya mencapai 2/3 dari harga jual eceran.
3	Pasal 8: Perlindungan terhadap paparan asap rokok	Para pihak harus memberlakukan dan menerapkan peraturan Kawasan Tanpa Asap Rokok di wilayah hukum masing-masing dan menyebar luaskan peraturan ini ke wilayah hukum lainnya di perkantoran, tempat-tempat umum tertutup, dan transportasi umum.
4	Pasal 11: Kemasan dan label produk tembakau	Para pihak harus menerapkan peraturan termasuk persyaratan penempatan label peringatan kesehatan (<i>health warnings</i>) secara bergantian serta pesan-pesan lainnya yang sesuai pada kemasan produk tembakau. Peringatan kesehatan meliputi

² SEATCA, *Status of Tobacco Use and Its Control*, Indonesia Report Card, Maret 2008.

Tabel 5.2 | Beberapa Pokok dalam Pengendalian Tembakau

No	FCTC	Uraian Ringkas
		sedikitnya 30% (secara ideal adalah 50% atau lebih) dari luas tampilan utama dan mencantumkan gambar atau pictogram, serta mencegah kemasan dan label yang salah, menyesatkan atau menipu.
5	Pasal 13: Iklan, promosi dan sponsorship dari industri rokok	Para pihak harus menerapkan pelarangan yang komprehensif terhadap seluruh iklan, promosi dan sponsorship dari produk tembakau.
Sumber: WHO FCTC		

5.1.1. Serangan terhadap industri tembakau

Pada November 2009, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningih pernah mengirim surat kepada Presiden supaya Republik Indonesia (RI) meratifikasi dan kemudian dua kali minta izin untuk akses FCTC demi membendung dampak rokok bagi kesehatan, selain ikut merancang PP No. 109/2012 tentang Tembakau.³ Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi juga sudah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa supaya RI segera meratifikasi FCTC untuk mengendalikan peredaran rokok di tanah air.⁴ Wakil Ketua Komisi IX dari FPD, Nova Riyanti Yusuf meminta pemerintah untuk ikut meratifikasi kerangka konvensi pengendalian tembakau untuk membendung peredaran rokok.⁵

Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) mendesak Presiden SBY untuk segera meratifikasi FCTC, karena dinilai peredaran rokok di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu menekan konsumsi rokok baik dengan menggunakan instrumen ekonomi maupun non-ekonomi.⁶ Atas dasar anggapan bahwa konsumsi rokok yang tidak terkontrol menjadi ancaman serius terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat bagi setiap orang, maka Komnas HAM pun membuat Naskah Akademik (NA) tentang FCTC dan menyerahkannya kepada Menkes.⁷ Muhammadiyah juga mendesak pemerintah untuk melakukan hal yang sama.⁸ Sebelumnya desakan ini sudah muncul dari YLKI,⁹ serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI).¹⁰

³ Lihat "Mantan Menkes Endang Rahayu Raih Penghargaan WHO," *suarapembaruan.com*, Kamis, 14 Juni 2012 | 11:30; dan "Larangan Iklan Rokok Segera Terbit," *viva.co.id*, Senin, 25 Oktober 2010, 17:44.

⁴ Lihat "Kemenkes Desak Kemenlu Ratifikasi KK Pengendalian Tembakau," *poskotanews.com*, Minggu, 7 Oktober 2012 15:13:05 WIB.

⁵ Lihat "Bendung Peredaran Rokok, Pemerintah Harus Ratifikasi FCTC," *poskotanews.com*, Rabu, 30 Januari 2013 09:17:46 WIB.

⁶ Lihat "Presiden SBY Didesak Segera Ratifikasi FCTC," *poskotanews.com*, Senin, 5 November 2012 12:30:01 WIB.

⁷ Lihat "Komnas HAM Beri Naskah Akademik Ratifikasi Konvensi Anti Rokok ke Menkes," *detik.com*, Jumat, 28 September 2012 16:56 WIB.

⁸ Lihat "Muhammadiyah Desak Pemerintah Ratifikasi FCTC," *republika.co.id*, Jumat, 20 April 2012, 14:54 WIB.

⁹ Lihat "YLKI Desak Pemerintah Ratifikasi FCTC," *republika.co.id*, Sabtu, 10 Januari 2009, 02:35 WIB; dan "YLKI Datangi Komnas, Desak Ratifikasi Konvensi Rokok," *detik.com*, Senin, 23 Mei 2005 15:21 WIB.

¹⁰ Lihat "Kurangi Dampak Buruk Rokok, PB IDI Desak Pemerintah Untuk Segera Meratifikasi FCTC," *wartajakarta.com*, Rabu, 29 Desember 2010 - 15:37:34 WIB.

Sejumlah tokoh masyarakat dan selebritas yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Bahaya Tembakau pada 12 November 2008 di Jakarta, mengajukan petisi yang dimuat di sejumlah media cetak nasional, mendesak Presiden dan DPR untuk segera meratifikasi FCTC dan menerbitkan UU Pengendalian Dampak Tembakau. Mereka yang menandatangani petisi, antara lain, mantan Ketua MPR Amien Rais, pengusaha Arifin Panigoro, Farid Anfasa Moeloek, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dan Ketua YLKI Huza Zahir. Kalangan selebritas atau artis yang ikut menandatangani petisi ini di antaranya Dewi Rezer, Cynthia Lamuzu, dan Widyawati.¹¹

Desakan itu terus bergulir. Sekitar 100 orang yang terdiri dari mahasiswa, ibu-ibu dan anak-anak yang menamakan Aliansi Total Ban menggelar demo di depan gedung DPR pada 3 Agustus 2009. Mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Pengendalian dan Dampak Produk Tembakau.¹² Tanggal 29 Mei 2010, digelar demo yang diikuti 40 orang yang berasal Sekertariat Jenderal Kementerian Kesehatan di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mereka menyerukan, larangan merokok. Karena dinyatakan, rokok dapat membahayakan kesehatan paru-paru dan jantung. Sebagian siswa yang terlibat, turut pula membagi-bagikan anti rokok kepada pengendara yang lewat.¹³ Tahun 2011, kembali digelar demo yang melibatkan ribuan orang yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, ABRI, Polisi serta kalangan selebriti dan beberapa tokoh masyarakat melakukan jalan kaki dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Balaikota DKI.¹⁴

Kampanye antirokok juga membutuhkan keterlibatan organisasi keagamaan dalam produknya: fatwa.¹⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat – sesudah menempati kantor baru¹⁶ – merasa perlu mengumumkannya terlebih dulu.¹⁷ Sidang tahunan komisi fatwa MUI digelar pada 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang dihadiri sekitar 650 ulama.¹⁸ Dalam sidang komisi fatwa ini MUI mengeluarkan fatwa haram bagi anak-anak, perempuan hamil dan di tempat umum, serta mengharamkan juga meditasi yoga yang menggunakan ritual Hindu.¹⁹ Namun, sebelum fatwa dikeluarkan, hasil survei Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan, MUI sebagai lembaga yang sering disuap terkait penerbitan produknya: sertifikat halal.²⁰

¹¹ Lihat “Segera Ratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau,” *Kompas*, Kamis, 13 November 2008. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI merilis hasil studi, kontribusi industri rokok hanya 1,3 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Jika tarif cukai tembakau dinaikkan sampai 57 persen akan mencegah 2,4 juta kematian akibat rokok dan menambah pendapatan negara Rp 50,1 triliun.

¹² Kelompok Anti Rokok Demo di DPR, *rakyatmerdeka.co.id*, Senin, 03 Agustus 2009, 16:17:57 WIB.

¹³ Lihat “Demo Anti Rokok di Bundaran HI,” *okezone.com*, Sabtu, 29 Mei 2010 10:16 wib.

¹⁴ Lihat “Hari Tanpa Tembakau, Pelajar Longmarch,” *kompas.com*, Senin, 30 Mei 2011 | 22:23 WIB.

¹⁵ Lihat “Komnas PA Desak Ijtima' MUI Fatwakan Rokok Haram,” *detik.com*, Rabu, 21 Januari 2009 11:46 WIB.

¹⁶ Lihat “MUI Pindah Kantor Baru Senilai Rp 8,9 Miliar,” *detik.com*, Kamis, 24 Juli 2008 19:00 WIB.

¹⁷ Lihat “MUI Keluarkan Fatwa Rokok Januari 2009,” *kompas.com*, Senin, 24 November 2008 | 17:09 WIB.

¹⁸ Lihat “650 Ulama Hadiri Sidang Tahunan MUI,” *detik.com*, Sabtu, 24 Januari 2009 12:30 WIB.

¹⁹ Lihat “MUI: Merokok Haram,” *bbc.co.uk*, Minggu, 25 Januari 2009 - 13:08 GMT; dan “MUI: Rokok Haram untuk Anak, Remaja, Wanita Hamil dan di Tempat Umum,” *detik.com*, Minggu, 25 Januari 2009 21:28 WIB.

²⁰ Lihat “Survei TII: MUI Sering Disuap,” *detik.com*, Rabu, 21 Januari 2009 17:20 WIB; “Survei Transparansi Indonesia: Majelis Ulama Tak Luput Dari Suap,” *vivanews.com*, Jumat, 12 April 2013 | 08:41 WIB; “MUI Disebut Sering Disuap, FPPP: Jangan-jangan Ada Udang di Balik Batu,” *detik.com*, Kamis, 22 Januari 2009 13:06 WIB; “MUI Bantah Tuduhan Suap TII,” *republika.co.id*, Jumat, 20 Februari 2009, 04:32 WIB; dan “Agar Tak Dibilang Korup, MUI Harus Terbuka Soal Sertifikat Halal,” *detik.com*, Kamis, 22 Januari 2009 09:30 WIB.

Selang lebih setahun kemudian, giliran Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengalami pergeseran hukum agama dalam memandang rokok seiring dikeluarkannya fatwa haram merokok dalam rapat Majelis Tarjih dan Tajdid pada 8 Maret 2010 di Yogyakarta. Dengan fatwa haram kali ini, maka mengubah hukum *mubah* yang sebelumnya difatwakan menjadi larangan.²¹ Fatwa ini menuai dukungan dari MUI.²² Muhammadiyah mengakui telah menerima dana dari lembaga di luar negeri sebesar Rp 3,7 miliar untuk kampanye udara bersih di Indonesia.²³ Namun demikian, Muhammadiyah membantah gelontoran dana dari pengusaha Amerika Serikat (AS) Michael Bloomberg ini digunakan untuk penetapan fatwa haram merokok.²⁴

Serangan secara verbal terhadap industri pengolahan tembakau tidak hanya menekan negara atau pemerintah untuk mengendalikan atau mengekang dampak tembakau, namun juga menyajikan data yang terus berulang untuk mengingatkan bahayanya yang sangat serius. Pada Maret 2012, Direktur Jenderal WHO Margaret Chan menegaskan, pihaknya tidak akan pernah membiarkan industri tembakau berada di atas angin, karena tembakau adalah pembunuh. Sehingga tidak boleh diiklankan, disubsidi, atau dibuat glamor. Mendukung WHO, World Lung Foundation (WLF) mencatat apa yang ditemukannya bahwa kematian akibat merokok melonjak hampir tiga kali lipat dalam satu dekade terakhir. Situs www.tobaccoatlas.org menyajikan data, tembakau telah membunuh 50 juta orang dalam 10 tahun terakhir, dan rokok bertanggung jawab atas lebih dari 15 persen dari semua kematian pria dan 7 persen kematian perempuan. Tembakau dianggap sebagai pembunuh nomor satu di Cina yang menyebabkan 1,2 juta kematian per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 3,5 juta per tahun pada 2030.²⁵

Kementerian Kesehatan mempromosikan bahwa rokok ditempatkan sebagai salah satu “mesin pembunuh” yang telah menyebabkan kematian 300.000 orang per tahun di Indonesia.²⁶ Dengan mengutip hasil survei Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) tahun 2007, tidak ketinggalan, YLKI menyatakan, sebanyak 1.127 orang meninggal setiap hari atau 46 orang per jam akibat rokok, karena setiap tahun angka kematian akibat rokok di Indonesia setiap tahun yang mencapai 405.720 orang. Bahkan, sebesar 14,5 persen korban yang meninggal masih berusia remaja.²⁷ Sebelumnya – dengan mengutip hasil survei WHO pada 2006-2007 – YLKI

²¹ Lihat “Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Merokok,” *antaranews.com*, Selasa, 9 Maret 2010 12:21 WIB; “PP Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Merokok,” *detik.com*, Selasa, 09 Maret 2010 16:41 WIB; “Fatwa PP Muhammadiyah: Merokok Haram!” *kompas.com*, Selasa, 9 Maret 2010 | 10:12 WIB; dan “Muhammadiyah: Merokok Haram,” *kompas.com*, Rabu, 10 Maret 2010 | 02:38 WIB. Dengan fatwa ini, maka fatwa yang diterbitkan tahun 2005 dan 2007, yang menyatakan merokok hukumnya *mubah*, dinyatakan tidak berlaku.

²² Lihat “MUI Dukung Muhammadiyah Soal Fatwa Rokok Haram,” *detik.com*, Rabu, 10 Maret 2010 02:10 WIB.

²³ Lihat “Muhammadiyah Akui Terima Rp 3,7 Miliar dari Asing,” *tempo.co*, Rabu, 17 Maret 2010 | 06:13 WIB; dan “Pengusaha AS Beri Muhammadiyah Rp 3,6 Miliar Perangi Rokok,” *detik.com*, Sabtu, 13 Maret 2010 16:15 WIB.

²⁴ Lihat “Muhammadiyah: Penetapan Fatwa Haram Rokok Bukan Karena Uang Bloomberg,” *detik.com*, Sabtu, 13 Maret 2010 16:36 WIB.

²⁵ Lihat “Kematian akibat Rokok Melonjak Tiga Kali Lipat,” *kompas.com*, Jumat, 23 Maret 2012 | 09:36 WIB.

²⁶ Lihat “Rokok Diperkirakan “Bunuh” 300.000 Orang Per Tahun,” *kompas.com*, Selasa, 29 Mei 2012 | 19:32 WIB. Promosi ini disampaikan Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Ekowati Rahajeng.

²⁷ Lihat “Per Jam, 46 Orang Meninggal Akibat Rokok,” *viva.co.id*, Selasa, 2 Juni 2009, 07:23. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok dan Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Tujuh kawasan dilarang merokok meliputi tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat belajar-mengajar, arena bermain anak,

menyatakan, sekitar 427 ribu orang meninggal setiap tahun atau 1.172 orang per hari di Indonesia karena rokok.²⁸ Padahal, Badan Khusus Pengendalian Tembakau (Tobacco Control Support Center – TCSC) IAKMI, memang menunjukkan angka kematian yang sama dengan WHO.²⁹ Dengan promosi ini bahaya rokok bukan lagi sekadar terkait dengan hak atas kesehatan, namun sudah berada dalam batasan hak untuk hidup (*the right to life*).³⁰

Mengutip-utip data WHO juga dilakukan Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Julia Reveny. Dia menerangkan, terjadi satu kematian akibat penyakit kardiovaskuler setiap dua detik, serangan jantung setiap lima detik dan akibat stroke setiap enam detik. Setiap tahun diperkirakan 17 juta orang di berbagai negeri meninggal akibat penyakit kardiovaskuler, terjadinya penyumbatan pembuluh darah (*aterosklerosis*) sebenarnya tidak hanya dipicu dari tingginya konsumsi makanan berlemak, namun juga dipicu karena merokok.³¹ Sedangkan kutipan dari IAKMI dilakukan Pusat Kajian Bioetik dan Perilaku Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah China dan India, dalam kasus kematian akibat menghisap rokok. Dari 1.127 orang yang meninggal setiap hari, sebanyak 67 persen adalah laki-laki.³²

Dengan menganggap bahwa konsumsi rokok mengakibatkan kematian, Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti menyajikan hasil survei *The Global Youth Tobacco Survey 2012*. Dalam laporan survei ini disebutkan, sekitar 70 juta anak Indonesia terancam mengidap penyakit kronis akibat hidup serumah dengan perokok. Sebanyak 74,2 persen anak terpapar asap rokok selama di rumah, karena 67 persen rumah tangga terdapat sedikitnya seorang perokok dan hampir semua perokok (91,8 persen) merokok di rumah. Tambahan lagi – menurut WHO dengan 4.000 elemen racun – rokok merupakan penyebab kematian utama di dunia dan membunuh sepertiga hingga setengah penggunaannya dengan korbannya rata-rata meninggal 15 tahun lebih cepat. Tahun 2008, diperkirakan 5,4 juta orang meninggal karena rokok.³³ Semua itu mengesankan bahwa konsumsi rokok adalah penyebab tunggal kematian. Asap rokok bukan satu-satunya penyebab kanker paru-paru. Seseorang yang tidak merokok dapat juga terkena kanker paru-paru akibat terpapar radiasi atau menghirup zat-zat senyawa kimia tertentu. Almarhumah Endang Rahayu Sedyaningsih – mantan Menteri Kesehatan yang termasuk gencar mendorong pemerintah SBY untuk mengendalikan dampak konsumsi rokok atau tembakau dan mendapatkan penghargaan dari WHO – adalah contoh kasus sebagai penderita kanker paru-paru

angkutan umum, tempat umum dan tempat bekerja. Perokok yang kedapatan merokok di tujuh kawasan itu seharusnya dapat dikenai sanksi penjara enam bulan.

²⁸ Lihat “Sehari, 1.172 Orang Meninggal Karena Rokok,” *viva.co.id*, Minggu, 31 Mei 2009, 12:59 WIB.

²⁹ Lihat “70 Juta Anak Indonesia Serumah dengan Perokok,” *poskotanews.com*, Senin, 23 Juli 2012 15:01:56 WIB.

³⁰ Lihat “Hargai Hak Hidup Perokok Pasif,” *health.kompas.com*, Selasa, 24 April 2012 | 06:42 WIB.

³¹ Lihat “Awas, Rokok Penyebab Utama Kematian di Seluruh Dunia,” *palembang.tribunnews.com*, Rabu, 5 Oktober 2011 20:08 WIB.

³² Lihat “Kematian Akibat Merokok, Indonesia Tempati Peringkat Ketiga di Dunia,” *detik.com*, Jumat, 29/05/2009 17:34 WIB.

³³ Lihat “70 Juta Anak Indonesia Serumah dengan Perokok,” *poskotanews.com*, Senin, 23 Juli 2012 15:01:56 WIB. Pengisap asap rokok mengalami resiko lebih besar dibanding yang tidak mengisap asap rokok, yaitu 14 kali lebih beresiko menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan; 4 kali lebih beresiko menderita kanker esophagus; 2 kali lebih beresiko kanker kandung kemih; 2 kali lebih beresiko serangan jantung. Rokok juga meningkatkan resiko kefatalan bagi penderita pneumonia dan gagal jantung, serta tekanan darah tinggi.

stadium tiga, sebelum beliau meninggal. Beberapa zat ditemukan sebagai hasil pemeriksaan di laboratorium antara lain asbestos, arsen, kromat, nikel klorometil eter dan gas mustard.³⁴

Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengambil posisi berbeda dengan WHO. Dikemukakannya, rokok itu tidak selalu berbahaya bagi kesehatan, apalagi sebagai penyebab kematian. Berdasarkan penelitian rokok terbaru, ternyata asap rokok bisa menyembuhkan berbagai penyakit sebagaimana hasil temuan suatu zat oleh Guru Besar Universitas Brawijaya Prof Sutiman Bambang Soemitra. Zat yang dimaksud bisa menetralkan zat-zat berbahaya dari asap rokok, yang bernama *divine kretek* yang ditemukan oleh ahli kimia radiasi Indonesia Dr Gretha Zahar. Rokok yang sudah ditetesi zat *divine kretek*, asapnya tidak berbahaya bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Gretha menemukan *scavenger* yang menghasilkan *devine kretek*, dan *scavenger* dihasilkan dengan teknologi nano. Disebutkan pula contohnya, bahwa istri Prof Sutiman mengalami kanker payudara, namun dengan metode pengobatan dokter Gretha melalui asap rokok, justru mengalami kesembuhan.³⁵ Hasil temuan mereka terdokumentasi dalam sebuah buku.³⁶

Menentang kesan tunggal bahwa rokok sebagai penyebab kematian atau penyakit kanker paru-paru, bisa lebih dahsyat lagi bila dikaitkan dengan apa yang menjadi momok di atmosfer dan permukaan dunia (bumi): pemanasan global (*global warming*) dan efek rumah kaca (*green house effect*). Sumber utamanya berasal dari emisi karbon atau gas buang, yaitu beberapa senyawa kimia Karbon dioksida (CO₂), Chloro fluorocarbon (CFC), Methana (CH₄), Dinitro oksida (N₂O), Sulfur heksafluorida (SF₆), dan Sulfur dioksida (SO₂). Bahkan ada pula Karbon monoksida (CO), karena pembakaran tidak sempurna dan kekurangan oksigen (O₂), namun dengan proses alami di atmosfer akan teroksidasi menjadi CO₂. Emisi karbon ini berlangsung karena banyaknya bahan bakar fosil atau lebih dikenal dengan bahan bakar minyak (BBM) yang dimuntahkan dari pembakaran untuk menggerakkan berbagai kendaraan seperti mobil pribadi, sepeda motor, bus, truk, kereta api, kapal laut, dan pesawat maupun beraneka aktivitas pabrik-pabrik industri, juga penebangan dan pembakaran hutan (deforestasi), sehingga di atmosfer meningkat intensitas efek rumah kaca dan membentuk kabut polusi di permukaan bumi.³⁷ Selain produksi energi seperti batubara, minyak dan gas dipakai sebagai sumber bahan bakar dalam pembangkit listrik untuk menggerakkan turbin, juga penggunaan barang-barang elektronik yang tidak hemat energi.³⁸

Dampak pemanasan global antara lain timbulnya kekeringan yang parah, banjir, dan badai yang berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan atas kehidupan seperti peningkatan serangan udara panas atau kematian akibat panas, juga merosotnya kesehatan terkait cuaca buruk, banjir,

³⁴ Lihat "Rokok Bukan Satu-satunya Penyebab Kanker Paru," *metrotvnews.com*, Kamis, 03 Mei 2012 | 11:00 WIB.

³⁵ Lihat "Fahmi Idris: Rokok Tak Selamanya Jadi Lonceng Kematian," *finance.detik.com*, Selasa, 28 Februari 2012 17:18 WIB; dan "Divine Kretek Obat Kanker Mahakarya Bidang Kesehatan," *bisnis-jateng.com*, Kamis, 23 Juni 2011.

³⁶ Kodrat Wahyu Dewanto dkk., *Divine Kretek, Rokok Sehat : Inovasi Dr. Gretha Zahar, Prof. Sutiman Bambang Sumitro, Drs., M.S., D.Sc.*, Jakarta: Masyarakat Bangsa Produk Indonesia, 2011.

³⁷ Lihat "Penyebab Pemanasan Global," <http://www.indoenergi.com/2012/04/penyebab-pemanasan-global.html> (diakses pada 7 April 2013); dan "Perubahan Iklim dan Efek Rumah Kaca," <http://www.streamindonesia.org/resource-center/perubahan-iklim-dan-efek-rumah-kaca?language=id> (diakses pada 7 April 2013)

³⁸ Lihat "Apa Penyebab Utama Pemanasan Global," <http://www.pemanasnglobal.net/faq/apa-penyebab-utama-pemanasan-global.htm> (diakses pada 7 April 2013).

badai atau angin kencang dan kebakaran hutan.³⁹ Riset yang dimuat jurnal kesehatan *British Medical Journal* menyatakan, penurunan suhu tiap 1 derajat pada suatu hari di Inggris berkaitan dengan bertambahnya 200 kasus serangan jantung. Sedangkan ketika terjadi gelombang panas, kematian akibat sakit jantung pun meningkat. Pertengahan Agustus 2003, lebih dari 11.000 orang tewas di Prancis akibat sakit jantung, ketika suhu di wilayah itu mencapai 40 derajat celsius. Musim panas 2003, dengan cuaca panas yang tinggi menyebabkan 2.000 kematian di Inggris.⁴⁰ Cuaca panas ekstrim yang melanda sebagai besar wilayah Jepang mengakibatkan empat warga dilaporkan meninggal karena tidak dapat menahan serangan panas dalam suhu 38,4 derajat Celcius yang terjadi pada 28 Juli 2012 di utara Tokyo.⁴¹ Korea Selatan pun menyusul, dengan 14 orang meninggal karena penyakit terkait panas, seperti serangan *stroke* dan dehidrasi.⁴² Kasus sebelumnya terjadi di AS. Gara-gara gelombang panas dengan suhu tertinggi 41 derajat Celcius, 46 orang dilaporkan tewas.⁴³ Selain bagi manusia, dampaknya juga dialami banyak hewan ternak.⁴⁴

Dengan kasus-kasus itu, rasanya jelas bahwa industri pengolahan tembakau dan cengkeh bukan sebagai kontribusi utama dalam menimbulkan kekacauan atau perubahan iklim (*climate change*) dan polusi udara, sehingga tidak pula langsung – apalagi satu-satunya penyebab – sebagai biang kerok kematian dan serangan jantung atau kanker paru-paru. Asap rokok juga bukan satu-satunya asap yang dihirup perokok. Industri pengolahan tembakau dan cengkeh bukanlah industri yang menghasilkan paparan asap knalpot – salah satu emisi gas buang yang berbahaya bagi kesehatan dan pengaruh bahan pencemar terhadap organ lain seperti sistem syaraf⁴⁵ – yang membentuk kabut di jalan-jalan, bahkan tidak pula menghasilkan racun kimia dalam pestisida yang disemprot-semprotkan pada tanaman yang banyak dikonsumsi sebagai bahan makanan banyak orang.⁴⁶

Demikian pula, tanpa perlu melebih-lebihkan, riset dari University of California Los Angeles (UCLA), yang dibahas dalam American Association for Cancer Research mengungkapkan, perempuan yang terpapar polusi dari kendaraan bermotor (emisi dari mobil dan truk) dengan kadar tinggi ketika tengah mengandung dapat memberikan risiko yang tinggi bagi si anak untuk terserang kanker anak, termasuk *acute lymphoblastic leukemia* dan *retinoblastoma*. Sebelumnya sebuah studi yang dipublikasikan dalam *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* pada 2011 menemukan bahwa penduduk yang tinggal di kawasan berpolusi udara tinggi dapat meningkatkan risiko kematian akibat kanker paru-paru sebesar 20 persen. Pada

³⁹ Lihat “Akibat Pemanasan Global,” <http://www.indoenergi.com/2012/04/akibat-pemanasan-global.html> (diakses pada 7 April 2013).

⁴⁰ Lihat “Perubahan Iklim Sebabkan Kematian,” bbc.co.uk, Kamis, 12 Agustus 2010 - 07:08 GMT.

⁴¹ Lihat “Cuaca Panas Ekstrim Melanda Jepang, Empat Tewas,” liputan6.com, Minggu, 29 Juli 2012 18:46.

⁴² Lihat “Cuaca Panas, 14 Warga Korsel Tewas,” surabayapagi.com, Jumat, 10 Agustus 2012 | 03:45 WIB.

⁴³ Lihat “Cuaca Panas di AS, 46 Warga Tewas,” viva.co.id, Sabtu, 7 Juli 2012, 13:34.

⁴⁴ Lihat “Ribuan Ikan Mati, Petani Rugi Ratusan Juta,” kompas.com, Senin, 22 Oktober 2012 | 14:46 WIB; “Banyak Unggas Mati Mendadak, Warga Khawatir,” radarlampung.co.id, Jumat, 28 Desember 2012; “Ratusan Unggas Mati Selama Kemarau,” suaramerdeka.com, 02 Oktober 2012 | 07:25 wib; dan “Ribuan Ternak Mati Terbakar,” kompas.com, Kamis, 10 Januari 2013 | 01:47 WIB.

⁴⁵ A Tri Tugawati, “Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Kesehatan,” http://www.kpbb.org/makalah_ind/Emisi%20Gas%20Buang%20Bermotor%20-%26%20Dampaknya%20Terhadap%20Kesehatan.pdf (diakses pada Rabu, 20 Februari 2013).

⁴⁶ Lihat “Asosiasi Rokok: Asap Knalpot Jelas Ganggu Kesehatan,” suaramerdeka.com, Senin, 11 Februari 2013 | 16:49 wib.

2009, Environmental Protection Agency juga sempat merilis data yang memperlihatkan bahwa orang-orang yang tinggal di lingkungan berpolusi tinggi berisiko tinggi terkena kanker karena tingginya konsentrasi senyawa kimia beracun yang terkandung di udara.⁴⁷

Masih ingat dengan dampak menyemburnya luapan lumpur gas yang bersumber dari lubang-lubang pengeboran gas berkat aktivitas penambangan di dekat pemukiman penduduk yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006? Tidak dapat dibendung banjir lumpur gas – mengandung senyawa kimia Arsen, Barium, Boron, Timbal, Raksa, Sianida Bebas, Trichlorophenol, Kromium, Kadmium, dan Tembaga – itu telah memusnahkan atau menenggelamkan kawasan pemukiman penduduk, pertanian, peternakan dan perikanan, dan perindustrian di 16 desa dari tiga kecamatan di sekitarnya, merusak sungai-sungai, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.⁴⁸ Belum lagi dihitung berapa banyak yang menderita kerusakan paru-paru, penyakit kulit, atau terbakar gas metan,⁴⁹ selain kerusakan fisik tanah yang mengalami proses sedimentasi lumpur di darat.

5.1.2. Kebijakan pengendalian tembakau

Namun demikian, rokok justru menjadi satu-satunya sasaran pengetatan atau pengekanan (*restriction*) untuk mengarahkannya sebagai barang “setengah ilegal”. DPRD Sumbar mengusulkan pemuatan sanksi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok segera disahkan menjadi perda untuk memberikan efek jera pada perokok.⁵⁰ Usulan dalam bentuk denda uang Rp 500.000 bagi setiap orang yang melanggar aturan merokok di sembarang tempat dirancang dalam Raperda oleh DPRD Kabupaten Sleman.⁵¹ Sebelumnya, sekitar 30 orang ditangkap karena melanggar larangan merokok di Terminal Blok M dan pusat perbelanjaan Blok M Mall oleh BPLHD Jakarta Selatan pada 2008.⁵² Penangkapan juga berlangsung di sekitar Kantor Wali Kota Bogor atas 40 perokok ketahuan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor tentang Kawasan Tanpa Rokok.⁵³ Penerapan perlindungan kesehatan orang lain dari paparan asap rokok, sejumlah pemerintah di daerah-daerah juga sudah merealisasikan kawasan tanpa rokok (KTR).⁵⁴

Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) mengakui adanya kesulitan bagi penggerak kampanye bahaya merokok dalam menyaingi iklan dan promosi rokok. Sebaliknya iklan rokok berpengaruh besar dalam merayu calon perokok baru dan muda. Dengan landasan bahwa rokok

⁴⁷ Lihat “Waduh, Kena Polusi Udara Terus-Menerus Bikin Anak Rentan Kanker,” *health.detik.com*, Jumat, 12/04/2013 09:59 WIB. Studi UCLA ini melibatkan 3.950 anak yang terlahir antara tahun 1998-2007 dan terdaftar dalam California Cancer Registry. Kesemua partisipan telah didiagnosis kanker pertama kali ketika mencapai usia lima tahun.

⁴⁸ Ali Azhar Akbar, *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo: Dari Aktor Hingga Strategi Kotor*, Yogyakarta: Galang Press, 2007. Lihat juga, “Banjir lumpur panas Sidoarjo,” https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo (diakses pada 12 April 2013).

⁴⁹ Lihat “Terbakar Gas Metan, Setahun Korban Lapindo Diabaikan,” *korbanlumpur.info*, Minggu, 16 Oktober 2011.

⁵⁰ Lihat “DPRD Bahas Sanksi bagi Perokok,” *padangekspres.co.id*, Jumat, 25 Mei 2012 13:03 WIB.

⁵¹ Lihat “Buat Perokok, Sanksi Rp 500 Ribu Menanti Anda!” *republika.co.id*, Jumat, 11 Januari 2013, 10:43 WIB.

⁵² Lihat “30 Pelanggar Larangan Merokok Ditangkap,” *tempo.co*, Rabu, 19 November 2008 | 13:23 WIB.

⁵³ Lihat “Tindak Pidana Ringan, 40 Perokok Ditangkap,” *kompas.com*, Rabu, 30 November 2011 | 12:39 WIB.

⁵⁴ Lihat “Mulai 2013, Kawasan Tanpa Rokok Diwajibkan,” *kompas.com*, Rabu, 23 Januari 2013 | 18:58 WIB; “Bali Berlakukan Perda Kawasan Tanpa Rokok,” *voaindonesia.com*, Sabtu, 02 Juni 2012; “Muspida Dukung Perda Kawasan Tanpa Rokok,” *fajar.co.id*, Jumat, 02 November 2012 | 20:12:08 WITA; dan “Pemko Bukittinggi Terapkan Sanksi Perda Kawasan Tanpa Rokok,” *rri.co.id*, Selasa, 22 Januari 2013 10:46.

sebagai produk dapat menimbulkan kecanduan dan berbahaya bagi kesehatan, maka LDUI mengusulkan larangan iklan rokok. Komnas PT juga menyetujui iklan rokok dilarang.⁵⁵ Dengan masih memberi peringatan bergambar dalam produk rokok dianggap TCSC-IAKMI terlalu kecil, sehingga menyimpulkan masih mengabaikan kepentingan kesehatan seluruh rakyat.⁵⁶ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengusulkan, iklan di media massa dan sponsor rokok harus dilarang total karena pengaruhnya sangat besar bagi anak-anak dan remaja.⁵⁷

Demikianlah, sesudah FCTC diadopsi Majelis Kesehatan Dunia (WHA), kampanye anti rokok di Indonesia kian gencar dilakukan supaya regim kesehatan dunia mencapai targetnya dalam memerangi konsumsi dan industri rokok. Pengendalian tembakau pun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009, yakni RUU Pengendalian Dampak Tembakau. DPR pun didesak untuk segera membahasnya.⁵⁸ Pada 24 November 2008, seorang anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR mengklaim, RUU ini sudah mendapat dukungan dari 254 anggota DPR – dalam bentuk tanda tangan – untuk segera dibahas. RUU ini akan mengatur antara lain pengendalian perdagangan dan peredaran tembakau serta cara-cara berpromosi termasuk iklan rokok.⁵⁹ Namun, sampai periode keanggotaan DPR berakhir, RUU ini gagal diselesaikan sesuai periodenya. Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan – lembaga yang bergerak dalam isu pengendalian tembakau – menyatakan DPR telah gagal.⁶⁰

Kendati gagal mengesahkan RUU Pengendalian Tembakau, DPR masih dapat menunjukkan hasilnya dengan menyetujui UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Pada 14 September 2009, Ketua DPR memimpin pengesahan dalam rapat paripurna yang berlangsung cepat dan disetujui seluruh fraksi. Ketua Komisi IX juga menyatakan, UU ini penting bagi perlindungan pasien dan mengatur pelayanan maksimal pada pasien. Dengan demikian, pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien dengan alasan apa pun.⁶¹

Merasa kehendaknya tidak diakomodasi, beberapa kelompok membentuk Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) – Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), dan Campaign for Tobacco Free Kids – serta melaporkannya kepada Kepolisian Daerah (Polda) Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya) pada 22 Desember 2009.⁶² Terkait raibnya “ayat tembakau”, ICW menyebutkan tiga orang dari

⁵⁵ Lihat “Iklan Rokok Seharusnya Dilarang,” *kompas.com*, Jumat, 14 September 2012 | 09:57 WIB.

⁵⁶ Lihat “Kepentingan Kesehatan Seluruh Rakyat Terkalahkan,” *kompas.com*, Jumat, 20 April 2012 | 07:42 WIB.

⁵⁷ Lihat “KPI: Iklan Rokok Harus Dilarang Total,” *gatra.com*, Rabu, 30 Januari 2013 12:00.

⁵⁸ Lihat “DPR Harus Bahas RUU Dampak Tembakau,” *kompas.com*, Rabu, 2 Juli 2008 | 12:23 WIB.

⁵⁹ Lihat “DPR Segera Bahas RUU Pengendalian Tembakau,” *kompas.com*, Senin, 24 November 2008 | 16:58 WIB.

⁶⁰ Lihat “Indonesia Gagal Kendalikan Tembakau,” *kompas.com*, Selasa, 15 September 2009 | 04:40 WIB.

⁶¹ Lihat “RUU Kesehatan Disahkan, Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Pasien,” *health.detik.com*, Senin, 14 September 2009 13:40 WIB; dan “Rancangan Undang Undang Kesehatan Disahkan,” *tempo.co*, Senin, 14 September 2009 | 18:34 WIB.

⁶² Tidak dicantumkan ayat tembakau dalam UU Kesehatan yang disahkan itu dianggap sebagai bentuk tindak pidana korupsi oleh KAKAR. Ayat yang dimaksud adalah Ayat (2) Pasal 113 Undang-Undang Kesehatan berbunyi zat adiktif sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Tidak dicantumkan “ayat tembakau” ini menimbulkan kecurigaan intervensi pihak luar. KAKAR juga melaporkan dugaan adanya suap dalam penghilangan ayat rokok pada UU ini kepada KPK pada 29 Oktober 2009 dan kepada Badan Kehormatan DPR. Ada pula yang menyebut sebagai “kejahatan konstitusional”. Lihat Korupsi Ayat Tembakau Dilaporkan ke KPK Pekan Depan,” *kompas.com*, Jumat, 23 Oktober 2009 | 21:04

unsur DPR dan pemerintah (Depkes) yang diduga terlibat, dengan motif mendapat uang atau bayaran.⁶³ Namun, Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Kesehatan Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengklarifikasi, kehilangan ayat ini karena kesalahan teknis belaka, selain mengakui keberatan fraksinya dengan ayat ini yang bisa berdampak pada kepentingan petani dan buruh.⁶⁴ Dalam proses penyidikan, Mabes Polri menetapkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), karena kasus penghilangan ayat rokok atau tembakau ini bukan merupakan tindak pidana.⁶⁵ Kendati demikian, Ribka dilarang untuk memimpin rapat Pansus dan Panja oleh Badan Kehormatan (BK).⁶⁶ Dalam kasus gugat-mengguta ini tandingan KAKAR adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Rembug Tani Nasional Nahdlatul Ulama (RTN NU) yang memutuskan untuk menggugat UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehubungan Pasal 113 UU Kesehatan yang menyebut, tembakau komoditas mengandung zat adiktif.⁶⁷

Dalam kaitan tembakau dan rokok, DPR tidaklah bersuara bulat. Sedikit ada dua kubu, yaitu yang membela kepentingan petani tembakau dan buruh di satu kubu serta di kubu lain ada yang merasa peduli dengan kesehatan masyarakat. Badan Legislasi (Baleg) DPR diharapkan Ketua Kaukus Kesehatan DPR Subagyo Partodihardjo masih membutuhkan RUU Tembakau yang tidak diselesaikan pada periode lampau menjadi UU. Dia menyatakan, kandasnya proyek RUU sebelumnya tidak menyurutkan rencana pihaknya untuk kembali mengajukan ke Baleg. Judulnya yang baru adalah RUU Perlindungan Kesehatan Rakyat dari Dampak Merokok, karena dianggapnya dampak yang ditimbulkan atas kesehatan jauh lebih dahsyat dan dampak kesehatan itu berpengaruh pada sosial dan ekonomi, sehingga tidak perlu khawatir didemo oleh petani tembakau dan buruh pabrik rokok yang ditudingnya dibiayai oleh industri rokok.⁶⁸

Ketiadaan UU Pengendalian Tembakau itu pula yang mendorong pemerintah justru mengalihkannya dengan menggelindingkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau. Pemerintah bahkan mendasarkan RPP ini pada UU Kesehatan yang katanya diamankan Pasal 116. Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah memandang penting dilakukan kajian secara lebih seksama tentang industri rokok global dan lokal sebelum RPP disahkan untuk mencegah negara

WIB; "KAKAR Laporkan Upaya Penghilangan Ayat Tembakau ke Polisi," *kompas.com*, Selasa, 22 Desember 2009 | 21:29 WIB; "Penghilangan Ayat Tembakau Dilaporkan ke KPK," *kompas.com*, Kamis, 29 Oktober 2009 | 12:22 WIB; dan "Hilangnya Ayat Tembakau, Modus Baru Kejahatan Konstitusi?" *kompas.com*, Kamis, 15 Oktober 2009 | 11:00 WIB.

⁶³ Lihat "ICW: Ada Tiga Nama Penghilang Ayat Tembakau," *kompas.com*, Minggu, 18 Oktober 2009 | 15:02 WIB; dan "Ayat Tembakau Hilang, DPR dan Depkes Diadukan ke Polisi," *kompas.com*, Jumat, 16 Oktober 2009 | 14:12 WIB.

⁶⁴ Lihat "Raibnya Ayat Tembakau Cuma Kesalahan Teknis," *kompas.com*, Selasa, 13 Oktober 2009 | 20:04 WIB; dan "Soal Ayat Tembakau, Ribka Siap Tanggung Jawab," *kompas.com*, Selasa, 20 Oktober 2009 | 15:57 WIB.

⁶⁵ Lihat "Mabes Polri: SP3 Kasus 'Ayat Tembakau' Sah," *viva.co.id*, Rabu, 22 Februari 2012, 13:14; "Penghilangan Ayat Tembakau Bukan Tindak Pidana," *kompas.com*, Rabu, 22 Februari 2012 | 13:53 WIB; "KAKAR Gugat SP3 Kasus Penghilangan Ayat Tembakau," *kompas.com*, Rabu, 18 Januari 2012 | 22:40 WIB; dan "Sidang Praperadilan Ayat Tembakau di PN Jaksel," *kompas.com*, Senin, 20 Februari 2012 | 12:01 WIB.

⁶⁶ Lihat "Ribka Dilarang Pimpin Rapat karena Ayat Tembakau Hilang," *tribunnews.com*, Selasa, 17 April 2012 14:27 WIB.

⁶⁷ Lihat "Tembakau Adiktif, NU Gugat UU Kesehatan ke MK," *viva.co.id*, Sabtu, 21 Januari 2012, 22:59.

⁶⁸ Lihat "Pakai Nama Baru, RUU Tembakau akan Kembali Diajukan ke Baleg DPR," *detik.com*, Kamis, 31 Mei 2012 16:46 WIB.

terlibat dalam aksi yang ujung-ujungnya justru menguntungkan korporasi rokok asing dalam operasinya di Indonesia.⁶⁹

Digelindingkannya RPP Tembakau itu menimbulkan protes petani dan buruh tembakau di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan NTB. Antara lain, Masyarakat Jawa Timur (Jatim) – gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Propinsi Jatim, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jatim, serta Tim Revitalisasi Pertembakauan Jatim – menilai RPP menyimpang UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 116, karena dikesankan tunggal bahwa hanya produk tembakau saja yang mengandung zat adiktif.⁷⁰ Gelombang protes dari lapisan petani dan buruh tembakau serta pengusaha dan buruh industri rokok *kretek* maupun berbagai aliansi dan asosiasi yang berkepentingan mempertahankan supaya industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia tidak dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Karena selama ini mereka menggantungkan hidup dari industri pengolahan tembakau dan cengkeh dan PP ini mengancam masa depan mereka. Gelombang protes ini sempat meneriakkan boikot pajak, boikot Pemilu, yang muncul dari petani tembakau di sejumlah daerah.⁷¹



sumber: pressphotobureau.com (diambil dari beritasatu.com)

⁶⁹ Lihat “Pelajari Industri Rokok Sebelum Sahkan RPP Tembakau,” *beritasatu.com*, Kamis, 05 Juli 2012 | 06:00. Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK), pasar nikotin global tercatat bernilai 378 miliar dollar AS dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen pada 2007. Tahun 2012 diproyeksikan meningkat sebesar 23 persen dengan estimasi nilai mencapai angka 464,4 miliar dollar AS. Angka itu melebihi pendapatan domestik bruto (PDB) negara-negara maju seperti Norwegia dan Arab Saudi. Konsumen tembakau paling besar ada di China, diikuti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, negara-negara pecahan Uni Soviet, Brasil, Jepang, Indonesia, Turki dan Pakistan. Ada empat perusahaan produk tembakau terbesar dunia yang menguasai sekitar 46 persen konsumsi dunia, yaitu Phillip Morris International Inc (16 persen) dan British American Tobacco (13 persen) – keduanya perusahaan berbasis di AS – Japan Tobacco (11%), dan Imperial Tobacco (6 persen).

⁷⁰ Lihat “RPP Tembakau Dinilai Menyimpang dari UU,” *beritasatu.com*, Jumat, 27 Juli 2012 | 13:37.

⁷¹ Gugun El Guyanie, “PP Tembakau dan Pembangkangan Sipil,” <http://komunitaskretek.or.id/?p=1997> (diakses pada 27 Maret 2013). Bila dicermati kembali, Pasal 116 UU Kesehatan menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Artinya, pasal ini menyuruh dibentuknya peraturan pelaksana (*further regulation*) yang menyangkut satu hal; yaitu pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif. Tetapi secara tiba-tiba pasal 114 mengatur produksi rokok. Di sinilah ditemukan inkonsistennya.

Namun, pada 24 Desember 2012, Presiden SBY tetap meneken RPP tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan atau dikenal juga PP No. 109/2012 tentang Tembakau, yang katanya sebagai amanat Pasal 116 UU No 36/2009 tentang Kesehatan. Dengan kebijakan ini pemerintah seperti ‘memeras’ industri rokok nasional. Karena di satu sisi pemerintah mengecap nikmatnya setoran cukai dan pajak yang menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan di sisi lain ikut ambil bagian dalam tekanan regim kesehatan dunia dengan melakukan pengekanan terhadap peran industri rokok. Bahkan, pemerintah membuka keleluasaan pihak anti rokok yang juga mengecap dana dari perusahaan asing untuk memperlancar misi menghancurkan industri tembakau dalam negeri.⁷² PP ini mulai berlaku pada Juni 2014.⁷³

Tabel 5.3 | Pengendalian Tembakau dalam PP No. 109/2012

No	Bab PP	Pasal
1	Bab I: Berisi ketentuan umum, definisi dan tujuan pembuatan aturan	Pasal 2 Ayat 1: Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
2	Bab II: berisi penekanan bahwa aturan itu terkait kepada produk rokok dari bahan baku tembakau alami maupun sintetis	Pasal 4 Ayat 1: Produk Tembakau yang diatur meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan
3	Bab III: Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pasal 6: [1] Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan; [2] akses informasi dan edukasi; Pasal 7: [1] penelitian dan pengembangan; [2] diversifikasi Produk Tembakau
4	Bab IV: Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau	Pasal 8: Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan meliputi: [a] produksi dan impor; [b] peredaran; [c] perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil; dan [d] Kawasan Tanpa Rokok.
	Bab V: peran serta masyarakat yang luasa untuk terlibat dalam kampanye antirokok, hingga mengawasi serta melaporkan pelanggaran aturan	Pasal 53: [2] Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
	Bab VI: pembinaan dan	Pasal 57: Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan

⁷² Lihat “Pemerintah ‘Peras’ Industri Rokok,” *beritasatu.com*, Rabu, 20 Juni 2012 | 21:31.

⁷³ Lihat “PP Tembakau Baru Diterapkan pada 2014,” *metrotvnews.com*, Kamis, 10 Januari 2013 | 00:06 WIB; dan “PP Tembakau Tak Larang Petani Menanam Tembakau,” *kontan.co.id*, Jumat, 11 Januari 2013 | 21:18 WIB.

Tabel 5.3 | Pengendalian Tembakau dalam PP No. 109/2012

No	Bab PP	Pasal
	pengawasan aparat kementerian atau lembaga negara	Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan dengan: [a] mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; [b] mencegah perokok pemula dan konseling berhenti merokok; [c] memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; [d] bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan; dan [e] memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan.
	Bab VII: ketentuan peralihan yang mengatur tenggat waktu kewajiban industri rokok mengikuti aturan itu begitu disahkan	Pasal 61: Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; Pasal 62: [1] promosi dan/atau iklan; dan [2] produksi, impor, dan/atau peredaran Produk Tembakau yang menjadi sponsor
5	Bab VIII: ketentuan penutup berisi penegasan atas pemberlakuan PP	Pasal 64: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2012		

Tanpa perlu meratifikasi FCTC, pemerintah sudah lebih implementatif dengan PP No. 109/2012 itu. PP juga sudah mendahului *roadmap* industri hasil tembakau (IHT) yang dibentangkan dalam tiga tahapan periode, yaitu periode 2007-2010 yang memprioritaskan aspek tenaga kerja, penerimaan dan kesehatan; periode 2010-2015 memprioritaskan aspek penerimaan negara, kesehatan, dan tenaga kerja; serta periode 2015-2020, prioritas tertuju pada aspek kesehatan, tenaga kerja dan penerimaan negara.⁷⁴ Bahkan diterapkan secara tidak konsekuen, karena pemerintah lebih mengutamakan aspek penerimaan negara ketimbang aspek tenaga kerja dalam periode 2007-2010, dengan terus menerapkan kenaikan tarif cukai rokok setiap tahun. Menurut Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, panen cukai rokok yang dikantongi pemerintah selalu melebihi target.⁷⁵

⁷⁴ Imam Haryono, "Roadmap 2007-2020 Industri Hasil Tembakau dan Kebijakan Cukai," <http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/pdf/sby60.pdf> (diakses pada 4 Maret 2013). Lihat juga, "Pemerintah Tak Peduli Pengusaha Rokok Protes Cukai Naik," *finance.detik.com*, Senin, 28 November 2011 13:01 WIB.

⁷⁵ Lihat "Penerimaan Cukai Rokok 2013 Ditarget Rp 100 Triliun," *republika.co.id*, Rabu, 27 Februari 2013, 22:00 WIB. Dalam APBN 2013, penerimaan cukai ditarget Rp 92 triliun, maka dalam APBN-P 2013, penerimaan cukai diharapkan akan melebihi target, diharapkan bisa mencapai Rp 100 triliun.

Berdasarkan UU APBN 2013 diproyeksikan penerimaan negara dari pita cukai rokok – yang sebenarnya dibayar oleh konsumen (karena perusahaan rokok juga menaikkan harga jual) – mencapai lebih dari Rp 88,20 triliun. Dengan jumlah nilai cukai yang digelontorkan kepada negara berada di atas uang pajak yang bersumber dari migas yang besarnya hanya Rp 71,38 T (pajak minyak bumi 23,98 T dan pajak gas bumi Rp 47,39 T)⁷⁶ sebagaimana yang terlihat dalam **tabel 5.4**. Besaran nilai penerimaan negara yang dipanen dari cukai saja, sesungguhnya tidak bisa diremehkan sebagaimana yang ditunjukkan Lembaga Demografi FEUI.⁷⁷

Tabel 5.4 Perbandingan Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Migas 2013			
No	Bidang Usaha	Cukai/Pajak	Total
1	Industri rokok	Rp 88,20 triliun	Rp 88,20 triliun
2	Minyak bumi	Rp 23,98 triliun	Rp 71,38 triliun
3	Gas bumi	Rp 47,39 triliun	

Sumber: Diolah dari Arys Aditya, proyek APBN 2013

Penerimaan negara dari cukai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, karena tarif yang dipasang pemerintah tidak pernah turun. Sepanjang 1996-2013, pemasukan dari cukai merangkak naik sampai puncaknya tahun 2013 (masih dalam target APBN, belum realisasi). Bila tahun 1996 terealisasi sebesar Rp 4,57 triliun, maka tahun ini ditargetkan Rp 88,20 triliun (lihat **grafik 5.1**). Lonjakan terbesar terjadi pada 2011 yang mencatat penerimaan sebanyak Rp 77 triliun (target Rp 62,7 triliun) dibandingkan tahun sebelumnya masih dipetik Rp 60 triliun, atau selisih sebanyak Rp 17 triliun. Dengan demikian, setoran cukai rokok adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan negara sebagaimana dikemukakan Menteri Koordinator Perekonomian yang menunjuk angka Rp 80 triliun.⁷⁸ Biro Humas Kementerian Keuangan menyatakan, realisasi cukai rokok mencapai 90 persen penerimaan cukai, yakni sebesar Rp 85 triliun. Dari jumlah ini dialokasikan sebanyak Rp 1,69 triliun bagi pemerintah daerah di mana Jawa Timur memperoleh paling besar dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) sebanyak Rp

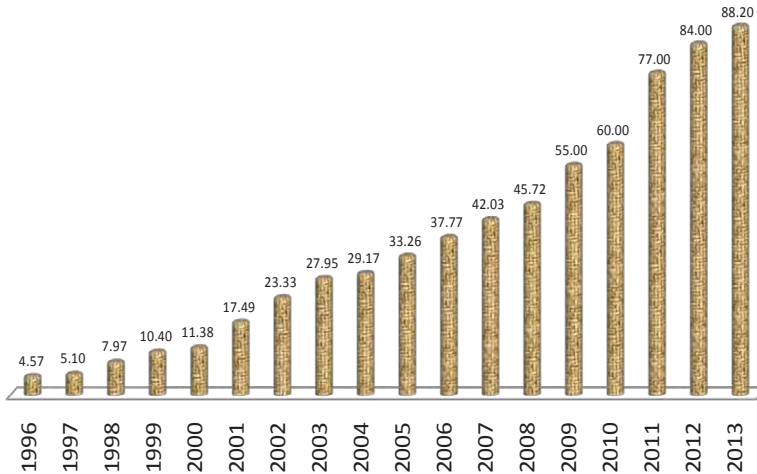
⁷⁶ Arys Aditya, "Kretek dan Cita Industrialisasi Indonesia [II]," <http://komunitaskretek.or.id/?p=2111> (diakses pada 11 April 2013). Lihat juga, "Setoran Industri Rokok Lebih Besar dari Freeport," *finance.detik.com*, Senin, 11 April 2011 15:37 WIB; dan "Anggota DPR Minta Cukai Rokok Digenjot Rp 100 Triliun," *finance.detik.com*, Senin, 12 September 2011 19:05 WIB.

⁷⁷ Sarah L Berger, Abdullah Ahsan, Sri Moertiningsih, Adioetomo, Diahhadi Setyonaluri, *Ekonomi Tembakau di Indonesia*, Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2008.

⁷⁸ Lihat "Cukai Rokok Beri Setoran Terbesar ke Bea Cukai," *finance.detik.com*, Selasa, 11 Mei 2010 17:49 WIB; "Cukai Rokok Penyumbang Terbesar Penerimaan Negara," *kontan.co.id*, Kamis, 07 April 2011 | 20:43 WIB; "Tiga Industri Rokok Penyumbang Cukai Terbesar," *bisnis-jateng.com*, Senin, 13 Juni 2011; "Jatim Andalkan Setoran Cukai 1.367 Pabrik Rokok," *bisnis.com*, Minggu, 27 November 2011; "Rokok Tetap Penyumbang Pajak Terbesar," *batamtoday.com*, Selasa, 13 Desember 2011 | 11:12 WIB; "Cukai Rokok Penyumbang Terbesar ke Negara," *monitorindonesia.com*, Sabtu, 15 September 2012 15:05.

817,64 miliar. Kemudian disusul Jawa Tengah sebesar Rp 426,65 miliar, Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp 187,23 miliar, dan Jawa Barat memperoleh bagian Rp 160,55 miliar.⁷⁹

**Grafik 5.1 | Penerimaan Cukai Rokok Tahun 1996-2013
(dalam triliun rupiah)**



Sumber: Diolah dari berbagai sumber (*2013 target penerimaan)

5.2. Dampak Pengendalian Tembakau

Kendati dinilai menyimpang dari UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dengan tipu muslihat untuk membatasi dan mengkekang perdagangan produk tembakau dalam negeri, namun dengan mengesahkan PP No. 109/2012, maka secara resmi, pemerintah sudah menjadi bagian dari kepanjangan tangan regim “kesehatan” dunia. PP ini lebih implementatif ketimbang RI meratifikasi WHO FCTC, karena langsung dapat diberlakukan tanpa perlu terlebih dulu merancang dan mengesahkan UU. Langkah ini dapat langsung diterapkan perangkatnya dalam membatasi dan mengkekang perdagangan produk tembakau domestik – bukan untuk kepentingan kesehatan – sebagai kelanjutan dari persaingan bisnis nikotin antara industri farmasi dengan industri tembakau di AS yang berdampak secara global.⁸⁰

⁷⁹ Lihat “Jatim Panen Cukai Rokok, Dapat Bagian Terbesar Dari DBH Cukai,” *jpnn.com*, Senin, 21 Januari 2013, 01:26:00.

⁸⁰ Wanda Hamilton, *Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, Yogyakarta: INSISTPress, 2010.



Stiker YLKI, Foto ANTARAM Agung Rajasa (diambil dari beritasatu.com)

Apa dampak kebijakan pengendalian tembakau itu? Secara positif, PP itu memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kampanye antirokok. Pengusaha yang memiliki industri farmasi Michael Bloomberg asal New York sudah menggelontorkan dana sebesar 4.195.442 juta dollar AS atau Rp 39 miliar seperti tercantum di laman www.tobaccocontrolgrants.org, selama 2007-2010. Dengan menggunakan Bloomberg Initiative (BI) mendanai 14 proyek antirokok mulai dari institusi pendidikan, organisasi masyarakat, serta LSM. Proyek terbesar BI di Indonesia adalah pembentukan Tobacco Control Support Centre (TCSC) yang menghabiskan dana 542.600 dollar yang dioperasikan IAKMI.⁸¹ Muhammadiyah mengecap dana Rp 3,6 miliar dalam rentang pelaksanaan proyek mulai November 2009 sampai Oktober 2011. Selain Muhammadiyah, juga dana Bloomberg Initiative digelontorkan kepada LDUI (menerima dua kali 280.755 dollar dan 40.654 dollar AS), sedangkan YLKI memperoleh sebesar 454.480 dollar AS.⁸² Dalam kaitan dengan Muhammadiyah, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais, mengaku terkejut dengan adanya fatwa haram merokok yang dikeluarkan PP Muhammadiyah.⁸³ Beberapa lainnya adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Departemen Kesehatan, Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD), Komisi Perlindungan Anak

⁸¹ Lihat "Pengusaha New York Beri Jutaan Dolar Perangi Rokok di Indonesia," *detik.com*, Sabtu, 13 Maret 2010 14:40 WIB. TCSC bertujuan berfungsi sebagai pusat koordinasi segala kegiatan kampanye dan memperjuangkan regulasi yang prokesehatan

⁸² Lihat "Pengusaha AS Beri Muhammadiyah Rp 3,6 Miliar Perangi Rokok," *detik.com*, Sabtu, 13 Maret 2010 16:15 WIB; dan "Muhammadiyah Akui Terima Rp 3,7 Miliar dari Asing," *tempo.co*, Rabu, 17 Maret 2010 | 06:13 WIB.

⁸³ Lihat "Amien Rais Terkejut Fatwa Haram Merokok," *kompas.com*, Sabtu, 13 Maret 2010 | 15:18 WIB.

Nasional Indonesia (KPAI/NCCP), Jaringan Kontrol Tembakau Indonesia (NGO) pada 2009, dan Swisscontact Indonesia Foundation (SIF).

Perhatikan pendapat yang dikeluarkan peneliti Lembaga Demografi FEUI Abdillah Ahsan yang menyatakan, industri rokok disebut-sebut sebagai penyerap puluhan juta tenaga kerja, hanyalah mitos, karena menurutnya, industri ini hanya mempekerjakan 250 ribu buruh dan 684 ribu petani tembakau.⁸⁴ Pendapat ini sudah menghilangkan angka dari ladang-ladang cengkeh, selain tanpa menjelaskan golongan industri rokok serta rangkaian dari hulu ke hilir sampai produk-produk tembakau dan cengkeh mengalir ke konsumen. Apalagi bila dimengerti secara lebih mendalam, buruh tidak sekadar deretan angka-angka statistik, melainkan lebih dari itu juga dengan pengerahan tenaganya dalam menggerakkan roda industrialisasi, memproduksi dan mengalirkan barang-barang ke distributor dan pasar, menghidupkan serikat-serikat dan membangkitkan solidaritas buruh, menyumbangkan uang cukai buat negara dari batang-batang rokok yang dihasilkan dari kerja banting tulang, menghadapi ancaman PHK akibat kelakuan pemerintah yang lemah, serta *stress* yang timbul sesudah di-PHK. Selain itu, pendapatnya juga tidak memandang penting kaitan produksi dari hulu ke hilir yang sudah dibangun lebih seabad. Bahkan tidak menarik pelajaran berharga dari tergusurnya produksi industri gula dan beras, sehingga menyeret Indonesia dalam ketergantungan impor.⁸⁵

Demikian pula pendapat YLKI yang menyatakan, industri rokok justru melanggar hak-hak buruh, karena banyak dari buruh yang berstatus kontrak, bukan buruh tetap dan upah yang rendah. Hal yang sama dialami buruh tembakau yang belum menikmati tingkat kesejahteraan yang setara dengan melonjaknya produksi rokok dengan upah rata-rata Rp 413 ribu per bulan.⁸⁶ Bukankah seharusnya pihaknya ambil bagian dalam membantu buruh pabrik rokok dan perkebunan tembakau memperjuangkan hak-haknya, bukan mengarahkan kedua sumber ekonomi mereka diakhiri.⁸⁷

Maka, dengan menggunakan PP Tembakau itu, ruang gerak konsumen rokok telah dibatasi lewat KTR, bahkan dengan sejumlah Perda diberi sanksi. Demikian pula ruang gerak industri rokok baik dalam produknya maupun berbagai bentuk promosi. Dengan kebijakan menaikkan tarif cukai, harga jual rokok yang tinggi diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok. Sedangkan jumlah perokok baru akan ditekan dengan pembatasan yang diterapkan. Perihal yang lebih penting lagi adalah kemungkinan dampak buruknya terhadap mereka yang bekerja di pabrik-pabrik rokok, ladang-ladang tembakau dan cengkeh. Politik ini juga dapat mengarahkan pembentukan perusahaan-perusahaan industri rokok menjadi kekuatan monopolis.

5.2.1. Berebut pasar dunia

Kendati rokok *kretek* diminati, namun tidak banyak ekspor rokok yang berasal dari Indonesia, dengan nilai yang ditanggung hanya 400 juta dollar AS per tahun. Selama Januari-September 2010, nilai ekspor rokok *kretek* mencapai 357,05 juta dollar AS atau naik 25,83 persen

⁸⁴ Lihat "Industri Rokok Serap Tenaga Kerja Hanya Mitos," *detik.com*, Selasa, 24 Februari 2009 15:41 WIB.

⁸⁵ Djoko Suud Sukahar, "Kretek dan Blantik Asing," <http://komunitaskretek.or.id/?p=519> (diakses pada 9 April 2013).

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Lihat "Jumlah Pabrik Rokok Indonesia Terus Turun," *jaringnews.com*, Rabu, 21 November 2012 17:44 WIB.

dibandingkan tahun sebelumnya.⁸⁸ Sedangkan larangan ekspor ke AS hanya mengurangi nilainya lebih dari 6 juta dollar, karena sejak 2010 nihil.⁸⁹ PT Gudang Garam mencatat ekspor *kretek* sebanyak 6,1 miliar batang pada 2011, turun sebanyak 300 juta batang dibandingkan tahun 2010. Namun pada semester I, mengalami kenaikan 15 persen, dengan nilai Rp 1,15 triliun atau lebih dari 100 juta dollar AS. Sebagian besar diekspor ke Malaysia, Arab Saudi dan beberapa negeri di Timur Tengah, kemudian disusul Jepang, Belanda dan Swiss.⁹⁰ Sebaliknya nilai ekspor dari Kudus pada 2011 mencapai 49,26 juta dolar AS atau meningkat sebesar 199,2 persen dibanding tahun sebelumnya.⁹¹

Ekspor rokok dari Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai pasar rokok global pada 2012 yang mencapai 464,4 miliar dollar AS. Nilai ini bahkan melampaui PDB negeri kaya-raya yang dikuasai oleh para “raja minyak” semacam Arab Saudi.⁹² Ini berarti industri pengolahan tembakau menawarkan keuntungan yang sangat menggiurkan. Perusahaan industri rokok yang menguasai 40 persen pasar dunia adalah National China Tobacco Corporation (NCTC), namun lebih tertuju di pasar domestik, dengan konsumen sebanyak 350 juta orang dengan dilindungi oleh kebijakan pemerintahnya dalam mengontrol produk, pasokan, distribusi, dan perdagangan produk tembakau. Empat raksasa industri rokok dunia⁹³ yang menyebarkan produk-produknya ke berbagai negeri adalah Philip Morris International Inc (PMI),⁹⁴ British American Tobacco (BAT),⁹⁵ Japan Tobacco International (JTI),⁹⁶ dan Imperial Tobacco.⁹⁷ Dua dari empat perusahaan ini – PMI dan BAT – sudah mengakuisisi dua perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT HM Sampoerna Tbk⁹⁸ dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk.⁹⁹ Kekuasaan bisnis kedua raksasa ini kian mencengkram untuk menguasai pasar rokok di

⁸⁸ Lihat “Ekspor Rokok Kretek 2010 Naik 25,83%,” *kontan.co.id*, Jumat, 17 Desember 2010 | 12:04 WIB; dan “Ekspor Rokok RI Capai Rp 3,6 Triliun, Paling Besar ke Kamboja,” *finance.detik.com*, Kamis, 16/12/2010 14:14 WIB.

⁸⁹ Lihat “Larangan Rokok Kretek Ekspor Terkikis USD 6 Juta,” *okezone.com*, Senin, 28 Juni 2010 18:55 WIB.

⁹⁰ Lihat “Ekspor Rokok Kretek PT GG Jadi 6,1 Miliar Batang,” *tribunnews.com*, Rabu, 27 Juni 2012 17:47 WIB; dan “Penjualan Ekspor Gudang Garam Semester I Naik 15%,” *indonesiainfinancetoday.com*, Selasa, 16 Agustus 2011.1 Kontribusi nilai cukai dan PPN PT GG mencapai Rp 22,3 triliun pada 2011.

⁹¹ Lihat “Ekspor Rokok Kudus Melesat hingga 49,26 Juta Dolar AS,” *antarajateng.com*, Senin, 16 Jan 2012 17:06:00 WIB.

⁹² Arys Aditya, “Kretek dan Cita Industrialisasi Indonesia [I],” <http://komunitaskretek.or.id/?p=2071> (diakses pada 11 April 2013).

⁹³ Amir Fawwaz, “4 Perusahaan Rokok Raksasa Dunia,” <http://komunitaskretek.or.id/?p=2063> (diakses pada 9 April 2013). Produk-produk PMI dipasarkan di hampir 200 negeri. BAT menjual 705 miliar rokok pada 2011, memiliki 46 pabrik rokok yang tersebar di berbagai negeri. Perusahaan multinasional RJ Reynolds yang bermarkas di AS mengakuisisi Japan Tobacco (JT) dengan menggelontorkan 7,8 miliar dollar AS. Tahun 2007, JTI juga mengakuisisi Gallaher senilai 9,4 miliar pounds (£).

⁹⁴ Berpendapat sebesar 76,34 miliar dollar dan menanggung laba bersih 8,59 miliar dollar AS (2011). Lihat “Philip Morris International,” http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Morris_International (diakses pada 13 April 2013).

⁹⁵ Pendapatan sebesar 15,190 miliar pounds (£) dan menuai laba bersih 4,122 miliar pounds (2012). Lihat “British American Tobacco,” http://en.wikipedia.org/wiki/British_American_Tobacco (diakses pada 13 April 2013).

⁹⁶ Lihat “Japan Tobacco International,” http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Tobacco_International (diakses pada 13 April 2013).

⁹⁷ Membukukan pendapatan sebesar 28,574 miliar pounds dan laba bersih 699 juta pounds. Lihat “Imperial Tobacco,” http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Tobacco (diakses pada 13 April 2013).

⁹⁸ Lihat “Philip Morris Indonesia Akuisisi HM Sampoerna,” *tempointeractive.com*, ” Senin, 14 Maret 2005 | 11:51 WIB; dan “Untuk Akuisisi HM Sampoerna, Philips Morris Bayar Rp 48 T,” *finance.detik.com*, Senin, 14 Maret 2005 15:54 WIB.

⁹⁹ Lihat “Akuisisi Bentoel, BAT Incar Pasar Kretek Indonesia,” *finance.detik.com*, Rabu, 17 Juni 2009 11:04 WIB.

Indonesia. Karena di bawah regim perdagangan dunia – membersihkan kebijakan protektif – maka lewat pasar modal, kekuatan finansial memegang peran yang menentukan.

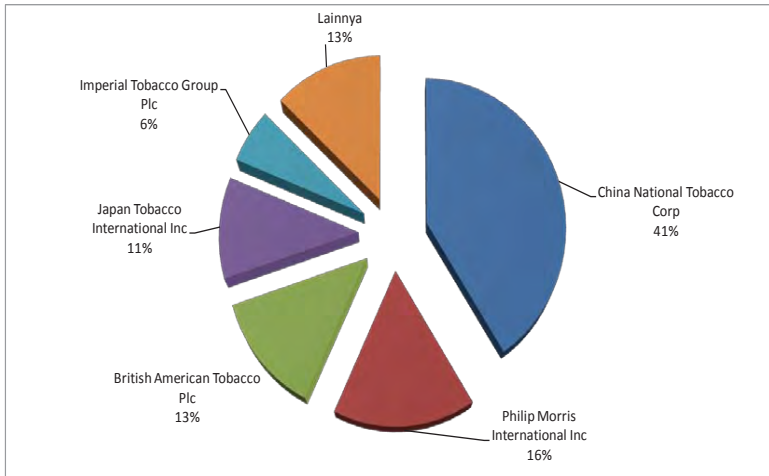
Empat raksasa dunia itu memang mengincar pasar di Cina, karena produk tembakau menjadi tambang emas bagi perusahaan rokok. Kendati sudah meratifikasi WHO FCTC pada 2005 yang diiringi menurunnya persentase perokok, namun meningkatnya jumlah penduduk Cina membuat jumlah perokok juga terdongkrak naik. Berdasarkan data dari WHO, dalam rentang 2002-2006 tercatat sekitar 30 juta perokok baru di Cina. Setiap tahun, sekitar 1,8 triliun batang rokok terjual. Sedangkan pemasukan pajak yang berasal dari para perokok mencapai 31 miliar dollar, lebih tinggi dari anggaran pemerintah untuk memberi pendidikan gratis yang hanya 27 miliar dollar AS. BAT hanya dapat menjual 1,2 miliar batang saja di Cina dari penjualan 689 miliar batang rokok di seluruh dunia. Untuk bisa meningkatkan penjualan di pasar Cina, para pemain asing menggunakan sejumlah taktik, salah satunya patungan dengan NCTC yang mengendalikan secara monopoli terhadap industri rokok.¹⁰⁰ Pada 2009, industri tembakau Cina memproduksi 2.290,90 miliar batang rokok, dengan volume penjualan mencapai 2.286,30 miliar batang.¹⁰¹

Dengan menempati posisinya sebagai pemegang monopoli produksi dan distribusi rokok di Cina, maka NCTC bukan saja menguasai pangsa pasar dalam negeri melainkan juga pasar dunia dengan pangsa pasar sebesar 41 persen (lihat **gambar 5.1**). Karena dengan produksi lebih 1,8 triliun batang, pasar Cina menyumbangkan volume terbesar pasar dunia. Pemain asing lainnya sulit menembus kekuasaan monopoli NCTC. Karena itu, tempat kedua diduduki PMI yang hanya menguasai 16 persen, lalu diikuti BAT 13 persen, serta JTI dan Imperial Tobacco.

¹⁰⁰ Lihat "Industri Rokok Bidik Pasar Cina," *bbc.co.uk*, 29 Juni, 2007 - 12:57 GMT.

¹⁰¹ Lihat "Lebih dari 4,10% Peningkatan Produksi Rokok Diharapkan di China 2010," <http://id.prmob.net/industri-tembakau/cina/pemerintah-republik-rakyat-cina-20244.html> (diakses pada 11 April 2013).

Gambar 5.1 | Pangsa Pasar Rokok Dunia



Sumber: Dikutip dari Abhisam DM dkk, 2011

Bagaimana dengan pasar rokok di Indonesia? Mengutip data WHO, mantan Ketua Umum IDI Kartono Muhammad mengatakan, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negeri dengan jumlah konsumsi rokok terbesar di dunia, setelah Cina dan India. Dengan jumlah perokok sebanyak 75 juta orang, untuk konsumsi rokok sebanyak 225 miliar batang per tahun, diperkirakan sedikitnya menghabiskan Rp 100 triliun membelanjakan uang mereka.¹⁰² Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyebutkan, setiap tahun orang Indonesia menghabiskan biaya Rp 138 triliun untuk membeli rokok.¹⁰³ Sedikitnya perusahaan-perusahaan rokok besar seperti PMI (PT Philip Morris Indonesia dan HM Sampoerna), BAT (+ PT Bentoel Investama), PT Gudang Garam Tbk, PT Djarum Tbk, PT Wismilak Inti Makmur, dan PT Nojorono memperrebutkan nilai dari pasar rokok yang bernilai lebih dari 10,5 miliar dollar AS. Satu lagi pemain asing yang masuk adalah KT & G (Korea Tobacco & Ginseng) Corporation – perusahaan rokok dari Korea Selatan – yang memanen keuntungan dengan menguasai 60 persen saham PT Trisakti Purwosari Makmur (TPM).¹⁰⁴

¹⁰² Lihat “Belanja Rokok Rakyat Indonesia Rp 100 Triliun Per Tahun,” *skalanews.com*, Selasa, 07 Agustus 2012 12:50 WIB.

¹⁰³ Lihat “Tiap Tahun Perokok Habiskan Dana Rp 138 Triliun,” *berita8.com*, Rabu, 16 Januari 2013, 20:54; dan “Indonesia Habiskan Rp138 triliun Untuk Beli Rokok, Sumbang Kematian 500 Orang per Hari,” *depoknews.com*, Kamis, 17 Januari 2013.

¹⁰⁴ Lihat “Korsel Beli Perusahaan Rokok Indonesia,” *liputan6.com*, Kamis, 21 Juli 2011 11:43; dan “KT&G Corp Beli 60% Saham Perusahaan Rokok Lokal,” *indonesiafinancetoday.com*, Kamis, 21 Jul 2011.

Perebutan dalam memproduksi rokok “NeO Mild” juga berlangsung antara PT Bintang Pesona Jagat (BPJ) – anak perusahaan PT Bentoel Internasional Investama Tbk – dengan PT Karya Tajinan Prima (KTP). BPJ mengklaim, seharusnya merek rokok ini miliknya berdasarkan hak eksklusif yang dikeluarkan Kemenkum dan HAM tahun 2001 lalu. BPJ berupaya melakukan praktik bisnis yang baik dan benar dengan mendaftarkan merek ini ke Direktorat Merek Direktorat Jenderal HaKI Kemenkum dan HAM untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek rokok tersebut. Namun dalam Pengadilan Niaga Surabaya pada 25 Mei 2011, perusahaan rokok papan atas ini diputuskan kalah. Lantas, Bentoel pun mengajukan kasasi. Namun, lagi-lagi kandas.¹⁰⁵

Dalam berebut pasar, perusahaan industri rokok putih sulit bersaing dengan rokok *kretek* dalam memperebutkan pasar rokok di Indonesia. Dengan pangsa pasar 93 persen inilah yang menjadi motif PMI dan BAT mengakuisisi dua perusahaan *kretek*. Dalam memperluas produksinya, PMI – sebagai pemilik brand Sampoerna – juga menerapkan taktik kerjasama yang dikenal Mitra Produksi Sigaret (MPS).¹⁰⁶ Namun taktik ini dituduh menggunakan pekerja alih daya, yakni pengalihan pekerjaan kepada 38 MPS untuk proses pelinting rokok. Padahal, proses bisnis utama seperti pelinting rokok tidak boleh dialihkan pada pekerja alih daya (*outsourcing*), karena dapat menyimpan bom waktu gejolak sosial bila tidak ada desakan kepada perusahaan ini untuk mengangkat 60.000 pekerja sebagaimana yang dipersiapkan Partisipasi Indonesia (PI) yang didukung oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).¹⁰⁷

Akuisisi yang dilakukan dua raksasa industri rokok dunia itu berlangsung sesudah regim kesehatan dunia mengadopsi WHO FCTC. Pemilik HM Sampoerna Tbk memilih untuk melepaskan seluruh sahamnya kepada PMI pada 2005. Akuisisi kedua dilakukan BAT terhadap Bentoel Internasional Investama Tbk, dengan membeli 99 persen saham pemilik lama pada 2009. Terakhir, TPM yang memproduksi merek rokok “Apokat” dan “Kacang Bayi”, “Master Mild”, “Win Mild”, “Lintang Enam”, dan “Pensil Mas International”, sudah menjual 60 persen sahamnya kepada KT & G pada 2011.¹⁰⁸ Dengan demikian, tinggal Gudang Garam, Djarum, Wismilak, dan Nojorono – tergolong perusahaan industri *kretek* besar – yang belum ditelan lewat akuisisi atau penjualan saham mayoritas kepada pemain asing.

5.2.2. Industri rokok gulung tikar dan efek berantai

Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi produk tembakau tidak mungkin tanpa dampak buruknya. Salah satu dampak buruk itu adalah banyak perusahaan industri rokok *kretek* yang mengalami gulung tikar atau bangkrut. Sedangkan salah satu faktor penyebab banyaknya mereka gulung tikar adalah kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai rokok per batang. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Kendal mengungkapkan, melambungnya harga atau tarif cukai rokok mengakibatkan 20 usaha industri rokok rumahan di

¹⁰⁵ Lihat “Berebut Merek Rokok ‘Neomild’, Anak Usaha Bentoel Kalah,” *finance.detik.com*, Senin, 16/04/2012 15:53 WIB. Pengadilan Niaga Surabaya mengeluarkan putusan kasasi Nomor 567 K/Pid.Sus/2011.

¹⁰⁶ Lihat “RI’s Cigarette Sales Boost HMSP’s Market Share,” *thejakartapost.com*, Sabtu, 09 Februari 2013, 2:13 PM.

¹⁰⁷ Lihat “Praktik Outsourcing di Sampoerna Harus Segera Dihapus,” *neraca.co.id*, Rabu, 09 Januari 2013; dan “Sampoerna Segera Ditindak, Penyalahgunaan Alih Daya,” *neraca.co.id*, Senin, 14 Januari 2013.

¹⁰⁸ Lihat “KT&G Korsel Beli 60 Persen Saham Perusahaan Rokok Trisakti Senilai Rp1,12 Triliun,” *ipotnews.com*, Kamis, 21 Juli 2011 12:51 WIB.

daerahnya ambruk.¹⁰⁹ Beberapa daerah lainnya diperkirakan juga menyusul ke dalam kehancuran.¹¹⁰

Sepanjang 2010-2015 – sesuai *road map* IHT yang dirancang dan dijalankan pemerintah – memasukan ke dalam kantong negara dari cukai memang digenjut dengan memasang tarif yang kian tinggi. Kebijakan ini menargetkan untuk mengurangi konsumsi rokok, memajukan aspek kesehatan dari dampak konsumsi tembakau dan paparan asap rokok, serta mendesak ke belakang aspek tenaga kerja. Periode ini diiringi dengan keluarnya PP No. 109/2012.¹¹¹ Kenaikan tarif cukai rokok berdampak pada banyak industri rokok skala menengah dan kecil menderita dan tidak sedikit pula dari mereka yang terlibat dalam usaha ini terpaksa memilih jalan untuk gulung tikar. Dari puluhan pemilik usaha sampai 15.000 usaha produk rokok mengalami kehancuran.¹¹² Ironisnya, pada saat banyak industri rokok mengalami kehancuran justru dibarengi dengan meningkatnya pundi-pundi pemerintah dari setoran cukai.¹¹³

Pemasangan tarif cukai yang meningkat dijawab pemilik usaha industri rokok dengan menaikkan harga jual rokok. Namun, banyak perusahaan kecil justru menghadapi kesulitan dalam pemasaran produknya. Mereka kalah bersaing, sehingga buntutnya adalah gulung tikar. Pada 2007, Ditjen Bea Cukai mencatat sebanyak hampir 5.000 perusahaan yang ambil bagian dalam produksi rokok. Sepanjang periode 2007-2011, kecenderungan yang terjadi adalah merosotnya jumlah perusahaan, karena dari tahun ke tahun, ratusan perusahaan industri rokok jatuh berguguran. Berturut-turut terdapat 4.793 perusahaan (2007), kemudian menciut jumlahnya menjadi 3.961 perusahaan (2008), 3.255 perusahaan (2009), 1.994 perusahaan (2010), dan akhirnya tersisa 1.664 perusahaan (2011).¹¹⁴

Ironisnya lagi, banyaknya perusahaan yang gulung tikar gara-gara kenaikan cukai, justru pada saat yang bersamaan ditunjukkan dengan meningkatnya produksi rokok. Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data yang mengungkapkan produksi rokok dari perusahaan skala menengah dan besar di Indonesia pada 2011 meningkat 9,22 persen dibandingkan tahun 2010. Gabungan

¹⁰⁹ Lihat “Cukai Naik, Industri Rokok Rumahan Ambruk,” *kompas.com*, Kamis, 16 Februari 2012 | 12:17 WIB.

¹¹⁰ Lihat “Cukai Naik, Industri Rokok Berguguran,” *medanbisnisdaily.com*, Kamis, 03 Januari 2013 08:02 WIB.

¹¹¹ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono PP No. 109/2012 pada 24 Desember 2012. Lihat “SBY Teken PP Tembakau,” *tempo.co*, Rabu, 09 Januari 2013 | 21:22 WIB; dan “KNPK: Pemerintah Tak Pernah Libatkan Stakeholder Tembakau,” *liputan6.com*, Sabtu, 09 Juni 2012 14:10.

¹¹² Lihat “Kenaikan Cukai Rokok Akan Menambah Pemasukan Negara,” *kompas.com*, Rabu, 22 Juli 2009 | 11:34 WIB; “Tarif Cukai Rokok 2007 Diterapkan Per Batang,” *liputan6.com*, Sabtu, 18 November 2006 14:34; “Tarif Cukai Spesifik Rokok Berlaku Mulai 1 Juli,” *antaranews.com*, Kamis, 28 Juni 2007 17:22 WIB; “Mulai Januari 2008 Tarif Cukai Spesifik Rokok Naik, Tarif Cukai Advalorum Turun,” *beritasore.com*, Rabu, 2 Januari 2008; “Cukai Rokok 2009 Naik 7%, Penerimaan Bea Cukai Lampau Rp 49 T,” *finance.detik.com*, Selasa, 16 Desember 2008 11:00 WIB; “Pemerintah Putuskan Kenaikan Cukai Rokok,” *kompas.com*, Rabu, 18 November 2009 | 17:20 WIB; “Target Cukai Rokok 2010 Naik,” *kompas.com*, Rabu, 17 Februari 2010 | 11:54 WIB; “Kebijakan Pita Cukai Ancam Ratusan Perusahaan Rokok,” *okezone.com*, Kamis, 29 November 2007 16:09 wib; “15 Ribu Industri Kecil Rokok Kretek Gulung Tikar,” *temanggungkab.go.id*, Kamis, 3 Mei 2012; dan “Cukai Tinggi, Ratusan Perusahaan Rokok Gulung Tikar,” *liputan6.com*, Sabtu, 16 Juni 2012 14:59.

¹¹³ Lihat “Penerimaan Cukai Rokok Meningkatkan Tiap Tahun,” *merdeka.com*, Rabu, 18 November 2009 21:11:00; “Cukai Rokok Naik 5%, Penerimaan Negara Bertambah Rp 2 Triliun,” *finance.detik.com*, Jumat, 29 Oktober 2010 15:50 WIB; dan “Pendapatan Cukai Rokok Pemerintah Naik Rp 3 Triliun di 2013,” *liputan6.com*, Jumat, 28 Desember 2012 11:44.

¹¹⁴ Lihat **Grafik 3.7:** Jumlah Perusahaan 2007-2011 (Bab 3). Tahun 2008, sebanyak 832 perusahaan lenyap. Penurunan paling drastik terjadi pada 2010, karena sebanyak 1.261 perusahaan tidak lagi beroperasi.

Perserikatan Produsen Rokok Indonesia (Gappri) memproyeksikan produksi rokok secara nasional hingga akhir 2011 mencapai 300 miliar batang.¹¹⁵ Ternyata, jumlah produksi rokok tidak berpengaruh terhadap ribuan perusahaan kecil ambruk. Ditjen Bea Cukai mengeluarkan data yang menunjukkan jumlah produksi rokok cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2007-2011. Dalam enam tahun jumlah produksi rokok telah bertambah dari 231 miliar batang (2007) menjadi 279,4 miliar batang (2011), yang berarti sudah bertambah sebanyak 48,4 miliar batang. Lonjakan yang paling tinggi dicapai pada 2011 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.¹¹⁶

Banyak perusahaan besar dan menengah kelihatannya memegang peranan penting dalam kontribusinya atas melonjaknya jumlah produksi rokok selama enam tahun itu. Dengan demikian, bertambahnya produksi – pada saat yang bersamaan ditunjukkan dengan merosotnya jumlah perusahaan – maka penerimaan negara dari setoran cukai pun cenderung meningkat. Artinya, perusahaan-perusahaan menengah dan besar memetik untung dari kehancuran perusahaan-perusahaan kecil. Demikian pula, dengan mengantongi lebih banyak uang dari cukai, pemerintah justru tidak dapat mencegah kehancuran perusahaan-perusahaan kecil tersebut. Kebijakan pemerintah gagal melindungi perusahaan atau usaha kecil di bidang industri pengolahan tembakau dan cengkeh, karena yang penting bagi pemerintah adalah menghisap setoran cukai.

Tidak hanya kenaikan tarif cukai yang bisa menghantam industri rokok yang menjual produknya ke pasar dengan harga terjangkau, namun juga pemberlakuan PP No. 109/2012 kelak pasti mempersulit lagi. Sekretaris Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) Universitas Muria Kudus (UMK), Zamhuri mengatakan, industri rokok kecil sudah tertekan dengan kebijakan kenaikan cukai dan banyak yang gulung tikar, sekitar 4-6 persen pada 2012. Tekanan ini ditambah lagi dengan PP Tembakau yang semakin membebani industri dengan membengkaknya biaya produksi, dengan mencantumkan pernyataan baru: “Tidak ada batas aman”, “Mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”, dan “Dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”. Tambahan biaya produksi ini menyebabkan mereka semakin sulit bersaing.¹¹⁷

Dalam sosialisasi PP Tembakau yang ditujukan kepada pimpinan para media massa dan elektronik, Menkes mengatakan, paling lambat mulai tahun depan, iklan dan sponsor rokok tidak diperbolehkan lagi dalam acara musik dan olahraga di Indonesia, termasuk sponsorship bagi-bagi rokok. Acara-acara ini harus mengalihkan ke sponsor lain. “Jika tetap masih menggunakan sebagai sponsorship dan menyangkan produk tembakau akan ada sanksinya sesuai dengan PP,” tandasnya.¹¹⁸ Bentuk pengekanan ini adalah industri pengolahan tembakau dan cengkeh

¹¹⁵ Lihat “Produksi Rokok Meningkat 9,2% di 2011,” *indonesiainfancetoday.com*, Kamis, 02 Februari 2012.

¹¹⁶ Lihat **Grafik 3.8:** Jumlah Produksi Rokok 2007-2011 (Bab 3).

¹¹⁷ Lihat “Akibat PP Tembakau, 1.500 Industri Rokok Kecil Terancam Gulung Tikar,” *suaramerdeka.com*, 10 Januari 2013 | 21:20 wib. Tak hanya itu, produsen dilarang mencantumkan kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “Low Tar”, “Slim”, “Special”, “Full Flavour”, “Premium” atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, dan pencitraan pada produk. Ini berarti pabrik rokok harus merubah desain kemasan yang berarti menambah biaya produksi dan perencanaan.

¹¹⁸ Lihat “Menkes: 2014, Acara Musik-Olahraga Tanpa Sponsor Rokok,” *republika.co.id*, Rabu, 23 Januari 2013, 15:00 WIB; dan “Stop Iklan & Sponsorship Bagi-bagi Rokok,” *inilah.com*, Rabu, 23 Januari 2013 | 20:27 WIB.

diperbolehkan memproduksi produk-produknya, namun dilarang melakukan promosi dan memberikan kontribusi, selain membatasi ruang geraknya.

PP Tembakau lebih banyak mengatur bisnis rokok dan tembakau ketimbang mengatur kesehatan.¹¹⁹ Dengan itu, maka dampak PP Tembakau itu juga diiringi dengan perubahan bungkus rokok. Setiap perusahaan industri rokok wajib mengubah rancangan bungkusnya untuk mencetak plat gambar rokok dengan lima gambar larangan. Sejak PP ini disahkan, setiap perusahaan diberi waktu 18 bulan untuk mengubah bungkus rokok supaya dapat gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada bungkusnya. Kebijakan ini jelas menambah biaya produksi sebelum batang-batang rokok dimasukkan ke dalam bungkusnya. Menurut Gappri, mereka terpaksa harus merogoh kocek sebesar 1 juta dollar AS atau Rp 9,6 miliar.¹²⁰

Sementara itu, Penasihat Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Muhammad Sobary menuding kehadiran PP Tembakau itu justru menguntungkan kepentingan asing sehingga mengancam eksistensi pabrik *kretek* pribumi. Pemerintah melahirkan regulasi pertembakauan demi melayani kepentingan sekitar 9 pabrik asing yang kini beroperasi di Indonesia. Pabrik-pabrik mereka terus mengalami kemajuan pesat. Sebaliknya, pabrik rokok *kretek* milik pribumi menurun drastis karena tidak didukung fasilitas. Diperkirakan lebih dari 300 pabrik rokok *kretek* sudah gulung tikar akibat penerapan cukai tinggi.¹²¹ Inilah salah satu industri yang paling banyak menderita dan menemui hari akhirnya gara-gara “tersundut” cukai.¹²²

Kemudian, dengan kemunculan dan segera diberlakukannya PP No. 109/2012 oleh pemerintah, jumlah industri rokok *kretek* nasional mengalami penyusutan. Bila sebelumnya berjumlah 5.000 perusahaan, maka seiring terkekangnya ruang gerak mereka, industri rokok *kretek* pun menyusut menjadi hanya 600 perusahaan, bahkan sebanyak 100 perusahaan masih berstatus aktif dan mampu memproduksi rokok. Sisanya hanya memiliki izin usaha, namun tidak mampu memproduksi lagi.¹²³

Kehancuran industri *kretek* dimulai dengan banyaknya industri rokok kecil itu gulung tikar, sedangkan yang tersisa berada dalam ancaman yang sama. Namun kehancuran ini tidaklah semata-mata hanya ditanggung oleh para pengusaha kecil saja, melainkan juga mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik-pabrik rokok itu. Kehancuran ini menimbulkan efek berantai, mulai dari hilir akan segera menuju ke hulu yang menyemai benih-benih tembakau dan yang bekerja di ladang-ladang cengkeh. Selain itu, dengan mengubah kemasannya, bukan hanya menambah biaya produksi, namun juga industri rokok semakin diperkeras untuk melawan produknya sendiri.

¹¹⁹ Lihat “Ubah Kemasan Rokok, Pengusaha Keluarkan US\$1 Juta,” *neraca.co.id*, Selasa, 12 Februari 2013.

¹²⁰ Lihat “Gara-gara PP Tembakau, Pengusaha Terpaksa Rogoh Kocek Lagi USD 1 Juta,” *suarapengusaha.com*, Senin, 11 Februari 2013 - 05:00 pm; “Merugi USD 1 Juta, Industri Rokok Kretek Terancam Bangkrut,” *okezone.com*, Senin, 11 Februari 2013 14:44 wib; dan “Wajib Cantumkan Gambar, Industri Rokok Butuh Dana Rp 9,6 Miliar,” *liputan6.com*, 11/02/2013 15:52.

¹²¹ Lihat “Duh, 300 Pabrik Rokok Terancam Tak Berasap,” *krjogja.com*, Selasa, 22 Januari 2013 | 16:21 WIB.

¹²² Lihat “Industri Kecil Rokok, Mati Tersundut Cukai,” *inilah.com*, Sabtu, 17 November 2012 | 10:01 WIB.

¹²³ Lihat “Wajib Cantumkan Gambar, Industri Rokok Butuh Dana Rp 9,6 Miliar,” *liputan6.com*, 11/02/2013 15:52.

5.2.3. Kehilangan pekerjaan, penghasilan dan tunjangan

Sesudah ditunjukkan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok dan menggenjot penerimaannya dari situ telah menghancurkan belasan ribu pabrik rokok di Indonesia. Demikian pula kemungkinan dampak atas penerapan PP Tembakau – sebagai salah satu tali kekang yang banyak mengambil dari pasal-pasal FCTC – yang sedikitnya bakal menambah biaya perencanaan ulang dan produksi maupun pembatasan ruang gerak konsumen dan perusahaan industri rokok. Masih ditambah lagi bentuk-bentuk tekanan dari kepanjangan tangan lainnya regim kesehatan dunia yang harus mereka hadapi.

Periode 2010-2015 adalah serangan gencar yang dihadapi industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia dari regim kesehatan dunia dan kepanjangan tangannya, sehingga banyak usaha kecil berguguran. Bahkan dalam perdagangan dunia produk tembakau, penegakan nilai-nilai regim perdagangan dunia tidak sepenuhnya berjalan: perdagangan bebas atau kebebasan berdagang.¹²⁴ Padahal banyak peminat rokok asal Indonesia.¹²⁵ Larangan dan diskriminasi impor oleh sejumlah pemerintah asing tanpa diiringi sanksi apa pun, sehingga terkesan membiarkan terciptanya penguasaan pasar di tangan beberapa kekuatan raksasa dan membentuk struktur monopoli atau oligopoli. Padahal, salah satu keunggulan produk tembakau yang berasal dari Indonesia adalah harga yang murah. Selain itu, keunikan atau kekhasannya adalah mengandung cengkeh.

Ketika banyak perusahaan berguguran, dampak buruknya tidak hanya diderita pemiliknya saja, namun juga buruh-buruh yang dipekerjakannya. Begitu pabrik-pabrik tutup atau tidak beroperasi, sebegitu pula buruh-buruh dirumahkan atau di-PHK. Periode 2010-2015 dapat dipandang sebagai ancaman terhadap banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan bakal terus berlangsung sebagai buah busuk dari kebijakan pemerintah.¹²⁶

Menurut hasil penelitian Partisipasi Indonesia (PI), industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja sampai 30,5 juta orang (*on farm dan off farm*). Industri rokok – sebagai elemen terakhir dalam rantai produksi – terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Dalam relasi perusahaan dan buruh, sekitar 600.000 pekerja menggantungkan hidup mereka sebagai buruh pabrik rokok tersebut. Salah satu strategi perusahaan industri ini adalah menerapkan sistem kerjasama MPS. HM Sampoerna aviliasi PMI menerapkannya, selain untuk inovasi produk dan promosi dalam memperluas pasar dan meningkatkan produksi dengan metode berbiaya lebih murah, yaitu dengan menyerahkan produksi rokoknya pada pihak ketiga (*third party operation*). Sistem kerjasama produksi ini disingkat MPS, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 1.000-1.600

¹²⁴ Lihat “Amerika Terbukti Diskriminatif terhadap Rokok Indonesia,” *tempo.co*, Senin, 05 September 2011 | 07:00 WIB; “Ekspor Rokok ke AS Dilarang, RI Rugi US\$ 200 Juta Per Tahun,” *neraca.co.id*, Selasa, 06 September 2011; dan “Australia Perketat Impor Rokok Kretek,” *investor.co.id*, Jumat, 27 April 2012 | 22:31. Setelah Amerika Serikat dan Brasil yang memberlakukan pengetatan impor komoditas rokok kretek asal Indonesia, Australia juga menerapkan peraturan yang sama melalui kebijakan *Plain Tobacco Packaging*.

¹²⁵ Lihat “Mayoritas Penduduk Amerika Serap Rokok Kretek Indonesia,” *republika.co.id*, Senin, 18 Oktober 2010, 03:47 WIB.

¹²⁶ Lihat “KNPK: 35 Juta Orang Terancam Menganggur,” *republika.co.id*, Selasa, 03 Juli 2012, 18:15 WIB; dan “PP Tembakau Mengancam Industri Kecil dan Menengah,” *kontan.co.id*, Jumat, 11 Januari 2013 | 09:14 WIB.

buruh per MPS yang didominasi buruh perempuan.¹²⁷ Penerapan MPS ini merupakan praktik *outsourcing* buruh dengan melakukan sub-kontrak produksi utama/inti (*core business*), yaitu pelinting rokok kepada pihak lain. HM Sampoerna yang memberikan sub-kontrak memasok seluruh bahan baku (*raw material*), namun tidak terbebani hubungan kerja dan tanggung jawab terhadap buruh-buruh yang dipekerjakan pihak ketiga (MPS), sehingga status buruh digantung.¹²⁸

Hubungan sub-kontrak (MPS) yang menerima biaya linting dan *management fee* berdasar hasil negosiasi termasuk untuk membayar upah buruh, serta menerapkan *outsourcing* buruh dalam industri rokok itu bukan saja menjadi penghalang bagi kesejahteraan buruh karena pembayaran upah di bawah UMK, namun juga dengan menerapkan sistem kerja borongan dapat meledakkan PHK massal sesudah sub-kontrak berakhir. Apalagi hampir sepenuhnya berada di bawah kontrol perusahaan besar pemberi sub-kontrak.¹²⁹ Strategi MPS ini terkesan seperti didasari oleh motif mengeruk untung sebanyak mungkin dalam tempo sesingkat mungkin. Dengan taktik ini pula dapat memproduksi rokok lebih dari 90 miliar batang dan membukukan penjualan bersih sebesar Rp 31,96 triliun dengan mengandalkan upah buruh yang rendah.¹³⁰

Bisa diduga, tekanan-tekanan regim kesehatan dunia dan kampanye antirokok yang terus bergelombang, telah menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan-perusahaan industri rokok asing untuk melakukan investasi jangka panjang. Sampoerna-PMI lebih memilih sub-kontrak ketimbang memastikan hubungannya dengan buruh dalam jangka panjang. Dugaan lainnya, mereka memang memanfaatkan kondisi politik-ekonomi yang lemah di mana pemerintah bisa didikte. Demikian pula sejumlah perusahaan besar menerapkan sistem ketenagakerjaan yang lentur (*labour market flexibility*) dengan mempekerjakan banyak buruh borongan dengan upah yang rendah.

Namun demikian, apa pun yang dilakukan perusahaan-perusahaan industri rokok terhadap buruh, tetap tidak bisa diabaikan dari peran pemerintah yang kerap mengabaikan hak-hak buruh, karena tidak cukup berkomitmen untuk memenuhi dan melindungi hak-hak. Bahkan pemerintah juga mengingkari buah kerja buruh industri rokok yang telah memproduksi rokok dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara dari cukai dalam jumlah yang besar. Tahun 2013, pemerintah diharapkan bakal menanggung Rp 100 triliun, hanya dari cukai rokok.¹³¹ Sayangnya, kendati buruh-buruh ini sudah berkontribusi dengan kerja keras mereka untuk menghasilkan ratusan

¹²⁷ Dengan bentuk MPS, Sampoerna mempergunakan 38 MPS yang tersebar di Pulau Jawa, yang secara keseluruhan mempekerjakan lebih dari 60.000 buruh.

¹²⁸ Lihat "Siaran Pers PI: Outsourcing pada Industri Rokok dan Dampaknya pada Kesejahteraan Buruh," <http://blog.redwhitecommunication.com/siaran-pers-outsourcing-pada-industri-rokok-dan-dampaknya-pada-kesejahteraan-buruh/> (diakses pada 13 April 2013). Penerapan *outsourcing* ini diduga melanggar Pasal 60 dan 66 UU No. 13/2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) tentang Pelaksanaan Jenis Pekerjaan Alih Daya (*outsourcing*), 15 November 2012.

¹²⁹ *Ibid.* Lihat juga, Partisipasi Indonesia, "Ringkasan Eksekutif: Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh pada Kegiatan Produksi Utama (Core Bisnis) di Sektor Industri Rokok," <http://blog.redwhitecommunication.com/ringkasan-eksekutif/> (diakses pada 13 April 2013).

¹³⁰ Lihat "Volume Penjualan Sampoerna Capai 91,7 Miliar Batang di 2011," indonesiainancetoday.com, Senin, 30 April 2012.

¹³¹ Lihat "Penerimaan Cukai Rokok 2013 Ditarget Rp 100 Triliun," republika.co.id, Rabu, 27 Februari 2013, 22:00 WIB. Dalam APBN 2013, penerimaan cukai ditarget Rp 92 triliun, maka dalam APBN-P 2013, penerimaan cukai diharapkan akan melebihi target, diharapkan bisa mencapai Rp 100 triliun.

miliar batang rokok demi memenuhi penerimaan negara dari cukai, namun pemerintah membiarkan semakin banyak perusahaan industri rokok yang bangkrut.

Sebagaimana dikemukakan, dalam perusahaan-perusahaan industri rokok, ada sebanyak 600.000 buruh yang bekerja memproduksi rokok dan menjadi tempat mereka menggantungkan hidup secara ekonomi. Sebagian besar mereka bekerja untuk memproduksi rokok khas Indonesia, *kretek*. Namun, sebagian mereka sudah kehilangan pekerjaan sebagai buntut dari perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Dengan keprihatinannya, Gappri mengungkapkan, pabrik-pabrik produk tembakau yang sebelumnya berjumlah 5.000 pabrik menciut menjadi hanya 600 pabrik, bahkan dapat menyisakan hanya 100 pabrik.¹³²

Dampak kehancuran pabrik-pabrik rokok, terutama *kretek* dipastikan pula mengarah kepada buruh yang kehilangan hak atas pekerjaan. Buruh-buruh yang kehilangan pekerjaan ini dipandang sebagai tumbal dari regim kesehatan dunia. Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPRTMM-SPSI) menilai, terbitnya PP No. 109/2012 itu bukan hanya mematikan kelangsungan produk tembakau, melainkan juga dijadikan tumbal untuk dikorbankan (demi kepentingan asing), karena bakal menimbulkan PHK secara besar-besaran.¹³³

Ancaman PHK besar-besaran itu disuarakan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Dia memprediksi, bila diberlakukannya PP Tembakau, dampaknya adalah 500.000 orang bakal terkena PHK sebagaimana yang juga dinyatakan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Kemenakertrans itu. Puluhan industri rokok kecil sudah ada yang tutup di Kudus, serta berbagai kasus pengurangan pekerja di Jateng dan Jatim. Realitas ini belum termasuk petani tembakau yang juga menggantungkan perdagangannya dengan industri rokok.¹³⁴

Pernyataan Kemenakertrans itu dikecam oleh Komnas Pengendalian Tembakau (PT) yang juga Ketua Umum Pengurus Besar IDI Prijo Sidipratomo – dengan mengesankan seakan-akan sebagai pemegang kebenaran statistik – karena dianggapnya pernyataan Kemenakertrans tanpa didasarkan atas hitungan statistik yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memintanya pernyataan Kemenakertrans itu dicabut. Komnas PT menunjuk data WHO-Lembaga Demografi UI tahun 2009 yang menunjukkan bahwa kematian akibat rokok di Indonesia sebesar 427.948 orang per tahun.¹³⁵ Pada 2010 (data Susenas dan Riskesdas), dengan prevalensi paparan asap rokok, angkanya diduga meningkat jauh, bahkan berada di atas angka 500.000 orang terancam kematian akibat rokok.¹³⁶

¹³² Lihat “Gara-Gara PP, dari 5.000 Tinggal 600 Pabrik Tembakau,” *okezone.com*, Senin, 11 Februari 2013 16:19 wib.

¹³³ Lihat “Anggota Kami Dijadikan Tumbal Kepentingan Asing: Federasi Serikat Pekerja Rokok Janji Siap ‘Lawan’ Terus PP Tembakau,” *lensaindonesia.com*, Sabtu, 02 Februari 2013 05:45 WIB.

¹³⁴ Lihat “500.000 Orang Terancam PHK Jika RPP Tembakau Berlaku,” *finance.detik.com*, Rabu, 20 Juni 2012 15:53 WIB.

¹³⁵ Bandingkan dengan Robert A Levy dan Rosalind B Marimont, “Lies, Damned Lies & 400.000 Smoking-Relating Deaths.” *Regulation*, Vol. 2 1, No. 4, 1998. Menurut mereka, perang terhadap tembakau, telah berkembang jadi “monster kebohongan” dan ketamakan. Dengan tipu muslihat statistik, lahir ilmu pengetahuan sampah (*junk science*) untuk menggantikan ilmu pengetahuan yang jujur (*honest science*).

¹³⁶ Lihat “Komisi Nasional Pengendalian Tembakau: Per tahun, 500.000 Perokok Terancam Mati,” *atjeh.co*, Kamis, 28 Juni 2012 10:00 WIB.

Angka yang disebutkan Komnas PT itu juga sangat terkesan berlebihan dan tanpa didasarkan atas penjelasan bagaimana mungkin 500.000 orang sedang menempuh akhir hidup mereka yang begitu tragis menuju ke kematian hanya karena rokok?¹³⁷ Adakah daftar kasus kematian orang-orang itu? Sebaliknya, bagaimana menjelaskan ada begitu banyak perokok yang tidak mati-mati juga? Selain itu, terkesan pendapat Komnas PT tidak menunjukkan keprihatinan apa pun terhadap banyaknya kasus pabrik rokok gulung tikar dan sekaligus berdampak PHK terhadap buruh yang membuat mereka bukan saja kehilangan pekerjaan, namun juga upah dan tunjangan yang selama ini mengebalkan asap dapur mereka. Dan fakta ini bukanlah isapan jempol atau kebohongan untuk mengarang statistik.

Ancaman PHK itu konkret di hadapan buruh-buruh yang bekerja di pabrik-pabrik rokok *kretek*. Kasus berikut, dalam rentang dua tahun terakhir, ratusan pabrik rokok golongan tiga – dengan ketentuan produksi minimal 300 juta batang rokok – yang memproduksi di wilayah kerja Bea Cukai Kediri yang mencakup Kota dan Kabupaten Kediri, Jombang, Nganjuk dan Tulungagung, gulung tikar dan tinggal jadi catatan sejarah. Mereka terpaksa menutup usaha karena kesulitan memenuhi syarat administrasi luas bangunan minimal yang ditentukan pemerintah, PMK 2010.¹³⁸ Dampaknya, buruh pun di-PHK. Mereka yang mengandalkan hanya pada tenaga kerja untuk mendapatkan penghasilan rendah, ancaman ini mirip dengan ancaman kematian. Begitu mereka di-PHK bukan saja mereka kehilangan upah dan tunjangan, namun juga bisa kehilangan segalanya: masa depan. Mereka ibarat rongsokan dan lenyap dari hiruk-pikuk aktivitas sosial-ekonomi dan industri dari mana mereka telah mempersembahkan salah satu tambang emas berupa pundi-pundi cukai ke kantong negara dengan menghasilkan ribuan batang rokok setiap hari per buruh.¹³⁹

Dari hasil kerja buruh yang banting tulang, peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Hasbullah Thabrany, mengusulkan supaya pemerintah menaikkan tarif cukai rokok untuk mengendalikan konsumsi serta memperkuat upaya pengekanan ruang geraknya. Karena, tarif cukai rokok yang diberlakukan sekarang ini dinilai terlampau rendah. Diusulkannya cukai rokok sebesar 65 persen dari harga jual dalam 10 tahun ke depan.¹⁴⁰ Namun, lagi-lagi kelihatan bahwa dia tidak menuntut pemerintah untuk menaikkan upah buruh sebesar sebagaimana yang diusulkannya hanya untuk memenuhi kantong pemerintah belaka.

5.3. Berdampak dari Hilir ke Hulu

Ketika rantai produksi industri rokok, khususnya industri rokok *kretek*, diperangi karena dituduh dan dipropagandakan sebagai biang kerok kematian 500.000 orang per tahun di Indonesia tidak hanya semata-mata menghantam perusahaan-perusahaan industri rokok terutama industri kecil dan menengah yang kemudian berdampak langsung terhadap buruh-buruh yang dipekerjakan

¹³⁷ Bandingkan pernyataan Komnas Pengendalian Tembakau dengan artikel Judith Hatton, “Lies, Damned Lies and ... Statistic,” <http://www.forces.org/writers/hatton/files/lies.htm> (diakses pada 16 April 2013).

¹³⁸ Lihat “Ratusan Pabrik Rokok di Kediri Jadi Catatan Sejarah,” *beritajatim.com*, Kamis, 18 Oktober 2012 10:57:39 WIB.

¹³⁹ Lihat “Rokok Masih Diandalkan Jadi Sumber Pemasukkan Negara,” *finance.detik.com*, Kamis, 05 Juli 2012 15:49 WIB; “Menkeu: Bea Cukai Rokok Masih Jadi Andalan,” *inilah.com*, Senin, 29 Oktober 2012 | 15:09 WIB; “Cukai Rokok Masih Jadi Andalan Penerimaan Negara,” *ipotnews.com*, Senin, 29 Oktober 2012 17:04 WIB; “Pemerintah Masih Berharap Besar dari Cukai Rokok,” *kontan.co.id*, Rabu, 16 Januari 2013 | 16:38 WIB; dan “Cukai Rokok Jateng-DIY Ditarget Rp 24,6 Triliun,” *suaramerdeka.com*, Kamis, 04 April 2013 | 21:14 wib.

¹⁴⁰ Lihat “Cukai Rokok Diusulkan 65% dari Harga Jual,” *indonesiainancetoday.com*, Jumat, 25 Januari 2013.

untuk menebasnya dengan PHK, namun juga rantai-rantai produksi berikutnya yang berada di hulu, yaitu perkebunan tembakau dan cengkeh.

Sedangkan rantai perdagangan di hilir juga terkenda dampak dari kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi, distribusi dan promosi produk tembakau dan cengkeh. Perdagangan produk tembakau sebagai bagian dari rangkaian industri pengolahan tembakau dan cengkeh. Para pedagang kebingungan dalam menentukan harga jual seiring kenaikan tarif cukai rokok pada permulaan tahun 2012. Harga sebungkus rokok bisa naik setiap minggu sampai Rp 500. Sampai akhirnya mereka mempertahankan harga kenaikan rata-rata di bawah Rp 1.000 per bungkus.¹⁴¹ Kenaikan harga jual rokok ini juga berdampak pada konsumen yang terpaksa merogok uangnya lebih besar dalam membeli rokok.

Lebih jauh lagi, dengan disahkannya PP Tembakau, para pedagang rokok eceran dan konsumen mengaku bingung, terutama bagi pedagang eceran terkait larangan menjual kepada anak dan perempuan hamil atau konsumen yang menyuruh anak membeli rokok. Bentuk-bentuk pembatasan bagi pedagang pengecer mempersempit ruang atau kesempatan mereka untuk mendapatkan penghasilan dibandingkan sebelumnya. Apalagi dilarang untuk menjual sebatang atau beberapa batang rokok kepada konsumen. Mereka merasa keberatan dengan penerapan kebijakan itu. Sebaliknya juga bagi konsumen yang *ngeteng*.¹⁴²

Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron mengomentari perihal RPP Tembakau. Bersebarangan dengan Kemenakertrans, dia menegaskan PP Tembakau tidak akan berdampak terhadap PHK dalam industri rokok, tidak ada yang melarang orang untuk merokok, tidak melarang untuk jualan rokok, tidak ada yang melarang orang untuk memproduksi rokok.¹⁴³ Padahal, faktanya ada Perda-perda yang mengatur larangan merokok di tempat-tempat yang ditentukan. Intinya memang produknya bukanlah komoditas ilegal, namun tempat atau ruang mengkonsumsinya dibatasi. PP jelas mengandung larangan ruang gerak pelaku industri dan pedagang rokok untuk menjangkau anak dan perempuan hamil. Iklan dan promosi juga dilarang, maka setiap larangan ada sanksinya.¹⁴⁴

Apakah aturan dalam PP Tembakau itu memberatkan industri dan pedagang rokok? Bila hal ini dinyatakan dalam posisi Kemenkes, memang tidak ada keberatan apa pun. Namun bila pendapat ini dipetik dari para pelaku industri dan pedagang rokok, sudah ditunjukkan di muka bahwa mereka keberatan. Beberapa perusahaan industri besar pun khawatir bahwa mereka bakal mengalami nasib serupa seperti HM Sampoerna dan Bentoel yang diakuisisi atau TPM yang dicopot sebagai pemilik saham mayoritas. Sedangkan sebagian dari mereka yang menanamkan modal dalam industri kecil sudah ditunjukkan kasus-kasus di mana pabrik-pabrik rokok mereka gulung tikar. Hal ini pula yang bahkan banyak buruh pabrik rokok terlibat dalam demo

¹⁴¹ Lihat "Harga Rokok Naik Terus, Pedagang Bingung," *finance.detik.com*, Rabu, 25/01/2012 07:16 WIB; dan "Perokok Baru Terus Bertambah, Harga Rokok Naik," *antarariau.com*, Senin, 23 Juli 2012 16:32 WIB.

¹⁴² Lihat "Pedagang & Konsumen Bingung Soal Aturan Pembatasan Rokok," *finance.detik.com*, Minggu, 22 April 2012 16:55 WIB.

¹⁴³ Lihat "Wamenkes: Tak Ada Larangan Orang untuk Memproduksi Rokok," *finance.detik.com*, Senin, 02 Juli 2012 17:30 WIB.

¹⁴⁴ Lihat "Menkes: 2014, Acara Musik-Olahraga Tanpa Sponsor Rokok," *republika.co.id*, Rabu, 23 Januari 2013, 15:00 WIB; dan "Stop Iklan & Sponsorship Bagi-bagi Rokok," *inilah.com*, Rabu, 23 Januari 2013 | 20:27 WIB.

menyatakan penolakan mereka terhadap PP itu. Demikian pula dengan para petani dan buruh tembakau yang melancarkan berbagai demonstrasi untuk menentang PP Tembakau.

Tekanan atas industri rokok diperkirakan muncul di pasar modal atas terbitnya PP No. 109/2012 itu. Kepala Riset Indosurya Securites, Tonny W Setiadi mengatakan, bukan saja petani tembakau yang terketan dengan PP Tembakau, namun saham emiten rokok juga akan mengalami tekanan tersebut. Pasar rokok domestik tidak akan berkurang dengan adanya aturan baru ini, namun bentuk pengaruhnya adalah pertumbuhan industri rokok akan tertahan hanya sampai 10 persen. PP ini sudah mempersulit bahkan dengan alasan kesehatan saja, sehingga berpengaruh terhadap marjin keuntungan perusahaan.¹⁴⁵

Perkiraan Ketua Gappri Ismanu Soemiran lebih jauh lagi dampaknya, yakni setiap perusahaan industri rokok *kretek* sudah mengalami kerugian yang cukup besar yang mencapai 1 juta dollar AS dalam menambah biaya produksinya. Namun pihaknya belum menghitung seluruh kerugian dalam industri *kretek*. Dalam PP Tembakau tercantumkan larangan campuran zat yang berpotensi membahayakan bila dicampur dalam *kretek*, kecuali zat tersebut sudah terbukti tidak membahayakan. Sehingga dibutuhkan riset untuk menguji seberapa bahayanya bila rokok sudah terbakar.¹⁴⁶ Namun persoalannya, PP ini bukanlah aturan yang melindungi kesehatan, karena tidak satu pasal pun di dalamnya yang mengacu pada kesehatan, semua jelas ke arah membatasi dan mengekang perdagangan rokok *kretek*.¹⁴⁷

Gappri menolak PP Tembakau itu, karena pemerintah dinilai tidak mendukung industri rokok *kretek* – produk asli Indonesia yang telah melakukan upaya dan strategi untuk meningkatkan daya saing – yang sudah dijalankan dengan kesungguhan, mengasah pengalaman, dan menerapkan strategi-taktik sampai menguasai 92 persen pangsa pasar (*market share*). Sebaliknya, pemerintah cenderung memberikan kesempatan kepada investor rokok nonkretek (rokok putih) yang berupaya mengembalikan daya saingnya lewat regulasi. PP ini arahnya jelas kepada tren anti rokok beraroma (rokok *kretek*).¹⁴⁸

Jika PP No. 109/2012 itu tidak ada kaitannya antara rokok *kretek* dengan alasan kesehatan, melainkan lebih mengatur perdagangan rokok, khususnya *kretek*, maka kebijakan pemerintah bersifat ancaman bagi industri rokok *kretek*, dengan menekan pangsa pasarnya. Dengan itu pula APTI pun PP Tembakau ini bukan saja tidak berurusan dengan kesehatan, namun juga membahayakan kelangsungan hidup industri tembakau dari hulu ke hilir.¹⁴⁹ Sungguh ironis, ketika rokok dituduh sebagai “mesin pembunuh”, kini dengan PP Tembakau – mengatur tentang

¹⁴⁵ Lihat “PP Tembakau akan Tekan Kinerja Emiten Rokok,” *pasarmodal.inilah.com*, Minggu, 13 Januari 2013 | 13:16 WIB.

¹⁴⁶ Lihat “Merugi USD 1 Juta, Industri Rokok Kretek Terancam Bangkrut,” *okezone.com*, Senin, 11 Februari 2013 14:44 wib.

¹⁴⁷ Lihat “Aturan Rokok Terbaru Tak Lindungi Kesehatan,” *okezone.com*, Senin, 11 Februari 2013 14:05 wib. “Kalau mau membatasi konsumsi rokok, buatlah regulasi yang tegas supaya anak-anak tidak merokok dan dari dulu kami jajak pemerintah tidak mau membuat regulasi semacam itu,” ujar Sekjen Gappri Hasan Anon Azis.

¹⁴⁸ Lihat “Pabrik Rokok Tolak Pengetatan Aturan Rokok Kretek,” *okezone.com*, Senin, 11 Februari 2013 13:31 wib. PP Tembakau ini juga dinilai melanggar UU No 36/2009 tentang Kesehatan, karena tidak mengatur rokok *kretek* dengan alasan kesehatan, melainkan lebih pada industri dan situasi perdagangan rokok dalam negeri.

¹⁴⁹ Lihat “APTI Bersikukuh RPP Tembakau Matikan Industri,” *kompas.com*, Rabu, 1 Agustus 2012 | 20:46 WIB.

tata niaga, standarisasi produk, iklan, dan pengenaan cukai yang tinggi – pemerintah justru mengarahkan industri rokok *kretek* ke jurang kehancuran.

5.3.1. Dampak ke hulu

Sebagaimana sudah dikemukakan, tidak ada kebijakan yang bersifat membatasi dan mengekang dalam dunia usaha, bahkan diserang secara global, tanpa diiringi dampak buruknya. Mengecilkan dampaknya tanpa mengkalkulasi kembali biaya-biaya produksi termasuk upah buruh dan bahan baku, menghadapi persaingan yang kian keras dengan berbagai cara, larangan impor dari pemerintah asing, serta kebijakan atas berbagai bentuk pembatasan dan pengekangan maupun propaganda yang terus menyerang untuk memusuhi industri yang sudah jatuh-bangun dan menunjukkan zaman keemasannya lebih dalam dua dekade terakhir, sungguh mengingkari begitu banyak hasil kerja yang sudah ditanamkan lebih dari seabad – jauh sebelum RI dibentuk oleh para pendirinya – bukanlah waktu yang singkat. Bahkan, pelajaran dari jatuhnya produksi industri gula dan beras yang diserbu produk impor, rasanya cukup sudah sebagai pengalaman yang seharusnya dijadikan pedoman supaya dampak buruk itu tidak terulang pada industri rokok *kretek*, tembakau dan cengkeh.¹⁵⁰

Kebijakan pengendalian tembakau yang bersifat mengekang di negeri penghasil rokok *kretek* di mana cengkeh sebagai salah satu bahan bakunya, menimbulkan kekhawatiran untuk melanjutkan penggarapan lahan-lahan cengkeh yang berada di hulu. Sebagai salah satu daerah penghasil cengkeh di Aceh, sedikitnya satu juta pohon cengkeh di Kabupaten Simeulue mengalami kerusakan dan terancam mati disebabkan tidak adanya perawatan dari petani secara maksimal bahkan untuk pohon-pohon yang sudah berusia puluhan tahun. Pohon-pohon cengkeh yang terancam rusak dan mati mencapai luas 9.888 hektar dan ditaksir dapat menghasilkan buah cengkeh kering sebanyak 20.000 ton.¹⁵¹

Berkurangnya kepentingan petani dalam menggarap ladang dan produksi cengkeh berimplikasi pada kenaikan harganya. Dengan volume produksi yang berkurang, permintaan cengkeh pun melonjak dari para produsen rokok *kretek*. Kepala Humas Gappri Hasan Aony Aziz menyatakan, kenaikan harga cengkeh ini bisa memperlambat laju produksi rokok *kretek* nasional 5-10 persen. Dengan kenaikan ini modal produsen rokok *kretek* harus didongkrak sampai dua kali lipat. Sedangkan para produsen skala kecil seringkali menemui kesulitan mendapatkan suntikan modal baru, sehingga mereka terpaksa menurunkan volume produksi *kretek*.¹⁵²

Sesuai hukumnya, bandul harga cengkeh diperantarai oleh permintaan dan pasokan. Naiknya harga cengkeh diiringi dengan semakin berkurangnya pasokan di pabrik. Bila harga di tingkat pabrik naik, para pedagang pun menaikkan harga cengkeh. Demikian pula sebaliknya bila harganya turun. Karena petani belum panen, maka pergerakan harga cengkeh di tingkat pedagang di Palu mengalami kenaikan kisaran Rp 111.000 menjadi Rp 119.000 per kilogram pada pertengahan Februari 2013 dan terus bergerak naik.¹⁵³ Harga cengkeh di Ternate juga

¹⁵⁰ Djoko Suud Sukahar, *Op.cit.*

¹⁵¹ Lihat “Sejuta Pohon Cengkeh di Simeulue Terancam Mati,” *atjeh.co*, Selasa, 19 Maret 2013 14:05 WIB.

¹⁵² Lihat “Harga Cengkeh Tinggi, Pabrik Rokok Kretek Terjepit,” *kontan.co.id*, Senin, 30 Mei 2011 | 17:31 WIB.

¹⁵³ Lihat “Stok Kurang Harga Cengkeh Bergerak Naik,” *antaranews.com*, Senin, 18 Februari 2013 12:17 WIB.

mengalami kenaikan sebesar Rp 5.000, dari harga Rp 110.000 menjadi Rp 115.000 per kilogram.¹⁵⁴

Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar Kementerian Pertanian, Azwar AB mengatakan, kenaikan harga cengkeh disebabkan tingginya permintaan untuk bahan baku industri, karena selama ini hampir 90 persen produksi cengkeh nasional dihisap untuk memenuhi kebutuhan industri rokok *kretek*. Awal 2013, harga cengkeh terus melambung sampai menyentuh Rp 120 ribu per kilogram dari normalnya Rp 60-80 ribu per kilogram mengakibatkan pengusaha rokok kecil merugi dan terancam gulung tikar. Karena dalam rencana produksi, mereka hanya mematok harga cengkeh maksimal Rp 70 ribu per kilogram. Para pengusaha industri rokok skala kecil terancam bangkrut karena tidak dapat begitu saja menaikkan harga rokok. Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Heri Susianto mengaku prihatin dengan kerugian yang dialami para pengusaha rokok *kretek* kecil akibat melambungnya harga cengkeh.¹⁵⁵

Bagaimana dengan produksi tembakau? Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah Agus Setiawan mengatakan, para petani di provinsinya hampir semua ladangnya ditanami oleh tembakau berkualitas tinggi. Namun dengan bergulirnya RPP Tembakau telah memicu anjloknya harga tembakau itu sekitar 50 persen, dari harga awal Rp 850 ribu menjadi Rp 425 ribu per kilogram. Anjloknya harga tembakau ini merugikan para petani yang menggantungkan penghasilannya dari menanam tembakau. Pihaknya juga menilai PP Tembakau tidak mengakomodasi kepentingan petani, karena tidak satu pasal pun yang dapat menunjukkannya.¹⁵⁶

Kenaikan cukai 7-10 persen dikeluhkan oleh sejumlah petani tembakau di Jawa Barat. Mereka menilai kenaikan itu terlalu tinggi sehingga mengurangi pendapatan petani. Harga tembakau anjlok dari Rp 50.000 menjadi hanya Rp 20.000 per kilogram. Ketua Aliansi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jabar Nana Suryana mengatakan, anjloknya harga ini disebabkan isu pengendalian tembakau WHO, kemudian disusul dengan terbitnya PP No. 109/2012 yang mengakibatkan petani semakin kesulitan.¹⁵⁷

Kesulitan memperbesar volume ekspor juga diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Magelang, Djoko Soetiono. Kendati tren ekspor tembakau krosok tiga tahun (2008-2010) cukup stabil di angka 30.800 kilogram senilai 33.880 Euro, namun tahun 2011 ekspor produk ini pun berhenti. Pasalnya, tembakau

¹⁵⁴ Lihat "Harga Cengkeh Naik Rp 5000," *malupost.co.id*, Selasa, 20 November 2012, 2:47 pm.

¹⁵⁵ Lihat "Harga Cengkeh Melambung, Industri Rokok Menjerit," *tempo.co*, Senin, 07 Januari 2013 | 19:25 WIB; dan "Harga Cengkeh Naik 2X Lipat, Perusahaan Rokok Kecil Merugi," *okezone.com*, Senin, 7 Januari 2013 11:41 wib. Jumlah produsen rokok *kretek* di Indonesia terus merosot. Pada 2009, jumlah pabrik *kretek* mencapai 2.500 perusahaan, kini menyusut hanya 1.500 perusahaan.

¹⁵⁶ Lihat "RPP Akan memicu Turunnya Harga Tembakau Kualitas Tinggi," *kompas.com*, Selasa, 3 Juli 2012 | 20:40 WIB.

¹⁵⁷ Lihat "Pita Cukai Naik, Petani Tembakau Menjerit," *okezone.com*, Minggu, 7 April 2013 14:23 wib. APTI Jabar menargetkan produksi 9.700 ton tembakau pada 2013 dari total luas lahan 9.679 hektare yang terbagi empat jenis, yaitu *kroso*, hitam, *mole*, dan rajangan kasar. Saat ini, petani tembakau di Jabar sedikit beruntung karena masa panen bisa berlangsung tiga kali, kecuali curah hujan tinggi.

krosok (tembakau untuk cerutu) sudah sulit masuk Eropa, karena aturan merokok di sana semakin ketat dan banyak yang mengikuti ketentuan tentang kesehatan.¹⁵⁸

Sebaliknya, kebijakan pemerintah semakin memperbesar keuntungan produksi tembakau impor tanpa pembatasan yang sekaligus menunjukkan pengingkarannya terhadap aspek kesehatan di mana tembakau dinyatakan sebagai barang adiktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2012, impor tembakau sudah mencapai 120 ribu ton. Jumlah ini sudah melampaui separuh lebih dari kebutuhan tembakau nasional mencapai 200 ribu ton. Impor ini bakal mempersulit petani tembakau lokal.¹⁵⁹ Dengan jumlah impor yang semakin bertambah atau kebijakan impor semakin longgar, maka bisa dinilai kelakuan pemerintah dalam menempatkan PP Tembakau, sudah berubah: tembakau dari barang adiktif bergerak menjadi “non-adiktif”.

Padahal, harga tembakau di musim panen 2012 merosot tajam bila dibandingkan 2011. Sebagai contoh kejadiannya, tahun 2011 harga gudang untuk daun tembakau kelas D plus adalah berkisar Rp 125.000-Rp 130.000 per kilogram, namun tahun 2012 harga jualnya hanya mencapai Rp 70.000-Rp 80.000 per kilogram.¹⁶⁰ Para petani tembakau di Jember juga khawatir dengan harga tembakau anjlok pada musim panen 2012 dan sudah mulai turun 20 persen dari harga semula. Karena diperkirakan panen bakal melimpah menyusul luasan lahan yang bertambah dan kondisi cuaca kembali membaik.¹⁶¹

Para petani di Kabupaten Temanggung juga merugi seiring anjloknya harga tembakau. Harga tembakau yang dipanen tahun 2012 jatuh drastis. Tembakau kualitas *grade* F hanya laku sekitar Rp 80.000 per kilogram, padahal sebelumnya bisa berharga Rp 300.000 per kilogram. Beberapa petani mengatakan, tembakau rajangan milik mereka dengan kualitas *grade* D masih menumpuk di rumah, karena harganya rendah dan belum mau menjualnya. Sebelumnya harga *grade* D Rp 60.000–Rp70.000 per kilogram, namun beberapa hari sesudah gudang kembali dibuka, harganya turun menjadi Rp 40.000–Rp 50.000 per kilogram.¹⁶²

Selain berharap kepada pemerintah untuk membantu memulihkan harga tembakau yang merosot, manajemen unit Gudang Garam Paiton di Kabupaten Probolinggo, menggelar selamatan dan aksi bakar kemenyan pada 17 Juli 2012, sehingga asapnya menyeruak di sebuah gudang tempat berlangsungnya selamatan. Dengan selamatan ini mereka berharap, *belandang* (pengepul), petani dan gudang sama-sama untung. Bupati Probolinggo ambil bagian dalam acara selamatan, juga turun tangan dalam memulihkan harga tembakau di daerahnya.¹⁶³

¹⁵⁸ Lihat “Ekspor Tembakau Krosok Magelang Mandek,” *suaramerdeka.com*, 17 Februari 2012 | 15:52 wib.

¹⁵⁹ Lihat “Aturan Rokok Terbaru Tak Lindungi Kesehatan,” *okezone.com*, Senin, 11 Februari 2013 14:05 wib.

¹⁶⁰ Lihat “Harga Tembakau Merosot Tajam,” *suaramerdeka.com*, Sabtu, 08 September 2012 | 08:00 wib. Tembakau kelas D biasanya dapat mencapai Rp 70.000-Rp 100.000 per kilogram juga anjlok menjadi Rp 50.000-Rp 70.000 per kilogram. Sementara kelas C dari Rp 50.000-Rp 70.000 per kilogram pada 2011, turun menjadi Rp 40.000-Rp 50.000 per kilogram di 2012. Untuk kelas E, tahun 2011 dijual seharga Rp 150.000-Rp 200.000 per kilogram, namun tahun 2012 hanya Rp 90.000-Rp 100.000 per kilogram.

¹⁶¹ Lihat “Petani Khawatirkan Penurunan Harga,” *kompas.com*, Kamis, 12 Juli 2012 | 02:59 WIB.

¹⁶² Lihat “Harga Tembakau Anjlok, Petani Temanggung Rugi,” *swaramuria.forumkota.com*, Senin, 17 September 2012 02:45; “Harga Tembakau Anjlok, Petani Alami Kerugian,” *hariansemarang.net*, Senin, 17 September 2012 03:09; dan “Harga Tembakau Jatuh, Petani Meringis,” *kompas.com*, Sabtu, 4 Agustus 2012 | 11:37 WIB. Para petani berharap pemerintah bisa memberi solusi terkait harga sekaligus membenahi tataniaga agar petani memiliki nilai tawar di hadapan grader maupun pabrik.

¹⁶³ Lihat “Agar Harga Mahal, Petani Tembakau ‘Selamatan,’” *kompas.com*, Selasa, 17 Juli 2012 | 18:05 WIB.

Namun demikian, Menkes Nafsiah Mboi berupaya menghibur petani dengan mengatakan, tidak ada dalam PP yang berisi larangan untuk menanam tembakau, tidak ada larangan untuk bikin rokok, bahkan tidak ada larangan untuk merokok.¹⁶⁴ Tanaman tembakau dan produknya memang bukan barang ilegal, namun tekanan perdagangan, standarisasi produk, rancang ulang bungkus rokok yang melawan dirinya sendiri dan pemasangan promosi, sebagian dari faktor ini telah berdampak terhadap apa yang secara konkret dialami petani: harga tembakau anjlok.

Sedangkan dalam PP No. 109/2012 dinyatakan “produk tembakau sebagai barang adiktif”, namun pemerintah melonggarkan impor tembakau. Lagi, dapat ditegaskan bahwa pemerintah bukan berkepentingan untuk memajukan kesehatan – dengan kebijakan impor yang longgar atas tembakau dan produknya – melainkan justru hendak mematahkan keunggulan tembakau dan produknya yang berasal dari hasil kerja petani tembakau dan cengkeh, buruh dan pengusaha industri *kretek*.

Bila harga-harga tembakau tidak dapat dipulihkan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan petani terutama biaya produksi, maka dapat dipastikan ujung dari kebijakan pemerintah bakal mengulangi petaka yang mendera gula dan beras di masa lalu. Bila ketiga kali terjebak dalam perangkap yang sama, kiranya sudah bisa diperkirakan gejala sosial yang bakal muncul di mana pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Namun demikian, banyak petani tidak tinggal diam. Protes-protes petani dan buruh tembakau memperoleh dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sedang menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Impor dan Pemberdayaan Petani Tembakau untuk melindungi petani dan industri tembakau. Semula rancangan peraturan ini merupakan inisiatif dari anggota DPRD Jatim, namun kemudian pemerintah pun menyambut baik karena hal itu bertujuan melindungi industri kretek dan 15 juta lapangan kerja di daerahnya.¹⁶⁵ Selain pemerintah provinsi, DPRD Jatim juga ingin sama-sama terkesan untuk melindungi petani dan pabrik *kretek*.¹⁶⁶

5.3.2. Tanpa strategi pemenuhan hak

Silang pendapat antara Kemenkes dengan Kemenakertrans dapat menunjukkan pembelahan dua kubu dalam pemerintahan SBY untuk merespon kerangka acuan regim kesehatan dunia di Indonesia. Bila Kemenkes dengan jelas menjadi kepanjangan tangan regim kesehatan dunia, maka Kemenakertrans lebih mengesankan untuk menunjukkan keprihatinannya terhadap dampak kebijakan pengendalian tembakau yang dihadapi para pengusaha industri *kretek* dan buruh-buruh

¹⁶⁴ Lihat “Menkes: Tak Ada Larangan Petani Tanam Tembakau,” *health.kompas.com*, Senin, 9 Juli 2012 | 14:03 WIB; Tak Ada Larangan Tanam Tembakau, *Suara Merdeka*, Sabtu, 12 Januari 2013; dan “Menkes Tegaskan Tak Ada Larangan Tanam Tembakau,” *solopos.com*, Kamis, 31 Januari 2013 19:35 WIB.

¹⁶⁵ Lihat “Jawa Timur Susun Perda Perlindungan Tembakau,” *tempo.co*, Rabu, 01 Agustus 2012 | 10:37 WIB. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur mengungkapkan, jumlah industri rokok dan tembakau Jawa Timur lama-kelamaan menyusut. Pada 2007, jumlahnya mencapai 2.344 industri besar ataupun kecil, kemudian menjadi 1.100 industri pada 2010, dan saat ini menyusut menjadi 876 industri. Penyusutan ini terjadi karena adanya berbagai aturan, mulai dari pembatasan luas area pabrik hingga masuknya rokok impor. Namun, sumbangan dari cukai rokok terhadap penerimaan negara mencapai Rp 77 triliun pada 2011 dan diperkirakan melonjak menjadi Rp 80 triliun pada 2012. Jawa Timur menyumbang 60 persen.

¹⁶⁶ Lihat “Lawan RPP Tembakau, DPRD Jatim Siapkan Perda Pro Petani,” *lensaindonesia.com*, Rabu, 23 Januari 2013 14:08 WIB.

pabriknya. Sedangkan lainnya, Kementerian Pertanian menunjukkan ketidakpeduliannya dalam menyongsong tertancapnya tiang pancang regim kesehatan dunia yang diboncengi kepentingan impor tembakau dan produknya. Dan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Komenko Kesra) terkesan lebih menyokong Kemenkes.

Berbagai kasus yang ditunjukkan dalam kajian ini mengungkapkan bahwa kebangkrutan banyak industri rokok *kretek*, terutama industri kecil, bukanlah isapan jempol belaka. Banyaknya industri *kretek* yang gulung tikar tidaklah mungkin tanpa dampaknya terhadap buruh-buruh yang sebelumnya mereka pekerjakan. Selain itu, dalam rentang enam tahun (2005-2011), sudah tiga perusahaan industri rokok *kretek* yang dicaplok oleh dua perusahaan transnasional (TNC) yang sangat dikenal sebagai raksasa dunia, yaitu PMI Inc dan BAT. Satu perusahaan lagi adalah KT & G. Diduga, para pemilik HM Sampoerna, Bentoel, dan TPM khawatir oleh tekanan regim kesehatan dunia dan kampanye yang menyusup ke Indonesia yang disokong perusahaan farmasi AS yang berkepentingan menguasai nikotin sebagai bahan dasar produk *Nicotine Replacement Therapy* (NRT).¹⁶⁷ Dengan caplok yang menanggung total hampir Rp 50 triliun itu, mereka pun terbebas dari tekanan dan dapat menanamkan uang mereka di bidang lain.

Kasus-kasus yang mendera industri rokok *kretek* itu menjalar ke hulu. Tekanan yang dialami di hilir berdampak ke hulu sebagai bagian dari satu sirkuit produksi yang saling berkait (*linked*). Mulai muncul kasus di mana sejumlah perkebunan cengkeh terlantar, kurang tergarap oleh para petani sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Simeulue. Berkurangnya pasokan mendorong harga cengkeh. Pada paruh akhir 2012, harga cengkeh melonjak bahkan sampai dua kali lipat dari harga sebelumnya. Kenaikan ini kembali berdampak ke hilir yang dijalankan perusahaan-perusahaan industri rokok *kretek* bukan saja terpaksa mengurangi volume produksi, namun juga di ujung hayatnya: gulung tikar.

Berbeda dengan tembakau bila dibandingkan cengkeh. Tekanan di hilir (*kretek*) dengan menambah biaya produksi, setoran cukai dan kampanye lainnya ikut pula menekan di hulu. Tekanan tembakau bertambah dengan kebijakan yang melonggarkan impor tembakau tanpa perlu merujuknya sebagai barang adiktif sebagaimana yang diusung dalam Pasal 113 UU Kesehatan¹⁶⁸ dan Pasal 1 Ayat 1 PP Tembakau.¹⁶⁹ Dua tekanan inilah yang mengakibatkan harga tembakau anjlok di sejumlah sentra produksi tembakau di Jawa, bahkan ada yang merosot sampai lebih tiga kali lipat dari harga sebelumnya. Gudang tembakau di unit Gudang Garam Probolinggo pun harus menggelar acara selamatan untuk memulihkan harga tembakau. Lagi, dampak merosotnya pendapatan petani ini bukanlah juga isapan jempol.

¹⁶⁷ Abhisam DM, Hasriadi Ary, Miranda Harlan, *Membunuh Indonesia: Konspirasi Global Penghancuran Kretek*, Jakarta: Kata-Kata, 2011. dan Wanda Hamilton, *Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, Yogyakarta: INSISTPress, 2010.

¹⁶⁸ Pasal 113 ayat 2 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan: "Tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya."

¹⁶⁹ Pasal 1 Ayat 1 PP No. 109/2012: "Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat."

Dengan demikian, tidak ada yang tidak berdampak dari kebijakan pemerintah itu. Pertama, pemerintah berkepentingan setiap tahun mengeruk uang lebih banyak dari hasil kerja buruh pabrik yang menghasilkan 200-300 miliar batang rokok dan pengusaha yang bahan bakunya dipasok oleh petani dan buruh tembakau dan cengkeh, serta konsumen rokok dalam bentuk cukai, sehingga terjadi kenaikan harga jual rokok di pasar. Kedua, pemerintah merancang dan menerapkan regulasi PP Tembakau yang bersifat mengekang perdagangan produk tembakau, standarisasi, rancang ulang bungkus rokok yang melawan dirinya sendiri dan pemasangan promosi di dalam negeri. Kebijakan ini meningkatkan tekanan bagi industri rokok terutama *kretek* yang berlanjut dampaknya pada produk dan pengolahan tembakau dan cengkeh. Ketiga, pemerintah justru tidak menyesuaikan judul PP Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dengan mendasarkan pengujian batang-batang rokok dalam ukuran-ukuran kesehatan, melainkan lebih sebagai tipu muslihat atau topeng untuk melakukan pengeangan perdagangan rokok dalam negeri. Keempat, pemerintah melonggarkan impor tembakau yang ditunjukkan dengan lebih dari separuh volume tembakau dari kebutuhan nasional yang justru diimpor.¹⁷⁰ Rokok impor pun ikut memboncengnya.¹⁷¹ Lagi-lagi, dengan impor yang meningkat ini, tembakau sebagai barang adiktif hanya isapan jempol saja, sehingga patut diduga kebijakan ini hanyalah sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan produksi tembakau dan rokok asing untuk mendesak ke belakang produksi tembakau lokal. Sehingga, bagi pemerintah tidak lagi penting apakah persoalan paparan asap rokok ataukah asap knalpot.¹⁷²

Apakah pemerintah mempunyai strategi dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pekerjaan, hak atas upah dan tunjangan, hak atas jaminan sosial, serta hak atas kesehatan?

Partisipasi Indonesia (PI) mengungkapkan, jumlah orang yang terlibat dalam menggerakkan roda industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia mencapai 6,1 juta orang dan dalam industri rokok berjumlah sekitar 600.000 pekerja pada 2008.¹⁷³ Sedangkan lainnya menyebut, dalam industri pengolahan tembakau menyerap sebanyak 6,2 juta orang yang bekerja.¹⁷⁴ Dengan kekuatan tenaga kerja lebih 6 juta orang itulah yang telah mengantarkan uang cukai Rp 84 triliun kepada negara lewat tarikan pemerintah pada 2012.

Dalam kaitan kebijakan pemerintah lewat PP Tembakau dan Kementerian Keuangan yang menaikkan tarif cukai demi memenuhi *road map* IHT sampai 2015, serta tekanan global dari regim kesehatan dunia dan kampanye perang antirokok, Kemenakertrans justru mengeluarkan

¹⁷⁰ Lihat "Petani Tembakau Dihambat, Impor Tak Dihalangi," *bisniskeuangan.kompas.com*, Kamis, 10 Januari 2013 | 14:27 WIB; "PP Tembakau Bikin Impor Tembakau Naik 20 Ribu Ton," *bisnis.liputan6.com*, Selasa, 05 Februari 2013 19:31; dan "Petani Jember Demo Tolak Impor Tembakau," *antarajatim.com*, Senin, 03 September 2012 16:07:52.

¹⁷¹ Lihat "Diserbu Asing, Industri Rokok Nasional Hancur," *viva.co.id*, Kamis, 16 Juni 2011, 15:00. Menurut Salamudin Daeng, di negeri-negeri maju, pemerintah mereka memberlakukan kebijakan yang melindungi perusahaan rokok domestik. Dalam melindungi perusahaan rokoknya, kebijakan pemerintah di negeri maju, menghambat perdagangan impor tembakau dan produknya dalam bentuk hambatan tarif (*tariff barrier*) dan hambatan non tarif (*nontariff barrier*). Bea masuk mencapai 350 persen bagi produk tembakau di AS.

¹⁷² Lihat "Asosiasi Rokok: Asap Knalpot Jelas Ganggu Kesehatan," *suaramerdeka.com*, Senin, 11 Februari 2013 | 16:49 wib.

¹⁷³ Lihat "Outsourcing: Studi Kasus Mitra Produksi Sampoerna-MPS, PT HMSampoerna aviliasi PT Philip Morris Indonesia," *rimanews.com*, Selasa, 08 Januari 2013 - 20:40 WIB.

¹⁷⁴ Sutawi, "Gizi, Rokok, dan Karakter Bangsa," <http://sutawi.staff.umm.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=29> (diakses pada 3 April 2013).

pernyataan tentang potensi PHK yang bakal mengancam 500.000 orang sebagai dampaknya.¹⁷⁵ Namun, dalam menghadapi potensi ini Kemenakertrans mengaku belum mempunyai strategi untuk mengatasinya.¹⁷⁶ Dengan demikian, rencana pemerintah yang menggelar program untuk memenuhi sekitar 4.731.770 orang dalam mendapatkan hak atas pekerjaan sampai 2014 – dengan nilai investasi sebesar Rp 2.225 triliun yang disusun rencananya oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)¹⁷⁷ – tidak menghitung kemungkinan dampaknya terhadap mereka yang bakal kehilangan pekerjaan.

Mereka yang terlibat dalam industri pengolahan tembakau dan cengkeh yang membentang dari hulu ke hilir secara nasional kelihatannya tidak dapat menerima begitu saja kebijakan pemerintah yang merugikan mereka. Ekspresi protes sudah berlangsung sejak lima tahun terakhir, jauh sebelum PP Tembakau disahkan. Menjelang RPP disahkan, ribuan petani dan buruh tembakau yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Kretek (KNPK) dan APTI mendatangi Kemenkes dengan berunjuk rasa menolak RPP dan melanjutkan demo ke Kemenkum dan HAM. Penolakan ini karena mereka menilai merugikan kehidupan mereka, kaum tani dan kelas buruh.¹⁷⁸

Beberapa daerah lainnya di Jawa Tengah juga memprotesnya seperti yang dilakukan sekitar 15.000 petani dan buruh tembakau dari lereng Gunung Sindoro di lapangan Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Para demonstran mengarak keranda, keranjang tembakau serta membentang berbagai spanduk antara lain bertuliskan, “Tembakau Nafas Kami Nyawa Kami”, “Tembakau Atau Mati”, dan “Tolong Tinjau PP 109 Tahun 2012”. Beberapa keranjang tembakau dan keranda yang telah dibawa mereka bakar – mengepulkan asap – sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah. Mereka menuntut: cabut atau revisi PP 109!¹⁷⁹

Para petani tembakau di Temanggung menunjukkan tekad mereka untuk tidak pernah meninggalkan tembakau. Menanam tembakau adalah lahan penghasilan mereka untuk mendapatkan makanan, menyekolahkan anak-anak dan menghidupi keluarga sampai bisa naik haji. Mereka menyatakan tetap kompak dalam satu bahasa untuk mempertahankan tembakau, tidak bersedia melakukan konversi tanaman tembakau. Karena belum ditemukan tanaman konversi tembakau yang setidaknya menghasilkan keuntungan yang sama dengan tembakau, terutama di lahan-lahan yang hanya mungkin tanaman tembakau tumbuh. Sejumlah lahan tembakau yang telah diujicobakan dan diganti dengan tanaman lain di beberapa daerah di Madura, berakhir dengan kenyataan: selalu gagal.¹⁸⁰

Rencana pemerintah provinsi Jawa Tengah yang akan mengurangi sampai 20.000 hektar lahan tembakau dari jumlah lahan seluas 45.930 hektar dengan mengendalikan *supply and demand* di

¹⁷⁵ Lihat “500.000 Orang Terancam PHK Jika RPP Tembakau Berlaku,” *finance.detik.com*, Rabu, 20 Juni 2012 15:53 WIB.

¹⁷⁶ Lihat “Pemerintah Tak Punya Strategi Cegah PHK 500.000 Pekerja Industri Rokok,” *finance.detik.com*, Rabu, 20 Juni 2012 17:37 WIB.

¹⁷⁷ Lihat “Serap 5 Juta Pekerja Butuh Rp 2.000 T,” *neraca.co.id*, Rabu, 16/05/2012.

¹⁷⁸ Lihat “Tolak RPP Tembakau, Petani Demo di Kemenkes,” *health.kompas.com*, Selasa, 3 Juli 2012 | 14:40 WIB.

¹⁷⁹ Lihat “15 Ribu Petani Tembakau Gunung Sindoro Demo Tolak PP 109,” *suaramerdeka.com*, Rabu, 20 Februari 2013 | 01:45 wib.

¹⁸⁰ Lihat “Petani Tembakau Konsisten Tolak Larangan Penanaman Tembakau,” *okezone.com*, Rabu, 27 Juni 2012 15:12 wib.

pasaran dalam mengatasi limpahan stok tembakau juga ditentang oleh dua fraksi di DPRD Jateng. Karena konversi lahan dengan mengalihkannya dari tanaman tembakau ke tanaman pangan lainnya dianggap tidak menguntungkan petani secara ekonomi. Penolakan juga disampaikan Sekjen APTI Boedidaya, karena dianggap dapat mengganggu pasokan tembakau dan secara ekonomis masih menjanjikan keuntungan bagi petani, selain dari aspek agronomi sudah telanjur ditanami tembakau yang tidak akan mudah dikonversi ke tanaman lain.¹⁸¹ Singkatnya, pemerintah belum mampu memastikan konversi lahan yang dibutuhkan atau sejalan dengan kepentingan petani tembakau. Dengan kata lain, pemerintah tidak mempunyai rencana yang cukup dalam menggerakkan peralihan terkait jaminan kesempatan kerja, penghasilan, perdagangan, selain aspek agronomi.

Kendati tembakau dan produk tembakau tidak dilarang – tetap sebagai komoditas legal – namun kebijakan pemerintah dengan perangkatnya PP No. 109/2012 itu bersifat antitembakau atau antirokok. Sebelumnya, industri rokok sudah dipaksa melawan dirinya dengan mencantumkan pernyataan pro kesehatan pada kemasan bungkusnya. Industri rokok juga sudah dibatasi untuk melakukan promosi dan penayangan iklan. Karena produk-produknya sudah dicitrakan dengan status bahaya berkat promosi dan kampanye antirokok. Maka, demi mempertahankan kelangsungan industri rokok, para pengusaha industri ini merogoh kocek mereka untuk mensponsori berbagai aktivitas budaya seperti musik, pemutaran film, sepakbola, basket, pameran, seminar, pendidikan dan pelatihan untuk menjangkau konsumen.

Namun kini – dengan segera diberlakukannya PP Tembakau – bakal banyak larangan yang berhubungan dengan produk tembakau antara lain, bertambahnya tempat-tempat dilarang merokok, perusahaan rokok dilarang beriklan dan mensponsori berbagai acara serta dipaksa mengubah rancangan kemasan bungkusnya, dan para pedagang dilarang menjual rokok kepada anak dan perempuan hamil. Pelanggaran atas setiap larangan ada sanksinya. Masih ditambah lagi berbagai promosi dan kampanye antirokok. Semua ini jelas mempersulit ruang gerak mereka dan menempatkan produk tembakau sebagai komoditas “semi-ilegal”. Dengan demikian, industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia – yang membentangkan kaitan dari hulu ke hilir secara lengkap – sedang diperangi, dikucilkan oleh kebijakan pemerintah yang diskriminatif, mencitrakan secara tunggal yang mengepulkan dan menyebarkan asap yang berbahaya, serta dijadikan “tersangka” sebagai “mesin pembunuh”. Sebaliknya melonggarkan impor tembakau dan rokok, sehingga memperlihatkan belang pemerintah yang lebih mementingkan menghisap bea dan cukai dari banyak kehancuran usaha industri rokok.

Propaganda perang dan kampanye antirokok memang sudah menyusup ke dalam pikiran banyak orang di Indonesia dalam periode zaman keemasan rokok *kretek*. Sehingga muncul pikiran “*kretek* berbahaya” dan mengandung ribuan racun, menyebarkan “wabah penyakit” namun tidak menular. Pandangan ini ditambahi lagi dengan data, angka, statistik, dan estimasi kematian. Namun, bagi Ralph Harris dan Judith Hatton,¹⁸² propaganda itu lebih cenderung memberikan

¹⁸¹ Lihat “Rencana Konversi Lahan Tembakau Ditolak,” *tempo.co*, Senin, 23 Juli 2012 | 11:33 WIB. Boedidaya menyatakan wacana pembatasan lahan tembakau telah muncul sejak 2000, namun sampai kini tidak ada kepastian.

¹⁸² Ralph Harris and Judith Hatton, *Murder a Cigarette*, London: Duckworth, 1998.

kesan yang mengerikan dengan menciptakan “monster pikiran” ketimbang kebenaran tentang tembakau dan merokok yang dipandang sebagai pengetahuan sampah.¹⁸³

Demikian pula, dengan mengecilkan kontribusi industri pengolahan tembakau dan cengkeh – bertentangan dengan pengakuan para pejabat di Kementerian Keuangan, khususnya pajak dan bea cukai – bisa diduga bertujuan untuk menyingkirkan industri yang sudah lebih 120 tahun menunjukkan peran dan kontribusi bukan hanya menyerahkan panen buat negara dalam bentuk pajak dan cukai, melainkan juga membentangkan rantai-rantai produksi yang saling terhubung antara ladang-ladang tembakau dan cengkeh yang tersebar di banyak daerah dengan industri *kretek* di mana jutaan pekerja dengan tangan-tangan terampil mereka telah menghadirkan produknya dalam berbagai kemasan. Lebih lagi, *kretek* telah membentuk identitas sebagai khas Indonesia. Dari lereng Gunung Sindoro, Temanggung, harum semerbak tembakau *srintil* dipuja sebagai pemegang kualitas tertinggi.

Dari itulah, maka pakar pertembakauan, Kabul Santoso, menganjurkan bahwa industri rokok *kretek* harus dibela, karena industri ini dan rokok *kretek* yang diproduksi tidak hanya sebagai produk budaya asli Indonesia, namun juga bersifat strategis yang telah memberikan banyak kontribusi untuk ekonomi. Pembelaan ini bukan semata-mata untuk membela para pengusaha, namun ada sekitar 18 juta orang, mulai dari hulu hingga hilir yang menggantungkan hidupnya terkait keberadaan dan kemajuan yang sudah dicapai industri rokok *kretek*, serta hasil kerja mereka sudah berlangsung lebih seabad.¹⁸⁴ Pembelaan ini juga penting supaya dapat mencegah berulangnya kasus tersingkirnya Indonesia sebagai negeri penghasil kopra, penghasil gula, dan penghasil beras dalam perdagangan internasional dan domestik.[]

¹⁸³ Steven Milloy, *Junk Science Judo: Self Defense Against Health Scares and Scams*, Massachusetts: Cato Institute, 2001.

¹⁸⁴ Lihat “Industri Rokok Kretek Perlu Dibela,” *investor.co.id*, Selasa, 16 Oktober 2012 | 9:25.

Bab 6

Kesimpulan dan Rekomendasi



Indonesia adalah negeri penghasil *kretek*. Dukungan penuh di belakangnya, Indonesia adalah negeri penghasil tembakau dan cengkeh. Kendati ada beberapa perusahaan besar, namun usaha industri rokok di Indonesia terbanyak di dunia.¹ Tidak hanya itu, karena industri pengolahan tembakau dan cengkeh mempunyai kedudukan dan kontribusi yang penting dalam ekonomi di Indonesia bukan saja saling berkaitnya satu sama lain dari hulu ke hilir pada tiga komponen utama – perkebunan tembakau, perkebunan cengkeh dan industri rokok *kretek* – namun juga memberikan dua kontribusinya yang pokok bagi penerimaan negara dari cukai dan pajak, serta pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. *Kretek* juga melekatkan identitasnya pada Indonesia, mirip seperti cerutu dengan Kuba, vodka dengan Rusia, atau sepakbola dengan Inggris atau Brazil.

Kajian ini menunjukkan bagaimana riwayat perjalanan panjang industri pengolahan tembakau dan cengkeh itu mulai dibangun pada akhir abad ke-19, bangkit dan mengalami pertumbuhan penting pada awal abad ke-20 yang sempat dihantam oleh kerusuhan sosial pada 1918, didera oleh efek Depresi Besar dari Eropa (Belanda), bahkan hampir hancur berkeping-keping ketika berada di bawah kebuasan gelombang pasang fasisme-militerisme Jepang yang menduduki Nusantara selama 1941-1945 dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk kepentingan perangnya, namun industri ini terus mempertahankan kelangsungan hidupnya, mengasah daya kompetisi dan merebut persaingan, serta sekarang memanen masa keemasannya dalam dua dekade terakhir dengan menguasai pangsa pasar (*market share*) lebih 90 persen.

6.1. Kesimpulan

Jujur saja, kajian ini merupakan sebuah pleidoi terhadap industri pengolahan tembakau dan cengkeh dalam kaitannya dengan kampanye global antitembakau, kerangka aturan regim kesehatan dunia, dan kebijakan pemerintah yang menekan, membatasi dan mengekang. Pembelaan ini tidak berarti hanya tertuju kepada para pemilik industri ini saja, namun yang lebih penting lagi adalah bentangan panjang yang sudah ditanamkan sepanjang perintisan, kebangkitan, jatuh-bangun, memperluas modal dan meningkatkan kapasitas produksi, diselingi dengan kelakuan monopoli BPPC, serta merebut dan memenangkan persaingan di negeri sendiri yang digerakkan oleh kerja ratusan tahun buruh-buruh. Nilai yang dihasilkan dari pencapaian ini tidak bisa diukur hanya dengan nilai investasi Rp 250 triliun dalam 3.000 perusahaan rokok *kretek*, dan digerakkan oleh 600.000 pekerja.² Bahkan tidak pula dengan ukuran nilai investasi Rp 2.225 triliun yang dirancang Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menciptakan lapangan kerja bagi 4.731.770 orang sampai tahun 2014.³ Karena industri ini menyangkut kerja dari lebih 120 tahun.

Kajian ini juga menawarkan perspektif hak-hak manusia terkait peran industri pengolahan tembakau dan cengkeh. Secara spesifik adalah hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak

¹ Direktur Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Frans Rupang mengatakan, Indonesia mempunyai sedikitnya 3.800 pabrik rokok, termasuk kelas rumahan. Sekitar 3.000 pabrik rokok tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lihat “Wah... Pabrik Rokok di Indonesia Terbanyak di Dunia,” *bisniskeuangan.kompas.com*, Kamis, 14 Januari 2010 | 14:36 WIB.

² Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Soedaryanto coba menghitung jumlah nilai yang tertanam, namun hanya pada terbatas pada 2010. Lihat “Pasar Industri Rokok Kretek Terancam Turun,” *kabarbisnis.com*, Rabu, 04 Agustus 2010 | 17:36 wib.

³ Lihat “Serap 5 Juta Pekerja Butuh Rp 2.000 T,” *neraca.co.id*, Rabu, 16/05/2012.

atas pekerjaan, hak atas upah dan tunjangan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas partisipasi dalam kebudayaan. Kendati bukan menjadi kewajibannya – karena beban kewajiban berada di tangan negara, terutama di tangan pemerintah – namun kontribusinya tidak dapat disepelekan.

6.1.1. Kontribusi industri pengolahan tembakau dan cengkeh

Dengan lintasan panjang yang mengiringi riwayat dan perjalanan industri pengolahan tembakau dan cengkeh atas apa yang sudah tertanam dari seluruh rangkaian kerja lapisan petani dan buruh tembakau dan cengkeh, serta pengusaha dan buruh pabrik *kretek*, maka beberapa penegasan perlu dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, berbeda dengan berbagai industri yang dibangun pasca-kolonial (*post-colonial*), industri rokok *kretek* tumbuh secara mandiri sejak masa Hindia Belanda. Para pengusaha Belanda tidak berkepentingan melakukan industrialisasi di Hindia Belanda, sebaliknya menjadikannya sebagai kawasan kantong ekspor (*enclave*) produk pertanian untuk diserap dalam industrialisasi di Eropa. Maka, tidak demikian halnya dengan *kretek*, yang dirintis dan diakumulasi oleh para pengusaha bumiputra dan keturunan Tionghoa. Kedua golongan pengusaha ini merintis industrialisasi di bidang perkretekan – bukan rokok putih yang diklaim secara global sebagai rokok – tanpa dukungan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Mereka memupuk modal secara kecil-kecilan, menanamkan kembali dari sebagian keuntungan yang dipetik, setahap demi setahap menapak kemajuan volume penjualan. Mereka juga tidak mempunyai koneksi politik untuk mendapatkan hak-hak istimewa dalam politik-ekonomi, bahkan terkucil dari proyek-proyek pemerintah Hindia Belanda. Namun, tanpa diprediksi pemerintah, bisnis *kretek* justru mendapat tempat yang semula hanya di satu daerah, kemudian menyebar ke sejumlah daerah. Sedangkan industri rokok putih dikuasai oleh perusahaan transnasional (TNC) untuk segmen pasar golongan non-bumiputra.

Kedua, industrialisasi produk tembakau dan cengkeh itu tidak bergantung kepada impor bahan baku. Sebelum kongsi dagang Belanda – *Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)* – memonopoli perdagangan cengkeh di Nusantara untuk kepentingan industri farmasi di Eropa, sebagian penduduk Ternate dan Tidore di kepulauan Maluku sudah menyemai benih, menanam bibit dan menuai panen cengkeh sebagai tanaman di daerah tropis sejak abad ke-16 dan menyebar pula tanaman ini ke berbagai daerah, khususnya Jawa. Sementara itu, penduduk di Jawa telah dipaksa untuk menanam tembakau dalam periode Tanam Paksa (*Cultuur stelsel*) dengan dukungan sejumlah riset, untuk kepentingan industri rokok dan cerutu di Eropa. Namun, dalam tangan Haji Djahhari, kedua produk pertanian ini diubahnya menjadi ‘rokok cengkeh’, yang kemudian dikenal sebagai *kretek*. Dengan turun tangannya Haji Nitisemito menggarap bisnis ini, *kretek* pun melejit sebagai produk yang dipasarkan secara luas.⁴ *Kretek* pun membentuk rantai-rantai produk yang saling terhubung antara tembakau dan cengkeh sebagai bahan baku dengan rokok *kretek* sebagai produk akhir. Bahan-bahan baku ini diperoleh di negeri sendiri, tidak diimpor.

⁴ Alex Sumaji Nitisemito, *Raja Kretek Nitisemito*, Kudus, 1980; Amen Budiman dan Onghokham, *Rokok kretek: Lintasan sejarah dan Artinya bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, Kudus: Djarum Kudus, 1987; Mark Hanusz, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Jakarta: Equinox Publishing (Asia), 2000; Topatimasang, Roem, Puthut EA, dan Hasriadi Ary (eds), *Kretek: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota*, Yogyakarta: Indonesia Berdikari, 2010; dan Rudy Badil, *Kretek Jawa: Gaya Hidup Lintas Budaya*, Jakarta: Gramedia, 2011.

Ketiga, industrialisasi *kretek* mempekerjakan banyak buruh. Banyak usaha industri ini adalah industri rumahan (*home industry*), karena tidak banyak dibutuhkan pekerja terampil (*skills labour*). Sampai sekarang masih banyak yang bekerja dengan menggunakan tangan untuk memproduksi sigaret kretek tangan (SKT). Di satu sisi memberikan kontribusi bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, namun di sisi lain kurang berkontribusi terhadap upah yang layak. Karena lebih mengandalkan upah buruh yang rendah dan sedikit tunjangan. Sejumlah perusahaan besar yang menggunakan teknologi produksi yang lebih maju – menggunakan mesin-mesin untuk memproduksi sigaret kretek mesin (SKM) – juga masih banyak buruh yang dipekerjakannya dengan upah yang rendah dan tidak memasukkan dalam program asuransi sosial. Ada pula yang melakukan hubungan sub-kontrak dalam bentuk mitra produksi sigaret (MPS). Dalam kaitannya dengan hulu, industrialisasi *kretek* membutuhkan tembakau dan cengkeh. Sebagian besar perkebunan tembakau dan hampir semua perkebunan cengkeh tergolong perkebunan rakyat. Sebagian petani mempekerjakan buruh, termasuk pula bentuk-bentuk pengolahannya. Dengan hasil yang dipetik, sebagian petani mengecap penghasilan layak, namun buruh tembakau masih banyak yang kurang menggembirakan. Sedikitnya ada 6 juta orang yang menggantungkan hidup mereka dari industri pengolahan tembakau dan cengkeh, sedangkan efek gandanya bisa mencapai 18 juta orang.

Keempat, meski bukan sub-sektor industri yang digarap pengusaha Belanda, namun dari sini pula pemerintah Hindia Belanda memanen cukai dan pajak dari mereka dalam jumlah yang cukup besar pada 1938. Sesudah berganti negara, pada 1959 pemerintah mengecap panen pajak dan cukai yang lebih besar dibandingkan masa Hindia Belanda.⁵ Kontribusi pajak dan cukainya terus mengalami peningkatan. Sepanjang 1996-2013, sumbangan industri rokok kepada pemasukan negara dalam bentuk cukai tidak pernah menurun. Bila di tahun 1996 dipetik Rp 4,57 triliun, maka 17 tahun berikutnya dipanen Rp 88,20 triliun.⁶ Pada 2013, target penerimaan cukai dan pajak dari rokok lebih tinggi dari minyak dan gas bumi.⁷ Selain itu, menyumbangkan lalu lintas devisa dalam bentuk perolehan ekspor rokok dan tembakau.⁸

Kelima, tidak sedikit peran industri rokok yang berkontribusi untuk kegiatan sosial dan kebudayaan. Sejumlah perusahaan menggelontorkan sebagian laba yang dipetikinya untuk program bea siswa, pelatihan guru, pembangunan rumah sakit, membantu meringankan kesulitan usaha kecil, menata lingkungan, membangun gedung olahraga dan sejumlah pebulutangkis mampu mencatatkan prestasi gemilang. Industri rokok juga mensponsori liga sepakbola, basket, serta pentas dan tur keliling para artis musik. Mereka juga dibebankan untuk menyalurkan dana untuk menjalankan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Kontribusi lainnya

⁵ Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Jakarta : Sinar Harapan, 1982. Lihat juga **tabel 3.32** (Bab 3).

⁶ Lihat Grafik 5.1 | Penerimaan Cukai Rokok Tahun 1996-2013 (Bab 5).

⁷ Tabel 5.4 | Perbandingan Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Migas 2013 (Bab 5).

⁸ Lihat “Ekspor Rokok RI Capai Rp 3,6 Triliun, Paling Besar ke Kamboja,” *finance.detik.com*, Kamis, 16 Desember 2010 14:14 WIB; “Ekspor Rokok Naik 2,6% di Kuartal I,” *indonesiainfinancetoday.com*, Senin, 16 Mei 2011; “Ekspor Rokok Kretek PT GG Jadi 6,1 Miliar Batang,” *tribunnews.com*, Rabu, 27 Juni 2012 17:47 WIB; Ekspor Rokok Kudus Tumbuh 24,34% Selama 2012,” *bisnis-jateng.com*, Minggu, 24 Februari 2013; “Jerman Siap Tampung Tembakau Indonesia,” *merdeka.com*, Sabtu, 26 Mei 2012 16:29:54; “Ekspor Tembakau Besuki NO Tak Terdampak Krisis Eropa,” *lensaindonesia.com*, Jumat, 14 September 2012 02:38 WIB; dan “Perusahaan Jerman Akui Kualitas Tembakau Deli Terbaik Di Dunia,” *tribunnews.com*, Jumat, 21 Desember 2012 20:40 WIB.

adalah mewariskan museum kretek di Kudus dan Surabaya yang sekaligus terbuka bagi kegiatan wisata.

Kontribusi mereka dalam kegiatan sosial dan kebudayaan, terutama yang dilakukan perusahaan-perusahaan *kretek* besar hanyalah refleksi dari besarnya keuntungan yang mereka petik dari produksi dan penjualan ratusan miliar batang *kretek*. Apalagi bila diperhatikan dari belanja iklan mereka yang mencapai Rp 11,9 triliun per tahun. Namun ironisnya, masih banyak buruh perusahaan rokok yang berada di bawah standar hidup layak.

6.1.2. Kampanye dan kebijakan anti tembakau

Pertarungan bisnis nikotin antara industri farmasi dengan industri tembakau di AS telah mengerek kampanye global antitembakau. Kampanye ini sudah memetik hasilnya seiring diadopsinya WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) ke-56 pada Mei 2003, bahkan dengan suara bulat mengadopsi FCTC.⁹ Republik Indonesia (RI), kendati belum menandatangani dan meratifikasi FCTC, namun dalam kaitannya dengan antitembakau, sudah masuk dalam UU No. 36/2009 dan belakangan yang lebih implementatif adalah ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2012.

Apa implikasi atau dampak dari keberhasilan kampanye antitembakau terhadap industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang mengiringinya?

Pertama, keberhasilan kampanye global dengan diadopsinya WHO FCTC sebagai kerangka acuan dalam mengatur sepak terjang industri produk tembakau tertuju pada dua aspek. Aspek pertama adalah kesehatan, sedangkan aspek kedua berhubungan dengan perdagangan. Karena, isi yang terkandung dalam FCTC tidak hanya sekadar paparan asap rokok, bahkan lebih banyak mengatur produksi dan perdagangan, yaitu harga dan tarif cukai rokok, kemasan dan label produk, iklan, promosi dan sponsorship, serta mengendalikan tujuan komersial dan kepentingan lain industri tembakau. Hampir seluruh yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan dimasukkan dalam PP No. 109/2012 atau PP Tembakau itu. Semuanya jelas mengarah untuk membatasi dan mengekang perdagangan rokok *kretek*.¹⁰

Kedua, regim kesehatan dunia bersama kelompok-kelompok antitembakau semakin gencar memberikan dua tekanan sekaligus. Di satu sisi tekanan dari aspek kesehatan terkait paparan asap rokok yang mengusung tuduhan bukan saja sebagai penyebab banyak penyakit tidak menular, bahkan tuduhan sangat serius: membunuh ratusan ribu orang per tahun.¹¹ Sedangkan di

⁹ Lihat "Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)," <http://www.ifppd.org/detail/komitment.php?id=7> (diakses pada 8 April 2013).

¹⁰ Lihat "Aturan Rokok Terbaru Tak Lindungi Kesehatan," *okezone.com*, Senin, 11 Februari 2013 14:05 wib. "Kalau mau membatasi konsumsi rokok, buatlah regulasi yang tegas supaya anak-anak tidak merokok dan dari dulu kami jajaki pemerintah tidak mau membuat regulasi semacam itu," ujar Sekjen Gapri Hasan Aoni Azis.

¹¹ Lihat "Komisi Nasional Pengendalian Tembakau: Per tahun, 500.000 Perokok Terancam Mati," *atjeh.co*, Kamis, 28 Juni 2012 10:00 WIB; "Rokok Bisa Membunuh 8 Juta Orang per Tahun," *health.kompas.com*, Rabu, 1 Juni 2011 | 07:08 WIB; "WHO: Rokok Membunuh 5 Juta Orang Tiap Tahun," *health.kompas.com*, Kamis, 10 Desember 2009 | 10:22 WIB; dan "Orang Terkaya itu adalah Pembunuh Nomer Satu," *bisnis-kti.com*, Senin, 1 April 2013.

sisi lain tekanan dari aspek perdagangan mulai dari kenaikan tarif dan harga jual, pembatasan sampai pelarangan tertentu. Dalam menjual produk, mereka juga dibebankan membuat dan mencantumkan pernyataan pada kemasan bungkusnya yang melawan dirinya. Dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri, mereka pun harus menghadapi pembatasan dan larangan dari pemerintah yang negerinya menjadi tujuan ekspor. Dengan tuduhan, pembatasan dan larangan tertentu, maka produk tembakau lebih mirip sebagai produk “semi-ilegal”.

Ketiga, pemerintah RI bukan saja sudah menjadi kepanjangan tangan dari regim kesehatan dunia, namun juga bagian dari kepentingan dagang asing. PP Tembakau adalah cerminan dari dua kepentingan itu. PP menempatkan tembakau sebagai barang yang mengandung zat adiktif, membatasi ruang gerak perusahaan industri dan melawan produknya sendiri, serta pedagang dan konsumen rokok, pemerintah setiap tahun menaikkan tarif cukai dengan tujuan harga melonjak demi menekan konsumsi, namun pemerintah melonggarkan kran impor tembakau dan rokok putih. Perdagangan dalam negeri diperketat, namun impor dibiarkan mengalir masuk tanpa pengetatan.

Keempat, formasi industri dan pasar rokok di Indonesia bersifat oligopoli. Dalam *market share*, rokok *kretek* merenggut 93 persen.¹² Ini berarti rokok putih hanya kebagian 7 persen. Pada 2011, berdasarkan riset Nielsen Retail Audit, sebanyak lima perusahaan besar yang menyabet 86,4 persen.¹³ Sisanya, hanya 6,6 persen pangsa pasar saja yang terpaksa mendapatkan bagian yang sangat kecil di antara ribuan usaha industri *kretek*. Formasi ini – menggunakan metode CR (*concentration ratio*) – berciri oligopoli dengan lima perusahaan besar yang memegang konsentrasi tinggi. Mereka dikerumuni oleh banyak perusahaan *kretek* menengah dan lebih banyak lagi usaha *kretek* kecil yang terkonsentrasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Struktur oligopoli ini sulit ditembus oleh pelaku industri rokok yang masuk ke *kretek* dengan sama sekali baru. Dua raksasa produsen rokok putih, Philip Morris Indonesia (PMI) dan British American Tobacco (BAT) sulit mendongkrak pasar rokoknya untuk bersaing dengan *kretek*.

Kelima, cara yang ditempuh pelaku industri rokok untuk menyaingi lima besar perusahaan dengan konsentrasi tinggi itu adalah akuisisi atau pembelian saham mayoritas di pasar modal (saham). Cara akuisisi – mengambil alih atau menelan – dilakukan PMI (Sampoerna) pada 2005 dan BAT (Bentoel) pada 2009. Sedangkan penguasaan mayoritas saham dilakukan perusahaan Korea Tobacco & Ginseng (KT & G) Corporation membeli 60 persen saham PT Trisakti Purwosari Makmur (TPM) pada 2011.¹⁴ Semua langkah yang ditempuh tiga perusahaan rokok asing itu berlangsung sesudah WHO FCTC diadopsi dan banyak negara meratifikasinya, serta meningkatnya kampanye antitembakau di Indonesia.

Keenam, sesudah HM Sampoerna berada di bawah kekuasaan PMI, posisinya berhasil melesat di bagian terdepan mengalahkan Gudang Garam dan Djarum dalam merebut pangsa pasar. Bentoel pun menempati urutan keempat. Bersama KT & G, para pemain asing ini mengubah peta kekuatan bisnis rokok *kretek* di Indonesia. Selain itu, HM Sampoerna menjalankan taktik

¹² Lihat “Ini Peluang Besar Rebut Pasar Kretek RI,” *viva.co.id*, Rabu, 17 Juni 2009, 10:04; dan “Akuisisi Bentoel, BAT Incar Pasar Kretek Indonesia,” *finance.detik.com*, Rabu, 17 Juni 2009 11:04 WIB.

¹³ Lihat Grafik 3.11 | Pangsa Pasar Industri Rokok Indonesia 2011 (Bab 3).

¹⁴ Lihat “Korsel Beli Perusahaan Rokok Indonesia,” *liputan6.com*, Kamis, 21 Juli 2011 11:43; dan “KT&G Corp Beli 60% Saham Perusahaan Rokok Lokal,” *indonesiafinancetoday.com*, Kamis, 21 Jul 2011.

kerjasama sub-kontrak berlabel MPS – dengan menyerahkan produksi rokoknya pada pihak ketiga (*third party operation*) – yang merupakan bisnis utama/inti (*core business*),¹⁵ dengan menggunakan tenaga *outsourcing* yang selama ini banyak dikecam oleh serikat-serikat buruh, karena dinilai melepaskan tanggung jawab terhadap buruh sambil meningkatkan jumlah produksi rokoknya.

Ketujuh, pemerintah tidak hanya terus-menerus menaikkan cukai untuk peningkatan penerimaannya,¹⁶ lebih lagi cukai yang tinggi ditujukan pada pabrik rokok kecil,¹⁷ namun memperketat produksi dan perdagangan rokok yang ditambah dengan kampanye antitembakau di dalam negeri berdampak pada kehancuran banyak perusahaan pabrik rokok *kretek*. Gappri mengungkapkan, pabrik-pabrik produk tembakau yang sebelumnya berjumlah 5.000 pabrik telah menciut menjadi hanya 600 pabrik, bahkan dapat menyisakan hanya 100 pabrik.¹⁸ Ada perusahaan yang masih memiliki izin, namun banyak dari mereka yang kesulitan menambah biaya produksi, sehingga banyak pula yang tidak beroperasi lagi. Dampak ini mengakibatkan mereka kehilangan pendapatan atau penghasilan.

Kedelapan, industri rokok *kretek* berkait dengan hulu yang sedikit-banyak berdampak terhadap perkebunan tembakau dan cengkeh. Kasus di Pulau Simeulue, Aceh, banyak petani cengkeh hampir tidak berkepentingan menggarap lahan perkebunannya, sehingga lebih 1 juta pohon cengkeh mengalami kerusakan dan terancam mati. Di satu sisi, berkurangnya pasokan cengkeh mendongkrak harganya,¹⁹ sehingga berdampak ke hilir, yakni meningkatnya biaya produksi *kretek*. Sedangkan di lain sisi, pemerintah melonggarkan impor tembakau dan rokok putih yang berdampak pada membesarnya volume pasokan tembakau. Akibatnya banyak petani tembakau mengeluhkan anjloknya harga tembakau. Mereka mengalami kemerosotan penghasilan.

Kesembilan, merosotnya jumlah perusahaan pabrik rokok *kretek*, berdampak pada banyak buruh yang menggantungkan hidupnya dari pabrik-pabrik tersebut. sebagai contoh, dibekukannya 20 perusahaan rokok skala kecil di Kota Malang berdampak terhadap sekitar 15.000 buruh.²⁰ Dampak yang diperkirakan lebih serius adalah pemberlakuan PP No. 109/2012 setelah Juni 2014 mendatang.²¹ Dengan banyak pabrik ditutup, maka banyak pula pekerja yang kehilangan hak atas pekerjaan, karena mereka mengalami PHK. Kemenakertrans mengkhawatirkan potensi PHK

¹⁵ HM Sampoerna mengaku telah memiliki 38 MPS yang tersebar di Jawa, dengan mempekerjakan buruh sebanyak 60.000 orang. Setiap MPS mempekerjakan 1.000-1.600 buruh yang didominasi buruh perempuan. Lihat "Siaran Pers PI: Outsourcing pada Industri Rokok dan Dampaknya pada Kesejahteraan Buruh," <http://blog.redwhitecommunication.com/siaran-pers-outsourcing-pada-industri-rokok-dan-dampaknya-pada-kesejahteraan-buruh/> (diakses pada 13 April 2013).

¹⁶ Lihat "Negara Diuntungkan Kenaikan Cukai Rokok," *kabarbisnis.com*, Rabu, 27 Februari 2013 | 11:44 wib; dan "Target Cukai di Surabaya Capai Rp 11 T," *kabarbisnis.com*, Kamis, 12 Mei 2011 | 18:10 wib.

¹⁷ Lihat "Ribuan Buruh Pabrik Rokok Tagih Janji Menkeu," *antaranews.com*, Senin, 22 Februari 2010 22:07 WIB.

¹⁸ Lihat "Gara-Gara PP, dari 5.000 Tinggal 600 Pabrik Tembakau," *okezone.com*, Senin, 11 Februari 2013 16:19 wib. Lihat juga, Grafik 3.7 | Jumlah Perusahaan 2007-2011 (Bab 3).

¹⁹ Lihat "Pengusaha Rokok Teriak Harga Cengkeh Naik Rp 110.000 per Kilogram," *suarapengusaha.com*, Kamis, 3 Januari 2013 - 11:32 am.

²⁰ Lihat "20 Perusahaan Rokok Dibekukan, 15.000 Buruh Terancam PHK," *finance.detik.com*, Jumat, 11 Mei 2007 17:20 WIB.

²¹ Lihat "RPP Tembakau Disahkan, Ribuan Buruh Pabrik Rokok Terancam PHK," *aktual.co*, Rabu, 16 Januari 2013 14:35:30.

sebanyak 500.000 buruh di berbagai perusahaan pabrik *kretek*.²² Persoalan ini belum termasuk dampak ke hulu terhadap banyak petani dan buruh tembakau dan cengkeh. Dari hulu ke hilir, seluruhnya diperkirakan lebih dari 6 juta orang yang bergantung pekerjaan mereka dalam industri pengolahan tembakau dan cengkeh. Kebijakan pemerintah seperti ini menciptakan banyak pengangguran. Kontradiktifnya, pemerintah justru hendak menghabiskan dana sebanyak Rp 2.225 triliun nilai investasi untuk menciptakan lapangan kerja bagi 4.731.770 orang sampai tahun 2014.²³

Kesepuluh, para pengusaha yang menutup usaha mereka dan buruh yang kehilangan pekerjaan, sama-sama kehilangan penghasilan atau pendapatan. Sedangkan para petani yang menjumpai kenyataan harga tembakau anjlok, mengalami kerugian dibandingkan sebelumnya.²⁴ Para pedagang rokok juga mulai kebingungan atas kemungkinan larangan menjual rokok kepada kelompok tertentu, juga konsumen ikut bingung.²⁵ Dari mereka, yang paling menderita adalah buruh-buruh yang kehilangan pekerjaan dan sekaligus kehilangan hak atas upah dan tunjangan lainnya. Kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai rokok demi peningkatan pemasukan, mengetatkan produksi dan perdagangan produk tembakau, serta membiarkan impor dan rokok membanjiri pasar dalam negeri dan sebaliknya sebagian pemerintah asing menghalangi produk tembakau Indonesia, telah menciptakan banyak orang bukan saja berkurang penghasilan mereka, bahkan banyak yang tidak berpenghasilan lagi.

Kesebelas, menjelang diterapkannya PP No. 109/2012, berbagai perusahaan industri rokok, terutama *kretek*, harus bersiap-siap menjalankan aturan yang melarang mereka beriklan, melakukan promosi dan sponsorship terhadap acara-acara kebudayaan seperti pendidikan, musik dan olahraga. Kemungkinan dampak ini antara lain dialami perusahaan iklan dan media yang bakal berkurang pendapatan Rp 11,9 triliun,²⁶ pemerintah daerah yang mengizinkan memajang reklame,²⁷ serta para penyelenggara (*event organizer*) acara-acara seminar, pelatihan, musik dan berbagai cabang olahraga. Mereka akan menghadapi transisi dari sponsorship perusahaan rokok ke non-rokok.

Keduabelas, dalam menghadapi kemungkinan risiko kehilangan pekerjaan atas banyak orang, terutama buruh-buruh yang bekerja di pabrik rokok, pemerintah – lewat Kemenakertrans – mengaku belum punya strategi mengatasinya.²⁸ Sedangkan beberapa penggalan rencana pemerintah dalam melakukan konversi lahan dari tanaman tembakau ke tanaman pangan atau

²² Lihat “500.000 Orang Terancam PHK Jika RPP Tembakau Berlaku,” *finance.detik.com*, Rabu, 20 Juni 2012 15:53 WIB; dan “0,5 Juta Buruh Pabrik Rokok di Ujung PHK,” *kabarbisnis.com*, Rabu, 20 Juni 2012 | 21:49 wib.

²³ Lihat “Serap 5 Juta Pekerja Butuh Rp 2.000 T,” *neraca.co.id*, Rabu, 16/05/2012.

²⁴ Lihat “Harga Anjlok, Petani Tembakau Terancam Rugi,” *antarajateng.com*, Minggu, 16 Sept 2012 11:13:34 WIB; dan “Jelang Panen Agustus Nanti, Petani Tembakau Jatim Resahkan Anjloknya Harga,” *lensaindonesia.com*, Jumat, 15 Februari 2013.

²⁵ Lihat “Pedagang & Konsumen Bingung Soal Aturan Pembatasan Rokok,” *finance.detik.com*, Minggu, 22 April 2012 16:55 WIB.

²⁶ Lihat “Belanja Iklan Rokok Selalu Bertengger di Atas,” *neraca.co.id*, Sabtu, 26 Januari 2013; “Imbas Terbitnya PP No 109 Tahun 2012, Iklan Rokok Bakal Terjadi Penyusutan,” *lensaindonesia.com*, Selasa, 15 Januari 2013 22:27 WIB; dan “P3I: PP Tembakau Ancam Belanja Iklan Rokok,” *antarajatim.com*, Selasa, 15 Januari 2013 22:29:06.

²⁷ Lihat “Larangan Reklame Rokok Pengaruhi PAD Kota Balikpapan,” *tribunnews.com*, Rabu, 23 Januari 2013 20:26 WIB.

²⁸ Lihat “Pemerintah Tak Punya Strategi Cegah PHK 500.000 Pekerja Industri Rokok,” *finance.detik.com*, Rabu, 20 Juni 2012 17:37 WIB.

tanaman lainnya. Bagi petani, persoalan ini disebabkan belum ditemukan tanaman konversi tembakau yang setidaknya menghasilkan keuntungan yang sama dengan tembakau, terutama di lahan-lahan yang hanya mungkin tanaman tembakau tumbuh. Sejumlah lahan tembakau yang telah diujicobakan dan diganti dengan tanaman lain di beberapa daerah di Madura, berakhir dengan kenyataan: selalu gagal.²⁹

6.2. Rekomendasi

Tidak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negeri penghasil *kretek*, tembakau dan cengkeh. Dengan mengutip Mark Hanusz,³⁰ *kretek* itu tidak diproduksi di AS atau di negeri-negeri di Eropa, melainkan produk asli dan khas Indonesia.³¹ Lagi pula, sejarahnya sudah lebih 120 tahun – jauh sebelum RI terbentuk. Sekarang, kendati sedang berupaya keras untuk ekspor, namun dengan adanya kampanye global antitembakau dan kerangka acuan WHO FCTC, kebijakan tarif cukai yang naik setiap tahun serta pengekangan perdagangan dan pelarangan promosi, ternyata produksi *kretek* masih merajai lebih 90 persen pangsa pasar di negerinya sendiri.³²

Berbekal dari kesimpulan dalam kajian ini maka perlu diajukan beberapa rekomendasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan industri rokok terutama *kretek* dalam menghadapi tantangan yang semakin tidak menguntungkan industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia.

1. Pemerintah perlu mencabut PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini bukan saja bertentangan dengan Pasal 116 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, melainkan juga tidak sesuai dengan judulnya yang mengatur kaitan produk tembakau dengan zat adiktif. Karena, PP ini – dengan mencabut PP No. 19/2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan – justru mengatur hal-hal yang berkaitan dengan produk dan diversifikasi, kemasan bungkusnya, pembatasan dan pengekangan perdagangan, serta promosi, iklan dan sponsorship. Memang tidak melarang seluruhnya, namun – ditambah lagi dengan kampanye antitembakau – produk tembakau ini lebih mirip sebagai produk “semi-illegal”. Inkonsistensi dengan judul PP ini sekaligus menampakkan perilaku pemerintah sebagai bentuk tipu muslihat. Bila pemerintah tetap mempertahankan judulnya, sebaiknya isi pasal-pasalinya harus segera direvisi supaya lebih sesuai.
2. Pemerintah sebaiknya mengambil posisi mendukung industri pengolahan tembakau dan cengkeh dalam berbagai bentuk seperti PP, peraturan menteri, sampai UU bukan saja karena sudah menunjukkan ketangguhannya mampu bertahan selama 120 tahun dan mencapai masa keemasannya selama dua dekade, namun juga kontribusinya untuk penerimaan negara dari pajak dan cukai serta devisa, bahkan kontribusi bagi pemenuhan

²⁹ Lihat “Petani Tembakau Konsisten Tolak Larangan Penanaman Tembakau,” *okezone.com*, Rabu, 27 Juni 2012 15:12 wib.

³⁰ Mark Hanusz, *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes*, Jakarta: Equinox Publishing (Asia), 2000. Kutipan yang dimaksud: “...kretek itu tidak ada di AS, tidak ada di Eropa, atau negeri-negeri lain. Hanya ada di sini, khas Indonesia.”

³¹ Kikivolvo, “Rokok Kretek Tidak Ada di Amerika,” <http://komunitaskretek.or.id/?p=753> (diakses pada 17 April 2013).

³² Lihat “Jatuh-Bangunnya Industri Rokok Kretek Nasional,” *swa.co.id*, Senin, 11 Februari 2013; “BAT Akuisisi Bentoel: Ini Peluang Besar Rebut Pasar Kretek RI,” *viva.co.id*, Rabu, 17 Juni 2009, 10:04.

hak atas pekerjaan, hak atas upah dan tunjangan, hak atas jaminan sosial, serta hak atas partisipasi dalam kehidupan budaya. Karena, sedikitnya 6 juta orang menggantungkan hidup mereka dalam industri pengolahan tembakau dan cengkeh. Untuk melindunginya dari serbuan perdagangan impor, pemerintah juga perlu menerapkan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan hambatan non tarif (*nontariff barrier*).

3. Dalam kaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial itu pula, maka pemerintah perlu mendorong dan bahkan menekan industri pengolahan tembakau dan cengkeh lebih berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada buruh-buruh yang mereka pekerjakan seperti kepastian kerja, upah yang layak, jaminan sosial dan tunjangan lainnya. Pemerintah seharusnya menghapus bentuk kerjasama sub-kontrak dengan label MPS dalam industri rokok yang merupakan bisnis utama (*core business*) supaya mengakhiri persoalan status buruh yang dipekerjakan. Status buruh borongan perlu diiringi dengan peningkatan menjadi buruh tetap dalam kaitannya dengan masa kerja. Langkah-langkah ini penting dilakukan supaya para pengusaha rokok terutama kretek tidak dituding sebagai kelompok yang rakus dan tamak: mengeruk untung sebanyak mungkin dalam tempo sesingkat mungkin dengan mengandalkan upah yang rendah. Karena tidak terbantahkan mengingat banyak publikasi dan pemberitaan yang mengungkapkan tentang begitu besarnya laba bersih yang dipetik, belanja iklan yang dialokasi, serta menyokong berbagai acara musik dan olahraga.
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu menimbang lebih matang ketimbang sekadar menjadi corong regim kesehatan dunia – karena WHO FCTC juga lebih banyak mengandung pengaturan perdagangan daripada kesehatan – supaya pertentangan antara hak atas kesehatan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya dapat dihasilkan titik temu. Karena, paparan asap rokok – bukan paparan asap knalpot – tingkat bahayanya tidaklah seperti yang dikesankan oleh pihak-pihak yang menyuarakan antitembakau. Karena, banyak juga pengalaman hidup dan riset tentang produk tembakau yang menunjukkan hasil dan fakta yang bertentangan dengan yang disuarakan itu. Kemenkes perlu mengarahkan dan menguatkan standarisasi produk tembakau supaya dicapai kemajuan yang lebih diharapkan.
5. Hasil kajian ini perlu juga menyampaikan kepada semua pihak bahwa 120 tahun bertahan dan mampu menggapai masa keemasannya dalam dua dekade terakhir, bukanlah waktu yang pendek. Apa pun kandungan bahaya yang dikampanyekan, industri pengolahan tembakau dan cengkeh merupakan pelajaran yang sangat berharga – industrialisasi yang hampir sepenuhnya bersumber dari tangan-tangan dan bahan baku lokal – yang tidak atau sangat kurang bergantung kepada impor pada saat para pengusaha Eropa di Hindia Belanda tidak berkepentingan melakukan industrialisasi. Industri ini sudah melewati tahap-tahap krisis ekonomi dunia, kerusuhan sosial, perang dunia, bahkan nyaris hancur berantakan di bawah gelombang fasisme-militerisme Jepang, namun dengan tangguhannya mampu bertahan sebelum mereguk masa keemasannya. Khususnya bagi pemerintah, kiranya titisan sejarah panjang dengan jatuh-bangunnya pantas diapresiasi sebagai salah satu kekhasan produk Indonesia.

INDEKS KATA

<u>Kata</u>	<u>Halaman</u>
A	
Aburizal Bakrie	63
Aceh	670,80,83,97,127,163,164,165,177,225,242
Alihdaya	42,104
Ambon	85,138
AMTI	9,12,14,42,103,105,115,150,161,162
APCI	14,86
APTI	13,14,18,19,20,21,22,23,24,28,30,42,68,70,77,97,99 205,215,218,224,226,231,232
Aria Bima	9
AROL	5
Asperki	32
B	
Bal Tiga	92,121,131,134,135
Balaikota DKI Jakarta	10
Bansari	23
BAT	90,94,113,119,120,129,131,133,183,212,214,215,241
Bentoel	17,18,29
BEP	17
BICT	118
Bogor	204,201
BPPC	8,37,38,79,84,85,133
BPS	37,42,75,76,103,111,160,217,224
Brazil	42,72,115,185,194,237
BUMN	37,64
Bunderan Hotel Indonesia	10,197
C	
Climate Change	6,201
Cukai	3,4,9,10,13,15,16,18,19,21,25,29,30,31,32,34,42,44,45,49,51,53 54,56,61,62,88,89,94,95,96,100,105,106,107,108,121,1222,123, 124,125,126,127,128,129,131,133,135,144,151,152,153,155, 156,157,158,160,161,169,176,182,185,195,206,208,211,215 216,217,218,219,220,221,222,223,225,226,229,230,232,233 237,239,240,241,242,243,244
Cultuurstelsel	33,55
Cynthia Lamuzu	197
D	
DBH CTH	15,16,18
Demak	28,35,39,167
Dewi Rezer	197
DI Yogyakarta	11,13,26,40,54,105,127,150,198,219
Disperindag	16,53,88,175
Ditjen Pajak	64,128
Djarum	17,18,29,63,111,112,115,125,134,174,178,179,180,182,183,214 215,241
Dji Sam Soe	134
DPR	14,19,20,24,29,32,45,58,70,125,127,128,154,163,199,205,206 207
DPRD	18,20,21,23,24,28,39,180,202,205,228
Dunhill	119,122,183

E	
Eka Tjipta Widjaja	62,63
ELI	17
Epidemiologi	6
F	
Fakta	3,11,12,23,24,25,26,27,30,203,222
FCTC	4,5,10,12,13,14,49,52,54,133,158,194,195,196,197,203,208,210 213,215,219,239,240,242,245
FDA	9
FKPJ	15
FMPT	14
Formasi	29,30,32,80,181,226,236
G	
Gapero	32
Gaperoma	32
GAPPRI	8,9,10,29,31,38,43,44,79,89,93
Gaprindo	31,123
GCSF	67
GPEI	76
Grobogan	34,35,167
Gudang Garam	17,18,29,62,63,64,111,114,117,126,134,155,156,177,182,184 212,214,215,227,229
Gunung Prahu	22
Lobal Warming	6,183
H	
H Ali Asikin	92
Haji Nitisemito	130,134,138,149,238
Halakah	11
Hilmi Aminuddin	197
Hindia Belanda	34,38,39,55,73,79,91,92,93,118,121,129,130,133,134,138, 143,144,147,151,158,159,185,186,189,238,239,245
HKTI	14,24,162
Hongi	78
HTTS	10
Huzna Zahir	197
I	
IAKMI	97,157,198,199
ICESCR	50
ICW	203
Illicit Trade	4,5,49,54
India	7,42,49,68,72,75,108,185,194,199,214
Inggris	87,185,131,137,201,237
IPB	69,183
Istana Merdeka	14
ITGA	14
J	
Jakarta	6,10,15,19,20,25,26,28,31,80,105,128,155,178,187,188,197, 202
Jan Pieterszoon Coen	78
Jawa Barat	14,20,34,35,36,39,40,65,66,71,77,80,84,93,97,98,127,128,150, 163,165,177,185,209,219,226
Jawa Timur	14,17,20,21,23,29,30,35,36,39,40,65,66,71,88,91,97,98,104,118 127,128,130,132,138,150,153,154,158,163,167,168,171,176, 177,182,185,202,205,208,219,228,241

Indeks Kata

Jember	15,23,26,34,35,69,74,104,161,167,168,172,176,227
Jerowaru	15,16
JPTI	12
K	
Kabul Santoso	161,162,233
Kamboja	43,115,116,135,151
Karawang	39,166
Kebumen	20,35,39,65,148,167
Kemenkes	15,19,20,223,228,229,231,245
Kementerian Perindustrian	42,43,101,116
Kendal	18,20,32,34,35,166,167,215
Keruak	16
Ki Ageng Makukuhun	139
Klaten	21,22,28,34,35,138,167
KNKP	13,16,22
Komnas	12,25,56,196,2013,221,222
Komunitas Kretek Jakarta	15,19
KPPBC	94,95,104,117,127
KSBSI	33
KTM	14
KTR	10,32,52,54,195,202,211
L	
LIK-IHT	105
Lombok Barat	18,34,36,40,169
Lombok Tengah	18,34,36,40,168,169
Lombok Timur	18,34,36,40,168,169
M	
M Atmowidjojo	92
Madagaskar	83,132,148
Madiun	16,20,35,39,131,168,178
Madura	17,18,34,231,244
Magelang	20,28,34,35,148,167,184,226
Majelis Tarjih dan Tajdid	11,198
Marlboro	118
Marty Natalegawa	196
MATA	10
MDGs	12
Menakertrans	33,176,220
Michael Bloomberg	26,27,198,210
Michael Hartono	62,63
Minahasa	21,148,149
MPS	42,104,172,179,216,219,220,239,242,245
MUI	23,24,25,26,55,56,197,198
Multiplier Effect	41
N	
Nafsiah Mboi	7,196,214,228
Naskah Akademik	196
Nielsen Retail Audit	3,4,241
Nikotin	4,7,11,54,69,209,229,240
Nitisemito	90,92,131,134,135,137,149,238
Nojorono	7,18,20,112,113,135,102,214,215
Nova Riyanti	198
NTB	12,12,15,16,17,18,19,21,22,24,27,34,36,39,66,70,71,156,168 205,209
NU	23,68

O	
OPSI	215
P	
PAD	157
Padang Panjang	24,197
Pamekasan	17,20,35,39,53,88,94,167,168,172,176
Pangeran Philip	139
Paparasan asap rokok	5,7,51,53,193,195,202,216,221,230,240,245
Paperki	32
PBB	4,28
PDB	157,155,156,184,212
Pemuda Tani	14
Perda	21,202,211
Pertamina	62
Philip Morris	64,108,109,110,118,119,120,129,133,212,214,241
Ponorogo	21,35,39,130,168,178
PP Muhammadiyah	25,26,27,54,210
PPS	27
Probolinggo	17,34,35,39,95,130,167,168,172,176,227,229
PT Perkebunan Nusantara	37
PTM	6,7,8,11,52
Purworejo	20,35,148,167
Puskindo	31,69,217
R	
Raja Kretek	90,121,135
RAN-GRK	7
Ratu Elizabeth	137
Riskesdas	6,221
Rokok putih	9,31,34,38,39,68,77,93,103,107,110,116,118,120,123,129,130 131,132,137,166,170,215,224,238,241,242
RPP	7,18,19,20,21,26,28,68,204,205,206,223,226,231
RPP Tebakau	18,19,20,21,26,68,205,223,226
S	
Sampoerna	17,18,29,63,64,109,111,112,113,117,119,120,127,129,134,136 157,171,179,182,183,184,189,212,214,215,219,220,223,229, 241
Seoul	49
Sindoro	23,26,69,139,166,231,233
SKM	38,44,78,89,104,108,111,124,170,178,239
SKT	38,44,78,89,93,95,104,108,111,124,137,170,178,179,188,239
SPPT	27
SPSI	25,33,180,181,221
Srintil	35,69,70,157,166,186,233
STN	12,14,18,10,21
Sukaraja	15
Sumbing	23,69,139,166
Sumenep	17,35,70,94,168,177
Surabaya	21,29,32,39,40,92,104,125,126,127,129,130,131,134,135,136 149,153,171,189,215,240
Susilo Bambang Yudhoyono	21,240
Susilo Wonowidjojo	62,63
Syamsul Hadi	161,162
Syariah Islam	11

Indeks Kata

T	
TCSC	27,65,97,157,199,203,210
TDI	15
Temanggung	14,18,19,20,22,23,26,27,28,34,35,68,69,70,73,89,138,147 157,166,167,186
Thailand	42,116,135,151
TII	197
TIS	77
Tjoa Khang Hay	92
TPM	119,120,214,215,223,229,241
U	
UMK	31,177,178,180,181,217,220
V	
VOC	78,79,81,143,147,148,185,238
W	
WHO	4,5,6,10,13,49,52,120,133,135,159,169,196,197,198,200,201, 202,211,215,216,217,223,228,240,241,244,245
Widya Kandi Susanti	20
Widyawati	197
Wisnilak	114,216,217
Wonosari	22
Wonosobo	18,20,28,34,148,167
World Health Assembly	4,49,160,196,240
WTA	10
WTO	9,43,45,49
Y	
YLKI	159,198,199,100,205,212,213
Yogyakarta	11,14,22,26,35,39,40,42,56,80,84,97,105,151,152,154,159,100 207
Z	
Zanzibar	130,132
Zat Adiktif	7,12,19,22,25,55,56,68,183,206,207,208,209,232,240,241,244

TIM PENULIS

Suryadi Radjab

Lahir di Meulaboh, Aceh, pada 29 November 1961. Mengenyam pendidikan tinggi di Departemen Teknik Geologi ITB (1980-1986) dan Administrasi Negara Unpad (1981-1984), Bandung. Belajar filsafat dan ekonomi-politik dalam Kelompok Diskusi Sabtu dan Free School for Socio-analysis (Fressa), serta belajar tentang hak-hak manusia setelah menjadi anggota di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

Menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengurus Nasional PBHI (2007-sekarang). Pernah sebagai Ketua Badan Pengurus PBHI Jawa Barat. Sebelumnya pernah bekerja sebagai pekerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Menulis banyak artikel di media massa dalam isu-isu ekonomi-politik, gerakan mahasiswa, kebudayaan dan hak-hak manusia, serta menjadi narasumber pada sejumlah diskusi dan pelatihan. Menulis beberapa buku dan editor, terakhir berjudul *Laporan Pelanggaran Hak-hak Tersangka: Hentikan Praktik Sewenang-wenang dan Kejam* (2012). Sehari-hari bekerja sebagai penulis dan terlibat dalam perencanaan program dan beberapa penelitian, dan sampai sekarang masih berdomisili di Bandung.

Imas Didah Deliah

Setelah lulus dari Institut Agama Islam Negara (IAIN), pernah bekerja sebagai staf administrasi dan keuangan di PBHI Jawa Barat. Selain sebagai anggota PBHI, juga pernah mengikuti pelatihan investigasi atas pelanggaran hak-hak manusia. Selama 2007-2009 menjadi staf monitoring dalam program kerjasama PBHI Jawa Barat dan empat lembaga/organisasi lainnya, yakni Jaringan Kerja Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (Jaker PAKB2).

Tahun 2011-2012, perempuan yang lahir di Garut pada 15 April 1980 ini bekerja sebagai Monitoring Officer dalam Badan Pengurus Nasional PBHI untuk mengkoordinasikan pemantauan dugaan pelanggaran hak-hak tersangka, dan ikut menyusun buku *Laporan Pelanggaran Hak-hak Tersangka: Hentikan Praktik Sewenang-wenang dan Kejam* (2012). Sebelumnya sebagai tim penulis Instrument *Pemantauan Implementasi CEDAW: Pasal Pendidikan dan Kesehatan* di PBHI Jawa Barat (2008). Selain sebagai peneliti, juga bekerja sebagai penerjemah.

Unung Nuralamsyah

Lulusan Fakultas Hukum dan Syariah (FKS) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sekarang ini menjabat sebagai Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Sebelumnya pernah sebagai Advocacy Officer dalam Jaringan Kerja Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Jaker PAKB2) di mana LBH Bandung salah satu anggotanya, juga mengelola situs Jaker (2007-2009).

Lahir di Majalengka, 26 Juni 1979, dan sejak kuliah sampai sekarang berdomisili di Bandung. Selain pernah menjadi peserta sejumlah workshop, juga belakangan sering menjadi fasilitator dalam berbagai pelatihan. Beberapa kali terlibat dalam penelitian tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, dinamika konflik di Jawa Barat, aksesibilitas masyarakat atas kesehatan di Kota Bandung. Sekarang sedang melakukan advokasi tentang dampak jalan rusak terhadap pengguna jalan.

Identitas Pribadi

Nama : Suryadi Radjab
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh, 29 November 1961
Alamat Kantor : Jl. Matraman Raya No. 148 Blok A2/18 Jakarta Timur
Pendidikan Terakhir 1. Jurusan Teknik Geologi ITB (Institut Teknologi Bandung)
2. Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung
Jabatan : Sekretaris Badan Pengurus Nasional PBHI 2007–2010 dan 2010–2013
Pekerjaan lainnya : Penulis Lepas/ Kolomnis dan Peneliti
Email : suryadi.radjab@gmail.com/ suradjab@yahoo.com

Pengalaman Organisasi

- 1 Departemen Litbang Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG) “GEA” ITB (1984–1985)
- 2 Pjs. Ketua PERSPEK (Persatuan Studi dan Pengembangan Kemasyarakatan) Unpad (1984–1985)
- 3 Koordinator Kelompok Diskusi Sabtu ITB (1984–1986)
- 4 Ketua Yayasan FRESSA (Free School for Socioanalysis) 1987–1992
- 5 Pekerja LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandung (1988–2000)
- 6 Pendiri PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) pada 5 November 1996
- 7 Pendiri PBHI Jawa Barat pada 14 Februari 1999
- 8 Sekretaris Badan Pengurus PBHI Jawa Barat 1999–2001
- 9 Ketua Badan Pengurus PBHI Jawa Barat 2001–2004 dan 2004–2007
- 10 Pendiri Setara Institute for Democracy and Peace (2005)
- 11 Ketua SC Jaker Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Pengalaman Kerja

Advokasi sejumlah kasus pidana dan hak-hak manusia termasuk berdasarkan hasil investigasi.

Penulisan Buku

1. Menulis beberapa buku laporan hak asasi manusia YLBHI (1989–1993) dan menulis pada sejumlah media massa
2. Menulis bunga rampai tentang LBH yang berjudul LBH: Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi (1995)
3. Menulis beberapa buku
 - a. Gerakan Mahasiswa dan Pekerja (LBH Bandung, 1997)

- b. Praktik Culas Bisnis Gaya Orde Baru (Grasindo, 1999)
 - c. Filsafat Perubahan Sosial (LBH Bandung, 2000)
 - d. Ekonomi–Politik Kaum Buruh (LWG, 2001)
 - e. Indonesia: Hilangnya Rasa Aman (PBHI dan The Asia Foundation, 2002)
4. Turut menulis 5 buku penuntun hak asasi manusia (PBHI dan The Asia Foundation, 2002) bersama Yani Renata Uno, Eka Fitria, Tunjung Kordawati dan Kemadhipie MR Kuron
- a. Dasar–dasar Hak Asasi Manusia
 - b. Hukum Hak Asasi Manusia dan Humaniter Internasional
 - c. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pidana
 - d. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Pidana
 - e. Keadilan di Masa Transisi dan Impunitas

Menulis beberapa buku kecil lainnya bersama Hendardi untuk kebutuhan anggota PBHI Jabar (2005)

Pernah menjadi penanggungjawab, pelaksana, narasumber maupun peserta sejumlah seminar, fasilitator workshop dan pelatihan tentang hak–hak manusia

Pengalaman Lainnya

- 1 Penanggungjawab dan Moderator Seminar Kejahatan terhadap Kemanusiaan (1999)
- 2 Penanggungjawab dan Narasumber Pelatihan Pencarian Fakta (1999)
- 3 Penanggungjawab dan Narasumber Lokakarya Investigasi (1999)
- 4 Pelaksana Investigasi Kasus Lingkungan di Cimahi (1999)
- 5 Pelaksana Monitoring Situasi Hak Asasi Manusia PBHI (1999)
- 6 Koordinator Pertemuan Cilember untuk anggota PBHI Jabar dan DKI Jakarta (2000)
- 7 Penanggungjawab Program Magang PBHI Jabar (2000)
- 8 Penanggungjawab Investigasi Pelanggaran Hak–hak Tersangka (2000)
- 9 Pelaksana Pameran Foto dan Pemutaran Video Kasus HAM (2000)
- 10 Koordinator Pawai Hari Hak Asasi Manusia: Menentang Impunitas (2000)
- 11 Narasumber Diskusi Hak–hak Ekosob PBHI Jakarta (2001)
- 12 Peserta Workshop tentang Pemantauan dan Investigasi Kasus Penyiksaan PBHI Jakarta (2001)
- 13 Narasumber Pelatihan tentang Penyiksaan PBHI Jakarta (2001)
- 14 Penanggungjawab Rapat Kerja Wilayah PBHI Jawa Barat (2001)
- 15 Penanggungjawab Workshop Penyusunan Modul dan Kurikulum Pelatihan Monitoring CEDAW (2002)
- 16 Narasumber Diskusi Buku Laporan HaM PBHI (2002)

- 17 Penanggungjawab dan Moderator Diskusi Panel RUU Anti Terorisme (2002)
- 18 Narasumber Seminar Hak Manusia di Garut (2002)
- 19 Penyusun Laporan Situasi Hak-hak Manusia di Indonesia (PBHI, 2002)
- 20 Penanggungjawab Workshop Perencanaan Strategis (2003)
- 21 Penanggungjawan Seminar Hak Cipta (2003)
- 22 Narasumber Diskusi Publik tentang RUU TNI (2003)
- 23 Penanggungjawab Diskusi Trafiking Anak dan Perempuan (2003)
- 24 Penyusun Laporan Situasi Hak-hak Manusia di Indonesia (PBHI, 2003)
- 25 Penanggungjawab Seminar Hak Manusia dan Polisi (2004)
- 26 Penanggungjawab Survei Anggota PBHI Jawa Barat (2004)
- 27 Lokakarya Pemetaan Potensi dan Kapasitas Pemantauan CEDAW (2004)
- 28 Fasilitator Pelatihan HaM untuk Anggota PBHI Yogyakarta (2004)
- 29 Penanggungjawab dan Narasumber Diskusi Publik Problematika Kebebasan Berekspresi dan Solusinya (2004)
- 30 Penanggungjawab Diskusi Publik Evaluasi Darurat Militer dan Sipil di Aceh (2004)
- 31 Penanggungjawab Kegiatan Darurat Kemanusiaan untuk Aceh (2004–2005)
- 32 Peserta Rapat Kerja Prepcom CEDAW (2005)
- 33 Koordinator Dengan Pendapat dengan DPRD Jabar tentang UU No. 9/1998 (2005)
- 34 Fasilitator Penyusunan Modul Pendidikan PBHI (2005)
- 35 Narasumber Pelatihan HaM untuk Anggota PBHI Jateng (2005)
- 36 Peneliti Program Bantuan Hukum (2005)
- 37 Narasumber Pelatihan Investigasi PBHI (2005)
- 38 Peserta Workshop Impunitas PBHI–HOM (2006)
- 39 Penanggungjawab Kegiatan Darurat Kemanusiaan untuk Yogyakarta (2006)
- 40 Narasumber Pelatihan HaM untuk Guru dan Komunitas HaM PBHI Yogyakarta (2006)
- 41 Penanggungjawab dan Narasumber Pelatihan HaM untuk Anggota (2006)
- 42 Penanggungjawab Workshop Penyusunan Rencana Pemantauan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (2006)
- 43 Penanggungjawab Workshop Penyusunan Rencana Pemantauan dan Advokasi Hak-hak Tersangka dan Terdakwa (2006)
- 44 Penanggungjawab Program Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (2006–2007)
- 45 Penanggungjawab Kegiatan Darurat Kemanusiaan untuk Jabar dan DKI (2007)
- 46 Peserta Diskusi Pelatihan HURIDOCS Komnas HAM (2007)
- 47 Peserta FGD RUU Rahasia Negara Komnas HAM (2007)

- 48 Fasilitator Workshop Penyusunan Instrumen Pemantauan CEDAW (2008)
- 49 Tim Penyusun Laporan Monitoring Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (2009)
- 50 Tim Penyusun Laporan Monitoring Pembunuhan di Luar Proses Hukum (2009–2010)
- 51 Tim Penyusun Laporan Monitoring HaM dalam Otonomi Daerah (2010)
- 52 Tim Penyusun Laporan Monitoring Hak-hak Tersangka (2011–2012)

Identitas Pribadi

Nama : Imas Didah Deliah, SS,
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 15 April 1980
E-mail : nimazdee@gmail.com

Pendidikan:

1993 : Lulus dari SDN Sukasirna Bayongbong Garut
1996 : Lulus dari Madrasah Tsanawiyah Al-Wasiilah (MTs) Garut
1999 : Lulus dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Garut
2005 : Lulus dari Jurusan Sastra Inggris - Institute Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Pengalaman Organisasi:

2000 - Hadir Sastra dan Seni Komunitas IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
2005 - Hadir Anggota PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia) Jawa Barat

Pengalaman Profesional:

1. Administrasi dan Keuangan Staf PBHI Jawa Barat, 2005 – 2006;
2. Berita Reporter dari detik.com Jakarta, dalam "Pelatihan Investigasi" program, PBHI bekerja sama dengan Mass Media Jakarta, 2006;
3. Administrasi dan Keuangan Staf Proyek "Peningkatan Kapasitas Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan"; PBHI Jawa Barat bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika – Bagian Public Affair, 2006;;
4. Tim penerjemah Proyek Tandem, PBHI Jawa Barat bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika – Bagian Public Affair, 2006;;
5. Penerjemah Laporan Akhir Proyek "Peningkatan Kapasitas Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan"; PBHI Jawa Barat & SAHaRHA bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika – Bagian Public Affair, 2006;
6. Penerjemah Semester Laporan Proyek "Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan"; Jaringan Kerja Pemantauan Dan Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (PAKB2) bekerja sama dengan NZAID, 2007;
7. Koordinator Pemantauan Kecamatan "Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008"; Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bandung, April 2008;
8. Monitor: Proyek Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan "; Jaringan Kerja Pemantauan Dan Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (Jaker PAKB2) bekerja sama dengan NZAID, 2007–2009;
9. Kontributor Berita Deport (Desantara Report) Dalam Isu Minoritas, Desantara Foundation, 2009;
10. Pemantauan Officer Project "Tersangka dan Terdakwa Hak"; PBHI bekerja sama dengan Open Society Foundation, 2011 – 2012;

Lokakarya, Pelatihan, dan Diskusi:

1. Peserta, Diskusi Publik "Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka UMUM sebagai Hak Politik Warga Negara Indonesia"; PBHI Jawa Barat, 2005;
2. Peserta, Lobby Mendengar DPRD DI I Propinsi Jawa Barat "Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka UMUM sebagai Hak Politik Warga Negara Indonesia"; PBHI Jawa Barat, 2005;
3. Peserta, Pelatihan "Advokasi HAM Litigasi & Non Litigasi"; PBHI Jawa Tengah, 2005;
4. Peserta, Pelatihan "Investigasi Hak Asasi Manusia", PBHI Pusat, 2006;
5. Peserta, Pelatihan dan Lokakarya "Hak-Hak Manusia untuk Anggota Dan Calon Anggota"; PBHI Jawa Barat, 2006;
6. Peserta, Pelatihan "Penyusunan Proposal Dan Administrasi Keuangan", PBHI, 2006;
7. Peserta, Lokakarya "Pembentukan Jaringan Monitoring dan Program Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan"; Snakes & SAHaRHA Jawa Barat, 2007;
8. Peserta, Lokakarya "Modul PELATIHAN Dan Instrumen Pemantauan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan"; PBHI Jawa Barat & SAHaRHA, 2007;
9. Peserta, Lokakarya "Perlindungan Hak Asasi Manusia * Bagi Defender", Imparsial, 2007;
10. Peserta, Lobby Mendengar PBB Perwakilan "Perlindungan Hak Asasi Manusia * Bagi Defender", Imparsial, HRWG, dan Komnas Perempuan, 2007;
11. Peserta, Pelatihan "Pengawasan Dan Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Jaker PAKB2 bekerja sama dengan NZAID, 2007;
12. Peserta, Focus Group Discussion (FGD) "Penyusunan Draft Instrumen Pemantauan CEDAW" (Pembangunan Kapasitas untuk Proyek Pemantauan Pelaksanaan CEDAW), PBHI Jawa Barat bekerja sama dengan Yayasan TIFA, 2008;
13. Peserta, Workshop "Penyusunan Instrumen Pemantauan CEDAW" (Pembangunan Kapasitas untuk Proyek Pemantauan Pelaksanaan CEDAW), PBHI Jawa Barat bekerja sama dengan Yayasan TIFA, 2008;
14. Peserta, Lokakarya "Instrumen Pemantauan Tersangka dan Terdakwa Hak"; PBHI bekerja sama dengan Open Society Foundation, 2011;
15. Peserta, Pelatihan Pemantauan Tersangka dan Terdakwa Hak, PBHI bekerja sama dengan Open Society Foundation, 2011;

Tulisan :

1. Penulis Tim: Instrumen Pemantauan Implementasi CEDAW: Tax Pendidikan Dan Kesehatan, PBHI Jawa Barat bekerja sama dengan Yayasan TIFA, Juni 2008;
2. Penulis Tim: Laporan Pelanggaran pada Tersangka dan Terdakwa Hak: Hentikan Praktik Sewenang-Wenang Dan Kejam, PBHI Nasional bekerja sama dengan Open Society Institute, Desember 2012.

Identitas Pribadi

Nama : Unung Nuralamsyah
Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka, 26 Juni 1979
Email : unung.nuralamsyah@lbhbandung.org
unung.nuralamsyah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Munjul Lama Majalengka
2. SMPN 3 Majalengka
3. MA Darul Falah Majalengka
4. S-1 Fak. Hukum dan Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Majalengka
Ketua Lembaga Sastra dan Budaya
2. Teater Awal UIN SGD Bandung

Pengalaman Kerja

1. Iqbal Abieza Mahardika Foundation (1999 - 2003)
 - Anggota Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
 - Koordinator Jaringan Becak Bandung (JBB)
 - Koordinator Penelitian
2. Lembaga Penelitian dan Analisis Sosial (1999 - 2000)
 - Staf Peneliti
3. Lembaga Pemberdayaan Kepada Masyarakat (LPKM) UNPAR (1999 - 2002)
 - Fasilitator Eliminasi Pekerja Anak Cibaduyut
 - Fasilitator Koperasi Dampingan LPKM UNPAR
 - Anggota Peneliti
4. Forum Pemberdayaan Masyarakat Bandung (FPMB) (2000 - 2001)
 - Koordinator Pemberdayaan
5. Gerakan Anti Hutang (GERAH) Jawa Barat (2000 - 2001)
 - Koordinator Region Kabupaten Majalengka
 - Staf Peneliti
6. Saresehan Warga Bandung (SAWARUNG) (1999 - 2002)
 - Koordinator Program Enclave Kesehatan
 - Koordinator Peneliti Kesehatan
7. Koalisi Untuk Jawa Barat Sehat (KUJBS) (2000 - 2001)
 - Koordinator Advokasi

- Koordinator Peneliti
8. Lembaga Bantuan Hukum Bandung (2004 - Sekarang)
 - Wakil Direktur
 9. Jaringan Kerja Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Jaker PAKB2) (2007 - 2009)
 - Advocacy Officer

Pelatihan, Seminar Dan Workshop

1. Peserta Pelatihan Fasilitator Pekerja Anak Sektor Sepatu Cibaduyut Kerjasama ILO - LPKM UNPAR
2. Peserta Fasilitator Koperasi Dampingan LPKM UNPAR
3. Peserta Training of Trainer Koperasi Dampingan UNPAR
4. Peserta Pelatihan Hak Asasi Manusia (Yayasan Tifa)
5. Peserta Pelatihan P-Process (YLKI)
6. Fasilitator Pelatihan Penelitian Kesehatan di Kota Bandung (KUJBS - KUIS)
7. Fasilitator Analisa Utang Luar Negeri (GERAH JABAR)
8. Fasilitator Pelatihan Koperasi Bagi Masyarakat Miskin Kota (LPKM UNPAR)
9. Fasilitator Pelatihan Paralegal (Yayasan Tifa - LBH Bandung)
10. Narasumber Seminar Pendidikan Hukum (HIMMAKA)
11. Peserta Pelatihan Analisis Dispute Resolution (Yayasan Tifa)
12. Fasilitator Analisa Anggaran Daerah (FITRA)

Penelitian-Penelitian

1. Penelitian Dinamika Konflik di Jawa Barat (KESBANG JABAR - LPKM UNPAR)
2. Penelitian PKPS BBM (Menkokesra - LPKM UNPAR)
3. Penelitian Aksesibilitas Masyarakat Atas Kesehatan di Kota Bandung (SAWARUNG)
4. Penelitian Program Pengembangan Kecamatan (INFID - GERAH JABAR)



CENTER FOR LAW AND ORDER STUDIES

Center for Law and Order Studies didirikan pada tahun 1995, oleh sejumlah Pengajar dari Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila, Pengacara, dan Sarjana Hukum yang bekerja di swasta.

Lembaga ini didirikan dengan maksud mengkaji permasalahan-permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan:

1. Melaksanakan studi, kajian dan riset di bidang keamanan dan penegakan hukum.
2. Memberikan masukan bagi upaya-upaya meningkatkan keamanan masyarakat dan pembangunan hukum pada umumnya.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan guna memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mengembangkan komunikasi dalam bentuk publikasi dan kesadaran hukum masyarakat untuk meningkatkan ketahanan sosial dan budaya.



SAKTI (Serikat Kerakyatan Indonesia) merupakan Organisasi Massa konstituen dengan etos kerakyatan dan moralitas perjuangan. Aktivitas pergerakannya diarahkan guna meningkatkan efektivitas parlementer serta wahana partisipasi politik rakyat (secara langsung) untuk mendesak tuntutan-tuntutan sosial-politik, dengan mengedepankan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar.

Ruang lingkup aktivitas gerakannya:

1. Kontrol sosial-politik konstituen terhadap pelaksanaan trifungsi parlemen: legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Pengorganisasian dan pelebagaan aspirasi politik rakyat dalam rangka perwujudan demokrasi partisipatoris.
3. Kontrol rakyat dalam penegakan akuntabilitas demokratik.

Indonesia adalah negeri penghasil tembakau dan penghasil cengkeh sekaligus. Dari pengolahan dan racikan tembakau dan cengkeh inilah yang melahirkan ‘rokok cengkeh’, lebih dikenal dengan sebutan *kretek*. Identitas ini melekat pada Kudus sebagai “kota kretek” dan salah seorang pembentuk industri ini, Haji Nitisemito, dikenang sebagai “raja kretek”. Identitas ini sekaligus menandakan pentingnya kedudukan industri pengolahan tembakau dan cengkeh dalam ekonomi di Indonesia, dari sebelum terbentuknya Republik Indonesia sampai sekarang. Identitas ini pula yang melekatkan *kretek* dengan Indonesia, sebagaimana halnya cerutu dengan Kuba, atau sepakbola dengan Inggris atau Brazil. Karena, *kretek* tidak dibuat di AS atau Eropa.

Industri rokok *kretek* mengalami perjalanan yang panjang, lebih 120 tahun. Setelah melewati berbagai kesulitan, bahkan nyaris hancur berkeping-keping dalam periode singkat gelombang pasang fasisme-militerisme Jepang, industri *kretek* mampu bangkit kembali dan selama dua dekade terakhir mengecap masa keemasannya. Namun, lagi-lagi, kini industri *kretek* dihadapkan tantangan global dalam bentuk hambatan-hambatan perdagangan – dengan menampilkan sosok dalam bentuk regim kesehatan dunia – bahkan berikade-berikade perdagangan yang dibentuk di negerinya sendiri.

